



# BPHN

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL



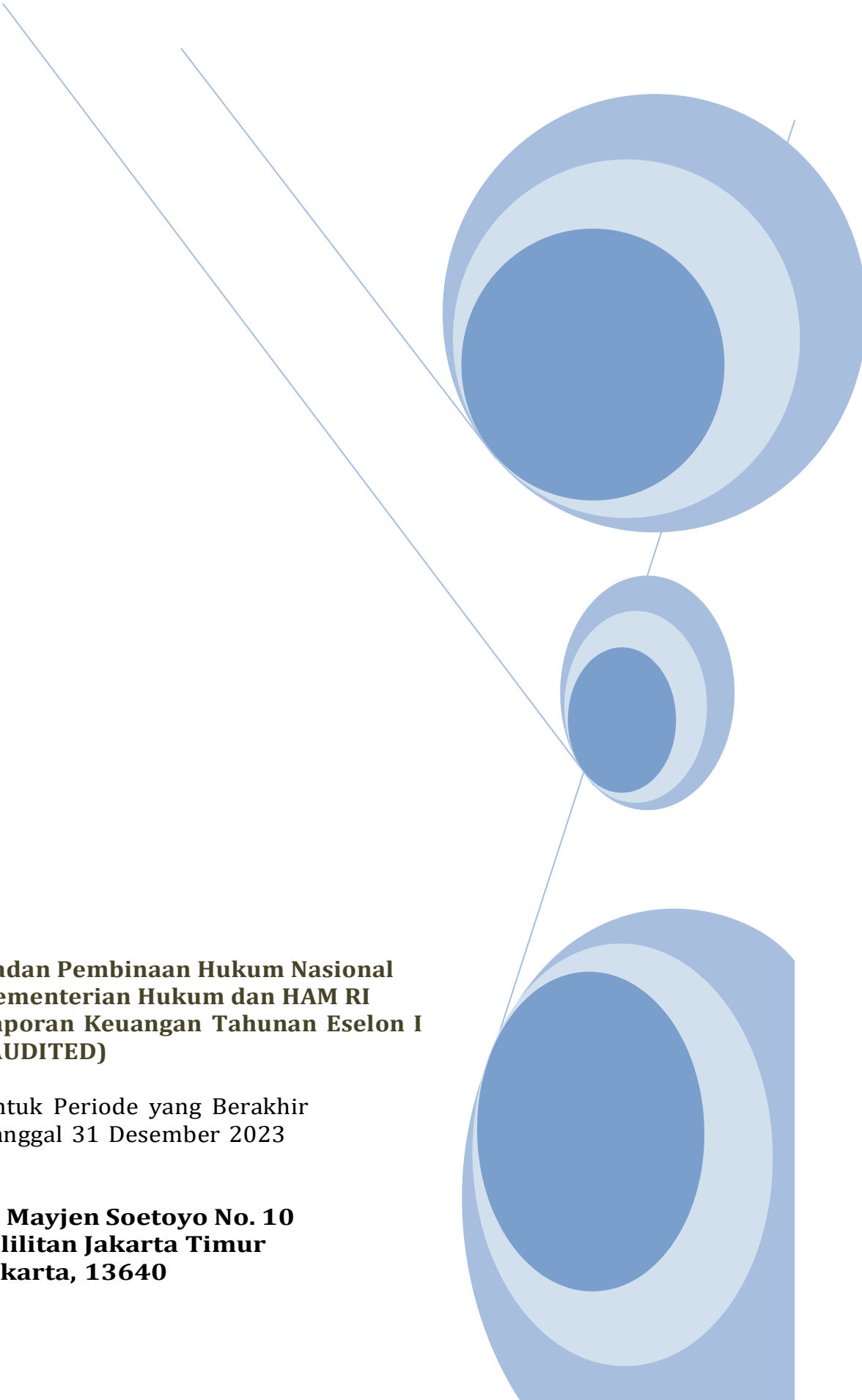
# 2023

## LAPORAN KEUANGAN BPHN ESELON I TAHUNAN (*AUDITED*)



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

JL. MAYJEND SUTOYO NO 10 JAKARTA TIMUR 13640



**Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kementerian Hukum dan HAM RI  
Laporan Keuangan Tahunan Eselon I  
(AUDITED)**

Untuk Periode yang Berakhir  
Tanggal 31 Desember 2023

**Jl. Mayjen Soetoyo No. 10  
Cililitan Jakarta Timur  
Jakarta, 13640**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 14 Juni 2024

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Chandrajagati secara elektronik oleh :

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum  
NIP. 19710501 199303 1 001



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	25
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	61
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	84
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	94
F. Pengungkapan Penting Lainnya	102
VI. Lampiran dan Daftar	

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 (AUDITED) sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 14 Juni 2024  
Kepala,



Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum  
NIP. 19710501 199303 1 001

Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional periode 31 Desember 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp89.025.700 atau mencapai 445 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp20.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp120.388.945.868 atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp121.586.486.000.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp399.790.313.816 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp239.929.556; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp398.911.010.607; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp639.373.653.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp715.176.761 dan Rp399.075.137.055.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk

periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.324.589, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp121.318.073.430 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp121.304.748.841). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp57.511.700 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp121.247.237.141).

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp400.237.667.014 ditambah Defisit-LO sebesar (Rp121.247.237.141) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai (Rp55.740.920) dan transaksi antar entitas senilai Rp120.140.448.102 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp399.075.137.055.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	20.000.000	89.025.700	445	71.416.520
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>20.000.000</b>	<b>89.025.700</b>	<b>445</b>	<b>71.416.520</b>
<b>BELANJA</b>					
<b>Belanja Operasi</b>					
Belanja Pegawai	B.2	17.002.977.000	16.789.330.933	99	16.897.721.259
Belanja Barang	B.3	99.582.869.000	98.630.804.748	99	67.991.580.417
Belanja Modal	B.4	5.000.640.000	4.968.810.187	99	2.762.287.230
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>121.586.486.000</b>	<b>120.388.945.868</b>	<b>99</b>	<b>87.651.588.906</b>

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3		
Piutang Bukan Pajak	C.4	59.148.730	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.5	(295.744)	98.063.299
Persediaan	C.6	181.076.570	-
Jumlah Aset Lancar		239.929.556	98.063.299
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.7	356.165.357.000	356.165.357.000
Peralatan dan Mesin	C.8	26.605.556.857	24.758.430.869
Gedung dan Bangunan	C.9	62.954.462.581	59.683.830.714
Aset Tetap Lainnya	C.10	1.123.767.442	1.088.776.559
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.11	(47.938.133.273)	(41.440.019.747)
Jumlah Aset Tetap		398.911.010.607	400.256.375.395
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	C.12	4.234.323.660	4.184.325.500
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.13	589.375.493	-
Aset Lain-Lain	C.14	430.984.260	853.242.316
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.15	(4.615.309.760)	(5.037.567.816)
Jumlah Aset Lainnya		639.373.653	-
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>399.790.313.816</b>	<b>400.354.438.694</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.16	687.628.955	107.413.285
Utang yang Belum Ditagihkan	C.17	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.18	27.547.806	9.358.395
Uang Muka dari KPPN	C.19	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.20	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		715.176.761	116.771.680
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>715.176.761</b>	<b>116.771.680</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.21	399.075.137.055	400.237.667.014
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>399.075.137.055</b>	<b>400.237.667.014</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>399.790.313.816</b>	<b>400.354.438.694</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

### III. LAPORAN OPERASIONAL

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	13.324.589	12.512.140
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>13.324.589</b>	<b>12.512.140</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	16.789.330.933	16.897.721.259
Beban Persediaan	D.3	676.771.180	618.639.650
Beban Barang dan Jasa	D.4	72.314.832.432	49.519.821.979
Beban Pemeliharaan	D.5	3.555.957.901	3.354.965.899
Beban Perjalanan Dinas	D.6	21.979.001.766	14.636.050.265
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	6.001.883.474	5.855.601.849
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	295.744	0
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>121.318.073.430</b>	<b>90.882.800.901</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
		(121.304.748.841)	(90.870.288.761)
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
	D.9		
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar		26.763.500	50.001.111
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		26.763.500	50.001.111
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		30.748.200	17.250.409
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		30.748.200	17.250.409
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>57.511.700</b>	<b>67.251.520</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>			
		(121.247.237.141)	(90.803.037.241)
<b>POS LUAR BIASA</b>			
	D.10		
Pendapatan PNBPN		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(121.247.237.141)</b>	<b>(90.803.037.241)</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2023	2022
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	400.237.667.014	403.693.026.368
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(121.247.237.141)	<b>(90.803.037.241)</b>
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(55.740.920)	(49.538.524)
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.4.3	0	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.4	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.5	(55.740.920)	(49.538.524)
LAIN-LAIN	E.5	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.6	120.140.448.102	87.397.216.411
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.7	(1.162.529.959)	(3.455.359.354)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.8	<b>399.075.137.055</b>	<b>400.237.667.014</b>

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pembinaan Hukum Nasional

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

#### **RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, BPHN mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, BPHN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pembinaan hukum nasional, pemantauan dan peninjauan undang-undang, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyuluhan dan bantuan hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, serta pembinaan penyuluh hukum dan analisis hukum;
2. Pelaksanaan perencanaan peraturan perundang-undangan, pemantauan dan peninjauan undang-undang, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyuluhan dan bantuan hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, serta pembinaan penyuluh hukum dan analisis hukum;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan peraturan perundang-undangan, pemantauan dan peninjauan undang-undang, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyuluhan dan bantuan hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, serta pembinaan penyuluh hukum dan analisis hukum;

4. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai 8 (delapan) sasaran strategis yang menjadi arah bagi pencapaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni:

1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;
3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
7. Meningkatkan kompetensi strategis SDM di bidang hukum dan HAM;
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif, dan efisien.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai potensi yang dapat menjadi pendorong untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sejalan dengan potensi tersebut, Kementerian Hukum dan HAM juga mempunyai permasalahan yang harus dicermati sehingga tidak mengganggu upaya kementerian dalam menjamin manfaat program di bidang Hukum dan HAM yang dirasakan oleh masyarakat. Potensi dan permasalahan tersebut dikelompokkan dalam 5 (lima) bidang, yaitu Pembentukan dan Penataan Regulasi; Pelayanan Publik di

Bidang Hukum; Penegakan Hukum; Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pemajuan HAM; dan tata kelola pemerintahan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya BPHN memiliki 5 (lima) unit Eselon II, yaitu:

1. Sekretarian Badan;
2. Pusat Perencanaan Hukum Nasional
3. Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum;
4. Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional;
5. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional.



A. Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

B. Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:

Kementerian Hukum dan HAM memiliki misi sebagai tindak lanjut atas visi yang telah ditetapkan oleh Presiden, adapun misi Kementerian Hukum dan HAM dalam menunjang visi Presiden dijabarkan dalam 7 (tujuh) hal yaitu:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakat yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakat; dan
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan 31 Desember 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional periode 31 Desember 2023 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Badan Pembinaan Hukum Nasional yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah entitas akuntansi di lingkup Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah 34 entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

### *+Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-E1*

NO	KODE Es. I	KODE WILAYAH	KODE SATKER	ENTITAS	JUMLAH/JENIS KEWENANGAN		JUMLAH SATKER
					KP	KD	
1	10	0199	409288	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	1	-	1
2	10	0100	408727	KANWIL DKI JAKARTA	-	1	1
3	10	0200	408737	KANWIL JAWA BARAT	-	1	1
4	10	0300	408749	KANWIL JAWA TENGAH	-	1	1
5	10	0400	409187	KANWIL DI YOGYAKARTA	-	1	1
6	10	0500	408759	KANWIL JAWA TIMUR	-	1	1
7	10	0600	408789	KANWIL ACEH	-	1	1
8	10	0700	408769	KANWIL SUMATERA UTARA	-	1	1
9	10	0800	408799	KANWIL SUMATERA BARAT	-	1	1
10	10	0900	408809	KANWIL RIAU	-	1	1
11	10	1000	409166	KANWIL JAMBI	-	1	1
12	10	1100	408819	KANWIL SUMATERA SELATAN	-	1	1
13	10	1200	408829	KANWIL LAMPUNG	-	1	1



NO	KODE Es. I	KODE WILAYAH	KODE SATKER	ENTITAS	JUMLAH/JENIS KEWENANGAN		JUMLAH SATKER
					KP	KD	
14	10	1300	408839	KANWIL KALIMANTAN BARAT	-	1	1
15	10	1400	409197	KANWIL KALIMANTAN TENGAH	-	1	1
16	10	1500	408848	KANWIL KALIMANTAN SELATAN	-	1	1
17	10	1600	408859	KANWIL KALIMANTAN TIMUR	-	1	1
18	10	1700	408869	KANWIL SULAWESI UTARA	-	1	1
19	10	1800	409217	KANWIL SULAWESI TENGAH	-	1	1
20	10	1900	408779	KANWIL SULAWESI SELATAN	-	1	1
21	10	2000	409207	KANWIL SULAWESI TENGGARA	-	1	1
22	10	2100	408899	KANWIL MALUKU	-	1	1
23	10	2200	408879	KANWIL BALI	-	1	1
24	10	2300	409227	KANWIL NUSA TENGGARA BARAT	-	1	1
25	10	2400	408889	KANWIL NUSA TENGGARA TIMUR	-	1	1
26	10	2500	408909	KANWIL PAPUA	-	1	1
27	10	2600	409177	KANWIL BENGKULU	-	1	1
28	10	2800	649029	KANWIL MALUKU UTARA	-	1	1
29	10	2900	648996	KANWIL BANTEN	-	1	1
30	10	3000	649008	KANWIL BANGKA BELITUNG	-	1	1
31	10	3100	649017	KANWIL GORONTALO	-	1	1
32	10	3200	667789	KANWIL KEPULAUAN RIAU	-	1	1
33	10	3300	667779	KANWIL PAPUA BARAT	-	1	1
34	10	3400	667799	KANWIL SULAWESI BARAT	-	1	1
<b>JUMLAH</b>					<b>1</b>	<b>33</b>	<b>34</b>

*Basis*

*Akuntansi*

### **A.3. Basis Akuntansi**

Badan Pembinaan Hukum Nasional menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah

basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

*Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

*Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan 31 Desember 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-31/PB/PB.6/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2023 (*Unaudited*). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan

menggunakan standar akuntansi dan peraturan-peraturan yang berlaku dari Kementerian Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

**(1) Pendapatan-LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO*

**(2) Pendapatan-LO**

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

**(4) Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa

kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

### *Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang Jangka Panjang*

#### **d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

*Aset Lainnya*

#### **e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan



berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*

**(7) Kewajiban**

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek  
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(8) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## **B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, Badan Pembinaan Hukum Nasional telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Pada Tahun 2023 Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja mendapat Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp1.694.866.000 sehingga menambah Anggaran DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional. Rincian Anggaran Belanja Tambahan (ABT) adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja Tambahan TA 2023 sebesar Rp1.557.108.000 berupa Belanja Barang dalam rangka Pelaksanaan JDIHN dan Legal Development Content Creator (LDCC) Awards Tahun 2023;
2. Anggaran Belanja Tambahan TA 2023 sebesar Rp137.758.000 berupa Belanja Barang dalam rangka Supervisi Tindak Lanjut Penelitian Pagu Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah TA 2024.

Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tersebut sesuai dengan dokumen sebagai berikut :

1. Surat Plt. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-79 tanggal 23 Agustus 2023 perihal Penyampaian Data Dukung Revisi DIPA Anggaran Belanja Tambahan (ABT) TA 2023;
2. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK-KU.01.02-203 tanggal 01 September 2023 Perihal Usulan Revisi Anggaran;
3. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK-KU.01.02-204 tanggal 01 September 2023 Perihal Persetujuan Revisi Anggaran;
4. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK-KU.01.02-206 tanggal 01 September 2023 Perihal Penetapan Perubahan Rencana Kerja (RKA) atas Revisi Anggaran;

5. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-424/AG/AG.5/2023 tanggal 07 September 2023 perihal Pengesahan Usulan Revisi Pergeseran Anggaran Antar Unit Setjen Kemenkumham TA 2023.

Pada Tahun 2023 Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional juga melakukan pergeseran belanja pegawai (51) ke Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp550.000.000 sesuai dengan dokumen sebagai berikut :

1. Surat Plt. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.01-507 Tanggal 25 Agustus 2023 Perihal Inventarisasi Perkiraan Kelebihan Belanja Pegawai BPHN TA 2023;
2. Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-KU.01.02-04 Tanggal 03 Oktober 2023 Perihal Usulan Revisi Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023;
3. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-KU.01.02-225 Tanggal 10 Oktober 2023 Perihal Usulan Revisi Anggaran;
4. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-KU.01.02-226 tanggal 10 Oktober 2023 Perihal Persetujuan Revisi Anggaran;
5. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hask Asasi Manusia Nomor SEK-KU.01.02-228 Tanggal 10 Oktober 2023 Perihal Penetapan Perubahan Rencana Kerja (RKA) atas Revisi Anggaran;
6. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-518/AG/AG.5/2023 Tanggal 13 Oktober 2023 Perihal Pengesahan Usulan Revisi Anggaran Pergeseran Anggaran Antar Unit Kemenkumham TA 2023.

Perubahan anggaran tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	20.000.000	20.000.000
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Iuran dan Denda	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	17.552.977.000	17.002.977.000
Belanja Barang	95.022.855.000	99.582.869.000
Belanja Modal	7.865.788.000	5.000.640.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>120.441.620.000</b>	<b>121.586.486.000</b>

Sedangkan apabila dilihat dari Kegiatan Badan Pembinaan Hukum Nasional maka perubahannya adalah sebagai berikut:

KEGIATAN	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendokumentasian Data Hukum dan Peningkatan Integrasi Jaringan Informasi Hukum Nasional	1.702.291.000	1.452.291.000
Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	2.737.390.000	2.737.390.000
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	2.770.352.000	3.020.352.000
Perencanaan Hukum Nasional	1.597.799.000	1.597.799.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	38.933.593.000	40.078.459.000
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	67.961.087.000	67.961.087.000
Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan evaluasi Produk Hukum di Wilayah	4.739.108.000	4.739.108.000
<b>Total Belanja</b>	<b>120.441.620.000</b>	<b>121.586.486.000</b>

Pada tahun 2023 ini Badan Pembinaan Hukum Nasional melakukan realokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, anggaran semula sebesar Rp360.645.000 menjadi sebesar Rp31.386.000. Rincian realokasi anggaran

tersebut adalah sebagai berikut:

Akun	URAIAN	2023	
		ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	66.740.000	30.268.000
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	17.500.000	0
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	276.405.000	1.118.000
<b>Total Belanja</b>		<b>360.645.000</b>	<b>31.386.000</b>

Berdasarkan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal Penggunaan Akun Khusus COVID-19, akun khusus COVID-19 hanya digunakan sampai dengan Semester I Tahun 2023 dan tidak lagi menggunakan akun belanja khusus COVID-19 mulai Semester II Tahun 2023. Pada periode Semester II Tahun 2023, masih terdapat sisa anggaran akun belanja khusus COVID-19 pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara dan realisasi belanja khusus COVID-19 pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional. Rincian sisa anggaran Belanja COVID-19 tersebut adalah sebagai berikut :

KODE SATKER	NAMA SATKER	Kode Akun	URAIAN	Sisa Anggaran	Keterangan
409207	Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara	522192	Belanja Jasa - Penangan Pandemi COVID-19	396.000	Biaya Rapid Test/Swab PCR
409288	BPHN	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	65.427	Sewa langganan aplikasi Zoom
		522192	Belanja Jasa - Penangan Pandemi COVID-19	317.000	Biaya Rapid Test/Swab PCR
<b>J U M L A H</b>				<b>778.427</b>	

Terhadap sisa anggaran tersebut sudah dilakukan revisi tetapi sisa anggarannya terlalu kecil sehingga secara satuan tidak dapat memenuhi kebutuhan sedangkan untuk realisasi pada semester II, tidak dilakukan ralat karena dikhawatirkan akan menurunkan Nilai IKPA Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2023 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional PN VII Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Pelaksanaannya melalui satu Program prioritas, yaitu program Bantuan Hukum melalui Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi dan Bantuan Hukum Non Litigasi, yang tersebar di 33 Satuan Kerja dengan Pagu mencapai Rp56.365.320.000 dan realisasi sebesar Rp55.922.687.179 atau 99,21%. Rincian program Kegiatan Prioritas Nasional Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi untuk masing-masing satuan kerja disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan ini (terlampir).

*Realisasi  
Pendapatan.  
Rp89.025.700*

#### **B.1 PENDAPATAN**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp89.025.700 atau mencapai 445,13 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan. Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat realisasi pendapatan berupa :

1. Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin berupa lelang kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp26.763.500 sesuai surat risalah lelang nomor 602/28/2023 tanggal 14 November 2023;
2. Pendapatan sewa tanah, Gedung dan bangunan sebesar Rp31.514.000. Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan yang bersifat rutin pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah berupa pendapatan sewa kantin yang dibayarkan setiap 2 tahun sekali. Pendapatan atas sewa kantin BPHN disetorkan pada tahun 2023 untuk jangka waktu 2 tahun sebesar Rp31.514.000 yang berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 30 September 2025 sesuai dengan surat perjanjian sewa atas tanah dan atau bangunan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.1-PB.03.01-34 tanggal 12 September 2023.

3. Pendapatan yang berasal dari penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp30.748.200 berupa pengembalian karena adanya temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 3 Kantor Wilayah, temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada 2 Kantor Wilayah serta pengembalian belanja bantuan hukum dikarenakan adanya penjatuhan sanksi terhadap LBH Kubi yang terdapat di Kantor Wilayah Bangka Belitung. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan  
Periode 31 Desember 2023*

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	26.763.500	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	20.000.000	31.514.000	157,57
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	30.748.200	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>20.000.000</b>	<b>89.025.700</b>	<b>445,13</b>

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 24,66 persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan karena adanya pendapatan berupa sewa kantin dan meningkatnya penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu yang disebabkan adanya pengembalian belanja barang karena adanya temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 pada 3 Kantor wilayah, temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada 2 Kantor Wilayah serta pengembalian belanja bantuan hukum dikarenakan adanya penjatuhan sanksi terhadap LBH KUBI yang terdapat di Kanwil Bangka Belitung.



*Perbandingan Realisasi Pendapatan*

*31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	26.763.500	50.001.111	(46,47)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	31.514.000	4.165.000	656,64
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	10.343.009	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	30.748.200	6.907.400	345,15
<b>Jumlah</b>	<b>89.025.700</b>	<b>71.416.520</b>	<b>24,66</b>

*Rincian Jenis Pendapatan berdasarkan*

*Satuan Kerja/ Wilayah*

URAIAN	SATUAN KERJA	REALISASI T.A. 2023
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	BPHN	26.763.500
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan bangunan		31.514.000
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	Kantor Wilayah Jawa Timur	189.200
	Kantor Wilayah Lampung	11.874.000
	Kantor Wilayah Kalimantan Tengah	4.740.000
	Kantor Wilayah Bangka Belitung	1.960.000
	Kantor Wilayah Bengkulu	11.835.000
	Kantor Wilayah Kalimantan Timur	150.000
<b>Jumlah</b>		<b>89.025.700</b>

Rincian realisasi pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin, pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan serta penerimaan kembali belanja barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar Rp89.025.700 adalah sebagai berikut :

1. Pada Kantor Wilayah Jawa Timur sebesar Rp189.200 berupa pengembalian biaya diluar tiket pesawat yang tidak bisa dibayarkan yaitu asuransi penumpang dan biaya pemilihan kursi sesuai NTPN 4D71B0N9VR09DSTG tanggal 16 Maret 2023;

2. Pada Kantor Wilayah Lampung sebesar Rp11.874.000 berupa pengembalian kelebihan belanja transport hasil temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2022 (rincian terlampir);
3. Pada Kantor Wilayah Kalimantan Tengah sebesar Rp4.740.000 berupa pengembalian kelebihan belanja perjalanan dinas tahun anggaran 2022 a.n. Mariani, Erna Sulistyowati dan Musa Ansari Rambe sesuai NTPN 4EAA355DEVP5RFQ3 tanggal 15 Februari 2023;
4. Pada Kantor Wilayah Kalimantan Timur sebesar Rp150.000 berupa pengembalian transport lokal karena adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas nama Santi Mediana Panjaitan Tahun Anggaran 2022 sesuai NTPN 2040D7QLUG4V0QJ2 tanggal 05 September 2023;
5. Pada Kantor Wilayah Bengkulu sebesar Rp11.835.000 berupa pengembalian selisih biaya penginapan perjalanan dinas luar kota sebesar Rp200.000 dan transportasi luar kota tidak sesuai ketentuan sebesar Rp11.635.000 karena adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran 2022 (rincian terlampir);
6. Pada Kantor Wilayah Bangka Belitung sebesar Rp1.960.000 berupa pengembalian belanja bantuan hukum tahun anggaran 2022 yang disebabkan karena adanya penjatuhan sanksi pada LBH KUBI dengan penerima bantuan hukum a.n. Siti Husnah sesuai NTPN C834C1JNFLROTBED tanggal 09 Juni 2023;
7. Pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional sebesar Rp58.277.500 berupa :
  - Pembayaran Sewa kantin sebesar Rp31.514.000 sesuai NTPN 8777A61QUQTMCOII tanggal 22 Agustus 2023;
  - Hasil Lelang kendaraan bermotor roda dua dalam kondisi rusak berat sebesar Rp26.763.500 sesuai risalah lelang nomor 602/28/2023 tanggal 14 November 2023 dan surat setoran NTPN C5EE948VV61M4LKE tanggal 15 November 2023.

## B.2. BELANJA

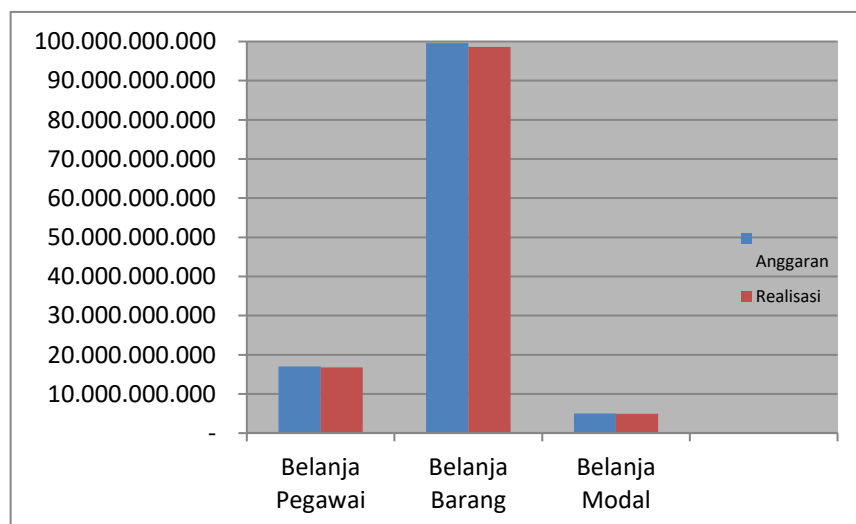
Realisasi Belanja pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp120.388.945.868 atau 99,02% dari anggaran belanja sebesar Rp121.586.486.000. Realisasi belanja Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Eselon I terdiri 34 Satuan Kerja yaitu BPHN selaku satuan kerja dan 33 Kantor Wilayah mencapai realisasi sebesar 99,02%. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

### *Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja*

*Periode 31 Desember 2023*

URAIAN	2023		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	17.002.977.000	16.791.428.384	98,76
Belanja Barang	99.582.869.000	98.690.481.786	99,10
Belanja Modal	5.000.640.000	4.968.810.187	99,36
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>121.586.486.000</b>	<b>120.450.720.357</b>	<b>99,07</b>
Pengembalian Belanja	-	(61.774.489)	<b>0</b>
<b>Total Belanja</b>	<b>121.586.486.000</b>	<b>120.388.945.868</b>	<b>99,02</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Belanja Berdasarkan Program*

*Periode 31 Desember 2023*

PROGRAM	2023	
	ANGGARAN	REALISASI
Pendokumentasian Data Hukum dan Peningkatan Integrasi Jaringan Informasi Hukum Nasional	1.452.291.000	1.448.801.168
Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	2.737.390.000	2.703.358.515
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	3.020.352.000	3.015.669.744
Perencanaan Hukum Nasional	1.597.799.000	1.585.807.553
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	40.078.459.000	39.592.022.758
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	67.961.087.000	67.388.244.888
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	4.739.108.000	4.655.041.242
<b>Total Belanja</b>	<b>121.586.486.000</b>	<b>120.388.945.868</b>

Dibandingkan dengan 31 Desember 2022, Realisasi Belanja periode 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 37,35% hal ini disebabkan karena adanya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga menambah anggaran dan belanja pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional.

*Perbandingan Realisasi Belanja*

*31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	16.789.330.933	16.897.721.259	(0,64)
Belanja Barang	98.630.804.748	67.991.580.417	45,06
Belanja Modal	4.968.810.187	2.762.287.230	79,88
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>120.388.945.868</b>	<b>87.651.588.906</b>	<b>37,35</b>

Badan Pembinaan Hukum Nasional mengalokasikan belanja untuk penanganan pandemi COVID-19 yang terdapat pada

Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja dan Kantor Wilayah sebesar Rp31.386.000. Anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp30.607.573 dengan rincian sebagai berikut :

*Rincian Belanja Penanganan Pandemi COVID-19  
Berdasarkan Akun Periode 31 Desember 2023*

<b>AKUN</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% REAL ANGG</b>
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	30.268.000	30.202.573	99,78
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	0,00
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	1.118.000	405.000	36,23
<b>Jumlah</b>		<b>31.386.000</b>	<b>30.607.573</b>	<b>97,52</b>

Realisasi Belanja Penanganan Pandemi COVID-19 TA. 2023 mengalami penurunan sebesar 94,62% dari TA 2022. Hal ini antara lain disebabkan karena anggaran belanja COVID-19 sudah tidak dapat digunakan sesuai dengan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal Penggunaan Akun Khusus COVID-19, akun khusus COVID-19 hanya digunakan sampai dengan Semester I Tahun 2023 dan tidak lagi menggunakan akun belanja khusus COVID-19 mulai Semester II Tahun 2023. Pada Semester II Tahun 2023, masih terdapat anggaran dan realisasi akun belanja khusus COVID-19.

*Perbandingan Belanja Barang-Penanganan Pandemi COVID-19  
Periode 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	30.202.573	210.201.381	(85,63)
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	39.737.900	(100,00)
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	24.728.329	(100,00)
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	405.000	294.171.262	(99,86)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>		<b>30.607.573</b>	<b>568.838.872</b>	<b>(94,62)</b>
<b>Pengembalian</b>		-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>30.607.573</b>	<b>568.838.872</b>	<b>(94,62)</b>

Sisa anggaran dan realisasi belanja khusus COVID-19 pada masing-masing satuan kerja adalah sebagai berikut:

KODE SATKER	NAMA SATKER	Kode Akun	URAIAN	Sisa Anggaran	Keterangan
409207	Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara	522192	Belanja Jasa - Penangan Pandemi COVID-19	396.000	Terlewat untuk dilakukan revisi
409288	BPHN	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	65.427	Tidak dilakukan ratat atau revisi dikhawatirkan akan menurunkan nilai IKPA TA 2023
		522192	Belanja Jasa - Penangan Pandemi COVID-19	317.000	
<b>J U M L A H</b>				<b>778.427</b>	

Rincian anggaran COVID-19 disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan ini.

*Belanja Pegawai  
Rp16.789.330.933*

### ***B.3 Belanja Pegawai***

Realisasi Belanja Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp16.789.330.933 dan Rp16.897.721.259 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Anggaran dan realisasi belanja pegawai disajikan pada tabel berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai  
Periode 31 Desember 2023*

URAIAN	Anggaran	Realisasi	% Real Angg
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	16.619.682.000	16.418.430.384	98,79
Belanja Lembur	383.295.000	372.998.000	97,31
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>17.002.977.000</b>	<b>16.791.428.384</b>	<b>98,76</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	-	(2.097.451)	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>17.002.977.000</b>	<b>16.789.330.933</b>	<b>98,74</b>

Terdapat pengembalian belanja pegawai TA 2023 pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja sebesar Rp2.097.451 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp2.451 melalui potongan SPM;
2. Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebesar Rp540.000 berupa Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Hukum Pertama bulan Maret 2023 a.n Deasy Kamila dikarenakan tugas belajar sesuai dengan NTPN Nomor 792195UDQBTHR824 tanggal 04 Mei 2023;
3. Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebesar Rp1.000.000 berupa Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat Penyelia bulan Februari dan Maret 2023 a.n Dien Shalli dikarenakan cuti melahirkan sesuai dengan NTPN Nomor 2F2D92CNR1K03JGA tanggal 04 Mei 2023;
4. Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS sebesar Rp555.000 berupa Tunjangan Umum PNS karena dilantik sebagai JFT sebanyak 3 pegawai a.n Alfansyah, Moh. Khomsin dan Sri Indah melalui potongan SPM 00235T/409288/2023 tanggal 04 Mei 2023;

Realisasi belanja pegawai pada kantor BPHN periode 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 0,64 % dibandingkan realisasi belanja pada periode sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pada tahun anggaran 2022 terdapat pembayaran atas kekurangan gaji terkait penyederhanaan birokrasi.

*Perbandingan Belanja Pegawai  
31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	16.418.430.384	16.872.026.404	(2,69)
Belanja Lembur	372.998.000	258.850.000	44,10
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>16.791.428.384</b>	<b>17.130.876.404</b>	<b>(1,98)</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	(2.097.451)	(233.155.145)	(99,10)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>16.789.330.933</b>	<b>16.897.721.259</b>	<b>(0,64)</b>

*Belanja Barang  
Rp98.630.804.748*

**B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp98.630.804.748 dan Rp67.991.580.417. Rincian Realisasi Anggaran dan Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 tersaji dalam tabel berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang  
Periode 31 Desember 2023*

URAIAN	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Barang Operasional	4.159.608.000	4.142.377.202	99,59
Belanja Barang Non Operasional	7.150.864.000	7.058.971.606	98,71
Belanja Barang Persediaan	888.553.000	879.917.146	99,03
Belanja Jasa	61.603.867.000	61.162.557.822	99,28
Belanja Pemeliharaan	3.456.985.000	3.435.825.206	99,39
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	22.322.992.000	22.010.832.804	98,60
Belanja Perjalanan Luar Negeri	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>99.582.869.000</b>	<b>98.690.481.786</b>	<b>99,10</b>
Pengembalian Belanja	-	(59.677.038)	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>99.582.869.000</b>	<b>98.630.804.748</b>	<b>99,04</b>



Pada Tahun 2023 terdapat pengembalian belanja barang pada 5 Kantor Wilayah dan Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja sebesar Rp.59.677.038 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta berupa pengembalian kelebihan belanja pembayaran bantuan hukum litigasi LBH Tentrem DIY sebesar Rp1.000.000 sesuai NTPN 31C356QT6P7AAODD tanggal 21 Desember 2023;
2. Kantor Wilayah Sumatera Barat berupa pengembalian sisa penginapan perjalanan dinas a.n. Marisa sebesar Rp2.000 sesuai NTPN 85FB82CNR1KQMILG tanggal 31 Mei 2023;
3. Kantor Wilayah Riau berupa pengembalian kelebihan pembayaran ATK Kegiatan Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah sebesar Rp21.000 sesuai NTPN 244015UD08BEED0 tanggal 29 Maret 2023;
4. Kantor Wilayah Jambi sebesar Rp17.956.000 berupa :
  - Pengembalian belanja bantuan hukum litigasi sebesar Rp11.700.000 sesuai NTPN 434D12CNR1HD59U4 tanggal 18 April 2023;
  - Pengembalian belanja bantuan hukum litigasi sebesar Rp6.000.000 sesuai NTPN 87DB95UDQBQVI46Q tanggal 18 April 2023;
  - Pengembalian belanja perjalanan dinas sebesar Rp256.000 sesuai NTPN 1C33C45KN9IHF97U tanggal 28 Desember 2023.
5. Kantor Wilayah Sumatera Selatan sebesar Rp804.100 berupa:
  - Pengembalian sisa penginapan perjalanan dinas sebesar Rp90.500 sesuai NTPN 413CC2CPNK8VUPD7 tanggal 12 Desember 2023;
  - Pengembalian sisa penginapan perjalanan dinas sebesar Rp713.600 sesuai NTPN 882473977EU287OH tanggal 22 Desember 2023;
6. Kantor Wilayah Lampung sebesar Rp2.100.000 berupa:
  - Pengembalian transport perjalanan dinas (524111) kegiatan pembinaan desa kadarkum sebesar

- Rp250.000 sesuai NTPN 993D32CNR1K8JOBE tanggal 12 Mei 2023;
- Pengembalian transport perjalanan dinas sebesar Rp250.000 sesuai NTPN 9C6828JM9RHPNP75 tanggal 06 April 2023;
  - Pengembalian transport perjalanan dinas sebesar Rp1.380.000 sesuai NTPN 4DBC66QT6O8AAM8N tanggal 16 November 2023;
  - Pengembalian transport perjalanan dinas sebesar Rp220.000 sesuai NTPN 9C6828JM9RHPNP75 tanggal 06 April 2023;
7. Kantor Wilayah Kalimantan Barat sebesar Rp2.000.000 berupa pengembalian belanja bantuan hukum litigasi dikarenakan adanya dua kali pembayaran (double payment) sesuai NTPN E3B4C7NAMOPD686M tanggal 19 Desember 2023;
8. Kantor Wilayah Kalimantan Timur sebesar Rp100.000 berupa pengembalian belanja bantuan hukum non litigasi dikarenakan adanya kesalahan perhitungan namun sudah dikembalikan ke Kas Negara sesuai dengan NTPN BA7802CPNK99G4P0 tanggal 13 Desember 2023;
9. Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara sebesar Rp660.000 berupa pengembalian belanja perjalanan dinas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran 2023 karena adanya kelebihan pembayaran hotel kegiatan pra evaluasi pembangunan Zona Integritas Tahun 2023 di Jakarta sesuai NTPN 1A0B152273ULF7BF tanggal 07 Desember 2023;
10. Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp1.000.000 berupa pengembalian belanja Bantuan Hukum karena adanya kelebihan bayar untuk Layanan bantuan Hukum pada OBH Posmakumadin Kefamenanu sesuai dengan NTPN 4B3DE522J35K9HVT tanggal 23 November 2023;
11. Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional sebesar Rp34.033.938 berupa:
- Pengembalian Belanja Jasa Profesi sebesar Rp1.690.000 berupa Pengembalian honor narasumber kegiatan

peningkatan kapasitas asesor PMPRB sesuai dengan NTPN Nomor E660B7N8Q0PLASC6 tanggal 13 Februari 2023;

- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp2.657.333 berupa selisih biaya tiket pesawat kegiatan perjadiin diskusi penyusunan NA di Palembang sesuai dengan NTPN Nomor 5040C6QRA6J8B3D3 tanggal 15 Juni 2023;
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp2.122.575 berupa selisih biaya tiket pesawat dan uang penginapan kegiatan perjadiin penyusunan NA RUU ke DIY sesuai dengan NTPN Nomor 56C901GAB74TG91L tanggal 15 Juni 2023;
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp1.650.000 berupa Pengembalian uang harian kegiatan workshop peningkatan kapasitas asesor PMPRB sesuai dengan NTPN Nomor 5B603520AH2G9MM9 tanggal 13 Februari 2023;
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp150.000 berupa Pengembalian Biaya Uang Harian paket meeting fullboard selama 1 hari kegiatan Konsiyering Penyelarasan sesuai dengan NTPN Nomor D93E5395AS9MR84F tanggal 16 Juni 2023;
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp150.000 berupa Pengembalian uang harian kegiatan konsinyering penyusunan NA RUU Badan Usaha Di Jawa Barat a.n Uci Bayu Kurniawan sesuai dengan NTPN Nomor 6AEF42CNR1NA61PE tanggal 15 Juni 2023;
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp300.000 berupa selisih uang penginapan kegiatan monev pelaporan keuangan DIPA BPHN di Kanwil NTB a.n Ira Yustisia sesuai NTPN Nomor 5EC86520AHK9TH5J tanggal 11 Agustus 2023;
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp62.000 berupa selisih uang tiket travel kegiatan

monev laporan keuangan dan nilai IKPA di Kanwil Jawa Barat a.n Rizky Awaliyah dan Ratna Jamilah sesuai NTPN Nomor 981171GAB7AOBLG5 tanggal 11 Agustus 2023;

- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp32.000 berupa selisih uang penginapan kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan dan BMN di Jawa Barat a.n Vian Budi dan Andhika Rizki sesuai NTPN Nomor C724A8JM9RTQN4IR tanggal 11 Agustus 2023;
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp32.000 berupa selisih uang penginapan kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan dan BMN di Jawa Barat a.n Teguh Irawan dan Bangun Asanurjaya sesuai NTPN Nomor D283D45IQN1T3J88 tanggal 11 Agustus 2023;
- Pengembalian Honor Narasumber KHN kegiatan penyusunan DPHN karena tidak diperkenankan menerima honor (Narasumber KPK) sebesar Rp4.335.000 sesuai NTPN Nomor 3C8455UFMUL7FA4I tanggal 22 Desember 2023;
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp450.000 berupa selisih biaya penggantian tiket pesawat dan uang harian kegiatan Monev JDIH ke Maluku a.n Desyana Berliana sesuai NTPN Nomor 6C2FA2CPNKBVCO0G tanggal 22 Desember 2023;
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa Pengembalian Selisih pengajuan LS Di Awal dengan Biaya Aktual Kegiatan Pemetaan dan Profiling AH di Sulawesi Selatan sebesar Rp96.840 sesuai NTPN Nomor 7561445KN9GELAHK tanggal 22 Desember 2023;
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa Pengembalian Selisih pengajuan LS Di Awal dengan Biaya Aktual Kegiatan pelaksanaan AEH di Sumatera Barat sebesar Rp5.369.520 sesuai NTPN Nomor 1B6915UFMUL7F9M6 tanggal 22 Desember 2023;
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa

Pengembalian Selisih Pengajuan LS Di Awal dengan Biaya Aktual Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan AEH di Jawa Timur sebesar Rp2.187.600 sesuai NTPN Nomor EDA663977EU289UR tanggal 22 Desember 2023;

- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa pengembalian selisih pengajuan LS Di Awal dengan Biaya Aktual kegiatan penyusunan DPHN di NTB sebesar Rp10.585.270 sesuai NTPN Nomor 6D397522742R2A7V tanggal 22 Desember 2023;
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa Pengembalian Selisih Pengajuan LS Di Awal dengan Biaya Aktual Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan AEH di Jawa Timur sebesar Rp1.633.800 sesuai NTPN Nomor 8EE5C0JUNV6T1AG8 tanggal 22 Desember 2023;
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa pengembalian selisih pengajuan LS Di Awal dengan Biaya Aktual kegiatan pemetaan dan Profiling AH di Lampung sebesar Rp230.000 sesuai NTPN Nomor 285785UFMUL7FAIA tanggal 22 Desember 2023;
- Pengembalian selisih biaya uang harian kegiatan FGD Tim Teknis JDIH di Bogor a.n M.Reyhan Pradipta sebesar Rp300.000 sesuai NTPN Nomor C82242CPNKBVCO3A tanggal 22 Desember 2023.

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember TA. 2023 mengalami penurunan sebesar 17,74% dari TA 2022.

*Perbandingan Belanja Barang  
31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	4.142.377.202	3.645.475.256	13,63
Belanja Barang Non Operasional	7.058.971.606	42.163.011.537	(83,26)
Belanja Barang Persediaan	879.917.146	583.180.152	50,88
Belanja Jasa	61.162.557.822	3.807.345.053	1.506,44
Belanja Pemeliharaan	3.435.825.206	3.273.888.864	4,95
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	22.010.832.804	14.658.684.864	50,16
Belanja Perjalanan Luar Negeri	0	-	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>98.690.481.786</b>	<b>68.131.585.726</b>	<b>44,85</b>
Pengembalian Belanja	(59.677.038)	(140.005.199)	(57,38)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>98.630.804.748</b>	<b>67.991.580.527</b>	<b>45,06</b>

Dalam DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional terdapat Program Prioritas Nasional (PN) yang dibiayai dengan menggunakan akun belanja jasa konsultan (522131) yaitu Bantuan Hukum (Bankum) dimana pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum terdapat di Kantor Wilayah, Badan Pembinaan Hukum Nasional hanya sebatas memonitor sejauh mana anggaran tersebut terealisasi sesuai rencana. Realisasi Bantuan Hukum periode 31 Desember 2023 sebesar Rp55.922.687.179. atau 99,21% dari Anggaran Bantuan Hukum sebesar Rp56.365.320.000 (rincian terlampir). Pada Tahun Anggaran 2023 Badan Pembinaan Hukum Nasional mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp31.386.000. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp30.607.573 atau sebesar 97,52% dari yang dianggarkan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Belanja Barang-Penanganan Pandemi COVID-19  
Periode 31 Desember 2023*

<b>Akun</b>	<b>URAIAN</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Real Angg.</b>
521131	Belanja Barang Operasional - Penangan Pandemi COVID-19	30.268.000	30.202.573	99,78%
522192	Belanja Jasa - Penangan Pandemi COVID-19	1.118.000	405.000	36,23%
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>31.386.000</b>	<b>30.607.573</b>	<b>97,52%</b>
	Pengembalian Belanja	0	-	0,00%
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>31.386.000</b>	<b>30.607.573</b>	<b>97,52%</b>

Belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 pada Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah berupa pembelian lisensi aplikasi zoom dan biaya Swab test antigen/PCR test. Rincian realisasi belanja barang untuk belanja penanganan pandemi COVID-19 disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Perbandingan Belanja Barang-Penanganan Pandemi COVID-19

31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	30.202.573	210.201.381	(85,63)
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	39.737.900	0,00
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	24.728.329	(100,00)
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	405.000	294.171.262	(99,86)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>30.607.573</b>	<b>568.838.872</b>	<b>(94,62)</b>
Pengembalian Belanja	-	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>30.607.573</b>	<b>568.838.872</b>	<b>(94,62)</b>

Realisasi Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19 periode 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 94,62% dari TA 2022. Hal ini antara lain disebabkan adanya kebijakan pemerintah sesuai dengan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal Penggunaan Akun Khusus COVID-19, akun khusus COVID-19 hanya digunakan sampai dengan Semester I Tahun 2023 dan tidak lagi menggunakan akun belanja khusus COVID-19 mulai Semester II Tahun 2023. Pada periode 31 Desember 2023, masih terdapat anggaran dan realisasi akun belanja khusus COVID-19. Terhadap sisa anggaran dan realisasi belanja khusus COVID-19 pada masing-masing satuan kerja akan dilakukan langkah-langkah berikut:

KODE SATKER	NAMA SATKER	Kode Akun	URAIAN	Sisa Anggaran	Keterangan
409207	Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara	522192	Belanja Jasa - Penangan Pandemi COVID-19	396.000	akan di lakukan Revisi untuk belanja Bahan
409288	BPHN	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	65.427	Tidak dilakukan ralat atau revisi dikhawatirkan akan menurunkan nilai IKPA TA 2023
		522192	Belanja Jasa - Penangan Pandemi COVID-19	317.000	
<b>J U M L A H</b>				<b>778.427</b>	

### **B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.968.810.187 dan Rp2.762.287.230. Realisasi belanja modal Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai eselon I terdapat pada 21 satuan kerja yaitu Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja dan 20 Kantor Wilayah yang telah mencapai realisasi sebesar 99,36%. Dimana sebagian besar belanja modal terdapat pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja sebesar Rp4.796.808.047 dan Kantor Wilayah sebesar Rp172.002.140. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

*Rincian Realisasi Belanja Modal  
Periode 31 Desember 2023*

<b>Akun</b>	<b>URAIAN</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Real Angg.</b>
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.394.698.000	1.394.106.782	99,96%
533121	Belanja penambahan Nilai gedung dan Bangunan	3.348.248.000	3.317.712.222	99,09%
536111	Belanja Modal Lainnya	257.694.000	256.991.183	99,73%
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>		<b>5.000.640.000</b>	<b>4.968.810.187</b>	<b>99,36%</b>
<b>Pengembalian</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Jumlah Belanja Netto</b>		<b>5.000.640.000</b>	<b>4.968.810.187</b>	<b>99,36%</b>

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2023 sebesar Rp4.968.810.187 terdapat pada Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja dan Kantor Wilayah. Realisasi Belanja Modal ini mempengaruhi penambahan aset pada Neraca Badan Pembinaan Hukum Nasional. Rincian Realisasi Belanja Modal masing-masing Satuan Kerja adalah sebagai berikut :



1. Kantor Wilayah DKI Jakarta sebesar Rp.3.991.500 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 231391301013281 tanggal 17 April 2023;
2. Kantor Wilayah Jawa Barat sebesar Rp7.500.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 230221305000228 tanggal 01 maret 2023;
3. Kantor Wilayah Jawa Tengah sebesar Rp20.000.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 230261301006396 tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp11.061.000 dan SP2D nomor 230261301009846 tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp8.939.000;
4. Kantor Wilayah Sumatera Utara sebesar Rp18.030.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 230041303001359 tanggal 17 Maret 2023;
5. Kantor Wilayah Sumatera Barat sebesar Rp4.000.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 230101303000571 tanggal 13 Februari 2023;
6. Kantor Wilayah Riau sebesar Rp6.600.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 230081303007008 tanggal 29 Mei 2023;
7. Kantor Wilayah Jambi sebesar Rp6.000.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 230121302000839 tanggal 14 Maret 2023;
8. Kantor Wilayah Lampung sebesar Rp5.000.000 berupa pembelian Buku Lainnya sesuai SP2D nomor 230171303003291 tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp347.000 dan pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 230171303004732 tanggal 25 Juli 2023 sebesar Rp4.653.000 ;
9. Kantor Wilayah Kalimantan Selatan sebesar Rp14.998.300 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 230431301004692 tanggal 13 Februari 2023;
10. Kantor Wilayah Kalimantan Timur sebesar Rp5.000.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 230461301001863 tanggal 21 Februari 2023;
11. Kantor Wilayah Sulawesi Utara sebesar Rp7.750.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 230491302003456 tanggal 16 Maret 2023;

12. Kantor Wilayah Bali sebesar Rp15.000.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 230371303002510 tanggal 18 April 2023;
13. Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp11.000.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 230391301012157 tanggal 31 Mei 2023
14. Kantor Wilayah Papua sebesar Rp10.205.340 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 230631303001717 tanggal 12 Mei 2023 sebesar Rp5.104.890 dan SP2D nomor 230631303002642 tanggal 07 Juli sebesar Rp5.100.450;
15. Kantor Wilayah Bengkulu sebesar Rp9.980.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 230161302001624 tanggal 30 Maret 2023;
16. Kantor Wilayah Kalimantan Tengah sebesar Rp3.500.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 230431301004692 tanggal 13 Maret 2023;
17. Kantor Wilayah Bangka Belitung sebesar Rp2.500.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 230151303000652 tanggal 24 Maret 2023;
18. Kantor Wilayah Kepulauan Riau sebesar Rp8.947.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 230091303002036 tanggal 31 Maret 2023;;
19. Kantor Wilayah Papua Barat sebesar Rp10.000.000 berupa pembelian Buku Lainnya sesuai SP2D nomor 230651302006182 tanggal 24 Mei 2023;
20. Kantor Wilayah Sulawesi Barat sebesar Rp2.000.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 230651302006182 tanggal 24 Mei 2023;
21. Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja sebesar Rp4.796.808.047 berupa :
  - 5 Unit Lemari ES LG GN-B372PXGB Kulkas 2 Pintu 410 L sebesar Rp37.500.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391302003250 tanggal 16 Februari 2023;
  - 4 unit Televisi (Polytron Smart TV Google PLD43UG5959) sebesar Rp19.000.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391302003258 tanggal

16 Februari 2023;

- 1 Unit Mesin Pemotong Rumput (Honda Brushcutter UMR435N) sebesar Rp4.600.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391302003272 tanggal 16 Februari 2023;
- 5 Unit Dispenser (Polytron Dispenser PWC 776) sebesar Rp11.445.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391303002180 tanggal 16 Februari 2023;
- 5 unit Scanner (1 Epson DS1630 Scanner Portable dan 4 Epson Workforce ES-580W) sebesar Rp53.000.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391303005409 tanggal 10 Maret 2023;
- 49 unit Laptop (Acer Travelmate P214 Core-i5) sebesar Rp677.425.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391302008099 tanggal 10 Maret 2023;
- 7 unit PC (ACER AIO Veriton Z4) sebesar Rp171.500.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391302011461 tanggal 29 Maret 2023;
- 5 Unit Proyektor (Viewsonic Proyektor VS16909) sebesar Rp38.500.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391303010130 tanggal 11 April 2023;
- 5 unit printer (Epson L15150) sebesar 78.750.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391701000537 tanggal 10 Mei 2023;
- 1 unit Laptop (Axioo Mybook Pro L7V) sebesar 29.500.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391303014069 tanggal 11 Mei 2023;
- 9 unit Dispenser (Polytron Dispenser PWC 776) sebesar Rp20.601.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391701000855 tanggal 21 Juni 2023;
- Pengadaan Neon Box Tulisan BPHN sebesar Rp139.488.150 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391701000855 tanggal 21 Juni 2023;
- Pengadaan Peralatan Podcast sebesar Rp14.797.632 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391701000855 tanggal 21 Juni 2023;

- 4 Unit Komputer Meja Merk Acer Veriton Z4 AIO sebesar Rp98.000.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391701000855 tanggal 21 Juni 2023 ;
- Pekerjaan Perbaikan dan Pemasangan Paving Block Kantor BPHN TA. 2023 sebesar Rp198.971.096 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391302011408 tanggal 29 Maret 2023 ;
- Pekerjaan Perbaikan Toilet Lt.3 Kantor BPHN TA 2023 sebesar Rp47.230.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391701000855 tanggal 21 Juni 2023;
- 1 Paket buku buku hukum dalam rangka kegiatan pengelolaan perpustakaan hukum Kantor BPHN TA. 2023 sebesar Rp5.885.400 sesuai SP2D nomor 231391303012041 tanggal 27 April 2023;
- 1 Paket buku buku hukum dalam rangka kegiatan pengelolaan perpustakaan hukum Kantor BPHN TA. 2023 sebesar Rp5.485.999 sesuai SP2D nomor 231391701001076 tanggal 10 Juli 2023;
- Pekerjaan Perencanaan Kontruksi Gedung Induk dan Annex Kantor BPHN TA.2023 sebesar Rp42.394.200 sesuai SP2D nomor 231391303026247 tanggal 28 Juli 2023 ;
- 1 Paket buku buku hukum dalam rangka kegiatan pengelolaan perpustakaan hukum Kantor BPHN TA. 2023 sebesar Rp12.635.608 sesuai SP2D nomor 231391303031721 tanggal 28 Agustus 2023;
- Pekerjaan Perencanaan Konstruksi Gedung Induk dan Annex Kantor BPHN TA. 2023 sebesar Rp77.722.700 sesuai SP2D nomor 231391303031523 tanggal 29 Agustus 2023;
- 1 Paket buku buku hukum dalam rangka kegiatan pengelolaan perpustakaan hukum Kantor BPHN TA. 2023 sebesar Rp5.144.300 sesuai SP2D nomor 231391303036657 tanggal 25 September 2023;
- Biaya Konsumsi dalam rangka rapat lanjutan pembahasan pengembangan rancangan JKK pada pengelola kegiatan renovasi BPHN sebesar Rp8.992.626

dan biaya konsumsi makan dan snack dalam rangka rapat layanan pengadaan tentang pembahasan konsep awal rancangan JKK BPHN pada Kantor BPHN TA 2023 sebesar Rp22.452.500 sesuai SP2D nomor 231391701001938 tanggal 11 Oktober 2023;

- Biaya honor tim pengelolaan kegiatan renovasi lt 3 gd annex, ruang kerja pimpinan gd SJDI dan ruang kerja pimpinan gd induk BPHN periode September 2023 sebesar Rp10.700.000 sesuai SP2D nomor 231391303041648 tanggal 20 Oktober 2023;
- Biaya Pembelian Buku Hukum dalam rangka pengelolaan perpustakaan hukum Kantor BPHN TA.2023 sebesar Rp474.900 sesuai SP2D nomor 231391303041648 tanggal 20 Oktober 2023;
- Pengadaan Konstruksi Fisik Renovasi Lantai 2 Gd. Annex, R. Kerja Pimpinan Gd. SJDI dan R. Kerja Pimpinan Gd. Induk BPHN TA. 2023 Termin Ke-1 sebesar Rp655.217.750 sesuai SP2D nomor 231391303042793 tanggal 27 Oktober 2023;
- Biaya pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan renovasi lt.2 gd.annex, ruang kerja pimpinan gd.SJDI, dan ruang kerja pimpinan gd.induk BPHN sebesar Rp24.845.750 sesuai SP2D nomor 231391701002362 tanggal 10 November 2023;
- Biaya honor pengangkatan tim pengelola kegiatan renovasi lt.2 gd. annex, ruang kerja pimpinan gd. SJDI dan ruang kerja pimpinan gd. induk BPHN TA 2023 sebesar Rp12.265.000 sesuai SP2D nomor 231391303046974 tanggal 15 November 2023;
- Biaya Pembelian Buku - buku hukum (monografi) dalam rangka pengelolaan perpustakaan hukum Kantor BPHN TA 2023 sebesar Rp5.364.676 sesuai SP2D nomor 231391303046974 tanggal 15 November 2023;
- Pengadaan Konstruksi Fisik Renovasi Lantai 2 Gd. Annex, R. Kerja Pimpinan Gd. SJDI dan R. Kerja Pimpinan Gd. Induk BPHN TA. 2023 Termin Ke-2

sebesar Rp823.469.100 sesuai SP2D nomor 231391303048486 tanggal 23 November 2023;

- Biaya Pengadaan Ebook JDIHN BPHN TA. 2023 sebesar Rp49.998.160 sesuai SP2D nomor 231391701002634 tanggal 24 November 2023 ;
- Biaya pekerjaan pengadaan jasa konsultan pengawas renovasi lt 2 gd annex, ruang kerja pimpinan gd indk BPHN TA 2023 termin 2 (30%) sebesar Rp29.814.900sesuai dengan SP2D nomor 231391701002634 tanggal 24 November 2023;
- Pembayaran belanja modal sesuai kontrak PHN.1-PB.02.01-911/2023 tgl 18 Jul 23, BAST PHN.1-PB.02.01-1327/2023 tgl 29 Nov 23, BAP PHN.1-PB.02.01-1350/2023 tgl 1 Des 23. Pengadaan Perencanaan Konstruksi Kgt Renovasi Lt 2 Gedung Annex dan Induk Termin Ke-3 sebesar Rp21.197.100 sesuai dengan SP2D nomor 231391303052799 tanggal 08 Desember 2023;
- Biaya konsumsi dan transport lokal pengelola kegiatan renovasi dalam rangka pembahasan progress renovasi BPHN termin II (lanjutan pada kantor BPHN TA 2023) sebesar Rp8.157.000 sesuai SP2D nomor 231391701002854 tanggal 11 Desember 2023;
- Pengadaan Konstruksi Fisik Renovasi Lantai 2 Gd. Annex, R. Kerja Pimpinan Gd. SJDI dan R. Kerja Pimpinan Gd. Induk BPHN TA. 2023 Termin Ke-3 sebesar Rp1.266.210.150 sesuai SP2D nomor 231391303054394 tanggal 12 Desember 2023;
- Biaya pekerjaan pengadaan jasa konsultan pengawas renovasi lt 2 Gd. annex, ruang kerja pimpinan Gd. SJDI, dan ruang kerja pimpinan Gd. induk BPHN sebesar Rp44.722.350 dan biaya honor dan konsumsi dalam rangka rapat pembahasan pelaporan progress renovasi gedung kantor BPHN sebesar Rp 23.350.000 sesuai SP2D nomor 231391701004216 tanggal 29 Desember 2023.

Realisasi Belanja Modal pada periode 31 Desember TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 79,88% dibandingkan TA 2022 disebabkan karena adanya penambahan alokasi anggaran belanja modal untuk belanja modal gedung dan bangunan untuk renovasi gedung serta penambahan belanja modal lainnya sehingga alokasi anggaran belanja modal tahun anggaran 2023 lebih besar dibanding tahun 2022.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal*

*31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI T.A 2023	REALISASI T.A 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.394.106.782	2.333.786.913	(40,26)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.317.712.222	198.746.152	0,00
Belanja Modal Lainnya	256.991.183	229.754.165	11,85
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>4.968.810.187</b>	<b>2.762.287.230</b>	<b>79,88</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.968.810.187</b>	<b>2.762.287.230</b>	<b>79,88</b>

***B.5.1 Belanja Modal Tanah***

Realisasi Belanja Modal Tanah periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja modal tanah pada Badan Pembinaan Hukum Nasional.

***B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin***

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.394.106.782, mengalami penurunan sebesar 40,26% bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.333.786.913. Hal ini disebabkan karena alokasi anggaran belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023 lebih kecil dibandingkan 2022 sehingga menurunnya realisasi belanja modal peralatan dan mesin.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI TA. 2023	REALISASI TA. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.394.106.782	2.333.786.913	(40,26)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.394.106.782</b>	<b>2.333.786.913</b>	<b>(40,26)</b>
Pengembalian	0	0	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.394.106.782</b>	<b>2.333.786.913</b>	<b>(40,26)</b>

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdapat pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional sebesar Rp1.394.106.782 berupa pembelian:

- 5 Unit Lemari ES LG GN-B372PXGB Kulkas 2 Pintu 410 L sebesar Rp37.500.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391302003250 tanggal 16 Februari 2023;
- 4 unit Televisi (Polytron Smart TV Google PLD43UG5959) sebesar Rp19.000.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391302003258 tanggal 16 Februari 2023;
- 1 Unit Mesin Pemotong Rumput (Honda Brushcutter UMR435N) sebesar Rp4.600.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391302003272 tanggal 16 Februari 2023;
- 5 Unit Dispenser (Polytron Dispenser PWC 776) sebesar Rp11.445.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391303002180 tanggal 16 Februari 2023;
- 5 unit Scanner (1 Epson DS1630 Scanner Portable dan 4 Epson Workforce ES-580W) sebesar Rp53.000.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391303005409 tanggal 10 Maret 2023;
- 49 unit Laptop (Acer Travelmate P214 Core-i5) sebesar Rp677.425.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391302008099 tanggal 10 Maret 2023;
- 7 unit PC (ACER AIO Veriton Z4) sebesar Rp171.500.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391302011461 tanggal 29 Maret 2023;



- 5 Unit Proyektor (Viewsonic Proyektor VS16909) sebesar Rp38.500.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391303010130 tanggal 11 April 2023;
- 5 unit printer (Epson L15150) sebesar 78.750.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391701000537 tanggal 10 Mei 2023;
- 1 unit Laptop (Axioo Mybook Pro L7V) sebesar 29.500.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391303014069 tanggal 11 Mei 2023;
- 9 unit Dispenser (Polytron Dispenser PWC 776) sebesar Rp20.601.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391701000855 tanggal 21 Juni 2023;
- Pengadaan Neon Box Tulisan BPHN sebesar Rp139.488.150 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391701000855 tanggal 21 Juni 2023;
- Pengadaan Peralatan Podcast sebesar Rp14.797.632 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391701000855 tanggal 21 Juni 2023;
- 4 Unit Komputer Meja Merk Acer Veriton Z4 AIO sebesar Rp98.000.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391701000855 tanggal 21 Juni 2023.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin akan mempengaruhi penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada Neraca sehingga akan mempengaruhi kenaikan/penurunan pada Neraca.

### ***B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan***

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.317.712.222 dan Rp198.746.152.

Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 mengalami Kenaikan yang sangat signifikan dari Tahun Anggaran 2022 dikarenakan anggaran Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 terkena Blokir *Automatic Adjustment* sampai dengan akhir tahun anggaran. Belanja Modal Gedung dan Bangunan terdapat pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional sebesar Rp3.317.712.222

adalah berupa:

- Pekerjaan Perbaikan dan Pemasangan Paving Block Kantor BPHN TA. 2023 sebesar Rp198.971.096 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391302011408 tanggal 29 Maret 2023;
- Pekerjaan Perbaikan Toilet Lt.3 Kantor BPHN TA 2023 sebesar Rp47.230.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391701000855 tanggal 21 Juni 2023;
- Pekerjaan Perencanaan Konstruksi Gedung Annex dan Induk Kantor BPHN sebesar Rp42.394.200 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391303026247 tanggal 28 Juli 2023;
- Pekerjaan Perencanaan Konstruksi Gedung Annex dan Induk Kantor BPHN sebesar Rp77.722.700 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391303031523 tanggal 2023;
- Biaya Konsumsi dalam rangka rapat lanjutan pembahasan pengembangan rancangan JKK pada pengelola kegiatan renovasi BPHN sebesar Rp8.992.626 dan biaya konsumsi makan dan snack dalam rangka rapat layanan pengadaan tentang pembahasan konsep awal rancangan JKK BPHN pada Kantor BPHN TA 2023 sebesar Rp22.452.500 sesuai SP2D nomor 231391701001938 tanggal 11 Oktober 2023;
- Biaya honor tim pengelolaan kegiatan renovasi lt 3 gd annex, ruang kerja pimpinan gd SJDI dan ruang kerja pimpinan gd induk BPHN periode September 2023 sebesar Rp10.700.000 sesuai SP2D nomor 231391303041648 tanggal 20 Oktober 2023;
- Pengadaan Konstruksi Fisik Renovasi Lantai 2 Gd. Annex, R. Kerja Pimpinan Gd. SJDI dan R. Kerja Pimpinan Gd. Induk BPHN TA. 2023 Termin Ke-1 sebesar Rp655.217.750 sesuai SP2D nomor 231391303042793 tanggal 27 Oktober 2023;
- Biaya pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan renovasi lt.2 gd.annex, ruang kerja pimpinan gd.SJDI, dan ruang kerja pimpinan gd.induk BPHN sebesar Rp24.845.750 sesuai SP2D nomor 231391701002362

- tanggal 10 November 2023;
- Biaya honor pengangkatan tim pengelola kegiatan renovasi lt.2 gd. annex, ruang kerja pimpinan gd. SJDI dan ruang kerja pimpinan gd. induk BPHN TA 2023 sebesar Rp12.265.000 sesuai SP2D nomor 231391303046974 tanggal 15 November 2023;
  - Pengadaan Konstruksi Fisik Renovasi Lantai 2 Gd. Annex, R. Kerja Pimpinan Gd. SJDI dan R. Kerja Pimpinan Gd. Induk BPHN TA. 2023 Termin Ke-2 sebesar Rp823.469.100 sesuai SP2D nomor 231391303048486 tanggal 23 November 2023;
  - Biaya pekerjaan pengadaan jasa konsultan pengawas renovasi lt 2 gd annex, ruang kerja pimpinan gedung induk Kantor BPHN TA 2023 termin 2 (30%) sebesar Rp29.814.900sesuai dengan SP2D nomor 231391701002634 tanggal 24 November 2023;
  - Pembayaran belanja modal sesuai kontrak PHN.1-PB.02.01-911/2023 tgl 18 Jul 23, BAST PHN.1-PB.02.01-1327/2023 tgl 29 Nov 23, BAP PHN.1-PB.02.01-1350/2023 tgl 1 Des 23. Pengadaan Perencanaan Konstruksi Kgt Renovasi Lt 2 Gedung Annex dan Induk Termin Ke-3 sebesar Rp21.197.100 sesuai dengan Sp2D nomor 231391303052799 tanggal 08 Desember 2023;
  - Biaya konsumsi dan transport lokal pengelola kegiatan renovasi dalam rangka pembahasan progress renovasi BPHN termin II (lanjutan pada kantor BPHN TA 2023) sebesar Rp8.157.000 sesuai SP2D nomor 231391701002854 tanggal 11 Desember 2023;
  - Pengadaan Konstruksi Fisik Renovasi Lantai 2 Gd. Annex, R. Kerja Pimpinan Gd. SJDI dan R. Kerja Pimpinan Gd. Induk BPHN TA. 2023 Termin Ke-3 sebesar Rp1.266.210.150 sesuai SP2D nomor 231391303054394 tanggal 12 Desember 2023;
  - Biaya pekerjaan pengadaan jasa konsultan pengawas renovasi lt 2 Gd. annex, ruang kerja pimpinan Gd. SJDI, dan ruang kerja pimpinan Gd. induk BPHN sebesar Rp44.722.350 dan biaya honor dan konsumsi dalam

rangka rapat pembahasan pelaporan progress renovasi gedung kantor BPHN sebesar Rp 23.350.000 sesuai SP2D nomor 231391701004216 tanggal 29 Desember 2023.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan  
31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.317.712.222	198.746.152	1569,32
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>3.317.712.222</b>	<b>198.746.152</b>	<b>1569,32</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.317.712.222</b>	<b>198.746.152</b>	<b>1569,32</b>

Realisasi Belanja Modal gedung dan bangunan ini mempengaruhi penambahan aset pada Neraca Badan Pembinaan Hukum Nasional.

***B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan***

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat alokasi anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada TA 2023.

***B.5.5 Belanja Modal Lainnya***

Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp256.991.183 dan Rp229.754.165. Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 31 Desember 2023 sebesar Rp256.991.183 berupa pembelian buku dan koleksi perpustakaan (monografi) di Kantor Wilayah sebesar Rp172.002.140 dan Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja sebesar Rp84.989.043 dengan rincian sebagai berikut :

*Rincian Pembelian Buku dan Koleksi Perpustakaan  
periode 31 Desember 2023*

NO	SATREB	NILAI	NO EPID	TANGGAL SPID	KETERANGAN
1	SADRA PEMERINTAH HUKUM NASIONAL	3.985.400	221381303012041	27-04-2023	1 Paket Buku Hukum
2	SADRA PEMERINTAH HUKUM NASIONAL	3.488.999	221381781891278	10-07-2023	1 Paket Buku Hukum
3	SADRA PEMERINTAH HUKUM NASIONAL	6.114.308	221381383011721	28-08-2023	1 Paket Buku Hukum
4	SADRA PEMERINTAH HUKUM NASIONAL	8.821.300			
5	SADRA PEMERINTAH HUKUM NASIONAL	5.144.300	221381303004887	28-09-2023	1 Paket Buku Hukum
6	SADRA PEMERINTAH HUKUM NASIONAL	474.900	221381303041848	20-10-2023	1 Paket Buku Hukum
7	SADRA PEMERINTAH HUKUM NASIONAL	3.264.678	221381303049574	15-11-2023	1 Paket Buku Hukum
8	SADRA PEMERINTAH HUKUM NASIONAL	48.888.180	221381781882834	24-11-2023	e-Book JDIH
9	KAWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKSIK JAKARTA	188.900	221381301011281	17-04-2023	Monografi
10	KAWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKSIK JAKARTA	3.801.800			
11	KAWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT	7.300.000	220221303000228	21-05-2023	Monografi
12	KAWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	8.388.000	220281301000848	21-07-2023	Monografi
13	KAWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	11.081.000	220281301004288	21-08-2023	Monografi
14	KAWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	878.000	220281381880848	21-07-2023	Monografi
15	KAWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA	18.000.000	220281383011281	17-05-2023	Monografi
16	KAWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT	4.000.000	220121303000271	13-02-2023	Monografi
17	KAWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU	6.800.000	220281303007028	28-06-2023	Monografi
18	KAWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JABAR	8.000.000	220121303000838	14-05-2023	Monografi
19	KAWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	347.000	220171303001281	21-05-2023	Buku Lembar
20	KAWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	4.882.000	220171303004732	28-07-2023	Monografi
21	KAWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TENGAH	3.800.000	220401381884882	13-05-2023	Buku Lembar
22	KAWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN SELATAN	14.358.300	220481302000541	10-02-2023	Monografi
23	KAWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TANGGAS	3.000.000	220481381891883	21-02-2023	Monografi
24	KAWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA	7.750.000	220481382001488	16-05-2023	Monografi
25	KAWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI	18.000.000	220371303002810	18-04-2023	Monografi

NO	SATKER	NILAI	NO SP2D	TANGGAL SP2D	KETERANGAN
26	KANWIL ACEH DAN HANUHA TENGGARA TAMU	1.200.000	2023/31/012107	31-05-2023	Mengapri
27	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKIPAPUA	5.700.450	2023/31/0000842	07-07-2023	Mengapri
28	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKIPAPUA	5.124.800	2023/31/000117	10-06-2023	Mengapri
29	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKIBENGKULU	9.992.000	2023/31/0001624	02-08-2023	Mengapri
30	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKISABANGKA BELITUNG	2.900.000	2023/31/0000882	24-03-2023	Mengapri
31	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	8.047.000	2023/31/0000036	31-03-2023	Mengapri
32	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	10.000.000	2023/31/0000142	24-06-2023	Duku Laras
33	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	213.400	2023/31/0001229	10-07-2023	Mengapri
34	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	1.888.800	2023/31/0000836	22-11-2023	Mengapri
<b>J U M L A H</b>					<b>256.991.183</b>

Realisasi belanja modal lainnya periode 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 11,85% dibandingkan 31 Desember 2022 hal ini disebabkan karena bertambahnya kantor wilayah yang mengalokasikan anggaran belanja modal lainnya pada tahun 2023 sehingga alokasi anggaran belanja modal lainnya tahun 2023 lebih besar dibandingkan tahun 2022.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya  
31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BELANJA	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	256.991.183	229.754.165	11,85
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>256.991.183</b>	<b>229.754.165</b>	<b>11,85</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>256.991.183</b>	<b>229.754.165</b>	<b>11,85</b>

Realisasi belanja modal lainnya akan mempengaruhi penambahan aset tetap lainnya pada Neraca sehingga akan mempengaruhi kenaikan/penurunan pada Neraca.

*Belanja Bantuan Sosial Rp0*

## **B.6 Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional tidak terdapat anggaran belanja bantuan sosial dikarenakan bukan entitas yang bertugas memberikan bantuan sosial.

## **C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

*Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0*

### **C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran (Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kantor wilayah) adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran Laporan Keuangan ini.

*Kas di Bendahara Penerimaan Rp0*

### **C.2 Kas di Bendahara Penerimaan**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Tidak terdapat Bendahara Penerimaan di Badan Pembinaan Hukum Nasional dan satuan kerja di wilayah.

*Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0*

### **C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Tidak terdapat Kas lainnya dan Setara Kas pada DIPA Badan pembinaan Hukum Nasional.

*Piutang PNB*  
*Rp59.148.730*

#### **C.4 Piutang PNB**

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp59.148.730 dan Rp0. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang Bukan Pajak terdapat pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja sebesar Rp59.148.730 yang merupakan hasil tindak lanjut atas temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Tahun anggaran 2023, yang terdiri dari :

1. Koreksi Beban atas kelebihan/selisih pembayaran iuran BPJS Kesehatan terkait pengadaan Outsourcing tahun 2023 dan telah disetorkan ke kas negara sesuai NTPN 9D5EA55DF96JNTN9 tanggal 28 Maret 2024 sebesar Rp12.068.375;
2. Koreksi atas kelebihan pekerjaan konstruksi renovasi lantai 2 gedung Annex, ruang kerja pimpinan gedung SJDI serta ruang kerja pimpinan Gedung induk Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional dan telah disetorkan ke kas negara sesuai NTPN 2A2DE6U8EUGJ5AUI tanggal 2 Mei 2024 sebesar Rp47.080.355.

*Penyisihan Piutang  
Tak Tertagih –  
Piutang Lancar  
(Rp295.744)*

#### **C.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing adalah sebesar (Rp295.744) dan Rp0.

Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – piutang Lancar terdapat pada Kantor badan Pembinaan Hukum Nasional periode 31 Desember 2023 yang merupakan hasil tindak lanjut atas temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Tahun anggaran 2023, yang terdiri dari :

1. Penyisihan Piutang lainnya atas Koreksi Beban atas temuan pengembalian belanja barang yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp60.342;



2. Penyisihan Piutang lainnya atas koreksi aset atas kelebihan pembayaran belanja modal yang tidak sesuai ketentuan penyisihan piutang lainnya atas koreksi asset kelebihan pembayaran belanja modal yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp235.402.

*Persediaan*  
Rp181.076.570

### **C.6 Persediaan**

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp181.076.570 dan Rp98.063.299. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Persediaan  
31 Desember 2023 dan 2022*

<b>Jenis</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
Barang Konsumsi	181.076.570	98.063.299
<b>Jumlah</b>	<b>181.076.570</b>	<b>98.063.299</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Hasil Opname Fisik Barang Persediaan Nomor PHN.I-PB.04.03-01 tanggal 02 Januari 2024.

*Tanah*  
Rp356.165.357.000

### **C.7 Tanah**

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pembinaan Hukum Nasional per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp356.165.357.000 dan Rp356.165.357.000. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>356.165.357.000</b>
Mutasi tambah:		
Koreksi barang berlebih hasil inventarisasi	Rp	-
Koreksi kesalahan input IP	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Revaluasi Aset	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>356.165.357.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	Rp	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>356.165.357.000</b>

Tanah seluas 11.348 m<sup>2</sup> terletak di Jl Mayjen Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur sesuai Sertifikat nomor 6938773 Tahun 1986 dan Nomor 09040402400106 tanggal 06 Desember 2019.

*Peralatan dan Mesin*  
Rp26.605.556.857

### **C.8 Peralatan dan Mesin**

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp26.605.556.857 dan Rp24.758.430.869. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>24.758.430.869</b>
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	1.394.106.782
Transfer Masuk	Rp	409.738.000
Reklas Masuk	Rp	199.771.250
Perolehan Hasil tindak Lanjut Normalisasi	Rp	-
Penggunaan Kembali BMN yang dihentikan	Rp	853.242.316
Mutasi kurang:	Rp	-
Penghentian aset	Rp	(430.984.260)
Transfer Keluar	Rp	(378.976.850)
Reklas keluar	Rp	(199.771.250)
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>26.605.556.857</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	Rp	(22.314.784.270)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>4.290.772.587</b>

Mutasi tambah pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.856.858.348 berasal dari transaksi sebagai berikut :

3. Pembelian sebesar Rp1.394.106.782 dengan rincian sebagai berikut :

- 5 Unit Lemari ES LG GN-B372PXGB Kulkas 2 Pintu 410 L sebesar Rp37.500.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391302003250 tanggal 16 Februari 2023;

- 4 unit Televisi (Polytron Smart TV Google PLD43UG5959) sebesar Rp19.000.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391302003258 tanggal 16 Februari 2023;
- 1 Unit Mesin Pemootong Rumput (Honda Brushcutter UMR435N) sebesar Rp4.600.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391302003272 tanggal 16 Februari 2023;
- 5 Unit Dispenser (Polytron Dispenser PWC 776) sebesar Rp11.445.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391303002180 tanggal 16 Februari 2023;
- 5 unit Scanner (1 Epson DS1630 Scanner Portable dan 4 Epson Workforce ES-580W) sebesar Rp53.000.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391303005409 tanggal 10 Maret 2023;
- 49 unit Laptop (Acer Travelmate P214 Core-i5) sebesar Rp677.425.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391302008099 tanggal 10 Maret 2023;
- 7 unit PC (ACER AIO Veriton Z4) sebesar Rp171.500.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391302011461 tanggal 29 Maret 2023;
- 5 Unit Proyektor (Viewsonic Proyektor VS16909) sebesar Rp38.500.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391303010130 tanggal 11 April 2023;
- 5 unit printer (Epson L15150) sebesar 78.750.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391701000537 tanggal 10 mei 2023;
- 1 unit Laptop (Axioo Mybook Pro L7V) sebesar 29.500.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391303014069 tanggal 11 May 2023;
- 9 unit Dispenser (Polytron Dispenser PWC 776) sebesar Rp20.601.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391701000855 tanggal 21 Juni 2023;
- Pengadaan Neon Box Tulisan BPHN sebesar Rp139.488.150 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391701000855 tanggal 21 Juni 2023;
- Pengadaan Peralatan Podcast sebesar Rp14.797.632 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor 231391701000855 tanggal 21 Juni 2023;

- 4 Unit Komputer Meja Merk Acer Veriton Z4 AIO sebesar Rp98.000.000 (termasuk pajak) sesuai SP2D nomor231391701000855 tanggal 21 Juni 2023.
4. Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp853.242.316 berupa :
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap AC Split sebesar Rp565.570.316 sesuai dengan Berita Acara Penggunaan BMN Kembali Nomor PHN1-PB.03.01-02 tanggal 17 Mei 2022;
  - Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Sepeda Motor sebesar Rp9.395.000 sesuai dengan Berita Acara Penggunaan BMN Kembali Nomor PHN1-PB.04.03-07 tanggal 12 Juni 2023;
  - Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Summersible Pump sebesar Rp229.812.000 sesuai dengan Berita Acara Penggunaan BMN Kembali Nomor PHN.1-PB.04.03-05 tanggal 30 Mei 2023;
  - Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Televisi sebesar Rp48.465.000 sesuai Berita Acara Penggunaan BMN Kembali Nomor PHN1-PB.04.03-03 tanggal 26 Mei 2023.
5. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp199.771.250 berupa:
- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke bawah) sebesar Rp168.871.250 sesuai Berita Acara Reklasifikasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Nomor PHN.1-PB.04.01-09 tanggal 27 Juli 2023;
  - Reklasifikasi Masuk berupa Server sebesar Rp30.900.000 sesuai Berita Acara Reklasifikasi Barang Milik Negara Nomor PHN.1-PB.03.01-52 tanggal 29 November 2023.
6. Transfer Masuk sebesar Rp409.738.000 berupa:
- Transfer Masuk dari Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa 1 buah Meja Rapat sebesar Rp9.988.000 sesuai Berita Acara Transfer Keluar BMN Nomor PPH.1-PB.05.05-15 tanggal 02 Agustus 2023;
  - 10 Buah Laptop sebesar Rp399.750.000 dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia sesuai dengan Berita Acara Nomor HKI.1-PB.02.01-2225 tanggal 02 November 2023

Mutasi kurang pada Peralatan dan mesin sebesar Rp1.009.732.360 berupa :

1. Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp 430.984.260 berupa :
  - Sepeda motor sebesar Rp107.382.000 sesuai Berita Acara Penghentian BMN dari Penggunaan Nomor PHN.1-PB.05.05-02 tanggal 12 Juni 2023;
  - Penghentian Aset dari Penggunaan berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) sebesar Rp198.680.260 sesuai dengan Berita Acara Reklasifikasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Nomor PHN.1-PB.04.01-09 tanggal 27 Juli 2023;
  - Penghentian Aset dari Penggunaan berupa Micro Bus (Penumpang 15 s.d 29 Orang) sebesar Rp124.922.000 sesuai dengan Berita Acara Penghentian BMN Dari Penggunaan Nomor PHN.1-PB.03.01-51 tanggal 29 November 2023.
2. Transfer keluar dari Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional ke Kantor Wilayah Divisi Administrasi sebesar Rp378.976.850. Berikut rincian Kantor Wilayah yang menerima transfer keluar :
  - Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah berupa Laptop dan Alat Podcast sebesar Rp24.450.768 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-03 tanggal 27 Januari 2023 dan Berita Acara Serah Terima Peralatan dan Mesin (Alat Podcast) Nomor PHN.1-PB.03.01-25 tanggal 11 Mei 2023;
  - Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara berupa Laptop sebesar Rp11.795.000 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-14 tanggal 01 Februari 2023;
  - Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan berupa Laptop dan Alat Podcast sebesar Rp24.450.768 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-13 tanggal 01 Februari 2023 dan

- Berita Acara Serah Terima Peralatan dan Mesin (Alat Podcast) Nomor PHN.1-PB.03.01-25 tanggal 17 April 2023;
- Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat berupa Laptop sebesar Rp11.795.000 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-10 tanggal 01 Februari 2023;
  - Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau berupa Laptop dan Alat Podcast sebesar Rp24.450.768 sesuai BAST Peralatan dan Mesin Nomor PHN.1-PB.03.01-03 tanggal 28 Februari 2023;
  - Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan berupa Laptop sebesar Rp11.795.000 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-01 tanggal 27 Januari 2023;
  - Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat berupa Laptop sebesar Rp11.795.000 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-04 tanggal 27 Januari 2023;
  - Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan berupa Laptop dan Alat Podcast sebesar Rp24.450.768 sesuai BAST Peralatan dan Mesin Nomor PHN.1-PB.03.01-22 tanggal 13 Maret 2023;
  - Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali berupa Laptop dan Alat Podcast sebesar Rp24.450.768 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-09 tanggal 01 Februari 2023 dan BAST Peralatan dan Mesin (Alat Podcast) Nomor PHN.1-PB.03.01-26 tanggal 05 Mei 2023;
  - Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jambi berupa Laptop sebesar Rp11.795.000 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-11 tanggal 01 Februari 2023;
  - Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu berupa Laptop dan Alat Podcast sebesar Rp24.450.768 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-08 tanggal 01 Februari 2023 dan BAST Peralatan dan Mesin (Alat Podcast) Nomor PHN.1-

PB.03.01-21 tanggal 10 Maret 2023;

- Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta berupa Laptop dan Alat Podcast sebesar Rp24.450.768 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-16 tanggal 16 Februari 2023;
- Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat berupa Laptop dan Alat Podcast sebesar Rp24.450.768 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-06 tanggal 27 Januari 2023 dan BAST Peralatan dan Mesin Nomor PHN.1-PB.03.01-20 tanggal 10 Maret 2023;
- Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung berupa Laptop dan Alat Podcast sebesar Rp24.450.770 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-12 tanggal 01 Februari 2023 dan BAST Peralatan dan Mesin (Alat Podcast) Nomor PHN.1-PB.03.01-31 tanggal 26 Mei 2023;
- Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo berupa Laptop dan Alat Podcast sebesar Rp26.592.632 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-15 tanggal 01 Februari 2023 dan BAST Peralatan dan Mesin (Alat Podcast) Nomor PHN.1-PB.03.01-32 tanggal 12 Juni 2023;
- Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara berupa Laptop dan Alat Podcast sebesar Rp24.450.768 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-02 tanggal 27 Januari 2023 dan BAST Peralatan dan Mesin (Alat Podcast) Nomor PHN.1-PB.03.01-23 tanggal 20 Mei 2023;
- Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau berupa Laptop dan Alat Podcast sebesar Rp24.450.768 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-05 tanggal 27 Januari 2023 dan BAST Peralatan dan Mesin (Alat Podcast) Nomor PHN.1-PB.03.01-24 tanggal 20 Maret 2023;

- Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat berupa Laptop dan Alat Podcast sebesar Rp24.450.768 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-07 tanggal 27 Januari 2023 dan BAST Peralatan dan Mesin (Alat Podcast) Nomor PHN.1-PB.03.01-19 tanggal 28 Februari 2023.
3. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp199.771.250 berupa:
- Sedan sebesar Rp168.871.250 sesuai Berita Acara Reklasifikasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Nomor PHN.1-PB.04.01-09 tanggal 27 Juli 2023;
  - Reklasifikasi Keluar P.C Unit sebesar Rp30.900.000 sesuai dengan Berita Acara Reklasifikasi Barang Milik Negara Nomor PHN.1-PB.03.01-52 tanggal 29 November 2023.

Gedung dan  
Bangunan  
Rp62.954.462.581

### C.9 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp62.954.462.581 dan Rp59.683.830.714. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>59.683.830.714</b>
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	246.201.096
Pengembangan Melalui KDP	3.071.511.126
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	179.449.000
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai	(226.529.355)
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>62.954.462.581</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(25.623.349.003)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>37.331.113.578</b>

Mutasi tambah pada Gedung dan Bangunan berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang menambah nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.497.161.222 berupa :

1. Pengembangan nilai aset sebesar Rp246.201.096 berupa:
  - Pekerjaan Perbaikan dan Pemasangan Paving Block Kantor BPHN sebesar Rp198.971.096;
  - Pekerjaan Perbaikan Toilet Lt. 3 Kantor BPHN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp47.230.000.



2. Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp3.071.511.126 berupa pekerjaan konstruksi Gedung Annex, Gedung SJDI dan Gedung Induk BPHN sesuai dengan Berita Acara Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Nomor PHN.1-PB.04.01-02 Tanggal 15 Januari 2024;
3. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar Rp179.449.000 sesuai dengan Berita Acara Koreksi Pencatatan dan Perubahan Nilai Aset Nomor PHN.1-PB.04.01-08 tanggal 27 Juli 2023;

Mutasi kurang pada Gedung dan bangunan sebesar Rp179.449.000 berupa :

1. Koreksi Pencatatan Pagar Permanen sesuai dengan Berita Acara Koreksi Pencatatan dan Perubahan Nilai Aset Nomor PHN.1-PB.04.01-08 tanggal 27 Juli 2023;
2. Koreksi atas kelebihan pekerjaan konstruksi renovasi lantai 2 gedung Annex, ruang kerja pimpinan, Gedung SJDI serta ruang kerja pimpinan Gedung induk Kantor badan Pembinaan Hukum Nasional. Koreksi tersebut merupakan hasil tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2023 dan telah disetorkan ke kas negara sesuai dengan NTPN 2A2DE6U8EUGJ5AUI tanggal 2 Mei 2024 sebesar Rp47.080.355.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap Lainnya*  
*Rp1.123.767.442*

### **C.10 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.123.767.442 dan Rp1.088.776.559. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>1.088.776.559</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	206.993.023
Reklasifikasi Masuk	10.000.000
Perolehan Lainnya	18.030.000
Mutasi kurang:	
Transfer keluar	(172.002.140)
Reklasifikasi Keluar	(10.000.000)
Koreksi Pencatatan	(18.030.000)
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>1.123.767.442</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>1.123.767.442</b>

Mutasi tambah pada Aset Tetap Lainnya pada 31 Desember 2023 bertambah sebesar Rp235.023.023 berupa :

1. Pembelian buku perpustakaan (monografi) dan buku lainnya pada Kantor Wilayah sebesar Rp206.993.023 (rincian terlampir);
2. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp10.000.000 di Monografi pada Kanwil Papua atas perbaikan pencatatan kode aset dari buku lainnya ke kode aset monografi;
3. Perolehan lainnya sebesar Rp18.030.000 pada Kanwil Sumatera Utara dikarenakan terjadi kesalahan pencatatan berupa pencatatan yang tidak di detailkan (gelondongan) sehingga dilakukan koreksi pencatatan pada transaksi monografi dan dilakukan input pendetailan pada menu perolehan lainnya.

Mutasi kurang pada Aset Tetap Lainnya berupa:

1. Transfer keluar sebesar Rp172.002.140 berupa buku perpustakaan di Kantor Wilayah dari Divisi Pelayanan Hukum ke Divisi Administrasi.
2. Reklasifikasi keluar sebesar Rp10.000.000 pada Kanwil Papua dikarenakan adanya kesalahan pencatatan kode berupa aset yang seharusnya monografi tetapi tercatat buku lainnya sehingga harus dilakukan reklasifikasi keluar atas kode aset tersebut.
3. Koreksi pencatatan sebesar Rp18.030.000 pada Kanwil Sumatera Utara atas dikarenakan terjadi kesalahan pencatatan berupa pencatatan yang tidak di detailkan (gelondongan) sehingga dilakukan koreksi pencatatan pada transaksi monografi .

Rincian Aset Tetap Lainnya

Periode 31 Desember 2023

No	Satker	Nilai
1	BPHN (Pusat)	1.123.767.442
<b>J U M L A H</b>		<b>1.123.767.442</b>

Rincian pembelian buku

Periode 31 Desember 2023

NO	SATKER	NILAI	NO SPIS	TANGGAL SPIS	KETERANGAN
1	SADAN PEMERINTAH KURUM NASIONAL	3.885.400	231331000012847	27-04-2023	1 Paket Buku Hukum
2	SADAN PEMERINTAH KURUM NASIONAL	3.485.899	231331101001076	10-07-2023	1 Paket Buku Hukum
3	SADAN PEMERINTAH KURUM NASIONAL	6.114.308	23133100001721	28-08-2023	1 Paket Buku Hukum
4	SADAN PEMERINTAH KURUM NASIONAL	6.927.300			
5	SADAN PEMERINTAH KURUM NASIONAL	3.149.200	231331000038807	25-08-2023	1 Paket Buku Hukum
6	SADAN PEMERINTAH KURUM NASIONAL	474.800	231331000041848	20-10-2023	1 Paket Buku Hukum
7	SADAN PEMERINTAH KURUM NASIONAL	3.384.376	231331000040974	18-11-2023	1 Paket Buku Hukum
8	KAWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASIL JAWA BARU	180.000	231331001001087	17-04-2023	Monev
9	KAWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASIL JAWA BARU	3.801.800			
10	KAWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASIL JAWA BARU	1.900.000	23021000000228	01-01-2023	Monev
11	KAWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASIL JAWA TENGAH	3.369.000	23021001000848	31-07-2023	Monev
12	KAWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASIL JAWA TENGAH	11.081.000	23021001000888	31-08-2023	Monev
13	KAWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASIL JAWA TENGAH	870.000	23021001000848	31-07-2023	Monev
14	KAWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASIL SUMATERA UTARA	18.650.000	23041000001389	17-03-2023	Monev
15	KAWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASIL SUMATERA BARAT	4.000.000	230710000000871	10-02-2023	Monev
16	KAWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASIL	4.600.000	23031000000788	25-05-2023	Monev
17	KAWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASIL	4.280.000	23071000000000	14-02-2023	Monev
18	KAWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASIL Lampung	347.000	23071000000000	31-03-2023	Buku Lainnya
19	KAWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASIL Lampung	4.622.000	23071000000000	25-07-2023	Monev
20	KAWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASIL Sumatera Tengah	3.300.000	23041001000880	10-03-2023	Buku Lainnya
21	KAWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASIL Sumatera Selatan	14.998.500	23041000000000	10-03-2023	Monev
22	KAWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASIL Sumatera Timur	9.000.000	23041001000862	21-02-2023	Monev
23	KAWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASIL Sumatera Utara	1.790.000	23041000000000	10-03-2023	Monev
24	KAWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASIL	19.000.000	23031000000000	18-04-2023	Monev
25	KAWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASIL TENGGAH	11.000.000	23031001001187	31-08-2023	Monev

NO	SAKSI	NILA	NO SPIS	TANGGAL SPIS	KETERANGAN
26	KARSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA	5.193.492	2023/10/02/042	27-01-2023	Managref
27	KARSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA	5.154.880	2023/10/02/117	13-08-2023	Managref
28	KARSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BERGOLONG	5.280.000	2023/10/02/124	20-08-2023	Managref
29	KARSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BERGOLONG DELTUNG	2.980.000	2023/10/02/062	23-08-2023	Managref
30	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN MALUKU	5.947.000	2023/10/02/056	17-08-2023	Managref
31	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	12.000.000	2023/10/02/182	20-08-2023	Buku Lainnya
32	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	3.13.488	2023/10/02/129	20-07-2023	Managref
33	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	1.280.001	2023/10/02/080	22-11-2023	Managref
<b>J U M L A H</b>					<b>295.983.825</b>

*Rincian Transfer Keluar  
Periode 31 Desember 2023*

No	Saksi Penerima	Jenis Barang	Saksi Perantara	Jumlah
1	Karsi DKJ Jember (Divisi Pelayanan Hukum)	Managref	Karsi DKJ Jember (Divisi Administrasi)	3.891.000
2	Karsi Jember Barat (Divisi Pelayanan Hukum)	Managref	Karsi Jember Barat (Divisi Administrasi)	1.500.000
3	Karsi Jember Tengah (Divisi Pelayanan Hukum)	Managref	Karsi Jember Tengah (Divisi Administrasi)	30.000.000
4	Karsi Sumbersari Utara (Divisi Pelayanan Hukum)	Managref	Karsi Sumbersari Utara (Divisi Administrasi)	18.000.000
5	Karsi Sumbersari Barat (Divisi Pelayanan Hukum)	Managref	Karsi Sumbersari Barat (Divisi Administrasi)	4.000.000
6	Karsi Pasa (Divisi Pelayanan Hukum)	Managref	Karsi Pasa (Divisi Administrasi)	8.800.000
7	Karsi Lampung (Divisi Pelayanan Hukum)	Buku Lainnya	Karsi Lampung (Divisi Administrasi)	9.000.000
8	Karsi Kalimantan Timur (Divisi Pelayanan Hukum)	Managref	Karsi Kalimantan Timur (Divisi Administrasi)	9.000.000
9	Karsi Kalimantan Selatan (Divisi Pelayanan Hukum)	Managref	Karsi Kalimantan Selatan (Divisi Administrasi)	14.000.000
10	Karsi Sukawa Utara (Divisi Pelayanan Hukum)	Managref	Karsi Sukawa Utara (Divisi Administrasi)	2.700.000
11	Karsi Bat (Divisi Pelayanan Hukum)	Managref	Karsi Bat (Divisi Administrasi)	18.000.000
12	Karsi Nusa Tenggara Timur (Divisi Pelayanan Hukum)	Managref	Karsi Nusa Tenggara Timur (Divisi Administrasi)	11.000.000
13	Karsi Jember (Divisi Pelayanan Hukum)	Managref	Karsi Jember (Divisi Administrasi)	9.000.000
14	Karsi Bengkulu (Divisi Pelayanan Hukum)	Managref	Karsi Bengkulu (Divisi Administrasi)	9.980.000
15	Karsi Kalimantan Tengah (Divisi Pelayanan Hukum)	Buku Lainnya	Karsi Kalimantan Tengah (Divisi Administrasi)	3.500.000
16	Karsi Bengkulu Selatan (Divisi Pelayanan Hukum)	Managref	Karsi Bengkulu Selatan (Divisi Administrasi)	2.000.000
17	Karsi Puncu Barat (Divisi Pelayanan Hukum)	Buku Lainnya	Karsi Puncu Barat (Divisi Administrasi)	10.000.000
18	Karsi Kapuas Besar (Divisi Pelayanan Hukum)	Managref	Karsi Kapuas Besar (Divisi Administrasi)	8.947.000
19	Karsi Sumbersari Barat (Divisi Pelayanan Hukum)	Managref	Karsi Sumbersari Barat (Divisi Administrasi)	3.000.000
20	Karsi Pasa (Divisi Pelayanan Hukum)	Managref	Karsi Pasa (Divisi Administrasi)	10.000.000
<b>J U M L A H</b>				<b>173.983.980</b>

Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap  
(Rp47.938.133.273)

### C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp47.938.133.273) dan (Rp41.440.019.747).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023.

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
Periode 31 Desember 2023*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	26.605.556.857	22.314.784.270	4.290.772.587
2	Gedung dan Bangunan	62.954.462.581	25.623.349.003	37.331.113.578
3	Aset Tetap Lainnya	1.123.767.442	-	1.123.767.442
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>90.683.786.880</b>	<b>47.938.133.273</b>	<b>42.745.653.607</b>

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada lampiran.

Aset Tak Berwujud  
Rp4.234.323.660

### C.12 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.234.323.660 dan Rp4.184.325.500. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Badan Pembinaan Hukum Nasional berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor dan Ebook JDIHN. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>4.184.325.500</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	49.998.160
Mutasi kurang:	-
Koreksi	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>4.234.323.660</b>
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	(4.184.325.500)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>49.998.160</b>

Mutasi tambah Aset Tak Berwujud sebesar Rp49.998.160 pada periode 31 Desember 2023 adalah berupa pengadaan *Ebook* JDIHN BPHN TA. 2023.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Aset Tak Berwujud periode 31 Desember 2023*

<b>Uraian</b>	<b>Nilai Perolehan</b>
Software Komputer :	
- Software Komputer Aplikasi Absensi BPHN	25.300.000
- Aplikasi Integrasi Website BPHN	382.297.500
- Website BPHN	2.058.528.000
- Aplikasi Akses Penyuluhan dan Bantuan Hukum (Sidbankum)	1.483.830.000
- Aplikasi Absensi Berbasis Web	19.140.000
- Aplikasi JDIHN	215.230.000
Aset tak berwujud lainnya (Ebook JDIHN)	49.998.160
<b>Jumlah</b>	<b>4.234.323.660</b>

### **C.13 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya**

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp589.375.493 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya adalah Dana di Rekening Penampungan Kementerian/Lembaga dalam hal ini adalah Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang merupakan rekening lain-lain milik BUN untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan

sampai dengan akhir tahun anggaran yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya (sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada Tahun Anggaran).

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada periode 31 Desember 2023 sebesar Rp589.375.493 adalah Dana pada rekening penampungan untuk kontrak sebagai berikut:

No	Kantor (Pilih dan Nama Pekerjaan)	Tanggal perkiraan kerja	Rupiah Kontes	Jadwal Kerja Persewaan dan Jumlah			Jenis Pekerjaan
				Tanggal	Jumlah	Rupiah	
1	Pekerjaan Perawatan AC dan Instalasi Pendingin ruangan Pabrik Gula Grogol, Teras Pabrik SPN TA.2021	02 Januari 21 2021	Rp 22.250,00	Tanggal 1	20-Apr-21	Rp 22.250,00	SPN
				Tanggal 2	20-Apr-21	Rp 22.250,00	SPN
				Tanggal 3	19-Apr-21	Rp 22.250,00	SPN
				Tanggal 4	20-Apr-21	Rp 22.250,00	SPN Persewaan alat kerja 15 \$1400 SPN Persewaan alat kerja 15 \$1400
2	Pekerjaan Perawatan AC dan AC Cetakan di CT Teras Grogol Pabrik SPN TA.2021	02 Januari 21 2021	Rp 17.740,00	Tanggal 1	20-Apr-21	Rp 17.740,00	SPN
				Tanggal 2	20-Apr-21	Rp 17.740,00	SPN Persewaan alat kerja 15 \$1400 SPN Persewaan alat kerja 15 \$1400
3	Pekerjaan Perawatan AC dan AC Pemeriksaan di Teras SPN TA.2021	02 Januari 21 2021	Rp 10.490,00	Tanggal 1	20-Apr-21	Rp 10.490,00	SPN
				Tanggal 2	20-Apr-21	Rp 10.490,00	SPN Persewaan alat kerja 15 \$1400 SPN Persewaan alat kerja 15 \$1400
4	Pekerjaan Perawatan AC dan AC Instansi SPN, Cetak dan Instalasi Sistem dan Instalasi SPN TA. 2021	02 Januari 21 2021	Rp 10.520,00	Tanggal 1	20-Apr-21	Rp 10.520,00	SPN
				Tanggal 2	20-Apr-21	Rp 10.520,00	SPN Persewaan alat kerja 15 \$1400 SPN Persewaan alat kerja 15 \$1400
5	Pekerjaan Perawatan AC dan AC Pemeriksaan dan Instalasi Teras SPN TA.2021	02 Januari 21 2021	Rp 41.300,00	Tanggal 1	20-Apr-21	Rp 41.300,00	SPN
				Tanggal 2	20-Apr-21	Rp 41.300,00	SPN
				Tanggal 3	19-Apr-21	Rp 41.300,00	SPN
				Tanggal 4	20-Apr-21	Rp 41.300,00	SPN Persewaan alat kerja 15 \$1400 SPN Persewaan alat kerja 15 \$1400
6	Pekerjaan Perawatan AC dan AC Pemeriksaan dan Instalasi Teras SPN TA.2021	02 Januari 21 2021	Rp 17.740,00	Tanggal 1	20-Apr-21	Rp 17.740,00	SPN
				Tanggal 2	20-Apr-21	Rp 17.740,00	SPN
				Tanggal 3	20-Apr-21	Rp 17.740,00	SPN Persewaan alat kerja 15 \$1400 SPN Persewaan alat kerja 15 \$1400
7	Pekerjaan Perawatan AC dan AC Pemeriksaan dan Instalasi Teras Pabrik Gula Grogol dan Instalasi Grogol dan Pabrik Gula SPN TA.2021	02 Januari 21 2021	Rp 18.470,00	Tanggal 1	20-Apr-21	Rp 18.470,00	SPN
				Tanggal 2	20-Apr-21	Rp 18.470,00	SPN Persewaan alat kerja 15 \$1400 SPN Persewaan alat kerja 15 \$1400
				Tanggal 3	20-Apr-21	Rp 18.470,00	SPN
				Tanggal 4	20-Apr-21	Rp 18.470,00	SPN Persewaan alat kerja 15 \$1400 SPN Persewaan alat kerja 15 \$1400
8	Pekerjaan Perawatan AC dan AC Pemeriksaan dan Instalasi Teras Pabrik Gula Grogol dan Instalasi SPN TA.2021	02 Januari 21 2021	Rp 18.470,00	Tanggal 1	20-Apr-21	Rp 18.470,00	SPN
				Tanggal 2	20-Apr-21	Rp 18.470,00	SPN Persewaan alat kerja 15 \$1400 SPN Persewaan alat kerja 15 \$1400
9	Pekerjaan Perawatan AC dan AC Pemeriksaan dan Instalasi Teras Pabrik Gula Grogol dan Instalasi SPN TA.2021	02 Januari 21 2021	Rp 18.470,00	Tanggal 1	20-Apr-21	Rp 18.470,00	SPN
				Tanggal 2	20-Apr-21	Rp 18.470,00	SPN Persewaan alat kerja 15 \$1400 SPN Persewaan alat kerja 15 \$1400
10	Pekerjaan Perawatan AC dan AC Pemeriksaan dan Instalasi Teras Pabrik Gula Grogol dan Instalasi SPN TA.2021	02 Januari 21 2021	Rp 18.470,00	Tanggal 1	20-Apr-21	Rp 18.470,00	SPN
				Tanggal 2	20-Apr-21	Rp 18.470,00	SPN Persewaan alat kerja 15 \$1400 SPN Persewaan alat kerja 15 \$1400
<b>TOTAL</b>						<b>Rp 98.271,40</b>	



### C.14 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp430.984.260 dan Rp853.242.316. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Pembinaan Hukum Nasional serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>853.242.316</b>
Mutasi tambah:	
Penghentian Aset dari Penggunaan	430.984.260
Mutasi kurang:	
Penghapusan BMN karena penjualan	-
Reklasifikasi ke Aset Tetap	(853.242.316)
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>430.984.260</b>
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	(430.984.260)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>-</b>

Mutasi tambah sebesar Rp430.984.260 adalah penghentian BMN dari penggunaan dengan cara merekam aset yang sudah dihentikan penggunaannya secara permanen dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang adalah berupa:

4. Penghentian Aset dari Penggunaan berupa 5 Unit sepeda motor sebesar Rp107.382.000 sesuai dengan Berita Acara Penghentian BMN dari Penggunaan Nomor PHN.1-PB.05.05-02 tanggal 12 Juni 2023;
5. Penghentian Aset dari Penggunaan berupa Micro Bus (Penumpang 15 s.d 29 Orang) sebesar Rp124.922.000 sesuai dengan Berita Acara Penghentian BMN dari Penggunaan Nomor PHN.1-PB.03.01-51 tanggal 29 November 2023;
6. Penghentian Aset dari Penggunaan berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) sebesar Rp198.680.260 sesuai dengan Berita Acara Penghentian BMN dari Penggunaan Nomor PHN.1-PB.03.01-51 tanggal 29 November 2023.

Mutasi kurang pada Aset Lain-lain sebesar Rp853.242.316 adalah berupa penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan aktif, yang terdiri dari :

1. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap AC Split sebesar Rp565.570.316 sesuai dengan Berita Acara Penggunaan BMN Kembali Nomor PHN1-PB.03.01-02 tanggal 17 Mei 2022;
2. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Sepeda Motor sebesar Rp9.395.000 sesuai dengan Berita Acara Penggunaan BMN Kembali Nomor PHN1-PB.04.03-07 tanggal 12 Juni 2023;
3. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Summersible Pump sebesar Rp229.812.000 sesuai dengan Berita Acara Penggunaan BMN Kembali Nomor PHN.1-PB.04.03-05 tanggal 30 Mei 2023;
4. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Televisi sebesar Rp48.465.000 sesuai Berita Acara Penggunaan BMN Kembali Nomor PHN1-PB.04.03-03 tanggal 26 Mei 2023.

Rincian Aset Lain-lain terdapat pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja dan tersaji dalam tabel berikut :

*Rincian Aset Lain-Lain  
Periode 31 Desember 2023*

KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
3020104001	Sepeda Motor	Unit	5	107.382.000
3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Unit	1	124.922.000
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	1	198.680.260
<b>TOTAL</b>			<b>5</b>	<b>430.984.260</b>

### **C.15 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp4.615.309.760) dan (Rp5.037.567.816). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Software	4.184.325.500	(4.184.325.500)	0
Aset Tak Berwujud Lainnya	49.998.160	-	49.998.160
<b>Jumlah</b>	<b>4.184.325.500</b>	<b>(4.184.325.500)</b>	<b>0</b>
Aset Lain-lain	430.984.260	(430.984.260)	0
<b>Jumlah</b>	<b>4.615.309.760</b>	<b>(4.615.309.760)</b>	<b>0</b>

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari KPPN Rp0

**C.16 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang muka dari KPPN terdapat pada Kantor Wilayah dan Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran (Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kantor wilayah) adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran Laporan Keuangan ini.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp687.628.955

**C.17 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp687.628.955 dan Rp107.413.285. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2022 pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional

sebesar Rp107.413.285 telah dibayarkan pada bulan Januari dan Februari Tahun Anggaran 2023. Rincian pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2022 tersaji sebagai berikut:

NO	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Utang atas tagihan Listrik Bulan Desember 2022 dengan nomor ID 547100163555	67,159,197	Dibayarkan pada tanggal 18 Januari 2023 sesuai SP2D Nomor 231391303000195
2	Utang atas tagihan Listrik Bulan Desember 2022 dengan nomor ID 547100717100 dan ID 547102931079	39,189,068	Dibayarkan pada tanggal 18 Januari 2023 sesuai SP2D Nomor 231391303000195
3	Utang atas tagihan telepon Bulan Desember 2022	1,065,020	Dibayarkan pada tanggal 06 Februari 2023 sesuai SP2D Nomor 231391303001082
<b>Jumlah Total</b>		<b>107,413,285</b>	

Utang Pihak Ketiga periode 31 Desember 2023 terdapat pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja. Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp687.628.955 berupa tagihan listrik dan telepon Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional 2024 periode 31 Desember 2023 yang baru diterima tagihannya pada bulan Januari 2024 serta pengajuan BAST RPATA untuk SPM pembayaran bulan Desember 2023 yang pembayarannya dilanjutkan pada tahun 2024. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga tersaji sebagai berikut :

*Rincian Utang kepada Pihak Ketiga  
Periode 31 Desember 2023*

NO	Satker	Jumlah	Keterangan
1	BPHN	589.375.493	Pengajuan BAST RPATA untuk SPM pembayaran Desember 2023 yang akan dilanjutkan pembayaran/ SP2D di 2024
		59.552.282	Utang atas tagihan Listrik Bulan Desember 2023 dengan nomor ID 547100163555
		37.728.322	Utang atas tagihan Listrik Bulan Desember 2023 dengan nomor ID 547100717100 dan ID 547102931079
		972.858	Utang atas tagihan telepon Bulan Desember 2023
<b>Jumlah</b>		<b>687.628.955</b>	

Utang pihak ketiga pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2022. Hal ini disebabkan karena adanya BAST RPATA yang dibayarkan pada tahun 2024.

Utang Yang Belum  
Ditagihkan Rp0

### **C.18 Utang Yang Belum Ditagihkan**

Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang belum Ditagihkan terdapat pada kantor wilayah dan Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja.

Pendapatan Diterima  
di Muka  
Rp27.547.806

### **C.19 Pendapatan Diterima di Muka**

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp27.547.806 dan Rp9.358.395. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN. Pendapatan Diterima Di Muka pada Periode 31 Desember 2023 sebesar Rp27.547.806 adalah Pendapatan atas sewa kantin BPHN tahun 2023 untuk jangka waktu 2 tahun yang berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 30 September 2025 sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Atas Sebagian Tanah Atau Bangunan Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN1-PB.03.01-34 Tanggal 12 September 2023 sebesar Rp31.514.000 dan sudah diakui sebagai pendapatan sewa periode berjalan untuk waktu 3 Bulan (Oktober s.d Desember 2023) sebesar Rp3.966.194.

Utang Jangka  
pendek lainnya Rp0

### **C.20 Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, Utang jangka pendek lainnya merupakan utang pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara.

Ekuitas  
Rp399.075.137.055

### **C.21 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp399.075.137.055 dan Rp400.237.667.014. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB  
Rp13.324.589

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp13.324.589 dan Rp12.512.140. Pendapatan tersebut terdiri dari:

#### Perbandingan Jumlah Pendapatan 31 desember 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	% Naik (TURUN)
Pendapatan PNB Lainnya	13.324.589	12.512.140	6,49

#### Rincian Pendapatan periode 31 Desember 2023

URAIAN	TH 2023
Pendapatan PNB Lainnya	
- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	13.324.589
- Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	-
- Pendapatan Anggaran Lain-lain	-
<b>Jumlah</b>	<b>13.324.589</b>

Pendapatan LO sebesar Rp13.324.589 terdapat pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional berupa :

1. Pendapatan bukan pajak berupa Pendapatan Sewa Periode berjalan sebesar Rp9.358.395 (Januari s.d September 2023) atas Pendapatan Sewa Kantin BPHN tahun 2021 untuk jangka waktu 2 tahun yang berlaku mulai 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2023 sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Atas Sebagian Tanah Atau Bangunan Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN1-UM.03.06-32 Tanggal 01 Oktober 2021 sebesar Rp24.990.000;
2. Pendapatan bukan pajak berupa Pendapatan Sewa Periode berjalan sebesar Rp3.966.194 (Oktober s.d Desember 2023) atas Pendapatan Sewa Kantin BPHN tahun 2023 untuk jangka waktu 2 tahun yang berlaku 1 Oktober tahun 2023

sampai dengan 30 September 2025 sesuai dengan surat perjanjian sewa atas Sebagian tanah dan atau bangunan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.1-PB.03.01-34 tanggal 12 September 2023 sebesar Rp31.514.000.

Beban Pegawai  
Rp16.789.330.933

## D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp16.789.330.933 dan Rp16.897.721.259. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

### Perbandingan Jumlah Beban Pegawai 31 Desember 2023 dan 2022

JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pegawai	16.789.330.933	16.897.721.259	(0,64)

### Rincian Beban Pegawai Periode 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2023
Beban Gaji Pokok PNS	10.999.399.080
Beban Pembulatan Gaji PNS	168.399
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	719.599.160
Beban Tunj Anak PNS	188.884.068
Beban Tunj. Struktural PNS	354.430.000
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.830.928.000
Beban Tunj. PPh PNS	83.116.726
Beban Tunj. Beras PNS	563.065.500
Beban Uang Makan PNS	1.529.887.000
Beban Tunjangan Umum PNS	146.855.000
Beban Uang Lembur	372.998.000
<b>Jumlah</b>	<b>16.789.330.933</b>

Beban Persediaan  
Rp676.771.180

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 676.771.180 dan Rp618.639.650. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban persediaan terdapat pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja sebesar Rp676.771.180. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan  
Periode 31 Desember 2023*

NO	URAIAN JENIS BEBAN	NAMA SATKER	TH 2023
1	Beban Persediaan Konsumsi	BPHN	676.771.180
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>			<b>676.771.180</b>

*Perbandingan Jumlah Beban Persediaan  
31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	676.771.180	618.639.650	9,40
Beban Persediaan Bahan Baku	-	0	0
Beban Persediaan Lainnya	-	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>676.771.180</b>	<b>618.639.650</b>	<b>9,40</b>

Beban Barang dan Jasa  
Rp72.314.832.432

### D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp72.314.832.432 dan Rp49.519.821.979. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian



Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa  
31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	TH 2023	TH 2022	% Naik (TURUN)
Beban Barang dan Jasa	72.314.832.432	49.519.821.979	46,03

*Rincian Beban Barang dan Jasa  
Periode 31 Desember 2023*

URAIAN	TH 2023
Beban Keperluan Perkantoran	3.910.641.754
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	9.049.500
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	160.392.000
Beban Barang Operasional Lainnya	20.023.000
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	30.202.573
Beban Bahan	5.215.954.056
Beban Honor Output Kegiatan	733.392.000
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.109.604.550
Beban Langganan Listrik	1.307.505.965
Beban Langganan Telepon	13.421.744
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	434.755.870
Beban Jasa Konsultan	55.922.687.179
Beban Sewa	1.346.693.000
Beban Jasa Profesi	842.975.000
Beban Jasa Lainnya	1.257.129.241
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	405.000
<b>Jumlah</b>	<b>72.314.832.432</b>

Dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional terdapat beban Barang dan Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	Jumlah
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	30,202,573
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	405,000
<b>Jumlah</b>	<b>30,607,573</b>

Berdasarkan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal Penggunaan Akun Khusus COVID-19, akun khusus COVID-19 hanya digunakan sampai dengan Semester I Tahun 2023 dan tidak lagi menggunakan akun belanja khusus COVID-19 mulai Semester II Tahun 2023. Pada Triwulan III Tahun 2023, masih terdapat beban barang dan jasa penanganan - COVID-19. Beban Barang dan Jasa penanganan pandemi COVID-19 terdapat pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja. Terhadap beban tersebut tidak dilakukan ralat dan revisi dikhawatirkan akan menurunkan Nilai IKPA Tahun Anggaran 2023.

*Beban Pemeliharaan  
Rp 3.555.957.901*

#### **D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.555.957.901 dan Rp3.354.965.899. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Jumlah Beban Pemeliharaan  
31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	TH 2023	TH 2022	% Naik (TURUN)
Beban Pemeliharaan	3.555.957.901	3.354.965.899	5,99

*Rincian Beban Pemeliharaan  
Periode 31 Desember 2023*

URAIAN	TH 2023
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.875.672.589
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.526.107.812
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	154.177.500
<b>Jumlah</b>	<b>3.555.957.901</b>

*Beban Perjalanan Dinas  
Rp21.979.001.766*

**D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp21.979.001.766 dan Rp14.636.050.265. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Jumlah Beban perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Jumlah Beban Perjalanan Dinas  
31 Desember 2023 dan 2022*

JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas	21.979.001.766	14.636.050.265	50,17

*Rincian Beban Perjalanan Dinas  
Periode 31 Desember 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023
Beban Perjalanan Biasa	15.250.635.227
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.063.953.157
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.180.538.676
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.483.874.706
<b>Jumlah</b>	<b>21.979.001.766</b>

Beban Barang untuk  
Diserahkan kepada  
Masyarakat Rp0

#### **D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Bantuan  
Sosial Rp0

#### **D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 dikarenakan Badan Pembinaan Hukum Nasional bukan merupakan instansi pengelola ataupun penyalur Bantuan Sosial. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

Beban Penyusutan  
dan Amortisasi  
Rp6.001.883.474

#### **D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.001.883.474 dan Rp5.855.601.849. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi  
31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	TH 2023	TH 2022	% Naik (TURUN)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.001.883.474	5.855.601.849	2,50

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi*

*Periode 31 Desember 2023*

<b>URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>TH 2023</b>
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.916.497.334
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.085.386.140
Jumlah Penyusutan	<b>6.001.883.474</b>
Beban Amortisasi Software	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	-
Jumlah Amortisasi	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-
<b>Jumlah</b>	<b>6.001.883.474</b>

Terdapat perbedaan nilai Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Laporan Operasional dengan Laporan Penyusutan Barang Intrakomptabel sebesar Rp55.740.920. Pada Laporan Operasional, nilai Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp4.085.386.140 sedangkan pada Laporan Penyusutan Barang Intrakomptabel adalah sebesar Rp4.141.127.060 hal ini dikarenakan adanya koreksi pencatatan pagar batas permanen dan koreksi Nilai bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen BPHN yang menyebabkan adanya Penyusutan Transaksional sebesar Rp55.740.920.

*Beban Penyisihan  
Piutang Tak tertagih  
Rp295.744*

#### **D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp295.744 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	% Naik (TURUN)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	295.744	-	

*Surplus dari Kegiatan  
Non Operasional  
Rp57.511.700*

**D.11 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional  
31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	57.511.700	67.251.520	(14,48)

*Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional  
Periode 31 Desember 2023*

URAIAN	TH 2023
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	26.763.500
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya *)	
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0
- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	30.748.200
- Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya *)	0
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>57.511.700</b>

Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional periode 30 September 2023 sebesar Rp 57.511.700 berupa :

1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar 26.763.500 berupa Lelang kendaraan bermotor roda dua Dalam kondisi rusak berat sesuai risalah lelang nomor 602/28/2023 tanggal 14 November 2023 dan surat setoran NTPN C5EE948VV61M4LKE tanggal 15 November 2023;
2. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu yang terdapat di Kantor Wilayah sebesar Rp30.748.200 dengan rincian sebagai berikut:
  - Pada Kantor Wilayah Jawa Timur sebesar Rp189.200 berupa pengembalian biaya diluar tiket pesawat yang tidak bisa dibayarkan yaitu asuransi penumpang dan biaya pemilihan kursi sesuai NTPN 4D71B0N9VR09DSTG tanggal 16 Maret 2023;
  - Pada Kantor Wilayah Lampung sebesar Rp11.874.000 berupa pengembalian kelebihan belanja transport hasil temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2022 (rincian terlampir);
  - Pada Kantor Wilayah Kalimantan Tengah sebesar Rp4.740.000 berupa pengembalian kelebihan belanja perjalanan dinas tahun anggaran 2022 a.n. Mariani, Erna Sulistyowati dan Musa Ansari Rambe sesuai NTPN 4EAA355DEVP5RFQ3 tanggal 15 Februari 2023;
  - Pada Kantor Wilayah Kalimantan Timur sebesar Rp150.000 berupa pengembalian transport lokal karena adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas nama Santi Mediana Panjaitan Tahun Anggaran 2022 sesuai NTPN 2040D7QLUG4V0QJ2 tanggal 05 September 2023;
  - Pada Kantor Wilayah Bengkulu sebesar Rp11.835.000 berupa pengembalian selisih biaya penginapan perjalanan dinas luar kota sebesar Rp200.000 dan transportasi luar kota tidak sesuai ketentuan sebesar Rp11.635.000 karena adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran 2022 (rincian terlampir);

- Pada Kantor Wilayah Bangka Belitung sebesar Rp1.960.000 berupa pengembalian belanja bantuan hukum tahun anggaran 2022 yang disebabkan karena adanya penjatuhan sanksi pada LBH KUBI dengan penerima bantuan hukum a.n. Siti Husnah sesuai NTPN C834C1JNFLROTBED tanggal 09 Juni 2023;

*\*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2017*

Pos-Pos Luar Biasa  
Rp0

## **D.12 POS-POS LUAR BIASA**

Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Tidak terdapat nilai Pos Luar Biasa baik untuk 31 Desember 2023 dan 2022.

## **E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Ekuitas Awal  
Rp400.237.667.014

### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp400.237.667.014 dan Rp403.693.026.368.

Defisit LO  
(Rp121.247.237.141)

### **E.2 Defisit LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah defisit sebesar (Rp121.247.237.141) dan (Rp90.803.037.241). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.



*Dampak Kumulatif  
Perubahan Kebijakan  
Akuntansi/Kesalahan  
Mendasar  
Rp0*

### **E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar**

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp0.

*Penyesuaian Nilai Aset  
Rp0*

### **E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai  
Persediaan Rp0*

### **E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Atas  
Reklasifikasi Rp0*

### **E.3.4 Koreksi Atas Reklasifikasi**

Koreksi Atas Reklasifikasi mencerminkan koreksi atas nilai reklasifikasi aset yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan aset yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi kurang atas reklasifikasi untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Selisih Revaluasi Aset  
Tetap Rp0*

### **E.3.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Aset Tetap Non  
Revaluasi  
(Rp55.740.920)*

### **E.3.6 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar (Rp55.740.920) dan (Rp49.538.524). Koreksi ini terdapat pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja.

Koreksi yang terjadi pada Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja berupa penyusutan transaksional koreksi pencatatan pagar batas permanen dan koreksi nilai bertambah bangunan gedung Kantor Permanen BPHN. Berikut rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi :

*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi  
Periode 31 Desember 2023*

<b>Jenis Aset Tetap</b>	<b>Nilai Koreksi</b>
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen	(179.449.000)
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen	76.302.780
Koreksi Pencatatan Pagar Permanen	179.449.000
Koreksi Pencatatan Pagar Permanen	(20.561.860)
<b>Jumlah</b>	<b>55.740.920</b>

*Koreksi Lain-lain Rp0*

### **E.3.7 Koreksi Lain-lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

*Rincian Koreksi Lain-Lain 31 Desember 2023*

<b>Jenis Beban</b>	<b>Jumlah Koreksi</b>
Koreksi Lainnya	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Transaksi Antar Entitas  
Rp120.140.448.102*

### **E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp120.140.448.102 dan Rp87.397.216.411. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

*Periode 31 Desember 2023*

<b>Transaksi Antar Entitas</b>	<b>Nilai</b>
Diterima dari Entitas Lain	(89.025.700)
Ditagihkan ke Entitas Lain	120.388.945.868
Transfer Keluar	(509.253.316)
Transfer Masuk	349.781.250
Pengesahan Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>120.140.448.102</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

**E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar (Rp89.025.700) berupa Penerimaan Kembali Belanja barang tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) pada 6 Kantor Wilayah dan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan atas Sewa Kantin serta hasil lelang kendaraan bermotor roda dua pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada Kantor Wilayah Jawa Timur sebesar Rp189.200 berupa pengembalian biaya diluar tiket pesawat yang tidak bisa dibayarkan yaitu asuransi penumpang dan biaya pemilihan kursi sesuai NTPN 4D71B0N9VR09DSTG tanggal 16 Maret 2023;
2. Pada Kantor Wilayah Lampung sebesar Rp11.874.000 berupa pengembalian kelebihan belanja transport hasil temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2022 (rincian terlampir);
3. Pada Kantor Wilayah Kalimantan Tengah sebesar Rp4.740.000 berupa pengembalian kelebihan belanja perjalanan dinas tahun anggaran 2022 a.n. Mariani, Erna Sulistyowati dan Musa Ansari Rambe sesuai NTPN 4EAA355DEVP5RFQ3 tanggal 15 Februari 2023;

4. Pada Kantor Wilayah Kalimantan Timur sebesar Rp150.000 berupa berupa pengembalian transport lokal karena adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas nama Santi Mediana Panjaitan Tahun Anggaran 2022 sesuai NTPN 2040D7QLUG4V0QJ2 tanggal 05 September 2023;
5. Pada Kantor Wilayah Bengkulu sebesar Rp11.835.000 berupa pengembalian selisih biaya penginapan perjalanan dinas luar kota sebesar Rp200.000 dan transportasi luar kota tidak sesuai ketentuan sebesar Rp11.635.000 karena adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran 2022 (rincian terlampir).
6. Pada Kantor Wilayah Bangka Belitung sebesar Rp1.960.000 berupa pengembalian belanja bantuan hukum tahun anggaran 2022 yang disebabkan karena adanya penjatuhan sanksi pada LBH KUBI dengan penerima bantuan hukum a.n. Siti Husnah sesuai NTPN C834C1JNFLROTBED tanggal 09 Juni 2023;
7. Pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional sebesar Rp58.277.500 berupa :
  - Pembayaran Sewa kantin sebesar Rp31.514.000 sesuai NTPN 8777A61QUQTMCOII tanggal 22 Agustus 2023;
  - Hasil Lelang kendaraan bermotor roda dua Dalam kondisi rusak berat sebesar Rp26.763.500 sesuai risalah lelang nomor 602/28/2023 tanggal 14 November 2023 dan surat setoran NTPN C5EE948VV61M4LKE tanggal 15 November 2023.

Sedangkan Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp120.388.945.868 berupa transaksi realisasi belanja pada DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja dan Kantor Wilayah.

*Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)*

*Periode 31 Desember 2023*

<b>Akun</b>	<b>Uraian</b>	<b>Transaksi belanja</b>
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	Rp 16.418.430.384
5111	Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	Rp (2.097.451)
5122	Belanja Lembur	Rp 372.998.000
5211	Belanja Barang Operasional	Rp 4.142.377.202
5212	Belanja Barang Non Operasional	Rp 7.058.971.606
5212	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional	Rp (21.000)
5218	Belanja Barang Persediaan	Rp 879.917.146
5218	Pengembalian Belanja Persediaan	Rp -
5221	Belanja Jasa	Rp 61.162.557.822
5221	Pengembalian Belanja Jasa	Rp (27.825.000)
5231	Belanja Pemeliharaan	Rp 3.435.825.206
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp 22.010.832.804
5241	Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp (31.831.038)
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	Rp -
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 1.394.106.782
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 3.317.712.222
5361	Belanja Modal Lainnya	Rp 256.991.183
<b>Jumlah Total</b>		<b>Rp 120.388.945.868</b>

#### **E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp349.781.250 terdapat pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional berupa:

- Transfer Masuk dari Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa 1 buah Meja Rapat sebesar Rp9.988.000 sesuai Berita Acara Transfer Keluar BMN Nomor PPH.1-PB.05.05-15 tanggal 02 Agustus 2023 dengan penyusutan Transfer Masuk Sebesar (Rp9.988.000) sehingga bersaldo Rp0.
- Transfer Masuk dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa 10 buah Laptop sebesar Rp399.750.000 sesuai Berita Acara Nomor HKI.1-PB.02.01-2225 tanggal 02 November 2023 dengan penyusutan transfer masuk sebesar (Rp49.968.750) sehingga bersaldo Rp349.781.250.

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp509.253.316 berupa buku hukum (monografi) dari Divisi Pelayanan Hukum (DIPA Badan Pembinaan Hukum

Nasional) kepada Divisi Administrasi (DIPA Sekretariat Jenderal) dan Peralatan dan Mesin beserta Akumulasi Penyusutannya dari Kantor badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja ke Kantor Wilayah dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Transfer Keluar  
Periode 31 Desember 2023*

No.	Sektor Pengirim	Jenis Barang	Sektor Penerima	Jumlah
1	Kantor DKI Jakarta (Divisi Pelayanan Hukum)	Manupial	Kantor DKI Jakarta (Divisi Administrasi)	3.891.000
2	Kantor Jawa Barat (Divisi Pelayanan Hukum)	Manupial	Kantor Jawa Barat (Divisi Administrasi)	7.000.000
3	Kantor Jawa Tengah (Divisi Pelayanan Hukum)	Manupial	Kantor Jawa Tengah (Divisi Administrasi)	21.000.000
4	Kantor Sumatera Utara (Divisi Pelayanan Hukum)	Manupial	Kantor Sumatera Utara (Divisi Administrasi)	18.000.000
5	Kantor Sumatera Barat (Divisi Pelayanan Hukum)	Manupial	Kantor Sumatera Barat (Divisi Administrasi)	4.000.000
6	Kantor Riau (Divisi Pelayanan Hukum)	Manupial	Kantor Riau (Divisi Administrasi)	6.000.000
7	Kantor Lampung (Divisi Pelayanan Hukum)	Suku Lainnya	Kantor Lampung (Divisi Administrasi)	5.000.000
8	Kantor Kalimantan Timur (Divisi Pelayanan Hukum)	Manupial	Kantor Kalimantan Timur (Divisi Administrasi)	5.000.000
9	Kantor Kalimantan Selatan (Divisi Pelayanan Hukum)	Manupial	Kantor Kalimantan Selatan (Divisi Administrasi)	14.000.000
10	Kantor Sulawesi Utara (Divisi Pelayanan Hukum)	Manupial	Kantor Sulawesi Utara (Divisi Administrasi)	7.750.000
11	Kantor Bali (Divisi Pelayanan Hukum)	Manupial	Kantor Bali (Divisi Administrasi)	10.000.000
12	Kantor Nusa Tenggara Timur (Divisi Pelayanan Hukum)	Manupial	Kantor Nusa Tenggara Timur (Divisi Administrasi)	11.000.000
13	Kantor Jambi (Divisi Pelayanan Hukum)	Manupial	Kantor Jambi (Divisi Administrasi)	6.000.000
14	Kantor Bengkulu (Divisi Pelayanan Hukum)	Manupial	Kantor Bengkulu (Divisi Administrasi)	8.880.000
15	Kantor Kalimantan Tengah (Divisi Pelayanan Hukum)	Suku Lainnya	Kantor Kalimantan Tengah (Divisi Administrasi)	3.330.000
16	Kantor Bangka Belitung (Divisi Pelayanan Hukum)	Manupial	Kantor Bangka Belitung (Divisi Administrasi)	2.930.000
17	Kantor Papua Barat (Divisi Pelayanan Hukum)	Suku Lainnya	Kantor Papua Barat (Divisi Administrasi)	10.000.000
18	Kantor Kepulauan Riau (Divisi Pelayanan Hukum)	Manupial	Kantor Kepulauan Riau (Divisi Administrasi)	6.947.000
19	Kantor Sulawesi Barat (Divisi Pelayanan Hukum)	Manupial	Kantor Sulawesi Barat (Divisi Administrasi)	3.000.000
20	Kantor Papua (Divisi Pelayanan Hukum)	Manupial	Kantor Papua (Divisi Administrasi)	10.200.340
21	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Peralatan dan Mesin (Lainnya dan Ritel Perkotaan)	Kantor Jawa Tengah (Divisi Administrasi)	21.480.788
22	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Kantor Jawa Tengah (Divisi Administrasi)	2.730.952
23	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Peralatan dan Mesin (Lainnya)	Kantor Sumatera Utara (Divisi Administrasi)	11.780.000
24	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Kantor Sumatera Utara (Divisi Administrasi)	1.474.375
25	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Peralatan dan Mesin (Lainnya dan Ritel Perkotaan)	Kantor Sulawesi Selatan (Divisi Administrasi)	24.480.788
26	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Kantor Sulawesi Selatan (Divisi Administrasi)	2.730.952
27	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Peralatan dan Mesin (Lainnya)	Kantor Sumatera Barat (Divisi Administrasi)	11.780.000
28	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Kantor Sumatera Barat (Divisi Administrasi)	1.474.375
29	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Peralatan dan Mesin (Lainnya dan Ritel Perkotaan)	Kantor Riau (Divisi Administrasi)	24.480.788
30	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Kantor Riau (Divisi Administrasi)	2.730.952

No	Sektor Penerima	Jenis Barang	Sektor Penawar	Jumlah
21	Badan Pertinaan Hutan Nasional	Peralatan dan Mesin Laptop	Korwil Sumatera Selatan (Div. Administrasi)	11.785.000
22	Badan Pertinaan Hutan Nasional	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Korwil Sumatera Selatan (Div. Administrasi)	(1.474.375)
23	Badan Pertinaan Hutan Nasional	Peralatan dan Mesin Laptop	Korwil Kalimantan Barat (Div. Administrasi)	11.785.000
24	Badan Pertinaan Hutan Nasional	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Korwil Kalimantan Barat (Div. Administrasi)	(1.474.375)
25	Badan Pertinaan Hutan Nasional	Peralatan dan Mesin Laptop dan Alat Podaasi	Korwil Kalimantan Selatan (Div. Administrasi)	24.490.768
26	Badan Pertinaan Hutan Nasional	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Korwil Kalimantan Selatan (Div. Administrasi)	(2.739.952)
27	Badan Pertinaan Hutan Nasional	Peralatan dan Mesin Laptop dan Alat Podaasi	Korwil Bali (Div. Administrasi)	24.490.768
28	Badan Pertinaan Hutan Nasional	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Korwil Bali (Div. Administrasi)	(2.739.952)
29	Badan Pertinaan Hutan Nasional	Peralatan dan Mesin Laptop	Korwil Jambi (Div. Administrasi)	11.785.000
30	Badan Pertinaan Hutan Nasional	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Korwil Jambi (Div. Administrasi)	(1.474.375)
31	Badan Pertinaan Hutan Nasional	Peralatan dan Mesin Laptop dan Alat Podaasi	Korwil Bengkulu (Div. Administrasi)	24.490.768
32	Badan Pertinaan Hutan Nasional	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Korwil Bengkulu (Div. Administrasi)	(2.739.952)
33	Badan Pertinaan Hutan Nasional	Peralatan dan Mesin Laptop dan Alat Podaasi	Korwil Kepulauan Riau (Div. Administrasi)	24.490.768
34	Badan Pertinaan Hutan Nasional	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Korwil Kepulauan Riau (Div. Administrasi)	(2.739.952)
35	Badan Pertinaan Hutan Nasional	Peralatan dan Mesin Laptop dan Alat Podaasi	Korwil Nusa Tenggara Barat (Div. Administrasi)	24.490.768
36	Badan Pertinaan Hutan Nasional	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Korwil Nusa Tenggara Barat (Div. Administrasi)	(2.739.952)
37	Badan Pertinaan Hutan Nasional	Peralatan dan Mesin Laptop dan Alat Podaasi	Korwil Bengkulu Selang (Div. Administrasi)	24.490.770
38	Badan Pertinaan Hutan Nasional	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Korwil Bengkulu Selang (Div. Administrasi)	(2.739.952)
39	Badan Pertinaan Hutan Nasional	Peralatan dan Mesin Laptop dan Alat Podaasi	Korwil Gorontalo (Div. Administrasi)	28.962.832
40	Badan Pertinaan Hutan Nasional	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Korwil Gorontalo (Div. Administrasi)	(1.474.375)
41	Badan Pertinaan Hutan Nasional	Peralatan dan Mesin Laptop dan Alat Podaasi	Korwil Maluku Utara (Div. Administrasi)	24.490.768
42	Badan Pertinaan Hutan Nasional	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Korwil Maluku Utara (Div. Administrasi)	(2.739.952)
43	Badan Pertinaan Hutan Nasional	Peralatan dan Mesin Laptop dan Alat Podaasi	Korwil Kepulauan Riau (Div. Administrasi)	24.490.768
44	Badan Pertinaan Hutan Nasional	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Korwil Kepulauan Riau (Div. Administrasi)	(2.739.952)
45	Badan Pertinaan Hutan Nasional	Peralatan dan Mesin Laptop dan Alat Podaasi	Korwil Sulawesi Barat (Div. Administrasi)	24.490.768
46	Badan Pertinaan Hutan Nasional	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Korwil Sulawesi Barat (Div. Administrasi)	(2.739.952)
<b>J U M L A H</b>				<b>586.292.394</b>

### **E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Tidak terdapat Hibah langsung pada DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional.

*Ekuitas*                      *Akhir*  
*Rp399.075.137.055*

### **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp399.075.137.055 dan Rp400.237.667.014.

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**

### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

#### **F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

1. Pada tanggal 02 Januari 2023 Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional melakukan jurnal balik atas pengakuan pendapatan diterima dimuka pada akhir tahun 2022 sebesar Rp9.358.395 (memo penyesuaian disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini);
2. Pada tanggal 18 Januari 2023 Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional telah melakukan pembayaran utang kepada pihak ketiga berupa tagihan listrik kantor BPHN dengan no ID 547100163555 sebesar Rp67.159.197 sesuai SP2D nomor 231391303000195 (sudah dilakukan jurnal balik dan memo penyesuaian disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini);
3. Pada tanggal 18 Januari 2023 Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional telah melakukan pembayaran utang kepada pihak ketiga berupa tagihan listrik kantor BPHN dengan no ID 547100717100 dan ID 547102931079 sebesar Rp39.189.068 sesuai SP2D



nomor 231391303000195 (sudah dilakukan jurnal balik dan memo penyesuaian disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini);

4. Pada tanggal 18 Januari 2023 Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional telah melakukan pembayaran utang kepada pihak ketiga berupa tagihan listrik kantor BPHN dengan no ID 547100717100 dan ID 547102931079 sebesar Rp39.189.068 sesuai SP2D nomor 231391303000195 (sudah dilakukan jurnal balik dan memo penyesuaian disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini);
5. Pada tanggal 06 Februari 2023 Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional telah melakukan pembayaran utang kepada pihak ketiga berupa tagihan telepon kantor BPHN sebesar Rp1.065.020 sesuai SP2D nomor 2313913030001082 (sudah dilakukan jurnal balik dan memo penyesuaian disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini);
6. Terdapat Utang kepada pihak ketiga pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional sebesar Rp687.628.955 berupa Belanja Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp98.253.462 dan Utang kepada pihak lainnya sebesar Rp589.375.493 yang sudah dibuatkan jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2023. Berikut adalah rincian Utang kepada pihak lainnya periode 31 Desember 2023;

NO	Satker	Jumlah	Keterangan
1	BPHN	589.375.493	Pengajuan BAST RPATA untuk SPM pembayaran Desember 2023 yang akan dilanjutkan pembayaran/ SP2D di 2024
		59.552.282	Utang atas tagihan Listrik Bulan Desember 2023 dengan nomor ID 547100163555
		37.728.322	Utang atas tagihan Listrik Bulan Desember 2023 dengan nomor ID 547100717100 dan ID 547102931079
		972.858	Utang atas tagihan telepon Bulan Desember 2023
<b>Jumlah</b>		<b>687.628.955</b>	

7. Pada tanggal 31 Desember 2023 telah dilakukan jurnal atas pengakuan pendapatan diterima dimuka diakhir Desember 2023 atas Sewa Kantin BPHN Tahun 2023 yang bernilai Rp31.514.000 untuk jangka waktu 2 tahun yang berlaku 1 Oktober tahun 2023 sampai dengan 30 September 2025 sesuai dengan surat perjanjian sewa atas Sebagian tanah dan atau bangunan pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.1-PB.03.01-34 tanggal 12 September 2023 sebesar Rp27.547.806;
8. Pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional terdapat Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp589.375.493 yang merupakan Dana di Rekening Penampungan Kementerian/Lembaga dalam hal ini adalah Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang merupakan rekening lain-lain milik BUN untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya (sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada Tahun Anggaran). Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada periode 31 Desember 2023 sebesar Rp589.375.493 adalah Dana pada rekening penampungan untuk kontrak sebagai berikut:

No.	Nomor SPK dan Nama Pekerjaan	Tanggal pelaksanaan	Nilai Kontrak	Jadwal Batas Pembayaran dan Jumlah			Status Pembayaran
				Termin	Tgl	Rp	
1	PHN.FPB.02.01-07/2023 tgl 02 Jan 23 Pekerjaan Perawatan AC Central termasuk Cooling Tower dan Pompa Cooling Tower Kantor BPHN TA. 2023	02 Jans/d 31 Des 23	Rp 28.220.000	Termin 1	20-Apr-23	Rp 32.055.000	SP2D
				Termin 2	21-Jul-23	Rp 32.055.000	SP2D
				Termin 3	19-Oct-23	Rp 32.055.000	SP2D
				Termin 4	31-Dec-23	Rp 32.055.000	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-01-2024
2	PHN.FPB.02.01-06/2023 tgl 02 Jan 23 Pekerjaan Perawatan AC Split, AC Cassette dan AC Floor Standing Kantor BPHN TA. 2023	02 Jans/d 31 Des 23	Rp 67.740.000	Termin 1	21-Jul-23	Rp 33.870.000	SP2D
				Termin 2	31-Dec-23	Rp 33.870.000	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-01-2024
3	PHN.FPB.02.01-09/2023 tgl 02 Jan 23 Perawatan Lift Kantor BPHN TA. 2023	02 Jans/d 31 Des 23	Rp 60.876.840	Termin 1	21-Jul-23	Rp 30.438.420	SP2D
				Termin 2	31-Dec-23	Rp 30.438.420	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-01-2024
4	PHN.FPB.02.01-08/2023 tgl 02 Jan 23 Pengadaan Pemeliharaan Aplikasi Webserver BPHN (Content Management System) dan Subdomain Kantor BPHN TA. 2023	02 Jans/d 31 Des 23	Rp 63.752.850	Termin 1	21-Jul-23	Rp 31.876.425	SP2D
				Termin 2	31-Dec-23	Rp 31.876.425	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-01-2024
5	PHN.FPB.02.01-01/2023 tgl 02 Jan 23 Pengadaan Langganan Internet Kantor BPHN TA. 2023	02 Jans/d 31 Des 23	Rp 17.600.000	Termin 1	20-Apr-23	Rp 104.400.000	SP2D
				Termin 2	21-Jul-23	Rp 104.400.000	SP2D
				Termin 3	19-Oct-23	Rp 104.400.000	SP2D
				Termin 4	31-Dec-23	Rp 104.400.000	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-01-2024
6	PHN.FPB.02.01-23/2023 tgl 01 Mar 23 Pemeliharaan/perawatan aplikasi akses penyuluh dan bantuan hukum (SIDBANKUM) Badan Pembinaan Hukum Nasional TA 2023	01 Mars/d 31 Des 23	Rp 117.070.201	Termin 1	22-Jun-23	Rp 35.151.061	SP2D
				Termin 2	20-Sep-23	Rp 35.151.061	SP2D
				Termin 3	31-Dec-23	Rp 46.868.079	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-01-2024
7	PHN.FPB.02.01-1246/2023 Paket Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Petugas Kebersihan Dalam dan Luar Gedung Non PNS Kantor BPHN TA. 2023	1 Nov s/d 31 Des 23	Rp 318.470.150	Termin 1	20-Dec-23	Rp 159.235.075	SP2D
				Termin 2	31-Dec-23	Rp 159.235.075	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-01-2024
8	PHN.FPB.02.01-1247/2023 Paket Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Petugas Pengamanan Non PNS Kantor BPHN TA. 2023	1 Nov s/d 31 Des 23	Rp 166.873.176	Termin 1	20-Dec-23	Rp 83.436.588	SP2D
				Termin 2	31-Dec-23	Rp 83.436.588	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-01-2024
9	PHN.FPB.02.01-1248/2023 Paket Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Pramubakti Non PNS Kantor BPHN TA. 2023	1 Nov s/d 31 Des 23	Rp 50.955.224	Termin 1	20-Dec-23	Rp 25.477.612	SP2D
				Termin 2	31-Dec-23	Rp 25.477.612	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-01-2024
10	PHN.FPB.02.01-1249/2023 Paket Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Petugas Pengemudi Kantor BPHN TA. 2023	1 Nov s/d 31 Des 23	Rp 83.436.588	Termin 1	20-Dec-23	Rp 41.718.294	SP2D
				Termin 2	31-Dec-23	Rp 41.718.294	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-01-2024
<b>TOTAL</b>						<b>Rp 589.375.493</b>	

Atas pencatatan BAST RPATA untuk kontrak tersebut, menghasilkan saldo Utang Yang Belum ditagihkan pada neraca sebesar Rp589.375.493 yang kemudian dilakukan Jurnal Penyesuaian sehingga menghasilkan Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya dengan nilai yang sama;

9. Pada Kantor Wilayah Kalimantan Tengah terdapat Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar Rp4.740.000. Pengembalian tersebut berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah nomor W.17-25.KP.07.01, W.17-26.KP.07.01, W.17-27.KP.07.01 Tahun 2023 tanggal 4 Januari 2023, menimbang berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor ITJ.KP.07.02-153 tanggal 30 Desember 2022 hal Penerbitan Keputusan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai a.n. Agustina Dayaleluni, S.H., M.H., dkk., Pegawai pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 8 Desember 2022 berdasarkan Surat Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor ITJ.KP.04.01.4-199 tanggal 2 Desember 2022 serta hasil pemeriksaan, Sdri. Erna Sulistyowati, S.H., M.H., NIP. 196512161989032001, Sdr. Mariani, S.H., NIP. 197110271991032002 dan Sdr. Musa Ansari Rambe, S.H., NIP. 199201152020121001, telah terbukti melakukan perbuatan berupa tidak melaksanakan perjalanan dinas secara penuh sesuai surat perintah yang mengakibatkan kelebihan pembayaran perjalanan dinas. Hasil keputusan tersebut yang bersangkutan berkewajiban mengembalikan kelebihan pembayaran perjalanan dinas selama 2 (dua) hari dan disetorkan ke kas negara masing-masing sebesar Rp1.580.000. Atas hasil keputusan telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas Negara berupa Penyetoran kembali Tahun Anggaran Yang Lalu

- (425912) sebesar Rp4.740.000 ke kas negara sesuai NTPN 4EAA355DEVP5RFQ3 tanggal 15 Februari 2023;
10. Pada Kantor Wilayah Bangka Belitung terdapat pengembalian belanja barang Tahun Anggaran Yang Lalu Sejumlah Rp.1.960.000 atas pencairan anggaran bantuan hukum (reimbursement) pada aplikasi SIDBANKUM dengan permohonan Nomor 00028.19.01.PDT.BPHN.2022 tanggal 26 Mei 2022 dan telah dilakukan pembayaran dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 220151301013028 tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp. 2.000.000,00 (Terbilang Dua Juta Rupiah) sudah termasuk pajak. Pengembalian belanja tersebut sehubungan dengan telah keluarnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PHN. 04 - HN.04.03 Tahun 2023 tentang penjatuhan Sanksi Terhadap Organisasi Pemberi Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Untuk Bangsa Indonesia (LBH KUBI) Kepulauan Bangka Belitung.
  11. Pada Kantor Wilayah Sumatera Utara telah dilakukan koreksi pencatatan pada modul aset tetap yang disebabkan karena pencatatan gelondongan atas pencatatan monografi, atas kesalahan pencatatan tersebut kemudian dilakukan pencatatan (input) kembali melalui menu perolehan lainnya pada monografi (didetailkan), atas koreksi pencatatan tersebut pada modul GLP muncul pendapatan perolehan aset lainnya pada Neraca percobaan, pendapatan tersebut bukan merupakan pendapatan yang diterima entitas melainkan dampak dari koreksi pencatatan pada modul aset tetap sehingga perlu dilakukan jurnal koreksi atas pendapatan perolehan lainnya pada modul GLP sebesar Rp18.030.000 (memo penyesuaian terlampir);
  12. Terdapat belanja modal pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional dan 20 Kantor Wilayah sebesar Rp 4.968.810.187, belanja modal tersebut berupa belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp1.394.106.782,

belanja modal Gedung dan bangunan sebesar Rp3.317.712.222 dan belanja modal lainnya sebesar Rp256.991.183. Belanja modal yang terealisasi mempengaruhi penambahan aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya serta aset tidak berwujud pada Neraca sebesar Rp5.249.827.253. Dengan demikian terdapat selisih antara belanja modal dalam LRA dengan kenaikan jumlah aset pada neraca sebesar Rp281.017.066 yang disebabkan karena adanya :

- Penambahan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp853.242.316 berupa Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan (reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap);
- Penambahan nilai peralatan dan mesin berupa Reklasifikasi Masuk Mini Bus dan Server sebesar Rp199.771.250;
- Penambahan nilai peralatan dan mesin berupa Transfer Masuk sebesar Rp409.738.000 yang terdiri dari 1 buah Meja Rapat sebesar Rp9.988.000 dari Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan 10 buah Laptop sebesar Rp399.750.000 dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Pengurangan nilai peralatan dan mesin berupa Penghentian aset dari penggunaan sebesar (Rp430.984.260);
- Pengurangan nilai peralatan dan mesin berupa Reklasifikasi Keluar Sedan dan P.C Unit sebesar (Rp199.771.250);
- Pengurangan nilai peralatan dan mesin berupa Transfer keluar peralatan dan mesin berupa Laptop dan alat Podcast ke 18 Kantor wilayah (Divisi Administasi) sebesar (Rp 378.976.850);
- Pengurangan nilai aset tetap lainnya terkait Transfer Keluar pada 17 Kantor Wilayah berupa

Monografi dan buku lainnya dari Divisi Pelayanan Hukum ke Divisi Administrasi sebesar Rp172.002.140.

13. Pada Kantor Wilayah Lampung terdapat transaksi resiprokal berupa kegiatan bantuan hukum litigasi Rp88.856.600 dengan rincian sebagai berikut:

No	No. SP2D / No. Referensi	Tanggal	Akun	Jumlah	Satker Intraco	Uraian
1	230171303002456	27-04-2023	522131 - Belanja Jasa Konsultan	6.762.000	677516	Bantuan Hukum
2	230171303001729	30-03-2023	522131 - Belanja Jasa Konsultan	490.000	677516	Bantuan Hukum
3	230171303003180	26-05-2023	522131 - Belanja Jasa Konsultan	2.940.000	677516	Bantuan Hukum
4	230171303003788	21-06-2023	522131 - Belanja Jasa Konsultan	3.920.000	677516	Bantuan Hukum
5	230171303001687	30-03-2023	522131 - Belanja Jasa Konsultan	8.820.000	677516	Bantuan Hukum
6	230171303002457	27-04-2023	522131 - Belanja Jasa Konsultan	7.840.000	677516	Bantuan Hukum
7	230171303006687	27-09-2023	522131 - Belanja Jasa Konsultan	5.880.000	677516	Bantuan Hukum
8	230171303004882	28-07-2023	522131 - Belanja Jasa Konsultan	6.860.000	677516	Bantuan Hukum
9	230171303007578	27-10-2023	522131 - Belanja Jasa Konsultan	17.640.000	677516	Bantuan Hukum
10	230171303008694	28-11-2023	522131 - Belanja Jasa Konsultan	1.244.600	677516	Bantuan Hukum
11	230171303008681	28-11-2023	522131 - Belanja Jasa Konsultan	13.720.000	677516	Bantuan Hukum
12	230171303005830	29-08-2023	522131 - Belanja Jasa Konsultan	10.780.000	677516	Bantuan Hukum
13	230171303003179	26-05-2023	522131 - Belanja Jasa Konsultan	1.960.000	677516	Bantuan Hukum
<b>Total</b>				<b>88.856.600</b>		

### **F.3 TINDAK LANJUT TEMUAN**

1. Merujuk Surat Perintah Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: ITJ.KP.04.01-459 tanggal 3 Maret 2023, Tim Inspektorat Jenderal telah melakukan Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Februari 2023 yang dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari, mulai tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan 21 Maret 2023. Terdapat temuan TA 2022 pada Kanwil Lampung khususnya Dipa Badan Pembinaan Hukum Nasional sebesar Rp.15.263.260,-. Adapun sistem pengembalian secara bertahap selama 6 kali pembayaran. Dimulai dari bulan Mei 2023 sd Oktober 2023. Sampai dengan Bulan Desember 2023 ini total pengembalian RP. 11.874.000. Terdapat selisih Rp.3.389.260 yang belum dikembalikan ke negara sampai dengan bulan Desember 2023. Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sampai dengan 31 Desember 2023 (rincian terlampir);
2. Pada Kantor Wilayah Jawa Timur terdapat temuan atas audit Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Temuan tersebut berupa tambahan biaya diluar tiket pesawat yang tidak bisa dibayarkan asuransi penumpang dan biaya pemilihan kursi sebesar Rp189.200. Temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas Negara sesuai hasil laporan audit dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa Penyetoran Tahun Anggaran Yang Lalu (425912) sebesar Rp189.200 ke kas negara sesuai NTPN 4D71B0N9VR09DSTG. Tanggal 16 Maret 2023;
3. Pada Kantor Wilayah Bengkulu terdapat temuan atas audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2022. Temuan tersebut berupa selisih biaya penginapan perjalanan dinas luar kota sebesar Rp200.000 dan transportasi luar kota tidak sesuai ketentuan sebesar Rp11.635.000 dan atas temuan pemeriksaan tersebut



telah ditindak lanjuti melakukan penyetoran ke Kas negara sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.11.835.000 (rincian terlampir);

4. Pada Kantor Wilayah Kalimantan Timur terdapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas audit Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja Barang, dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dan 2023. Temuan tersebut berupa double pembayaran transport atas nama Santi Meidiana Panjaitan sebesar Rp150.000. Temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas Negara sesuai hasil laporan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan berupa Penyetoran Tahun Anggaran Yang Lalu (425912) sebesar Rp150.000 ke kas negara sesuai NTPN 2040DD7QLUG4V0QJ2 tanggal 05 September 2023;
5. Pada Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara terdapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas pemeriksaan Tahun 2023 berupa pengembalian belanja perjalanan dinas karena adanya kelebihan pembayaran penginapan di Rasuna Mantion selama 2 malam dan 3 orang dalam rangka kegiatan evaluasi pembangunan Zona Integritas Tahun 2023 di Jakarta atas nama Marsuki P, Muhammad Saeful Rizzal dan Ilham Rinaldo. Penginapan yang dibayarkan oleh Kanwil Sulawesi Tenggara permalam sebesar Rp650.000 namun harga konfirmasi dari Badan Pemeriksa Keuangan sebesar Rp540.000 sehingga terjadi selisih sebesar Rp110.000 per malam, Atas selisih tersebut diakumulasikan untuk penginapan selama 2 malam dan 3 orang sehingga berjumlah Rp660.000. Atas temuan tersebut telah ditindak lanjuti dengan melakukan penyetoran ke Kas negara sebesar Rp660.000 sesuai NTPN 1A0B152273ULF7BF tanggal 07 Desember 2023.
6. Pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional terdapat temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 berupa:
  1. Terdapat kelebihan/selisih pembayaran iuran BPJS Kesehatan terkait pengadaan Outsourcing tahun

2023 dan telah dilakukan penyetoran ke kas negara sesuai NTPN 9D5EA55DF96JNTN9 tanggal 28 Maret 2024 sebesar Rp12.068.375;

2. Terdapat kelebihan pekerjaan konstruksi renovasi lantai 2 gedung Annex, ruang kerja pimpinan Gedung SJDI serta ruang kerja pimpinan Gedung induk Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional dan telah dilakukan penyetoran ke kas negara sesuai NTPN 2A2DE6U8EUGJ5AUI tanggal 2 Mei 2024 sebesar Rp47.080.355.

Rincian Pengembalian Temuan Inspektorat  
Kantor Wilayah Lampung

No	Tanggal Pengembalian	NTPN	Jumlah
1	09 May 2023	F8EA648VV5FK5TTE	Rp 140.000
2	04 May 2023	5241D55DF01RA609	Rp 231.000
3	04 May 2023	81F7D6U8EL6K46MH	Rp 210.000
4	04 May 2023	F7F9848VV5FET75E	Rp 210.000
5	09 May 2023	E77E23CIFAT7OU73	Rp 210.000
6	04 May 2023	EEC423CIFAT2G7QV	Rp 210.000
7	09 May 2023	D1A9B2G4VGARBUF6	Rp 210.000
8	09 May 2023	FFDFD6U8EL6PCUN5	Rp 210.000
9	04 May 2023	9DC5A55DF01RA87R	Rp 210.000
10	04 May 2023	570F948VV5FET8RG	Rp 920.000
11	09 May 2023	7400A8N3EABI6V6H	Rp 210.000
12	04 May 2023	71FED6U8EL6K4JGR	Rp 166.000
13	04 May 2023	BFDEE6U8EL6K4S29	Rp 363.000
14	04 May 2023	FE4FD6U8EL6K4SLL	Rp 446.000
15	09 May 2023	EE26061QUQKD00SG	Rp 210.000
16	04 May 2023	509F948VV5FETTH2	Rp 210.000
17	04 May 2023	A05C655DF01RATU7	Rp 258.000
18	04 May 2023	A52648N3EABC UUDL	Rp 210.000
19	09 May 2023	9A03761QUQKD0182	Rp 210.000
20	04 May 2023	5E5398N3EABC UV4P	Rp 210.000
21	04 May 2023	654FD0N9VR5T9VFE	Rp 210.000
22	04 May 2023	A24582G4VGAM3VOI	Rp 223.000
23	20 Jun 2023	9B86048VV5ITTH90	Rp 140.000
24	20 Jun 2023	705FA6U8ELA34LSJ	Rp 210.000
25	20 Jun 2023	ED64D48VV51TTMEU	Rp 168.000
26	20 Jun 2023	2DF2948VV5ITTN62	Rp 363.000
27	20 Jun 2023	04F6B7QLUFSFHQ8K	Rp 446.000
28	20 Jun 2023	A3A9B61QUQNMNQLM	Rp 210.000
29	04 May 2023	B77393CIFAT2H03R	Rp 250.000
30	20 Jun 2023	D062D7QLUFSFHR28	Rp 8.000
31	20 Jun 2023	BD9773CIFB0HGRC D	Rp 223.000
32	02 Agustus 2023	2366B55DF0ANMLOL	Rp 140.000
33	03 Juli 2023	65B460N9VRBRN54S	Rp 213.000
34	02 Agustus 2023	2B3713CIFB5USMB1	Rp 232.000
35	02 Agustus 2023	0EDCE6U8ELFGGMKH	Rp 210.000
36	02 Agustus 2023	576D61JNFM163GCN	Rp 166.000
37	02 Agustus 2023	3AF9148VV5OBAF7A	Rp 364.000
38	02 Agustus 2023	999DC0N9VREPMKJ2	Rp 448.000
39	02 Agustus 2023	F39B361QUQT44L1U	Rp 210.000
40	02 Agustus 2023	7FDD92G4VGJIGLAI	Rp 258.000
41	23 Agustus 2023	0C80448VV5OVLHRE	Rp 258.000
42	12 September 2023	D93E73CIFB9712QB	Rp 258.000
43	02 Agustus 2023	D2A1955DF0ANNLJ3	Rp 690.000
44	02 Agustus 2023	B4C5648VV5OBALS4	Rp 224.000
45	23 Agustus 2023	725CE0N9VRFE1D7G	Rp 220.000
46	12 Oktober 2023	C140F61QUR3CJ9DO	Rp 260.000
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp 11.856.000</b>

Rincian Pengembalian Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  
Atas Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Transport  
Kantor Wilayah Bengkulu

NTPN	Nama	Tanggal Penerimaan	Akun	Biaya Akomodasi dan/atau Transportasi (Rp)
078B76U8ELJ85OD3	Beny Krista	27-SEP-23	425912	250.000
07DF33CIFBCKEQCE	Yatna	27-OCT-23	425912	380.000
0A10D48VV5S1SNBI	Rahmayanti	26-SEP-23	425912	300.000
0D4A23CIB9MI6NB	Hero Herlambang	27-SEP-23	425912	315.000
0E09C0N9VRFUCUF6U	Yudhi Irawan	22-AUG-23	425912	300.000
10D420N9VRIG8PDM	Acep Mulingki	26-SEP-23	425912	345.000
1271761QUR3PLPCI	Sudino	27-OCT-23	425912	300.000
1C51A8N3EAKRIGON	Fajri Alamsyah	21-AUG-23	425912	300.000
208013CIB6ALKKP	Nova Harneli	14-AUG-23	425912	300.000
25A3255DF0EC3OOR	Jisi Nasistiawan	25-SEP-23	425912	310.000
440266U8ELFSCEN3	Firman Dwi P	14-AUG-23	425912	300.000
4AA496U8ELJ85RCV	Ilip Septian	27-SEP-23	425912	290.000
4C6E048VV5UIMBAS	Rusman Eko Putra	11-OCT-23	425912	380.000
59F757QLUG8MLM20	Minarni Snorita Karo Br Sitepu	30-OCT-23	425912	190.000
6AEFC0N9VRIG8P5I	Acep Mulingki	26-SEP-23	425912	190.000
6B35E1JNFM7RKOSF	Faizal Yusuf	27-OCT-23	425912	300.000
798C56U8ELJ4TO2M	Jisi Nasistiawan	25-SEP-23	425912	190.000
7E69755DF0HIL11B	Djodi Siswanto	31-OCT-23	425912	190.000
8E0152G4VGGC7JMQ	Minarni Snorita Karo Br Sitepu	30-OCT-23	425912	340.000
8E90761QUR3V22EM	Djodi Siswanto	31-OCT-23	425912	345.000
8F9707QLUG84AANF	Rusman Eko Putra	11-OCT-23	425912	340.000
980821JNFM7SPD9V	Juli Prihanto	27-OCT-23	425912	190.000
A03E46U8ELM62R55	Yatna	27-OCT-23	425912	300.000
A44251JNFM4RIRJN	Medianto	26-SEP-23	425912	345.000
ACS9A48VV5S1SNJC	Rahmayanti	26-SEP-23	425912	190.000
ACBE87QLUG8IFPRK	Yatna	27-OCT-23	425912	340.000
BEEAE6U8ELJ85V1H	Nopa Herdianti	02-OCT-23	425912	260.000
C823B3CIFBCPR05F	Djodi Siswanto	31-OCT-23	425912	260.000
C93128N3EAR491UH	Djodi Siswanto	31-OCT-23	425912	315.000
D19643CIFBCPV8D	Djodi Siswanto	31-OCT-23	425912	290.000
D5D501JNFM4SLPMF	Acep Mulingki	26-SEP-23	425912	300.000
D96CE0N9VRLJDLT2	Minarni Snorita Karo Br Sitepu	30-OCT-23	425912	380.000
DE16B2G4VGGQ81S8A	Yatna	27-OCT-23	425912	190.000
DF73C3CIB9KCREP	Medianto	26-SEP-23	425912	190.000
E356C55DF0ED6RH1	Medianto	26-SEP-23	425912	190.000
E427548VV5VORRJE	Yatna	27-OCT-23	425912	300.000
E57623CIFB6BRMN7	Christa Stephanie	16-AUG-23	425912	300.000
E9D0F55DF0HIL0E9	Djodi Siswanto	31-OCT-23	425912	310.000
F2DD948VV5UEB2KS	Oliver Sitanggang	06-OCT-23	425912	290.000
F458B3CIFBCPR1MR	Djodi Siswanto	31-OCT-23	425912	290.000
FF92C1JNFM8110BB	Djodi Siswanto	31-OCT-23	425912	250.000
	<b>JUMLAH</b>			<b>11.635.000</b>

Rincian Pengembalian Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  
Atas Biaya Perjalanan Dinas Berupa Biaya Penginapan  
Kantor Wilayah Bengkulu

No.	NTPN	Nama	Tanggal Penerimaan	Akun	Biaya Akomodasi dan/atau Transportasi (Rp)
1	76CF261QUQTFSCIE	Nova Harneli	14-AUG-23	425912	100.000
2	BA1BD48VV5VORMPB	Yatna	27-OCT-23	425912	100.000
		<b>JUMLAH</b>			<b>200.000</b>



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**



# LAMPIRAN- LAMPIRAN

**BPJN NEBAT**



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**



**LAMPIRAN**

**MONSAKTI**



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**



# *LAMPIRAN*

# *KEUANGAN*

**BPJN HEBAT**



**NERACA**  
**TINGKAT ESELON I**  
**PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UNIT ORGANISASI : ( 10 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 28/05/24 9:10 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_es1\_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Piutang Bukan Pajak	59,148,730	0	59,148,730	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(295,744)	0	(295,744)	0.00
<b>PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)</b>	<b>58,852,986</b>	<b>0</b>	<b>58,852,986</b>	<b>0.00</b>
Persediaan	181,076,570	98,063,299	83,013,271	84.65
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>239,929,556</b>	<b>98,063,299</b>	<b>141,866,257</b>	<b>144.67</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	356,165,357,000	356,165,357,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	26,605,556,857	24,758,430,869	1,847,125,988	7.46
Gedung dan Bangunan	62,954,462,581	59,683,830,714	3,270,631,867	5.48
Aset Tetap Lainnya	1,123,767,442	1,088,776,559	34,990,883	3.21
AKUMULASI PENYUSUTAN	(47,938,133,273)	(41,440,019,747)	(6,498,113,526)	15.68
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>398,911,010,607</b>	<b>400,256,375,395</b>	<b>(1,345,364,788)</b>	<b>(0.34)</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Tak Berwujud	4,234,323,660	4,184,325,500	49,998,160	1.19
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	589,375,493	0	589,375,493	0.00
Aset Lain-lain	430,984,260	853,242,316	(422,258,056)	(49.49)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(4,615,309,760)	(5,037,567,816)	422,258,056	(8.38)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>639,373,653</b>	<b>0</b>	<b>639,373,653</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>399,790,313,816</b>	<b>400,354,438,694</b>	<b>(564,124,878)</b>	<b>(0.14)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	687,628,955	107,413,285	580,215,670	540.17
Pendapatan Diterima Dimuka	27,547,806	9,358,395	18,189,411	194.36
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>715,176,761</b>	<b>116,771,680</b>	<b>598,405,081</b>	<b>512.46</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>715,176,761</b>	<b>116,771,680</b>	<b>598,405,081</b>	<b>512.46</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	399,075,137,055	400,237,667,014	(1,162,529,959)	(0.29)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>399,075,137,055</b>	<b>400,237,667,014</b>	<b>(1,162,529,959)</b>	<b>(0.29)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>399,075,137,055</b>	<b>400,237,667,014</b>	<b>(1,162,529,959)</b>	<b>(0.29)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>399,790,313,816</b>	<b>400,354,438,694</b>	<b>(564,124,878)</b>	<b>(0.14)</b>

**NERACA**  
**TINGKAT ESELON I**  
**PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UNIT ORGANISASI : ( 10 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 28/05/24 9:10 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_es1\_komparatif

Keterangan :

FINAL

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT ESELON I**  
**PER 1 JANUARI 2023 (SALDO AWAL)**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013  
UNIT ORGANISASI : 10

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl. Cetak 28/05/2024

lap\_neraca\_percobaan\_sawal\_akrual\_es1 --rekon17

<b>KODE TRANS</b>	<b>KODE PERKIRAAN</b>	<b>NAMA PERKIRAAN</b>	<b>DEBET</b>	<b>KREDIT</b>
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	98,063,299	0
0.0	131111	Tanah	356,165,357,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	24,758,430,869	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	59,683,830,714	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,088,776,559	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	19,957,797,804
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	21,482,221,943
0.0	162151	Software	4,184,325,500	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	853,242,316	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	853,242,316
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	4,184,325,500
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	107,413,285
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	9,358,395
0.0	391111	Ekuitas	0	400,237,667,014
<b>JUMLAH</b>			<b>446,832,026,257</b>	<b>446,832,026,257</b>

# NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : ( 10 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 28/05/24 9:10 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_es1

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115212	Piutang Lainnya	59,148,730	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	295,744
0.0	117111	Barang Konsumsi	181,076,570	0
0.0	131111	Tanah	356,165,357,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	26,605,556,857	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	62,954,462,581	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,123,767,442	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	22,314,784,270
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	25,623,349,003
0.0	162151	Software	4,184,325,500	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	49,998,160	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	589,375,493	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	430,984,260	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	430,984,260
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	4,184,325,500
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	98,253,462
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	589,375,493
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	27,547,806
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	120,388,945,868
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	89,025,700	0
0.0	313211	Transfer Keluar	509,253,316	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	349,781,250
0.0	391111	Ekuitas	0	400,237,667,014
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	55,740,920	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	26,763,500
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	13,324,589
3.0	425912	Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	30,748,200
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	10,999,399,080	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	168,399	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	719,599,160	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	188,884,068	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	354,430,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,830,928,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	83,116,726	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	563,065,500	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,529,887,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	146,855,000	0

# NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 UNIT ORGANISASI : ( 10 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 28/05/24 9:10 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_es1

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	512211	Beban Uang Lembur	372,998,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	3,910,641,754	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,049,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	160,392,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	20,023,000	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	30,202,573	0
3.0	521211	Beban Bahan	5,215,954,056	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	733,392,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,109,604,550	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	1,307,505,965	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	13,421,744	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	434,755,870	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	55,922,687,179	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,346,693,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	842,975,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	1,257,129,241	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	405,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,875,672,589	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,526,107,812	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	15,250,635,227	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,063,953,157	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,180,538,676	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,483,874,706	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,916,497,334	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4,085,386,140	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	676,771,180	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	154,177,500	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	295,744	0
<b>JUMLAH</b>			<b>574,316,145,959</b>	<b>574,316,145,959</b>

Keterangan :

FINAL

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

## TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : ( 10 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 28/05/24 9:10 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_es1

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	120,388,945,868
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	89,025,700	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	26,763,500
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	31,514,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	30,748,200
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	10,999,399,080	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	170,850	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	719,599,160	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	188,884,068	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	354,430,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,832,468,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	83,116,726	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	563,065,500	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,529,887,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	147,410,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	372,998,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,922,710,129	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,049,500	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	160,392,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	20,023,000	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	30,202,573	0
3.0	521211	Belanja Bahan	5,215,975,056	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	733,392,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,109,604,550	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	776,275,800	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	103,641,346	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	1,316,573,626	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	13,513,906	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	434,755,870	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	55,944,487,179	0
3.0	522141	Belanja Sewa	1,346,693,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	849,000,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	1,257,129,241	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	405,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,875,672,589	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34,044,805	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,526,107,812	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

## TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : ( 10 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 28/05/24 9:10 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_es1

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,280,216,265	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,063,953,157	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,180,538,676	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,486,124,706	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,394,106,782	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	3,317,712,222	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	256,991,183	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	2,451
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	1,540,000
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	555,000
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	21,000
3.1	522131	Pengembalian Belanja Jasa Konsultan	0	21,800,000
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	6,025,000
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	29,581,038
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	2,250,000
JUMLAH			120,539,746,057	120,539,746,057

Keterangan :

FINAL

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023  
(dalam rupiah)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013  
**ESELON I** : 10

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Kode Lap : LRA.P.E1.1  
Tanggal : 28/05/24 9:16 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_akun\_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	26,763,500	0	26,763,500	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	20,000,000	31,514,000	0	31,514,000	157.57
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	20,000,000	58,277,500	0	58,277,500	291.39
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	30,748,200	0	30,748,200	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	30,748,200	0	30,748,200	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	20,000,000	89,025,700	0	89,025,700	445.13
	JUMLAH PENDAPATAN	20,000,000	89,025,700	0	89,025,700	445.13



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT ESELON I  
MENURUT WILAYAH / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023  
(dalam rupiah)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013  
**ESELON I** : 10

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Kode Lap : LRA.P.E.3  
Tanggal : 28/05/24 9:15 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_akun\_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
0100	DKI JAKARTA					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	26,763,500	0	26,763,500	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	20,000,000	31,514,000	0	31,514,000	157.57
	JUMLAH PENDAPATAN (0100) - DKI JAKARTA	20,000,000	58,277,500	0	58,277,500	78.78
0500	JAWA TIMUR					
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	189,200	0	189,200	0
	JUMLAH PENDAPATAN (0500) - JAWA TIMUR	0	189,200	0	189,200	0
1200	LAMPUNG					
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	11,874,000	0	11,874,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1200) - LAMPUNG	0	11,874,000	0	11,874,000	0
1400	KALIMANTAN TENGAH					
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,740,000	0	4,740,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1400) - KALIMANTAN TENGAH	0	4,740,000	0	4,740,000	0
1600	KALIMANTAN TIMUR					
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	150,000	0	150,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1600) - KALIMANTAN TIMUR	0	150,000	0	150,000	0
2600	BENGKULU					

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT ESELON I  
MENURUT WILAYAH / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023  
(dalam rupiah)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

Kode Lap : LRA.P.E.3

**ESELON I** : 10

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tanggal : 28/05/24 9:15 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_akun\_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	11,835,000	0	11,835,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2600) - BENGKULU	0	11,835,000	0	11,835,000	0
3000	BANGKA BELITUNG					
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,960,000	0	1,960,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (3000) - BANGKA BELITUNG	0	1,960,000	0	1,960,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN	20,000,000	89,025,700	0	89,025,700	19.7

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT ESELON I  
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023  
(dalam rupiah)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013  
**ESELON I** : 10

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Kode Lap : LRA.P.E1.2  
Tanggal : 28/05/24 9:15 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
0100 409288	DKI JAKARTA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	20,000,000	58,277,500	0	58,277,500	291.39
	JUMLAH PENDAPATAN (0100) - DKI JAKARTA	20,000,000	58,277,500	0	58,277,500	291.39
0500 408759	JAWA TIMUR KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	0	189,200	0	189,200	0
	JUMLAH PENDAPATAN (0500) - JAWA TIMUR	0	189,200	0	189,200	0
1200 408829	LAMPUNG KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	0	11,874,000	0	11,874,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1200) - LAMPUNG	0	11,874,000	0	11,874,000	0
1400 409197	KALIMANTAN TENGAH KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA	0	4,740,000	0	4,740,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1400) - KALIMANTAN TENGAH	0	4,740,000	0	4,740,000	0
1600 408859	KALIMANTAN TIMUR KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	0	150,000	0	150,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1600) - KALIMANTAN TIMUR	0	150,000	0	150,000	0
2600 409177	BENGKULU KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	0	11,835,000	0	11,835,000	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT ESELON I  
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023  
(dalam rupiah)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013  
**ESELON I** : 10

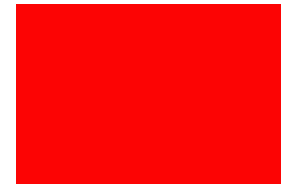
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Kode Lap : LRA.P.E1.2  
Tanggal : 28/05/24 9:15 AM  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN (2600) - BENGKULU	0	11,835,000	0	11,835,000	0
3000 649008	BANGKA BELITUNG KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG	0	1,960,000	0	1,960,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (3000) - BANGKA BELITUNG	0	1,960,000	0	1,960,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN	20,000,000	89,025,700	0	89,025,700	41.627



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013**  
**ESELON I : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 10**

Tgl Data : 20/05/24 12:28 AM  
Tgl Cetak : 28/05/24 9:09 AM  
Halaman : 2  
lap\_lra\_face\_es1\_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>a. Dana Perimbangan</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1. Dana Transfer Umum</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Dana Transfer Khusus</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>b. Dana Insentif Daerah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>c. Dana Keistimewaan DIY</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>d. Dana Otonomi Khusus</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Dana Desa</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Hibah Kepada Daerah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>	<b>121,586,486,000</b>	<b>120,388,945,868</b>	<b>(1,197,540,132)</b>	<b>99</b>	<b>89,011,069,000</b>	<b>87,651,588,906</b>	<b>(1,359,480,094)</b>	<b>98</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013  
**ESELON I** : 10

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 28/05/24 9:16 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_es1

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	11,305,140,000	11,003,117,000	10,999,399,080	0	10,999,399,080	99.97	3,717,920
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	177,000	177,000	170,850	2,451	168,399	95.14	8,601
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	750,000,000	729,500,000	719,599,160	0	719,599,160	98.64	9,900,840
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	198,000,000	198,000,000	188,884,068	0	188,884,068	95.4	9,115,932
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	934,000,000	361,648,000	354,430,000	0	354,430,000	98	7,218,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	911,000,000	1,845,500,000	1,832,468,000	1,540,000	1,830,928,000	99.21	14,572,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	77,900,000	87,500,000	83,116,726	0	83,116,726	94.99	4,383,274
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	603,000,000	568,000,000	563,065,500	0	563,065,500	99.13	4,934,500
511129	Belanja Uang Makan PNS	2,064,480,000	1,673,040,000	1,529,887,000	0	1,529,887,000	91.44	143,153,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	254,000,000	153,200,000	147,410,000	555,000	146,855,000	95.86	6,345,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111</b>	<b>17,097,697,000</b>	<b>16,619,682,000</b>	<b>16,418,430,384</b>	<b>2,097,451</b>	<b>16,416,332,933</b>	<b>98.78</b>	<b>203,349,067</b>
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	455,280,000	383,295,000	372,998,000	0	372,998,000	97.31	10,297,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122</b>	<b>455,280,000</b>	<b>383,295,000</b>	<b>372,998,000</b>	<b>0</b>	<b>372,998,000</b>	<b>97.31</b>	<b>10,297,000</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51</b>	<b>17,552,977,000</b>	<b>17,002,977,000</b>	<b>16,791,428,384</b>	<b>2,097,451</b>	<b>16,789,330,933</b>	<b>98.74</b>	<b>213646067</b>
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,084,906,000	3,933,297,000	3,922,710,129	0	3,922,710,129	99.73	10,586,871
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,529,000	9,131,000	9,049,500	0	9,049,500	99.11	81,500
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	200,640,000	165,792,000	160,392,000	0	160,392,000	96.74	5,400,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	23,010,000	21,120,000	20,023,000	0	20,023,000	94.81	1,097,000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	66,740,000	30,268,000	30,202,573	0	30,202,573	99.78	65,427
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211</b>	<b>3,377,825,000</b>	<b>4,159,608,000</b>	<b>4,142,377,202</b>	<b>0</b>	<b>4,142,377,202</b>	<b>99.59</b>	<b>17,230,798</b>
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	5,490,750,000	5,290,292,000	5,215,975,056	21,000	5,215,954,056	98.59	74,337,944
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	833,180,000	736,996,000	733,392,000	0	733,392,000	99.51	3,604,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,498,431,000	1,123,576,000	1,109,604,550	0	1,109,604,550	98.76	13,971,450
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212</b>	<b>7,822,361,000</b>	<b>7,150,864,000</b>	<b>7,058,971,606</b>	<b>21,000</b>	<b>7,058,950,606</b>	<b>98.71</b>	<b>91,913,394</b>
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	568,149,000	783,553,000	776,275,800	0	776,275,800	99.07	7,277,200
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	100,000,000	105,000,000	103,641,346	0	103,641,346	98.71	1,358,654
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	17,500,000	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218</b>	<b>685,649,000</b>	<b>888,553,000</b>	<b>879,917,146</b>	<b>0</b>	<b>879,917,146</b>	<b>99.03</b>	<b>8,635,854</b>
5221	Belanja Jasa							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013  
**ESELON I** : 10

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 28/05/24 9:16 AM  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_es1

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
522111	Belanja Langganan Listrik	1,430,400,000	1,316,580,000	1,316,573,626	0	1,316,573,626	100	6,374
522112	Belanja Langganan Telepon	42,000,000	13,596,000	13,513,906	0	13,513,906	99.4	82,094
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	439,500,000	435,096,000	434,755,870	0	434,755,870	99.92	340,130
522131	Belanja Jasa Konsultan	56,365,320,000	56,365,320,000	55,944,487,179	21,800,000	55,922,687,179	99.21	442,632,821
522141	Belanja Sewa	1,138,220,000	1,352,033,000	1,346,693,000	0	1,346,693,000	99.61	5,340,000
522151	Belanja Jasa Profesi	1,171,800,000	862,103,000	849,000,000	6,025,000	842,975,000	97.78	19,128,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	238,734,000	1,258,021,000	1,257,129,241	0	1,257,129,241	99.93	891,759
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	276,405,000	1,118,000	405,000	0	405,000	36.23	713,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221</b>	<b>61,102,379,000</b>	<b>61,603,867,000</b>	<b>61,162,557,822</b>	<b>27,825,000</b>	<b>61,134,732,822</b>	<b>99.24</b>	<b>469,134,178</b>
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,156,293,000	1,875,867,000	1,875,672,589	0	1,875,672,589	99.99	194,411
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	34,055,000	34,055,000	34,044,805	0	34,044,805	99.97	10,195
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,295,494,000	1,547,063,000	1,526,107,812	0	1,526,107,812	98.65	20,955,188
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231</b>	<b>2,485,842,000</b>	<b>3,456,985,000</b>	<b>3,435,825,206</b>	<b>0</b>	<b>3,435,825,206</b>	<b>99.39</b>	<b>21,159,794</b>
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,810,868,000	15,487,438,000	15,280,216,265	29,581,038	15,250,635,227	98.47	236,802,773
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,268,010,000	2,103,226,000	2,063,953,157	0	2,063,953,157	98.13	39,272,843
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	472,071,000	2,181,384,000	2,180,538,676	0	2,180,538,676	99.96	845,324
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,827,850,000	2,550,944,000	2,486,124,706	2,250,000	2,483,874,706	97.37	67,069,294
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241</b>	<b>19,378,799,000</b>	<b>22,322,992,000</b>	<b>22,010,832,804</b>	<b>31,831,038</b>	<b>21,979,001,766</b>	<b>98.46</b>	<b>343,990,234</b>
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	170,000,000	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242</b>	<b>170,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52</b>	<b>95,022,855,000</b>	<b>99,582,869,000</b>	<b>98,690,481,786</b>	<b>59,677,038</b>	<b>98,630,804,748</b>	<b>99.04</b>	<b>952064252</b>
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,840,728,000	1,394,698,000	1,394,106,782	0	1,394,106,782	99.96	591,218
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321</b>	<b>1,840,728,000</b>	<b>1,394,698,000</b>	<b>1,394,106,782</b>	<b>0</b>	<b>1,394,106,782</b>	<b>99.96</b>	<b>591,218</b>
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	5,812,000,000	3,348,248,000	3,317,712,222	0	3,317,712,222	99.09	30,535,778
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331</b>	<b>5,812,000,000</b>	<b>3,348,248,000</b>	<b>3,317,712,222</b>	<b>0</b>	<b>3,317,712,222</b>	<b>99.09</b>	<b>30,535,778</b>
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	213,060,000	257,694,000	256,991,183	0	256,991,183	99.73	702,817
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361</b>	<b>213,060,000</b>	<b>257,694,000</b>	<b>256,991,183</b>	<b>0</b>	<b>256,991,183</b>	<b>99.73</b>	<b>702,817</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53</b>	<b>7,865,788,000</b>	<b>5,000,640,000</b>	<b>4,968,810,187</b>	<b>0</b>	<b>4,968,810,187</b>	<b>99.36</b>	<b>31829813</b>



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013  
**ESELON I** : 10

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 28/05/24 9:16 AM  
Halaman : 3  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_es1

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA	120,441,620,000	121,586,486,000	120,450,720,357	61,774,489	120,388,945,868	99.02	1,197,540,132

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19  
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013  
**ESELON I** : 10

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 28/05/24 9:11 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_covid\_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	66,740,000	30,268,000	30,202,573	0	30,202,573	99.78	65,427
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	66,740,000	30,268,000	30,202,573	0	30,202,573	99.78	65,427
5218	Belanja Barang Persediaan							
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	17,500,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	17,500,000	0	0	0	0		0
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	276,405,000	1,118,000	405,000	0	405,000	36.23	713,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	276,405,000	1,118,000	405,000	0	405,000	36.23	713,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	360,645,000	31,386,000	30,607,573	0	30,607,573	97.52	778,427
	JUMLAH BELANJA	360,645,000	31,386,000	30,607,573	0	30,607,573	97.52	778,427

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013  
**ESELON I** : 10

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 28/05/24 9:11 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_es1

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	11,305,140,000	11,003,117,000	10,999,399,080	0	10,999,399,080	99.97	3,717,920
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	177,000	177,000	170,850	2,451	168,399	95.14	8,601
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	750,000,000	729,500,000	719,599,160	0	719,599,160	98.64	9,900,840
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	198,000,000	198,000,000	188,884,068	0	188,884,068	95.4	9,115,932
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	934,000,000	361,648,000	354,430,000	0	354,430,000	98	7,218,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	911,000,000	1,845,500,000	1,832,468,000	1,540,000	1,830,928,000	99.21	14,572,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	77,900,000	87,500,000	83,116,726	0	83,116,726	94.99	4,383,274
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	603,000,000	568,000,000	563,065,500	0	563,065,500	99.13	4,934,500
511129	Belanja Uang Makan PNS	2,064,480,000	1,673,040,000	1,529,887,000	0	1,529,887,000	91.44	143,153,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	254,000,000	153,200,000	147,410,000	555,000	146,855,000	95.86	6,345,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111</b>	<b>17,097,697,000</b>	<b>16,619,682,000</b>	<b>16,418,430,384</b>	<b>2,097,451</b>	<b>16,416,332,933</b>	<b>98.78</b>	<b>203,349,067</b>
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	455,280,000	383,295,000	372,998,000	0	372,998,000	97.31	10,297,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122</b>	<b>455,280,000</b>	<b>383,295,000</b>	<b>372,998,000</b>	<b>0</b>	<b>372,998,000</b>	<b>97.31</b>	<b>10,297,000</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51</b>	<b>17,552,977,000</b>	<b>17,002,977,000</b>	<b>16,791,428,384</b>	<b>2,097,451</b>	<b>16,789,330,933</b>	<b>98.74</b>	<b>213646067</b>
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,084,906,000	3,933,297,000	3,922,710,129	0	3,922,710,129	99.73	10,586,871
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,529,000	9,131,000	9,049,500	0	9,049,500	99.11	81,500
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	200,640,000	165,792,000	160,392,000	0	160,392,000	96.74	5,400,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	23,010,000	21,120,000	20,023,000	0	20,023,000	94.81	1,097,000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	66,740,000	30,268,000	30,202,573	0	30,202,573	99.78	65,427
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211</b>	<b>3,377,825,000</b>	<b>4,159,608,000</b>	<b>4,142,377,202</b>	<b>0</b>	<b>4,142,377,202</b>	<b>99.59</b>	<b>17,230,798</b>
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	5,490,750,000	5,290,292,000	5,215,975,056	21,000	5,215,954,056	98.59	74,337,944
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	833,180,000	736,996,000	733,392,000	0	733,392,000	99.51	3,604,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,498,431,000	1,123,576,000	1,109,604,550	0	1,109,604,550	98.76	13,971,450
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212</b>	<b>7,822,361,000</b>	<b>7,150,864,000</b>	<b>7,058,971,606</b>	<b>21,000</b>	<b>7,058,950,606</b>	<b>98.71</b>	<b>91,913,394</b>
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	568,149,000	783,553,000	776,275,800	0	776,275,800	99.07	7,277,200
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	100,000,000	105,000,000	103,641,346	0	103,641,346	98.71	1,358,654
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	17,500,000	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218</b>	<b>685,649,000</b>	<b>888,553,000</b>	<b>879,917,146</b>	<b>0</b>	<b>879,917,146</b>	<b>99.03</b>	<b>8,635,854</b>
5221	Belanja Jasa							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013  
**ESELON I** : 10

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 28/05/24 9:11 AM  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_es1

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
522111	Belanja Langganan Listrik	1,430,400,000	1,316,580,000	1,316,573,626	0	1,316,573,626	100	6,374
522112	Belanja Langganan Telepon	42,000,000	13,596,000	13,513,906	0	13,513,906	99.4	82,094
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	439,500,000	435,096,000	434,755,870	0	434,755,870	99.92	340,130
522131	Belanja Jasa Konsultan	56,365,320,000	56,365,320,000	55,944,487,179	21,800,000	55,922,687,179	99.21	442,632,821
522141	Belanja Sewa	1,138,220,000	1,352,033,000	1,346,693,000	0	1,346,693,000	99.61	5,340,000
522151	Belanja Jasa Profesi	1,171,800,000	862,103,000	849,000,000	6,025,000	842,975,000	97.78	19,128,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	238,734,000	1,258,021,000	1,257,129,241	0	1,257,129,241	99.93	891,759
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	276,405,000	1,118,000	405,000	0	405,000	36.23	713,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221</b>	<b>61,102,379,000</b>	<b>61,603,867,000</b>	<b>61,162,557,822</b>	<b>27,825,000</b>	<b>61,134,732,822</b>	<b>99.24</b>	<b>469,134,178</b>
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,156,293,000	1,875,867,000	1,875,672,589	0	1,875,672,589	99.99	194,411
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	34,055,000	34,055,000	34,044,805	0	34,044,805	99.97	10,195
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,295,494,000	1,547,063,000	1,526,107,812	0	1,526,107,812	98.65	20,955,188
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231</b>	<b>2,485,842,000</b>	<b>3,456,985,000</b>	<b>3,435,825,206</b>	<b>0</b>	<b>3,435,825,206</b>	<b>99.39</b>	<b>21,159,794</b>
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,810,868,000	15,487,438,000	15,280,216,265	29,581,038	15,250,635,227	98.47	236,802,773
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,268,010,000	2,103,226,000	2,063,953,157	0	2,063,953,157	98.13	39,272,843
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	472,071,000	2,181,384,000	2,180,538,676	0	2,180,538,676	99.96	845,324
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,827,850,000	2,550,944,000	2,486,124,706	2,250,000	2,483,874,706	97.37	67,069,294
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241</b>	<b>19,378,799,000</b>	<b>22,322,992,000</b>	<b>22,010,832,804</b>	<b>31,831,038</b>	<b>21,979,001,766</b>	<b>98.46</b>	<b>343,990,234</b>
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	170,000,000	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242</b>	<b>170,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52</b>	<b>95,022,855,000</b>	<b>99,582,869,000</b>	<b>98,690,481,786</b>	<b>59,677,038</b>	<b>98,630,804,748</b>	<b>99.04</b>	<b>952064252</b>
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,840,728,000	1,394,698,000	1,394,106,782	0	1,394,106,782	99.96	591,218
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321</b>	<b>1,840,728,000</b>	<b>1,394,698,000</b>	<b>1,394,106,782</b>	<b>0</b>	<b>1,394,106,782</b>	<b>99.96</b>	<b>591,218</b>
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	5,812,000,000	3,348,248,000	3,317,712,222	0	3,317,712,222	99.09	30,535,778
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331</b>	<b>5,812,000,000</b>	<b>3,348,248,000</b>	<b>3,317,712,222</b>	<b>0</b>	<b>3,317,712,222</b>	<b>99.09</b>	<b>30,535,778</b>
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	213,060,000	257,694,000	256,991,183	0	256,991,183	99.73	702,817
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361</b>	<b>213,060,000</b>	<b>257,694,000</b>	<b>256,991,183</b>	<b>0</b>	<b>256,991,183</b>	<b>99.73</b>	<b>702,817</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53</b>	<b>7,865,788,000</b>	<b>5,000,640,000</b>	<b>4,968,810,187</b>	<b>0</b>	<b>4,968,810,187</b>	<b>99.36</b>	<b>31829813</b>

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013  
**ESELON I** : 10

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 28/05/24 9:11 AM  
Halaman : 3  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_es1

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA	120,441,620,000	121,586,486,000	120,450,720,357	61,774,489	120,388,945,868	99.02	1,197,540,132

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
MENURUT WILAYAH / JENIS BELANJA  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013  
**ESELON I** : 10

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Kode Lap : LRA.B.E1.3  
Tanggal : 28/05/24 9:11 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_org\_akun\_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
null	null							
51	BELANJA PEGAWAI	17,552,977,000	17,002,977,000	16,791,428,384	2,097,451	16,789,330,933	98.74	213,646,067
52	BELANJA BARANG	95,022,855,000	99,582,869,000	98,690,481,786	59,677,038	98,630,804,748	99.04	952,064,252
53	BELANJA MODAL	7,865,788,000	5,000,640,000	4,968,810,187	0	4,968,810,187	99.36	31,829,813
	JUMLAH BELANJA WILAYAH null	120,441,620,000	121,586,486,000	120,450,720,357	61,774,489	120,388,945,868	99.07	1,197,540,132
	JUMLAH BELANJA	120,441,620,000	121,586,486,000	120,450,720,357	61,774,489	120,388,945,868	99.07	1,197,540,132

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
MENURUT WILAYAH / JENIS BELANJA  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013  
**ESELON I** : 10

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Kode Lap : LRA.B.E1.3  
Tanggal : 28/05/24 9:13 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_org\_akun\_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
null	null							
51	BELANJA PEGAWAI	17,552,977,000	17,002,977,000	16,791,428,384	2,097,451	16,789,330,933	98.74	213,646,067
52	BELANJA BARANG	95,022,855,000	99,582,869,000	98,690,481,786	59,677,038	98,630,804,748	99.04	952,064,252
53	BELANJA MODAL	7,865,788,000	5,000,640,000	4,968,810,187	0	4,968,810,187	99.36	31,829,813
	JUMLAH BELANJA WILAYAH null	120,441,620,000	121,586,486,000	120,450,720,357	61,774,489	120,388,945,868	99.07	1,197,540,132
	JUMLAH BELANJA	120,441,620,000	121,586,486,000	120,450,720,357	61,774,489	120,388,945,868	99.07	1,197,540,132

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
MENURUT WILAYAH / JENIS BELANJA  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013  
**ESELON I** : 10

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Kode Lap : LRA.B.E1.3  
Tanggal : 28/05/24 9:11 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_org\_akun\_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
null	null							
51	BELANJA PEGAWAI	17,552,977,000	17,002,977,000	16,791,428,384	2,097,451	16,789,330,933	98.74	213,646,067
52	BELANJA BARANG	95,022,855,000	99,582,869,000	98,690,481,786	59,677,038	98,630,804,748	99.04	952,064,252
53	BELANJA MODAL	7,865,788,000	5,000,640,000	4,968,810,187	0	4,968,810,187	99.36	31,829,813
	JUMLAH BELANJA WILAYAH null	120,441,620,000	121,586,486,000	120,450,720,357	61,774,489	120,388,945,868	99.07	1,197,540,132
	JUMLAH BELANJA	120,441,620,000	121,586,486,000	120,450,720,357	61,774,489	120,388,945,868	99.07	1,197,540,132



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT ESELON I  
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN  
S.D BULAN 2023**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013  
**UNIT ESELON I** : 10

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Kode Lap : LRA.B.S.1  
Tanggal : 28/05/24 9:14 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_prog\_giat\_es1 --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
<b>01</b>	<b>RUPIAH MURNI</b>							
BB	Program Pembentukan Regulasi							
1611	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	2,737,390,000	2,737,390,000	2,727,796,545	24,438,030	2,703,358,515	98.76	34,031,485
1613	Perencanaan Hukum Nasional	1,597,799,000	1,597,799,000	1,590,887,461	5,079,908	1,585,807,553	99.25	11,991,447
5256	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	4,739,108,000	4,739,108,000	4,657,134,842	2,093,600	4,655,041,242	98.23	84,066,758
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM BB</b>	<b>9,074,297,000</b>	<b>9,074,297,000</b>	<b>8,975,818,848</b>	<b>31,611,538</b>	<b>8,944,207,310</b>	<b>98.747</b>	<b>130,089,690</b>
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
1610	Pendokumentasian Data Hukum dan Peningkatan Integrasi Jaringan Informasi Hukum Nasional	1,702,291,000	1,452,291,000	1,449,551,168	750,000	1,448,801,168	99.76	3,489,832
1612	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	2,770,352,000	3,020,352,000	3,015,669,744	0	3,015,669,744	99.84	4,682,256
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	67,961,087,000	67,961,087,000	67,411,794,388	23,549,500	67,388,244,888	99.16	572,842,112
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM BF</b>	<b>72,433,730,000</b>	<b>72,433,730,000</b>	<b>71,877,015,300</b>	<b>24,299,500</b>	<b>71,852,715,800</b>	<b>99.587</b>	<b>581,014,200</b>
WA	Program Dukungan Manajemen							
1614	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bphn	38,933,593,000	40,078,459,000	39,597,886,209	5,863,451	39,592,022,758	98.79	486,436,242
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM WA</b>	<b>38,933,593,000</b>	<b>40,078,459,000</b>	<b>39,597,886,209</b>	<b>5,863,451</b>	<b>39,592,022,758</b>	<b>98.79</b>	<b>486,436,242</b>
	<b>JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI</b>	<b>120,441,620,000</b>	<b>121,586,486,000</b>	<b>120,450,720,357</b>	<b>61,774,489</b>	<b>120,388,945,868</b>	<b>99.113</b>	<b>1,197,540,132</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>120,441,620,000</b>	<b>121,586,486,000</b>	<b>120,450,720,357</b>	<b>61,774,489</b>	<b>120,388,945,868</b>	<b>99.11</b>	<b>1,197,540,132</b>

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT ESELON I  
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN  
S.D BULAN 2023**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013  
**UNIT ESELON I** : 10

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Kode Lap : LRA.B.S.1  
Tanggal : 28/05/24 9:14 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_prog\_giat\_es1 --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
<b>01</b>	<b>RUPIAH MURNI</b>							
BB	Program Pembentukan Regulasi							
1611	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	2,737,390,000	2,737,390,000	2,727,796,545	24,438,030	2,703,358,515	98.76	34,031,485
1613	Perencanaan Hukum Nasional	1,597,799,000	1,597,799,000	1,590,887,461	5,079,908	1,585,807,553	99.25	11,991,447
5256	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	4,739,108,000	4,739,108,000	4,657,134,842	2,093,600	4,655,041,242	98.23	84,066,758
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM BB</b>	<b>9,074,297,000</b>	<b>9,074,297,000</b>	<b>8,975,818,848</b>	<b>31,611,538</b>	<b>8,944,207,310</b>	<b>98.747</b>	<b>130,089,690</b>
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
1610	Pendokumentasian Data Hukum dan Peningkatan Integrasi Jaringan Informasi Hukum Nasional	1,702,291,000	1,452,291,000	1,449,551,168	750,000	1,448,801,168	99.76	3,489,832
1612	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	2,770,352,000	3,020,352,000	3,015,669,744	0	3,015,669,744	99.84	4,682,256
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	67,961,087,000	67,961,087,000	67,411,794,388	23,549,500	67,388,244,888	99.16	572,842,112
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM BF</b>	<b>72,433,730,000</b>	<b>72,433,730,000</b>	<b>71,877,015,300</b>	<b>24,299,500</b>	<b>71,852,715,800</b>	<b>99.587</b>	<b>581,014,200</b>
WA	Program Dukungan Manajemen							
1614	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bphn	38,933,593,000	40,078,459,000	39,597,886,209	5,863,451	39,592,022,758	98.79	486,436,242
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM WA</b>	<b>38,933,593,000</b>	<b>40,078,459,000</b>	<b>39,597,886,209</b>	<b>5,863,451</b>	<b>39,592,022,758</b>	<b>98.79</b>	<b>486,436,242</b>
	<b>JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI</b>	<b>120,441,620,000</b>	<b>121,586,486,000</b>	<b>120,450,720,357</b>	<b>61,774,489</b>	<b>120,388,945,868</b>	<b>99.113</b>	<b>1,197,540,132</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>120,441,620,000</b>	<b>121,586,486,000</b>	<b>120,450,720,357</b>	<b>61,774,489</b>	<b>120,388,945,868</b>	<b>99.11</b>	<b>1,197,540,132</b>

# LAPORAN OPERASIONAL

## TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : ( 10 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 28/05/24 9:09 AM

Halaman : 1

lap\_lo\_es1

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	13,324,589	12,512,140	812,449	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	13,324,589	12,512,140	812,449	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	13,324,589	12,512,140	812,449	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	16,789,330,933	16,897,721,259	(108,390,326)	-
Beban Persediaan	676,771,180	618,639,650	58,131,530	-
Beban Barang dan Jasa	72,314,832,432	49,519,821,979	22,795,010,453	-
Beban Pemeliharaan	3,555,957,901	3,354,965,899	200,992,002	-
Beban Perjalanan Dinas	21,979,001,766	14,636,050,265	7,342,951,501	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	-
Beban Bunga	0	0	0	-

# LAPORAN OPERASIONAL

## TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : ( 10 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 28/05/24 9:09 AM

Halaman : 2

lap\_lo\_es1

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	6,001,883,474	5,855,601,849	146,281,625	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	295,744	0	295,744	-
Beban Transfer	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>121,318,073,430</b>	<b>90,882,800,901</b>	<b>30,435,272,529</b>	-
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(121,304,748,841)</b>	<b>(90,870,288,761)</b>	<b>(30,434,460,080)</b>	-
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	26,763,500	50,001,111	(23,237,611)	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	26,763,500	50,001,111	(23,237,611)	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	30,748,200	17,250,409	13,497,791	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	30,748,200	17,250,409	13,497,791	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>57,511,700</b>	<b>67,251,520</b>	<b>(9,739,820)</b>	-
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(121,247,237,141)</b>	<b>(90,803,037,241)</b>	<b>(30,444,199,900)</b>	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(121,247,237,141)</b>	<b>(90,803,037,241)</b>	<b>(30,444,199,900)</b>	-

Keterangan :

FINAL

# LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

## TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : ( 10 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 28/05/24 9:09 AM

Halaman : 1

lap\_lpe\_es1

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	400,237,667,014	403,693,026,368	(3,455,359,354)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(121,247,237,141)	(90,803,037,241)	(30,444,199,900)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(55,740,920)	(49,538,524)	(6,202,396)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(55,740,920)	(49,538,524)	(6,202,396)	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	120,140,448,102	87,397,216,411	32,743,231,691	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,162,529,959)	(3,455,359,354)	2,292,829,395	-
EKUITAS AKHIR	399,075,137,055	400,237,667,014	(1,162,529,959)	-

Keterangan :

FINAL



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**



***LAMPIRAN***  
***BARANG MILIK***  
***NEGARA (BMN)***

**BPJN HEBAT**

**DAFTAR BARANG BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

NM ES1 : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
KD ES1 : 01310

TANGGAL : 28-05-2024  
Kode LAP : daftar\_bmn\_bpybds\_es1  
HALAMAN : 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
				TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
Tidak ada data										
JUMLAH										

**DAFTAR BARANG BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

NM ES1 : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
KD ES1 : 01310

TANGGAL : 28-05-2024  
Kode LAP : daftar\_bmn\_bpybds\_es1  
HALAMAN : 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
				TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
Tidak ada data										
JUMLAH										



**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

**UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tanggal : 28/05/24 10:17 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_persediaan\_es1

Kode	Uraian	Jumlah
<b>117111</b>	<b>Barang Konsumsi</b>	
1010301001	Alat Tulis	5,417,400
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	107,800
1010301003	Penjepit Kertas	97,500
1010301004	Penghapus/Korektor	148,600
1010301005	Buku Tulis	21,436,000
1010301006	Ordner Dan Map	44,782,000
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	538,400
1010301010	Alat Perekat	697,400
1010301012	Staples	424,000
1010301013	Isi Staples	371,250
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	1,014,900
1010302001	Kertas HVS	17,741,500
1010302002	Berbagai Kertas	2,771,000
1010302004	Amplop	1,260,600
1010304004	Tinta/Toner Printer	25,517,000
1010304006	USB/Flash Disk	2,008,000
1010304010	Mouse	560,000
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	567,000
1010306010	Batu Baterai	1,121,000
1010314001	Obat Cair (Barang Konsumsi)	2,945,217
1010314002	Obat Padat (Barang Konsumsi)	11,293,516
1010314004	Obat Serbuk/Tepung (Barang Konsumsi)	27,500
1010314005	Obat Gel/ Salep (Barang Konsumsi)	645,503
1010314999	Obat Lainnya (Barang Konsumsi)	4,423,484
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	35,160,000
<b>Jumlah Barang Konsumsi</b>		<b>181,076,570</b>
<b>TOTAL</b>		<b>181,076,570</b>

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG ESELON 1  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER BIDANG BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA ESELON I : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
131111 Tanah

Tanggal : 28/05/2024 10.16.22

Halaman : 1 dari 9

Kode Lap : lap\_crbrmn\_es1

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	TANAH		11,348	356,165,357,000	11,348	356,165,357,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	11,348	356,165,357,000	11,348	356,165,357,000	0	0
<b>TOTAL</b>				<b>356,165,357,000</b>		<b>356,165,357,000</b>		<b>0</b>

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG ESELON 1  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER BIDANG BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA ESELON I : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 28/05/2024 10.16.22

Halaman : 2 dari 9

Kode Lap : lap\_crbrmn\_es1

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	ALAT BESAR		19	2,335,666,500	19	2,335,666,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	18	2,105,854,500	18	2,105,854,500	0	0
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-	1	229,812,000	1	229,812,000	0	0
302	ALAT ANGKUTAN		29	5,297,865,190	29	5,297,865,190	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	35	5,719,454,450	35	5,719,454,450	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	-	1	168,871,250	1	168,871,250	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(1)	(168,871,250)	(1)	(168,871,250)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(7)	(430,984,260)	(7)	(430,984,260)	0	0
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-	1	9,395,000	1	9,395,000	0	0
303	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		10	18,130,164	10	18,130,164	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	10	18,130,164	10	18,130,164	0	0
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA		2,921	7,945,380,716	2,720	7,839,149,716	201	106,231,000
000	Saldo Awal TAYL	-	2,844	7,202,092,468	2,643	7,095,861,468	201	106,231,000
101	Pembelian	-	31	285,931,782	31	285,931,782	0	0
102	Transfer Masuk	-	1	9,988,000	1	9,988,000	0	0
302	Transfer Keluar	-	(13)	(166,666,850)	(13)	(166,666,850)	0	0
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-	58	614,035,316	58	614,035,316	0	0
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		312	3,038,938,172	204	3,018,585,172	108	20,353,000
000	Saldo Awal TAYL	-	312	3,038,938,172	204	3,018,585,172	108	20,353,000
307	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		26	330,083,510	26	330,083,510	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	26	330,083,510	26	330,083,510	0	0
308	ALAT LABORATORIUM		2	28,320,000	2	28,320,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG ESELON 1  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER BIDANG BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA ESELON I : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 28/05/2024 10.16.22  
Halaman : 3 dari 9  
Kode Lap : lap\_crbmn\_es1

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	-	2	28,320,000	2	28,320,000	0	0
310	KOMPUTER		717	7,714,778,985	717	7,714,778,985	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	654	6,419,163,985	654	6,419,163,985	0	0
101	Pembelian	-	71	1,108,175,000	71	1,108,175,000	0	0
102	Transfer Masuk	-	10	399,750,000	10	399,750,000	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	-	1	30,900,000	1	30,900,000	0	0
302	Transfer Keluar	-	(18)	(212,310,000)	(18)	(212,310,000)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(1)	(30,900,000)	(1)	(30,900,000)	0	0
319	PERALATAN OLAH RAGA		1	22,977,620	1	22,977,620	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	1	22,977,620	1	22,977,620	0	0
<b>TOTAL</b>				<b>26,732,140,857</b>		<b>26,605,556,857</b>		<b>126,584,000</b>

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG ESELON 1  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER BIDANG BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA ESELON I : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
133111 Gedung dan Bangunan

Tanggal : 28/05/2024 10.16.22

Halaman : 4 dari 9

Kode Lap : lap\_crbrmn\_es1

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
401	BANGUNAN GEDUNG		18	62,954,462,581	18	62,954,462,581	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	18	59,504,381,714	18	59,504,381,714	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	-	0	246,201,096	0	246,201,096	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	0	179,449,000	0	179,449,000	0	0
208	Pengembangan Melalui KDP	-	0	3,071,511,126	0	3,071,511,126	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	0	(47,080,355)	0	(47,080,355)	0	0
404	TUGU TITIK KONTROL/PASTI		0	0	0	0	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	1	179,449,000	1	179,449,000	0	0
305	Koreksi Pencatatan	-	(1)	(179,449,000)	(1)	(179,449,000)	0	0
<b>TOTAL</b>				<b>62,954,462,581</b>		<b>62,954,462,581</b>		<b>0</b>

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG ESELON 1  
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
 RINCIAN PER BIDANG BARANG  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Tanggal : 28/05/2024 10.16.23

Halaman : 5 dari 9

Kode Lap : lap\_crbrmn\_es1

NAMA ESELON I : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

135121 Aset Tetap Lainnya

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
601	BAHAN PERPUSTAKAAN		27,336	1,123,767,442	27,336	1,123,767,442	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	27,080	1,088,776,559	27,080	1,088,776,559	0	0
101	Pembelian	-	1,683	206,993,023	1,683	206,993,023	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	-	33	10,000,000	33	10,000,000	0	0
112	Perolehan Lainnya	-	145	18,030,000	145	18,030,000	0	0
302	Transfer Keluar	-	(1,497)	(172,002,140)	(1,497)	(172,002,140)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(33)	(10,000,000)	(33)	(10,000,000)	0	0
305	Koreksi Pencatatan	-	(75)	(18,030,000)	(75)	(18,030,000)	0	0
<b>TOTAL</b>				<b>1,123,767,442</b>		<b>1,123,767,442</b>		<b>0</b>

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG ESELON 1  
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
 RINCIAN PER BIDANG BARANG  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA ESELON I : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 136111 Konstruksi Dalam pengerjaan

Tanggal : 28/05/2024 10.16.23

Halaman : 6 dari 9

Kode Lap : lap\_crbrmn\_es1

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
701	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		2	0	2	0	0	0
502	Perolehan/Penambahan KDP	-	1	42,394,200	1	42,394,200	0	0
503	Pengembangan KDP	-	0	3,029,116,926	0	3,029,116,926	0	0
513	Reklasifikasi Keluar KDP	-	(1)	(3,071,511,126)	(1)	(3,071,511,126)	0	0
514	Reklasifikasi Masuk KDP	-	2	3,071,511,126	2	3,071,511,126	0	0
599	Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	-	0	(3,071,511,126)	0	(3,071,511,126)	0	0
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG ESELON 1  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER BIDANG BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023NAMA ESELON I : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
162151 Software

Tanggal : 28/05/2024 10.16.23

Halaman : 7 dari 9

Kode Lap : lap\_crbrmn\_es1

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	ASET TAK BERWUJUD		6	4,184,325,500	6	4,184,325,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	6	4,184,325,500	6	4,184,325,500	0	0
<b>TOTAL</b>				<b>4,184,325,500</b>		<b>4,184,325,500</b>		<b>0</b>



LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG ESELON 1  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER BIDANG BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA ESELON I : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

162191 Aset Tak Berwujud Lainnya

Tanggal : 28/05/2024 10.16.23

Halaman : 8 dari 9

Kode Lap : lap\_crbrmn\_es1

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	ASET TAK BERWUJUD		519	49,998,160	519	49,998,160	0	0
101	Pembelian	-	519	49,998,160	519	49,998,160	0	0
<b>TOTAL</b>				<b>49,998,160</b>		<b>49,998,160</b>		<b>0</b>

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG ESELON 1  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER BIDANG BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Tanggal : 28/05/2024 10.16.23

Halaman : 9 dari 9

Kode Lap : lap\_crbrmn\_es1

NAMA ESELON I : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	ALAT BESAR		0	0	0	0	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	1	229,812,000	1	229,812,000	0	0
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-	(1)	(229,812,000)	(1)	(229,812,000)	0	0
302	ALAT ANGKUTAN		7	430,984,260	7	430,984,260	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	1	9,395,000	1	9,395,000	0	0
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-	(1)	(9,395,000)	(1)	(9,395,000)	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	7	430,984,260	7	430,984,260	0	0
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA		0	0	0	0	0	0
000	Saldo Awal TAYL	-	58	614,035,316	58	614,035,316	0	0
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-	(58)	(614,035,316)	(58)	(614,035,316)	0	0
<b>TOTAL</b>				<b>430,984,260</b>		<b>430,984,260</b>		<b>0</b>

**DAFTAR BMN HILANG YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA - TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

NM ES1 : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
KD ES1 : 01310

TANGGAL : 28-05-2024  
Kode LAP : daftar\_bmn\_dbh\_es1  
HALAMAN : 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KONDISI	STATUS
				TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
Tidak ada data										
JUMLAH										

**DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

NM ES1 : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
KD ES1 : 01310

TANGGAL : 28-05-2024  
Kode LAP : daftar\_bmn\_dbrb\_es1  
HALAMAN : 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							



**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I  
INTRAKOMPTABEL**

**RINCIAN PER KELOMPOK BARANG**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tanggal : 28/05/24 9:53 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap\_bmn\_susut\_intra\_kel\_es1

**UAPA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPA-Es1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED					
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
			SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
<b>131111</b>	<b>Tanah</b>	<b>356,165,357,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356,165,357,000</b>
20101	TANAH PERSIL	356,165,357,000	0	0	0	0	356,165,357,000
<b>132111</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>26,605,556,857</b>	<b>(19,957,797,804)</b>	<b>(2,356,986,466)</b>	<b>0</b>	<b>(22,314,784,270)</b>	<b>4,290,772,587</b>
30103	ALAT BANTU	2,335,666,500	(2,065,059,857)	(257,008,429)	0	(2,322,068,286)	13,598,214
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	5,297,865,190	(4,588,858,021)	227,153,546	0	(4,361,704,475)	936,160,715
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	3,241,700	(2,695,275)	(258,170)	0	(2,953,445)	288,255
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	10,380,492	(10,380,492)	0	0	(10,380,492)	0
30303	ALAT UKUR	4,507,972	(4,507,972)	0	0	(4,507,972)	0
30501	ALAT KANTOR	2,450,558,045	(2,118,188,075)	(89,979,477)	0	(2,208,167,552)	242,390,493
30502	ALAT RUMAH TANGGA	5,388,591,671	(3,461,552,293)	(1,034,355,623)	0	(4,495,907,916)	892,683,755
30601	ALAT STUDIO	2,579,580,592	(2,137,072,711)	(126,375,508)	0	(2,263,448,219)	316,132,373
30602	ALAT KOMUNIKASI	423,081,420	(398,316,420)	(9,642,000)	0	(407,958,420)	15,123,000
30603	PERALATAN PEMANCAR	15,923,160	(15,572,502)	(350,658)	0	(15,923,160)	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	330,083,510	(298,893,746)	(9,153,892)	0	(308,047,638)	22,035,872
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	26,125,000	(6,531,250)	(3,265,625)	0	(9,796,875)	16,328,125
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	2,195,000	(2,195,000)	0	0	(2,195,000)	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	6,465,408,956	(3,891,380,644)	(909,039,312)	0	(4,800,419,956)	1,664,989,000
31002	PERALATAN KOMPUTER	1,249,370,029	(937,445,529)	(140,881,715)	0	(1,078,327,244)	171,042,785
31901	PERALATAN OLAH RAGA	22,977,620	(19,148,017)	(3,829,603)	0	(22,977,620)	0
<b>133111</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>62,954,462,581</b>	<b>(21,482,221,943)</b>	<b>(4,141,127,060)</b>	<b>0</b>	<b>(25,623,349,003)</b>	<b>37,331,113,578</b>
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	62,954,462,581	(21,461,660,083)	(4,161,688,920)	0	(25,623,349,003)	37,331,113,578
40401	TUGU/TANDA BATAS	0	(20,561,860)	20,561,860	0	0	0
<b>135121</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>1,123,767,442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,123,767,442</b>
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	1,123,767,442	0	0	0	0	1,123,767,442
<b>166112</b>	<b>Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan</b>	<b>430,984,260</b>	<b>(853,242,316)</b>	<b>422,258,056</b>	<b>0</b>	<b>(430,984,260)</b>	<b>0</b>
30103	ALAT BANTU	0	(229,812,000)	229,812,000	0	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	430,984,260	(9,395,000)	(421,589,260)	0	(430,984,260)	0
30501	ALAT KANTOR	0	0	0	0	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	(614,035,316)	614,035,316	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>447,280,128,140</b>	<b>(42,293,262,063)</b>	<b>(6,075,855,470)</b>	<b>0</b>	<b>(48,369,117,533)</b>	<b>398,911,010,607</b>

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I  
INTRAKOMPTABEL**

**RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tanggal : 28/05/24 9:55 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap\_bmn\_susut\_intra\_skel\_es1

**UAPA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPA-Es1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED					
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
			SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
<b>131111</b>	<b>Tanah</b>	<b>356,165,357,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356,165,357,000</b>
2010104	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	356,165,357,000	0	0	0	0	356,165,357,000
<b>132111</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>26,605,556,857</b>	<b>(19,957,797,804)</b>	<b>(2,356,986,466)</b>	<b>0</b>	<b>(22,314,784,270)</b>	<b>4,290,772,587</b>
3010302	FEEDER	1,490,098,000	(1,490,098,000)	0	0	(1,490,098,000)	0
3010303	COMPRESSOR	3,210,000	(3,210,000)	0	0	(3,210,000)	0
3010304	ELECTRIC GENERATING SET	118,458,500	(118,458,500)	0	0	(118,458,500)	0
3010305	POMPA	723,900,000	(453,293,357)	(257,008,429)	0	(710,301,786)	13,598,214
3020101	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	2,232,522,700	(2,005,197,521)	96,835,536	0	(1,908,361,985)	324,160,715
3020102	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	2,745,212,490	(2,165,543,500)	32,331,010	0	(2,133,212,490)	612,000,000
3020104	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	88,992,500	(186,979,500)	97,987,000	0	(88,992,500)	0
3020105	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	231,137,500	(231,137,500)	0	0	(231,137,500)	0
3030103	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	3,241,700	(2,695,275)	(258,170)	0	(2,953,445)	288,255
3030205	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	5,506,969	(5,506,969)	0	0	(5,506,969)	0
3030212	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM	4,873,523	(4,873,523)	0	0	(4,873,523)	0
3030301	ALAT UKUR UNIVERSAL	2,417,972	(2,417,972)	0	0	(2,417,972)	0
3030308	ALAT UKUR/PEMBANDING	2,090,000	(2,090,000)	0	0	(2,090,000)	0
3050101	MESIN KETIK	13,486,000	(13,486,000)	0	0	(13,486,000)	0
3050102	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	21,126,980	(21,126,980)	0	0	(21,126,980)	0
3050103	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	309,000,000	(309,000,000)	0	0	(309,000,000)	0
3050104	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	1,020,087,095	(1,004,072,700)	(7,149,597)	0	(1,011,222,297)	8,864,798
3050105	ALAT KANTOR LAINNYA	1,086,857,970	(770,502,395)	(82,829,880)	0	(853,332,275)	233,525,695
3050201	MEUBELAIR	1,907,547,495	(1,549,459,856)	(121,612,195)	0	(1,671,072,051)	236,475,444
3050202	ALAT PENGUKUR WAKTU	92,000	(92,000)	0	0	(92,000)	0
3050203	ALAT PEMBERSIH	22,540,500	(16,561,100)	(1,379,800)	0	(17,940,900)	4,599,600
3050204	ALAT PENDINGIN	1,917,715,551	(758,313,960)	(768,346,351)	0	(1,526,660,311)	391,055,240
3050205	ALAT DAPUR	6,462,500	(6,462,500)	0	0	(6,462,500)	0
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA ( HOME USE )	1,534,233,625	(1,130,662,877)	(143,017,277)	0	(1,273,680,154)	260,553,471
3060101	PERALATAN STUDIO AUDIO	213,439,088	(168,436,438)	(12,857,900)	0	(181,294,338)	32,144,750
3060102	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	2,304,651,504	(1,947,571,273)	(101,967,608)	0	(2,049,538,881)	255,112,623
3060104	PERALATAN CETAK	3,740,000	(3,740,000)	0	0	(3,740,000)	0
3060199	ALAT STUDIO LAINNYA	57,750,000	(17,325,000)	(11,550,000)	0	(28,875,000)	28,875,000
3060201	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	400,081,420	(375,316,420)	(9,642,000)	0	(384,958,420)	15,123,000
3060202	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	9,800,000	(9,800,000)	0	0	(9,800,000)	0
3060206	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	13,200,000	(13,200,000)	0	0	(13,200,000)	0
3060323	PROGRAM INPUT EQUIPMENT	15,923,160	(15,572,502)	(350,658)	0	(15,923,160)	0
3070101	ALAT KEDOKTERAN UMUM	46,959,194	(42,342,794)	(2,308,200)	0	(44,650,994)	2,308,200
3070102	ALAT KEDOKTERAN GIGI	153,891,793	(134,447,293)	(5,261,500)	0	(139,708,793)	14,183,000

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I  
INTRAKOMPTABEL**

**RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPA-Es1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM  
Tanggal : 28/05/24 9:55 AM  
Halaman : 2  
Kode Lap : lap\_bmn\_susut\_intra\_skel\_es1

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED					
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
			SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
3070106	ALAT KEDOKTERAN THT	2,811,234	(2,811,234)	0	0	(2,811,234)	0
3070110	ALAT KEDOKTERAN ANAK	0	0	0	0	0	0
3070111	ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK	92,783,170	(92,783,170)	0	0	(92,783,170)	0
3070118	ALAT KEDOKTERAN RADIOTERAPY	24,657,600	(24,657,600)	0	0	(24,657,600)	0
3070199	ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	8,980,519	(1,851,655)	(1,584,192)	0	(3,435,847)	5,544,672
3080111	ALAT LABORATORIUM UMUM	26,125,000	(6,531,250)	(3,265,625)	0	(9,796,875)	16,328,125
3080804	ALAT LABORATORIUM LISTRIK DAN MEKANIK	2,195,000	(2,195,000)	0	0	(2,195,000)	0
3090402	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	0	0	0	0	0	0
3100101	KOMPUTER JARINGAN	5,500,000	(5,500,000)	0	0	(5,500,000)	0
3100102	PERSONAL KOMPUTER	6,459,908,956	(3,885,880,644)	(909,039,312)	0	(4,794,919,956)	1,664,989,000
3100202	PERALATAN MINI KOMPUTER	226,878,000	(194,634,998)	(22,362,004)	0	(216,997,002)	9,880,998
3100203	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	650,189,150	(402,061,464)	(87,358,186)	0	(489,419,650)	160,769,500
3100204	PERALATAN JARINGAN	372,302,879	(340,749,067)	(31,161,525)	0	(371,910,592)	392,287
3190106	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	22,977,620	(19,148,017)	(3,829,603)	0	(22,977,620)	0
<b>133111</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>62,954,462,581</b>	<b>(21,482,221,943)</b>	<b>(4,141,127,060)</b>	<b>0</b>	<b>(25,623,349,003)</b>	<b>37,331,113,578</b>
4010101	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	59,966,118,647	(20,602,251,267)	(3,998,980,820)	0	(24,601,232,087)	35,364,886,560
4010102	BANGUNAN GUDANG	154,108,000	(67,807,520)	(12,328,640)	0	(80,136,160)	73,971,840
4010106	BANGUNAN KESEHATAN	481,163,934	(191,840,123)	(41,331,973)	0	(233,172,096)	247,991,838
4010108	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	1,422,910,000	(318,161,558)	(57,847,556)	0	(376,009,114)	1,046,900,886
4010113	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	82,559,000	(14,415,060)	(2,620,920)	0	(17,035,980)	65,523,020
4010114	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	383,440,000	(62,952,835)	(11,445,971)	0	(74,398,806)	309,041,194
4010130	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	464,163,000	(204,231,720)	(37,133,040)	0	(241,364,760)	222,798,240
4040104	PAGAR	0	(20,561,860)	20,561,860	0	0	0
<b>135121</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>1,123,767,442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,123,767,442</b>
6010101	BUKU	1,123,767,442	0	0	0	0	1,123,767,442
6010199	TERCETAK LAINNYA	0	0	0	0	0	0
<b>166112</b>	<b>Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan</b>	<b>430,984,260</b>	<b>(853,242,316)</b>	<b>422,258,056</b>	<b>0</b>	<b>(430,984,260)</b>	<b>0</b>
3010305	POMPA	0	(229,812,000)	229,812,000	0	0	0
3020102	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	323,602,260	0	(323,602,260)	0	(323,602,260)	0
3020104	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	107,382,000	(9,395,000)	(97,987,000)	0	(107,382,000)	0
3050105	ALAT KANTOR LAINNYA	0	0	0	0	0	0
3050201	MEUBELAIR	0	0	0	0	0	0
3050204	ALAT PENDINGIN	0	(565,570,316)	565,570,316	0	0	0
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA ( HOME USE )	0	(48,465,000)	48,465,000	0	0	0
3060201	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	0	0	0	0	0	0
3070101	ALAT KEDOKTERAN UMUM	0	0	0	0	0	0
3070110	ALAT KEDOKTERAN ANAK	0	0	0	0	0	0



**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPA-Es1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM  
Tanggal : 28/05/24 9:55 AM  
Halaman : 3  
Kode Lap : lap\_bmn\_susut\_intra\_skel\_es1

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED					
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
			SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
3100102	PERSONAL KOMPUTER	0	0	0	0	0	0
3100203	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>447,280,128,140</b>	<b>(42,293,262,063)</b>	<b>(6,075,855,470)</b>	<b>0</b>	<b>(48,369,117,533)</b>	<b>398,911,010,607</b>

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I  
INTRAKOMPTABEL**

**RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPA-Es1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM  
Tanggal : 28/05/24 9:56 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_susut\_intra\_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED					
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
			SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
<b>131111</b>	<b>Tanah</b>	<b>356,165,357,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356,165,357,000</b>
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	356,165,357,000	0	0	0	0	356,165,357,000
<b>132111</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>26,605,556,857</b>	<b>(19,957,797,804)</b>	<b>(2,356,986,466)</b>	<b>0</b>	<b>(22,314,784,270)</b>	<b>4,290,772,587</b>
3010302001	Elevator /Lift	1,490,098,000	(1,490,098,000)	0	0	(1,490,098,000)	0
3010303003	Stationary Compressor	3,210,000	(3,210,000)	0	0	(3,210,000)	0
3010304002	Portable Generating Set	4,042,500	(4,042,500)	0	0	(4,042,500)	0
3010304003	Stationary Generating Set	114,416,000	(114,416,000)	0	0	(114,416,000)	0
3010305002	Portable Water Pump	126,665,000	(126,665,000)	0	0	(126,665,000)	0
3010305003	Stationary Water Pump	129,748,000	(129,748,000)	0	0	(129,748,000)	0
3010305005	Sumersible Pump	467,487,000	(196,880,357)	(257,008,429)	0	(453,888,786)	13,598,214
3020101001	Sedan	1,383,372,700	(1,552,243,950)	168,871,250	0	(1,383,372,700)	0
3020101002	Jeep	849,150,000	(452,953,571)	(72,035,714)	0	(524,989,285)	324,160,715
3020102002	Micro Bus ( Penumpang 15 S/D 29 Orang )	250,000,000	(374,922,000)	124,922,000	0	(250,000,000)	0
3020102003	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	2,495,212,490	(1,790,621,500)	(92,590,990)	0	(1,883,212,490)	612,000,000
3020104001	Sepeda Motor	88,992,500	(186,979,500)	97,987,000	0	(88,992,500)	0
3020105999	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya	231,137,500	(231,137,500)	0	0	(231,137,500)	0
3030103001	Battery Charge	1,921,700	(1,441,275)	(192,170)	0	(1,633,445)	288,255
3030103031	Tester Listrik/Telepon/Internet	1,320,000	(1,254,000)	(66,000)	0	(1,320,000)	0
3030205001	Tool Kit Set	5,506,969	(5,506,969)	0	0	(5,506,969)	0
3030212025	Mesin Pompa air PMK	4,873,523	(4,873,523)	0	0	(4,873,523)	0
3030301064	Memori Programmer	2,417,972	(2,417,972)	0	0	(2,417,972)	0
3030308012	Termometer Standar	2,090,000	(2,090,000)	0	0	(2,090,000)	0
3050101003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	9,546,000	(9,546,000)	0	0	(9,546,000)	0
3050101008	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	3,940,000	(3,940,000)	0	0	(3,940,000)	0
3050102002	Mesin Hitung Listrik	21,126,980	(21,126,980)	0	0	(21,126,980)	0
3050103007	Mesin Fotocopy Folio	234,200,000	(234,200,000)	0	0	(234,200,000)	0
3050103008	Mesin Fotocopy Double Folio	74,800,000	(74,800,000)	0	0	(74,800,000)	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	161,964,500	(154,341,500)	(2,178,000)	0	(156,519,500)	5,445,000
3050104002	Lemari Kayu	114,759,000	(107,327,000)	(4,332,000)	0	(111,659,000)	3,100,000
3050104003	Rak Besi	334,819,890	(334,294,890)	(350,000)	0	(334,644,890)	175,000
3050104004	Rak Kayu	88,344,984	(87,910,589)	(289,597)	0	(88,200,186)	144,798
3050104005	Filing Cabinet Besi	292,050,721	(292,050,721)	0	0	(292,050,721)	0
3050104007	Brandkas	4,775,000	(4,775,000)	0	0	(4,775,000)	0
3050104011	Rotary Filling	4,467,000	(4,467,000)	0	0	(4,467,000)	0
3050104016	Roll Opek	10,906,000	(10,906,000)	0	0	(10,906,000)	0
3050104020	Lemari Display	8,000,000	(8,000,000)	0	0	(8,000,000)	0
3050105001	Tabung Pemadam Api	66,102,500	(66,102,500)	0	0	(66,102,500)	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPA-Es1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM  
Tanggal : 28/05/24 9:56 AM  
Halaman : 2  
Kode Lap : lap\_bmn\_susut\_intra\_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED					
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
			SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
3050105002	Hydrant	23,372,000	(23,372,000)	0	0	(23,372,000)	0
3050105003	Sprinkler	1,156,000	(1,156,000)	0	0	(1,156,000)	0
3050105004	Fire Alarm	3,615,000	(3,615,000)	0	0	(3,615,000)	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	163,281,745	(120,515,945)	(12,218,800)	0	(132,734,745)	30,547,000
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	155,020,150	(15,532,000)	(27,897,630)	0	(43,429,630)	111,590,520
3050105009	Movitex Board	0	0	0	0	0	0
3050105010	White Board	7,807,890	(7,807,890)	0	0	(7,807,890)	0
3050105013	Copy Board/Elektrik White Board	2,732,000	(2,732,000)	0	0	(2,732,000)	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	106,706,000	(90,503,000)	(6,841,200)	0	(97,344,200)	9,361,800
3050105017	Mesin Absensi	138,762,000	(117,037,000)	(8,690,000)	0	(125,727,000)	13,035,000
3050105024	Alat Pemetong Kertas	11,528,000	(9,207,500)	(1,547,000)	0	(10,754,500)	773,500
3050105025	Headmachine Besar	2,690,000	(2,690,000)	0	0	(2,690,000)	0
3050105031	Panel Pameran	3,887,000	(3,887,000)	0	0	(3,887,000)	0
3050105037	White Board Electronic	4,278,000	(4,278,000)	0	0	(4,278,000)	0
3050105038	Laser Pointer	11,440,000	(11,440,000)	0	0	(11,440,000)	0
3050105039	Display	9,900,000	(9,900,000)	0	0	(9,900,000)	0
3050105045	Penangkal Petir	6,931,000	(6,931,000)	0	0	(6,931,000)	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	161,709,500	(78,794,500)	(20,666,000)	0	(99,460,500)	62,249,000
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	43,300,000	(43,300,000)	0	0	(43,300,000)	0
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	126,925,935	(126,925,935)	0	0	(126,925,935)	0
3050105062	Bel	24,475,000	(18,535,000)	(2,970,000)	0	(21,505,000)	2,970,000
3050105095	Wastafel Portable	9,996,250	(4,998,125)	(1,999,250)	0	(6,997,375)	2,998,875
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	1,242,000	(1,242,000)	0	0	(1,242,000)	0
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	2,156,234	(2,156,234)	0	0	(2,156,234)	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	229,130,781	(200,398,276)	(7,794,057)	0	(208,192,333)	20,938,448
3050201003	Kursi Besi/Metal	307,580,000	(131,510,000)	(60,130,000)	0	(191,640,000)	115,940,000
3050201004	Kursi Kayu	3,372,000	(3,372,000)	0	0	(3,372,000)	0
3050201005	Sice	381,625,416	(307,008,882)	(22,898,538)	0	(329,907,420)	51,717,996
3050201008	Meja Rapat	332,597,000	(317,989,000)	(11,308,000)	0	(329,297,000)	3,300,000
3050201009	Meja Komputer	13,183,000	(13,183,000)	0	0	(13,183,000)	0
3050201010	Tempat Tidur Besi	2,866,234	(2,866,234)	0	0	(2,866,234)	0
3050201013	Meja Telepon	5,038,000	(5,038,000)	0	0	(5,038,000)	0
3050201014	Meja Resepsionis	23,064,000	(23,064,000)	0	0	(23,064,000)	0
3050201016	Kasur/Spring Bed	38,385,000	(27,110,000)	(4,400,000)	0	(31,510,000)	6,875,000
3050201017	Sketsel	9,007,000	(9,007,000)	0	0	(9,007,000)	0
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	559,542,830	(506,757,230)	(15,081,600)	0	(521,838,830)	37,704,000
3050202003	Jam Elektronik	92,000	(92,000)	0	0	(92,000)	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I  
INTRAKOMPTABEL**

**RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPA-Es1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM  
Tanggal : 28/05/24 9:56 AM  
Halaman : 3  
Kode Lap : lap\_bmn\_susut\_intra\_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED					
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
			SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2,886,500	(2,886,500)	0	0	(2,886,500)	0
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	13,972,500	(9,372,500)	(920,000)	0	(10,292,500)	3,680,000
3050203004	Mesin Cuci	2,970,000	(2,970,000)	0	0	(2,970,000)	0
3050203005	Air Cleaner	2,299,000	(919,600)	(459,800)	0	(1,379,400)	919,600
3050203999	Alat Pembersih Lainnya	412,500	(412,500)	0	0	(412,500)	0
3050204001	Lemari Es	83,064,910	(31,015,821)	(11,016,342)	0	(42,032,163)	41,032,747
3050204003	A.C. Window	234,610,000	(234,610,000)	0	0	(234,610,000)	0
3050204004	A.C. Split	1,598,786,641	(491,434,139)	(757,330,009)	0	(1,248,764,148)	350,022,493
3050204006	Kipas Angin	1,254,000	(1,254,000)	0	0	(1,254,000)	0
3050205019	Mixer	6,462,500	(6,462,500)	0	0	(6,462,500)	0
3050206002	Televisi	166,810,000	(46,894,500)	(70,768,500)	0	(117,663,000)	49,147,000
3050206007	Loudspeaker	76,250,500	(44,742,250)	(10,867,500)	0	(55,609,750)	20,640,750
3050206008	Sound System	334,180,200	(221,267,124)	(21,413,076)	0	(242,680,200)	91,500,000
3050206012	Wireless	12,498,000	(12,498,000)	0	0	(12,498,000)	0
3050206014	Microphone	29,480,000	(17,283,200)	(3,484,800)	0	(20,768,000)	8,712,000
3050206015	Microphone Table Stand	2,013,000	(2,013,000)	0	0	(2,013,000)	0
3050206016	Mic Conference	84,150,000	(84,150,000)	0	0	(84,150,000)	0
3050206017	Unit Power Supply	90,190,000	(90,190,000)	0	0	(90,190,000)	0
3050206020	Camera Video	99,327,860	(90,342,860)	(3,594,000)	0	(93,936,860)	5,391,000
3050206021	Tustel	3,076,250	(3,076,250)	0	0	(3,076,250)	0
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	0	0	0	0	0	0
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	0	0	0	0	0	0
3050206030	Tiang Bendera	0	0	0	0	0	0
3050206034	Tangga Aluminium	14,086,105	(10,259,053)	(1,530,821)	0	(11,789,874)	2,296,231
3050206036	Dispenser	92,144,534	(43,558,664)	(10,515,660)	0	(54,074,324)	38,070,210
3050206037	Mimbar/Podium	0	0	0	0	0	0
3050206046	Handy Cam	70,398,500	(70,398,500)	0	0	(70,398,500)	0
3050206055	Heater (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use ))	666,232	(666,232)	0	0	(666,232)	0
3050206056	Karpet	59,605,000	(24,901,100)	(9,915,400)	0	(34,816,500)	24,788,500
3050206057	Vertikal Blind	72,705,184	(72,705,184)	0	0	(72,705,184)	0
3050206058	Gordyin/Kray	264,581,100	(238,082,100)	(8,833,000)	0	(246,915,100)	17,666,000
3050206059	Kabel Roll	7,700,000	(7,700,000)	0	0	(7,700,000)	0
3050206061	Keset Kaki	25,224,000	(25,224,000)	0	0	(25,224,000)	0
3050206068	DVD Player	2,000,000	(2,000,000)	0	0	(2,000,000)	0
3050206071	Kabel	2,029,500	(2,029,500)	0	0	(2,029,500)	0
3050206080	Bracket Standing Peralatan	25,117,660	(20,681,360)	(2,094,520)	0	(22,775,880)	2,341,780
3060101002	Audio Mixing Portable	5,802,500	(1,740,750)	(1,160,500)	0	(2,901,250)	2,901,250

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I  
INTRAKOMPTABEL**

**RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

**UAPA-Es1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tanggal : 28/05/24 9:56 AM

Halaman : 4

Kode Lap : lap\_bmn\_susut\_intra\_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED					
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
			SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
3060101003	Audio Mixing Stationer	20,702,000	(6,210,600)	(4,140,400)	0	(10,351,000)	10,351,000
3060101017	Cassette Duplicator	34,824,000	(34,824,000)	0	0	(34,824,000)	0
3060101036	Microphone/Wireless MIC	41,074,000	(16,934,500)	(6,897,000)	0	(23,831,500)	17,242,500
3060101039	Light Signal	3,500,000	(3,500,000)	0	0	(3,500,000)	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	61,821,288	(59,511,288)	(660,000)	0	(60,171,288)	1,650,000
3060101056	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	2,381,500	(2,381,500)	0	0	(2,381,500)	0
3060101060	Power Amplifier	11,000,000	(11,000,000)	0	0	(11,000,000)	0
3060101079	Microphone Cable	1,870,000	(1,870,000)	0	0	(1,870,000)	0
3060101088	Voice Recorder	6,964,500	(6,964,500)	0	0	(6,964,500)	0
3060101091	Digital LED Running Text	23,499,300	(23,499,300)	0	0	(23,499,300)	0
3060102003	Camera Electronic	91,520,000	(91,520,000)	0	0	(91,520,000)	0
3060102012	Video Monitor	59,751,660	(59,751,660)	0	0	(59,751,660)	0
3060102013	Video Tape Recorder Portable	8,448,000	(2,534,400)	(1,689,600)	0	(4,224,000)	4,224,000
3060102016	Video Switcher	21,940,260	(15,819,530)	(1,748,780)	0	(17,568,310)	4,371,950
3060102020	Video Test Signal Generator	12,287,000	(12,287,000)	0	0	(12,287,000)	0
3060102034	Teleprompter	19,140,000	(5,742,000)	(3,828,000)	0	(9,570,000)	9,570,000
3060102045	Tripod Camera	58,388,958	(39,057,516)	(5,499,672)	0	(44,557,188)	13,831,770
3060102055	Lighting Stand Tripod	71,606,700	(27,141,510)	(12,704,340)	0	(39,845,850)	31,760,850
3060102056	Film Projector	146,646,000	(146,646,000)	0	0	(146,646,000)	0
3060102057	Slide Projector	3,190,000	(3,190,000)	0	0	(3,190,000)	0
3060102060	Camera Film	116,688,000	(35,006,400)	(23,337,600)	0	(58,344,000)	58,344,000
3060102061	Lensa Kamera	108,303,600	(77,994,200)	(9,948,400)	0	(87,942,600)	20,361,000
3060102099	Automatic Emergency Light	1,100,000	(1,100,000)	0	0	(1,100,000)	0
3060102107	Layar Film/Projector	16,400,000	(16,400,000)	0	0	(16,400,000)	0
3060102114	Standard True Signal/Master Rack	12,162,360	(12,162,360)	0	0	(12,162,360)	0
3060102118	Head Set	6,072,000	(1,821,600)	(1,214,400)	0	(3,036,000)	3,036,000
3060102128	Camera Digital	280,600,000	(191,736,000)	(26,592,000)	0	(218,328,000)	62,272,000
3060102129	Tas Kamera	2,400,200	(2,400,200)	0	0	(2,400,200)	0
3060102130	Lampu Blitz Kamera	8,231,500	(8,231,500)	0	0	(8,231,500)	0
3060102131	Lensa Filter	1,687,500	(1,687,500)	0	0	(1,687,500)	0
3060102135	LCD Monitor	1,204,207,689	(1,188,006,889)	(4,628,800)	0	(1,192,635,689)	11,572,000
3060102152	RF Cable	7,700,000	(2,310,000)	(1,540,000)	0	(3,850,000)	3,850,000
3060102165	Camera Conference	2,035,000	(610,500)	(407,000)	0	(1,017,500)	1,017,500
3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	44,145,077	(4,414,508)	(8,829,016)	0	(13,243,524)	30,901,553
3060104045	Mesin Barcode	3,740,000	(3,740,000)	0	0	(3,740,000)	0
3060199999	Alat Studio Lainnya	57,750,000	(17,325,000)	(11,550,000)	0	(28,875,000)	28,875,000
3060201001	Telephone (PABX)	241,354,500	(241,354,500)	0	0	(241,354,500)	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I  
INTRAKOMPTABEL**

**RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPA-Es1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM  
Tanggal : 28/05/24 9:56 AM  
Halaman : 5  
Kode Lap : lap\_bmn\_susut\_intra\_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED					
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
			SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
3060201003	Pesawat Telephone	2,741,000	(2,741,000)	0	0	(2,741,000)	0
3060201006	Handy Talky (HT)	48,210,000	(23,445,000)	(9,642,000)	0	(33,087,000)	15,123,000
3060201010	Facsimile	35,178,000	(35,178,000)	0	0	(35,178,000)	0
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	72,597,920	(72,597,920)	0	0	(72,597,920)	0
3060202999	Alat Komunikasi Radio Ssb Lainnya	9,800,000	(9,800,000)	0	0	(9,800,000)	0
3060206002	Wireless Amplifier	13,200,000	(13,200,000)	0	0	(13,200,000)	0
3060323022	Change Over Switch	15,923,160	(15,572,502)	(350,658)	0	(15,923,160)	0
3070101001	Sterilisator	9,900,000	(9,900,000)	0	0	(9,900,000)	0
3070101002	Minor Surgical Set (Alat Kedokteran Umum)	0	0	0	0	0	0
3070101005	Tensimeter	12,866,234	(12,866,234)	0	0	(12,866,234)	0
3070101009	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	658,000	(658,000)	0	0	(658,000)	0
3070101012	Metal Chatheeter	0	0	0	0	0	0
3070101018	Instrumen Cabinet	935,000	(935,000)	0	0	(935,000)	0
3070101022	Lemari Steril	4,565,000	(4,565,000)	0	0	(4,565,000)	0
3070101026	Tabung O2	3,088,635	(3,088,635)	0	0	(3,088,635)	0
3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	12,155,075	(7,538,675)	(2,308,200)	0	(9,846,875)	2,308,200
3070101127	Kursi Dorong	2,791,250	(2,791,250)	0	0	(2,791,250)	0
3070102002	Dental Unit	123,200,000	(123,200,000)	0	0	(123,200,000)	0
3070102019	Portable Dental Unit	14,107,500	(5,643,000)	(2,821,500)	0	(8,464,500)	5,643,000
3070102093	Tang Ektrasi (Dewasa,Anak)	3,713,000	(3,713,000)	0	0	(3,713,000)	0
3070102118	Bein	671,293	(671,293)	0	0	(671,293)	0
3070102999	Alat Kedokteran Gigi Lainnya	12,200,000	(1,220,000)	(2,440,000)	0	(3,660,000)	8,540,000
3070106096	Otoscope Halogen Lamp	2,811,234	(2,811,234)	0	0	(2,811,234)	0
3070110011	Neirbekken Stainless Steel	0	0	0	0	0	0
3070111003	Bed Pan For Adult 310 mm Complete	3,436,000	(3,436,000)	0	0	(3,436,000)	0
3070111999	Alat Kedokteran Poliklinik Lainnya	89,347,170	(89,347,170)	0	0	(89,347,170)	0
3070118011	Data Catridge	24,657,600	(24,657,600)	0	0	(24,657,600)	0
3070199999	Alat Kedokteran Lainnya	8,980,519	(1,851,655)	(1,584,192)	0	(3,435,847)	5,544,672
3080111021	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	26,125,000	(6,531,250)	(3,265,625)	0	(9,796,875)	16,328,125
3080804009	DC / AC Power Supply	2,195,000	(2,195,000)	0	0	(2,195,000)	0
3090402031	Kamera Digital	0	0	0	0	0	0
3100101004	Internet	5,500,000	(5,500,000)	0	0	(5,500,000)	0
3100102001	P.C Unit	2,451,847,000	(1,772,680,250)	(241,911,750)	0	(2,014,592,000)	437,255,000
3100102002	Lap Top	1,981,893,498	(518,466,373)	(380,161,500)	0	(898,627,873)	1,083,265,625
3100102003	Note Book	309,832,000	(238,282,000)	(48,000,000)	0	(286,282,000)	23,550,000
3100102007	Net Book	1,567,210,000	(1,243,678,750)	(215,687,500)	0	(1,459,366,250)	107,843,750
3100102009	Tablet PC	87,779,458	(63,200,146)	(15,429,312)	0	(78,629,458)	9,150,000

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I  
INTRAKOMPTABEL**

**RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPA-Es1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM  
Tanggal : 28/05/24 9:56 AM  
Halaman : 6  
Kode Lap : lap\_bmn\_susut\_intra\_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED					
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
			SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
3100102999	Personal Komputer Lainnya	61,347,000	(49,573,125)	(7,849,250)	0	(57,422,375)	3,924,625
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	202,707,500	(175,413,748)	(19,062,504)	0	(194,476,252)	8,231,248
3100202014	Keyboard (Peralatan Mini Komputer)	24,170,500	(19,221,250)	(3,299,500)	0	(22,520,750)	1,649,750
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	435,984,500	(276,051,814)	(63,430,186)	0	(339,482,000)	96,502,500
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	122,421,650	(39,671,650)	(21,750,000)	0	(61,421,650)	61,000,000
3100203017	External/ Portable Hardisk	91,783,000	(86,338,000)	(2,178,000)	0	(88,516,000)	3,267,000
3100204001	Server	147,300,000	(116,400,000)	(30,900,000)	0	(147,300,000)	0
3100204002	Router	118,198,719	(118,198,719)	0	0	(118,198,719)	0
3100204004	Modem	5,666,100	(5,012,288)	(261,525)	0	(5,273,813)	392,287
3100204030	Network Cable Tester	8,580,000	(8,580,000)	0	0	(8,580,000)	0
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	92,558,060	(92,558,060)	0	0	(92,558,060)	0
3190106003	Sepeda Olah Raga	22,977,620	(19,148,017)	(3,829,603)	0	(22,977,620)	0
<b>133111</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>62,954,462,581</b>	<b>(21,482,221,943)</b>	<b>(4,141,127,060)</b>	<b>0</b>	<b>(25,623,349,003)</b>	<b>37,331,113,578</b>
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	59,966,118,647	(20,602,251,267)	(3,998,980,820)	0	(24,601,232,087)	35,364,886,560
4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	154,108,000	(67,807,520)	(12,328,640)	0	(80,136,160)	73,971,840
4010106010	Bangunan Klinik/Puskesmas	481,163,934	(191,840,123)	(41,331,973)	0	(233,172,096)	247,991,838
4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1,422,910,000	(318,161,558)	(57,847,556)	0	(376,009,114)	1,046,900,886
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	82,559,000	(14,415,060)	(2,620,920)	0	(17,035,980)	65,523,020
4010114001	Gedung Garasi/Pool Permanen	383,440,000	(62,952,835)	(11,445,971)	0	(74,398,806)	309,041,194
4010130001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	464,163,000	(204,231,720)	(37,133,040)	0	(241,364,760)	222,798,240
4040104001	Pagar Permanen	0	(20,561,860)	20,561,860	0	0	0
<b>135121</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>1,123,767,442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,123,767,442</b>
6010101001	Monografi	1,123,767,442	0	0	0	0	1,123,767,442
6010101999	Buku Lainnya	0	0	0	0	0	0
6010199999	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	0	0	0	0	0	0
<b>166112</b>	<b>Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan</b>	<b>430,984,260</b>	<b>(853,242,316)</b>	<b>422,258,056</b>	<b>0</b>	<b>(430,984,260)</b>	<b>0</b>
3010305005	Sumersible Pump	0	(229,812,000)	229,812,000	0	0	0
3020102002	Micro Bus ( Penumpang 15 S/D 29 Orang )	124,922,000	0	(124,922,000)	0	(124,922,000)	0
3020102003	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	198,680,260	0	(198,680,260)	0	(198,680,260)	0
3020104001	Sepeda Motor	107,382,000	(9,395,000)	(97,987,000)	0	(107,382,000)	0
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	0	0	0	0	0	0
3050105009	Movitex Board	0	0	0	0	0	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	0	0	0	0	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	0	0	0	0	0	0
3050201005	Sice	0	0	0	0	0	0
3050201009	Meja Komputer	0	0	0	0	0	0
3050204004	A.C. Split	0	(565,570,316)	565,570,316	0	0	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I  
INTRAKOMPTABEL**

**RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPA-Es1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM  
Tanggal : 28/05/24 9:56 AM  
Halaman : 7  
Kode Lap : lap\_bmn\_susut\_intra\_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED					
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
			SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
3050206002	Televisi	0	(48,465,000)	48,465,000	0	0	0
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	0	0	0	0	0	0
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	0	0	0	0	0	0
3050206030	Tiang Bendera	0	0	0	0	0	0
3050206037	Mimbar/Podium	0	0	0	0	0	0
3060201006	Handy Talky (HT)	0	0	0	0	0	0
3070101002	Minor Surgical Set (Alat Kedokteran Umum)	0	0	0	0	0	0
3070101012	Metal Chatheeter	0	0	0	0	0	0
3070110011	Neirbekken Stainless Steel	0	0	0	0	0	0
3100102001	P.C Unit	0	0	0	0	0	0
3100102002	Lap Top	0	0	0	0	0	0
3100102007	Net Book	0	0	0	0	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0	0	0	0	0	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>447,280,128,140</b>	<b>(42,293,262,063)</b>	<b>(6,075,855,470)</b>	<b>0</b>	<b>(48,369,117,533)</b>	<b>398,911,010,607</b>



**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - TINGKAT ESELON I  
EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM  
 Tanggal : 28/05/24 9:58 AM  
 Halaman : 1  
 Kode Lap : lap\_bmn\_susut\_ekstra\_kel\_es1

**UAPA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPA-Es1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED					
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
			SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
<b>132111</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>126,584,000</b>	<b>(101,562,400)</b>	<b>(19,967,800)</b>	<b>0</b>	<b>(121,530,200)</b>	<b>5,053,800</b>
30502	ALAT RUMAH TANGGA	106,231,000	(81,354,600)	(19,895,200)	0	(101,249,800)	4,981,200
30601	ALAT STUDIO	1,760,000	(1,760,000)	0	0	(1,760,000)	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	17,867,000	(17,867,000)	0	0	(17,867,000)	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	726,000	(580,800)	(72,600)	0	(653,400)	72,600
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0
<b>166112</b>	<b>Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>126,584,000</b>	<b>(101,562,400)</b>	<b>(19,967,800)</b>	<b>0</b>	<b>(121,530,200)</b>	<b>5,053,800</b>

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - TINGKAT ESELON I  
EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tanggal : 28/05/24 9:59 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap\_bmn\_susut\_ekstra\_skel\_es1

**UAPA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

**UAPA-Es1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED					
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
			SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
<b>132111</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>126,584,000</b>	<b>(101,562,400)</b>	<b>(19,967,800)</b>	<b>0</b>	<b>(121,530,200)</b>	<b>5,053,800</b>
3050201	MEUBELAIR	104,526,000	(79,649,600)	(19,895,200)	0	(99,544,800)	4,981,200
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA ( HOME USE )	1,705,000	(1,705,000)	0	0	(1,705,000)	0
3060101	PERALATAN STUDIO AUDIO	1,760,000	(1,760,000)	0	0	(1,760,000)	0
3060201	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	17,867,000	(17,867,000)	0	0	(17,867,000)	0
3060346	PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO	726,000	(580,800)	(72,600)	0	(653,400)	72,600
3090402	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	0	0	0	0	0	0
<b>166112</b>	<b>Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3090402	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>126,584,000</b>	<b>(101,562,400)</b>	<b>(19,967,800)</b>	<b>0</b>	<b>(121,530,200)</b>	<b>5,053,800</b>

**LAPORAN AMORTISASI BARANG PEMBANTU PENGGUNA ESELON I  
ASET TAK BERWUJUD  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 013**  
**UAPPB-E1 : 10**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM  
Tanggal : 28/05/24 10:01 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_amor\_kel\_es1

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	BEBAN AMORTISASI	AKUMULASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=5-9
162151	Software		6	4,184,325,500	(4,184,325,500)	0	0	(4,184,325,500)	0
80101	ASET TAK BERWUJUD		6	4,184,325,500	(4,184,325,500)	0	0	(4,184,325,500)	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya		519	49,998,160	0	0	0	0	49,998,160
80101	ASET TAK BERWUJUD		519	49,998,160	0	0	0	0	49,998,160
<b>JUMLAH</b>			<b>525</b>	<b>4,234,323,660</b>	<b>(4,184,325,500)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(4,184,325,500)</b>	<b>49,998,160</b>

**LAPORAN AMORTISASI BARANG PEMBANTU PENGGUNA ESELON I  
ASET TAK BERWUJUD  
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 013**  
**UAPPB-E1 : 10**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM  
Tanggal : 28/05/24 10:02 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_amor\_skel\_es1

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	BEBAN AMORTISASI	AKUMULASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=5-9
162151	Software		6	4,184,325,500	(4,184,325,500)	0	0	(4,184,325,500)	0
8010101	ASET TAK BERWUJUD		6	4,184,325,500	(4,184,325,500)	0	0	(4,184,325,500)	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya		519	49,998,160	0	0	0	0	49,998,160
8010101	ASET TAK BERWUJUD		519	49,998,160	0	0	0	0	49,998,160
<b>JUMLAH</b>			<b>525</b>	<b>4,234,323,660</b>	<b>(4,184,325,500)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(4,184,325,500)</b>	<b>49,998,160</b>

**LAPORAN AMORTISASI BARANG PEMBANTU PENGGUNA ESELON I  
ASET TAK BERWUJUD  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 013**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

**UAPPB-E1 : 10**

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tanggal : 28/05/24 10:05 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap\_bmn\_amor\_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN	SAT	KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	BEBAN AMORTISASI	AKUMULASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=5-9
<b>162151</b>	<b>Software</b>		<b>6</b>	<b>4,184,325,500</b>	<b>(4,184,325,500)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(4,184,325,500)</b>	<b>0</b>
8010101001	Software Komputer		6	4,184,325,500	(4,184,325,500)	0	0	(4,184,325,500)	0
<b>162191</b>	<b>Aset Tak Berwujud Lainnya</b>		<b>519</b>	<b>49,998,160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,998,160</b>
8010101050	Buku Digital		519	49,998,160	0	0	0	0	49,998,160
<b>JUMLAH</b>			<b>525</b>	<b>4,234,323,660</b>	<b>(4,184,325,500)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(4,184,325,500)</b>	<b>49,998,160</b>

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tanggal : 28/05/24 9:28 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap\_bmn\_intra\_kel\_es1

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>131111</b>	<b>Tanah</b>	<b>11,348</b>	<b>356,165,357,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,348</b>	<b>356,165,357,000</b>
20101	TANAH PERSIL	11,348	356,165,357,000	0	0	0	0	11,348	356,165,357,000
<b>132111</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>3,593</b>	<b>24,758,430,869</b>	<b>175</b>	<b>2,856,858,348</b>	<b>40</b>	<b>1,009,732,360</b>	<b>3,728</b>	<b>26,605,556,857</b>
30103	ALAT BANTU	18	2,105,854,500	1	229,812,000	0	0	19	2,335,666,500
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	35	5,719,454,450	2	178,266,250	8	599,855,510	29	5,297,865,190
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	5	3,241,700	0	0	0	0	5	3,241,700
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	2	10,380,492	0	0	0	0	2	10,380,492
30303	ALAT UKUR	3	4,507,972	0	0	0	0	3	4,507,972
30501	ALAT KANTOR	922	2,272,569,895	6	177,988,150	0	0	928	2,450,558,045
30502	ALAT RUMAH TANGGA	1,721	4,823,291,573	84	731,966,948	13	166,666,850	1,792	5,388,591,671
30601	ALAT STUDIO	133	2,579,580,592	0	0	0	0	133	2,579,580,592
30602	ALAT KOMUNIKASI	59	423,081,420	0	0	0	0	59	423,081,420
30603	PERALATAN PEMANCAR	12	15,923,160	0	0	0	0	12	15,923,160
30701	ALAT KEDOKTERAN	26	330,083,510	0	0	0	0	26	330,083,510
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	1	26,125,000	0	0	0	0	1	26,125,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	1	2,195,000	0	0	0	0	1	2,195,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	402	5,332,443,956	71	1,376,175,000	19	243,210,000	454	6,465,408,956
31002	PERALATAN KOMPUTER	252	1,086,720,029	11	162,650,000	0	0	263	1,249,370,029
31901	PERALATAN OLAH RAGA	1	22,977,620	0	0	0	0	1	22,977,620
<b>133111</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>19</b>	<b>59,683,830,714</b>	<b>0</b>	<b>3,497,161,222</b>	<b>1</b>	<b>226,529,355</b>	<b>18</b>	<b>62,954,462,581</b>
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	18	59,504,381,714	0	3,497,161,222	0	47,080,355	18	62,954,462,581
40401	TUGU/TANDA BATAS	1	179,449,000	0	0	1	179,449,000	0	0
<b>135121</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>27,080</b>	<b>1,088,776,559</b>	<b>1,861</b>	<b>235,023,023</b>	<b>1,605</b>	<b>200,032,140</b>	<b>27,336</b>	<b>1,123,767,442</b>
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	27,080	1,088,776,559	1,861	235,023,023	1,605	200,032,140	27,336	1,123,767,442
<b>166112</b>	<b>Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi</b>	<b>60</b>	<b>853,242,316</b>	<b>7</b>	<b>430,984,260</b>	<b>60</b>	<b>853,242,316</b>	<b>7</b>	<b>430,984,260</b>
30103	ALAT BANTU	1	229,812,000	0	0	1	229,812,000	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	1	9,395,000	7	430,984,260	1	9,395,000	7	430,984,260
30501	ALAT KANTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	58	614,035,316	0	0	58	614,035,316	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>442,549,637,458</b>		<b>7,020,026,853</b>		<b>2,289,536,171</b>		<b>447,280,128,140</b>

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I**  
**INTRAKOMPTABEL**  
**RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 03/03/24 12:00 AM

Tanggal : 28/05/24 9:23 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap\_bmn\_intra\_skel\_es1\_po

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>131111</b>	<b>Tanah</b>	<b>11,348</b>	<b>356,165,357,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,348</b>	<b>356,165,357,000</b>
2010104	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	11,348	356,165,357,000	0	0	0	0	11,348	356,165,357,000
<b>132111</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>3,593</b>	<b>24,758,430,869</b>	<b>175</b>	<b>2,856,858,348</b>	<b>40</b>	<b>1,009,732,360</b>	<b>3,728</b>	<b>26,605,556,857</b>
3010302	FEEDER	2	1,490,098,000	0	0	0	0	2	1,490,098,000
3010303	COMPRESSOR	1	3,210,000	0	0	0	0	1	3,210,000
3010304	ELECTRIC GENERATING SET	4	118,458,500	0	0	0	0	4	118,458,500
3010305	POMPA	11	494,088,000	1	229,812,000	0	0	12	723,900,000
3020101	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	9	2,401,393,950	0	0	1	168,871,250	8	2,232,522,700
3020102	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	15	2,899,943,500	1	168,871,250	2	323,602,260	14	2,745,212,490
3020104	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	10	186,979,500	1	9,395,000	5	107,382,000	6	88,992,500
3020105	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	1	231,137,500	0	0	0	0	1	231,137,500
3030103	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	5	3,241,700	0	0	0	0	5	3,241,700
3030205	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	1	5,506,969	0	0	0	0	1	5,506,969
3030212	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM	1	4,873,523	0	0	0	0	1	4,873,523
3030301	ALAT UKUR UNIVERSAL	2	2,417,972	0	0	0	0	2	2,417,972
3030308	ALAT UKUR/PEMBANDING	1	2,090,000	0	0	0	0	1	2,090,000
3050101	MESIN KETIK	8	13,486,000	0	0	0	0	8	13,486,000
3050102	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	14	21,126,980	0	0	0	0	14	21,126,980
3050103	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	7	309,000,000	0	0	0	0	7	309,000,000
3050104	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	649	1,020,087,095	0	0	0	0	649	1,020,087,095
3050105	ALAT KANTOR LAINNYA	244	908,869,820	6	177,988,150	0	0	250	1,086,857,970
3050201	MEUBELAIR	1,102	1,897,559,495	1	9,988,000	0	0	1,103	1,907,547,495
3050202	ALAT PENGUKUR WAKTU	1	92,000	0	0	0	0	1	92,000
3050203	ALAT PEMBERSIH	6	17,940,500	1	4,600,000	0	0	7	22,540,500
3050204	ALAT PENDINGIN	98	1,314,645,235	55	603,070,316	0	0	153	1,917,715,551
3050205	ALAT DAPUR	1	6,462,500	0	0	0	0	1	6,462,500
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA ( HOME USE )	513	1,586,591,843	27	114,308,632	13	166,666,850	527	1,534,233,625
3060101	PERALATAN STUDIO AUDIO	35	213,439,088	0	0	0	0	35	213,439,088
3060102	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	94	2,304,651,504	0	0	0	0	94	2,304,651,504
3060104	PERALATAN CETAK	1	3,740,000	0	0	0	0	1	3,740,000
3060199	ALAT STUDIO LAINNYA	3	57,750,000	0	0	0	0	3	57,750,000
3060201	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	53	400,081,420	0	0	0	0	53	400,081,420
3060202	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	4	9,800,000	0	0	0	0	4	9,800,000
3060206	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	2	13,200,000	0	0	0	0	2	13,200,000
3060323	PROGRAM INPUT EQUIPMENT	12	15,923,160	0	0	0	0	12	15,923,160
3070101	ALAT KEDOKTERAN UMUM	12	46,959,194	0	0	0	0	12	46,959,194
3070102	ALAT KEDOKTERAN GIGI	7	153,891,793	0	0	0	0	7	153,891,793





**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 03/03/24 12:00 AM  
Tanggal : 28/05/24 9:23 AM  
Halaman : 3  
Kode Lap : lap\_bmn\_intra\_skel\_es1\_po

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3100102	PERSONAL KOMPUTER	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>442,549,637,458</b>		<b>7,020,026,853</b>		<b>2,289,536,171</b>		<b>447,280,128,140</b>

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM  
Tanggal : 28/05/24 9:25 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_intra\_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>131111</b>	<b>Tanah</b>	<b>11,348</b>	<b>356,165,357,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,348</b>	<b>356,165,357,000</b>
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	11,348	356,165,357,000	0	0	0	0	11,348	356,165,357,000
<b>132111</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>3,593</b>	<b>24,758,430,869</b>	<b>175</b>	<b>2,856,858,348</b>	<b>40</b>	<b>1,009,732,360</b>	<b>3,728</b>	<b>26,605,556,857</b>
3010302001	Elevator /Lift	2	1,490,098,000	0	0	0	0	2	1,490,098,000
3010303003	Stationary Compressor	1	3,210,000	0	0	0	0	1	3,210,000
3010304002	Portable Generating Set	1	4,042,500	0	0	0	0	1	4,042,500
3010304003	Stationary Generating Set	3	114,416,000	0	0	0	0	3	114,416,000
3010305002	Portable Water Pump	5	126,665,000	0	0	0	0	5	126,665,000
3010305003	Stationary Water Pump	4	129,748,000	0	0	0	0	4	129,748,000
3010305005	Sumersible Pump	2	237,675,000	1	229,812,000	0	0	3	467,487,000
3020101001	Sedan	7	1,552,243,950	0	0	1	168,871,250	6	1,383,372,700
3020101002	Jeep	2	849,150,000	0	0	0	0	2	849,150,000
3020102002	Micro Bus ( Penumpang 15 S/D 29 Orang )	2	374,922,000	0	0	1	124,922,000	1	250,000,000
3020102003	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	13	2,525,021,500	1	168,871,250	1	198,680,260	13	2,495,212,490
3020104001	Sepeda Motor	10	186,979,500	1	9,395,000	5	107,382,000	6	88,992,500
3020105999	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya	1	231,137,500	0	0	0	0	1	231,137,500
3030103001	Battery Charge	3	1,921,700	0	0	0	0	3	1,921,700
3030103031	Tester Listrik/Telepon/Internet	2	1,320,000	0	0	0	0	2	1,320,000
3030205001	Tool Kit Set	1	5,506,969	0	0	0	0	1	5,506,969
3030212025	Mesin Pompa air PMK	1	4,873,523	0	0	0	0	1	4,873,523
3030301064	Memori Programmer	2	2,417,972	0	0	0	0	2	2,417,972
3030308012	Termometer Standar	1	2,090,000	0	0	0	0	1	2,090,000
3050101003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	6	9,546,000	0	0	0	0	6	9,546,000
3050101008	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	2	3,940,000	0	0	0	0	2	3,940,000
3050102002	Mesin Hitung Listrik	14	21,126,980	0	0	0	0	14	21,126,980
3050103007	Mesin Fotocopy Folio	5	234,200,000	0	0	0	0	5	234,200,000
3050103008	Mesin Fotocopy Double Folio	2	74,800,000	0	0	0	0	2	74,800,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	87	161,964,500	0	0	0	0	87	161,964,500
3050104002	Lemari Kayu	56	114,759,000	0	0	0	0	56	114,759,000
3050104003	Rak Besi	278	334,819,890	0	0	0	0	278	334,819,890
3050104004	Rak Kayu	57	88,344,984	0	0	0	0	57	88,344,984
3050104005	Filing Cabinet Besi	152	292,050,721	0	0	0	0	152	292,050,721
3050104007	Brandkas	8	4,775,000	0	0	0	0	8	4,775,000
3050104011	Rotary Filling	2	4,467,000	0	0	0	0	2	4,467,000
3050104016	Roll Opek	7	10,906,000	0	0	0	0	7	10,906,000
3050104020	Lemari Display	2	8,000,000	0	0	0	0	2	8,000,000
3050105001	Tabung Pemadam Api	90	66,102,500	0	0	0	0	90	66,102,500

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I**  
**INTRAKOMPTABEL**  
**RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tanggal : 28/05/24 9:25 AM

Halaman : 2

Kode Lap : lap\_bmn\_intra\_es1

**UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3050105002	Hydrant	3	23,372,000	0	0	0	0	3	23,372,000
3050105003	Sprinkler	1	1,156,000	0	0	0	0	1	1,156,000
3050105004	Fire Alarm	3	3,615,000	0	0	0	0	3	3,615,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	3	163,281,745	0	0	0	0	3	163,281,745
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	1	15,532,000	1	139,488,150	0	0	2	155,020,150
3050105009	Movitex Board	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105010	White Board	33	7,807,890	0	0	0	0	33	7,807,890
3050105013	Copy Board/Elektrik White Board	1	2,732,000	0	0	0	0	1	2,732,000
3050105015	Alat Penghancur Kertas	17	106,706,000	0	0	0	0	17	106,706,000
3050105017	Mesin Absensi	8	138,762,000	0	0	0	0	8	138,762,000
3050105024	Alat Pemotong Kertas	3	11,528,000	0	0	0	0	3	11,528,000
3050105025	Headmachine Besar	3	2,690,000	0	0	0	0	3	2,690,000
3050105031	Panel Pameran	4	3,887,000	0	0	0	0	4	3,887,000
3050105037	White Board Electronic	2	4,278,000	0	0	0	0	2	4,278,000
3050105038	Laser Pointer	11	11,440,000	0	0	0	0	11	11,440,000
3050105039	Display	2	9,900,000	0	0	0	0	2	9,900,000
3050105045	Penangkal Petir	1	6,931,000	0	0	0	0	1	6,931,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	10	123,209,500	5	38,500,000	0	0	15	161,709,500
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	23	43,300,000	0	0	0	0	23	43,300,000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	18	126,925,935	0	0	0	0	18	126,925,935
3050105062	Bel	3	24,475,000	0	0	0	0	3	24,475,000
3050105095	Wastafel Portable	1	9,996,250	0	0	0	0	1	9,996,250
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	3	1,242,000	0	0	0	0	3	1,242,000
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	2	2,156,234	0	0	0	0	2	2,156,234
3050201002	Meja Kerja Kayu	230	229,130,781	0	0	0	0	230	229,130,781
3050201003	Kursi Besi/Metal	212	307,580,000	0	0	0	0	212	307,580,000
3050201004	Kursi Kayu	12	3,372,000	0	0	0	0	12	3,372,000
3050201005	Sice	31	381,625,416	0	0	0	0	31	381,625,416
3050201008	Meja Rapat	110	322,609,000	1	9,988,000	0	0	111	332,597,000
3050201009	Meja Komputer	59	13,183,000	0	0	0	0	59	13,183,000
3050201010	Tempat Tidur Besi	1	2,866,234	0	0	0	0	1	2,866,234
3050201013	Meja Telepon	44	5,038,000	0	0	0	0	44	5,038,000
3050201014	Meja Resepsionis	4	23,064,000	0	0	0	0	4	23,064,000
3050201016	Kasur/Spring Bed	8	38,385,000	0	0	0	0	8	38,385,000
3050201017	Sketsel	3	9,007,000	0	0	0	0	3	9,007,000
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	386	559,542,830	0	0	0	0	386	559,542,830
3050202003	Jam Elektronik	1	92,000	0	0	0	0	1	92,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM  
Tanggal : 28/05/24 9:25 AM  
Halaman : 3  
Kode Lap : lap\_bmn\_intra\_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	2,886,500	0	0	0	0	1	2,886,500
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	2	9,372,500	1	4,600,000	0	0	3	13,972,500
3050203004	Mesin Cuci	1	2,970,000	0	0	0	0	1	2,970,000
3050203005	Air Cleaner	1	2,299,000	0	0	0	0	1	2,299,000
3050203999	Alat Pembersih Lainnya	1	412,500	0	0	0	0	1	412,500
3050204001	Lemari Es	12	45,564,910	5	37,500,000	0	0	17	83,064,910
3050204003	A.C. Window	8	234,610,000	0	0	0	0	8	234,610,000
3050204004	A.C. Split	76	1,033,216,325	50	565,570,316	0	0	126	1,598,786,641
3050204006	Kipas Angin	2	1,254,000	0	0	0	0	2	1,254,000
3050205019	Mixer	1	6,462,500	0	0	0	0	1	6,462,500
3050206002	Televisi	17	99,345,000	12	67,465,000	0	0	29	166,810,000
3050206007	Loudspeaker	18	76,250,500	0	0	0	0	18	76,250,500
3050206008	Sound System	18	486,049,418	1	14,797,632	13	166,666,850	6	334,180,200
3050206012	Wireless	3	12,498,000	0	0	0	0	3	12,498,000
3050206014	Microphone	12	29,480,000	0	0	0	0	12	29,480,000
3050206015	Microphone Table Stand	3	2,013,000	0	0	0	0	3	2,013,000
3050206016	Mic Conference	1	84,150,000	0	0	0	0	1	84,150,000
3050206017	Unit Power Supply	5	90,190,000	0	0	0	0	5	90,190,000
3050206020	Camera Video	2	99,327,860	0	0	0	0	2	99,327,860
3050206021	Tustel	1	3,076,250	0	0	0	0	1	3,076,250
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206030	Tiang Bendera	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206034	Tangga Aluminium	7	14,086,105	0	0	0	0	7	14,086,105
3050206036	Dispenser	19	60,098,534	14	32,046,000	0	0	33	92,144,534
3050206037	Mimbar/Podium	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206046	Handy Cam	4	70,398,500	0	0	0	0	4	70,398,500
3050206055	Heater (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use ))	1	666,232	0	0	0	0	1	666,232
3050206056	Karpet	2	59,605,000	0	0	0	0	2	59,605,000
3050206057	Vertikal Blind	51	72,705,184	0	0	0	0	51	72,705,184
3050206058	Gordyin/Kray	317	264,581,100	0	0	0	0	317	264,581,100
3050206059	Kabel Roll	10	7,700,000	0	0	0	0	10	7,700,000
3050206061	Keset Kaki	8	25,224,000	0	0	0	0	8	25,224,000
3050206068	DVD Player	1	2,000,000	0	0	0	0	1	2,000,000
3050206071	Kabel	3	2,029,500	0	0	0	0	3	2,029,500
3050206080	Bracket Standing Peralatan	10	25,117,660	0	0	0	0	10	25,117,660
3060101002	Audio Mixing Portable	1	5,802,500	0	0	0	0	1	5,802,500

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I**  
**INTRAKOMPTABEL**  
**RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM  
Tanggal : 28/05/24 9:25 AM  
Halaman : 4  
Kode Lap : lap\_bmn\_intra\_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3060101003	Audio Mixing Stationer	2	20,702,000	0	0	0	0	2	20,702,000
3060101017	Cassette Duplicator	3	34,824,000	0	0	0	0	3	34,824,000
3060101036	Microphone/Wireless MIC	6	41,074,000	0	0	0	0	6	41,074,000
3060101039	Light Signal	1	3,500,000	0	0	0	0	1	3,500,000
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	61,821,288	0	0	0	0	5	61,821,288
3060101056	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	1	2,381,500	0	0	0	0	1	2,381,500
3060101060	Power Amplifier	2	11,000,000	0	0	0	0	2	11,000,000
3060101079	Microphone Cable	1	1,870,000	0	0	0	0	1	1,870,000
3060101088	Voice Recorder	7	6,964,500	0	0	0	0	7	6,964,500
3060101091	Digital LED Running Text	6	23,499,300	0	0	0	0	6	23,499,300
3060102003	Camera Electronic	3	91,520,000	0	0	0	0	3	91,520,000
3060102012	Video Monitor	1	59,751,660	0	0	0	0	1	59,751,660
3060102013	Video Tape Recorder Portable	1	8,448,000	0	0	0	0	1	8,448,000
3060102016	Video Switcher	2	21,940,260	0	0	0	0	2	21,940,260
3060102020	Video Test Signal Generator	1	12,287,000	0	0	0	0	1	12,287,000
3060102034	Teleprompter	1	19,140,000	0	0	0	0	1	19,140,000
3060102045	Tripod Camera	19	58,388,958	0	0	0	0	19	58,388,958
3060102055	Lighting Stand Tripod	11	71,606,700	0	0	0	0	11	71,606,700
3060102056	Film Projector	5	146,646,000	0	0	0	0	5	146,646,000
3060102057	Slide Projector	1	3,190,000	0	0	0	0	1	3,190,000
3060102060	Camera Film	3	116,688,000	0	0	0	0	3	116,688,000
3060102061	Lensa Kamera	8	108,303,600	0	0	0	0	8	108,303,600
3060102099	Automatic Emergency Light	2	1,100,000	0	0	0	0	2	1,100,000
3060102107	Layar Film/Projector	1	16,400,000	0	0	0	0	1	16,400,000
3060102114	Standard True Signal/Master Rack	1	12,162,360	0	0	0	0	1	12,162,360
3060102118	Head Set	2	6,072,000	0	0	0	0	2	6,072,000
3060102128	Camera Digital	15	280,600,000	0	0	0	0	15	280,600,000
3060102129	Tas Kamera	1	2,400,200	0	0	0	0	1	2,400,200
3060102130	Lampu Blitz Kamera	2	8,231,500	0	0	0	0	2	8,231,500
3060102131	Lensa Filter	1	1,687,500	0	0	0	0	1	1,687,500
3060102135	LCD Monitor	7	1,204,207,689	0	0	0	0	7	1,204,207,689
3060102152	RF Cable	1	7,700,000	0	0	0	0	1	7,700,000
3060102165	Camera Conference	1	2,035,000	0	0	0	0	1	2,035,000
3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	4	44,145,077	0	0	0	0	4	44,145,077
3060104045	Mesin Barcode	1	3,740,000	0	0	0	0	1	3,740,000
3060199999	Alat Studio Lainnya	3	57,750,000	0	0	0	0	3	57,750,000
3060201001	Telephone (PABX)	2	241,354,500	0	0	0	0	2	241,354,500

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM  
Tanggal : 28/05/24 9:25 AM  
Halaman : 5  
Kode Lap : lap\_bmn\_intra\_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3060201003	Pesawat Telephone	14	2,741,000	0	0	0	0	14	2,741,000
3060201006	Handy Talky (HT)	16	48,210,000	0	0	0	0	16	48,210,000
3060201010	Facsimile	11	35,178,000	0	0	0	0	11	35,178,000
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	10	72,597,920	0	0	0	0	10	72,597,920
3060202999	Alat Komunikasi Radio Ssb Lainnya	4	9,800,000	0	0	0	0	4	9,800,000
3060206002	Wireless Amplifier	2	13,200,000	0	0	0	0	2	13,200,000
3060323022	Change Over Switch	12	15,923,160	0	0	0	0	12	15,923,160
3070101001	Sterilisator	1	9,900,000	0	0	0	0	1	9,900,000
3070101002	Minor Surgical Set (Alat Kedokteran Umum)	0	0	0	0	0	0	0	0
3070101005	Tensimeter	2	12,866,234	0	0	0	0	2	12,866,234
3070101009	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	1	658,000	0	0	0	0	1	658,000
3070101012	Metal Chatheeter	0	0	0	0	0	0	0	0
3070101018	Instrumen Cabinet	1	935,000	0	0	0	0	1	935,000
3070101022	Lemari Steriil	1	4,565,000	0	0	0	0	1	4,565,000
3070101026	Tabung O2	2	3,088,635	0	0	0	0	2	3,088,635
3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	3	12,155,075	0	0	0	0	3	12,155,075
3070101127	Kursi Dorong	1	2,791,250	0	0	0	0	1	2,791,250
3070102002	Dental Unit	1	123,200,000	0	0	0	0	1	123,200,000
3070102019	Portable Dental Unit	1	14,107,500	0	0	0	0	1	14,107,500
3070102093	Tang Ektrasi (Dewasa,Anak)	2	3,713,000	0	0	0	0	2	3,713,000
3070102118	Bein	1	671,293	0	0	0	0	1	671,293
3070102999	Alat Kedokteran Gigi Lainnya	2	12,200,000	0	0	0	0	2	12,200,000
3070106096	Otoscope Halogen Lamp	2	2,811,234	0	0	0	0	2	2,811,234
3070110011	Neirbekken Stainless Steel	0	0	0	0	0	0	0	0
3070111003	Bed Pan For Adult 310 mm Complete	1	3,436,000	0	0	0	0	1	3,436,000
3070111999	Alat Kedokteran Poliklinik Lainnya	1	89,347,170	0	0	0	0	1	89,347,170
3070118011	Data Catridge	1	24,657,600	0	0	0	0	1	24,657,600
3070199999	Alat Kedokteran Lainnya	2	8,980,519	0	0	0	0	2	8,980,519
3080111021	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	1	26,125,000	0	0	0	0	1	26,125,000
3080804009	DC / AC Power Supply	1	2,195,000	0	0	0	0	1	2,195,000
3090402031	Kamera Digital	0	0	0	0	0	0	0	0
3100101004	Internet	2	5,500,000	0	0	0	0	2	5,500,000
3100102001	P.C Unit	179	2,213,247,000	11	269,500,000	1	30,900,000	189	2,451,847,000
3100102002	Lap Top	73	1,087,528,498	60	1,106,675,000	18	212,310,000	115	1,981,893,498
3100102003	Note Book	17	309,832,000	0	0	0	0	17	309,832,000
3100102007	Net Book	118	1,567,210,000	0	0	0	0	118	1,567,210,000
3100102009	Tablet PC	11	87,779,458	0	0	0	0	11	87,779,458

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM  
Tanggal : 28/05/24 9:25 AM  
Halaman : 6  
Kode Lap : lap\_bmn\_intra\_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3100102999	Personal Komputer Lainnya	2	61,347,000	0	0	0	0	2	61,347,000
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	20	202,707,500	0	0	0	0	20	202,707,500
3100202014	Keyboard (Peralatan Mini Komputer)	3	24,170,500	0	0	0	0	3	24,170,500
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	137	357,234,500	5	78,750,000	0	0	142	435,984,500
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6	69,421,650	5	53,000,000	0	0	11	122,421,650
3100203017	External/ Portable Hardisk	46	91,783,000	0	0	0	0	46	91,783,000
3100204001	Server	3	116,400,000	1	30,900,000	0	0	4	147,300,000
3100204002	Router	23	118,198,719	0	0	0	0	23	118,198,719
3100204004	Modem	7	5,666,100	0	0	0	0	7	5,666,100
3100204030	Network Cable Tester	6	8,580,000	0	0	0	0	6	8,580,000
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	1	92,558,060	0	0	0	0	1	92,558,060
3190106003	Sepeda Olah Raga	1	22,977,620	0	0	0	0	1	22,977,620
<b>133111</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>19</b>	<b>59,683,830,714</b>	<b>0</b>	<b>3,497,161,222</b>	<b>1</b>	<b>226,529,355</b>	<b>18</b>	<b>62,954,462,581</b>
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	56,516,037,780	0	3,497,161,222	0	47,080,355	3	59,966,118,647
4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	4	154,108,000	0	0	0	0	4	154,108,000
4010106010	Bangunan Klinik/Puskesmas	1	481,163,934	0	0	0	0	1	481,163,934
4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2	1,422,910,000	0	0	0	0	2	1,422,910,000
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	1	82,559,000	0	0	0	0	1	82,559,000
4010114001	Gedung Garasi/Pool Permanen	2	383,440,000	0	0	0	0	2	383,440,000
4010130001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	5	464,163,000	0	0	0	0	5	464,163,000
4040104001	Pagar Permanen	1	179,449,000	0	0	1	179,449,000	0	0
<b>135121</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>27,080</b>	<b>1,088,776,559</b>	<b>1,861</b>	<b>235,023,023</b>	<b>1,605</b>	<b>200,032,140</b>	<b>27,336</b>	<b>1,123,767,442</b>
6010101001	Monografi	27,080	1,088,776,559	1,788	221,176,023	1,532	186,185,140	27,336	1,123,767,442
6010101999	Buku Lainnya	0	0	73	13,847,000	73	13,847,000	0	0
6010199999	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>166112</b>	<b>Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi</b>	<b>60</b>	<b>853,242,316</b>	<b>7</b>	<b>430,984,260</b>	<b>60</b>	<b>853,242,316</b>	<b>7</b>	<b>430,984,260</b>
3010305005	Sumersible Pump	1	229,812,000	0	0	1	229,812,000	0	0
3020102002	Micro Bus ( Penumpang 15 S/D 29 Orang )	0	0	1	124,922,000	0	0	1	124,922,000
3020102003	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	0	0	1	198,680,260	0	0	1	198,680,260
3020104001	Sepeda Motor	1	9,395,000	5	107,382,000	1	9,395,000	5	107,382,000
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105009	Movitex Board	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201005	Sice	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201009	Meja Komputer	0	0	0	0	0	0	0	0
3050204004	A.C. Split	50	565,570,316	0	0	50	565,570,316	0	0

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM  
Tanggal : 28/05/24 9:25 AM  
Halaman : 7  
Kode Lap : lap\_bmn\_intra\_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3050206002	Televisi	8	48,465,000	0	0	8	48,465,000	0	0
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206030	Tiang Bendera	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206037	Mimbar/Podium	0	0	0	0	0	0	0	0
3060201006	Handy Talky (HT)	0	0	0	0	0	0	0	0
3070101002	Minor Surgical Set (Alat Kedokteran Umum)	0	0	0	0	0	0	0	0
3070101012	Metal Chatheeter	0	0	0	0	0	0	0	0
3070110011	Neirbekken Stainless Steel	0	0	0	0	0	0	0	0
3100102001	P.C Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
3100102002	Lap Top	0	0	0	0	0	0	0	0
3100102007	Net Book	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>442,549,637,458</b>		<b>7,020,026,853</b>		<b>2,289,536,171</b>		<b>447,280,128,140</b>



**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I  
EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM  
Tanggal : 28/05/24 9:26 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_ekstra\_kel\_es1

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>132111</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>309</b>	<b>126,584,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309</b>	<b>126,584,000</b>
30502	ALAT RUMAH TANGGA	201	106,231,000	0	0	0	0	201	106,231,000
30601	ALAT STUDIO	8	1,760,000	0	0	0	0	8	1,760,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	90	17,867,000	0	0	0	0	90	17,867,000
30603	PERALATAN PEMANCAR	10	726,000	0	0	0	0	10	726,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>166112</b>	<b>Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>126,584,000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>126,584,000</b>

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I  
EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM  
Tanggal : 28/05/24 9:29 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_ekstra\_skel\_es1

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>132111</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>309</b>	<b>126,584,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309</b>	<b>126,584,000</b>
3050201	MEUBELAIR	195	104,526,000	0	0	0	0	195	104,526,000
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA ( HOME USE )	6	1,705,000	0	0	0	0	6	1,705,000
3060101	PERALATAN STUDIO AUDIO	8	1,760,000	0	0	0	0	8	1,760,000
3060201	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	90	17,867,000	0	0	0	0	90	17,867,000
3060346	PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO	10	726,000	0	0	0	0	10	726,000
3090402	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>166112</b>	<b>Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3090402	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>126,584,000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>126,584,000</b>

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I  
EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM  
Tanggal : 28/05/24 9:31 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_ekstra\_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>132111</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>309</b>	<b>126,584,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309</b>	<b>126,584,000</b>
3050201003	Kursi Besi/Metal	112	49,812,000	0	0	0	0	112	49,812,000
3050201009	Meja Komputer	19	5,050,000	0	0	0	0	19	5,050,000
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	64	49,664,000	0	0	0	0	64	49,664,000
3050206019	Stabilisator	1	275,000	0	0	0	0	1	275,000
3050206071	Kabel	5	1,430,000	0	0	0	0	5	1,430,000
3060101085	Cable	8	1,760,000	0	0	0	0	8	1,760,000
3060201003	Pesawat Telephone	90	17,867,000	0	0	0	0	90	17,867,000
3060346005	Conecctor	10	726,000	0	0	0	0	10	726,000
3090402014	Recharging System	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>166112</b>	<b>Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3090402014	Recharging System	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>126,584,000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>126,584,000</b>

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tanggal : 28/05/24 9:31 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap\_bmn\_gab\_kel\_es1

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>131111</b>	<b>Tanah</b>	<b>11,348</b>	<b>356,165,357,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,348</b>	<b>356,165,357,000</b>
20101	TANAH PERSIL	11,348	356,165,357,000	0	0	0	0	11,348	356,165,357,000
<b>132111</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>3,902</b>	<b>24,885,014,869</b>	<b>175</b>	<b>2,856,858,348</b>	<b>40</b>	<b>1,009,732,360</b>	<b>4,037</b>	<b>26,732,140,857</b>
30103	ALAT BANTU	18	2,105,854,500	1	229,812,000	0	0	19	2,335,666,500
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	35	5,719,454,450	2	178,266,250	8	599,855,510	29	5,297,865,190
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	5	3,241,700	0	0	0	0	5	3,241,700
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	2	10,380,492	0	0	0	0	2	10,380,492
30303	ALAT UKUR	3	4,507,972	0	0	0	0	3	4,507,972
30501	ALAT KANTOR	922	2,272,569,895	6	177,988,150	0	0	928	2,450,558,045
30502	ALAT RUMAH TANGGA	1,922	4,929,522,573	84	731,966,948	13	166,666,850	1,993	5,494,822,671
30601	ALAT STUDIO	141	2,581,340,592	0	0	0	0	141	2,581,340,592
30602	ALAT KOMUNIKASI	149	440,948,420	0	0	0	0	149	440,948,420
30603	PERALATAN PEMANCAR	22	16,649,160	0	0	0	0	22	16,649,160
30701	ALAT KEDOKTERAN	26	330,083,510	0	0	0	0	26	330,083,510
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	1	26,125,000	0	0	0	0	1	26,125,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	1	2,195,000	0	0	0	0	1	2,195,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	402	5,332,443,956	71	1,376,175,000	19	243,210,000	454	6,465,408,956
31002	PERALATAN KOMPUTER	252	1,086,720,029	11	162,650,000	0	0	263	1,249,370,029
31901	PERALATAN OLAH RAGA	1	22,977,620	0	0	0	0	1	22,977,620
<b>133111</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>19</b>	<b>59,683,830,714</b>	<b>0</b>	<b>3,497,161,222</b>	<b>1</b>	<b>226,529,355</b>	<b>18</b>	<b>62,954,462,581</b>
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	18	59,504,381,714	0	3,497,161,222	0	47,080,355	18	62,954,462,581
40401	TUGU/TANDA BATAS	1	179,449,000	0	0	1	179,449,000	0	0
<b>135121</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>27,080</b>	<b>1,088,776,559</b>	<b>1,861</b>	<b>235,023,023</b>	<b>1,605</b>	<b>200,032,140</b>	<b>27,336</b>	<b>1,123,767,442</b>
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	27,080	1,088,776,559	1,861	235,023,023	1,605	200,032,140	27,336	1,123,767,442
<b>166112</b>	<b>Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi</b>	<b>60</b>	<b>853,242,316</b>	<b>7</b>	<b>430,984,260</b>	<b>60</b>	<b>853,242,316</b>	<b>7</b>	<b>430,984,260</b>
30103	ALAT BANTU	1	229,812,000	0	0	1	229,812,000	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	1	9,395,000	7	430,984,260	1	9,395,000	7	430,984,260
30501	ALAT KANTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	58	614,035,316	0	0	58	614,035,316	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>442,676,221,458</b>		<b>7,020,026,853</b>		<b>2,289,536,171</b>		<b>447,406,712,140</b>

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tanggal : 28/05/24 9:32 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap\_bmn\_gab\_skel\_es1

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>131111</b>	<b>Tanah</b>	<b>11,348</b>	<b>356,165,357,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,348</b>	<b>356,165,357,000</b>
2010104	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	11,348	356,165,357,000	0	0	0	0	11,348	356,165,357,000
<b>132111</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>3,902</b>	<b>24,885,014,869</b>	<b>175</b>	<b>2,856,858,348</b>	<b>40</b>	<b>1,009,732,360</b>	<b>4,037</b>	<b>26,732,140,857</b>
3010302	FEEDER	2	1,490,098,000	0	0	0	0	2	1,490,098,000
3010303	COMPRESSOR	1	3,210,000	0	0	0	0	1	3,210,000
3010304	ELECTRIC GENERATING SET	4	118,458,500	0	0	0	0	4	118,458,500
3010305	POMPA	11	494,088,000	1	229,812,000	0	0	12	723,900,000
3020101	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	9	2,401,393,950	0	0	1	168,871,250	8	2,232,522,700
3020102	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	15	2,899,943,500	1	168,871,250	2	323,602,260	14	2,745,212,490
3020104	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	10	186,979,500	1	9,395,000	5	107,382,000	6	88,992,500
3020105	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	1	231,137,500	0	0	0	0	1	231,137,500
3030103	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	5	3,241,700	0	0	0	0	5	3,241,700
3030205	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	1	5,506,969	0	0	0	0	1	5,506,969
3030212	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM	1	4,873,523	0	0	0	0	1	4,873,523
3030301	ALAT UKUR UNIVERSAL	2	2,417,972	0	0	0	0	2	2,417,972
3030308	ALAT UKUR/PEMBANDING	1	2,090,000	0	0	0	0	1	2,090,000
3050101	MESIN KETIK	8	13,486,000	0	0	0	0	8	13,486,000
3050102	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	14	21,126,980	0	0	0	0	14	21,126,980
3050103	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	7	309,000,000	0	0	0	0	7	309,000,000
3050104	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	649	1,020,087,095	0	0	0	0	649	1,020,087,095
3050105	ALAT KANTOR LAINNYA	244	908,869,820	6	177,988,150	0	0	250	1,086,857,970
3050201	MEUBELAIR	1,297	2,002,085,495	1	9,988,000	0	0	1,298	2,012,073,495
3050202	ALAT PENGUKUR WAKTU	1	92,000	0	0	0	0	1	92,000
3050203	ALAT PEMBERSIH	6	17,940,500	1	4,600,000	0	0	7	22,540,500
3050204	ALAT PENDINGIN	98	1,314,645,235	55	603,070,316	0	0	153	1,917,715,551
3050205	ALAT DAPUR	1	6,462,500	0	0	0	0	1	6,462,500
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA ( HOME USE )	519	1,588,296,843	27	114,308,632	13	166,666,850	533	1,535,938,625
3060101	PERALATAN STUDIO AUDIO	43	215,199,088	0	0	0	0	43	215,199,088
3060102	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	94	2,304,651,504	0	0	0	0	94	2,304,651,504
3060104	PERALATAN CETAK	1	3,740,000	0	0	0	0	1	3,740,000
3060199	ALAT STUDIO LAINNYA	3	57,750,000	0	0	0	0	3	57,750,000
3060201	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	143	417,948,420	0	0	0	0	143	417,948,420
3060202	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	4	9,800,000	0	0	0	0	4	9,800,000
3060206	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	2	13,200,000	0	0	0	0	2	13,200,000
3060323	PROGRAM INPUT EQUIPMENT	12	15,923,160	0	0	0	0	12	15,923,160
3060346	PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO	10	726,000	0	0	0	0	10	726,000
3070101	ALAT KEDOKTERAN UMUM	12	46,959,194	0	0	0	0	12	46,959,194



**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tanggal : 28/05/24 9:32 AM

Halaman : 3

Kode Lap : lap\_bmn\_gab\_skel\_es1

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3070110	ALAT KEDOKTERAN ANAK	0	0	0	0	0	0	0	0
3090402	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	0	0	0	0	0	0	0	0
3100102	PERSONAL KOMPUTER	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>442,676,221,458</b>		<b>7,020,026,853</b>		<b>2,289,536,171</b>		<b>447,406,712,140</b>

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM  
Tanggal : 28/05/24 9:32 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_gab\_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>131111</b>	<b>Tanah</b>	<b>11,348</b>	<b>356,165,357,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,348</b>	<b>356,165,357,000</b>
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	11,348	356,165,357,000	0	0	0	0	11,348	356,165,357,000
<b>132111</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>3,902</b>	<b>24,885,014,869</b>	<b>175</b>	<b>2,856,858,348</b>	<b>40</b>	<b>1,009,732,360</b>	<b>4,037</b>	<b>26,732,140,857</b>
3010302001	Elevator /Lift	2	1,490,098,000	0	0	0	0	2	1,490,098,000
3010303003	Stationary Compressor	1	3,210,000	0	0	0	0	1	3,210,000
3010304002	Portable Generating Set	1	4,042,500	0	0	0	0	1	4,042,500
3010304003	Stationary Generating Set	3	114,416,000	0	0	0	0	3	114,416,000
3010305002	Portable Water Pump	5	126,665,000	0	0	0	0	5	126,665,000
3010305003	Stationary Water Pump	4	129,748,000	0	0	0	0	4	129,748,000
3010305005	Sumersible Pump	2	237,675,000	1	229,812,000	0	0	3	467,487,000
3020101001	Sedan	7	1,552,243,950	0	0	1	168,871,250	6	1,383,372,700
3020101002	Jeep	2	849,150,000	0	0	0	0	2	849,150,000
3020102002	Micro Bus ( Penumpang 15 S/D 29 Orang )	2	374,922,000	0	0	1	124,922,000	1	250,000,000
3020102003	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	13	2,525,021,500	1	168,871,250	1	198,680,260	13	2,495,212,490
3020104001	Sepeda Motor	10	186,979,500	1	9,395,000	5	107,382,000	6	88,992,500
3020105999	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya	1	231,137,500	0	0	0	0	1	231,137,500
3030103001	Battery Charge	3	1,921,700	0	0	0	0	3	1,921,700
3030103031	Tester Listrik/Telepon/Internet	2	1,320,000	0	0	0	0	2	1,320,000
3030205001	Tool Kit Set	1	5,506,969	0	0	0	0	1	5,506,969
3030212025	Mesin Pompa air PMK	1	4,873,523	0	0	0	0	1	4,873,523
3030301064	Memori Programmer	2	2,417,972	0	0	0	0	2	2,417,972
3030308012	Termometer Standar	1	2,090,000	0	0	0	0	1	2,090,000
3050101003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	6	9,546,000	0	0	0	0	6	9,546,000
3050101008	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	2	3,940,000	0	0	0	0	2	3,940,000
3050102002	Mesin Hitung Listrik	14	21,126,980	0	0	0	0	14	21,126,980
3050103007	Mesin Fotocopy Folio	5	234,200,000	0	0	0	0	5	234,200,000
3050103008	Mesin Fotocopy Double Folio	2	74,800,000	0	0	0	0	2	74,800,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	87	161,964,500	0	0	0	0	87	161,964,500
3050104002	Lemari Kayu	56	114,759,000	0	0	0	0	56	114,759,000
3050104003	Rak Besi	278	334,819,890	0	0	0	0	278	334,819,890
3050104004	Rak Kayu	57	88,344,984	0	0	0	0	57	88,344,984
3050104005	Filing Cabinet Besi	152	292,050,721	0	0	0	0	152	292,050,721
3050104007	Brandkas	8	4,775,000	0	0	0	0	8	4,775,000
3050104011	Rotary Filling	2	4,467,000	0	0	0	0	2	4,467,000
3050104016	Roll Opek	7	10,906,000	0	0	0	0	7	10,906,000
3050104020	Lemari Display	2	8,000,000	0	0	0	0	2	8,000,000
3050105001	Tabung Pemadam Api	90	66,102,500	0	0	0	0	90	66,102,500



**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM  
Tanggal : 28/05/24 9:32 AM  
Halaman : 2  
Kode Lap : lap\_bmn\_gab\_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3050105002	Hydrant	3	23,372,000	0	0	0	0	3	23,372,000
3050105003	Sprinkler	1	1,156,000	0	0	0	0	1	1,156,000
3050105004	Fire Alarm	3	3,615,000	0	0	0	0	3	3,615,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	3	163,281,745	0	0	0	0	3	163,281,745
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	1	15,532,000	1	139,488,150	0	0	2	155,020,150
3050105009	Movitex Board	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105010	White Board	33	7,807,890	0	0	0	0	33	7,807,890
3050105013	Copy Board/Elektrik White Board	1	2,732,000	0	0	0	0	1	2,732,000
3050105015	Alat Penghancur Kertas	17	106,706,000	0	0	0	0	17	106,706,000
3050105017	Mesin Absensi	8	138,762,000	0	0	0	0	8	138,762,000
3050105024	Alat Pemotong Kertas	3	11,528,000	0	0	0	0	3	11,528,000
3050105025	Headmachine Besar	3	2,690,000	0	0	0	0	3	2,690,000
3050105031	Panel Pameran	4	3,887,000	0	0	0	0	4	3,887,000
3050105037	White Board Electronic	2	4,278,000	0	0	0	0	2	4,278,000
3050105038	Laser Pointer	11	11,440,000	0	0	0	0	11	11,440,000
3050105039	Display	2	9,900,000	0	0	0	0	2	9,900,000
3050105045	Penangkal Petir	1	6,931,000	0	0	0	0	1	6,931,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	10	123,209,500	5	38,500,000	0	0	15	161,709,500
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	23	43,300,000	0	0	0	0	23	43,300,000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	18	126,925,935	0	0	0	0	18	126,925,935
3050105062	Bel	3	24,475,000	0	0	0	0	3	24,475,000
3050105095	Wastafel Portable	1	9,996,250	0	0	0	0	1	9,996,250
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	3	1,242,000	0	0	0	0	3	1,242,000
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	2	2,156,234	0	0	0	0	2	2,156,234
3050201002	Meja Kerja Kayu	230	229,130,781	0	0	0	0	230	229,130,781
3050201003	Kursi Besi/Metal	324	357,392,000	0	0	0	0	324	357,392,000
3050201004	Kursi Kayu	12	3,372,000	0	0	0	0	12	3,372,000
3050201005	Sice	31	381,625,416	0	0	0	0	31	381,625,416
3050201008	Meja Rapat	110	322,609,000	1	9,988,000	0	0	111	332,597,000
3050201009	Meja Komputer	78	18,233,000	0	0	0	0	78	18,233,000
3050201010	Tempat Tidur Besi	1	2,866,234	0	0	0	0	1	2,866,234
3050201013	Meja Telepon	44	5,038,000	0	0	0	0	44	5,038,000
3050201014	Meja Resepsionis	4	23,064,000	0	0	0	0	4	23,064,000
3050201016	Kasur/Spring Bed	8	38,385,000	0	0	0	0	8	38,385,000
3050201017	Sketsel	3	9,007,000	0	0	0	0	3	9,007,000
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	450	609,206,830	0	0	0	0	450	609,206,830
3050202003	Jam Elektronik	1	92,000	0	0	0	0	1	92,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM  
Tanggal : 28/05/24 9:32 AM  
Halaman : 3  
Kode Lap : lap\_bmn\_gab\_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	2,886,500	0	0	0	0	1	2,886,500
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	2	9,372,500	1	4,600,000	0	0	3	13,972,500
3050203004	Mesin Cuci	1	2,970,000	0	0	0	0	1	2,970,000
3050203005	Air Cleaner	1	2,299,000	0	0	0	0	1	2,299,000
3050203999	Alat Pembersih Lainnya	1	412,500	0	0	0	0	1	412,500
3050204001	Lemari Es	12	45,564,910	5	37,500,000	0	0	17	83,064,910
3050204003	A.C. Window	8	234,610,000	0	0	0	0	8	234,610,000
3050204004	A.C. Split	76	1,033,216,325	50	565,570,316	0	0	126	1,598,786,641
3050204006	Kipas Angin	2	1,254,000	0	0	0	0	2	1,254,000
3050205019	Mixer	1	6,462,500	0	0	0	0	1	6,462,500
3050206002	Televisi	17	99,345,000	12	67,465,000	0	0	29	166,810,000
3050206007	Loudspeaker	18	76,250,500	0	0	0	0	18	76,250,500
3050206008	Sound System	18	486,049,418	1	14,797,632	13	166,666,850	6	334,180,200
3050206012	Wireless	3	12,498,000	0	0	0	0	3	12,498,000
3050206014	Microphone	12	29,480,000	0	0	0	0	12	29,480,000
3050206015	Microphone Table Stand	3	2,013,000	0	0	0	0	3	2,013,000
3050206016	Mic Conference	1	84,150,000	0	0	0	0	1	84,150,000
3050206017	Unit Power Supply	5	90,190,000	0	0	0	0	5	90,190,000
3050206019	Stabilisator	1	275,000	0	0	0	0	1	275,000
3050206020	Camera Video	2	99,327,860	0	0	0	0	2	99,327,860
3050206021	Tustel	1	3,076,250	0	0	0	0	1	3,076,250
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206030	Tiang Bendera	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206034	Tangga Aluminium	7	14,086,105	0	0	0	0	7	14,086,105
3050206036	Dispenser	19	60,098,534	14	32,046,000	0	0	33	92,144,534
3050206037	Mimbar/Podium	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206046	Handy Cam	4	70,398,500	0	0	0	0	4	70,398,500
3050206055	Heater (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use ))	1	666,232	0	0	0	0	1	666,232
3050206056	Karpet	2	59,605,000	0	0	0	0	2	59,605,000
3050206057	Vertikal Blind	51	72,705,184	0	0	0	0	51	72,705,184
3050206058	Gordyin/Kray	317	264,581,100	0	0	0	0	317	264,581,100
3050206059	Kabel Roll	10	7,700,000	0	0	0	0	10	7,700,000
3050206061	Keset Kaki	8	25,224,000	0	0	0	0	8	25,224,000
3050206068	DVD Player	1	2,000,000	0	0	0	0	1	2,000,000
3050206071	Kabel	8	3,459,500	0	0	0	0	8	3,459,500
3050206080	Bracket Standing Peralatan	10	25,117,660	0	0	0	0	10	25,117,660

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM  
Tanggal : 28/05/24 9:32 AM  
Halaman : 4  
Kode Lap : lap\_bmn\_gab\_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3060101002	Audio Mixing Portable	1	5,802,500	0	0	0	0	1	5,802,500
3060101003	Audio Mixing Stationer	2	20,702,000	0	0	0	0	2	20,702,000
3060101017	Cassette Duplicator	3	34,824,000	0	0	0	0	3	34,824,000
3060101036	Microphone/Wireless MIC	6	41,074,000	0	0	0	0	6	41,074,000
3060101039	Light Signal	1	3,500,000	0	0	0	0	1	3,500,000
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	61,821,288	0	0	0	0	5	61,821,288
3060101056	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	1	2,381,500	0	0	0	0	1	2,381,500
3060101060	Power Amplifier	2	11,000,000	0	0	0	0	2	11,000,000
3060101079	Microphone Cable	1	1,870,000	0	0	0	0	1	1,870,000
3060101085	Cable	8	1,760,000	0	0	0	0	8	1,760,000
3060101088	Voice Recorder	7	6,964,500	0	0	0	0	7	6,964,500
3060101091	Digital LED Running Text	6	23,499,300	0	0	0	0	6	23,499,300
3060102003	Camera Electronic	3	91,520,000	0	0	0	0	3	91,520,000
3060102012	Video Monitor	1	59,751,660	0	0	0	0	1	59,751,660
3060102013	Video Tape Recorder Portable	1	8,448,000	0	0	0	0	1	8,448,000
3060102016	Video Switcher	2	21,940,260	0	0	0	0	2	21,940,260
3060102020	Video Test Signal Generator	1	12,287,000	0	0	0	0	1	12,287,000
3060102034	Teleprompter	1	19,140,000	0	0	0	0	1	19,140,000
3060102045	Tripod Camera	19	58,388,958	0	0	0	0	19	58,388,958
3060102055	Lighting Stand Tripod	11	71,606,700	0	0	0	0	11	71,606,700
3060102056	Film Projector	5	146,646,000	0	0	0	0	5	146,646,000
3060102057	Slide Projector	1	3,190,000	0	0	0	0	1	3,190,000
3060102060	Camera Film	3	116,688,000	0	0	0	0	3	116,688,000
3060102061	Lensa Kamera	8	108,303,600	0	0	0	0	8	108,303,600
3060102099	Automatic Emergency Light	2	1,100,000	0	0	0	0	2	1,100,000
3060102107	Layar Film/Projector	1	16,400,000	0	0	0	0	1	16,400,000
3060102114	Standard True Signal/Master Rack	1	12,162,360	0	0	0	0	1	12,162,360
3060102118	Head Set	2	6,072,000	0	0	0	0	2	6,072,000
3060102128	Camera Digital	15	280,600,000	0	0	0	0	15	280,600,000
3060102129	Tas Kamera	1	2,400,200	0	0	0	0	1	2,400,200
3060102130	Lampu Blitz Kamera	2	8,231,500	0	0	0	0	2	8,231,500
3060102131	Lensa Filter	1	1,687,500	0	0	0	0	1	1,687,500
3060102135	LCD Monitor	7	1,204,207,689	0	0	0	0	7	1,204,207,689
3060102152	RF Cable	1	7,700,000	0	0	0	0	1	7,700,000
3060102165	Camera Conference	1	2,035,000	0	0	0	0	1	2,035,000
3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	4	44,145,077	0	0	0	0	4	44,145,077
3060104045	Mesin Barcode	1	3,740,000	0	0	0	0	1	3,740,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM  
Tanggal : 28/05/24 9:32 AM  
Halaman : 5  
Kode Lap : lap\_bmn\_gab\_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3060199999	Alat Studio Lainnya	3	57,750,000	0	0	0	0	3	57,750,000
3060201001	Telephone (PABX)	2	241,354,500	0	0	0	0	2	241,354,500
3060201003	Pesawat Telephone	104	20,608,000	0	0	0	0	104	20,608,000
3060201006	Handy Talky (HT)	16	48,210,000	0	0	0	0	16	48,210,000
3060201010	Facsimile	11	35,178,000	0	0	0	0	11	35,178,000
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	10	72,597,920	0	0	0	0	10	72,597,920
3060202999	Alat Komunikasi Radio Ssb Lainnya	4	9,800,000	0	0	0	0	4	9,800,000
3060206002	Wireless Amplifier	2	13,200,000	0	0	0	0	2	13,200,000
3060323022	Change Over Switch	12	15,923,160	0	0	0	0	12	15,923,160
3060346005	Conecctor	10	726,000	0	0	0	0	10	726,000
3070101001	Sterilisator	1	9,900,000	0	0	0	0	1	9,900,000
3070101002	Minor Surgical Set (Alat Kedokteran Umum)	0	0	0	0	0	0	0	0
3070101005	Tensimeter	2	12,866,234	0	0	0	0	2	12,866,234
3070101009	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	1	658,000	0	0	0	0	1	658,000
3070101012	Metal Chatheeter	0	0	0	0	0	0	0	0
3070101018	Instrumen Cabinet	1	935,000	0	0	0	0	1	935,000
3070101022	Lemari Steriil	1	4,565,000	0	0	0	0	1	4,565,000
3070101026	Tabung O2	2	3,088,635	0	0	0	0	2	3,088,635
3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	3	12,155,075	0	0	0	0	3	12,155,075
3070101127	Kursi Dorong	1	2,791,250	0	0	0	0	1	2,791,250
3070102002	Dental Unit	1	123,200,000	0	0	0	0	1	123,200,000
3070102019	Portable Dental Unit	1	14,107,500	0	0	0	0	1	14,107,500
3070102093	Tang Ektrasi (Dewasa,Anak)	2	3,713,000	0	0	0	0	2	3,713,000
3070102118	Bein	1	671,293	0	0	0	0	1	671,293
3070102999	Alat Kedokteran Gigi Lainnya	2	12,200,000	0	0	0	0	2	12,200,000
3070106096	Otoscope Halogen Lamp	2	2,811,234	0	0	0	0	2	2,811,234
3070110011	Neirbekken Stainless Steel	0	0	0	0	0	0	0	0
3070111003	Bed Pan For Adult 310 mm Complete	1	3,436,000	0	0	0	0	1	3,436,000
3070111999	Alat Kedokteran Poliklinik Lainnya	1	89,347,170	0	0	0	0	1	89,347,170
3070118011	Data Catridge	1	24,657,600	0	0	0	0	1	24,657,600
3070199999	Alat Kedokteran Lainnya	2	8,980,519	0	0	0	0	2	8,980,519
3080111021	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	1	26,125,000	0	0	0	0	1	26,125,000
3080804009	DC / AC Power Supply	1	2,195,000	0	0	0	0	1	2,195,000
3090402014	Recharging System	0	0	0	0	0	0	0	0
3090402031	Kamera Digital	0	0	0	0	0	0	0	0
3100101004	Internet	2	5,500,000	0	0	0	0	2	5,500,000
3100102001	P.C Unit	179	2,213,247,000	11	269,500,000	1	30,900,000	189	2,451,847,000



**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM  
Tanggal : 28/05/24 9:32 AM  
Halaman : 7  
Kode Lap : lap\_bmn\_gab\_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3050201003	Kursi Besi/Metal	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201005	Sice	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201009	Meja Komputer	0	0	0	0	0	0	0	0
3050204004	A.C. Split	50	565,570,316	0	0	50	565,570,316	0	0
3050206002	Televisi	8	48,465,000	0	0	8	48,465,000	0	0
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206030	Tiang Bendera	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206037	Mimbar/Podium	0	0	0	0	0	0	0	0
3060201006	Handy Talky (HT)	0	0	0	0	0	0	0	0
3070101002	Minor Surgical Set (Alat Kedokteran Umum)	0	0	0	0	0	0	0	0
3070101012	Metal Chatheeter	0	0	0	0	0	0	0	0
3070110011	Neirbekken Stainless Steel	0	0	0	0	0	0	0	0
3090402014	Recharging System	0	0	0	0	0	0	0	0
3100102001	P.C Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
3100102002	Lap Top	0	0	0	0	0	0	0	0
3100102007	Net Book	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>442,676,221,458</b>		<b>7,020,026,853</b>		<b>2,289,536,171</b>		<b>447,406,712,140</b>

**LAPORAN BARANG PEMBANTU PENGGUNA - TINGKAT ESELON I**  
**ASET TAK BERWUJUD**  
**RINCIAN PER KELOMPOK BARANG**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM  
 Tanggal : 28/05/24 9:33 AM  
 Halaman : 1  
 Kode Lap : lap\_atb\_kel\_es1

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>162151</b>	<b>Software</b>	<b>6</b>	<b>4,184,325,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4,184,325,500</b>
80101	ASET TAK BERWUJUD	6	4,184,325,500	0	0	0	0	6	4,184,325,500
<b>162191</b>	<b>Aset Tak Berwujud Lainnya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519</b>	<b>49,998,160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519</b>	<b>49,998,160</b>
80101	ASET TAK BERWUJUD	0	0	519	49,998,160	0	0	519	49,998,160
<b>TOTAL</b>			<b>4,184,325,500</b>		<b>49,998,160</b>		<b>0</b>		<b>4,234,323,660</b>

**LAPORAN BARANG PEMBANTU PENGGUNA - TINGKAT ESELON I**  
**ASET TAK BERWUJUD**  
**RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM  
 Tanggal : 28/05/24 9:33 AM  
 Halaman : 1  
 Kode Lap : lap\_atb\_skel\_es1

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>162151</b>	<b>Software</b>	<b>6</b>	<b>4,184,325,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4,184,325,500</b>
8010101	ASET TAK BERWUJUD	6	4,184,325,500	0	0	0	0	6	4,184,325,500
<b>162191</b>	<b>Aset Tak Berwujud Lainnya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519</b>	<b>49,998,160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519</b>	<b>49,998,160</b>
8010101	ASET TAK BERWUJUD	0	0	519	49,998,160	0	0	519	49,998,160
<b>TOTAL</b>			<b>4,184,325,500</b>		<b>49,998,160</b>		<b>0</b>		<b>4,234,323,660</b>



**LAPORAN BARANG PEMBANTU PENGGUNA - TINGKAT ESELON I  
ASET TAK BERWUJUD  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM  
Tanggal : 28/05/24 9:42 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_atb\_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>162151</b>	<b>Software</b>	<b>6</b>	<b>4,184,325,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4,184,325,500</b>
8010101001	Software Komputer	6	4,184,325,500	0	0	0	0	6	4,184,325,500
<b>162191</b>	<b>Aset Tak Berwujud Lainnya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519</b>	<b>49,998,160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519</b>	<b>49,998,160</b>
8010101050	Buku Digital	0	0	519	49,998,160	0	0	519	49,998,160
<b>TOTAL</b>			<b>4,184,325,500</b>		<b>49,998,160</b>		<b>0</b>	<b>4,234,323,660</b>	

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA - TINGKAT ESELON I  
BARANG BERSEJARAH  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAKPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tanggal : 28/05/24 9:45 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap\_bmn\_sejarah\_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
			BERTAMBAH	BERKURANG	
KODE	URAIAN	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS
1	2	3	4	5	6

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA - TINGKAT ESELON I  
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan  
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM  
Tanggal : 28/05/24 9:44 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_kdp\_es1

AKUN NERACA/ SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D 1 JANUARI 2023	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7
<b>136111</b>	<b>Konstruksi Dalam pengerjaan</b>	<b>0</b>	<b>6,143,022,252</b>	<b>6,143,022,252</b>	<b>0</b>	
7010101002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	
7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	0	6,143,022,252	6,143,022,252	0	
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>6,143,022,252</b>	<b>6,143,022,252</b>	<b>0</b>	

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
 POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

**UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl.Data : 20/05/24 12:00 AM  
 Tgl.Cetak : 28/05/24 10:08 AM  
 Halaman : 1  
 Kode Lap : lap\_bmn\_neraca\_face\_es1

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	181,076,570
131111	Tanah	356,165,357,000
132111	Peralatan dan Mesin	26,605,556,857
133111	Gedung dan Bangunan	62,954,462,581
135121	Aset Tetap Lainnya	1,123,767,442
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(22,314,784,270)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(25,623,349,003)
162151	Software	4,184,325,500
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	49,998,160
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	430,984,260
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(430,984,260)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(4,184,325,500)
<b>J U M L A H</b>		<b>399,142,085,337</b>

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA - TINGKAT ESELON I**  
**POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2023**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tanggal : 28/05/24 10:10 AM  
 Halaman : 1  
 Kode Lap : lap\_bmn\_neraca\_sawal\_es1

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	98,063,299
131111	Tanah	356,165,357,000
132111	Peralatan dan Mesin	24,758,430,869
133111	Gedung dan Bangunan	59,683,830,714
135121	Aset Tetap Lainnya	1,088,776,559
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(19,957,797,804)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(21,482,221,943)
162151	Software	4,184,325,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	853,242,316
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(853,242,316)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(4,184,325,500)
<b>J U M L A H</b>		<b>400,354,438,694</b>

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA - TINGKAT ESELON I**  
**POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2023**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tanggal : 28/05/24 10:09 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_neraca\_sawal\_es1

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	98,063,299
131111	Tanah	356,165,357,000
132111	Peralatan dan Mesin	24,758,430,869
133111	Gedung dan Bangunan	59,683,830,714
135121	Aset Tetap Lainnya	1,088,776,559
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(19,957,797,804)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(21,482,221,943)
162151	Software	4,184,325,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	853,242,316
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(853,242,316)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(4,184,325,500)
<b>J U M L A H</b>		<b>400,354,438,694</b>



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**



***LAMPIRAN***  
***REVISI BELANJA***  
***PEGAWAI***



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Jl. Mayor Jenderal Sutoyo No. 10 Cilandak Jakarta Timur 13640

Telp. (021) 8091908 Faksimile : (021) 8002265-8011753

Website : www.bphn.go.id

Nomor : PHN-KU/01.03-04  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Usulan Revisi Anggaran Belanja Pegawai  
Tahun Anggaran 2023

03 Oktober 2023

Yth. Direktur Jenderal Anggaran  
@  
Jakarta

1. Dasar Hukum :

- a. Peraturan Menteri Keuangan No. 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- b. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA- 013.10.1.409255/2023 tanggal 30 November 2022 (DS 5814-9544-9400-0150);
- c. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA- 013.10.1.409255/2023 tanggal 03 Oktober 2023 Revisi ke-14 (DS 2129-0679-8220-8552).

2. Bersama ini disuskan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tema revisi : - Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap;  
- Revisi Administrasi.
- b. Mekanisme revisi : - Pergeseran Anggaran antar satuan kerja;  
- Perubahan halaman III DIPA.

3. Alasan/pertimbangan perlunya revisi anggaran :

- a. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS;
- b. Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2023.

4. Berkenaan dengan usulan Revisi Anggaran tersebut di atas, dilampirkan data dukung berupa :

- a. Matriks perubahan (semula-menjadi);
- b. Arsip data komputer RKA-K/L DIPA Revisi;
- c. DIPA Petikan sebelum revisi;
- d. Data dukung lainnya.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan,

  
M. Prof. Dr. Widodo Eriksyahana, S.H., M.Hum.  
NIP. 19710501199303100

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
Jalan May. Jen. Sutoyo Cililitan Jakarta 13640  
Telp.(021) 8091908, Faksimili (021) 8002265-8011753  
Laman: www.bphn.go.id

Nomor : PHN.1-KU.01.01-507  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Inventarisasi Perkiraan Kelebihan  
Belanja Pegawai BPHN TA 2023

25 Agustus 2023

Yth. Sekretaris Jenderal C.q. Kepala Biro Keuangan  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
di  
Jakarta

Menindaklanjuti Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III Tahun Anggaran 2023 mengenai Kelebihan Pagu Anggaran Belanja Pegawai Badan Pembinaan Hukum Nasional TA 2023, bersama ini di sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Realisasi belanja pegawai Badan Pembinaan Hukum Nasional bulan Januari s.d. Agustus 2023 dan gaji bulan ke 13 dan 14 TA 2023.
2. Perkiraan kebutuhan anggaran belanja pegawai bulan September s.d. Desember TA 2023 termasuk kebutuhan uang makan dan uang lembur selama 5 (lima) bulan TA 2023.
3. Perkiraan kelebihan belanja pegawai Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana terlampir.

Sehubungan hal tersebut di atas, selanjutnya kami mengharapkan sisa belanja pegawai tersebut dapat digunakan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.



Plt. Sekretaris BPHN,



Constantinus Kristomo  
NIP. 197404111999031001



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 12, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 2435 TELEPON (021) 3849315, FAKSIMILE (021) 3847157; SITUS [www.anggaran.kemenkeu.go.id](http://www.anggaran.kemenkeu.go.id)

Nomor : S-518/AG/AG.5/2023 13 Oktober 2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : 2 (Dua) Berkas  
Hal : Pengesahan Usulan Revisi Anggaran Pergeseran Anggaran Antar Unit  
Kemenkumham TA 2023

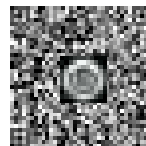
Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM  
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Sistem Perbendaharaan  
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran

Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK-KU.01.02-225 tanggal 10 Oktober 2023 hal Usulan Revisi Anggaran, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Usulan Revisi Anggaran telah disahkan dan pangkalan data RKA-KL DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbaharui.
2. Dengan pengesahan Revisi Anggaran ini Kode Pengaman (Digital Stamp) DIPA Petikan yang digunakan sebagai dasar transaksi berubah menjadi sebagaimana terlampir.
3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala KPPN agar mengunduh PDF File DIPA Petikan Revisi sebagai dasar untuk mencetak DIPA Petikan Revisi.
4. Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta menerapkan prinsip kehati-hatian, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Direktur Jenderal Anggaran  
Direktur Anggaran Bidang Politik,  
Hukum, Pertahanan dan Keamanan,  
dan Bagian Anggaran Bendahara Umum  
Negara



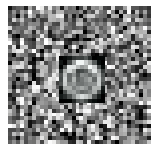
Ditandatangani secara elektronik  
Dwi Pudjiastuti Handayani

Tembusan:  
Terlampir



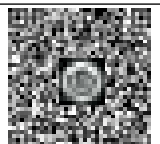
## DAFTAR TEMBUSAN SURAT

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI
3. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
4. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia
5. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
6. Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat
11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau
12. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau
13. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi
14. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan
15. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung
16. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu
17. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung
18. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten
19. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
21. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah
22. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta
23. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur
24. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat
25. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah
26. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
27. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
28. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat
29. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur
30. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan
31. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat
32. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah
33. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
34. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo
35. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara
36. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara
37. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku
38. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat
39. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua



**DAFTAR PERUBAHAN *DIGITAL STAMP*  
 REVISI PERGESERAN ANTAR UNIT KEMENKUMHAM**

NO	SATUAN KERJA	DIGITAL STAMP	
		SEMULA	MENJADI
<b>SEKRETARIAT JENDERAL</b>			
1	404233 SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	2073-2946-0468-5872	6524-2578-5174-5332
2	408720 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA	0902-4084-5600-8986	1409-1315-7551-9800
3	408736 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT	4442-5698-2048-2299	0099-6017-1165-2216
4	408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	8427-2530-5842-0053	3701-4028-7948-0308
5	408751 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR	4032-6010-1666-7569	0119-4990-1033-1064
6	408767 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA	4660-4007-8457-8936	5100-0399-8315-9007
7	408773 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN	8230-4602-6506-6107	0523-0190-3810-0556
8	408782 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH	9341-7069-0603-8207	6484-3580-4205-7773
9	408798 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT	6339-4424-8870-0812	5699-0617-1983-8514
10	408802 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU	7019-2940-0001-4545	8100-4555-6660-1557
11	408818 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN	0307-5400-0926-6304	0900-0796-8598-8041
12	408824 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	6740-6955-4090-9914	2077-5536-4004-5002
13	408830 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT	4002-7528-8090-0673	0500-4870-0221-6013
14	408849 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN SELATAN	5037-0716-7360-5013	0807-9600-3007-0612
15	408861 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA	1030-3693-7880-0118	9570-5005-7200-3031
16	408886 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR	7844-0840-9475-3116	4609-2059-9466-1403
17	408892 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU	7176-1115-4065-1822	0958-5175-4043-1140
18	408906 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA	4370-8388-0850-4144	9336-4461-0955-0109
19	409169 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	4826-5253-9145-1307	0468-5054-3007-3528
20	409175 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	6030-5043-0275-9957	7980-2430-3680-3943
21	409181 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA	7047-2781-2919-0624	8606-0020-9507-0715
22	409190 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TENGAH	8010-6090-0394-5527	0058-0094-0535-4868
23	409201 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA	7080-0051-5487-6066	5866-1082-3704-4202
24	409210 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH	3264-3843-5467-6427	7859-0330-7509-6500
25	409226 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA BARAT	0991-1001-3951-4540	0806-3900-6550-9261
26	648999 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN	7705-9075-3010-1579	6308-7250-5449-9248
27	649001 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	4903-0070-5705-7164	9247-5794-9634-8717
28	649018 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM GORONTALO	6702-6606-4188-0040	9014-1733-2080-2098



NO	SATUAN KERJA	DIGITAL STAMP	
		SEMULA	MENJADI
29	649022 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA	0797-2666-7885-0790	3560-8219-0787-5706
30	667772 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	0007-3085-0909-0638	6052-0659-5200-0090
31	667786 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	1632-0413-9764-0767	5806-3548-8803-0064
32	667790 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	0841-0239-0472-8468	1190-5307-5968-9092
<b>DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>			
33	626181 DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	0149-1245-3422-9022	1602-2312-8869-6589
<b>DITJEN HAK ASASI MANUSIA</b>			
34	622020 DIREKTORAT JENDERAL HAM	0600-0583-3072-9256	7897-3585-6052-6505
<b>BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL</b>			
35	409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	2129-0679-8220-8552	5620-2065-1947-7700
<b>BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAM</b>			
36	635549 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	4563-7591-4026-2486	3770-0978-7349-5670



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan  
Telepon (021) 525 3004 (8 saluran) Ext. 212, 222; Faksimile (021) 525 3159  
Laman: [www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id)

Nomor : SEK-KU.01.02-225  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Usulan Revisi Anggaran

10 Oktober 2023

Yth. Direktur Jenderal Anggaran  
Kementerian Keuangan  
di Jakarta

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- d. DIPA Induk Sekretariat Jenderal (Pusat) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. SP DIPA-013.01.1.404233/2022 tanggal 30 November 2022 kode *Digital Stamp* DS: 0040-7073-9451-7331;
- e. DIPA Sekretariat Jenderal (Pusat) SP DIPA- 013.01.1.404233/2023 tanggal 27 September 2023 kode *Digital Stamp* DS:2073-2946-0468-5872;
- f. DIPA Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan SP DIPA- 013.08.1.626181/2023 tanggal 22 Agustus 2023 kode *Digital Stamp* DS:0149-1245-3422-9022;
- g. DIPA Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia SP DIPA-013.09.1.622020/2023 tanggal 25 Agustus 2023 kode *Digital Stamp* DS:0600-0583-3072-9256;
- h. DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional SP DIPA- 013.10.1.409288/2023 tanggal 03 Oktober 2023 kode *Digital Stamp* DS:2129-0679-8220-8552;
- i. DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia SP DIPA-013.11.1.635549/2023 tanggal 06 September 2023 kode *Digital Stamp* DS:4563-7591-4026-2486;
- j. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua SP DIPA- 013.01.2.408906/2023 tanggal 22 Agustus 2023 kode *Digital Stamp* DS:4370-8388-0850-4144;
- k. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah SP DIPA-013.01.2.409210/2023 tanggal 22 Agustus 2023 kode *Digital Stamp* DS:3264-3843-5467-6427;
- l. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat SP DIPA-013.01.2.409226/2023 tanggal 22 Agustus 2023 kode *Digital Stamp* DS:0991-1001-3951-4540;
- m. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh SP DIPA- 013.01.2.408782/2023 tanggal 22 Agustus 2023 kode *Digital Stamp* DS:9341-7069-0603-8207;
- n. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah SP DIPA-013.01.2.409210/2022 tanggal 22 Agustus 2023 kode *Digital Stamp* DS:3264-3843-5467-6427;

- o. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara SP DIPA-013.01.2.408861/2023 tanggal 22 Agustus 2023 kode *Digital Stamp* DS: 9570-5005-7200-3031;
- p. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara SP DIPA-013.01.2.649022/2023 tanggal 30 Agustus 2023 kode *Digital Stamp* DS:0797-2666-7885-0790;
- q. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara SP DIPA-013.01.2.408767/2023 tanggal 07 September 2023 kode *Digital Stamp* DS:4660-4007-8457-8936;
- r. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau SP DIPA- 013.01.2.408802/2023 tanggal 25 September 2023 kode *Digital Stamp* DS:7019-2940-0001-4545;
- s. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung SP DIPA-013.01.2.649001/2023 tanggal 26 September 2023 kode *Digital Stamp* DS:4903-0070-5705-7164;
- t. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi SP DIPA- 013.01.2.409169/2023 tanggal 26 September 2023 kode *Digital Stamp* DS:4826-5253-9145-1307;
- u. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta SP DIPA-013.01.2.408720/2023 tanggal 27 September 2023 kode *Digital Stamp* DS:0902-4084-5600-8986;
- v. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten SP DIPA- 013.01.2.648999/2023 tanggal 27 September 2023 kode *Digital Stamp* DS:7705-9075-3010-1579;
- w. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara SP DIPA-013.01.2.409201/2023 tanggal 27 September 2023 kode *Digital Stamp* DS:7080-0051-5487-6066;
- x. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung SP DIPA-013.01.2.408824/2023 tanggal 27 September 2023 kode *Digital Stamp* DS:6740-6955-4090-9914;
- y. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan SP DIPA-013.01.2.408773/2023 tanggal 29 September 2023 kode *Digital Stamp* DS:8230-4602-6506-6107;
- z. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DI Yogyakarta SP DIPA-013.01.2.409181/2023 tanggal 02 Oktober 2023 kode *Digital Stamp* DS:7047-2781-2919-0624;
- aa. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah SP DIPA-013.01.2.408742/2023 tanggal 02 Oktober 2023 kode *Digital Stamp* DS:8427-2530-5842-0053;
- bb. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur SP DIPA-013.01.2.408886/2023 tanggal 02 Oktober 2023 kode *Digital Stamp* DS:7844-0840-9475-3116;
- cc. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu SP DIPA-013.01.2.649001/2023 tanggal 02 Oktober 2023 kode *Digital Stamp* DS:6030-5043-0275-9957;
- dd. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo SP DIPA-013.01.2.649018/2023 tanggal 02 Oktober 2023 kode *Digital Stamp* DS:6702-6606-4188-0040;

- ee. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat SP DIPA-013.01.2.667790/2023 tanggal 02 Oktober 2023 kode *Digital Stamp* DS:0841-0239-0472-8468;
- ff. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku SP DIPA- 013.01.2.408892/2023 tanggal 02 Oktober 2023 kode *Digital Stamp* DS:7176-1115-4065-1822;
- gg. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat SP DIPA-013.01.2.667772/2023 tanggal 02 Oktober 2023 kode *Digital Stamp* DS:0007-3085-0909-0638;
- hh. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan SP DIPA-013.01.2.408849/2023 tanggal 02 Oktober 2023 kode *Digital Stamp* DS:5037-0716-7360-5013;
- ii. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat SP DIPA-013.01.2.408736/2023 tanggal 03 Oktober 2023 kode *Digital Stamp* DS:4442-5698-2048-2299;
- jj. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur SP DIPA-013.01.2.408751/2023 tanggal 03 Oktober 2023 kode *Digital Stamp* DS:4032-6010-1666-7569;
- kk. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat SP DIPA-013.01.2.408798/2023 tanggal 03 Oktober 2023 kode *Digital Stamp* DS:6339-4424-8870-0812;
- ll. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat SP DIPA-013.01.2.408830/2023 tanggal 03 Oktober 2023 kode *Digital Stamp* DS:4002-7528-8090-0673;
- mm. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan SP DIPA-013.01.2.408818/2023 tanggal 04 Oktober 2023 kode *Digital Stamp* DS:0307-5400-0926-6304;
- nn. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau SP DIPA-013.01.2.667786/2023 tanggal 04 Oktober 2023 kode *Digital Stamp* DS:1632-0413-9764-0767.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

a. Tema revisi:

- 1) Perubahan rincian anggaran dan/atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap;
- 2) Revisi administrasi:
  - Penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA;
  - Pencantuman catatan pada Halaman IV B DIPA;
  - Pemutakhiran Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

b. Tata cara revisi berupa pergeseran anggaran dalam 1 (satu) satuan kerja, antar satuan kerja, antar Eselon I dalam 1 (satu) program anggaran yang menimbulkan pergeseran Rincian *Output* (RO) dalam rangka pemenuhan Belanja Operasional, pengadaan CASN dan pemenuhan layanan sarana dan prasarana internal dan pemenuhan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA 2023.

3. Alasan/pertimbangan perlunya Revisi Anggaran:

- a. Pergeseran anggaran yang dilakukan dalam rangka pemenuhan Belanja Operasional, pengadaan CASN dan pemenuhan layanan sarana dan prasarana internal dan pemenuhan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA 2023;
- b. Pergeseran anggaran yang dilakukan menyebabkan perubahan pada volume Rincian Output (RO).



4. Berkaitan dengan hal tersebut, usulan Revisi Anggaran di atas dilampirkan data dukung berupa:
- a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir;
  - b. Arsip Data Komputer RKA-K/L DIPA Revisi;
  - c. Surat Persetujuan Eselon I;
  - d. Surat Pernyataan Eselon I;
  - e. Surat Pemberitahuan Perubahan RKA;
  - f. RKBMN; dan
  - g. Data dukung terkait.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ABR', written over a diagonal line that extends from the top right towards the bottom left.

Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Keuangan;
3. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan  
Telepon (021) 525 3004 (8 saluran) Ext. 212, 222; Faksimile (021) 525 3159  
Laman: [www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id)

Nomor : SEK-KU.01.02-226

10 Oktober 2023

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Persetujuan Revisi Anggaran

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran  
di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- d. Surat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Nomor HAM-KU.01.02-28 tanggal 27 September 2023 hal Usulan Revisi Anggaran;
- e. Surat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPH-KU.01.02-58 tanggal 02 Oktober 2023 hal Usulan Revisi Anggaran;
- f. Surat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.1.PR.01.04-223 tanggal 03 Oktober 2023 hal Usulan Revisi Anggaran Kegiatan Rakernis Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Penganugerahan Legalisasi Daerah Tahun 2023;
- g. Surat Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-KU.01.02-04 tanggal 03 Oktober 2023 hal Usulan Revisi Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023;
- h. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Nomor W.30.KU.05.01-387 tanggal 20 September 2023 Hal Revisi Optimalisasi Belanja Modal dan Permintaan Pemenuhan Data Dukung Revisi Penambahan Anggaran;
- i. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Nomor W.27.PR.01.04-245 tanggal 27 September 2023 hal Revisi DIPA Penambahan Anggaran Pengadaan CASN TA 2023;
- j. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat Nomor W.21-KU.01.02-4472 tanggal 27 September 2023 hal Usulan Revisi Anggaran Dalam Rangka Penambahan Anggaran;
- k. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Nomor W.9-KU.01.02-7100 tanggal 29 September 2023 hal Usulan Revisi Anggaran Biaya Tambahan CPNS TA 2023 Satker 408824;
- l. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Nomor W16.KU.01.02-5321 tanggal 29 September 2023 hal Pemenuhan Data Dukung Revisi Penambahan Anggaran;
- m. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Nomor W29.KU.01.02-5369 tanggal 29 September 2023 Hal Permohonan Pengajuan Revisi Penambahan Anggaran Pengadaan CASN Tahun 2023;
- n. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Nomor W.2-KU.01.01-49605 tanggal 02 Oktober 2023 hal Usulan Revisi Anggaran;

- o. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta Nomor W14.KU.01.02-11298 tanggal 02 Oktober 2023 hal Pemenuhan Data Dukung Revisi Penambahan Anggaran CPNS;
- p. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan Nomor W.19.KU.01.02-5462 tanggal 02 Oktober 2023 hal Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan Belanja Pengadaan CASN TA. 2023 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan;
- q. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat Nomor W.31.KU.01.04-628 tanggal 02 Oktober 2023 hal Usulan ABT CASN TA 2023;
- r. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Nomor W.28-PR.01.04-4458 tanggal 02 Oktober 2023 Hal Usulan Revisi DIPA Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Pengadaan CASN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku (408892) Tahun 2023;
- s. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Nomor W.11-KU.01.02-11311 tanggal 02 Oktober 2023 hal Penyampaian Data Dukung Penambahan Anggaran;
- t. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Nomor W15.KU.01.02-625 tanggal 02 Oktober 2023 hal Usulan Revisi Anggaran;
- u. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Nomor W.10-KU.01.02-1155 tanggal 02 Oktober 2023 hal Usulan Permohonan Revisi Penambahan Anggaran TA 2023;
- v. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor W.12-KU.01.01-409 tanggal 02 Oktober 2023 hal Usulan Revisi Anggaran;
- w. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Nomor W13.KU.01.04-1210 tanggal 02 Oktober 2023 hal Usulan Revisi Anggaran, Pemenuhan Data Dukung Penambahan Anggaran CASN Tahun Anggaran 2023;
- x. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Nomor W.33-KU.01.01-124 tanggal 02 Oktober 2023 hal Usulan Revisi Anggaran;
- y. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Nomor W.23-KU.01.02-622 tanggal 02 Oktober 2023 hal Usulan Revisi Anggaran Belanja Tambahan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023;
- z. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung Nomor W.7.KU.01.01-6861 tanggal 02 Oktober 2023 hal Usulan Revisi Anggaran;
- aa. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Nomor W.17-KU.01.02-717 tanggal 02 Oktober 2023 hal Usulan Revisi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) TA 2023 Kantor Wilayah Kalimantan Tengah;
- bb. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Nomor W4.KU.01.02-8723 tanggal 02 Oktober 2023 hal Usulan Revisi Anggaran;
- cc. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh nomor W1.KU.01.02-2948 tanggal 02 Oktober 2023 hal Usul Revisi Anggaran Kanwil Aceh (408782);
- dd. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Nomor W.25-KU.01.02-7039 tanggal 03 Oktober 2023 hal Usulan Revisi Anggaran;
- ee. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo Nomor W.26.KU.01.02-3519 tanggal 03 Oktober 2023 hal Pemenuhan Data Dukung Revisi Penambahan Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo;
- ff. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur Nomor Surat W.22-KU.01.02-7977 tanggal 03 Oktober 2023 hal Pemenuhan Data Dukung Revisi Penambahan Anggaran;
- gg. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Nomor W3.KU.01.02-174 tanggal 03 Oktober 2023 hal Usulan Revisi Pemenuhan Penambahan Anggaran Kantor Wilayah kemenkumham Sumatera Barat tahun Anggaran 2023;

- hh. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Nomor W.6.KU.01.01-0217 tanggal 03 Oktober 2023 hal Usulan Revisi Anggaran;
- ii. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Nomor W.24-KU.01.01-5226 tanggal 03 Oktober 2023 Hal Usulan Revisi DIPA Kanwil Kemenkumham Palu/Setjen (409210);
- jj. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Nomor W8-KU.01.01-469 tanggal 03 Oktober 2023 hal Usulan Revisi Anggaran;
- kk. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi Nomor W.5-PR.01.04-110 tanggal 03 Oktober 2023 hal Usulan ABT Pengadaan CPNS Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Jambi TA. 2023 (409169);
- ll. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau Nomor W.32.KU.03.01-8308 tanggal 05 Oktober 2023 Hal Usulan Revisi Anggaran.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Lingkup : 1. Perubahan rincian anggaran dan/atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap;  
2. Revisi Administrasi.
- b. Program : Dukungan Manajemen;
- c. Satker : Sekretariat Jenderal (404233)
  - Kegiatan : (1552) Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM  
(1553) Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM  
(1554) Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM  
(1555) Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Program dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Berbasis Kinerja  
(1556) Layanan Barang Milik Negara Kementerian Hukum dan HAM  
(1557) Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum dan HAM
  - Satker : Ditjen Peraturan Perundang-undangan (626181)
    - Kegiatan : (1598) Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan
  - Satker : Direktorat Jenderal HAM (622020)
    - Kegiatan : (1614) Diseminasi Penguatan HAM
  - Satker : Badan Pembinaan Hukum Nasional (409288)
    - Kegiatan : (1614) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN
  - Satker : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
    - Kegiatan : (1619) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
  - Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (649022)
    - Kegiatan : (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
  - Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (409190)
    - Kegiatan : (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

- Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan (408849)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (408720)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau (408802)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (649001)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jambi (409169)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (408767)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan (408818)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat (408798)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung (408824)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau (667786)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta (409181)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (408736)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (408742)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

- Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (409201)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Satker Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (408773)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Satker Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur (408886)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Satker Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat (667790)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Satker Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur (408751)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Satker Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo (649018)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Satker Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat (409226)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Satker Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku (408892)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Satker Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua (408906)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Satker Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh (408782)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Satker Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat (667772)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Satker Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat (408830)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Satker Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara (408861)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Satker Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (409210)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

- Satker Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu (408736)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Satker Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan (408849)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

3. Pergeseran anggaran antar Eselon I menyebabkan penambahan pagu anggaran pada DIPA Unit Sekretariat Jenderal pada Kegiatan 1557.EBA.994.001 sebesar Rp5.936.547.000,- dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA 2023 dengan rincian sebagai berikut:

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	PAGU
			Selisih
1	409288	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	550.000.000
2	635549	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN	5.386.547.000
<b>TOTAL</b>			<b>5.936.547.000</b>

4. Pergeseran anggaran antar KRO dalam 1 (satu) satuan kerja dari 1557.EBA.994.001 ke 1553.EBC.954.053 sebesar Rp39.024.310.000,- dan antar satuan kerja menyebabkan pengurangan pagu anggaran pada DIPA Unit Sekretariat Jenderal pada Kegiatan 1557.EBA.994.001 sebesar Rp 14.417.448.000,- dalam rangka pemenuhan pengadaan CASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA 2023 dengan rincian sebagai berikut:

NO	KODE SATKER	KANTOR WILAYAH	PAGU
			Selisih
1	408720	KANWIL DKI JAKARTA	1.462.790.000
2	408736	KANWIL JAWA BARAT	770.030.000
3	409181	KANWIL YOGYAKARTA	346.300.000
4	648999	KANWIL BANTEN	730.811.000
5	408751	KANWIL JAWA TIMUR	1.103.870.000
6	408742	KANWIL JAWA TENGAH	400.738.000
7	409226	KANWIL NUSA TENGGARA BARAT	518.870.000
8	408886	KANWIL NUSA TENGGARA TIMUR	511.332.000
9	408782	KANWIL ACEH	402.036.000
10	408767	KANWIL SUMATERA UTARA	389.370.000
11	408798	KANWIL SUMATERA BARAT	478.371.000
12	408818	KANWIL SUMATERA SELATAN	836.067.000
13	649001	KANWIL BANGKA BELITUNG	203.656.000
14	408736	KANWIL BENGKULU	396.610.000
15	408824	KANWIL LAMPUNG	681.216.000
16	409169	KANWIL JAMBI	211.725.000

17	408802	KANWIL RIAU	421.156.000
18	667786	KANWIL KEPULAUAN RIAU	187.450.000
19	408830	KANWIL KALIMANTAN BARAT	262.980.000
20	409210	KANWIL KALIMANTAN TENGAH	289.705.000
21	649018	KANWIL GORONTALO	273.927.000
22	409201	KANWIL SULAWESI TENGGARA	606.334.000
23	409210	KANWIL SULAWESI TENGAH	316.700.000
24	408773	KANWIL SULAWESI SELATAN	793.982.000
25	408861	KANWIL SULAWESI UTARA	375.266.000
26	667790	KANWIL SULAWESI BARAT	259.950.000
27	408892	KANWIL MALUKU	296.240.000
28	649022	KANWIL MALUKU UTARA	319.674.000
29	408906	KANWIL PAPUA	266.764.000
30	667772	KANWIL PAPUA BARAT	303.528.000
<b>TOTAL</b>			<b>14.417.448.000</b>

5. Pergeseran anggaran antar satuan kerja, antar Eselon I menyebabkan pengurangan pagu anggaran pada DIPA Unit Sekretariat Jenderal pada Kegiatan 1557.EBA.994.002 sebesar Rp3.285.648.000,- dalam rangka pemenuhan Belanja Operasional, pemenuhan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA 2023 dengan rincian sebagai berikut:

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	PAGU
			Selisih
1	622020	DITJEN HAM	1.267.737.000
2	626181	DITJEN PP	1.709.561.000
3	409201	KANWIL SULAWESI TENGGARA	308.350.000
<b>TOTAL</b>			<b>3.285.648.000</b>

6. Pergeseran anggaran antar KRO dalam 1 (satu) satuan kerja pada satuan kerja berupa optimalisasi pengadaan CASN, pemenuhan Belanja Operasional, pemenuhan sarana dan prasarana dan pemenuhan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA 2023 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SATUAN KERJA	CASN	NON CASN	TOTAL
1	(404233) Sekretariat Jenderal			
	- 1554.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan		1.169.415.000	1.169.415.000
	- 1557.EBB.951 Layanan Sarana Internal		3.160.452.000	3.160.452.000
2	(635549) Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM		695.554.000	695.554.000
3	(649001) Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung		193.750.000	193.750.000



4	(409175) Kanwil Kemenkumham Bengkulu		270.000.000	270.000.000
5	(408782) Kanwil Kemenkumham Aceh		98.000.000	98.000.000
6	(408861) Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara		206.562.000	206.562.000
7	(409210) Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah	50.026.000	25.498.000	75.524.000
8	(408849) Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan	383.867.000		383.867.000
9	(408802) Kanwil Kemenkumham Riau	186.019.000		186.019.000
10	(408767) Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara	459.720.000		459.720.000

7. Revisi Administrasi berupa:

- a. Penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA pada seluruh satuan kerja;
- b. Pencantuman Catatan Halaman IV B;
- c. Pemutakhiran Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) pada satuan kerja:
  - 1) Sekretariat Jenderal;
  - 2) Direktorat Jenderal HAM;
  - 3) Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM;
  - 4) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
  - 5) Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh;
  - 6) Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu;
  - 7) Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan.

8. Alokasi belanja pegawai operasional pada tingkat kementerian telah terpenuhi sampai dengan akhir tahun.

9. Dalam hal terjadi kekurangan belanja pegawai operasional akan segera dipenuhi melalui pergeseran alokasi anggaran pada Kementerian Hukum dan HAM.

10. Dengan ini dinyatakan bahwa revisi anggaran berupa perubahan rincian anggaran dan/atau pergeseran rincian anggaran dalam pagu anggaran tetap serta Revisi Administrasi tersebut dapat disetujui.

Demikian untuk menjadi periksa.



Sekretaris Jenderal,

Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Keuangan;
3. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan  
Telepon (021) 525 3004 (8 saluran) Ext. 212, 222; Faksimile (021) 525 3159  
Laman: [www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id)

**SURAT PERNYATAAN SEKRETARIS JENDERAL**  
**NOMOR: SEK-KU.01.02-227**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

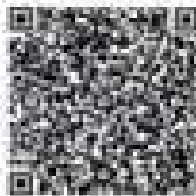
1. Menyetujui substansi usulan revisi anggaran yang diusulkan oleh:
  - a. Wisnu Nugroho Dewanto, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal berupa pergeseran anggaran dalam 1 (satu) satuan kerja, antar satuan kerja, antar Eselon I dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan Belanja Operasional, pengadaan CASN, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana internal dan pemenuhan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA 2023 yang menyebabkan pengurangan pagu sebesar Rp8.480.901.000,- dan Revisi Administrasi;
  - b. Asep N. Mulyana, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja, antar Eselon I dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA 2023 sebesar Rp1.709.561.000,- dan Revisi Administrasi;
  - c. Aman Riyadi, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja, antar Eselon I dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA 2023 sebesar Rp1.267.737.000,- dan Revisi Administrasi;
  - d. Jonny Pesta Simamora, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja, antar Eselon I dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA 2023 sebesar Rp5.386.547.000,- dan Revisi Administrasi;
  - e. Constantinus Kristomo, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja, antar Eselon I dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA 2023 sebesar Rp550.000.000,- dan Revisi Administrasi;
  - f. Ibnu Chuldun, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah DKI Jakarta berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan pengadaan CASN sebesar Rp1.462.790.000,- dan Revisi Administrasi;
  - f. R. Andika Dwi Prasetya, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan pengadaan CASN sebesar Rp770.030.000,- dan Revisi Administrasi;
  - g. Agung Rektono Seto, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan pengadaan CASN sebesar Rp346.300.000,- dan Revisi Administrasi;

- h. Tejo Harwanto, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan pengadaan CASN sebesar Rp730.811.000,- dan Revisi Administrasi;
- i. Saefur Rochim, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan pengadaan CASN sebesar Rp1.103.870.000,- dan Revisi Administrasi;
- j. Hantor Situmorang, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan pengadaan CASN sebesar Rp400.738.000,- dan Revisi Administrasi;
- k. Romi Yudianto, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan pengadaan CASN sebesar Rp518.870.000,- dan Revisi Administrasi;
- l. Marciana D. Jone, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan pengadaan CASN sebesar Rp511.332.000,- dan Revisi Administrasi;
- m. Rakhmat Renaldy, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan pengadaan CASN dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana internal sebesar Rp402.036.000,- dan Revisi Administrasi.
- n. Imam Suyudi, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan pengadaan CASN dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana internal sebesar Rp389.370.000,- dan Revisi Administrasi.
- o. Haris Sukamto, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan pengadaan CASN sebesar Rp478.371.000,- dan Revisi Administrasi.
- p. Ilham Djaya, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan pengadaan CASN sebesar Rp836.067.000,- dan Revisi Administrasi.
- q. Harun Sulianto, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan pengadaan CASN dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana internal sebesar Rp203.656.000,- dan Revisi Administrasi.
- r. Santosa, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan pengadaan CASN dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana internal sebesar Rp396.610.000,- dan Revisi Administrasi.
- s. Sorta Delima Br Tobing, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan pengadaan CASN sebesar Rp681.216.000,- dan Revisi Administrasi.

- t. M. Adnan, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan pengadaan CASN sebesar Rp211.725.000,- dan Revisi Administrasi.
- u. Mhd. Jahari Sitepu, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan pengadaan CASN sebesar Rp421.156.000,- dan Revisi Administrasi.
- v. Saffar Muhammad Godam, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan pengadaan CASN sebesar Rp187.450.000,- dan Revisi Administrasi.
- w. Pria Wibawa, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan pengadaan CASN sebesar Rp262.980.000,- dan Revisi Administrasi.
- x. Hendra Ekaputra, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan pengadaan CASN sebesar Rp289.705.000,- dan Revisi Administrasi.
- y. Heni Susila Wardoyo, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan pengadaan CASN sebesar Rp273.927.000,- dan Revisi Administrasi.
- z. Silvester Sili Laba, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan Belanja Operasional dan pemenuhan pengadaan CASN sebesar Rp606.334.000,- dan Revisi Administrasi.
- aa. Romi Yudianto, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan Belanja Operasional dan pemenuhan pengadaan CASN sebesar Rp316.700.000,- dan Revisi Administrasi.
- bb. Liberti Sitingjak, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan pengadaan CASN sebesar Rp793.982.000,- dan Revisi Administrasi.
- cc. Ronald Lumbuun, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan Belanja Operasional dan pemenuhan pengadaan CASN sebesar Rp375.266.000,- dan Revisi Administrasi.
- dd. Parlindungan, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan pengadaan CASN sebesar Rp259.950.000,- dan Revisi Administrasi.
- ee. Marasidin, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan pengadaan CASN sebesar Rp296.240.000,- dan Revisi Administrasi.
- ff. M. Adnan, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan pengadaan CASN sebesar Rp319.674.000,- dan Revisi Administrasi.

- gg. Anthonius Mathius Ayorbaba, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan pengadaan CASN sebesar Rp266.764.000,- dan Revisi Administrasi.
  - hh. Taufiqumakhsan, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan pengadaan CASN sebesar Rp303.528.000,- dan Revisi Administrasi.
  - ii. Fatsol AS, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan berupa pergeseran anggaran dalam 1 (satu) satuan kerja dalam rangka pemenuhan pengadaan CASN sebesar Rp383.967.000,- dan Revisi Administrasi.
2. Usul revisi anggaran beserta dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah disusun dengan lengkap dan benar.
  3. Usul revisi anggaran ini telah diperhitungkan dengan seksama dan tidak mengakibatkan kekurangan pada belanja pegawai operasional dan insentif WBK/WBBM pada tahun anggaran berjalan.
  4. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima segala risiko dan konsekuensinya sesuai dengan tugas dan wewenang saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.



Jakarta, 10 Oktober 2023

Sekretaris Jenderal,



A handwritten signature in black ink, written over the postage stamp and extending to the right.

(H.C.) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan  
Telepon (021) 525 3004 (8 saluran) Ext. 212, 222; Faksimile (021) 525 3159  
Laman: [www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id)

Nomor : SEK-KU.01.02-228

10 Oktober 2023

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penetapan Perubahan Rencana Kerja (RKA) atas Revisi Anggaran

Yth.

1. Direktur Jenderal Anggaran  
Kementerian Keuangan
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
5. Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
di tempat

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satker atas Revisi Anggaran telah ditetapkan dan pangkalan data RKA-K/L DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbaharui.
2. Dengan penetapan perubahan RKA ini, RKA Satker dimaksud berubah menjadi sebagai terlampir.
3. Bersama ini diusulkan Pengesahan Revisi Anggaran atas jenis revisi anggaran dalam rangka pemenuhan belanja operasional, pengadaan CASN, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana internal dan pemenuhan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA 2023.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Keuangan;
3. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI)**  
**PER SATUAN KERJA**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**Badan Pembinaan Hukum Nasional**

PROG/KEG/ OUTPUT	SEMULA		MENJADI		SELISIH	
	JUMLAH	BLOKIR	JUMLAH	BLOKIR	JUMLAH	BLOKIR
409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	49,436,291,000	0	48,886,291,000	0	-550,000,000	0
013.10.BB Program Pembentukan Regulasi	4,335,189,000	0	4,335,189,000	0	0	0
1611 Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	2,737,390,000	0	2,737,390,000	0	0	0
1611.AAD Peraturan Presiden [PerPres, R.Perpres] [00]	318,490,000	0	318,490,000	0	0	0
Volume :	1.00 PerPres, R.Perpres		1.00 PerPres, R.Perpres		0.00 PerPres, R.Perpres	
52 BELANJA BARANG	318,490,000	0	318,490,000	0	0	0
A RM	318,490,000	0	318,490,000	0	0	0
1611.ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM [Rekomendasi Kebijakan, Kajian] [00]	1,881,755,000	0	1,881,755,000	0	0	0
Volume :	201.00 Rekomendasi Kebijakan,		201.00 Rekomendasi Kebijakan,		0.00 Rekomendasi	
52 BELANJA BARANG	1,881,755,000	0	1,881,755,000	0	0	0
A RM	1,881,755,000	0	1,881,755,000	0	0	0
1611.ADG Standarisasi Profesi dan SDM [Orang] [00]	537,145,000	0	537,145,000	0	0	0
Volume :	100.00 Orang		100.00 Orang		0.00 Orang	
52 BELANJA BARANG	537,145,000	0	537,145,000	0	0	0
A RM	537,145,000	0	537,145,000	0	0	0
1613 Perencanaan Hukum Nasional	1,597,799,000	0	1,597,799,000	0	0	0
1613.ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM [Rekomendasi Kebijakan, Kajian] [00]	1,597,799,000	0	1,597,799,000	0	0	0
Volume :	13.00 Rekomendasi Kebijakan,		13.00 Rekomendasi Kebijakan,		0.00 Rekomendasi	
52 BELANJA BARANG	1,597,799,000	0	1,597,799,000	0	0	0
A RM	1,597,799,000	0	1,597,799,000	0	0	0
013.10.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	4,472,643,000	0	4,472,643,000	0	0	0
1610 Pendokumentasian Data Hukum dan Peningkatan Integrasi Jaringan Informasi Hukum Nasional	1,452,291,000	0	1,452,291,000	0	0	0
1610.BMA Data dan Informasi Publik [layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi] [00]	1,452,291,000	0	1,452,291,000	0	0	0
Volume :	166.00 layanan, dokumen,		166.00 layanan, dokumen,		0.00 layanan, dokumen,	
52 BELANJA BARANG	1,367,291,000	0	1,367,291,000	0	0	0
A RM	1,367,291,000	0	1,367,291,000	0	0	0
53 BELANJA MODAL	85,000,000	0	85,000,000	0	0	0

Digital Stamp Sebelum : DS : 2129-0679-8220-8552

Digital Stamp Sesudah : DS : 5620-2065-1947-7700

**MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI)**  
**PER SATUAN KERJA**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**Badan Pembinaan Hukum Nasional**

PROG/KEG/ OUTPUT	SEMULA		MENJADI		SELISIH	
	JUMLAH	BLOKIR	JUMLAH	BLOKIR	JUMLAH	BLOKIR
A RM	85,000,000	0	85,000,000	0	0	0
1612 Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	3,020,352,000	0	3,020,352,000	0	0	0
1612.ADG Standarisasi Profesi dan SDM [Orang] [00]	258,023,000	0	258,023,000	0	0	0
Volume : 432.00 Orang			432.00 Orang		0.00 Orang	
52 BELANJA BARANG	258,023,000	0	258,023,000	0	0	0
A RM	258,023,000	0	258,023,000	0	0	0
1612.BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat [Kelompok Masyarakat] [00]	651,095,000	0	651,095,000	0	0	0
Volume : 410.00 Kelompok Masyarakat			410.00 Kelompok Masyarakat		0.00 Kelompok Masyarakat	
52 BELANJA BARANG	651,095,000	0	651,095,000	0	0	0
A RM	651,095,000	0	651,095,000	0	0	0
1612.BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga [Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan] [00]	2,111,234,000	0	2,111,234,000	0	0	0
Volume : 652.00 Lembaga, Laporan,			652.00 Lembaga, Laporan,		0.00 Lembaga, Laporan,	
52 BELANJA BARANG	2,111,234,000	0	2,111,234,000	0	0	0
A RM	2,111,234,000	0	2,111,234,000	0	0	0
013.10.WA Program Dukungan Manajemen	40,628,459,000	0	40,078,459,000	0	-550,000,000	0
1614 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	40,628,459,000	0	40,078,459,000	0	-550,000,000	0
1614.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal [Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit] [00]	33,736,285,000	0	33,186,285,000	0	-550,000,000	0
Volume : 7.00 Layanan, Laporan,			7.00 Layanan, Laporan,		0.00 Layanan, Laporan,	
51 BELANJA PEGAWAI	17,552,977,000	0	17,002,977,000	0	-550,000,000	0
A RM	17,552,977,000	0	17,002,977,000	0	-550,000,000	0
52 BELANJA BARANG	16,183,308,000	0	16,183,308,000	0	0	0
A RM	16,183,308,000	0	16,183,308,000	0	0	0
1614.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Unit, m2, Paket] [00]	4,742,946,000	0	4,742,946,000	0	0	0
Volume : 69.00 Unit, m2, Paket			69.00 Unit, m2, Paket		0.00 Unit, m2, Paket	
53 BELANJA MODAL	4,742,946,000	0	4,742,946,000	0	0	0
A RM	4,742,946,000	0	4,742,946,000	0	0	0
1614.EBC Layanan Manajemen SDM Internal [Orang, Layanan, Rekomendasi] [00]	340,070,000	0	340,070,000	0	0	0
Volume : 239.00 Orang, Layanan,			239.00 Orang, Layanan,		0.00 Orang, Layanan,	
52 BELANJA BARANG	340,070,000	0	340,070,000	0	0	0

Digital Stamp Sebelum : DS : 2129-0679-8220-8552

Digital Stamp Sesudah : DS : 5620-2065-1947-7700



**MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI)  
PER SATUAN KERJA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Badan Pembinaan Hukum Nasional**

PROG/KEG/ OUTPUT	SEMULA		MENJADI		SELISIH	
	JUMLAH	BLOKIR	JUMLAH	BLOKIR	JUMLAH	BLOKIR
A RM	340,070,000	0	340,070,000	0	0	0
1614.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal [Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi] [00]						
	1,809,158,000	0	1,809,158,000	0	0	0
Volume :	5.00 Dokumen, Layanan,		5.00 Dokumen, Layanan,		0.00 Dokumen, Layanan,	
52 BELANJA BARANG	1,809,158,000	0	1,809,158,000	0	0	0
A RM	1,809,158,000	0	1,809,158,000	0	0	0

Digital Stamp Sebelum : DS : 2129-0679-8220-8552

Jakarta, 4 Oktober 2023

Digital Stamp Sesudah : DS : 5620-2065-1947-7700

Kuasa Pengguna Anggaran

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

**CONSTANTINUS KRISTOMO**  
NIP 197404111999031001  
**Prof. Dr. Widodo Ekadjahjana, S.H., M.Hum**

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi			4,335,189,000	
1611	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional			2,737,390,000	
1611.AAD	Peraturan Presiden[Base Line]	1.0 PerPres, R.Perpres		318,490,000	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
1611.AAD.001	Lokasi : INSTANSI PUSAT	1.0 R.Perpres		318,490,000	
051	<b>Rancangan Peraturan Presiden Mengenai Pemantauan dan Peninjauan/Analisis dan Evaluasi Hukum Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Pemantauan dan Peninjauan/Analisis dan Evaluasi Hukum</b>			58,031,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			58,031,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			39,170,000	RM
	- Biaya Konsumsi Snack Rapat Pokja	540.0 OK	22,000	11,880,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat Pokja	360.0 OK	53,000	19,080,000	
	- Biaya Konsumsi Snack Rapat FGD di KALIMANTAN SELATAN FULLDAY (22 org x 2 kali x 1 kgt)	44.0 OK	17,000	748,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat FGD di KALIMANTAN SELATAN FULLDAY (22 org x 1 kali x 1 kgt)	22.0 OK	51,000	1,122,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	6,340,000	6,340,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			1,411,000	RM
	- Biaya Pembelian ATK	1.0 PKT	1,411,000	1,411,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			2,000,000	RM
	- Biaya Honor Narasumber Eksternal Rapat Setara Eselon II [1 Orang x 2 Jam x 1 Kgt]	2.0 OJ	1,000,000	2,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			15,450,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Rapat Pokja [89 Orang x 1 Kali x 1 Kgt]	89.0 OK	150,000	13,350,000	
	- Biaya Transport Lokal Luar BPHN Rapat Pokja [7 Orang x 2 Kali x 1 Kgt]	14.0 OK	150,000	2,100,000	
052	<b>Diskusi Publik</b>			256,862,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			256,862,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			5,700,000	RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	4,500,000	4,500,000	
	- Biaya Pembuatan Spanduk	4.0 PKT	300,000	1,200,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			18,000,000	RM
	- Biaya Honor Narasumber Eksternal Setara Eselon II [2 Orang x 3 Jam x 3 Kgt]	18.0 OJ	1,000,000	18,000,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V ) > KALIMANTAN SELATAN - Biaya Tiket PP (1 org x 1 kali x 1 kgt) - Biaya Tiket PP (14 org x 1 kali x 1 kgt) - Biaya uang harian (15 org x 3 hari x 1 kgt) - Biaya uang Taksi Jakarta (10 org x 2 kali x 1 kgt) - Biaya uang Taksi Provinsi Tujuan (1 org x 2 kali x 1 kgt) - Biaya Uang Penginapan Golongan III (11 org x 2 hari x 1 kgt) - Biaya Uang Penginapan Golongan IV (3 org x 2 hari x 1 kgt) - Biaya Uang Penginapan Pejabat Ess I (1 org x 2 hari x 1 kgt)			99,548,000	RM
				99,548,000	
		1.0 OK	5,252,000	5,252,000	
		14.0 OK	2,995,000	41,930,000	
		45.0 OH	380,000	17,100,000	
		20.0 OK	200,000	4,000,000	
		2.0 OK	150,000	300,000	
		22.0 OH	697,000	15,334,000	
		6.0 OH	1,500,000	9,000,000	
		2.0 OH	3,316,000	6,632,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V ) - Biaya Transport Lokal [13 Orang x 1 Kali x 1 Kgt] - Biaya Transport Lokal Luar BPHN [7 Orang x 1 Kali x 1 Kgt] - Biaya Transport Lokal Luar BPHN kegiatan FGD - Penyusunan Rperpres di Daerah (20 org x 1 kali x 1 kgt)			6,000,000	RM
		13.0 OK	150,000	1,950,000	
		7.0 OK	150,000	1,050,000	
		20.0 OK	150,000	3,000,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V ) - Biaya Paket Meeting Fullboard setara Eselon I dan II [3 Orang x 2 Paket x 2 Kgt] - Biaya Paket Meeting Fullboard setara Eselon III ke bawah [87 Orang] - Biaya Uang Harian Paket Fullboard [33 Orang x 3 Hari x 2 Kgt] - Biaya Transport [22 Orang x 1 Kali x 2 Kgt]			127,614,000	RM
		12.0 OP	1,100,000	13,200,000	
		87.0 OP	822,000	71,514,000	
		198.0 OH	150,000	29,700,000	
		44.0 OK	300,000	13,200,000	
<b>053</b>	<b>Pelaporan</b>			<b>3,597,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<b>TANPA SUB KOMPONEN</b>			<b>3,597,000</b>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V ) - Biaya Penggandaan dan Penjilidan Laporan Akhir			2,847,000	RM
		1.0 PKT	2,847,000	2,847,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V ) - Biaya Transport Lokal [5 Orang x 1 Kali x 1 Kgt]			750,000	RM
		5.0 OK	150,000	750,000	
<b>1611.ABD</b>	<b>Kebijakan Bidang Hukum dan HAM[Base Line]</b>			<b>1,881,755,000</b>	
	Lokasi : INSTANSI PUSAT				
<b>1611.ABD.001</b>	<b>Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum</b>	<b>200.0</b>		<b>1,105,010,000</b>	
		<b>Rekomendasi Kebijakan</b>			
<b>051</b>	<b>Persiapan Analisis dan Evaluasi Hukum</b>			<b>5,280,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<b>TANPA SUB KOMPONEN</b>			<b>5,280,000</b>	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			5,280,000	RM
	- Biaya konsumsi Snack rapat [15 org x 2 kali x 2 Kgt]	60.0 OK	22,000	1,320,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PAKET	500,000	500,000	
	> Kegiatan Rapat Persiapan Pokja AEH Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi			3,460,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat [19 orang x 2 kali x 1 kgt]	38.0 OK	22,000	836,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat [19 orang x 2 kali x 1 kgt]	38.0 OK	53,000	2,014,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	610,000	610,000	
<b>052</b>	<b>Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum</b>			<b>783,476,000</b>	
A	<i>Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum</i>			<i>632,916,000</i>	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			66,640,000	RM
	> KEGIATAN RAPAT POKJA AEH (2 POKJA)			21,500,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	2.0 PKT	3,250,000	6,500,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat [20 Orang x 1 kali x 10 Kgt]	200.0 OK	22,000	4,400,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat [20 org x 1 kali x 10 Kgt]	200.0 OK	53,000	10,600,000	
	> Kegiatan Rapat Pokja AEH Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi			16,225,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat (27 org x 5 kali)	135.0 OK	22,000	2,970,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat (27 org x 5 kali)	135.0 OK	53,000	7,155,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	6,100,000	6,100,000	
	> Kegiatan FGD Pokja AEH Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi			5,400,000	
	- Biaya Pembuatan Spanduk	1.0 PKT	900,000	900,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	4,500,000	4,500,000	
	> Kegiatan Diskusi Publik AEH Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Daerah			9,000,000	
	- Biaya Pembelian Seminar kit (45Paket x 2 kgt)	90.0 PKT	100,000	9,000,000	
	> Kegiatan Diskusi Publik AEH Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Batam			4,940,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	2.0 PKT	1,000,000	2,000,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat dan kegiatan	40.0 OK	25,000	1,000,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat dan kegiatan	40.0 OK	41,000	1,640,000	
	- Biaya pembuatan spanduk	1.0 PKT	300,000	300,000	
	> Kegiatan Diskusi Publik AEH Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Yogyakarta			4,700,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	2.0 PKT	1,000,000	2,000,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat dan kegiatan	40.0 OK	16,000	640,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat dan kegiatan	40.0 OK	44,000	1,760,000	
	- Biaya pembuatan spanduk	1.0 PKT	300,000	300,000	
	> Kegiatan FGD Pokja AEH di Bali			2,500,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	500,000	500,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat [25 Orang x 1 kali x 1 Kgt]	25.0 OK	20,000	500,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat [25 org x 1 kali x 1 Kgt]	25.0 OK	48,000	1,200,000	
	- Biaya Pembuatan Spanduk	1.0 PKT	300,000	300,000	
	> FGD di Sumatera Barat			2,375,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	500,000	500,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat [25 Orang x 1 kali x 1 Kgt]	25.0 OK	18,000	450,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat [25 org x 1 kali x 1 Kgt]	25.0 OK	45,000	1,125,000	
	- Biaya Pembuatan Spanduk	1.0 PKT	300,000	300,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			66,250,000	RM
	> Kegiatan Pokja AEH (2 POKJA)			32,500,000	
	- Biaya Honorarium Anggota Pokja AEH [5 Orang x 5 Bulan x 2 Kgt]	50.0 OB	650,000	32,500,000	
	> Kegiatan Pokja AEH Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi			33,750,000	
	- Biaya Honorarium Anggota Pokja (5 org x 9 bulan X 1 kgt)	45.0 OB	750,000	33,750,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			11,050,000	RM
	> Kegiatan Pokja AEH (2 POKJA)			7,500,000	
	- Biaya Pembelian ATK	1.0 PKT	5,500,000	5,500,000	
	- Biaya Bahan ATK Komputer	1.0 PKT	2,000,000	2,000,000	
	> Kegiatan Pokja AEH Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi			3,550,000	
	- Biaya Pembelian ATK	1.0 PKT	2,500,000	2,500,000	
	- Biaya Bahan ATK Komputer	1.0 PKT	1,050,000	1,050,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			58,000,000	RM
	> Kegiatan Rapat Pokja AEH			20,000,000	
	- Biaya Honor Narasumber Eksternal Setara Eselon II [10 Orang x 2 Jam x 1 Kgt]	20.0 OJ	1,000,000	20,000,000	
	> Kegiatan FGD Pokja AEH di Daerah			12,000,000	
	- Biaya Honor Narasumber Eksternal Setara Eselon II [6 Orang x 2 Jam x 1 Kgt]	12.0 OJ	1,000,000	12,000,000	
	> Kegiatan FGD Pokja AEH Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di BODETABEK			18,000,000	
	- Biaya Honor narasumber Eksternal BPHN setara eselon II [2 Orang x 3 jam x 3 kgt]	18.0 OJ	1,000,000	18,000,000	
	> Kegiatan Diskusi Publik AEH Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Daerah			8,000,000	
	- Honor narasumber Eksternal setara eselon II [2 Orang x 2 jam x 2 kgt]	8.0 OJ	1,000,000	8,000,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.139-Jakarta V )			395,476,000	RM
	> FGD Pokja AEH Di Bali			101,830,000	
	- Biaya Tiket PP [15 org x 1 kali]	15.0 OK	3,262,000	48,930,000	
	- Biaya Uang Harian [15 Orang x 3 Hari x 1 Kgt]	45.0 OH	480,000	21,600,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [5 Orang x 2 Kali x 1 Kgt]	10.0 OK	250,000	2,500,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [7 Orang x 2 Kali x 1 Kgt]	14.0 OK	100,000	1,400,000	
	- Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV [2 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	4.0 OH	1,000,000	4,000,000	
	- Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III ke Bawah [13 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	26.0 OH	900,000	23,400,000	
	> FGD Sumatera Barat			87,966,000	
	- Biaya Tiket PP [15 org x 1 kali]	15.0 OK	2,952,000	44,280,000	
	- Biaya Uang Harian [15 Orang x 3 Hari x 1 Kgt]	45.0 OH	380,000	17,100,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [6 Orang x 2 Kali x 1 Kgt]	12.0 OK	250,000	3,000,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [2 Orang x 2 Kali x 1 Kgt]	4.0 OK	140,000	560,000	
	- Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV [2 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	4.0 OH	1,200,000	4,800,000	
	- Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III ke Bawah [13 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	26.0 OH	701,000	18,226,000	
	> DISKUSI PUBLIK YOGYAKARTA			100,328,000	
	- Biaya Tiket PP [16 org x 1 kali]	16.0 OK	2,268,000	36,288,000	
	- Biaya Uang Harian [16 Orang x 3 Hari x 1 Kgt]	48.0 OH	420,000	20,160,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [10 Orang x 2 Kali x 1 Kgt]	20.0 OK	250,000	5,000,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [1 Orang x 2 Kali x 1 Kgt]	2.0 OK	180,000	360,000	
	- Biaya Penginapan Eselon I dan Eselon II [2 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	4.0 OH	2,695,000	10,780,000	
	- Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV [4 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	8.0 OH	1,355,000	10,840,000	
	- Biaya Penginapan Pejabat Eselon III [10 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	20.0 OH	845,000	16,900,000	
	> DISKUSI PUBLIK BATAM			105,352,000	
	- Biaya Tiket PP [16 org x 1 kali]	16.0 OK	2,888,000	46,208,000	
	- Biaya Uang Harian [16 Orang x 3 Hari x 1 Kgt]	48.0 OH	370,000	17,760,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [16 Orang x 1 Kali x 1 Kgt]	16.0 OK	250,000	4,000,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [1 Orang x 2 Kali x 1 Kgt]	2.0 OK	100,000	200,000	
	- Biaya Penginapan Eselon I dan Eselon II [2 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	4.0 OH	2,318,000	9,272,000	
	- Biaya Penginapan Golongan IV [6 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	12.0 OH	1,270,000	15,240,000	
	- Biaya Penginapan Golongan III [8 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	16.0 OH	792,000	12,672,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			35,500,000	RM
	- Biaya Transport Lokal luar BPHN FGD Pokja AEH di Daerah [22 Orang x 1 Kali x 2 Kgt]	44.0 OK	150,000	6,600,000	
	- Biaya Transport Lokal BPHN kegiatan 2 Pokja AEH [5 orang x 3 kali x 2 kgt]	30.0 OK	150,000	4,500,000	
	> Kegiatan Rapat Pembahasan AEH Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi			5,400,000	
	- Biaya transport lokal peserta luar BPHN	36.0 OK	150,000	5,400,000	
	> Kegiatan Diskusi Publik AEH Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Daerah			10,000,000	
	- Biaya transport lokal peserta daerah ( luar BPHN)	40.0 OK	150,000	6,000,000	
	- Biaya transport lokal panitia (kanwil) dalam rangka persiapan Diskusi Publik di Daerah	40.0 OK	100,000	4,000,000	
	> Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan AEH di Daerah			9,000,000	
	- Biaya transport lokal peserta daerah ( luar BPHN)	60.0 OK	150,000	9,000,000	
<b>B</b>	<i>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rekomendasi Hasil AEH</i>			16,679,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			7,679,000	RM
	> Kegiatan Penyampaian Tindak Lanjut Pelaksanaan Rekomendasi Hasil AEH			7,679,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	3,179,000	3,179,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat dan kegiatan [60 org x 1 kgt x 1 bdg]	60.0 OK	22,000	1,320,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat dan kegiatan [60 org x 1 kgt x 1 bdg]	60.0 OK	53,000	3,180,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			6,000,000	RM
	> PENYAMPAIAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN REKOMENDASI AEH			6,000,000	
	- Biaya Honor Narasumber Eksternal setara Ess II (2 org x 3 jam x 1 kgt)	6.0 OJ	1,000,000	6,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			3,000,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Peserta Luar BPHN [20 Orang x 1 Kali x 1 Kgt]	20.0 OK	150,000	3,000,000	
<b>D</b>	<i>Fasilitasi dan Pembinaan Analisis dan Evaluasi Hukum</i>			133,881,000	



**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V ) > Kegiatan di KANWIL JAWA TIMUR - Biaya konsumsi Snack rapat dan kegiatan [35 org x 1 kali] - Biaya konsumsi Makan rapat dan kegiatan [35 org x 1 kali] - Biaya Penggandaan dan Penjilidan [1 pkt x 1 kgt] - Biaya pembuatan spanduk > Kegiatan di KANWIL SUMATERA UTARA - Biaya konsumsi Snack rapat dan kegiatan [35 org x 1 kali] - Biaya konsumsi Makan rapat dan kegiatan [35 org x 1 kali] - Biaya Penggandaan dan Penjilidan [1 pkt x 1 kgt] - Biaya pembuatan spanduk > Kegiatan di KANWIL SULAWESI SELATAN - Biaya konsumsi Snack rapat dan kegiatan [35 org x 1 kali] - Biaya konsumsi Makan rapat dan kegiatan [35 org x 1 kali] - Biaya Penggandaan dan Penjilidan [1 pkt x 1 kgt] - Biaya pembuatan spanduk > Kegiatan di KANWIL JAWA TENGAH - Biaya konsumsi Snack rapat dan kegiatan [35 org x 1 kali] - Biaya konsumsi Makan rapat dan kegiatan [35 org x 1 kali] - Biaya Penggandaan dan Penjilidan [1 pkt x 1 kgt] - Biaya pembuatan spanduk			13,105,000	RM
				3,180,000	
		35.0 OK	23,000	805,000	
		35.0 OK	45,000	1,575,000	
		1.0 PKT	500,000	500,000	
		1.0 PKT	300,000	300,000	
				3,040,000	
		35.0 OK	17,000	595,000	
		35.0 OK	47,000	1,645,000	
		1.0 PKT	500,000	500,000	
		1.0 PKT	300,000	300,000	
				3,600,000	
		35.0 OK	24,000	840,000	
		35.0 OK	56,000	1,960,000	
		1.0 PKT	500,000	500,000	
		1.0 PKT	300,000	300,000	
				3,285,000	
		35.0 OK	16,000	560,000	
		35.0 OK	55,000	1,925,000	
		1.0 PKT	500,000	500,000	
		1.0 PKT	300,000	300,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.139-Jakarta V )			120,776,000	RM
	> Jawa Timur			29,908,000	
	- Biaya Tiket PP [5 Orang x 1 Kali x 1 Kgt]	5.0 OK	2,674,000	13,370,000	
	- Biaya Uang Harian [5 Orang x 3 Hari x 1 Kgt]	15.0 OH	410,000	6,150,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [2 Orang x 2 Kali x 1 Kgt]	4.0 OK	200,000	800,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [2 Orang x 2 Kali x 1 Kgt]	4.0 OK	100,000	400,000	
	- Biaya Penginapan Pejabat Golongan IV [2 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	4.0 OH	1,076,000	4,304,000	
	- Biaya Penginapan Pejabat Golongan III ke Bawah [3 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	6.0 OH	814,000	4,884,000	
	> SUMATERA UTARA			33,268,000	
	- Biaya Tiket PP [5 Orang x 1 Kali x 1 Kgt]	5.0 OK	3,808,000	19,040,000	
	- Biaya Uang Harian [5 Orang x 3 Hari x 1 Kgt]	15.0 OH	370,000	5,550,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [1 Orang x 1 Kali x 1 Kgt]	1.0 OK	200,000	200,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [1 Orang x 1 Kali x 1 Kgt]	1.0 OK	100,000	100,000	
	- Biaya Penginapan Pejabat Golongan IV [2 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	4.0 OH	1,100,000	4,400,000	
	- Biaya Penginapan Pejabat Golongan III ke Bawah [3 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	6.0 OH	663,000	3,978,000	
	> SULAWESI SELATAN			32,040,000	
	- Biaya Tiket PP [5 Orang x 1 Kali x 1 Kgt]	5.0 OK	2,984,000	14,920,000	
	- Biaya Uang Harian [5 Orang x 3 Hari x 1 Kgt]	15.0 OH	430,000	6,450,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [4 Orang x 2 Kali x 1 Kgt]	8.0 OK	200,000	1,600,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [1 Orang x 2 Kali x 1 Kgt]	2.0 OK	100,000	200,000	
	- Biaya Penginapan Pejabat Golongan IV [2 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	4.0 OH	1,100,000	4,400,000	
	- Biaya Penginapan Pejabat Golongan III ke Bawah [3 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	6.0 OH	745,000	4,470,000	
	> JAWA TENGAH			25,560,000	
	- Biaya Tiket PP [5 Orang x 1 Kali x 1 Kgt]	5.0 OK	2,182,000	10,910,000	
	- Biaya Uang Harian [5 Orang x 3 Hari x 1 Kgt]	15.0 OH	370,000	5,550,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali x 1 Kgt]	6.0 OK	200,000	1,200,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 1 Kali x 1 Kgt]	3.0 OK	100,000	300,000	
	- Biaya Penginapan Pejabat Golongan IV [2 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	4.0 OH	1,000,000	4,000,000	
	- Biaya Penginapan Pejabat Golongan III ke Bawah [3 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	6.0 OH	600,000	3,600,000	
<b>053</b>	<b>Perumusan Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum</b>			<b>316,254,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<b>TANPA SUB KOMPONEN</b>			<b>316,254,000</b>	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			28,900,000	RM
	> Konsinyering Perumusan Rekomendasi AEH (2 POKJA)			16,300,000	
	- Biaya Pembuatan Spanduk	1.0 PKT	300,000	300,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	6,000,000	6,000,000	
	- Biaya Pencetakan Buku Rekomendasi Hasil AE	50.0 PKT	200,000	10,000,000	
	> Kegiatan Konsinyering Pokja AEH Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi			12,600,000	
	- Biaya Pembuatan Spanduk	2.0 PKT	300,000	600,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	2.0 PKT	1,500,000	3,000,000	
	- Biaya Pencetakan Buku Rekomendasi Hasil AE	45.0 PKT	200,000	9,000,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			9,000,000	
	> Kegiatan Konsinyering Pokja Pokja AEH Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi			9,000,000	
	- Biaya Honor narasumber (Pakar) Eksternal setara eselon II	9.0 OJ	1,000,000	9,000,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			278,354,000	RM
	> Konsinyering Perumusan Rekomendasi AEH			89,864,000	
	- Paket Meeting Fullboard setara Eselon II [3 Orang x 2 Paket]	6.0 OP	1,100,000	6,600,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard setara Eselon III ke bawah [31 Orang x 2 Paket]	62.0 OP	822,000	50,964,000	
	- Biaya Uang Harian Paket Fullboard [51 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	102.0 OH	150,000	15,300,000	
	- Biaya tiket/taksi Jakarta-Bogor/Bekasi/Depok [34 Orang x 2 Kali x 1 Kgt]	68.0 OK	250,000	17,000,000	
	> Konsinyering Pokja AEH Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi			73,256,000	
	- Paket Meeting Fullboard setara Eselon II [3 Orang x 1 Paket x 2 kgt]	6.0 OP	1,100,000	6,600,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard setara Eselon III ke bawah [24 Orang x 1 Paket x 2 kgt]	48.0 OP	822,000	39,456,000	
	- Biaya Uang Harian Paket Fullboard [27 Orang x 2 Hari x 2 Kgt]	108.0 OH	150,000	16,200,000	
	- Biaya tiket/taksi Jakarta-Bogor/Bekasi/Depok/Tangerang [55 Orang x 1 Kali x 1 kgt]	55.0 OK	200,000	11,000,000	
	> Kegiatan FGD Pokja AEH Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di JADETABEK			115,234,000	
	- Paket Meeting Fullboard setara Eselon II [3 Orang x 1 Paket x 3 kgt]	9.0 OP	1,100,000	9,900,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard setara Eselon III ke bawah [24 Orang x 1 Paket x 3 kgt]	72.0 OP	822,000	59,184,000	
	- Biaya Uang Harian Paket Fullboard [27 Orang x 2 Hari x 3 Kgt]	162.0 OH	150,000	24,300,000	
	- Biaya tiket/taksi Jakarta-Bogor/Bekasi/Depok [115 Orang x 1 Kali x 1 Kgt]	115.0 OK	190,000	21,850,000	
<b>1611.ABD.002</b>	<b>Rekomendasi Pembangunan Hukum Nasional</b>	<b>1.0 Rekomendasi Kebijakan</b>		<b>776,745,000</b>	
<b>051</b>	<b>Persiapan Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional</b>			<b>52,291,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<i>Persiapan Penyusunan</i>			<i>5,625,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			5,625,000	RM
	- Biaya konsumsi Snack rapat [25 org x 3 kali]	75.0 OK	22,000	1,650,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat [25 org x 3 kali]	75.0 OK	53,000	3,975,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>B</i>	<i>Penerbitan Jurnal Rechtsvinding</i>			46,666,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			30,500,000	RM
	- Biaya penerbitan jurnal ilmiah [30 EKS x 3 Kali]	90.0 PKT	150,000	13,500,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	5,000,000	5,000,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat [20 org x 8 kali]	160.0 OK	22,000	3,520,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat [20 org x 8 kali]	160.0 OK	53,000	8,480,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			13,500,000	RM
	- Biaya Honor Mitra Bestari [3 Orang x 3 Kali]	9.0 OT	1,500,000	13,500,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			1,766,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PKT	1,348,000	1,348,000	
	- Biaya Bahan Komputer	1.0 PKT	418,000	418,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			900,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [2 Orang x 3 Kali]	6.0 org	150,000	900,000	
<b>052</b>	<b>Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional</b>			<b>617,870,000</b>	<b>U</b>
<i>A</i>	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			617,870,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			65,078,000	RM
	- Biaya Konsumsi Snack Rapat dan Kegiatan FGD [55 Orang x 2 kali]	110.0 OK	22,000	2,420,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat dan Kegiatan FGD [55 org x 2 kali]	110.0 OK	53,000	5,830,000	
	- Biaya Konsumsi Snack Diskusi Publik di NTB [35 Orang x 1 kali]	35.0 OK	19,000	665,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Diskusi Publik di NTB [35 org x 1 kali]	35.0 OK	49,000	1,715,000	
	- Biaya Pembuatan Spanduk Diskusi Publik	1.0 PKT	300,000	300,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	6,000,000	6,000,000	
	> KEGIATAN KONFERENSI PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL			48,148,000	
	- Biaya Rapat Persiapan kegiatan KHN	310.0 OK	22,000	6,820,000	
	- Biaya Seminar Kit kegiatan Konferensi Hukum Nasional	175.0 PKT	150,000	26,250,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan kegiatan KHN	1.0 PKT	6,578,000	6,578,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan Laporan Akhir kegiatan KHN	1.0 PKT	2,500,000	2,500,000	
	- Pembelian Plakat kegiatan KHN	15.0 PKT	400,000	6,000,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			30,000,000	RM
	- Honor Anggota Pokja [4 Orang x 10 Bulan]	40.0 OB	750,000	30,000,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			2,000,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PKT	980,000	980,000	
	- Biaya Bahan Komputer	1.0 PKT	1,020,000	1,020,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.139-Jakarta V )			50,000,000	RM
	- Sewa Videotron kegiatan KHN	2.0 PKT	25,000,000	50,000,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			94,500,000	RM
	- Honor Narasumber Eksternal BPHN kegiatan FGD DPHN setara Eselon II [3 org x 3 jam x 3 kgt]	27.0 OJ	1,000,000	27,000,000	
	- Honor Narasumber Eksternal BPHN kegiatan Diskusi Publik setara Eselon II [3 org x 3 jam x 1 kgt]	9.0 OJ	1,000,000	9,000,000	
	> KEGIATAN KONFERENSI PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL			58,500,000	
	- Honor Narasumber Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat lainnya yang disetarakan (3 org x 3 jam x 1 kgt)	9.0 OJ	1,700,000	15,300,000	
	- Honor Narasumber Pejabat Esselon I yang disetarakan (6 org x 3 jam x 1 kgt)	18.0 OJ	1,400,000	25,200,000	
	- Honor Narasumber Pejabat Esselon II yang disetarakan (6 org x 3 jam x 1 kgt)	18.0 OJ	1,000,000	18,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V )			116,920,000	RM
	> Nusa Tenggara Barat			116,920,000	
	- Biaya Tiket PP [16 orang x 1 kali x 1 Kgt]	16.0 OK	3,000,000	48,000,000	
	- Biaya uang harian [16 org x 3 hari x 1 kgt]	48.0 OH	440,000	21,120,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [11 Orang x 2 kali x 1 kgt]	22.0 OK	250,000	5,500,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [1 Orang x 2 kali x 1 kgt]	2.0 OK	100,000	200,000	
	- Biaya Penginapan Eselon I dan II [3 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	6.0 OH	2,300,000	13,800,000	
	- Biaya penginapan Gol. IV [7 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	14.0 OH	1,400,000	19,600,000	
	- Biaya Penginapan Gol. III [6 Orang x 2 Hari x 1 kgt]	12.0 OH	725,000	8,700,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			15,600,000	RM
	- Biaya Transport Lokal BPHN [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	100,000	600,000	
	- Biaya transport Lokal kegiatan Rapat dan FGD [16 org x 5 kali]	80.0 Ok	150,000	12,000,000	
	- Biaya transport lokal Luar BPHN Kegiatan Diskusi Publik [20 Orang x 1 Kali]	20.0 OK	150,000	3,000,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			243,772,000	RM	
	> KEGIATAN KONFERENSI HUKUM NASIONAL			236,974,000		
	- Biaya Paket Meeting Narasumber Fullboard [3 ORG x 2 PKT]	6.0 OP	1,347,000	8,082,000		
	- Biaya Paket Meeting Peserta Fullboard setara eselon I dan II [8 orang x 2 paket]	16.0 OP	1,347,000	21,552,000		
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Panitia dan Peserta [30 orang x 2 paket]	60.0 OP	1,197,000	71,820,000		
	- Biaya Uang Harian Paket Meeting Fullboard Panitia dan Pimti [38 orang x 3 hari]	114.0 OH	180,000	20,520,000		
	- Biaya Uang Harian Paket Meeting Fullboard Narasumber [3 orang x 1 hari]	3.0 OH	180,000	540,000		
	- Biaya Paket Meeting Fullday Peserta dan Undangan [130 orang x 1 hari]	130.0 OH	667,000	86,710,000		
	- Biaya Transport Lokal [185 orang x 1 hari]	185.0 OK	150,000	27,750,000		
	> PERJADIN NARASUMBER KEGIATAN KONFERENSI HUKUM NASIONAL			6,798,000		
	- Biaya Tiket Pesawat (Yogyakarta)	1.0 OK	2,268,000	2,268,000		
	- Biaya Tiket Pesawat (Jawa Timur)	1.0 OK	2,674,000	2,674,000		
	- Biaya Taksi Provinsi Asal (Yogyakarta)	2.0 OK	222,000	444,000		
	- Biaya Taksi Provinsi Asal (Jawa Timur)	2.0 OK	194,000	388,000		
	- Biaya Taksi Provinsi Tujuan (Jakarta)	4.0 OK	256,000	1,024,000		
<b>053</b>	<b>Perumusan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional</b>			<b>106,584,000</b>		<b>U</b>
<b>A</b>	<b>TANPA SUB KOMPONEN</b>			<b>106,584,000</b>		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			12,600,000		RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan kegiatan Konsinyering	1.0 PKT	3,000,000	3,000,000		
	- Biaya Pencetakan Buku DPHN	45.0 EKS	200,000	9,000,000		
	- Biaya Pembuatan Spanduk Konsinyering	1.0 PKT	600,000	600,000		
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			3,000,000	RM	
	- Biaya Honor Narasumber Konsinyering Fnalisasi Perumusan Buku DPHN [1 Orang x 3 Jam x 1 Kgt]	3.0 OJ	1,000,000	3,000,000		
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			90,984,000	RM	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Eselon I dan II [6 Orang x 1 Paket x 2 Kgt]	12.0 OP	1,100,000	13,200,000		
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Eselon III ke Bawah [26 Orang x 1 Paket x 2 Kgt]	52.0 OP	822,000	42,744,000		
	- Biaya Uang Harian Paket Meeting Fullboard [32 Orang x 2 Hari x 2 Kgt]	128.0 OH	150,000	19,200,000		
	- Biaya Transport [48 Orang x 2 Kali x 1 Kgt]	96.0 OK	165,000	15,840,000		
1611.ADG	<u>Standarisasi Profesi dan SDM[Base Line]</u>	100.0 Orang		537,145,000		
1611.ADG.001	Lokasi : INSTANSI PUSAT <b>Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Hukum (Pusat dan Daerah)</b>	100.0 Orang		537,145,000		
051	<b>Pemetaan dan Profiling Analis Hukum</b>			79,278,000		
<b>A</b>	<b>TANPA SUB KOMPONEN</b>			79,278,000		

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			37,396,000	RM
	- Biaya Konsumsi Snack Rapat [40 Orang x 8 Kali]	320.0 OK	22,000	7,040,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [307 Orang]	307.0 OK	53,000	16,271,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	3,700,000	3,700,000	
	> Kegiatan di KANWIL JAWA TIMUR			3,380,000	
	- Biaya Konsumsi Snack Rapat dan kegiatan [35 org x 1 kali]	35.0 OK	23,000	805,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat dan kegiatan [35 org x 1 kali]	35.0 OK	45,000	1,575,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
	> Kegiatan di KANWIL SULAWESI SELATAN			3,800,000	
	- Biaya Konsumsi Snack Rapat dan kegiatan [35 org x 1 kali]	35.0 OK	24,000	840,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat dan kegiatan [35 org x 1 kali]	35.0 OK	56,000	1,960,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
	> Kegiatan di KANWIL LAMPUNG			3,205,000	
	- Biaya Konsumsi Snack Rapat dan kegiatan [35 org x 1 kali]	35.0 OK	20,000	700,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat dan kegiatan [35 org x 1 kali]	35.0 OK	43,000	1,505,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			2,542,000	RM
	- Biaya Pembelian ATK	1.0 PKT	2,042,000	2,042,000	
	- Biaya Bahan Komputer	1.0 PKT	500,000	500,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V )			39,340,000	RM
	> Jawa Timur			13,260,000	
	- Biaya Tiket PP [2 Orang x 1 Kali x 1 Kgt]	2.0 OK	2,670,000	5,340,000	
	- Biaya Uang Harian [2 Orang x 3 Hari x 1 Kgt]	6.0 OH	410,000	2,460,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [1 Orang x 2 Kali x 1 Kgt]	2.0 OK	250,000	500,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [2 Orang x 2 Kali x 1 Kgt]	4.0 OK	190,000	760,000	
	- Biaya Penginapan Gol. IV [2 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	4.0 OH	1,050,000	4,200,000	
	> Sulawesi Selatan			15,560,000	
	- Biaya Tiket PP [2 Orang x 1 Kali x 1 Kgt]	2.0 OK	3,800,000	7,600,000	
	- Biaya Uang Harian [2 Orang x 3 Hari x 1 Kgt]	6.0 OH	430,000	2,580,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [1 Orang x 2 Kali x 1 Kgt]	2.0 OK	250,000	500,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 1 Kali x 1 Kgt]	3.0 OK	160,000	480,000	
	- Biaya Penginapan Gol. IV [2 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	4.0 OH	1,100,000	4,400,000	
	> Lampung			10,520,000	
	- Biaya Tiket PP [2 Orang x 1 Kali x 1 Kgt]	2.0 OK	1,580,000	3,160,000	
	- Biaya Uang Harian [2 Orang x 3 Hari x 1 Kgt]	6.0 OH	380,000	2,280,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [1 Orang x 2 Kali x 1 Kgt]	2.0 OK	250,000	500,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [1 Orang x 1 Kali x 1 Kgt]	1.0 OK	180,000	180,000	
	- Biaya Penginapan Gol. IV [2 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	4.0 OH	1,100,000	4,400,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>052</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis Hukum</b>			<b>27,952,000</b>	
A	<i>Workshop Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis Hukum</i>			<i>27,952,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			7,250,000	RM
	> Kegiatan di KALIMANTAN TENGAH			7,250,000	
	- Biaya Konsumsi Snack Rapat Persiapan [5 ORG x 2 KALI]	10.0 OK	22,000	220,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat Persiapan [5 ORG x 2 KALI]	10.0 OK	53,000	530,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat kegiatan peningkatan kapasitas JF AH [60 org x 1 kgt]	60.0 OK	22,000	1,320,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat kegiatan peningkatan kapasitas JF AH [60 org x 1 kgt]	60.0 OK	53,000	3,180,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	2,000,000	2,000,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			1,502,000	RM
	- Biaya Pembelian ATK	1.0 PKT	1,167,000	1,167,000	
	- Biaya Pembelian Bahan ATK Komputer	1.0 PKT	335,000	335,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			19,200,000	RM
	- Biaya Honor narasumber Eksternal setara Ess II [1 org x 3 Jam]	3.0 OJ	1,000,000	3,000,000	
	- Biaya Honor narasumber Eksternal setara Ess II [6 Orang x 3 Jam]	18.0 OJ	900,000	16,200,000	
<b>053</b>	<b>Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit</b>			<b>340,226,000</b>	<b>U</b>
A	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			<i>340,226,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			39,333,000	RM
	- Biaya Pembuatan Spanduk	1.0 PKT	600,000	600,000	
	- Biaya Konsumsi Snack Rapat [31 Orang x 15 Kali x 1 Keg]	465.0 OK	22,000	10,230,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [447 Orang x 1 Kgt]	447.0 OK	53,000	23,691,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjiilidan	1.0 PKT	4,812,000	4,812,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			27,000,000	RM
	- Biaya Honor Anggota Tim Penilai Pusat di Luar BPHN [9 Orang x 6 Bulan]	54.0 OB	500,000	27,000,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			2,743,000	RM
	- Biaya Pembelian ATK	1.0 PKT	2,243,000	2,243,000	
	- Biaya Bahan Komputer	1.0 PKT	500,000	500,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			12,150,000	RM
	- Biaya Transport Lokal BPHN [12 Orang x 3 Kali x 1 Kgt]	36.0 OK	150,000	5,400,000	
	- Biaya Transport Lokas Non BPHN [3 Orang x 1 Kali x 15 Kgt]	45.0 OK	150,000	6,750,000	



**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			259,000,000	
	- Biaya Transport [50 Orang x 1 Kali x 2 Kgt]	100.0 OK	500,000	50,000,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard [50 Orang x 2 Paket x 2 Kgt]	200.0 OP	820,000	164,000,000	
	- Biaya Uang Harian Paket Meeting Fullboard [50 Orang x 3 Hari x 2 Kgt]	300.0 OH	150,000	45,000,000	
<b>054</b>	<b>Pemberian Rekomendasi Dalam Rangka Uji Kompetensi</b>			<b>89,689,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<b>TANPA SUB KOMPONEN</b>			<b>89,689,000</b>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			20,189,000	RM
	- Biaya Pembuatan Spanduk	1.0 PKT	600,000	600,000	
	- Biaya Konsumsi Snack Rapat	202.0 OK	22,000	4,444,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat	202.0 OK	53,000	10,706,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan Laporan Akhir	1.0 PKT	4,439,000	4,439,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			20,700,000	RM
	- Biaya Transport Lokal non BPHN [69 Orang x 2 Kali x 1 Kgt]	138.0 OK	150,000	20,700,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			48,800,000	RM
	- Biaya Transport [7 Orang x 2 Kali x 1 Kgt]	14.0 OK	500,000	7,000,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard [20 Orang x 2 Paket x 1 Kgt]	40.0 OP	820,000	32,800,000	
	- Biaya Uang Harian Paket Meeting Fullboard [20 Orang x 3 Hari x 1 Kgt]	60.0 OH	150,000	9,000,000	
1613	<u>Perencanaan Hukum Nasional</u>			1,597,799,000	
1613.ABD	<u>Kebijakan Bidang Hukum dan HAM[Base Line]</u>	13.0 Rekomendasi Kebijakan, Kajian		1,597,799,000	
-----					
1613.ABD.001	Lokasi : INSTANSI PUSAT <b>Rekomendasi Program Legislasi</b>	<b>3.0 Rekomendasi Kebijakan</b>		<b>728,974,000</b>	
<b>051</b>	<b>Penyusunan Program Legislasi Nasional</b>			<b>461,995,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<i>Persiapan Penyusunan Prolegnas</i>			<i>116,093,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			17,626,000	RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	5,846,000	5,846,000	
	- Biaya Konsumsi Snack Rapat [30 Orang x 1 Kali x 5 Kgt]	150.0 OK	22,000	3,300,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [40 Orang x 1 Kali x 4 Kgt]	160.0 OK	53,000	8,480,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			1,469,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	1,469,000	1,469,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			55,000,000	RM
	- Biaya Honor Narasumber Eselon II/Sederajat (Eksternal) [11 Orang x 1 Jam x 5 Kgt]	55.0 OJ	1,000,000	55,000,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V )			7,566,000	RM
	> Banten			3,916,000	
	- Biaya Transport [2 Orang x 2 Kali x 1 Kgt]	4.0 OK	250,000	1,000,000	
	- Biaya Uang Harian [2 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	4.0 OH	370,000	1,480,000	
	- Biaya Penginapan [2 Orang x 1 Hari x 1 Kgt]	2.0 OH	718,000	1,436,000	
	> JAWA BARAT			3,650,000	
	- Biaya transport	5.0 OK	300,000	1,500,000	
	- Biaya uang harian	5.0 OH	430,000	2,150,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			11,550,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Internal [1 Orang x 70 Kali x 1 Kgt]	70.0 OK	150,000	10,500,000	
	- Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam [1 Orang x 5 Kali x 1 Kgt]	5.0 OK	210,000	1,050,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			22,882,000	RM
	> Jawa Barat			22,882,000	
	- Biaya Transport [20 Orang x 1 Kali x 1 Kgt]	20.0 OP	177,500	3,550,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Eselon II [1 Orang x 1 Paket x 1 Kgt]	1.0 OP	1,110,000	1,110,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Eselon III ke Bawah [16 Orang x 1 Paket x 1 Kgt]	16.0 OP	820,125	13,122,000	
	- Biaya Uang Harian Paket Meeting Fullboard [17 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	34.0 OH	150,000	5,100,000	
<i>B</i>	<i>Hearing Konsep Prolegnas</i>			329,950,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			25,371,000	RM
	> Sulawesi Selatan			7,550,000	
	- Biaya Seminar Kit Kegiatan Hearing Pendapat [25 Orang x 1 Kali x 1 Kgt]	25.0 PKT	150,000	3,750,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	3,500,000	3,500,000	
	- Biaya Pembuatan Spanduk	1.0 PKT	300,000	300,000	
	> Nusa Tenggara Barat			7,550,000	
	- Biaya Seminar Kit Kegiatan Hearing Pendapat [25 Orang x 1 Kali x 1 Kgt]	25.0 PKT	150,000	3,750,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	3,500,000	3,500,000	
	- Biaya Pembuatan Spanduk	1.0 PKT	300,000	300,000	
	> Jawa Timur (Jember)			10,271,000	
	- Biaya Seminar Kit	32.0 Paket	150,000	4,800,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 Paket	5,171,000	5,171,000	
	- Biaya Pembuatan Spanduk	1.0 Paket	300,000	300,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			36,000,000	RM
	> Sulawesi Selatan			12,000,000	
	- Honor narasumber Eselon II/Sederajat (eksternal) [6 Orang x 2 Jam x 1 Kgt]	12.0 OJ	1,000,000	12,000,000	
	> Nusa Tenggara Barat			12,000,000	
	- Honor narasumber Eselon II/Sederajat (eksternal) [6 Orang x 2 Jam x 1 Kgt]	12.0 OJ	1,000,000	12,000,000	
	> Jawa Timur (Jember)			12,000,000	
	- Honor narasumber Es II/Sederajat (eksternal) [6 org x 2 jam x 1 kgt]	12.0 OJ	1,000,000	12,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V )			230,615,000	RM
	- Biaya Uang Representasi Eselon II [1 Orang x 1 Kali x 3 Kgt]	3.0 OK	150,000	450,000	
	- Biaya uang representasi Es I [1 orang x 1 kali x 1 kgt]	1.0 OK	200,000	200,000	
	> Sulawesi Selatan			64,236,000	
	- Biaya Tiket PP [10 Orang x 1 Kali x 1 Kgt]	10.0 OK	3,829,000	38,290,000	
	- Biaya Penginapan Eselon II [1 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	2.0 OH	1,550,000	3,100,000	
	- Biaya Penginapan Eselon III [1 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	2.0 OH	1,138,000	2,276,000	
	- Biaya Penginapan Eselon IV Kebawah [8 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	16.0 OH	732,000	11,712,000	
	- Biaya Uang Harian [10 Orang x 1 Hari x 1 Kgt]	10.0 OH	430,000	4,300,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [10 Orang x 2 Kali x 1 Kgt]	20.0 OK	191,250	3,825,000	
	- Biaya Taksi Provinsi Tujuan [2 Orang x 2 Kali x 1 Kgt]	4.0 OK	183,250	733,000	
	> Nusa Tenggara Barat			60,409,000	
	- Biaya Tiket PP [10 Orang x 1 Kali x 1 Kgt]	10.0 OK	3,230,000	32,300,000	
	- Biaya Penginapan Eselon II [1 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	2.0 OH	2,648,000	5,296,000	
	- Biaya Penginapan Eselon III [1 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	2.0 OH	1,418,000	2,836,000	
	- Biaya Penginapan Eselon IV Kebawah [8 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	16.0 OH	725,000	11,600,000	
	- Biaya Uang Harian [10 Orang x 1 Hari x 1 Kgt]	10.0 OH	440,000	4,400,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [10 Orang x 2 Kali x 1 Kgt]	20.0 OK	153,700	3,074,000	
	- Biaya Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali x 1 Kgt]	6.0 OK	150,500	903,000	
	> Jawa Timur (Jember)			105,320,000	
	- Biaya Tiket PP Bisnis [1 orang x 1 kali x 1 kgt]	1.0 OK	5,000,000	5,000,000	
	- Biaya Tiket PP Ekonomi [15 orang x 1 kali x 1 kgt]	15.0 OK	2,600,000	39,000,000	
	- Biaya Penginapan Es I [1 orang x 2 hari x 1 kgt]	2.0 OP	2,500,000	5,000,000	
	- Biaya Penginapan Es II [1 orang x 2 hari x 1 kgt]	2.0 OP	2,000,000	4,000,000	
	- Biaya Penginapan Es III [6 orang x 2 hari x 1 kgt]	12.0 OP	1,000,000	12,000,000	
	- Biaya Penginapan Es IV ke bawah [8 orang x 2 hari x 1 kgt]	16.0 OP	800,000	12,800,000	
	- Biaya Uang Harian [16 orang x 2 hari x 1 kgt]	32.0 OH	410,000	13,120,000	
	- Biaya taksi Jakarta [16 orang x 2 kali x 1 kgt]	32.0 OK	256,000	8,192,000	
	- Biaya taksi Provinsi Tujuan [16 orang x 2 kali x 1 kgt]	32.0 OK	194,000	6,208,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			37,964,000	RM
	> Sulawesi Selatan			9,383,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullday Eselon I dan II [1 Orang x 1 Hari x 1 Kgt]	1.0 OP	513,000	513,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullday Eselon III ke Bawah [25 Orang x 1 Hari x 1 Kgt]	25.0 OP	275,000	6,875,000	
	- Biaya Uang Harian Fullday [19 Orang x 1 Hari x 1 Kgt]	19.0 OH	105,000	1,995,000	
	> Nusa Tenggara Barat			12,495,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullday Eselon I dan II [1 Orang x 1 Hari x 1 Kgt]	1.0 OP	420,000	420,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullday Eselon III ke Bawah [24 Orang x 1 Hari x 1 Kgt]	24.0 OP	420,000	10,080,000	
	- Biaya Uang Harian Fullday [19 Orang x 1 Hari x 1 Kgt]	19.0 OH	105,000	1,995,000	
	> Jawa Timur (Jember)			16,086,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullday Es I dan II [2 orang x 1 hari x 1 kgt]	2.0 OP	623,000	1,246,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullday Es III ke bawah [30 orang x 1 hari x 1 kgt]	30.0 OP	408,000	12,240,000	
	- Biaya Uang Harian Fullday [26 orang x 1 hari x 1 kgt]	26.0 OH	100,000	2,600,000	
C	<u>Forum Koordinasi Penyusunan Prolegnas dengan Baleg DPR</u>			15,952,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V )			15,952,000	RM
	> Jakarta			15,952,000	
	- Biaya Penginapan Eselon I/setara [1 Orang x 1 Hari x 1 Kgt]	1.0 OH	2,500,000	2,500,000	
	- Biaya Penginapan Eselon II/setara [1 Orang x 1 Hari x 1 Kgt]	1.0 OH	2,000,000	2,000,000	
	- Biaya Penginapan Eselon III/setara [1 Orang x 1 Hari x 1 Kgt]	1.0 OH	992,000	992,000	
	- Biaya Penginapan Eselon IV / Gol III [8 Orang x 1 Hari x 1 Kgt]	8.0 OH	730,000	5,840,000	
	- Biaya Uang Harian [11 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	22.0 OH	210,000	4,620,000	
<b>052</b>	<b>Penyusunan Program Penyusunan PP dan PERPRES</b>			<b>171,694,000</b>	U
A	<i>Inventarisasi Penyusunan Program Penyusunan PP dan Perpres</i>			1,509,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			880,000	RM
	- Biaya Konsumsi Snack Rapat [40 Orang x 1 Kali x 1 Kgt]	40.0 OK	22,000	880,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			629,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	629,000	629,000	
B	<i>Persiapan penyusunan PP dan Perpres dengan Stake Holder terkait</i>			41,564,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			4,235,000	RM
	- Biaya Konsumsi Snack Rapat [30 Orang x 2 Kali]	60.0 OK	22,000	1,320,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat	55.0 OK	53,000	2,915,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V ) - Biaya Transport Lokal Internal [1 Orang x 75 Kali]	75.0 OK	150,000	12,720,000	RM
	- Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam [1 Orang x 7 KALI]	7.0 OK	210,000	11,250,000	
				1,470,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V ) > Jawa Barat			24,609,000	RM
	- Biaya Transport [15 Orang x 2 Kali x 1 Kgt]	30.0 OP	174,900	5,247,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Eselon II [1 Orang x 1 Paket x 1 Kgt]	1.0 OP	1,110,000	1,110,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Eselon III ke Bawah [16 Orang x 1 Paket x 1 Kgt]	16.0 OP	822,000	13,152,000	
	- Biaya Uang Harian Paket Meeting Fullboard [17 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	34.0 OH	150,000	5,100,000	
C	<i>Pembahasan Tahunan Perencanaan PP dan Perpres</i>			128,621,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V ) - Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	4,400,000	26,150,000	RM
	> RAPAT POKJA			21,750,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [58 ORG x 5 KALI]	290.0 OK	53,000	15,370,000	
	- Biaya Konsumsi Snack Rapat [58 ORG x 5 KALI]	290.0 OK	22,000	6,380,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V ) - Biaya Jasa Narasumber Eksternal Setara Es II [1 Orang x 1 Jam x 1 Kgt]	1.0 OJ	1,000,000	3,700,000	RM
	- Biaya Jasa Narasumber Eksternal Eselon III ke bawah	3.0 OJ	900,000	2,700,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V ) - Biaya Peliputan	2.0 PKT	28,316,500	56,633,000	RM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V ) - Biaya Paket Meeting Fullboard Eselon II [1 Orang x 1 Paket x 1 Kgt]	1.0 OP	1,110,000	42,138,000	RM
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Eselon III ke bawah [24 Orang x 1 Paket x 1 Kgt]	24.0 OP	822,000	19,728,000	
	- Biaya Uang Harian Paket Meeting Fullboard [25 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	50.0 OH	150,000	7,500,000	
	- Biaya Transport [23 Orang x 2 Kali x 1 Kgt]	46.0 OK	300,000	13,800,000	
053	<b>Pemantauan Prolegnas, Progsun PP dan Perpres Tahun 2023</b>			<b>32,645,000</b>	<b>U</b>
A	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			32,645,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V ) - Biaya Konsumsi Snack Rapat [20 Orang x 1 Kali x 1 kgt]	20.0 OK	20,500	5,210,000	RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	4,800,000	4,800,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

Halaman : 21

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			725,000	RM
	- Biaya Pembelian ATK	1.0 PKT	521,000	521,000	
	- Biaya Bahan Komputer	1.0 PKT	204,000	204,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V )			14,410,000	RM
	> Jawa Barat			14,410,000	
	- Biaya transport	5.0 OK	300,000	1,500,000	
	- Biaya Transport [15 Orang x 1 Kali x 1 Kgt]	15.0 OK	250,000	3,750,000	
	- Biaya Uang Harian [16 Orang x 1 Kgt]	16.0 OH	430,000	6,880,000	
	- Biaya Penginapan [4 Orang x 1 Hari x 1 Kgt]	4.0 OH	570,000	2,280,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			12,300,000	RM
	- Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam [1 org x 5 kali]	5.0 OK	210,000	1,050,000	
	- Biaya Transport Lokal [1 Orang x 75 Kali]	75.0 OK	150,000	11,250,000	
<b>054</b>	<b>Fasilitasi Perencanaan Program Legislasi Daerah</b>			<b>62,640,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<i>Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Program Legislasi Daerah</i>			<i>4,419,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			4,419,000	RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	4,419,000	4,419,000	
<b>B</b>	<i>Asistensi Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah</i>			<i>58,221,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			5,310,000	RM
	- Biaya Pembuatan Spanduk	1.0 PKT	600,000	600,000	
	> Maluku Utara			2,580,000	
	Biaya Konsumsi Makan Kegiatan Asistensi				
	- Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah [30 org x 1 kali]	30.0 OK	63,000	1,890,000	
	Biaya Konsumsi Snack Kegiatan Asistensi				
	- Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah [30 org x 1 kali]	30.0 OK	23,000	690,000	
	> Sulawesi Barat			2,130,000	
	Biaya Konsumsi Makan Kegiatan Asistensi				
	- Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah [30 org x 1 kali]	30.0 OK	51,000	1,530,000	
	Biaya Konsumsi Snack Kegiatan Asistensi				
	- Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah [30 org x 1 kali]	30.0 OK	20,000	600,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V )			52,911,000	RM
	> Maluku Utara			28,737,000	
	- Biaya Tiket PP [5 Orang x 1 Kali x 1 Kgt]	5.0 OK	3,955,400	19,777,000	
	- Biaya Penginapan Eselon III [1 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	2.0 OH	1,073,000	2,146,000	
	- Biaya Penginapan Eselon IV ke bawah [2 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	4.0 OH	600,000	2,400,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari x 1 Kgt]	9.0 OH	430,000	3,870,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [2 ORANG x 2 KALI x 1 Kgt]	4.0 OK	136,000	544,000	
	> Sulawesi Barat			24,174,000	
	- Biaya Tiket PP [4 Orang x 1 Kali x 1 Kgt]	4.0 OK	3,495,500	13,982,000	
	- Biaya Penginapan Eselon III [1 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	2.0 OH	1,075,000	2,150,000	
	- Biaya Penginapan Eselon IV ke bawah [2 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	4.0 OH	704,000	2,816,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari x 1 Kgt]	9.0 OH	410,000	3,690,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [3 ORANG x 2 KALI x 1 Kgt]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
<b>1613.ABD.002</b>	<b>Rekomendasi Naskah Akademik RUU</b>	<b>3.0 Rekomendasi Kebijakan</b>		<b>455,351,000</b>	
<b>051</b>	<b>Persiapan Penyusunan Naskah Akademik RUU</b>			<b>975,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			<i>975,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			975,000	RM
	- Biaya Konsumsi Snack Rapat [13 Orang x 1 Kali x 1 Kgt]	13.0 OK	22,000	286,000	
	- Biaya Konsumsi Makan rapat [13 Orang x 1 Kali x 1 Kgt]	13.0 OK	53,000	689,000	
<b>052</b>	<b>Penyusunan Naskah Akademik RUU</b>			<b>454,376,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			<i>454,376,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			33,662,000	RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan [1 Paket]	1.0 PKT	2,165,000	2,165,000	
	- Biaya Konsumsi Snack rapat [15 Orang x 20 Kgt]	300.0 OK	22,000	6,600,000	
	- Biaya Konsumsi Makan rapat [15 Orang x 20 Kgt]	300.0 OK	53,000	15,900,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Kegiatan Penyusunan NA Palembang [55 ORG x 1 KGT]	55.0 OK	63,000	3,465,000	
	- Biaya Konsumsi Snack Kegiatan Penyusunan NA Palembang [50 ORG x 1 KGT]	50.0 OK	18,000	900,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Kegiatan Penyusunan NA Yogyakarta [45 ORG x 1 KGT]	45.0 OK	16,000	720,000	
	- Biaya Konsumsi Snack Kegiatan Penyusunan NA Yogyakarta [45 ORG x 1 KGT]	45.0 OK	44,000	1,980,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Kegiatan Penyusunan NA Bandung [23 ORG x 1 KGT]	23.0 OK	20,000	460,000	
	- Biaya Konsumsi Snack Kegiatan Penyusunan NA Bandung [32 ORG x 1 KGT]	32.0 OK	46,000	1,472,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			7,650,000	RM
	- Honor Ketua Tim [1 Orang x 9 Bulan]	9.0 OB	850,000	7,650,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			507,000	RM
	- Biaya Pembelian ATK	1.0 PKT	507,000	507,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			34,200,000	RM
	- Honor Narasumber Eksternal setara Eselon II [2 Orang x 5 Kgt x 2 Jam]	20.0 OJ	1,000,000	20,000,000	
	- Honor Narasumber Eksternal setara eselon III [1 org x 3 Kgt x 2 Jam]	6.0 OJ	900,000	5,400,000	
	- Honor Narasumber Eksternal setara eselon II [2 Orang x 1 Kgt x 3 Jam]	6.0 OJ	1,000,000	6,000,000	
	- Honor Moderator Eksternal [2 orang x 2 Kgt]	4.0 OJ	700,000	2,800,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V )			196,475,000	RM
	> BALI			53,759,000	
	- Tiket PP Kegiatan kegiatan Penyusunan NA RUU [9 orang x 1 kgt x 1 kali]	9.0 OK	2,082,000	18,738,000	
	- Biaya Penginapan kegiatan Penyusunan NA RUU Eselon III Kebawah [17 orang x 1 kgt]	17.0 OK	1,166,118	19,824,000	
	- Biaya Uang Harian [9 orang x 1 kgt x 3 hari]	27.0 OH	480,000	12,960,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [4 orang x 1 kgt x 2 kali]	8.0 OK	256,000	2,048,000	
	- Biaya Taksi Bali [1 orang x 1 kgt x 1 kali]	1.0 OK	189,000	189,000	
	> PALEMBANG			51,228,000	
	- Tiket PP Kegiatan Penyusunan NA RUU [9 orang x 1 kgt x 1 kali]	9.0 OK	2,268,000	20,412,000	
	- Biaya Penginapan kegiatan Penyusunan NA RUU Eselon II [1 orang x 1 kgt x 2 hari]	2.0 OK	2,000,000	4,000,000	
	- Biaya Penginapan kegiatan Penyusunan NA RUU Eselon III Kebawah [8 orang x 1 kgt x 2 hari]	16.0 OK	861,000	13,776,000	
	- Biaya Uang Harian [9 orang x 1 kgt x 3 hari]	27.0 OH	380,000	10,260,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [4 orang x 1 kgt x 2 kali]	8.0 OK	256,000	2,048,000	
	- Biaya Taksi Palembang [3 orang x 1 kgt x 2 kali]	6.0 OK	122,000	732,000	
	> YOGYAKARTA			52,586,000	
	- Tiket PP Kegiatan Penyusunan NA RUU [9 orang x 1 kgt x 1 kali]	9.0 OK	2,268,000	20,412,000	
	- Biaya Penginapan kegiatan Penyusunan NA RUU Eselon II [1 orang x 1 kgt x 2 hari]	2.0 OK	2,695,000	5,390,000	
	- Biaya Penginapan kegiatan Penyusunan NA RUU Eselon III Kebawah [8 orang x 1 kgt x 2 hari]	16.0 OK	845,000	13,520,000	
	- Biaya Uang Harian [9 orang x 1 kgt x 3 hari]	27.0 OH	420,000	11,340,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [3 orang x 1 kgt x 2 kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	- Biaya Taksi Yogyakarta [2 orang x 1 kgt x 2 kali]	4.0 OK	97,000	388,000	
	> BANDUNG			32,802,000	
	- biaya tiket Jakarta - Bandung [4 Orang x 1 Kgt x 2 Kali]	8.0 OK	130,000	1,040,000	
	- biaya taksi Jakarta [2 Orang x 1 Kgt x 2 Kali]	4.0 OK	256,000	1,024,000	
	- biaya taksi Bandung [3 Orang x 1 Kgt x 2 Kali]	6.0 OK	200,000	1,200,000	
	- Biaya Penginapan kegiatan Penyusunan NA RUU [9 org x 1 kgt x 2 hari]	18.0 OK	686,000	12,348,000	
	- Biaya Uang Harian Bandung [11 org x 1 kgt x 3 hari]	33.0 OH	430,000	14,190,000	
	- Biaya Transport Jakarta - Bandung [5 org x 1 kgt x 2 kali]	10.0 OK	300,000	3,000,000	
	> BODETABEK			6,100,000	
	- Biaya Transport BODETABEK [3 Orang x 2 Kgt x 1 Kali]	6.0 OH	300,000	1,800,000	
	- Biaya Uang Harian BODETABEK [5 Orang x 2 Kgt x 1 Hari]	10.0 OK	430,000	4,300,000	



**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			28,620,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [11 Orang x 6 Kgt x 1 Kali]	66.0 OK	100,000	6,600,000	
	- Biaya Transport Lokal [18 Orang x 8 Kgt x 1 Kali]	144.0 OK	150,000	21,600,000	
	- Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 jam [2 Orang x 1 Kgt x 1 Kali]	2.0 OK	210,000	420,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			153,262,000	RM
	> Jawa Barat			153,262,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Eselon II Jawa Barat (Depok) [2 Orang x 2 Paket x 3 Kgt]	12.0 OP	1,000,000	12,000,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Eselon II Jawa Barat (Depok) [3 org x 1 kgt x 1 paket]	3.0 OP	1,000,000	3,000,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Eselon III Kebawah Jawa Barat (Depok) [13 Orang x 2 Paket x 3 Kgt]	78.0 OP	820,000	63,960,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Eselon III Kebawah Jawa Barat (Depok) [1 org x 1 kgt x 2 paket]	2.0 OP	820,000	1,640,000	
	- Biaya Uang Harian Paket Fullboard Jawa Barat (Depok) [16 Orang x 3 Kgt x 3 Hari]	144.0 OH	150,000	21,600,000	
	- Biaya Uang Harian Paket Fullboard Jawa Barat (Depok) [1 Orang x 1 Kgt x 3 Hari]	3.0 OH	150,000	450,000	
	- Biaya Transport [10 Orang x 2 Kali x 1 Kgt]	20.0 OK	457,000	9,140,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Eselon III Kebawah Jawa Barat (Depok) [14 orang x 1 kgt x 2 paket]	28.0 OP	820,000	22,960,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Eselon II Jawa Barat (Depok) [2 orang x 1 kgt x 2 paket]	4.0 OP	1,000,000	4,000,000	
	- Biaya Uang Harian Paket Fullboard Jawa Barat (Depok) [16 orang x 1 kgt x 3 hari]	48.0 OH	150,000	7,200,000	
	- Biaya Transport PP [16 orang x 1 kgt x 1 kali]	16.0 OK	457,000	7,312,000	
<b>1613.ABD.003</b>	<b>Rekomendasi Penyelesaian Naskah Akademik</b>	<b>7.0</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	<b>413,474,000</b>	
<b>051</b>	<b>Persiapan Awal Terhadap Naskah Akademik Yang Akan Diselaraskan</b>			<b>131,134,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<b>TANPA SUB KOMPONEN</b>			<b>131,134,000</b>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			7,500,000	RM
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [20 Orang x 1 Kali x 5 Kgt]	100.0 OK	53,000	5,300,000	
	- Biaya Konsumsi Snack Rapat [20 Orang x 1 Kali x 5 Kgt]	100.0 OK	22,000	2,200,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			7,125,000	RM
	- Biaya Pembelian ATK	1.0 PKT	5,585,000	5,585,000	
	- Biaya Bahan Komputer	1.0 PKT	1,540,000	1,540,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V )			99,000	RM
	- Biaya Pemeriksaan Rapid Test Antibody/Antigen/Swab PCR [1 Orang x 1 Kali]	1.0 OK	99,000	99,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V )			62,050,000	RM
	- Biaya Transport dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar [85 Orang x 1 Kali x 1 Kgt]	85.0 OK	300,000	25,500,000	
	- Uang Harian [85 Orang x 1 Hari x 1 kgt]	85.0 OH	430,000	36,550,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			54,360,000	
	- Biaya Transport Lokal [34 Orang x 10 Kali x 1 Kgt]	340.0 OK	150,000	51,000,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam [16 Orang x 1 Kali x 1 Kgt]	16.0 OK	210,000	3,360,000	
<b>052</b>	<b>Penyelarasan Terhadap Sistemika dan Materi Muatan Naskah Akademik</b>			<b>255,761,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<b>TANPA SUB KOMPONEN</b>			<b>255,761,000</b>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			25,190,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [55 Orang x 6 Kgt]	330.0 OK	53,000	17,490,000	
	- Biaya Konsumsi Snack Rapat [25 Orang x 7 Kgt x 2 kali]	350.0 OK	22,000	7,700,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			10,000,000	
	- Biaya Honor Jasa Narasumber Eselon II/III luar BPHN [5 Orang x 2 Jam x 1 Kgt]	10.0 OJ	1,000,000	10,000,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V )			99,000	
	- Biaya Pemeriksaan Rapid Test Antibody/Antigen/Swab PCR [1 Orang x 1 Kali]	1.0 OK	99,000	99,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			220,472,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Luar Kota Jakarta Eselon I/II [2 Orang x 1 Paket x 3 Kgt]	6.0 OP	1,100,000	6,600,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Luar Kota Jakarta Eselon III kebawah [11 Orang x 2 Paket x 8 kgt]	176.0 OP	822,000	144,672,000	
	- Uang Harian Paket Meeting Fullboard (Jawa Barat) [12 Orang x 3 Hari x 8 Kgt]	288.0 OH	150,000	43,200,000	
	- Biaya Transport [13 Orang x 1 Kali x 8 Kgt]	104.0 OK	250,000	26,000,000	
<b>053</b>	<b>Penyusunan Laporan Hasil Penyelarasan</b>			<b>26,579,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<b>TANPA SUB KOMPONEN</b>			<b>26,579,000</b>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			26,480,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [54 Orang x 1 Kali x 3 Kgt]	162.0 OK	53,000	8,586,000	
	- Biaya Konsumsi Snack Rapat [59 Orang x 1 Kali x 3 Kgt]	177.0 OK	22,000	3,894,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	14,000,000	14,000,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V )			99,000	
	- Biaya Pemeriksaan Rapid Test Antibody/Antigen/Swab PCR [1 Orang x 1 Kali x 1 Kgt]	1.0 OK	99,000	99,000	
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			4,472,643,000	
1610	Pendokumentasian Data Hukum dan Peningkatan Integrasi Jaringan Informasi Hukum Nasional			1,452,291,000	
1610.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	166.0 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi		1,452,291,000	
1610.BMA.001	Lokasi : INSTANSI PUSAT <b>Fasilitasi Integrasi JDIHN</b>	163.0 layanan		1,179,211,000	
051	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIHN)</b>			456,273,000	<b>U</b>

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	<i>Pembinaan dan Pengembangan JDIHN</i>			152,490,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			4,765,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 1 kgt x 2 kali]	50.0 OK	22,000	1,100,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [25 orang x 1 kgt x 2 kali]	50.0 OK	53,000	2,650,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PAKET	1,015,000	1,015,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			33,750,000	RM
	- Honor Anggota [5 orang x 9 bulan]	45.0 OB	750,000	33,750,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.139-Jakarta V )			110,225,000	RM
	> JAWA TENGAH			3,465,000	
	>> Eselon III/Setara		0	3,465,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	2,125,000	2,125,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 1 MALAM]	1.0 OH	600,000	600,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 2 HARI]	2.0 OH	370,000	740,000	
	> BALI			8,682,000	
	>> Eselon III/Setara		0	8,682,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	3,262,000	3,262,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	1,500,000	3,000,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	480,000	1,440,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- Biaya Taksi Provinsi PP [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	159,000	318,000	
	- Uang Representatif [1 Orang x 1 Hari]	1.0 OH	150,000	150,000	
	> Riau			15,148,000	
	- Tiket PP 2 orang x 1 kali	2.0 OK	2,265,000	4,530,000	
	- Biaya Penginapan 2 orang x 1 kali x 2 malam	4.0 OH	1,706,000	6,824,000	
	- Biaya Uang Harian 2orang x 1 kali x 3 hari	6.0 OH	370,000	2,220,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP 2 orang x 2 kali x 1 kgt	4.0 OK	256,000	1,024,000	
	- Biaya Taksi Provinsi PP 2orang x 2 kali x 1 kgt	4.0 OK	100,000	400,000	
	- Uang Representatif 1 orang x 1 hari	1.0 OH	150,000	150,000	
	> Jawa Barat			16,020,000	
	- Transport Darat PP 3 orang x 2 kali	6.0 OK	250,000	1,500,000	
	- Biaya Penginapan 3 orang x 1 kali x 2 malam	6.0 OH	1,750,000	10,500,000	
	- Biaya Uang Harian 3 orang x 1 kali x 3 hari	9.0 OH	430,000	3,870,000	
	- Uang Representatif 1 orang x 1 hari	1.0 OH	150,000	150,000	
	> Sulawesi Selatan			18,812,000	
	- Tiket PP 2 orang x 1 kali	2.0 OK	3,755,000	7,510,000	
	- Biaya Penginapan 2 orang x 1 kali x 2 malam	4.0 OH	1,742,000	6,968,000	
	- Biaya Uang Harian 2orang x 1 kali x 3 hari	6.0 OH	430,000	2,580,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP 2 orang x 2 kali x 1 kgt	4.0 OK	256,000	1,024,000	
	- Biaya Taksi Provinsi PP 2orang x 2 kali x 1 kgt	4.0 OK	145,000	580,000	
	- Uang Representatif 1 orang x 1 hari	1.0 OH	150,000	150,000	
	> Jawa Timur			32,966,000	
	- Tiket PP 4 orang x 1 kali	4.0 OK	2,674,000	10,696,000	
	- Biaya Penginapan 4 orang x 1 kali x 2 malam	8.0 OH	1,700,000	13,600,000	
	- Biaya Uang Harian 4 orang x 1 kali x 3 hari	12.0 OH	410,000	4,920,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP 4 orang x 2 kali x 1 kgt	8.0 OK	256,000	2,048,000	
	- Biaya Taksi Provinsi PP 4 orang x 2 kali x 1 kgt	8.0 OK	194,000	1,552,000	
	- Uang Representatif 1 orang x 1 hari	1.0 OH	150,000	150,000	
	> Bengkulu			15,132,000	
	- Tiket PP 2 orang x 1 kali	2.0 OK	2,621,000	5,242,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Biaya Penginapan 2 orang x 1 kali x 2 malam	4.0 OH	1,500,000	6,000,000	
	- Biaya Uang Harian 2orang x 1 kali x 3 hari	6.0 OH	380,000	2,280,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP 2 orang x 2 kali x 1 kgt	4.0 OK	256,000	1,024,000	
	- Biaya Taksi Provinsi PP 2orang x 2 kali x 1 kgt	4.0 OK	109,000	436,000	
	- Uang Representatif 1 orang x 1 hari	1.0 OH	150,000	150,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			3,750,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Internal [5 ORANG x 1 KALI]	5.0 OK	150,000	750,000	
	- Biaya Transport Lokal eksternal [5 ORANG x 4 KALI]	20.0 OK	150,000	3,000,000	
B	<u>Teknis Pengelolaan JDIH</u>			287,983,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			21,660,000	RM
	> TIM TEKNIS JDIHN			14,910,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [30 orang x 1 kgt x 2 kali]	60.0 OK	22,000	1,320,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [30 orang x 1 kgt x 2 kali]	60.0 OK	53,000	3,180,000	
	- Biaya Pengandaan dan Penjilidan	1.0 PAKET	660,000	660,000	
	- Biaya Seminar Kit	65.0 PAKET	150,000	9,750,000	
	> TIM TEKNIS JDIH BPHN			6,750,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [30 orang x 1 kgt x 3 kali]	90.0 OK	22,000	1,980,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [30 orang x 1 kgt x 3 kali]	90.0 OK	53,000	4,770,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			74,250,000	RM
	> TIM TEKNIS JDIHN			74,250,000	
	- Honor Anggota [11 orang x 9 bulan]	99.0 OB	750,000	74,250,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			1,937,000	RM
	> TIM TEKHNIS JDIHN			937,000	
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	937,000	937,000	
	> TIM TEKNIS JDIH BPHN			1,000,000	
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	1,000,000	1,000,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			8,500,000	RM
	> TIM TEKNIS JDIHN			5,100,000	
	- Honor Narasumber Eselon II/Sederajat (Eksternal) [1 orang x 1 kgt x 3 jam]	3.0 OJ	1,700,000	5,100,000	
	> TIM TEKNIS JDIH BPHN			3,400,000	
	- Honor Narasumber/pakar/praktisi/profesional [1 orang x 1 kgt x 2 jam]	2.0 OJ	1,700,000	3,400,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			5,100,000	RM
	> TIM TEKNIS JDIH BPHN			5,100,000	
	- Biaya Transport Lokal [3 ORANG x 1 KALI x 6 KGT]	18.0 OK	100,000	1,800,000	
	- Biaya Transport Lokal eksternal [11 Orang x 2 KGT]	22.0 OK	150,000	3,300,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			176,536,000	RM	
	> TIM TEKNIS JDIHN			0		
	> FGD Tim Teknis JDIHN			38,730,000		
	>> TANGERANG		0	38,730,000		
	- Paket meeting fullboard [30 ORANG x 1 PAKET x 1 KGT]	30.0 OP	1,051,000	31,530,000		
	- Uang Harian [30 ORANG x 2 HARI x 1 KGT]	60.0 OH	120,000	7,200,000		
	> TIM TEKNIS JDIH BPHN			0		
	> JAWA BARAT			46,440,000		
	- Paket meeting fullboard [30 ORANG x 1 PAKET x 1 KGT]	30.0 OP	822,000	24,660,000		
	- Uang Harian [30 ORANG x 2 HARI x 1 KGT]	60.0 OH	150,000	9,000,000		
	- Uang transportasi [30 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	60.0 OK	213,000	12,780,000		
	> Finalisasi Tim Teknis JDIHN			0		
	> Bogor			91,366,000		
	- Paket meeting fullboard Es. I II 1 Orang x 2 Paket x 1 KGT	2.0 OP	1,110,000	2,220,000		
	- Paket meeting fullboard Es. III ke bawah 34 Orang x 2 Paket x 1 KGT	68.0 OP	822,000	55,896,000		
	- Uang Harian (35 Orang x 3 Hari x 1 KGT)	105.0 OH	150,000	15,750,000		
	- Uang Transportasi (35 Orang X 1 KGT)	35.0 OK	500,000	17,500,000		
C	<i>Pertemuan Nasional Pengelola JDIH</i>			15,800,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			8,600,000		RM
	- Biaya Konsumsi Snack Rapat	100.0 OK	22,000	2,200,000		
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat	100.0 OK	53,000	5,300,000		
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	1,100,000	1,100,000		
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			7,200,000	RM	
	- Biaya Transport Lokal [8 orang x 6 kali x 1 kgt]	48.0 OK	150,000	7,200,000		
<b>052</b>	<b>Promosi , Penerbitan dan Kerja Sama JDIHN</b>			<b>296,639,000</b>	<b>U</b>	
A	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			296,639,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			42,969,000	RM	
	- Biaya konsumsi snack rapat [12 orang x 1 kgt x 4 kali]	48.0 OK	22,000	1,056,000		
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [12 orang x 1 kgt x 4 kali]	48.0 OK	47,000	2,256,000		
	- Pembuatan Bahan Cetak/leaflet/ stiker/poster/umbul(pemasangan)/ spanduk/ dan lainnya untuk sosialisasi JDIH	3.0 PAKET	10,419,000	31,257,000		
	> Biaya Penerbitan/Pencetakan			8,400,000		
	- Biaya Penerbitan/Perencanaan Jurnal MHN (2 edisi) e book [2 buku]	2.0 BUKU	2,350,000	4,700,000		
	- Biaya Penerbitan/Perencanaan Jurnal ILJ (2 edisi )	2.0 BUKU	1,850,000	3,700,000		

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			135,200,000	RM
	- Honor Editor Jurnal [7 orang x 2 Tbt]	14.0 OT	300,000	4,200,000	
	- Honor Honor Redaktur Jurnal [3 orang x 4 Tbt]	12.0 OT	400,000	4,800,000	
	- Honor Pembuat Artikel Jurnal Hukum Berbahasa Inggris [5 Orang x 2 ter x 22 Hal]	220.0 OT	200,000	44,000,000	
	- Honor Pembuat Artikel Majalah Hukum [7 orang x 2 ter x 22 Hal]	308.0 OT	150,000	46,200,000	
	- Honor Mitra Bestari Majalah Hukum Nasional	14.0 OT	1,500,000	21,000,000	
	- Honor Mitra Bestari Jurnal bahasa inggris [5 Orang x 2 Ter]	10.0 OT	1,500,000	15,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V )			18,900,000	RM
	- Biaya Langganan Aplikasi Grafis dan Template (1 th)	2.0 PAKET	4,000,000	8,000,000	
	- Biaya Langganan Fasilitas pengelolaan untuk jurnal [2 paket x 1 tahun]	2.0 PAKET	2,000,000	4,000,000	
	- Biaya Keanggotaan Penerbitan dan Jurnal (DOI)	2.0 PAKET	2,000,000	4,000,000	
	- Biaya Mengikuti Seminar/Kegiatan [3 ORANG x 1 KGT]	3.0 OK	300,000	900,000	
	- Biaya Pendistribusian Terbitan [20 TEMP x 4 KALI x 1 PAKET]	80.0 PAKET	25,000	2,000,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			2,980,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	2,090,000	2,090,000	
	- Biaya Bahan Komputer	1.0 PAKET	890,000	890,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			8,000,000	RM
	- Honor Narasumber Eselon II/Sederajat (Eksternal) [4 orang x 1 kgt x 2 jam]	8.0 OJ	1,000,000	8,000,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V )			87,090,000	RM
	- Pemasangan Iklan pada billboard/videotron [10 PAKET x 30 KALI x 7 HARI]	2100.0 PAKET	12,900	27,090,000	
	- Biaya Publikasi Media Massa	2.0 PAKET	30,000,000	60,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			1,500,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Internal [2 ORANG x 5 KALI]	10.0 OK	150,000	1,500,000	
<b>053</b>	<b>Pengintegrasian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional</b>			<b>226,014,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<b>TANPA SUB KOMPONEN</b>			<b>226,014,000</b>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			330,000	RM
	> VALIDASI DOKUMEN HUKUM JDIHN			330,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PAKET	330,000	330,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			640,000	RM
	> VALIDASI DOKUMEN HUKUM JDIHN			640,000	
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	640,000	640,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			225,044,000	RM
	> VALIDASI DOKUMEN HUKUM JDIHN			69,610,000	
	>> YOGYAKARTA		0	69,610,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard [17 ORANG x 2 PAKET x 1 KGT]	34.0 OP	750,000	25,500,000	
	- Biaya Uang Harian Paket Meeting Fullboard [17 ORANG x 3 HARI x 1 KGT]	51.0 OH	140,000	7,140,000	
	- Biaya Penggantian Tiket PP	1.0 OK	36,921,000	36,921,000	
	- Biaya transport darat	1.0 ok	49,000	49,000	
	> Jawa Barat			60,238,000	
	- Paket meeting fullboard Es. I II 1 Orang x 2 Paket x 1 KGT	2.0 OP	1,110,000	2,220,000	
	- Paket meeting fullboard Es. III ke bawah 22 Orang x 2 Paket x 1KGT	44.0 OP	822,000	36,168,000	
	- Uang Harian 23 Orang x 3 Hari x 1 KGT	69.0 OH	150,000	10,350,000	
	- Uang Transportasi PP 23 Orang x 1 KGT	23.0 OK	500,000	11,500,000	
	> Lombok			95,196,000	
	- Paket meeting fullboard Es. I II 1 Orang x 2 Paket x 1 KGT	2.0 OP	1,213,000	2,426,000	
	- Paket meeting fullboard Es. III ke bawah 14 Orang x 2 Paket x 1KGT	28.0 OP	820,000	22,960,000	
	- Uang Harian 15 Orang x 3 Hari x 1 KGT	45.0 OH	150,000	6,750,000	
	- Tiket Pesawat PP 15 Orang x 1 KGT	15.0 OK	3,230,000	48,450,000	
	- Biaya Taxi Jakarta PP 15 Org x 2 Kali	30.0 OK	256,000	7,680,000	
	- Biaya Taxi Provinsi Tujuan PP 15 Org x 2 Kali	30.0 OK	231,000	6,930,000	
<b>054</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional</b>			<b>200,285,000</b>	
<b>A</b>	<b>TANPA SUB KOMPONEN</b>			<b>200,285,000</b>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			1,148,000	RM
	- Biaya Pengandaan dan Penjilidan	1.0 KGT	1,148,000	1,148,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			3,881,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	2,991,000	2,991,000	
	- Biaya bahan komputer	1.0 PAKET	890,000	890,000	



**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.139-Jakarta V )			194,756,000	RM
	> ACEH			6,946,000	
	>> Eselon II/Setara		0	6,946,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	4,208,000	4,208,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	616,000	1,232,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	360,000	1,080,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	213,000	426,000	
	> SUMATERA UTARA			5,450,000	
	>> Eselon II/Setara		0	5,450,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	3,630,000	3,630,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	540,000	1,080,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 2 HARI]	2.0 OH	370,000	740,000	
	> RIAU			5,187,000	
	>> Eselon II/Setara		0	5,187,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	2,407,000	2,407,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	600,000	1,200,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	370,000	1,110,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	235,000	470,000	
	> KEPULAUAN RIAU			5,530,000	
	>> Eselon II/Setara		0	5,530,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	2,676,000	2,676,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	792,000	1,584,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	370,000	1,110,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	160,000	160,000	
	> SUMATERA BARAT			4,860,000	
	>> Eselon II/Setara		0	4,860,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	2,952,000	2,952,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	211,000	422,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	380,000	1,140,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	173,000	346,000	
	> JAMBI			3,917,000	
	>> Eselon II/Setara		0	3,917,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	1,947,000	1,947,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	174,000	348,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	370,000	1,110,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	> SUMATERA SELATAN			5,364,000	
	>> Eselon II/Setara		0	5,364,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	2,268,000	2,268,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	861,000	1,722,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	380,000	1,140,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	162,000	162,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Biaya Taksi Provinsi PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	72,000	72,000	
	> LAMPUNG			4,285,000	
	>> Eselon II/Setara		0	4,285,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	1,165,000	1,165,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	580,000	1,160,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	380,000	1,140,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- Biaya Taksi Provinsi PP [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	154,000	308,000	
	> BENGKULU			3,992,000	
	>> Eselon II/Setara		0	3,992,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	1,468,000	1,468,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	692,000	1,384,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	380,000	1,140,000	
	> BANGKA BELITUNG			3,733,000	
	>> Eselon II/Setara		0	3,733,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	1,669,000	1,669,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	622,000	1,244,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 2 HARI]	2.0 OH	410,000	820,000	
	> BANTEN			2,089,000	
	>> Eselon II/Setara		0	2,089,000	
	- Transport darat PP [1 orang x 2 Kali]	2.0 OK	148,000	296,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 1 MALAM]	1.0 OH	683,000	683,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	370,000	1,110,000	
	> JAWA BARAT			2,662,000	
	>> Eselon II/Setara		0	2,662,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	686,000	1,372,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	430,000	1,290,000	
	> JAWA TENGAH			4,359,000	
	>> Eselon II/Setara		0	4,359,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	1,801,000	1,801,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	600,000	1,200,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	370,000	1,110,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	248,000	248,000	
	> JAWA TIMUR			3,984,000	
	>> Eselon II/Setara		0	3,984,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	2,510,000	2,510,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	737,000	1,474,000	
	> D.I YOGYAKARTA			4,868,000	
	>> Eselon II/Setara		0	4,868,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	1,656,000	1,656,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	845,000	1,690,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	420,000	1,260,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	131,000	262,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	> BALI			7,040,000	
	>> Eselon II/Setara		0	7,040,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	3,262,000	3,262,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	1,040,000	2,080,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	480,000	1,440,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	129,000	258,000	
	> NUSA TENGGARA TIMUR			7,594,000	
	>> Eselon II/Setara		0	7,594,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	4,802,000	4,802,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	495,000	990,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	430,000	1,290,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	> KALIMANTAN TENGAH			5,542,000	
	>> Eselon II/Setara		0	5,542,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	2,984,000	2,984,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	659,000	1,318,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	360,000	1,080,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	160,000	160,000	
	> KALIMANTAN SELATAN			5,789,000	
	>> Eselon II/Setara		0	5,789,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	2,995,000	2,995,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	650,000	1,300,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	380,000	1,140,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [2 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	177,000	354,000	
	> KALIMANTAN TIMUR			5,792,000	
	>> Eselon II/Setara		0	5,792,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	2,753,000	2,753,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	804,000	1,608,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	430,000	1,290,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	141,000	141,000	
	> SULAWESI UTARA			8,578,000	
	>> Eselon II/Setara		0	8,578,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	5,000,000	5,000,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	978,000	1,956,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	370,000	1,110,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	> SULAWESI BARAT			7,809,000	
	>> Eselon II/Setara		0	7,809,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	4,867,000	4,867,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	704,000	1,408,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	410,000	1,230,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	152,000	304,000	
	> GORONTALO			7,038,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	>> Eselon II/Setara		0	7,038,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	4,034,000	4,034,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	865,000	1,730,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	370,000	1,110,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	164,000	164,000	
	> SULAWESI SELATAN			6,889,000	
	>> Eselon II/Setara		0	6,889,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	3,169,000	3,169,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	600,000	1,200,000	
	- Biaya uang harian [2 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	6.0 OH	420,000	2,520,000	
	> SULAWESI TENGAH			6,985,000	
	>> Eselon II/Setara		0	6,985,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	3,829,000	3,829,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	713,000	1,426,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	370,000	1,110,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	145,000	290,000	
	- Biaya Taksi Provinsi PP [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	165,000	330,000	
	> SULAWESI TENGGARA			6,800,000	
	>> Eselon II/Setara		0	6,800,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	4,000,000	4,000,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	710,000	1,420,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	380,000	1,140,000	
	- Biaya Taksi Provinsi PP [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	120,000	240,000	
	> MALUKU UTARA			9,141,000	
	>> Eselon II/Setara		0	9,141,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	6,402,000	6,402,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	600,000	1,200,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	430,000	1,290,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	249,000	249,000	
	> MALUKU			9,746,000	
	>> Eselon II/Setara		0	9,746,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	6,942,000	6,942,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	667,000	1,334,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	380,000	1,140,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	165,000	330,000	
	> PAPUA			9,977,000	
	>> Eselon II/Setara		0	9,977,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	5,737,000	5,737,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	994,000	1,988,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	580,000	1,740,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	> PAPUA BARAT			11,961,000	
	>> Eselon II/Setara		0	11,961,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	8,351,000	8,351,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	857,000	1,714,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	480,000	1,440,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	228,000	456,000	
	> NUSA TENGGARA BARAT			5,580,000	
	- Tiket PP (1 orang x 1 kali)	1.0 OK	2,889,000	2,889,000	
	- Biaya Penginapan (1 Orang x 1 kali x 2 malam)	2.0 OH	580,000	1,160,000	
	- Biaya Uang Harian (1 Orang x 1 kali x 3 hari)	3.0 OH	440,000	1,320,000	
	- Biaya Taksi Jakarta (1 Orang x 1 kali x 1 Kgt)	1.0 OK	211,000	211,000	
	> KALIMANTAN BARAT			5,269,000	
	- Tiket PP (1 orang x 1 kali)	1.0 OK	2,781,000	2,781,000	
	- Biaya Penginapan (1 Orang x 1 kali x 2 malam)	2.0 OH	538,000	1,076,000	
	- Biaya Uang Harian (1 Orang x 1 kali x 3 hari)	3.0 OH	380,000	1,140,000	
	- Biaya Taksi Jakarta (1 Orang x 2 kali x 1 Kgt)	2.0 OK	136,000	272,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			500,000	
	- Biaya Transport Lokal Internal [5 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	5.0 OK	100,000	500,000	
<b>1610.BMA.002</b>	<b>Fasilitasi Layanan Perpustakaan Hukum</b>	<b>3.0 layanan</b>		<b>273,080,000</b>	
<b>051</b>	<b>Pengelolaan Perpustakaan Hukum</b>			<b>199,034,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<b>TANPA SUB KOMPONEN</b>			<b>199,034,000</b>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			23,150,000	
	> Penggandaan dan Penjilidan Laporan Akhir Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Hukum			1,000,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan Laporan Akhir Kegiatan	1.0 PAKET	1,000,000	1,000,000	
	> Tim Penyusun Revisi Pedoman Pengelolaan Perpustakaan			1,000,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan Tim Penyusun Revisi Pedoman Pengelolaan Perpustakaan	1.0 PAKET	1,000,000	1,000,000	
	> Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan			11,250,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 1 kgt x 6 kali]	150.0 OK	22,000	3,300,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [25 orang x 1 kgt x 6 kali]	150.0 OK	53,000	7,950,000	
	> Rapat Tim Penyusun Perubahan Pedoman Pengelolaan Perpustakaan			9,900,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [22 orang x 1 kgt x 6 kali]	132.0 OK	22,000	2,904,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [22 orang x 1 kgt x 6 kali]	132.0 OK	53,000	6,996,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			15,750,000	
	- Biaya Honorarium Anggota Tim Penyusun Revisi Pedoman Tajuk Subjek Bidang Hukum dari luar BPHN [3 orang x 7 bulan]	21.0 OB	750,000	15,750,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

Halaman : 37

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V ) Biaya Pembelian Perlengkapan untuk Protokol Kesehatan Layanan Perpustakaan (Masker, Handgloves, handsanitizer, Disinfektan Spray, - Biaya Fumigasi Koleksi Dokumen Hukum - Langganan Media (Jurnal/Koran/Majalah/Buku dibidang hukum) baik tercetak atau elektronik) [12 Bulan x 1 Kali]	1.0 PAKET 1.0 PAKET 12.0 PAKET	2,956,000 26,985,000 720,000	38,581,000 2,956,000 26,985,000 8,640,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V ) - Biaya Pembelian ATK Pengelolaan Perpustakaan Hukum - Biaya bahan komputer	1.0 PAKET 1.0 PAKET	5,999,000 3,504,000	9,503,000 5,999,000 3,504,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V ) - Honor Narasumber Eselon II/Sederajat (Eksternal) [1 orang x 1 kgt x 3 jam] - Honor Narasumber Eselon III/Sederajat (Eksternal) [2 orang x 1 kgt x 2 jam]	3.0 OJ 4.0 OJ	1,000,000 900,000	6,600,000 3,000,000 3,600,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V ) > D.I YOGYAKARTA - Tiket PP [5 orang x 1 Kali] - Biaya penginapan [5 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM] - Biaya uang harian [5 ORANG x 1 KALI x 3 HARI] - Biaya Taksi Jakarta PP [5 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	5.0 OK 10.0 OH 15.0 OH 10.0 OK	960,000 360,000 420,000 125,000	15,950,000 15,950,000 4,800,000 3,600,000 6,300,000 1,250,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V ) - Biaya Transport Lokal Pendukung Kegiatan (untuk Internal/Eksternal)	30.0 OK	150,000	4,500,000 4,500,000	RM
536111	<u>Belanja Modal Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V ) - Biaya pembelian buku-buku hukum - Biaya Pengadaan E-Book	1.0 Paket 1.0 paket	35,000,000 50,000,000	85,000,000 35,000,000 50,000,000	RM
<b>052</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Pustakawan</b>			<b>74,046,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<b>TANPA SUB KOMPONEN</b>			<b>74,046,000</b>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V ) - Biaya Penggandaan dan Penjilidan - Biaya konsumsi snack rapat [105 orang x 1 kgt x 1 kali] - Biaya Konsumsi Makan Rapat [75 orang x 1 kgt x 1 kali] - Biaya Pembelian Seminar Kit Kegiatan [75 PKT x 1 KGT]	1.0 PAKET 105.0 OK 75.0 OK 75.0 PAKET	1,500,000 22,000 53,000 150,000	19,035,000 1,500,000 2,310,000 3,975,000 11,250,000	RM
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V ) - Biaya Pendaftaran Keikutsertaan Seminar/Forum dan kegiatan pertemuan lainnya di Bidang Perpustakaan	4.0 OK	3,625,000	14,500,000 14,500,000	RM

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V ) - Biaya Pembelian ATK	1.0 PAKET	1,983,000	1,983,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V ) - Honor Narasumber Eselon II/Sederajat (Eksternal) [2 orang x 1 kgt x 3 jam]	6.0 OJ	1,000,000	6,000,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V ) Keikutsertaan dalam Seminar Nasional > Perpustakaan/Seminar Forum Perpustakaan Khusus/Seminar Forum Perpustakaan Digital > Rapat Kerja Pusat IPI dan Seminar Ilmiah Nasional IPI ( LOMBOK - NTB)			25,778,000	RM
	- Tiket PP [2 orang x 1 Kali]	2.0 OK	3,206,000	6,412,000	
	- Biaya uang harian [2 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	6.0 OH	150,000	900,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [2 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	4.0 OK	78,000	312,000	
	- Biaya Taksi Provinsi PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	68,000	68,000	
	> Pembinaan Kapasitas Pengelola Perpustakaan Kanwil Sulawesi Utara			12,134,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	5,004,000	5,004,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	978,000	1,956,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	370,000	1,110,000	
	- Biaya Taksi Provinsi PP [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	138,000	276,000	
	>> Lampung		0	3,788,000	
	- Biaya tiket PP (1 Orang x 1 Kali)	1.0 OK	1,188,000	1,188,000	
	- Biaya Hotel/Penginapan (1 Org x 1 Kali x 2 Malam)	2.0 OH	580,000	1,160,000	
	- Biaya Uang Harian (1 Org x 1 Kali x 3 Hari)	3.0 OH	380,000	1,140,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta PP [1 orang x 2 kali]	2.0 OK	150,000	300,000	
	> Konfrensi Perpustakaan Digital (Malang)			5,652,000	
	- Biaya tiket PP Jakarta - Malang (2 Orang x 1 Kali)	2.0 OK	2,270,000	4,540,000	
	- Biaya Uang Harian (2 Org x 1 Kali x 3 Hari)	6.0 OH	140,000	840,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta PP (2 Org x 2 Kali)	4.0 OK	47,000	188,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi (2 Org x 2 Kali)	4.0 OK	21,000	84,000	
	> Seminar dan Rapat Perpusnas (Bogor)			300,000	
	- Uang Harian (1 Org x 2 Hari)	2.0 OH	150,000	300,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V ) - Biaya Transport Lokal Pendukung Kegiatan (untuk Internal/Eksternal)	45.0 OK	150,000	6,750,000	RM
1612	<u>Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum</u>			3,020,352,000	
1612.ADG	<u>Standarisasi Profesi dan SDM[Base Line]</u>	432.0 Orang		258,023,000	
	Lokasi : INSTANSI PUSAT				
1612.ADG.001	<b>Pembinaan Penyuluh Hukum Nasional</b>	432.0 Orang		258,023,000	
051	<b>Instrumen Pembinaan JF Penyuluh Hukum</b>			84,693,000	U
A	<i>Penyusunan Peraturan Penyuluh Hukum</i>			50,969,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			9,155,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [70 orang x 1 kali x 1 kgt]	70.0 OK	22,000	1,540,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [35 orang x 1 kali x 1 kgt]	35.0 OK	53,000	1,855,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PAKET	3,450,000	3,450,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat di Jawa Barat [35 orang x 1 kali]	35.0 OK	20,000	700,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat di Jawa Barat [35 orang x 1 kali]	35.0 OK	46,000	1,610,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			8,626,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	520,000	520,000	
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	6,356,000	6,356,000	
	- Biaya pembelian bahan komputer	1.0 PAKET	1,750,000	1,750,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V )			22,172,000	RM
	> Jawa Barat			22,172,000	
	- Biaya Penggantian Transport Darat Jakarta - Jawa Barat PP [2 orang x 2 kali x 1 kgt]	4.0 OK	200,000	800,000	
	- Uang Harian [7 orang x 3 HARI x 1 KGT]	21.0 OH	430,000	9,030,000	
	- Biaya Penginapan Eselon II [1 ORANG x 2 HARI x 1 KGT]	2.0 OH	685,000	1,370,000	
	- Biaya Penginapan Eselon III Sederajat ke bawah [7 ORANG x 2 malam x 1 KGT]	14.0 OH	588,000	8,232,000	
	- Biaya Penginapan Eselon IV/ sederajat kebawah [2 orang x 2 malam x 1 kgt]	4.0 OH	685,000	2,740,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			2,800,000	RM
	- Biaya Transport Lokal orang di Luar BPHN [12 ORANG x 1 KALI x 1 kgt]	12.0 OK	150,000	1,800,000	
	- Biaya Transport Lokal orang di Luar BPHN Kegiatan Jawa Barat [10 orang x 1 kali x 1 kgt]	10.0 OK	100,000	1,000,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			8,216,000	RM
	> JAWA TIMUR			8,216,000	
	- Biaya penggantian tiket PP [2 orang x 1 kgt]	2.0 OK	2,411,000	4,822,000	
	- Biaya uang harian [2 orang x 2 hari]	4.0 OH	410,000	1,640,000	
	- Biaya Penginapan (Biasa) [1 orang x 2 malam x 1 kgt]	2.0 OH	450,000	900,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [1 orang x 2 kali]	2.0 OK	427,000	854,000	
<i>B</i>	<i>Penyusunan Pedoman Penyuluhan Hukum Nasional</i>			8,360,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			8,360,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [15 orang x 6 kali x 1 kgt]	90.0 OK	22,000	1,980,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [15 orang x 4 kali x 1 kgt]	60.0 OK	53,000	3,180,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PAKET	3,200,000	3,200,000	
<i>C</i>	<i>Sosialisasi Peraturan JF Penyuluh Hukum</i>			25,364,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			3,850,000	RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PAKET	3,850,000	3,850,000	



**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V )			21,514,000	
	> JAWA TENGAH			21,514,000	
	- Biaya Penggantian Tiket PP [4 orang x 1 kgt]	4.0 OK	1,500,000	6,000,000	
	- Biaya Uang harian [4 orang x 3 hari x 1 kgt]	12.0 OH	370,000	4,440,000	
	- Biaya Penginapan (Eselon II/Sederajat) [2 orang x 2 malam x 1 kgt]	4.0 OH	1,500,000	6,000,000	
	- Biaya Penginapan (Eselon IV/Sederajat) [3 orang x 2 malam x 1 kgt]	6.0 OH	600,000	3,600,000	
	- Biaya Taksi Jakarta (PP) [2 orang x 2 kali x 1 kgt]	4.0 OK	256,000	1,024,000	
	- Biaya uang representatif 1 org X 3 hari	3.0 OH	150,000	450,000	
<b>052</b>	<b>Pemetaan dan Profiling Penyuluh Hukum</b>			<b>2,250,000</b>	<b>U</b>
A	<i>Penyusunan Database Penyuluh Hukum</i>			2,250,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			2,250,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [15 orang x 2 kali]	30.0 OK	22,000	660,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [15 orang x 2 kali]	30.0 OK	53,000	1,590,000	
<b>053</b>	<b>Peningkatan Kapasitas JF Penyuluh Hukum</b>			<b>37,124,000</b>	<b>U</b>
A	<i>Pembinaan Penyuluh Hukum</i>			37,124,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			16,059,000	RM
	- Biaya Pengandaan dan Penjilidan	1.0 KGT	3,110,000	3,110,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 11 kali]	220.0 OK	22,000	4,840,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [17 orang x 9 Kali]	153.0 OK	53,000	8,109,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V )			18,465,000	RM
	> KALIMANTAN SELATAN			18,465,000	
	- Biaya penggantian tiket PP 3 org X 1 kali	3.0 OK	2,900,000	8,700,000	
	- Biaya Penginapan (Eselon II/Sederajat) [3 orang x 2 malam x 1 kgt]	6.0 OH	1,000,000	6,000,000	
	- Biaya uang harian 3 org X 3 hari X 1 kgt	9.0 OK	380,000	3,420,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [2 orang x 2 kali]	4.0 OK	86,250	345,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			2,600,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [13 orang x 2 kali]	26.0 OK	100,000	2,600,000	
<b>054</b>	<b>Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit JF Penyuluh Hukum</b>			<b>101,520,000</b>	<b>U</b>
A	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			101,520,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			28,850,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat persiapan 20 org X 2 kali	40.0 OK	22,000	880,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat persiapan 20 org X 2 kali	40.0 OK	53,000	2,120,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [30 orang x 10 kali]	300.0 OK	22,000	6,600,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [30 orang x 10 Kali]	300.0 OK	53,000	15,900,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 KGT	3,000,000	3,000,000	
	> Bimbingan Teknis JF Penyuluh Hukum Dalam Rangka Penilaian Angka Kredit JF			0	
	> JAWA BARAT			350,000	
	- Biaya pembuatan spanduk	1.0 PAKET	350,000	350,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			4,000,000	RM
	- Honor Narasumber Eselon II / Sederajat (eksternal) 2 org X 1 kgt X 2 Jam	4.0 OJ	1,000,000	4,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			2,000,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [20 ORANG x 1 KALI]	20.0 OK	100,000	2,000,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			66,670,000	RM
	> JAWA BARAT			5,880,000	
	- Biaya penggantian transport peserta PP [7 ORANG x 1 kali x 2 kgt]	14.0 OK	420,000	5,880,000	
	> Bimbingan Teknis JF Penyuluh Hukum Dalam Rangka Penilaian Angka Kredit JF			60,790,000	
	- Biaya uang harian perjalanan dinas biasa [21 orang x 1 hari x 1 kgt]	21.0 OH	430,000	9,030,000	
	- Biaya Penginapan (Eselon I/II/Sederajat) [2 orang x 1 malam x 1 kgt]	2.0 OH	685,000	1,370,000	
	- Biaya Penginapan (Eselon IV/Sederajat/Kebawah) 19 org X 1 malam X 1 kgt	19.0 OH	685,000	13,015,000	
	- Biaya paket meeting fullday Peserta dan Panitia [65 orang x 1 paket x 1 kgt]	65.0 OH	470,000	30,550,000	
	- Biaya uang harian paket meeting fullday peserta dan panitia 65 org X 1 hari X 1 kgt	65.0 OH	105,000	6,825,000	
<b>055</b>	<b>Pemberian Rekomendasi dalam Rangka Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang</b>			<b>32,436,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<b>TANPA SUB KOMPONEN</b>			<b>32,436,000</b>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			24,436,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 14 kali]	280.0 OK	22,000	6,160,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [20 orang x 14 kali]	280.0 OK	53,000	14,840,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PAKET	3,436,000	3,436,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			6,000,000	RM
	- Honor Narasumber Eksternal Eselon II/Sederajat 3 org X 2 jam X 1 kgt	6.0 OJ	1,000,000	6,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			2,000,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [10 ORANG x 2 KALI]	20.0 OK	100,000	2,000,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1612.BDD	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat[Base Line]</b>	410.0 Kelompok Masyarakat		651,095,000	
	Lokasi : INSTANSI PUSAT				
1612.BDD.001	<b>Fasilitasi Kelompok Desa Sadar Hukum</b>	315.0 Kelompok Masyarakat		558,388,000	
051	<b>Pembinaan dan Pengembangan Kelompok KADARKUM dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum</b>			130,750,000	
A	<i>Melaksanakan Temu Sadar Hukum pada Kelompok KADARKUM Tingkat Pusat</i>			57,250,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			6,050,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [30 orang x 1 kgt]	30.0 OK	22,000	660,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [30 orang x 1 kgt]	30.0 OK	53,000	1,590,000	
	- Biaya Penggandaan Penjilidan dan Laporan Akhir	1.0 KGT	3,500,000	3,500,000	
	- Biaya Pembuatan Spanduk [1 buah x 1 KGT]	1.0 PAKET	300,000	300,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V )			50,000,000	RM
	- Biaya Peliputan	2.0 KGT	25,000,000	50,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			1,200,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Internal [6 ORANG x 2 KALI]	12.0 OK	100,000	1,200,000	
B	<i>Pengelolaan Aplikasi Sistem Elektronik Masyarakat Cerdas Hukum (e-MASDASKUM)</i>			73,500,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			8,110,000	RM
	- Biaya Penggandaan Penjilidan dan Laporan Akhir	1.0 PAKET	3,110,000	3,110,000	
	- Biaya Seminar kit [1 Kgt]	1.0 Kgt	5,000,000	5,000,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			65,390,000	RM
	> JAWA BARAT			65,390,000	
	- Biaya transportasi [10 orang x 2 kali x 1 kgt]	20.0 OK	250,000	5,000,000	
	- Biaya pakeet meeting fullboard Es. I dan II [4 ORANG x 1 KALI x 1 PAKET]	4.0 OP	1,110,000	4,440,000	
	- Biaya pakeet meeting fullboard III kebawah [25 ORANG x 2 KALI x 1 PAKET]	50.0 OP	822,000	41,100,000	
	- Biaya uang harian [33 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	99.0 OH	150,000	14,850,000	
052	<b>Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum</b>			160,644,000	U
A	<i>Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum</i>			115,825,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			70,775,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 1 kgt]	20.0 OK	22,000	440,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [20 orang x 1 kgt]	20.0 OK	53,000	1,060,000	
	- Biaya Penggandaan Penjilidan dan Laporan Akhir	1.0 KGT	5,682,000	5,682,000	
	- Biaya Pembuatan Piagam	1.0 KGT	63,593,000	63,593,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V )			20,000,000	RM
	- Biaya Peliputan	1.0 KGT	20,000,000	20,000,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V )			24,750,000	RM	
	> JAWA BARAT			24,750,000		
	- Biaya Penggantian Transport [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	250,000	1,500,000		
	- Uang Harian [8 orang x 3 HARI x 1 Kali x 1 KGT]	24.0 OH	430,000	10,320,000		
	- Biaya Penginapan Eselon II [1 ORANG x 2 HARI x 1 KGT]	2.0 OH	2,500,000	5,000,000		
	- Biaya Penginapan Eselon III/Gol. IV [1 ORANG x 2 HARI x 1 KGT]	2.0 OH	1,000,000	2,000,000		
	- Biaya Penginapan Eselon IV/Sederajat Kebawah [4 ORANG x 2 HARI x 1 KGT]	8.0 OH	685,000	5,480,000		
	- Biaya Representatif (Eselon II) [1 Orang x 3 Hari x 1 KGT]	3.0 OH	150,000	450,000		
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			300,000		RM
	- Biaya Transport Lokal Internal [3 ORANG x 1 KALI]	3.0 OK	100,000	300,000		
<b>B</b>	<u>Penyempurnaan Pedoman Instrumen Desa/Kelurahan Sadar Hukum</u>			44,819,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			9,179,000	RM	
	- Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 2 kgt]	50.0 OK	22,000	1,100,000		
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [25 orang x 2 kgt]	50.0 OK	53,000	2,650,000		
	- Biaya Penggandaan Penjilidan dan Laporan Akhir	1.0 KGT	4,829,000	4,829,000		
	- Biaya Pembuatan Spanduk	2.0 PAKET	300,000	600,000		
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			8,700,000	RM	
	- Honor Narasumber Eselon II / sederajat (Eksternal) [2 ORANG x 3 JAM x 1 KGT]	6.0 OJ	1,000,000	6,000,000		
	- Honor Narasumber Eselon III / sederajat (Eksternal) [1 orang x 3 jam x 1 kgt]	3.0 Oj	900,000	2,700,000		
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			26,940,000	RM	
	> JAWA TIMUR			26,940,000		
	- Biaya Tiket PP [3 orang x 1 kali x 1 kgt]	3.0 OK	2,702,000	8,106,000		
	- Uang Harian 3 ORANG X 1 HARI X 1 KGT	3.0 OH	410,000	1,230,000		
	- Biaya Penginapan Eselon II 1 ORANG X 1 HARI X 1 KGT	1.0 OH	1,700,000	1,700,000		
	- Biaya Penginapan Eselon III/Gol.IV [2 orang x 1 hari x 1 kgt]	2.0 OH	1,200,000	2,400,000		
	- Biaya Penginapan Eselon III/Gol.IV 1 ORANG X 2 HARI X 1 KGT	2.0 OH	450,000	900,000		
	- Biaya Penginapan Eselon III/Gol.IV [1 orang x 1 hari x 1 kgt]	1.0 OH	1,000,000	1,000,000		
	- Biaya Penginapan Eselon IV/Sederajat Kebawah 1 ORANG X 1 HARI X 1 KGT	1.0 OH	750,000	750,000		
	- Biaya Representatif (Eselon II) [1 orang x 1 hari x 1 kgt]	1.0 OH	150,000	150,000		
	- Biaya Taksi Jakarta PP [1 orang x 1 kali x 1 kgt]	1.0 OK	204,000	204,000		
	- Biaya Paket Meeting Fullday [25 orang x 1 kali x 1 paket]	25.0 OP	408,000	10,200,000		
	- Biaya Uang Harian Paket Meeting Fullday [3 orang x 1 kali x 1 paket]	3.0 OH	100,000	300,000		
<b>053</b>	<b>Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum</b>			<b>266,994,000</b>		<b>U</b>
<b>A</b>	<b>TANPA SUB KOMPONEN</b>			<b>266,994,000</b>		

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB**  
**UNIT ORG**  
**UNIT KERJA**  
**ALOKASI**

**(013)**  
**(10)**  
**(409288)**  
 Rp. 48,886,291,000

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V ) - Biaya konsumsi snack rapat [30 orang x 1 kgt] - Biaya Konsumsi Makan Rapat [30 orang x 1 kgt] - Biaya Penggandaan Penjilidan dan Laporan Akhir	  30.0 OK 30.0 OK 1.0 KGT	  22,000 53,000 4,591,000	  6,841,000 660,000 1,590,000 4,591,000	  RM

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.139-Jakarta V )			259,153,000	RM
	> JAWA TIMUR			44,400,000	
	- Biaya Tiket PP [7 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	7.0 OK	2,670,000	18,690,000	
	- Uang Harian [7 orang x 3 HARI x 1 KGT]	21.0 OH	410,000	8,610,000	
	- Biaya Penginapan Eselon II [1 ORANG x 2 HARI x 2 KGT]	4.0 OH	1,950,000	7,800,000	
	- Biaya Penginapan Eselon III/Gol. IV [3 ORANG x 2 HARI x 1 KGT]	6.0 OH	650,000	3,900,000	
	- Biaya Penginapan Eselon IV/Sederajat Kebawah [3 ORANG x 2 HARI x 1 KGT]	6.0 OH	750,000	4,500,000	
	- Biaya Representatif (Eselon II) [1 Orang x 3 Hari x 2 KGT]	6.0 OH	150,000	900,000	
	> JAWA BARAT			135,842,000	
	- Biaya Transport darat [11 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	22.0 OK	250,000	5,500,000	
	- Uang Harian [12 orang x 3 HARI x 3 KGT]	108.0 OH	430,000	46,440,000	
	- Uang Harian [12 orang x 3 hari x 1 kgt]	36.0 OH	430,000	15,480,000	
	- Biaya Penginapan Eselon II [1 ORANG x 2 HARI x 4 KGT]	8.0 OH	2,500,000	20,000,000	
	- Biaya Penginapan Eselon III/Gol. IV [2 ORANG x 2 HARI x 2 KGT]	8.0 OH	1,200,000	9,600,000	
	- Biaya Penginapan Eselon IV/Sederajat Kebawah [8 orang x 2 hari x 1 kgt]	16.0 OH	686,000	10,976,000	
	- Biaya Penginapan Eselon IV/Sederajat Kebawah [6 ORANG x 2 HARI x 3 KGT]	36.0 OH	686,000	24,696,000	
	- Biaya Representatif (Eselon II) [1 Orang x 3 Hari x 7 KGT]	21.0 OH	150,000	3,150,000	
	> LAMPUNG			12,820,000	
	- Biaya Tiket PP [3 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	3.0 OK	1,500,000	4,500,000	
	- Uang Harian [3 orang x 3 HARI x 1 KGT]	9.0 OH	380,000	3,420,000	
	- Biaya Penginapan Eselon II [1 ORANG x 2 HARI x 1 KGT]	2.0 OH	1,100,000	2,200,000	
	- Biaya Penginapan Eselon III/Gol. IV [2 ORANG x 2 HARI x 1 KGT]	4.0 OH	500,000	2,000,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [2 Orang x 2 Kali x 1 KGT]	4.0 OK	175,000	700,000	
	> BANTEN			38,200,000	
	- Biaya Transportasi darat [6 orang x 1 kali x 1 kgt]	6.0 OK	250,000	1,500,000	
	- Uang Harian 10 ORANG X 3 HARI X 1 KGTI	30.0 OH	370,000	11,100,000	
	- Uang Harian [8 orang x 2 hari x 1 kgt]	16.0 OH	370,000	5,920,000	
	- Biaya Penginapan Eselon II/setara [1 orang x 1 hari x 1 kgt]	1.0 OH	2,200,000	2,200,000	
	- Biaya Penginapan Eselon IV/sederajat Kebawah [7 orang x 1 hari x 1 kgt]	7.0 OH	600,000	4,200,000	
	- Biaya Penginapan Eselon III/Gol.IV 2 ORANG X 2 HARI X 1KGT	4.0 OH	1,000,000	4,000,000	
	- Biaya Penginapan Eselon III/Gol.IV 2 ORANG X 1 HARI X 1KGT	2.0 OH	1,000,000	2,000,000	
	- Biaya Penginapan Eselon IV/Sederajat Kebawah 7 ORANG X 2 HARI X 1 KGT	14.0 OH	520,000	7,280,000	
	> JAWA TENGAH			13,280,000	
	- Biaya Tiket PP [3 orang x 1 kali x 1 kgt]	3.0 OK	1,350,000	4,050,000	
	- Uang Harian [3 orang x 3 hari x 1 kgt]	9.0 OH	370,000	3,330,000	
	- Biaya Penginapan Eselon III/Gol.IV [2 orang x 2 hari x 1 kgt]	4.0 OH	750,000	3,000,000	
	- Biaya Penginapan Eselon IV/Sederajat Kebawah [2 orang x 2 hari x 1 kgt]	4.0 OK	600,000	2,400,000	
	- Biaya Taksi Jakarta 1 Orang x 2 Kgt	2.0 OK	250,000	500,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	> NTT			10,887,000	
	- Biaya Tiket PP [1 orang x 1 kali x 1 kgt]	1.0 OK	5,081,000	5,081,000	
	- Uang Harian [1 orang x 3 hari x 1 kgt]	3.0 OH	430,000	1,290,000	
	- Biaya Penginapan Eselon II [1 orang x 2 hari x 1 kgt]	2.0 OH	2,033,000	4,066,000	
	- Biaya Representatif (Eselon II) [1 orang x 3 hari x 1 kgt]	3.0 OH	150,000	450,000	
	> KALIMANTAN TENGAH			3,724,000	
	- Biaya Tiket PP [1 orang x 1 kali x 1 kgt]	1.0 OK	2,984,000	2,984,000	
	- Uang Harian [1 orang x 2 hari x 1 kgt]	2.0 OH	370,000	740,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,000,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Internal [2 ORANG x 5 KALI]	10.0 OK	100,000	1,000,000	
1612.BDD.002	<b>Layanan Penyuluhan Hukum</b>	<b>95.0 Kelompok Masyarakat</b>		<b>92,707,000</b>	
051	<b>Penyiapan bahan kegiatan Penyuluhan Hukum</b>			<b>7,140,000</b>	U
A	<i>Pelaksanaan Penyuluhan Hukum</i>			7,140,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			7,140,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [30 orang x 6 kgt]	180.0 OK	22,000	3,960,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [15 orang x 4 kgt]	60.0 OK	53,000	3,180,000	
052	<b>Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum</b>			<b>85,567,000</b>	
A	<i>Penyuluhan Hukum Langsung</i>			85,567,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			74,567,000	RM
	> Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu			26,013,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [42 orang x 7 kgt]	294.0 OK	22,000	6,468,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [40 orang x 6 kgt]	240.0 OK	53,000	12,720,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 KGT	4,125,000	4,125,000	
	- Biaya Pembuatan Spanduk [9 buah]	9.0 buah	300,000	2,700,000	
	> Penyuluhan Hukum Keliling melalui Mobil Penyuling			7,350,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [10 orang x 2 kgt]	20.0 OK	22,000	440,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [10 orang x 2 kgt]	20.0 OK	53,000	1,060,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 KGT	4,350,000	4,350,000	
	- Biaya Pembuatan/Pencetakan Leaflet/Banner/Poster	1.0 PAKET	1,500,000	1,500,000	
	> Pojok Penyuluhan dan Bantuan Hukum			32,355,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [10 orang x 1 kgt]	10.0 OK	22,000	220,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [10 orang x 1 kgt]	10.0 OK	53,000	530,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 KGT	1,855,000	1,855,000	
	- Biaya Pembuatan Goodybag dan Souvenir	350.0 PAKET	85,000	29,750,000	
	> Fasilitasi Konsultasi Hukum			8,849,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 1 kgt]	25.0 OK	22,000	550,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [25 orang x 1 kgt]	25.0 OK	53,000	1,325,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 KGT	6,974,000	6,974,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V ) > Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu - Honor Narasumber Eksternal Eselon III kebawah / setara [1 ORANG x 2 JAM x 1 KGT]	2.0 OJ	400,000	800,000 800,000 800,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V ) > Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu - Biaya Transport Lokal Internal [5 ORANG x 1 KALI x 7 KGT] > Penyuluhan Hukum Keliling melalui Mobil Penyuling - Biaya Transport Lokal Internal [14 ORANG x 2 KALI] > Pojok Penyuluhan dan Bantuan Hukum - Biaya Transport Lokal Internal [13 ORANG x 2 KALI]	35.0 OK 28.0 OK	100,000 100,000	10,200,000 3,500,000 3,500,000 2,800,000 2,800,000 3,900,000 3,900,000	RM
1612.BIC	<u>Pengawasan dan Pengendalian Lembaga[Base Line]</u>	652.0 Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan		2,111,234,000	
1612.BIC.001	Lokasi : INSTANSI PUSAT <b>Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum</b>	652.0 Lembaga		2,111,234,000	
051	<b>Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum Tingkat Pusat</b>			1,748,281,000	U
A	<i>KOORDINASI PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TINGKAT PUSAT</i>			65,687,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V ) - Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 40 kali] - Biaya Konsumsi Makan Rapat [20 orang x 18 kali] - Biaya Pengandaan dan Penjilidan	800.0 OK 360.0 OK 1.0 KGT	22,000 53,000 18,220,000	54,900,000 17,600,000 19,080,000 18,220,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V ) - Biaya pembelian ATK - Biaya bahan komputer	1.0 PAKET 1.0 PAKET	4,872,000 1,915,000	6,787,000 4,872,000 1,915,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V ) - Biaya Transport Lokal Internal [5 ORANG x 8 KALI]	40.0 OK	100,000	4,000,000 4,000,000	RM
B	<i>Rapat Koordinasi Bantuan Hukum Tahun 2023</i>			1,800,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V ) - Honor Narasumber Eselon II/Sederajat (Eksternal) [1 orang x 2 jam]	2.0 OJ	900,000	1,800,000 1,800,000	RM
C	<i>Asistensi Implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum</i>			37,576,000	



**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.139-Jakarta V )			37,576,000	RM
	> RIAU			5,200,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	3,000,000	3,000,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	850,000	1,700,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	250,000	500,000	
	> KEPULAUAN RIAU			9,076,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	2,880,000	2,880,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	2,318,000	4,636,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	370,000	1,110,000	
	- Biaya uang representatif Pejabat Eselon II 1 orang x 3 hari x 1 kali	3.0 OH	150,000	450,000	
	> KALIMANTAN TENGAH			5,860,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	2,980,000	2,980,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	650,000	1,300,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	360,000	1,080,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	250,000	500,000	
	> KALIMANTAN TIMUR			7,180,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	3,790,000	3,790,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	800,000	1,600,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	430,000	1,290,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	250,000	500,000	
	> SULAWESI TENGAH			1,110,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	370,000	1,110,000	
	> MALUKU UTARA			9,150,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	6,660,000	6,660,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	600,000	1,200,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	430,000	1,290,000	
D	Penyelenggaraan Paralegal Justice Award			1,643,218,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			250,892,000	RM
	> PARALEGAL ACADEMY			250,892,000	
	- Biaya Pembuatan Backdrop [1 Kgt]	1.0 Kgt	2,000,000	2,000,000	
	- Biaya Pembuatan Spanduk selamat datang [1 Kgt]	1.0 Kgt	1,000,000	1,000,000	
	- Biaya Seminar Kit [408 orang]	408.0 OK	164,000	66,912,000	
	- Biaya Medali ASDJ [71 buah]	71.0 buah	100,000	7,100,000	
	- Biaya Pin NLP [73 buah]	73.0 buah	60,000	4,380,000	
	- Biaya Cetakan Sertifikat [300 ok]	300.0 OK	10,000	3,000,000	
	- Biaya Sertifikat Paralegal Academy Map Batik [300 orang]	300.0 OK	52,000	15,600,000	
	- Biaya Uniform NLP [150 orang]	150.0 Ok	245,000	36,750,000	
	- Biaya Piagam NL.P Map Batik [150 orang]	150.0 OK	80,000	12,000,000	
	- Biaya Piagam ASDJ Map Batik [150 orang]	150.0 OK	80,000	12,000,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 Kgt	10,150,000	10,150,000	
	>> ANUGERAH PARALEGAL JUSTICE AWARD		0	80,000,000	
	- Seminar Kit PJA [400 orang x 1 Kgt]	400.0 OK	200,000	80,000,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.139-Jakarta V )			22,554,000	RM
	- Biaya Sewa Bus [7 Unit]	7.0 Unit	3,222,000	22,554,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			27,600,000	RM
	> PARALEGAL ACADEMY			23,600,000	
	>> Narasumber Audisi		0	3,600,000	
	- Honorarium Narasumber Audisi Luar BPHN [2 orang x 2 jam x 1 Kgt]	4.0 OJ	900,000	3,600,000	
	>> Narasumber Paralegal Academy		0	20,000,000	
	- Honorarium Narasumber Paralegal Academy [5 orang x 4 jam]	20.0 OJ	1,000,000	20,000,000	
	> ANUGERAH PARALEGAL JUSTICE AWARD			4,000,000	
	>> Narasumber Eliminasi		0	4,000,000	
	- Honorarium Narasumber Eliminasi Luar BPHN [1 orang x 4 jam x 1 kgt]	4.0 OJ	1,000,000	4,000,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V )			199,000,000	RM
	> ANUGERAH PARALEGAL JUSTICE AWARD			199,000,000	
	- Biaya Jasa Pendukung Kegiatan PJA (PJA Music Night) [1 Paket]	1.0 Paket	199,000,000	199,000,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			1,143,172,000	RM	
	> PARALEGAL ACADEMY			1,053,650,000		
	>> Peserta		0	810,000,000		
	- Biaya Paket Meeting Peserta [300 orang x 3 paket]	900.0 PKT	900,000	810,000,000		
	>> Panitia BPHN		0	207,950,000		
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Panitia setingkat eselon I dan II [3 Orang x 4 Paket]	12.0 OP	1,100,000	13,200,000		
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Panitia setingkat eselon I dan II [5 Orang x 2 Paket]	10.0 OP	1,100,000	11,000,000		
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Panitia [36 Orang x 4 Paket]	144.0 Paket	900,000	129,600,000		
	- Uang Harian Paket Meeting Fullboard Panitia [45 Orang x 5 Hari]	225.0 OH	180,000	40,500,000		
	- Uang Harian Paket Meeting Fullboard Panitia [5 Orang x 3 Hari]	15.0 OH	180,000	2,700,000		
	- Biaya Transportasi Lokal Panitia [45 Orang x 1 Kali]	45.0 OK	150,000	6,750,000		
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Narasumber [3 orang x 1 paket]	3.0 PKT	1,100,000	3,300,000		
	- Biaya Transportasi Lokal Narasumber [6 orang x 1 kali]	6.0 Kgt	150,000	900,000		
	>> Panitia MA		0	35,700,000		
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Panitia [10 orang x 3 paket]	30.0 PKT	900,000	27,000,000		
	- Uang Harian Paket Meeting Fullboard Panitia [10 Orang x 4 Hari]	40.0 Paket	180,000	7,200,000		
	- Biaya Transportasi Lokal Panitia [10 Orang x 1 Kali]	10.0 OK	150,000	1,500,000		
	> ANUGERAH PARALEGAL JUSTICE AWARD			89,522,000		
	>> Tamu VIP		0	67,522,000		
	- Biaya Paket Meeting Halfday setingkat Menteri [91 orang x 1 paket]	91.0 paket	742,000	67,522,000		
	>> Narasumber Eliminasi		0	11,000,000		
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Narasumber Eliminasi setingkat eselon II [5 Orang x 2 Paket]	10.0 PKT	1,100,000	11,000,000		
	>> Dewan Pakar		0	11,000,000		
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Dewan Pakar [5 Orang x 2 paket]	10.0 PKT	1,100,000	11,000,000		
<b>052</b>	<b>Pengawasan Bantuan Hukum Tingkat Pusat</b>			<b>243,703,000</b>		<b>U</b>
A	TANPA SUB KOMPONEN			243,703,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			7,500,000		RM
	- Biaya Seminar Kit [1 Kgt]	1.0 Kgt	7,000,000	7,000,000		
	- Biaya Pembuatan Spanduk [1 Kgt]	1.0 Kgt	500,000	500,000		

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.139-Jakarta V )			147,583,000	RM
	> JAWA TIMUR			46,960,000	
	- Tiket PP [9 orang x 1 kali]	9.0 OK	2,566,000	23,094,000	
	- Biaya penginapan Eselon II [1 orang x 1 kali x 2 malam]	2.0 OH	1,898,000	3,796,000	
	- Biaya penginapan [8 orang x 1 kali x 2 malam]	16.0 OK	600,000	9,600,000	
	- Biaya uang harian [11 orang x 1 kali x 2 hari]	22.0 OH	410,000	9,020,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [2 orang x 2 kali x 1 kgt]	4.0 OK	250,000	1,000,000	
	- Biaya uang representatif Pejabat Eselon II [1 orang x 3 hari x 1 kali]	3.0 OH	150,000	450,000	
	> JAWA BARAT			28,454,000	
	- Biaya penginapan Eselon II [1 orang x 2 malam]	2.0 OH	2,755,000	5,510,000	
	- Biaya penginapan [8 orang x 2 malam]	16.0 OH	524,000	8,384,000	
	- Biaya uang harian [9 orang x 3 hari]	27.0 OH	430,000	11,610,000	
	- Biaya Transportasi Darat Provinsi Tujuan [5 orang x 2 kali]	10.0 Ok	250,000	2,500,000	
	- Biaya uang representatif Pejabat Eselon II [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	150,000	450,000	
	> KALIMANTAN TENGAH			11,290,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	2,980,000	2,980,000	
	- Biaya penginapan Eselon II [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	3,390,000	6,780,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	360,000	1,080,000	
	- Biaya uang representatif Pejabat Eselon II [1 orang x 3 hari x 1 kali]	3.0 OH	150,000	450,000	
	> BALI			1,440,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	480,000	1,440,000	
	> KALIMANTAN TIMUR			12,374,000	
	- Tiket PP [2 orang x 1 Kali]	2.0 OK	3,797,000	7,594,000	
	- Biaya penginapan Eselon III ke bawah [2 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	4.0 OH	400,000	1,600,000	
	- Biaya uang harian [2 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	6.0 OH	430,000	2,580,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [2 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	4.0 OK	150,000	600,000	
	> BANTEN			17,888,000	
	- Biaya penginapan Eselon II [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	2,187,000	4,374,000	
	- Biaya penginapan [6 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	12.0 OH	500,000	6,000,000	
	- Biaya uang harian [6 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	18.0 OH	370,000	6,660,000	
	- Biaya Transportasi Darat Provinsi Tujuan [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	202,000	404,000	
	- Biaya uang representatif Pejabat Eselon II [1 orang x 3 hari x 1 kali]	3.0 OH	150,000	450,000	
	> RIAU			6,202,000	
	- Tiket PP 1 orang x 1 Kali	1.0 OK	3,020,000	3,020,000	
	- Biaya penginapan 1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM	2.0 OH	852,000	1,704,000	
	- Biaya uang harian 1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI	3.0 OH	370,000	1,110,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP 1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT	2.0 OK	184,000	368,000	
	> JAWA TENGAH			13,394,000	
	- Tiket PP [2 orang x 1 kali]	2.0 OK	2,182,000	4,364,000	
	- Biaya penginapan Eselon II [1 orang x 2 malam x 1 kgt]	2.0 OH	900,000	1,800,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Biaya penginapan [2 orang x 1 kali x 2 malam]	4.0 OH	600,000	2,400,000	
	- Biaya uang harian [3 orang x 1 kali x 3 hari]	9.0 OH	370,000	3,330,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [3 orang x 2 kali x 1 kgt]	6.0 OK	250,000	1,500,000	
	> NUSA TENGGARA TIMUR			9,581,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 kali]	1.0 OK	5,081,000	5,081,000	
	- Biaya penginapan Eselon III sederajat [1 orang x 2 malam x 1 kgt]	2.0 OH	1,355,000	2,710,000	
	- Biaya uang harian [1 orang x 1 kali x 3 hari]	3.0 OH	430,000	1,290,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [1 orang x 2 kali x 1 kgt]	2.0 OK	250,000	500,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			88,620,000	RM
	> Konsinyering Penyusunan Ketentuan Teknis Penyelenggara Bantuan Hukum			71,420,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Eselon I dan II [6 orang x 2 malam]	12.0 OP	1,100,000	13,200,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Eselon III kebawah [34 orang x 2 malam]	68.0 OP	565,000	38,420,000	
	- Biaya uang harian fullboard [44 ORANG x 3 HARI]	132.0 OH	150,000	19,800,000	
	> Konsinyering Penyusunan Ketentuan Teknis Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi			17,200,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Eselon I dan II [3 orang x 2 malam]	6.0 OP	1,000,000	6,000,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Eselon III kebawah [7 orang x 2 malam]	14.0 OP	800,000	11,200,000	
053	<b>Pengelolaan Aplikasi Akses Penyuluhan dan Bantuan Hukum (Sidbankum)</b>			<b>119,250,000</b>	<b>U</b>
A	TANPA SUB KOMPONEN			119,250,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			750,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [10 orang x 1 kali]	10.0 OK	22,000	220,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [10 orang x 1 kali]	10.0 OK	53,000	530,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V)			117,500,000	RM
	- Biaya pemeliharaan/perawatan aplikasi Sidbankum	1.0 PAKET	117,500,000	117,500,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,000,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Eksternal [2 ORANG x 5 KALI]	10.0 OK	100,000	1,000,000	
013.10.WA	Program Dukungan Manajemen			40,078,459,000	
1614	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN			40,078,459,000	
1614.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	7.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		33,186,285,000	
	Lokasi : INSTANSI PUSAT				
1614.EBA.956	Layanan BMN	1.0 Layanan		327,419,000	
051	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN			327,419,000	U
A	Perencanaan Kebutuhan dan Penggunaan BMN			25,704,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			4,844,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [15 orang x 5 kali]	75.0 OK	22,000	1,650,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [15 orang x 3 kali]	45.0 OK	53,000	2,385,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan [0 0 x 0 0]	1.0 PKT	809,000	809,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			2,178,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	928,000	928,000	
	- Bahan Komputer	1.0 Paket	1,250,000	1,250,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V )			15,682,000	RM
	> Melakukan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara di Jawa Barat			15,682,000	
	- Biaya Uang Harian [3 org x 5 hari]	15.0 OH	430,000	6,450,000	
	- Biaya Penginapan Eselon [3 org x 4 hari]	12.0 OH	686,000	8,232,000	
	- Transport Darat [4 org x 1 kali]	4.0 OK	250,000	1,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			3,000,000	RM
	- Transport Lokal [5 org x 4 kali]	20.0 OK	150,000	3,000,000	
<i>B</i>	<i>Penatausahaan BMN</i>			183,148,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			11,024,000	RM
	- Biaya penggandaan dan penjilidan	1.0 PKT	1,499,000	1,499,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [15 orang x 12 kali]	180.0 OK	22,000	3,960,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [15 orang x 7 kali]	105.0 OK	53,000	5,565,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			5,158,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	2,658,000	2,658,000	
	- Bahan Komputer	1.0 Paket	2,500,000	2,500,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V )			154,966,000	RM
	> Melakukan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data BMN Program Pembinaan Hukum Nasional di Jawa Barat			67,352,000	
	>> Penyusunan Laporan BMN Tingkat Eselon I dan Kantor Wilayah:		0	67,352,000	
	- Biaya Uang Harian [5 org x 4 hari x 5 kgt]	100.0 OH	386,000	38,600,000	
	- Biaya Penginapan Eselon [4 org x 3 hari x 3 kgt]	36.0 OH	732,000	26,352,000	
	- Transport Darat [2 org x 1 kali x 3 kgt]	6.0 OK	400,000	2,400,000	
	> Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan BMN di Kantor Wilayah Jawa Tengah			9,640,000	
	- Biaya Tiket PP [2 org x 1 kali]	2.0 OK	2,210,000	4,420,000	
	- Biaya Uang Harian [2 org x 3 hari x 1 kgt]	6.0 OH	370,000	2,220,000	
	- Biaya Penginapan Eselon [2 org x 2 hari x 1 kgt]	4.0 OH	750,000	3,000,000	
	> Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan BMN di Kantor Wilayah			6,018,000	
	- Biaya Tiket PP [1 orang x 1 kali]	1.0 OK	2,268,000	2,268,000	
	- Biaya Uang Harian [1 orang x 3 hari x 1 kgt]	3.0 OK	420,000	1,260,000	
	- Biaya Penginapan [1 orang x 2 hari x 1 kgt]	2.0 OH	845,000	1,690,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [1 orang x 2 kali x 1 kgt]	2.0 Ok	200,000	400,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [1 orang x 2 kali x 1 kgt]	2.0 OK	200,000	400,000	
	> Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan BMN di Kantor Wilayah Sumatra Utara			21,192,000	
	- Biaya Tiket PP [4 orang x 1 kali]	4.0 OK	3,000,000	12,000,000	
	- Biaya Uang Harian [4 orang x 3 hari x 1 kgt]	12.0 OK	370,000	4,440,000	
	- Biaya Penginapan [4 orang x 2 hari x 1 kgt]	8.0 OH	210,000	1,680,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [4 orang x 2 kali x 1 kgt]	8.0 OK	256,000	2,048,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [4 orang x 1 kali x 1 kgt]	4.0 OK	256,000	1,024,000	
	> Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan BMN di Kantor Wilayah Sumatra Barat			20,952,000	
	- Biaya Tiket PP [4 orang x 1 kali]	4.0 OK	2,250,000	9,000,000	
	- Biaya Uang Harian [4 orang x 3 hari x 1 kgt]	12.0 OK	380,000	4,560,000	
	- Biaya Penginapan [4 orang x 2 hari x 1 kgt]	8.0 OH	701,000	5,608,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [4 orang x 1 kali x 1 kgt]	4.0 OK	256,000	1,024,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [4 orang x 1 kali x 1 kgt]	4.0 OK	190,000	760,000	
	> Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan BMN di Kantor Wilayah Sulawesi Selatan			29,812,000	
	- Biaya Tiket PP [4 orang x 1 kali]	4.0 OK	3,829,000	15,316,000	
	- Biaya Uang Harian [4 orang x 3 hari x 1 kgt]	12.0 OK	430,000	5,160,000	
	- Biaya Penginapan [4 orang x 2 hari x 1 kgt]	8.0 OH	745,000	5,960,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [4 orang x 2 kali x 1 kgt]	8.0 OK	256,000	2,048,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [4 orang x 2 kali x 1 kgt]	8.0 OK	166,000	1,328,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			12,000,000	RM
	- Transport Lokal [5 org x 16 kali]	80.0 OK	150,000	12,000,000	
C	<u>Penghapusan BMN</u>			11,783,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V ) - Biaya penggandaan dan penjiilidan - Biaya konsumsi snack rapat [10 orang x 5 kali] - Biaya konsumsi makan rapat [10 orang x 3 kali]	1.0 PKT 50.0 OK 30.0 OK	1,060,000 22,000 53,000	3,750,000 1,060,000 1,100,000 1,590,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V ) - Biaya pembelian ATK - Bahan Komputer	1.0 Paket 1.0 Paket	2,283,000 1,250,000	3,533,000 2,283,000 1,250,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V ) - Transport Lokal [5 org x 6 kali]	30.0 OK	150,000	4,500,000 4,500,000	RM
E	<i>Layanan Pengadaan BMN</i>			106,784,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V ) - Biaya penggandaan dan penjiilidan - Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 18 kali] - Biaya konsumsi makan rapat [15 orang x 13 kali]	1.0 PKT 450.0 OK 195.0 OK	2,427,000 22,000 53,000	22,662,000 2,427,000 9,900,000 10,335,000	RM
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.139-Jakarta V ) > Honor Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa BPHN - Honor Kepala ULPBJ BPHN [1 org x 12 bln] - Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Non JF) [1 org x 12 bln] - Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa [3 orang x 12 bln] - Honor Staf Pendukung Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa BPHN [2 org x 12 bln] - Honor Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa [3 org x 3 pkt]	12.0 OB 12.0 OB 36.0 OB 24.0 OB 9.0 OP	1,000,000 680,000 272,000 680,000 750,000	53,022,000 12,000,000 8,160,000 9,792,000 16,320,000 6,750,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V ) - Biaya pembelian ATK - Bahan Komputer	1.0 Paket 1.0 Paket	4,218,000 1,700,000	5,918,000 4,218,000 1,700,000	RM



**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V )			22,782,000	RM
	> Melakukan Kegiatan Penyusunan RUP dan Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa			0	
	> Jawa Barat			8,910,000	
	- Biaya Uang Harian [3 org x 3 hari x 1 kali]	9.0 OH	430,000	3,870,000	
	- Biaya Penginapan [3 org x 2 hari x 1 kali]	6.0 OH	640,000	3,840,000	
	- Biaya Transport Darat [3 org x 2 kali]	6.0 OK	200,000	1,200,000	
	> Yogyakarta			4,072,000	
	- Tiket PP [1 org x 1 kali]	1.0 OK	1,000,000	1,000,000	
	- Biaya Uang Harian [1 org x 3 hari]	3.0 OH	420,000	1,260,000	
	- Biaya Penginapan [1 org x 2 hari]	2.0 OH	550,000	1,100,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [1 org x 2 kali]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [1 org x 2 kali]	2.0 OK	100,000	200,000	
	> Melakukan kegiatan Rapat Koordinasi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023			9,800,000	
	>> Jawa Barat			0	
	- Biaya uang harian (4 orang x 5 hari x 1 kali)	20.0 OK	430,000	8,600,000	
	- Biaya Transport Darat (4 orang x 2 kali)	8.0 OK	150,000	1,200,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			2,400,000	
	- Transport Lokal [4 org x 4 kali]	16.0 OK	150,000	2,400,000	
<b>1614.EBA.958</b>	<b>Layanan Hubungan Masyarakat</b>	<b>1.0 Layanan</b>		<b>2,366,075,000</b>	U
<b>051</b>	<b>Hubungan Masyarakat dan Komunikasi</b>			<b>32,573,000</b>	
<b>A</b>	<i>Penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat</i>			<i>2,957,000</i>	RM
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			1,760,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 4 kali]	80.0 OK	22,000	1,760,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			597,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	597,000	597,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			600,000	RM
	- Transport Lokal [2 org x 2 kali]	4.0 OK	150,000	600,000	
<b>B</b>	<i>Pameran/Expo</i>			<i>18,772,000</i>	RM
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			17,270,000	
	- Biaya pembuatan booth pameran [1 pkt]	1.0 pkt	17,270,000	17,270,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			752,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	196,000	196,000	
	- Bahan Komputer	1.0 Paket	556,000	556,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			750,000	RM
	- Transport Lokal [5 org x 1 kali]	5.0 OK	150,000	750,000	
C	<u>Pembinaan Koordinasi, Evaluasi dan monitoring Kehumasan BPHN</u>			10,844,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			7,988,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [15 orang x 15 kali]	225.0 OK	22,000	4,950,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [15 orang x 3 kali]	45.0 OK	45,000	2,025,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan [0 0 x 0 0]	1.0 PKT	1,013,000	1,013,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			1,206,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	650,000	650,000	
	- Bahan Komputer	1.0 Paket	556,000	556,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			1,650,000	RM
	- Transport Lokal [1 org x 11 kali]	11.0 OK	150,000	1,650,000	
052	<b>Penyediaan informasi publik</b>			<b>2,092,008,000</b>	<b>U</b>
A	<u>Peliputan Kegiatan</u>			166,530,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			10,000,000	RM
	- biaya pembelian selendang kegiatan Paralegal Justice Award	1.0 Paket	10,000,000	10,000,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V )			150,000	RM
	> Pulau Jawa			150,000	
	- Swab PCR [1 org x 1 kali]	1.0 OK	150,000	150,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V )			146,480,000	RM
	> Jawa Barat			15,940,000	
	- Biaya Uang Harian [6 org x 3 hari]	18.0 OH	430,000	7,740,000	
	- Biaya Penginapan Eselon III [2 org x 2 hari]	4.0 OH	550,000	2,200,000	
	- Biaya Penginapan Eselon IV [4 org x 2 hari]	8.0 OH	525,000	4,200,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [6 org x 2 kali]	12.0 OK	150,000	1,800,000	
	> Yogyakarta			17,640,000	
	- Tiket PP [3 orang x 1 kali x 1 Kgt]	3.0 OK	2,100,000	6,300,000	
	- Biaya Uang Harian [3 orang x 4 hari x 1 kgt]	12.0 OH	420,000	5,040,000	
	- Biaya Penginapan Eselon IV [2 orang x 3 hari x 1 kgt]	6.0 OH	800,000	4,800,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 orang x 2 kali x 1 kgt]	6.0 OK	125,000	750,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta PP [3 orang x 2 kali x 1 kgt]	6.0 OK	125,000	750,000	
	> Jawa Timur			52,290,000	
	- Tiket PP [4 org x 2 kali]	8.0 OK	2,674,000	21,392,000	
	- Biaya Uang Harian [8 org x 3 hari]	24.0 OH	410,000	9,840,000	
	- Biaya Penginapan Eselon III [3 org x 2 hari]	6.0 OH	1,153,000	6,918,000	
	- Biaya Penginapan Eselon IV [5 org x 2 hari]	10.0 OH	814,000	8,140,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [8 org x 3 kali]	24.0 OK	150,000	3,600,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [8 org x 2 kali]	16.0 OK	150,000	2,400,000	
	> Nusa Tenggara Timur			13,690,000	
	- Tiket PP [2 org x 1 kali]	2.0 OK	4,200,000	8,400,000	
	- Biaya Uang Harian [2 org x 3 hari]	6.0 OH	430,000	2,580,000	
	- Biaya Penginapan Eselon III [2 org x 2 hari]	4.0 OH	677,500	2,710,000	
	> Bali			46,920,000	
	- Tiket PP [6 orang x 1 kali x 1 Kgt]	6.0 OK	2,800,000	16,800,000	
	- Biaya Uang Harian [6 orang x 4 hari x 1 kgt]	24.0 OH	480,000	11,520,000	
	- Biaya Penginapan Eselon III [1 orang x 3 hari x 1 kgt]	3.0 OH	900,000	2,700,000	
	- Biaya Penginapan Eselon IV [5 orang x 3 hari x 1 kgt]	15.0 OH	900,000	13,500,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [6 orang x 1 kali x 1 kgt]	6.0 OK	200,000	1,200,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta PP [6 orang x 1 kali x 1 kgt]	6.0 OK	200,000	1,200,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			9,900,000	RM
	- Transport Lokal [3 org x 22 kali]	66.0 OK	150,000	9,900,000	
B	<u>Penyelenggaraan Penyebarluasan Informasi BPHN</u>			1,925,478,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			68,970,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [15 orang x 19 kali]	285.0 OK	22,000	6,270,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [15 orang x 2 kali]	30.0 OK	35,000	1,050,000	
	- Biaya pembuatan umbul-umbul kegiatan Paralegal Justice Award	1.0 PAKET	24,000,000	24,000,000	
	> JDIHN dan LDCC Awards			37,650,000	
	>> JDIHN Awards		0	28,500,000	
	- Biaya Seminar Kit [190 Paket x 1 KGT]	190.0 Paket	150,000	28,500,000	
	>> LDCC Awards		0	9,150,000	
	- Biaya Pembuatan Spanduk [2 Paket x 1 KGT]	2.0 Paket	500,000	1,000,000	
	- Biaya Pembuatan Backdrop [1 Paket x 1 KGT]	1.0 Paket	1,000,000	1,000,000	
	- Biaya Pembuatan Banner [2 Paket x 1 KGT]	2.0 Paket	500,000	1,000,000	
	- Biaya Seminar Kit [27 Paket x 1 KGT]	27.0 Paket	150,000	4,050,000	
	- Pembuatan Sertifikat Simbolis Pemberian Hadiah [21 Paket x 1 KGT]	21.0 Paket	100,000	2,100,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V )			151,380,000	RM
	- Biaya Langganan Aplikasi Envato Elements [1 pkt x 1 kgt]	1.0 pkt	2,600,000	2,600,000	
	- Biaya Langganan Aplikasi Freepik [1 pkt x 1 kgt]	1.0 pkt	1,600,000	1,600,000	
	> JDIHN dan LDCC Awards			147,180,000	
	>> JDIHN Awards		0	56,250,000	
	- Pembuatan Plakat/Piala Anggota JDIHN Terbaik [60 Paket x 1 KGT]	60.0 Paket	750,000	45,000,000	
	- Pembuatan Piagam Penghargaan Anggota JDIHN terbaik (Cetak Bingkai) [60 Paket x 1 KGT]	60.0 Paket	125,000	7,500,000	
	- Pembuatan Piagam Penghargaan Anggota JDIHN terintegrasi (Cetak Bingkai) [50 Paket x 1 KGT]	50.0 Paket	75,000	3,750,000	
	>> LDCC Awards		0	90,930,000	
	- Pembuatan Plakat/Piala Pemenang LDCC [42 Paket x 1 KGT]	42.0 Paket	750,000	31,500,000	
	- Pembuatan Piagam Penghargaan LDCC (Cetak Bingkai) [42 Paket x 1 KGT]	42.0 Paket	125,000	5,250,000	
	- Biaya Pengiriman Plakat/Piala dan Piagam LDCC [21 Orang x 1 Kali x 1 KGT]	21.0 OK	300,000	6,300,000	
	- Videotron/Billboard 1.0 Paket x 1.0 KGT	1.0 PAKET	47,880,000	47,880,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.139-Jakarta V )			123,000,000	RM
	- Biaya Sewa Videotron Pelaksanaan Paralegal Akademi	1.0 Kgt	74,000,000	74,000,000	
	- Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Paralegal Justice Award [1 Paket]	1.0 PKT	21,000,000	21,000,000	
	- Biaya Sewa foto Spin kegiatan Paralegal Justice Award	1.0 Paket	25,000,000	25,000,000	
	- Biaya Sewa foto booth kegiatan Paralegal Justice Award	1.0 Paket	3,000,000	3,000,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			25,600,000	RM
	- Honor Narasumber Eksternal [11 orang x 1 jam]	11.0 OJ	1,400,000	15,400,000	
	> JDIHN dan LDCC Awards			10,200,000	
	>> LDCC Awards		0	10,200,000	
	- Honor Narasumber Praktisi (KSP) [1 Orang x 2 Jam x 1 KGT]	2.0 OJ	1,700,000	3,400,000	
	- Honor Narasumber Praktisi (Content Creator) [2 Orang x 2 Jam x 1 KGT]	4.0 OJ	1,700,000	6,800,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V )			765,615,000	
	- Biaya Publikasi Media Massa [1 pkt x 1 kgt]	1.0 pkt	16,700,000	16,700,000	
	- Biaya Peliputan dan Publikasi	6.0 Kgt	25,000,000	150,000,000	
	- Biaya Jasa Tarian Musik Bali Kegiatan Paralegal Justice Award	1.0 PAKET	21,000,000	21,000,000	
	> JDIHN dan LDCC Awards			577,915,000	
	>> LDCC Awards		0	577,915,000	
	- Biaya Jasa Pendukung Kegiatan JDIHN dan LDCC Awards [1 Paket x 1 KGT]	1.0 Paket	577,915,000	577,915,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			6,750,000	RM
	- Transport Lokal [9 org x 5 kali]	45.0 OK	150,000	6,750,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			784,163,000	RM
	> JDIHN dan LDCC Awards			784,163,000	
	>> Konsinyering Finalisasi Penilaian LDCC		0	76,815,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Setara Eselon I II [10 Orang x 1 Paket x 1 KGT]	10.0 OP	1,347,000	13,470,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Setara Eselon III kebawah [35 Orang x 1 Paket x 1 KGT]	35.0 OP	1,197,000	41,895,000	
	- Biaya Uang Harian Paket Meeting Fullboard [45 Orang x 2 Hari x 1 KGT]	90.0 OH	180,000	16,200,000	
	- Biaya Transport Lokal [35 Orang x 1 Kali x 1 KGT]	35.0 OK	150,000	5,250,000	
	>> JDIHN Awards		0	522,689,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Setara Eselon I II (Panitia) [10 Orang x 2 Paket x 1 KGT]	20.0 OP	1,347,000	26,940,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Eselon III kebawah (Panitia) [110 Orang x 2 Paket x 1 KGT]	220.0 OP	1,197,000	263,340,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullday Eselon III ke bawah (Peserta JDIHN Awards) [125 Orang x 1 Paket x 1 KGT]	125.0 OP	433,000	54,125,000	
	- Biaya Paket Meeting Halfday Setara Menteri (Menkumham Wamenkumham) [2 Orang x 1 Paket x 1 KGT]	2.0 OP	742,000	1,484,000	
	- Biaya Paket Meeting Halfday Eselon III ke bawah (Peserta JDIHN Awards) [125 orang x 1 paket x 1 kgt]	125.0 OP	354,000	44,250,000	
	- Biaya Paket Meeting Halfday Setara Eselon I II (Eselon I, Kakanwil, Kadivmin, Kadivyakum, Stafsus, dan Sahli) [125 Orang x 1 Paket x 1 KGT]	125.0 OP	542,000	67,750,000	
	- Biaya Uang Harian Paket Meeting Fullboard (Panitia) [120 Orang x 3 Hari x 1 KGT]	360.0 OH	180,000	64,800,000	
	>> LDCC Awards		0	184,659,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullday Setara Eselon I II (Dewan Juri) [6 Orang x 1 Paket x 1 KGT]	6.0 OP	667,000	4,002,000	
	- Biaya Tiket PP [21 orang x 1 kali x 1 kgt]	21.0 OK	4,400,000	92,400,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullday setara Eselon I II (Narasumber) [3 Orang x 1 Paket x 1 KGT]	3.0 OP	667,000	2,001,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Eselon III kebawah (Peserta LDCC) [21 Orang x 2 Paket x 1 KGT]	42.0 OP	1,197,000	50,274,000	
	- Biaya Uang Harian Paket Meeting Fullboard (Peserta LDCC) [21 Orang x 3 Hari x 1 KGT]	63.0 OH	180,000	11,340,000	
	- Biaya Uang Harian Paket Meeting Fullday (Dewan Juri) [6 Orang x 3 Hari x 1 KGT]	18.0 OH	130,000	2,340,000	
	- Biaya Transport Lokal (Panitia Narasumber) [21 Orang x 1 Kali x 1 KGT]	21.0 OK	150,000	3,150,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [21 orang x 2 kali x 1 kgt]	42.0 OK	200,000	8,400,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta PP [21 orang x 2 kali x 1 kgt]	42.0 OK	256,000	10,752,000	
<b>053</b>	<b>Pelaksanaan Kerja sama</b>			<b>241,494,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<b>TANPA SUB KOMPONEN</b>			<b>241,494,000</b>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			19,300,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 14 kali]	350.0 OK	22,000	7,700,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [20 orang x 10 kali]	200.0 OK	53,000	10,600,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan [1 pkt]	1.0 pkt	1,000,000	1,000,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			1,108,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	552,000	552,000	
	- Bahan Komputer	1.0 Paket	556,000	556,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V )			37,136,000	RM
	> Jawa Barat			3,904,000	
	- Biaya Uang Harian [2 org x 3 hari x 1 kgt]	6.0 OH	290,000	1,740,000	
	- Biaya Penginapan Eselon III [1 org x 2 hari x 1 kgt]	2.0 OH	805,000	1,610,000	
	- Biaya Transport Darat [1 org x 2 kali x 1 kgt]	2.0 OK	277,000	554,000	
	> Banten			3,546,000	
	- Biaya Uang Harian [1 org x 3 hari x 1 kgt]	3.0 OH	370,000	1,110,000	
	- Biaya Penginapan Eselon IV [1 org x 2 hari x 1 kgt]	2.0 OK	718,000	1,436,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [1 org x 2 kali x 1 kgt]	2.0 OK	250,000	500,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta PP [1 org x 2 kali x 1 kgt]	2.0 OK	250,000	500,000	
	> Yogyakarta			25,726,000	
	- Tiket PP [4 orang x 1 kali x 1 Kgt]	4.0 OK	2,268,000	9,072,000	
	- Biaya Uang Harian [4 orang x 3 hari x 1 kgt]	12.0 OH	420,000	5,040,000	
	- Biaya Penginapan Eselon III [1 orang x 2 hari x 1 kgt]	2.0 OH	1,384,000	2,768,000	
	- Biaya Penginapan Eselon IV [3 orang x 2 hari x 1 kgt]	6.0 OH	845,000	5,070,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [4 orang x 2 kali x 1 kgt]	8.0 OK	222,000	1,776,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta PP [4 orang x 2 kali x 1 kgt]	8.0 OK	250,000	2,000,000	
	> DKI Jakarta			3,960,000	
	- Biaya Uang Harian dalam kota lebih dari 8 Jam [2 orang x 3 hari x 1 kgt]	6.0 OH	210,000	1,260,000	
	- Biaya Penginapan Eselon IV [2 orang x 2 hari x 1 kgt]	4.0 OH	600,000	2,400,000	
	- Biaya Penggantian Transport [2 orang x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	150,000	300,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			13,950,000	RM
	- Transport Lokal [3 org x 31 kali]	93.0 OK	150,000	13,950,000	
524211	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri</u> (KPPN.139-Jakarta V )			170,000,000	RM
	> Asia Tenggara			60,000,000	
	- Tiket PP [2 org x 1 kali]	2.0 OK	10,000,000	20,000,000	
	- Biaya Uang Harian [2 org x 4 hari]	8.0 OH	5,000,000	40,000,000	
	> Eropa			110,000,000	
	- Biaya Uang Harian [2 org x 4 hari]	8.0 OH	7,500,000	60,000,000	
	- Tiket PP [2 org x 1 kali]	2.0 OK	25,000,000	50,000,000	
<b>1614.EBA.959</b>	<b>Layanan Protokoler</b>	<b>1.0 Layanan</b>		<b>94,073,000</b>	
<b>051</b>	<b>Koordinasi Keprotokoleran</b>			<b>12,743,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<i>Koordinasi Keprotokoleran Antar Kementerian/Lembaga</i>			<i>2,693,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			293,000	RM
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	293,000	293,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			2,400,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [4 org x 4 kali]	16.0 OK	150,000	2,400,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B	<i>Koordinasi Keprotokoleran Kementerian</i>			10,050,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			4,050,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 2 kali]	50.0 OK	22,000	1,100,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [25 orang x 2 kali]	50.0 OK	53,000	2,650,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	300,000	300,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			6,000,000	RM
	- Biaya Transport Lokal	40.0 OK	150,000	6,000,000	
<b>052</b>	<b>Pelaksanaan Keprotokoleran</b>			<b>81,330,000</b>	<b>U</b>
A	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			81,330,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V )			81,330,000	RM
	- Tiket PP [2 org x 1 kali x 5 kgt]	10.0 OK	3,500,000	35,000,000	
	- Biaya Uang Harian [2 org x 3 hari x 5 kgt]	30.0 OH	480,000	14,400,000	
	- Biaya Penginapan Eselon III [1 org x 2 hari x 5 kgt]	10.0 OH	1,500,000	15,000,000	
	- Biaya Penginapan [1 org x 2 hari x 5 kgt]	10.0 OH	793,000	7,930,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [2 org x 2 kali x 5 kgt]	20.0 OK	250,000	5,000,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [2 org x 2 kali x 5 kgt]	20.0 OK	200,000	4,000,000	
<b>1614.EBA.960</b>	<b>Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal</b>	<b>1.0 Layanan</b>		<b>32,280,000</b>	
<b>051</b>	<b>Pengelolaan kelembagaan</b>			<b>18,150,000</b>	<b>U</b>
A	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			18,150,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			4,972,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 3 kali]	60.0 OK	22,000	1,320,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [20 orang x 3 kali]	60.0 OK	53,000	3,180,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjiilidan [1 paket]	1.0 paket	472,000	472,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			578,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	578,000	578,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			9,600,000	RM
	- Honor Narasumber Eksternal Eselon I [1 orang x 2 jam x 2 kgt]	4.0 OJ	1,400,000	5,600,000	
	- Honor Narasumber Eksternal Eselon II [1 orang x 2 jam x 2 kgt]	4.0 OJ	1,000,000	4,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			3,000,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [2 org x 10 kali]	20.0 OK	150,000	3,000,000	
<b>052</b>	<b>Tata Laksana Kelembagaan</b>			<b>9,225,000</b>	<b>U</b>
A	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			9,225,000	



**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			2,925,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 3 kali]	60.0 OK	22,000	1,320,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [20 orang x 1 kali]	20.0 OK	53,000	1,060,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan [1 paket]	1.0 paket	545,000	545,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			4,800,000	RM
	- Honor Narasumber Eksternal Eselon I [1 orang x 2 jam x 1 kgt]	2.0 OJ	1,400,000	2,800,000	
	- Honor Narasumber Eksternal Eselon II [1 orang x 2 jam x 1 kgt]	2.0 OJ	1,000,000	2,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			1,500,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [2 org x 5 kali]	10.0 OK	150,000	1,500,000	
<b>053</b>	<b>Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan BPHN</b>			<b>4,905,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<b>TANPA SUB KOMPONEN</b>			<b>4,905,000</b>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			2,305,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 4 kali]	80.0 OK	22,000	1,760,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan [1 paket]	1.0 paket	545,000	545,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			2,600,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [17 org x 1 kali]	17.0 OK	100,000	1,700,000	
	- Biaya Transport Lokal [2 orang x 3 kali]	6.0 OK	150,000	900,000	
<b>1614.EBA.962</b>	<b>Layanan Umum</b>	<b>1.0 Layanan</b>		<b>267,482,000</b>	
<b>051</b>	<b>Layanan Urusan Kerumahtangaan</b>			<b>160,402,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<b>TANPA SUB KOMPONEN</b>			<b>103,540,000</b>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			24,700,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [75 orang x 4 kali]	300.0 OK	22,000	6,600,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [100 orang x 2 kali]	200.0 OK	53,000	10,600,000	
	> Workshop Pelayanan Umum			7,500,000	
	- Biaya konsumsi snack Pelaksanaan Workshop [100 orang x 1 kali]	100.0 OK	22,000	2,200,000	
	- Biaya konsumsi makan Pelaksanaan Workshop [100 orang x 1 kali]	100.0 OK	53,000	5,300,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			7,890,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	6,590,000	6,590,000	
	- Bahan Komputer	1.0 Paket	1,300,000	1,300,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			3,600,000	RM
	- Honor Narasumber Eksternal Eselon III ke bawah [2 org x 2 jam x 1 kgt]	4.0 OJ	900,000	3,600,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			67,350,000	RM
	- Transport Lokal [1 org x 449 kali]	449.0 OK	150,000	67,350,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>B</i>	<i>Kegiatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD)</i>			56,862,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			45,612,000	RM
	- Biaya pembelian kaos HDKD	1.0 paket	10,000,000	10,000,000	
	- Biaya pembuatan banner, spanduk dan umbul-umbul	1.0 paket	4,000,000	4,000,000	
	- Biaya pembuatan spanduk lobby	1.0 paket	7,084,000	7,084,000	
	- Biaya pembelian peralatan	1.0 paket	1,303,000	1,303,000	
	- Biaya konsumsi snack kegiatan HDKD	185.0 OK	22,000	4,070,000	
	- Biaya konsumsi makan kegiatan HDKD	185.0 OK	53,000	9,805,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat persiapan	50.0 Ok	22,000	1,100,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat persiapan	50.0 Ok	53,000	2,650,000	
	> LOMBA HDKD			5,600,000	
	- Biaya pembelian kaos lomba HDKD	1.0 paket	3,800,000	3,800,000	
	- Biaya konsumsi snack kegiatan lomba HDKD	24.0 OK	22,000	528,000	
	- Biaya konsumsi makan kegiatan lomba HDKD	24.0 OK	53,000	1,272,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			11,250,000	RM
	- Biaya transport kegiatan HDKD	75.0 OK	150,000	11,250,000	
<b>052</b>	<b>Layanan Kesehatan</b>			<b>107,080,000</b>	<b>U</b>
<i>A</i>	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			107,080,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			88,180,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [120 org x 11 kali x 3 kgt]	3960.0 OK	22,000	87,120,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [20 orang x 1 kali]	20.0 OK	53,000	1,060,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V )			9,000,000	RM
	- Biaya Pengurusan Perpanjangan izin Klinik BPHN	1.0 paket	9,000,000	9,000,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V )			9,900,000	RM
	- Honor Instruktur Senam [1 org x 11 bln x 3 kali]	33.0 OB	300,000	9,900,000	
<b>1614.EBA.963</b>	<b>Layanan Data dan Informasi</b>	<b>1.0 Layanan</b>		<b>143,721,000</b>	
<b>051</b>	<b>Manajemen Sistem Informasi</b>			<b>143,721,000</b>	<b>U</b>
<i>A</i>	<i>PENGLOLAAN WEBSITE BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL</i>			79,031,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			10,690,000	RM
	- Biaya konsumsi makan rapat [20 orang x 6 kali]	120.0 OK	53,000	6,360,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 7 kali]	140.0 OK	22,000	3,080,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjiilidan [1 paket]	1.0 PKT	1,250,000	1,250,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V )			65,941,000	RM
	- Biaya Pemeliharaan aplikasi webserver BPHN (Content Management System) [1 paket]	1.0 paket	65,941,000	65,941,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			2,400,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [2 orang x 8 kali]	16.0 OK	150,000	2,400,000	
<b>B</b>	<u>Pengelolaan Teknis Teknologi Informasi/Aplikasi Dilingkungan BPHN</u>			<b>64,690,000</b>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			10,690,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 7 kali]	140.0 OK	22,000	3,080,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [20 orang x 6 kali]	120.0 OK	53,000	6,360,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan [1 paket]	1.0 PKT	1,250,000	1,250,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V )			51,300,000	RM
	> JAWA BARAT			51,300,000	
	- Biaya uang harian [3 orang x 5 hari x 3 kgt]	45.0 OH	420,000	18,900,000	
	- Biaya penginapan [3 orang x 4 hari x 3 kgt]	36.0 OH	685,000	24,660,000	
	- Biaya Transportasi [3 orang x 2 kali x 3 kgt]	18.0 OK	430,000	7,740,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			2,700,000	RM
	- Transport Lokal [2 orang x 9 kali]	18.0 OK	150,000	2,700,000	
<b>1614.EBA.994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>1.0 Layanan</b>		<b>29,955,235,000</b>	
<b>001</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>			<b>17,002,977,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<i>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</i>			<i>16,599,141,000</i>	
511111	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V )			10,720,340,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	9,148,340,000	9,148,340,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	785,500,000	785,500,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	786,500,000	786,500,000	
511119	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V )			177,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	149,000	149,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	14,000	14,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	14,000	14,000	
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V )			723,500,000	RM
	- Belanja Tunj. SuamiIstri PNS	1.0 THN	618,000,000	618,000,000	
	- Belanja Tunj. SuamiIstri PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	52,500,000	52,500,000	
	- Belanja Tunj. SuamiIstri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	53,000,000	53,000,000	
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V )			198,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	170,000,000	170,000,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	14,000,000	14,000,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	14,000,000	14,000,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

Halaman : 67

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V )			371,648,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	316,648,000	316,648,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	26,000,000	26,000,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	29,000,000	29,000,000	
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V )			1,830,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.0 THN	1,563,760,000	1,563,760,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	133,120,000	133,120,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	133,120,000	133,120,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V )			85,000,000	RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	40,000,000	40,000,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	22,000,000	22,000,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	23,000,000	23,000,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V )			566,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	483,400,000	483,400,000	
	- Belanja Tunj. Beras PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	41,300,000	41,300,000	
	- Belanja Tunj. Beras PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	41,300,000	41,300,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V )			1,953,276,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS Gol II [10 orang x 19 hari x 12 bln]	2280.0 BLN	35,000	79,800,000	
	- Belanja Uang Makan PNS Gol III [170 orang x 19 hari x 12 bln]	38760.0 BLN	37,000	1,434,120,000	
	- Belanja Uang Makan PNS Gol IV [47 orang x 19 hari x 12 bln]	10716.0 BLN	41,000	439,356,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V )			151,200,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	127,800,000	127,800,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	11,700,000	11,700,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	11,700,000	11,700,000	
<b>B</b>	<u>Uang Lembur</u>			403,836,000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.139-Jakarta V )			403,836,000	RM
	- Biaya uang lembur Gol II [10 orang x 25 jam x 12 hari]	3000.0 OJ	17,000	51,000,000	
	- Biaya uang makan lembur Golongan II [8 org x 8 jam x 11 hari]	704.0 OH	30,000	21,120,000	
	- Biaya uang lembur Gol III [30 orang x 30 jam x 11 hari]	9900.0 OJ	20,000	198,000,000	
	- Biaya uang makan lembur Golongan III [29 org x 7 jam x 11 hari]	2233.0 OH	32,000	71,456,000	
	- Biaya uang lembur Gol IV [10 orang x 14 jam x 11 hari]	1540.0 OJ	25,000	38,500,000	
	- Biaya uang makan lembur Golongan IV [10 org x 6 jam x 11 hari]	660.0 OH	36,000	23,760,000	
<b>002</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>			<b>12,952,258,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<i>Kendaraan Dinas Operasional</i>			<i>2,212,020,000</i>	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V )			23,010,000	RM
	- Biaya Pengurusan STNK/BPKB [30 pkt x 1 thn]	30.0 pkt	767,000	23,010,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.139-Jakarta V )			1,154,060,000	RM
	- Sewa Kendaraan Pejabat Eselon 1 [1 unit x 1 Thn]	1.0 unit	193,000,000	193,000,000	
	- Sewa Kendaraan Pejabat Eselon II [5 unit x 1 Thn]	5.0 unit	158,600,000	793,000,000	
	- Biaya sewa kendaraan operasional [1 unit x 1 Thn]	1.0 unit	74,400,000	74,400,000	
	- Biaya Sewa Kendaraan Operasional [2 Unit x 7 bulan]	14.0 UB	6,690,000	93,660,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.139-Jakarta V )			1,034,950,000	RM
	- BBM Kendaraan Sewa Eselon I [1 unit x 1 tahun]	1.0 unit	36,000,000	36,000,000	
	- BBM Kendaraan Sewa Eselon II [5 unit x 1 tahun]	5.0 unit	27,000,000	135,000,000	
	- BBM Kendaraan Sewa Operasional Kantor [3 unit x 1 tahun]	3.0 unit	24,000,000	72,000,000	
	- Pemeliharaan Roda 4 [23 unit x 1 thn]	23.0 unit	33,650,000	773,950,000	
	- Pemeliharaan Roda 2 [10 unit x 1 thn]	10.0 unit	1,800,000	18,000,000	
<i>B</i>	<u>Langganan Daya dan Jasa</u>			1,811,229,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.139-Jakarta V )			18,000,000	RM
	- Pengangkutan Sampah [1 kgt x 12 Bln]	12.0 Bln	1,500,000	18,000,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.139-Jakarta V )			13,329,000	RM
	- Biaya pengiriman pos surat/bahan	1.0 Pkt	13,329,000	13,329,000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.139-Jakarta V )			1,320,000,000	RM
	- Listrik Kantor BPHN [1 kgt x 12 bulan]	12.0 bulan	110,000,000	1,320,000,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.139-Jakarta V )			20,400,000	RM
	- Telepon kantor BPHN [1 kgt x 12 bulan]	12.0 bulan	1,700,000	20,400,000	
522119	<u>Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V )			439,500,000	RM
	- Langganan Internet Kantor [1 kgt x 12 bulan]	12.0 bulan	35,000,000	420,000,000	
	- TV Kabel/ Berlangganan [1 kgt x 12 bulan]	12.0 bulan	1,625,000	19,500,000	
<i>C</i>	<u>Pemeliharaan Gedung, Pagur dan Halaman</u>			1,909,922,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			1,875,867,000	RM
	- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat [8222 M2 x 1 Thn]	8222.0 M2	206,000	1,693,732,000	
	- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat [564 M2 x 1 Thn]	564.0 M2	153,000	86,292,000	
	- Halaman Gedung [8713 M2 x 1 Thn]	8713.0 M2	11,000	95,843,000	
523112	<u>Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			34,055,000	RM
	- Barang Persediaan Rumah Tangga [1 Paket]	1.0 Paket	34,055,000	34,055,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D	Pemeliharaan Peralatan Kantor			583,616,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.139-Jakarta V )			583,616,000	RM
	- Perawatan Inventaris Kantor [233 peg x 1 tahun]	233.0 unit	80,000	18,640,000	
	- Facsimile dan Telepon [1 paket x 1 tahun]	1.0 paket	25,000,000	25,000,000	
	- Perawatan Komputer [149 unit x 1 tahun]	149.0 unit	500,000	74,500,000	
	- Perawatan Laptop [38 unit x 1 tahun]	38.0 unit	600,000	22,800,000	
	- Perawatan Printer [78 unit x 1 tahun]	78.0 unit	92,000	7,176,000	
	- Perawatan Peralatan kedokteran/poliklinik [1 paket x 1 tahun]	1.0 paket	15,000,000	15,000,000	
	- Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) [90 unit x 1 tahun]	90.0 unit	223,000	20,070,000	
	- Perawatan AC Split, AC Cassette dan AC Floor Standing [143 unit x 1 tahun]	143.0 unit	500,000	71,500,000	
	- Perawatan Genset 100 KVA [1 unit x 1 tahun]	1.0 unit	10,000,000	10,000,000	
	- Perawatan Genset 125 KVA [1 unit x 1 tahun]	1.0 unit	10,300,000	10,300,000	
	- Perawatan Genset 300 KVA [1 unit x 1 tahun]	1.0 unit	20,500,000	20,500,000	
	- Perawatan AC Central termasuk Cooling Tower dan Pompa Cooling Tower [1 paket x 1 tahun]	1.0 paket	130,000,000	130,000,000	
	- Perawatan Mesin Pompa Air [12 unit x 1 tahun]	12.0 unit	2,100,000	25,200,000	
	- Perawatan Mesin Foto Copy [1 paket x 1 tahun]	1.0 paket	10,000,000	10,000,000	
	- Perawatan Lift BPHN [2 unit x 1 tahun]	2.0 unit	46,465,000	92,930,000	
	- Pemeliharaan mesin absensi [6 unit x 1 tahun]	6.0 unit	5,000,000	30,000,000	
E	Keperluan Perkantoran			4,353,969,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.139-Jakarta V )			3,845,958,000	RM
	- Honorarium Petugas Pengamanan non PNS (Kordinator) Triwulan 1 [1 orang x 4 bulan]	4.0 OB	4,500,000	18,000,000	
	- Honorarium Petugas Pengamanan Non PNS (Kordinator) [1 orang x 7 bulan]	7.0 OB	5,600,000	39,200,000	
	- Pengadaan Tenaga Petugas Pengamanan Non PNS (Kordinator) (1 orang x 2 bulan)	2.0 OB	7,715,000	15,430,000	
	- Honorarium Petugas Pengamanan Non PNS Triwulan 1 [11 orang x 4 bulan]	44.0 OB	4,200,000	184,800,000	
	- Honorarium Petugas Pengamanan Non PNS [11 orang x 7 bulan]	77.0 OB	5,300,000	408,100,000	
	- Pengadaan Tenaga Petugas Pengamanan Non PNS (12 orang x 2 bulan)	24.0 OB	7,154,000	171,696,000	
	- Pengadaan Tenaga Petugas Kebersihan/Luar Gedung Non PNS (Kordinator)(1 orang x 2 bulan)	2.0 OB	7,945,000	15,890,000	
	- Honorarium Petugas Kebersihan Taman Non PNS (Kordinator) Triwulan 1 [1 orang x 4 bulan]	4.0 OB	4,000,000	16,000,000	
	- Honorarium Petugas Kebersihan Taman Non PNS (Kordinator) [1 orang x 7 bulan]	7.0 OB	5,100,000	35,700,000	
	- Honorarium Petugas Kebersihan Taman Non PNS Triwulan 1 [5 orang x 4 bulan]	20.0 OB	3,800,000	76,000,000	
	- Honorarium Petugas Kebersihan Taman Non PNS [5 orang x 7 bulan]	35.0 OB	4,950,000	173,250,000	
	- Pengadaan Tenaga Petugas Kebersihan Luar Gedung Non PNS (6 orang x 2 bulan)	12.0 OB	7,086,000	85,032,000	
	- Honorarium Petugas Kebersihan Dalam Gedung non PNS Triwulan 1 [19 orang x 4 bulan]	76.0 OB	3,700,000	281,200,000	
	- Honorarium Petugas Kebersihan Dalam Gedung Non PNS [19 orang x 7 bulan]	133.0 OB	4,950,000	658,350,000	
	- Pengadaan Tenaga Petugas Kebersihan Dalam Gedung Non PNS (19 orang x 2 bulan)	38.0 OB	7,086,000	269,268,000	
	- Honorarium Pramubakti non PNS Triwulan 1 [8 org x 4 bulan]	32.0 OB	4,200,000	134,400,000	
	- Honorarium Pramubakti Non PNS [9 orang x 7 bulan]	63.0 OB	5,100,000	321,300,000	
	- Pengadaan Tenaga Administrasi Non PNS (6 orang x 2 bulan)	12.0 OB	6,978,000	83,736,000	
	- Pengadaan Tenaga Teknisi Non PNS (3 orang x 2 bulan)	6.0 OB	7,669,000	46,014,000	
	- Honorarium Pramubakti non PNS (Kordinator) Triwulan 1 [1 orang x 4 bulan]	4.0 OB	4,400,000	17,600,000	
	- Honorarium Pengemudi Kepala BPHN non PNS Triwulan 1 [1 orang x 4 bulan]	4.0 OB	5,000,000	20,000,000	
	- Honorarium Pengemudi Kepala BPHN Non PNS [1 orang x 7 bulan]	7.0 OB	5,600,000	39,200,000	
	- Honorarium Pengemudi Kepala BPHN Non PNS (6 orang x 2 bulan)	12.0 OB	8,282,000	99,384,000	
	- Honorarium Pengemudi non PNS Triwulan 1 [5 orang x 4 bulan]	20.0 OB	4,300,000	86,000,000	
	- Honorarium Pengemudi Non PNS [5 orang x 7 bulan]	35.0 OB	5,300,000	185,500,000	
	- luran BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung pemberi kerja [53 Org x 3 Bln]	159.0 OB	25,000	3,975,000	
	- luran BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung pemberi kerja [53 orang x 7 bulan]	371.0 OB	28,000	10,388,000	
	- Biaya keperluan sehari-hari perkantoran lainnya [233 orang x 1 tahun]	233.0 orang	951,000	221,583,000	
	- Biaya Pembelian Lisensi Aplikasi Daring (10 user 300 partisipan) [4 bulan]	4.0 bln	3,500,000	14,000,000	
	- Biaya Pembelian Lisensi Aplikasi Daring (1 user 1000 partisipan) [4 bulan]	4.0 bln	1,250,000	5,000,000	
	- Biaya refile tinta printer, tinta foto copy, dll [1 paket x 1 tahun]	1.0 paket	28,412,000	28,412,000	
	- Pembelian Lanyard dan ID Card pegawai [233 buah]	233.0 buah	350,000	81,550,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			490,011,000	RM
	- Biaya pembelian/pembuatan plakat/souvenir/cinderamata [50 buah x 1 tahun]	50.0 buah	999,000	49,950,000	
	- Biaya pembelian ATK Rutin [1 paket x 1 tahun]	1.0 paket	52,612,000	52,612,000	
	- Biaya Pembelian Bahan Komputer [1 paket x 1 tahun]	1.0 paket	51,047,000	51,047,000	
	- Biaya pengadaan alat/sarana prasarana kebersihan dan pertukangan [1 paket x 1 tahun]	1.0 paket	154,002,000	154,002,000	
	- Stempel Dinas [9 buah]	9.0 buah	50,000	450,000	
	- Biaya pembuatan Map BPHN [2500 buah]	2500.0 buah	21,000	52,500,000	
	- Pembuatan kalender duduk [800 buah]	800.0 buah	89,000	71,200,000	
	- Pembuatan buku agenda [233 buah]	233.0 buah	250,000	58,250,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.139-Jakarta V )			18,000,000	RM
	- Biaya pembelian solar/BBM untuk operasional Genset dan mesin potong rumput [1 kgt x 12 bulan x 150 liter]	1800.0 liter	10,000	18,000,000	
F	<u>Pakaian Dinas</u>			79,600,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.139-Jakarta V )			79,600,000	RM
	> Pengadaan pakaian dinas			79,600,000	
	- Satpam [12 orang x 2 stel]	24.0 stel	1,000,000	24,000,000	
	- Pramubakti [10 orang x 2 stel]	20.0 stel	400,000	8,000,000	
	- Cleaning Service [25 orang x 2 stel]	50.0 stel	400,000	20,000,000	
	- Supir [6 orang x 2 stel]	12.0 stel	400,000	4,800,000	
	- Seragam khusus pimpinan	1.0 paket	22,800,000	22,800,000	
G	<u>Jamuan Tamu</u>			50,000,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.139-Jakarta V )			50,000,000	RM
	- Jamuan tamu	1.0 Thn	50,000,000	50,000,000	
H	<u>Konsultasi/Koordinasi</u>			1,581,940,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V )			1,581,940,000	RM
	- Biaya Tiket PP Eselon I [1 Orang x 1 Kali x 38 Kgt]	38.0 OK	6,400,000	243,200,000	
	- Biaya Tiket PP [2 Orang x 1 Kali x 38 kgt]	76.0 OK	3,920,000	297,920,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari x 38 kgt]	342.0 OH	450,000	153,900,000	
	- Biaya Penginapan Eselon I [1 Orang x 2 Hari x 38 Kgt]	76.0 OH	5,200,000	395,200,000	
	- Biaya Penginapan Eselon II [1 Orang x 2 Hari x 38 Kgt]	76.0 OH	2,780,000	211,280,000	
	- Biaya Penginapan Eselon IV [1 Orang x 2 Hari x 38 Kgt]	76.0 OH	1,500,000	114,000,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 3 Kali x 38 kgt]	342.0 OK	200,000	68,400,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali x 38 kgt]	228.0 OK	255,000	58,140,000	
	- Uang Representatif Eselon I [1 Orang x 3 Hari x 38 kgt]	114.0 OH	200,000	22,800,000	
	- Uang Representatif Eselon II [1 Orang x 3 Hari x 38 kgt]	114.0 OH	150,000	17,100,000	
I	<u>Pengelola Keuangan</u>			200,640,000	



**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

Halaman : 72

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.139-Jakarta V )			200,640,000	RM
	> Tim Pengelolaan Keuangan			175,440,000	
	- Honor Kuasa Pengguna Anggaran [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	3,420,000	41,040,000	
	- Honor Pejabat Pembuat Komitmen [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	3,320,000	39,840,000	
	- Honor Pejabat Pembuat Komitmen [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	2,210,000	26,520,000	
	- Honor Penguji Tagihan Penandatanganan SPM [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	1,520,000	18,240,000	
	- Honor Bendaharawan Pengeluaran [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	1,320,000	15,840,000	
	- Honor Staf Pengelola Keuangan [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	810,000	9,720,000	
	- Honor Staf Pengelola Keuangan [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	640,000	7,680,000	
	- Honor Staf Pengelola Keuangan [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	570,000	6,840,000	
	- Honor Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	810,000	9,720,000	
	> Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)			25,200,000	
	- Honor Penanggungjawab [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	450,000	5,400,000	
	- Honor Koordinator [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	400,000	4,800,000	
	- Honor Ketua/Wakil Ketua [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	350,000	4,200,000	
	- Honor Anggota/Petugas [3 orang x 12 bulan]	36.0 OB	300,000	10,800,000	
<i>J</i>	<u>Kesehatan Pegawai</u>			105,000,000	
521832	<u>Belanja Barang Persediaan Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V )			105,000,000	RM
	- Biaya pembelian obat-obatan keperluan poliklinik kantor BPHN [1 pkt x 1 thn]	1.0 pkt	105,000,000	105,000,000	
<i>K</i>	<u>Penanganan Covid-19</u>			30,268,000	
521131	<u>Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V )			30,268,000	RM
	- Biaya Sewa Licensi Aplikasi (Partisipan sampai dengan 100 Org) [7 paket x 9 bulan]	63.0 bulan	356,000	22,428,000	
	- Biaya Sewa Licensi Aplikasi (Partisipan sampai dengan 500 Org) [2 paket x 4 bulan]	8.0 bulan	980,000	7,840,000	
<i>L</i>	<u>Pelantikan dan Sumpah Jabatan</u>			34,054,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			25,354,000	RM
	> Kegiatan Pelantikan Pejabat			25,354,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [46 orang x 7 kali]	322.0 OK	53,000	17,066,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [46 orang x 7 kali]	322.0 OK	22,000	7,084,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	1,204,000	1,204,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			5,600,000	RM
	- Biaya Jasa Rohaniawan [2 org x 7 kali]	14.0 OK	400,000	5,600,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			3,100,000	RM
	- Biaya transport lokal [2 org x 5 kali]	10.0 OK	100,000	1,000,000	
	- Biaya transport lokal orang luar BPHN [2 org x 7 kali]	14.0 OK	150,000	2,100,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1614.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	69.0 Unit, m2, Paket		4,742,946,000	
	Lokasi : INSTANSI PUSAT				
1614.EBB.951	Layanan Sarana Internal	68.0 Unit		1,394,698,000	
051	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			1,320,062,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			1,320,062,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.139-Jakarta V )			1,320,062,000	RM
	- Pengadaan Laptop [50 unit]	50.0 unit	14,140,000	707,000,000	
	- Pengadaan P.C. [7 unit]	7.0 unit	24,500,000	171,500,000	
	- Pengadaan Printer [5 unit]	5.0 unit	15,750,000	78,750,000	
	- Pengadaan Televisi [4 unit]	4.0 Unit	4,750,000	19,000,000	
	- Scanner [5 unit]	5.0 UNIT	10,600,000	53,000,000	
	- LCD Projector [5 unit]	5.0 UNIT	7,700,000	38,500,000	
	- Pengadaan Podcast untuk kanwil	1.0 Paket	14,800,000	14,800,000	
	- Pengadaan neon box tulisan BPHN [1 Unit]	1.0 Unit	139,512,000	139,512,000	
	- Pengadaan Komputer Meja	4.0 UNIT	24,500,000	98,000,000	
053	Peralatan Fasilitas Perkantoran			74,636,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			74,636,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.139-Jakarta V )			74,636,000	RM
	- Dispenser [14 unit]	14.0 unit	2,324,000	32,536,000	
	- Lemari Es [5 unit]	5.0 unit	7,500,000	37,500,000	
	- Mesin Pemotong Rumput [1 unit]	1.0 unit	4,600,000	4,600,000	
1614.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1.0 Unit		3,348,248,000	
051	Gedung dan Bangunan			3,348,248,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			3,348,248,000	
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (KPPN.139-Jakarta V )			3,348,248,000	RM
	> Renovasi Lantai 2 Gedung Annex, Ruang kerja Pimpinan Gedung SJDJ dan Ruang Kerja Pimpinan Gedung Induk BPHN			3,348,248,000	
	- Biaya Konstruksi Fisik (984 m2)	984.0 m2	2,797,000	2,752,248,000	
	- Biaya Perencanaan Konstruksi [1 pkt]	1.0 pkt	147,200,000	147,200,000	
	- Biaya Pengawasan Konstruksi [1 pkt]	1.0 pkt	99,500,000	99,500,000	
	- Renovasi Toilet Wanita Lantai 3 Gedung Annex	1.0 PAKET	48,300,000	48,300,000	
	- Biaya Pengelolaan Kegiatan [1 pkt]	1.0 pkt	102,000,000	102,000,000	
	- Perbaikan dan Pemasangan Paving Blok Halaman Kantor BPHN	1.0 PKT	199,000,000	199,000,000	
1614.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	239.0 Orang, Layanan, Rekomendasi		340,070,000	
	Lokasi : INSTANSI PUSAT				
1614.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	239.0 Orang		340,070,000	
051	Administrasi Kepegawaian			29,479,000	U
A	Pemberian Layanan Kepegawaian			20,509,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			6,826,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat koordinasi [25 orang x 4 kali]	100.0 OK	22,000	2,200,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	4,326,000	4,326,000	
	> Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja			150,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	150,000	150,000	
	> Pemutakhiran Data Pegawai BPHN			150,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	150,000	150,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			4,233,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PKT	1,216,000	1,216,000	
	- Biaya Pembelian Bahan Komputer	1.0 PKT	3,017,000	3,017,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			9,450,000	RM
	- Biaya transport lokal	63.0 OK	150,000	9,450,000	
<i>B</i>	<i>Supervisi dan Penilaian Jabatan Fungsional</i>			1,200,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			1,200,000	RM
	- Biaya transport lokal	8.0 OK	150,000	1,200,000	
<i>C</i>	<i>Pengelolaan Layanan Mutasi Pegawai BPHN</i>			7,770,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			2,370,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat	44.0 OK	22,000	968,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	300,000	300,000	
	> Tim Penilai Kinerja BPHN			1,102,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat	41.0 OK	22,000	902,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	200,000	200,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			5,400,000	RM
	- Biaya transport lokal	36.0 OK	150,000	5,400,000	
<b>052</b>	<b>Pembinaan Kepegawaian</b>			<b>39,540,000</b>	<b>U</b>
<i>A</i>	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			<i>39,540,000</i>	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			19,479,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 1 kali]	20.0 OK	22,000	440,000	
	- Biaya pembuatan plakat penghargaan pegawai	1.0 PKT	500,000	500,000	
	- Biaya pembuatan medali penghargaan pegawai	1.0 PKT	500,000	500,000	
	- Biaya pembuatan piagam penghargaan pegawai (cetak bingkai)	1.0 PKT	250,000	250,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	1,979,000	1,979,000	
	> Tim Pengawas dan Pengendalian Internal BPHN			5,234,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 4 kali]	100.0 OK	22,000	2,200,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat	40.0 OK	53,000	2,120,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	914,000	914,000	
	> Tim Penghargaan Pegawai BPHN			4,456,000	
	- Biaya konsumsi snack kegiatan [25 orang x 6 Kali]	150.0 OK	22,000	3,300,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	1,156,000	1,156,000	
	> Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara BPHN			1,320,000	
	- Biaya konsumsi snack kegiatan [20 orang x 3 kali]	60.0 OK	22,000	1,320,000	
	> Workshop/ Bimtek Pengelolaan Kinerja			4,800,000	
	- Biaya konsumsi snack kegiatan [60 orang x 1 kali]	60.0 OK	22,000	1,320,000	
	- Biaya konsumsi makan kegiatan [60 orang x 1 kali]	60.0 OK	53,000	3,180,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	300,000	300,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			4,011,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	1,071,000	1,071,000	
	- Biaya Pembelian Bahan Komputer	1.0 Paket	2,940,000	2,940,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			5,400,000	RM
	- Honor Narasumber Eksternal Tim Pengelolaan Kinerja ASN BPHN (setara Eselon II) [1 orang x 3 jam x 2 kgt]	6.0 OJ	900,000	5,400,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			10,650,000	RM
	- Biaya transport lokal	71.0 OK	150,000	10,650,000	
<b>053</b>	<b>Pengembangan Kepegawaian</b>			<b>271,051,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<b>TANPA SUB KOMPONEN</b>			<b>271,051,000</b>	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			34,550,000	RM
	- Biaya konsumsi makan rapat koordinasi	100.0 OK	53,000	5,300,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat koordinasi [18 orang x 10 kali]	180.0 OK	22,000	3,960,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	2,030,000	2,030,000	
	> Internalisasi Peraturan Pendukung Jabatan Fungsional			2,355,000	
	- Biaya konsumsi snack kegiatan	40.0 OK	22,000	880,000	
	- Biaya konsumsi makan kegiatan [25 orang x 1 kali]	25.0 OK	53,000	1,325,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	150,000	150,000	
	> Tim Penyusunan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi			15,130,000	
	- Biaya konsumsi snack kegiatan [23 orang x 9 kali]	207.0 OK	22,000	4,554,000	
	- Biaya konsumsi makan kegiatan [24 orang x 8 kali]	192.0 OK	53,000	10,176,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	400,000	400,000	
	> Kegiatan Penyusunan ruang lingkup jabatan fungsional Penyuluh Hukum dan Analis Hukum			5,775,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	539,000	539,000	
	- Biaya pembuatan spanduk	1.0 PKT	300,000	300,000	
	- Biaya pembelian seminar kit	25.0 PKT	197,440	4,936,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V )			67,450,000	RM
	> Diklat / Pelatihan			67,450,000	
	- Biaya dalam rangka mendukung pendidikan/pelatihan/pengembangan pegawai (SDM) [20 orang x 1 kali]	20.0 OK	3,372,500	67,450,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			3,990,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	3,367,000	3,367,000	
	- Biaya Bahan Komputer	1.0 Paket	623,000	623,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			17,100,000	RM
	- Honor narasumber Internalisasi Peraturan Pendukung Jabatan Fungsional (setara Eselon III) [3 orang x 3 jam x 1 KGT]	9.0 OJ	900,000	8,100,000	
	- Honor narasumber Kegiatan Penyusunan ruang lingkup jabatan fungsional Penyuluh Hukum dan Analis Hukum (setara Eselon II) [3 org x 3 jam x 1 kgt]	9.0 OJ	1,000,000	9,000,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V )			84,893,000	RM
	> Menghadiri Undangan terkait kegiatan di Bidang Kepegawaian di Jakarta			6,360,000	
	- Biaya uang harian [2 org x 4 hari x 1 kgt]	8.0 OH	210,000	1,680,000	
	- Biaya penginapan (eselon IV/Gol.III) [2 org x 3 malam x 1 kgt]	6.0 OH	730,000	4,380,000	
	- Biaya penggantian transport PP Jakarta [2 org x 1 kgt]	2.0 OK	150,000	300,000	
	> Menghadiri Undangan terkait kegiatan di Bidang Kepegawaian di Yogyakarta			17,598,000	
	- Biaya uang harian [3 org x 3 hari x 1 kgt]	9.0 OH	420,000	3,780,000	
	- Biaya tiket pesawat PP [3 orang x 1 kali]	3.0 OK	2,251,000	6,753,000	
	- Biaya penginapan (eselon III/Gol.IV) [1 org x 2 hari x 1 kgt]	2.0 OH	834,000	1,668,000	
	- Biaya penginapan (eselon IV/Gol.III) [2 org x 2 hari x 1 kgt]	4.0 OH	840,000	3,360,000	
	- Biaya taksi Jakarta PP [3 org x 2 kali x 1 kgt]	6.0 OK	252,000	1,512,000	
	- Biaya taksi Provinsi Tujuan PP [3 orang x 2 kali x 1 kgt]	6.0 OK	87,500	525,000	
	> Menghadiri Undangan terkait kegiatan di Bidang Kepegawaian di Jawa Barat			56,680,000	
	- Biaya uang harian [21 org x 3 hari]	63.0 OH	430,000	27,090,000	
	- Biaya penginapan (eselon III/Gol.IV) [1 org x 2 hari]	2.0 OH	685,000	1,370,000	
	- Biaya penginapan (eselon IV/Gol.III) [15 org x 2 hari]	30.0 OH	684,000	20,520,000	
	- Biaya penggantian transport [16 org]	16.0 OK	481,250	7,700,000	
	> Menghadiri Undangan terkait kegiatan di Bidang Kepegawaian di Lampung			4,255,000	
	- Biaya tiket pesawat PP [1 orang x 1 kali]	1.0 OK	1,583,000	1,583,000	
	- Biaya uang harian [1 orang x 3 hari x 1 kgt]	3.0 OH	380,000	1,140,000	
	- Biaya penginapan (eselon IV/Gol.II) [1 orang x 2 hari x 1 kgt]	2.0 OH	550,000	1,100,000	
	- Biaya taksi Jakarta PP [1 orang x 2 kali]	2.0 OK	138,500	277,000	
	- Biaya taksi Provinsi Tujuan PP [1 orang x 2 kali]	2.0 OK	77,500	155,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			5,700,000	RM
	- Biaya transport lokal	36.0 OK	150,000	5,400,000	
	- Biaya transport lokal orang luar BPHN	2.0 OK	150,000	300,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			57,368,000	RM
	> Konsinyering Keg. Penyusunan ruang lingkup jabatan fungsional Penyuluh Hukum Analis Hukum di Jawa Barat			57,368,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Eselon II (Narsum dari luar BPHN) [3 org x 1 malam x 1 kgt]	3.0 OH	1,100,000	3,300,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Eselon II [3 org x 2 malam x 1 kgt]	6.0 OH	1,100,000	6,600,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Eselon III kebawah [19 org x 2 malam x 1 kgt]	38.0 OH	820,000	31,160,000	
	- Uang Harian Fullboard (Narsum dari luar BPHN) [3 org x 2 hari x 1 kgt]	6.0 OH	150,000	900,000	
	- Uang Harian Fullboard [22 org x 3 hari x 1 kgt]	66.0 OH	150,000	9,900,000	
	- Biaya Transport PP [12 org x 2 kali x 1 kgt]	24.0 OK	229,500	5,508,000	
1614.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]		5.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	1,809,158,000	
	Lokasi : INSTANSI PUSAT				

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line] Lokasi : INSTANSI PUSAT	5.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi			
<b>1614.EBD.952</b>	<b>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</b>	<b>1.0 Dokumen</b>		<b>368,111,000</b>	
<b>051</b>	<b>Penyusunan Rencana Program</b>			<b>40,347,000</b>	<b>U</b>
<i>A</i>	<i>Pembahasan dan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja</i>			<i>36,275,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			11,175,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [30 orang x 12 kali]	360.0 OK	22,000	7,920,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [30 orang x 1 kali]	30.0 OK	53,000	1,590,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	1,665,000	1,665,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			1,750,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	200,000	200,000	
	- Biaya Bahan Komputer	1.0 Paket	1,550,000	1,550,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V )			17,880,000	RM
	> Finalisasi Renstra di Jawa Barat			5,760,000	
	- Biaya Transport [6 orang x 1 kali]	6.0 OK	100,000	600,000	
	- Biaya Uang Harian [6 orang x 2 hari]	12.0 OH	430,000	5,160,000	
	> Pembahasan Rencana Kerja di Jawa Barat			12,120,000	
	- Biaya Transport [6 orang x 2 kali x 1 kgt]	12.0 OK	150,000	1,800,000	
	- Biaya Uang Harian [6 orang x 2 hari x 2 kgt]	24.0 OH	430,000	10,320,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			5,470,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [7 org x 1 kali]	7.0 OK	100,000	700,000	
	- Biaya Transport Lokal [3 orang x 5 kali]	15.0 OK	150,000	2,250,000	
	- Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam [6 orang x 2 hari x 1 kgt]	12.0 OH	210,000	2,520,000	
<i>B</i>	<i>Penyusunan Postur</i>			<i>4,072,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			4,072,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 8 kali]	160.0 OK	22,000	3,520,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	552,000	552,000	
<b>052</b>	<b>Penyusunan Rencana Anggaran</b>			<b>327,764,000</b>	<b>U</b>
<i>A</i>	<i>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Anggaran</i>			<i>315,740,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			12,176,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 15 kali]	300.0 OK	22,000	6,600,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [20 orang x 4 kali]	80.0 OK	53,000	4,240,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	1,336,000	1,336,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			3,400,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	1,000,000	1,000,000	
	- Bahan Komputer	1.0 Paket	2,400,000	2,400,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			6,000,000	RM
	- Biaya Narasumber Eksternal Setara Es. II [2 orang x 3 jam]	6.0 OJ	1,000,000	6,000,000	



**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.139-Jakarta V )			287,924,000	RM
	> SULAWESI BARAT			36,245,000	
	- Biaya tiket PP [5 org x 1 kali]	5.0 OK	4,867,000	24,335,000	
	- Biaya Penginapan Golongan III [5 org x 2 hari]	10.0 OH	480,000	4,800,000	
	- Biaya Uang Harian [5 org x 3 hari]	15.0 OH	410,000	6,150,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [3 org x 2 kali]	6.0 OK	160,000	960,000	
	> YOGYAKARTA			13,008,000	
	- Biaya tiket PP [3 org x 1 kali]	3.0 OK	1,400,000	4,200,000	
	- Biaya Penginapan [3 org x 2 hari]	6.0 OH	450,000	2,700,000	
	- Biaya Uang Harian [3 org x 3 hari]	9.0 OH	420,000	3,780,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [3 org x 2 kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	- Biaya Taksi Provinsi Tujuan [2 org x 2 kali]	4.0 OK	198,000	792,000	
	> PAPUA			24,110,000	
	- Biaya tiket PP [2 org x 1 kali]	2.0 OK	8,193,000	16,386,000	
	- Biaya Penginapan [2 org x 2 hari]	4.0 OH	950,000	3,800,000	
	- Biaya Uang Harian [2 org x 3 hari]	6.0 OH	580,000	3,480,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [2 org x 2 kali]	4.0 OK	111,000	444,000	
	> KALIMANTAN SELATAN			15,282,000	
	- Biaya tiket PP [3 org x 1 kali]	3.0 OK	2,354,000	7,062,000	
	- Biaya Penginapan [3 org x 2 hari]	6.0 OH	648,000	3,888,000	
	- Biaya Uang Harian [3 org x 3 hari]	9.0 OH	380,000	3,420,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [3 org x 2 kali]	6.0 OK	152,000	912,000	
	> JAKARTA			15,900,000	
	- Biaya Transport [5 orang x 1 kali x 1 kgt]	5.0 OK	150,000	750,000	
	- Biaya Uang Harian [5 orang x 4 hari x 1 kgt]	20.0 OH	210,000	4,200,000	
	- Biaya Penginapan [5 orang x 3 hari x 1 kgt]	15.0 OH	730,000	10,950,000	
	> JAWA BARAT			8,348,000	
	- Biaya Transport Darat [2 org x 2 kali x 1 kgt]	4.0 OK	300,000	1,200,000	
	- Biaya Penginapan [2 org x 2 hari x 1 kgt]	4.0 OH	686,000	2,744,000	
	- Biaya Uang Harian [2 org x 3 hari x 1 kgt]	6.0 OH	430,000	2,580,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [2 org x 2 kali x 1 kgt]	4.0 OK	256,000	1,024,000	
	- Biaya Taksi Provinsi Tujuan [2 org x 2 kali x 1 kgt]	4.0 OK	200,000	800,000	
	> JAMBI			11,072,000	
	- Biaya tiket PP [2 org x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	2,460,000	4,920,000	
	- Biaya Penginapan [2 org x 2 hari x 1 kgt]	4.0 OH	580,000	2,320,000	
	- Biaya Uang Harian [2 org x 3 hari x 1 kgt]	6.0 OH	370,000	2,220,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [2 org x 2 kali x 1 kgt]	4.0 OK	256,000	1,024,000	
	- Biaya Taksi Provinsi Tujuan [2 org x 2 kali x 1 kgt]	4.0 OK	147,000	588,000	
	> JAWA TENGAH			7,554,000	
	- Biaya tiket PP [2 org x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	1,575,000	3,150,000	
	- Biaya Penginapan [2 org x 2 hari x 1 kgt]	4.0 OH	200,000	800,000	
	- Biaya Uang Harian [2 org x 3 hari x 1 kgt]	6.0 OH	370,000	2,220,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Biaya Taksi Jakarta [2 org x 2 kali x 1 kgt]	4.0 OK	256,000	1,024,000	
	- Biaya Taksi Provinsi Tujuan [2 org x 2 kali x 1 kgt]	4.0 OK	90,000	360,000	
	> SUMATERA SELATAN			5,300,000	
	- Biaya tiket PP [1 org x 1 kali x 1 kgt]	1.0 OK	2,268,000	2,268,000	
	- Biaya Penginapan [1 org x 2 hari x 1 kgt]	2.0 OH	830,000	1,660,000	
	- Biaya Uang Harian [1 org x 3 hari x 1 kgt]	3.0 OH	380,000	1,140,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [1 org x 2 kali x 1 kgt]	2.0 OK	116,000	232,000	
	> Sumatera Utara			12,592,000	
	- Biaya tiket PP [2 org x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	3,560,000	7,120,000	
	- Biaya Penginapan (Eselon IV/Gol III/II) [2 org x 2 hari x 1 kgt]	4.0 OH	663,000	2,652,000	
	- Biaya Uang Harian [2 org x 3 hari x 1 kgt]	6.0 OH	370,000	2,220,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [2 org x 2 kali x 1 kgt]	4.0 OK	150,000	600,000	
	> Sumatera Barat			11,408,000	
	- Biaya tiket PP [2 org x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	2,650,000	5,300,000	
	- Biaya Penginapan (Eselon IV/Gol III/II) [2 org x 2 hari x 1 kgt]	4.0 OH	701,000	2,804,000	
	- Biaya Uang Harian [2 org x 3 hari x 1 kgt]	6.0 OH	380,000	2,280,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [2 org x 2 kali x 1 kgt]	4.0 OK	256,000	1,024,000	
	> Jawa Timur			10,460,000	
	- Biaya tiket PP [2 org x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	2,674,000	5,348,000	
	- Biaya Penginapan (Eselon IV/Gol III/II) [1 org x 2 hari x 1 kgt]	2.0 OH	814,000	1,628,000	
	- Biaya Uang Harian [2 org x 3 hari x 1 kgt]	6.0 OH	410,000	2,460,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [2 org x 2 kali x 1 kgt]	4.0 OK	256,000	1,024,000	
	> Riau			12,684,000	
	- Biaya tiket PP [2 org x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	3,016,000	6,032,000	
	- Biaya Penginapan (Eselon IV/Gol III/II) [2 org x 2 hari x 1 kgt]	4.0 OH	852,000	3,408,000	
	- Biaya Uang Harian [2 org x 3 hari x 1 kgt]	6.0 OH	370,000	2,220,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [2 org x 2 kali x 1 kgt]	4.0 OK	256,000	1,024,000	
	> Kepulauan Riau			11,194,000	
	- Biaya tiket PP [2 org x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	2,635,000	5,270,000	
	- Biaya Penginapan (Eselon IV/Gol III/II) [2 org x 2 hari x 1 kgt]	4.0 OH	738,000	2,952,000	
	- Biaya Uang Harian [2 org x 3 hari x 1 kgt]	6.0 OH	370,000	2,220,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [2 org x 2 kali x 1 kgt]	4.0 OK	188,000	752,000	
	> Nusa Tenggara Timur			16,518,000	
	- Biaya tiket PP [2 org x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	5,081,000	10,162,000	
	- Biaya Penginapan (Eselon IV/Gol III/II) [2 org x 2 hari x 1 kgt]	4.0 OH	688,000	2,752,000	
	- Biaya Uang Harian [2 org x 3 hari x 1 kgt]	6.0 OH	430,000	2,580,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [2 org x 2 kali x 1 kgt]	4.0 OK	256,000	1,024,000	
	> Nusa Tenggara Barat			11,980,000	
	- Biaya tiket PP [2 org x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	3,100,000	6,200,000	
	- Biaya Penginapan (Eselon IV/Gol III/II) [2 org x 2 hari x 1 kgt]	4.0 OH	600,000	2,400,000	
	- Biaya Uang Harian [2 org x 3 hari x 1 kgt]	6.0 OH	440,000	2,640,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Biaya Taksi Jakarta [2 org x 2 kali x 1 kgt]	4.0 OK	185,000	740,000	
	> Kalimantan Barat			10,876,000	
	- Biaya Tiket PP [2 org x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	2,710,000	5,420,000	
	- Biaya Penginapan (Eselon IV/Gol III/II) [2 org x 2 hari x 1 kgt]	4.0 OH	538,000	2,152,000	
	- Biaya Uang Harian [2 org x 3 hari x 1 kgt]	6.0 OH	380,000	2,280,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [2 org x 2 kali x 1 kgt]	4.0 OK	256,000	1,024,000	
	> Kalimantan Timur			13,898,000	
	- Biaya Tiket PP [2 org x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	3,651,000	7,302,000	
	- Biaya Penginapan (Eselon IV/Gol III/II) [2 org x 2 hari x 1 kgt]	4.0 OH	804,000	3,216,000	
	- Biaya Uang Harian [2 org x 3 hari x 1 kgt]	6.0 OH	430,000	2,580,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [2 org x 2 kali x 1 kgt]	4.0 OK	200,000	800,000	
	> Kalimantan Tengah			11,788,000	
	- Biaya Tiket PP [2 org x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	2,984,000	5,968,000	
	- Biaya Penginapan (Eselon IV/Gol III/II) [2 org x 2 hari x 1 kgt]	4.0 OH	659,000	2,636,000	
	- Biaya Uang Harian [2 org x 3 hari x 1 kgt]	6.0 OH	360,000	2,160,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [2 org x 2 kali x 1 kgt]	4.0 OK	256,000	1,024,000	
	> Lampung			8,790,000	
	- Biaya Tiket PP [2 org x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	1,583,000	3,166,000	
	- Biaya Penginapan (Eselon IV/Gol III/II) [2 org x 2 hari x 1 kgt]	4.0 OH	580,000	2,320,000	
	- Biaya Uang Harian [2 org x 3 hari x 1 kgt]	6.0 OH	380,000	2,280,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [2 org x 2 kali x 1 kgt]	4.0 OK	256,000	1,024,000	
	> Sulawesi Utara			8,680,000	
	- Biaya tiket PP [1 org x 1 kali x 1 kgt]	1.0 OK	5,102,000	5,102,000	
	- Biaya Penginapan (Eselon IV/Gol III/II) [1 org x 2 hari x 1 kgt]	2.0 OH	978,000	1,956,000	
	- Biaya Uang Harian [1 org x 3 hari x 1 kgt]	3.0 OH	370,000	1,110,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [1 org x 2 kali x 1 kgt]	2.0 OK	256,000	512,000	
	> Aceh			7,316,000	
	- Biaya tiket PP [1 org x 1 kali x 1 kgt]	1.0 OK	4,492,000	4,492,000	
	- Biaya Penginapan (Eselon IV/Gol III/II) [1 org x 2 hari x 1 kgt]	2.0 OH	616,000	1,232,000	
	- Biaya Uang Harian [1 org x 3 hari x 1 kgt]	3.0 OH	360,000	1,080,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [1 org x 2 kali x 1 kgt]	2.0 OK	256,000	512,000	
	> Banten			2,921,000	
	- Biaya Tansport Darat [1 org x 1 kali x 1 kgt]	1.0 OK	375,000	375,000	
	- Biaya Penginapan (Eselon IV/Gol III/II) [1 org x 2 hari x 1 kgt]	2.0 OH	718,000	1,436,000	
	- Biaya Uang Harian [1 org x 3 hari x 1 kgt]	3.0 OH	370,000	1,110,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			6,240,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [3 org x 2 kali]	6.0 OK	100,000	600,000	
	- Biaya Transport Lokal [3 orang x 6 kali]	18.0 OK	150,000	2,700,000	
	- Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam [14 org x 1 kali]	14.0 OH	210,000	2,940,000	
B	<i>Penyusunan Analisa Kebutuhan Anggaran Tahun 2025</i>			12,024,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V ) - Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 4 kali]	80.0 OK	22,000	1,760,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V ) - Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	650,000	650,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V ) > JAWA BARAT - Biaya Transportasi Darat [3 org x 2 kali] - Biaya Penginapan [2 org x 2 hari] - Biaya Uang Harian [3 org x 3 hari]			8,114,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V ) - Biaya Transport Lokal [2 org x 5 kali]	10.0 OK	150,000	1,500,000	RM
<b>1614.EBD.953</b>	<b>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</b>	<b>1.0 Dokumen</b>		<b>403,604,000</b>	
<b>051</b>	<b>Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi</b>			<b>367,800,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<i>Pengumpulan dan Supervisi Data</i>			<i>343,232,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V ) - Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 15 kali] - Biaya konsumsi makan rapat [20 orang x 13 kali]	300.0 OK 260.0 OK	22,000 53,000	20,380,000 6,600,000 13,780,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V ) - Biaya pembelian ATK - Bahan Komputer	1.0 Paket 1.0 Paket	2,185,000 3,425,000	5,610,000 2,185,000 3,425,000	RM

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.139-Jakarta V )			314,242,000	RM
	> MALUKU UTARA			28,262,000	
	- Biaya tiket PP [3 org x 1 kali]	3.0 OK	6,664,000	19,992,000	
	- Biaya Penginapan [3 org x 2 hari]	6.0 OH	600,000	3,600,000	
	- Biaya Uang Harian [3 org x 3 hari]	9.0 OH	430,000	3,870,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [2 org x 2 kali]	4.0 OK	200,000	800,000	
	> BANTEN			11,874,000	
	- Biaya transport/tiket [3 org x 2 kali]	6.0 OK	250,000	1,500,000	
	- Biaya Penginapan [3 org x 2 hari]	6.0 OH	718,000	4,308,000	
	- Biaya Uang Harian [3 org x 3 hari]	9.0 OH	370,000	3,330,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [3 org x 2 kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	- Biaya Taksi Provinsi Tujuan [3 org x 2 kali]	6.0 OK	200,000	1,200,000	
	> BANGKA BELITUNG			14,107,000	
	- Biaya tiket PP [3 org x 1 kali]	3.0 OK	2,139,000	6,417,000	
	- Biaya Penginapan [3 org x 2 hari]	6.0 OH	622,000	3,732,000	
	- Biaya Uang Harian [3 org x 3 hari]	9.0 OH	410,000	3,690,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [2 org x 1 kali]	2.0 OK	90,000	180,000	
	- Biaya Taksi Provinsi Tujuan [1 org x 1 kali]	1.0 OK	88,000	88,000	
	> BENGKULU			15,042,000	
	- Biaya tiket PP [3 org x 1 kali]	3.0 OK	1,760,000	5,280,000	
	- Biaya Penginapan [3 org x 2 hari]	6.0 OH	692,000	4,152,000	
	- Biaya Uang Harian [3 org x 3 hari]	9.0 OH	380,000	3,420,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [3 org x 2 kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	- Biaya Taksi Provinsi Tujuan [3 org x 2 kali]	6.0 OK	109,000	654,000	
	> BALI			93,220,000	
	- Biaya tiket PP [12 org x 1 kali]	12.0 OK	3,226,000	38,712,000	
	- Biaya Penginapan (Eselon III/Gol IV) [2 Org x 2 hari]	4.0 OH	1,348,000	5,392,000	
	- Biaya Penginapan (Eselon IV/Gol III) [12 org x 2 hari]	24.0 OH	1,044,000	25,056,000	
	- Biaya Uang Harian [13 org x 3 hari]	39.0 OH	480,000	18,720,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [6 org x 2 kali]	12.0 OK	256,000	3,072,000	
	- Biaya Taksi Provinsi Tujuan [6 Org x 2 kali]	12.0 OK	189,000	2,268,000	
	> YOGYAKARTA			31,887,000	
	- Biaya Tiket PP [6 org x 1 kali x 1 kgt]	6.0 OK	2,011,000	12,066,000	
	- Biaya Penginapan (Eselon III/Gol IV) [1 org x 2 hari x 1 kgt]	2.0 OH	845,000	1,690,000	
	- Biaya Penginapan (Eselon IV/Gol III/II) [6 org x 2 hari x 1 kgt]	12.0 OH	845,000	10,140,000	
	- Biaya Uang Harian [6 org x 3 hari x 1 kgt]	18.0 OH	420,000	7,560,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [1 org x 1 kali x 1 kgt]	1.0 OK	138,000	138,000	
	- Biaya Taksi Provinsi Tujuan [1 org x 1 kali x 1 kgt]	1.0 OK	293,000	293,000	
	> SULAWESI SELATAN			44,718,000	
	- Biaya Tiket PP [6 org x 1 kali x 1 kgt]	6.0 OK	3,829,000	22,974,000	
	- Biaya Penginapan [6 org x 2 hari x 1 kgt]	12.0 OH	745,000	8,940,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Biaya Uang Harian [6 org x 3 hari x 1 kgt]	18.0 OH	430,000	7,740,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [6 org x 2 kali x 1 kgt]	12.0 OK	256,000	3,072,000	
	- Biaya Taksi Provinsi Tujuan [6 org x 2 kali x 1 kgt]	12.0 OK	166,000	1,992,000	
	> JAWA TENGAH			31,104,000	
	- Biaya Tiket PP [6 org x 1 kali x 1 kgt]	6.0 OK	2,182,000	13,092,000	
	- Biaya Penginapan [6 org x 2 hari x 1 kgt]	12.0 OH	600,000	7,200,000	
	- Biaya Uang Harian [6 org x 3 hari x 1 kgt]	18.0 OH	370,000	6,660,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [6 org x 2 kali x 1 kgt]	12.0 OK	256,000	3,072,000	
	- Biaya Taksi Provinsi Tujuan [6 org x 2 kali x 1 kgt]	12.0 OK	90,000	1,080,000	
	> NUSA TENGGARA BARAT			44,028,000	
	- Biaya Tiket PP [6 org x 1 kali x 1 kgt]	6.0 OK	3,230,000	19,380,000	
	- Biaya Penginapan [6 org x 2 hari x 1 kgt]	12.0 OH	907,000	10,884,000	
	- Biaya Uang Harian [6 org x 3 hari x 1 kgt]	18.0 OH	440,000	7,920,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [6 org x 2 kali x 1 kgt]	12.0 OK	256,000	3,072,000	
	- Biaya Taksi Provinsi Tujuan [6 org x 2 kali x 1 kgt]	12.0 OK	231,000	2,772,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			3,000,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [5 org x 4 kali]	20.0 OK	150,000	3,000,000	
B	<i>Verifikasi dan Validasi Target Kinerja BPHN</i>			1,960,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			1,760,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 4 kali]	80.0 OK	22,000	1,760,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			200,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [2 org x 1 kali]	2.0 OK	100,000	200,000	
C	<i>Pelaksanaan SPIP di Lingkungan BPHN</i>			9,248,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			3,928,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 8 kali]	160.0 OK	22,000	3,520,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	408,000	408,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V )			2,720,000	RM
	> Jawa Barat			2,720,000	
	- Biaya Transportasi Darat [4 org x 1 kali x 1 kgt]	4.0 OK	250,000	1,000,000	
	- Biaya Uang Harian [4 org x 1 hari x 1 kgt]	4.0 OK	430,000	1,720,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			2,600,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [2 org x 1 kali]	2.0 OK	100,000	200,000	
	- Biaya Transport Lokal [4 orang x 4 kali]	16.0 OK	150,000	2,400,000	
D	<i>Penerapan Manajemen Risiko</i>			9,360,000	

## RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

Halaman : 86

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			4,610,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 10 kali]	200.0 OK	22,000	4,400,000	
	- Biaya cetak piagam Manajemen Risiko dan pemasangan bingkai [3 pkt]	3.0 PKT	70,000	210,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			4,750,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [5 org x 2 kali]	10.0 OK	100,000	1,000,000	
	- Biaya Transport Lokal [5 orang x 5 kali]	25.0 OK	150,000	3,750,000	
<i>E</i>	<i>Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja BPHN</i>			4,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			2,200,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 5 kali]	100.0 OK	22,000	2,200,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			1,800,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [3 org x 4 kali]	12.0 OK	150,000	1,800,000	
<b>052</b>	<b>Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja</b>			<b>35,804,000</b>	<b>U</b>
<i>A</i>	<i>Rapat Koordinasi Capaian Kinerja</i>			10,201,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			2,200,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 5 kali]	100.0 OK	22,000	2,200,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			4,001,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	1,441,000	1,441,000	
	- Bahan Komputer	1.0 Paket	2,560,000	2,560,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			4,000,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [5 org x 2 kali]	10.0 OK	100,000	1,000,000	
	- Biaya Transport Lokal [5 orang x 4 kali]	20.0 OK	150,000	3,000,000	
<i>B</i>	<i>Penyusunan LKjIP, Laporan SPIP, dan Manajemen Risiko</i>			25,603,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			6,518,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 5 kali]	100.0 OK	22,000	2,200,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [20 orang x 3 kali]	60.0 OK	53,000	3,180,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan [1 pkt]	1.0 pkt	1,138,000	1,138,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			1,015,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	569,000	569,000	
	- Bahan Komputer	1.0 Paket	446,000	446,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			11,400,000	RM
	- Biaya Narasumber Eksternal Setara Es. II [3 orang x 2 jam]	6.0 OJ	1,000,000	6,000,000	
	- Biaya Narasumber Eksternal Setara Es. III [3 orang x 2 jam]	6.0 OJ	900,000	5,400,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V ) > JAWA BARAT - Biaya Transportasi Darat [2 org x 2 kali] - Biaya Uang Harian [4 org x 1 hari]	4.0 OK 4.0 OH	250,000 430,000	2,720,000 1,000,000 1,720,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V ) - Biaya Transport Lokal [2 org x 1 kali] - Biaya Transport Lokal [5 orang x 5 kali]	2.0 OK 25.0 OK	100,000 150,000	200,000 3,750,000	RM
<b>1614.EBD.955</b>	<b>Layanan Manajemen Keuangan</b>	<b>1.0 Dokumen</b>		<b>328,795,000</b>	
<b>051</b>	<b>Pelaksanaan Anggaran</b>			<b>143,661,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<b>TANPA SUB KOMPONEN</b>			<b>143,661,000</b>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V ) - Biaya konsumsi snack rapat [27 orang x 3 kali] - Biaya konsumsi makan rapat [14 orang x 1 kali] - Biaya penggandaan dan penjiilidan > Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran di Sulawesi Selatan - Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 1 kali] - Biaya konsumsi makan rapat [20 orang x 1 kali]	81.0 OK 14.0 OK 1.0 PKT 20.0 OK 20.0 OK	22,000 53,000 1,007,000 24,000 56,000	1,782,000 742,000 1,007,000 1,600,000 480,000 1,120,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V ) - Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	2,040,000	2,040,000	RM



**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V )			131,090,000	RM
	> Kegiatan di Jakarta			12,920,000	
	- Biaya Penginapan [4 org x 4 hari]	16.0 OH	455,000	7,280,000	
	- Biaya Uang Harian [4 org x 5 hari]	20.0 OH	210,000	4,200,000	
	- Penggantian transport darat (3 org x 1 kali)	3.0 OK	150,000	450,000	
	- Uang Harian [1 org x 4 hari]	4.0 OH	210,000	840,000	
	- Transport darat [1 org x 1 kali]	1.0 OK	150,000	150,000	
	> Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran di Kantor Wilayah			118,170,000	
	>> JAWA BARAT		0	66,712,000	
	- Biaya Transport Darat PP [13 org x 1 kali]	13.0 OK	600,000	7,800,000	
	- Biaya Penginapan [17 org x 2 hari]	34.0 OH	686,000	23,324,000	
	- Biaya Uang Harian [20 org x 3 hari]	60.0 OH	430,000	25,800,000	
	- Biaya Penginapan [2 orang x 4 hari]	8.0 OH	686,000	5,488,000	
	- Biaya Uang Harian [2 orang x 5 hari]	10.0 OH	430,000	4,300,000	
	>> SULAWESI SELATAN		0	20,076,000	
	- Biaya tiket PP [3 org x 1 kali]	3.0 OK	3,400,000	10,200,000	
	- Biaya Penginapan [3 org x 2 hari]	6.0 OH	745,000	4,470,000	
	- Biaya Uang Harian [3 org x 3 hari]	9.0 OH	430,000	3,870,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [3 org x 2 kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	>> BANGKA BELITUNG		0	15,321,000	
	- Biaya tiket PP [3 org x 1 kali]	3.0 OK	2,121,000	6,363,000	
	- Biaya Penginapan [3 org x 2 hari]	6.0 OH	622,000	3,732,000	
	- Biaya Uang Harian [3 org x 3 hari]	9.0 OH	410,000	3,690,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [3 org x 2 kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	>> DI YOGYAKARTA		0	12,348,000	
	- Biaya tiket PP [2 org x 1 kali]	2.0 OK	2,268,000	4,536,000	
	- Biaya Penginapan [2 org x 2 hari]	4.0 OH	845,000	3,380,000	
	- Biaya Uang Harian [2 org x 3 hari]	6.0 OH	420,000	2,520,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [2 org x 2 kali]	4.0 OK	256,000	1,024,000	
	- Biaya Taksi Provinsi Tujuan [2 org x 2 kali]	4.0 OK	222,000	888,000	
	>> DI YOGYAKARTA		0	3,713,000	
	- Biaya tiket PP [1 org x 1 kali]	1.0 OK	1,431,000	1,431,000	
	- Biaya penginapan [1 org x 2 hari]	2.0 OH	450,000	900,000	
	- Biaya uang harian [1 org x 3 hari]	3.0 OH	420,000	1,260,000	
	- Biaya taksi Jakarta [1 org x 2 kali]	2.0 OK	41,000	82,000	
	- Biaya taksi provinsi tujuan [1 org x 2 kali]	2.0 OK	20,000	40,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			5,400,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [3 org x 12 kali]	36.0 OK	150,000	5,400,000	
<b>052</b>	<b>Akuntansi dan Pelaporan</b>			<b>158,260,000</b>	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			158,260,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V ) Melakukan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data > Keuangan dan BMN Program Pembinaan Hukum Nasional Tingkat Satker - Biaya penggandaan dan penjiilidan - Biaya konsumsi snack rapat [30 orang x 3 kali] > Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Eselon I - Biaya penggandaan dan penjiilidan - Biaya konsumsi snack rapat [10 orang x 11 kali] - Biaya konsumsi makan rapat [10 orang x 7 kali] >> Kegiatan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) - Biaya Konsumsi Snack Rapat [22 orang x 2 kali]	1.0 PKT 90.0 OK 3.0 PKT 110.0 OK 70.0 OK 44.0 OK	444,000 22,000 901,000 22,000 53,000 22,000	12,225,000 2,424,000 444,000 1,980,000 9,801,000 2,703,000 2,420,000 3,710,000 968,000 968,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V ) Melakukan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data > Keuangan dan BMN Program Pembinaan Hukum Nasional Tingkat Satker - Biaya pembelian ATK > Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Eselon I - Biaya pembelian ATK - Bahan Komputer	1.0 Paket 1.0 Paket 1.0 Paket	3,175,000 2,373,000 1,112,000	6,660,000 3,175,000 3,175,000 3,485,000 2,373,000 1,112,000	RM

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.139-Jakarta V )			137,575,000	RM
	> Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Eselon I			34,265,000	
	>> Melakukan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Keuangan dan BMN Program Pembinaan Hukum Nasional (pendampingan Pra Rekonsiliasi) di		0	14,240,000	
	- Biaya tiket PP [4 org x 1 kali]	4.0 OK	1,450,000	5,800,000	
	- Biaya Penginapan Setara Es. III [2 org x 2 hari]	4.0 OH	450,000	1,800,000	
	- Biaya Penginapan Gol. III [2 org x 2 hari]	4.0 OH	225,000	900,000	
	- Biaya Uang Harian [4 org x 3 hari]	12.0 OH	420,000	5,040,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [2 org x 2 kali]	4.0 OK	65,000	260,000	
	- Biaya Taksi Provinsi Tujuan [4 org x 2 kali]	8.0 OK	55,000	440,000	
	>> Melakukan Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan Tingkat Eselon I di NTB		0	20,025,000	
	- Biaya tiket PP [3 org x 1 kali]	3.0 OK	2,930,000	8,790,000	
	- Biaya Penginapan Setara Es. III [1 org x 2 hari]	2.0 OH	1,350,000	2,700,000	
	- Biaya Penginapan Gol. III [2 org x 2 hari]	4.0 OH	900,000	3,600,000	
	- Biaya Uang Harian [3 org x 3 hari]	9.0 OH	440,000	3,960,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [3 org x 1 kali]	3.0 OK	325,000	975,000	
	> Melakukan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Keuangan dan BMN Program Pembinaan Hukum Nasional Tingkat Satker Pusat di Bogor - Ja			17,600,000	
	- Biaya Uang Harian [4 org x 5 hari]	20.0 OH	430,000	8,600,000	
	- Biaya Penginapan Setara Eselon III [2 org x 4 hari]	8.0 OH	750,000	6,000,000	
	- Biaya Penginapan Golongan III [2 org x 4 hari]	8.0 OH	375,000	3,000,000	
	> Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Eselon I di Jawa Timur			20,416,000	
	- Biaya Tiket PP [4 org x 1 kali]	4.0 OK	2,010,000	8,040,000	
	- Biaya Penginapan Setara Eselon III [2 org x 2 hari]	4.0 OH	1,076,000	4,304,000	
	- Biaya Penginapan Golongan III [2 org x 2 hari]	4.0 OH	538,000	2,152,000	
	- Biaya Uang Harian [4 org x 3 hari]	12.0 OH	410,000	4,920,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [4 org x 1 kali x 1 pp]	4.0 OK	150,000	600,000	
	- Biaya Taksi Provinsi Tujuan PP [4 org x 1 kali x 1 pp]	4.0 OK	100,000	400,000	
	> Melakukan Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan Tingkat Eselon I Jawa Barat			15,938,000	
	- Penggantian Transport PP [4 org]	4.0 OK	500,000	2,000,000	
	- Biaya Penginapan Eselon II [1 org x 2 hari]	2.0 OH	1,686,000	3,372,000	
	- Biaya Penginapan Setara Eselon III [1 org x 2 hari]	2.0 OH	686,000	1,372,000	
	- Biaya Penginapan Golongan III [2 org x 2 hari]	4.0 OH	686,000	2,744,000	
	- Biaya Uang Harian [5 org x 3 hari]	15.0 OH	430,000	6,450,000	
	> Melakukan Rekonsiliasi Pemutakhiran Data Keuangan BMN Prog. Pembinaan Hukum Nasional Tk. Satker (Rekonsiliasi tk. Wilayah Semest			32,736,000	
	- Penggantian transport PP [3 orang]	3.0 OK	300,000	900,000	
	- Penggantian Transport PP (2 org)	2.0 OK	700,000	1,400,000	
	- Biaya Penginapan [4 orang x 4 hari]	16.0 OH	686,000	10,976,000	
	- Biaya Penginapan Setara Eselon III (2 org x 4 hari )	8.0 OH	820,000	6,560,000	
	- Biaya Uang Harian [6 orang x 5 hari]	30.0 OH	430,000	12,900,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Melakukan Rekonsiliasi Pemutakhiran Data Keuangan			8,550,000	
	> BMN Prog.Pembinaan Hukum Nasional Tk. Satker (Keg. PIPK tk. Satker Pusat) di B				
	- Penggantian transport PP [3 orang x 1 Kgt]	3.0 OK	350,000	1,050,000	
	- Biaya Penginapan [3 orang x 2 hari]	6.0 OH	605,000	3,630,000	
	- Biaya Uang Harian [3 orang x 3 hari]	9.0 OH	430,000	3,870,000	
	Melakukan Rekonsiliasi Pemutakhiran Data Keuangan			8,070,000	
	> BMN Prog. Pembinaan Hukum Nasional Tk. Satker (Rekonsiliasi tk. Satker Pusat S				
	- Penggantian Transport PP [2 orang]	2.0 OK	300,000	600,000	
	- Biaya Penginapan [3 orang x 2 hari]	6.0 OH	600,000	3,600,000	
	- Biaya Uang Harian [3 orang x 3 hari]	9.0 OH	430,000	3,870,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			1,800,000	RM
	Melakukan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Keuangan dan BMN Program Pembinaan Hukum Nasional Tingkat Satker			900,000	
	> KEGIATAN WORKSHOP PEMBEKALAN ADMINISTRASI KEUANGAN TH. 2023				
	- Biaya Transport Lokal [3 org x 2 kali]	6.0 OK	150,000	900,000	
	> Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Eselon I			900,000	
	- Biaya Transport Lokal [3 org x 2 kali]	6.0 OK	150,000	900,000	
<b>053</b>	<b>Perbendaharaan</b>			<b>26,874,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<b>TANPA SUB KOMPONEN</b>			<b>26,874,000</b>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			1,390,000	RM
	> KEGIATAN WORKSHOP PEMBEKALAN ADMINISTRASI KEUANGAN TH. 2023			1,390,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	1,390,000	1,390,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			15,584,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	11,929,000	11,929,000	
	- Bahan Komputer	1.0 Paket	3,655,000	3,655,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			9,900,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [3 org x 22 kali]	66.0 OK	150,000	9,900,000	
<b>1614.EBD.961</b>	<b>Layanan Reformasi Kinerja</b>	<b>1.0 Dokumen</b>		<b>269,215,000</b>	
<b>051</b>	<b>Pelaksanaan dan Penilaian Reformasi Birokrasi</b>			<b>232,582,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<b>Perencanaan Reformasi Birokrasi</b>			<b>13,647,000</b>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			3,085,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 4 kali]	80.0 OK	22,000	1,760,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [25 orang x 1 kali]	25.0 OK	53,000	1,325,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			4,012,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	2,032,000	2,032,000	
	- Bahan Komputer	1.0 Paket	1,980,000	1,980,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			4,800,000	RM
	- Biaya Narasumber Eksternal Setara Es. I [1 orang x 2 jam]	2.0 OJ	1,400,000	2,800,000	
	- Biaya Narasumber Eksternal Setara Es. II [1 orang x 2 jam]	2.0 OJ	1,000,000	2,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			1,750,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [13 org x 1 kali]	13.0 OK	100,000	1,300,000	
	- Biaya Transport Lokal [3 orang x 1 kali]	3.0 OK	150,000	450,000	
<i>B</i>	<i>Penguatan Reformasi Birokrasi</i>			<i>218,935,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			36,825,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 28 kali]	700.0 OK	22,000	15,400,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [25 orang x 13 kali]	325.0 OK	53,000	17,225,000	
	- Biaya Pembuatan Roll Banner	10.0 Buah	350,000	3,500,000	
	- Biaya Pembuatan Banner	2.0 Buah	350,000	700,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			36,600,000	RM
	- Biaya Narasumber Eksternal Setara Es. I [5 orang x 2 jam]	10.0 OJ	1,400,000	14,000,000	
	- Biaya Narasumber Eksternal Setara Es. II [5 orang x 2 jam]	10.0 OJ	1,000,000	10,000,000	
	- Biaya Narasumber Eksternal Setara Es. III [7 orang x 2 jam]	14.0 OJ	900,000	12,600,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V )			1,980,000	RM
	- Biaya Swab Antigen [20 org x 1 kali]	20.0 OK	99,000	1,980,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			6,100,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [16 org x 1 kali]	16.0 OK	100,000	1,600,000	
	- Biaya Transport Lokal [3 orang x 10 kali]	30.0 OK	150,000	4,500,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			137,430,000	RM
	> Workshop Peningkatan Kapasitas Asesor PMPRB			137,430,000	
	- Biaya Penggantian Transport Darat [55 org x 1 kali]	55.0 OK	300,000	16,500,000	
	- Biaya paket meeting fullboard (Pejabat setara Es I dan II) [10 org x 2 pkt]	20.0 OP	1,110,000	22,200,000	
	- Biaya paket meeting fullboard (Pejabat Eselon III ke bawah) [45 org x 2 pkt]	90.0 OP	822,000	73,980,000	
	- Biaya uang harian paket meeting fullboard [55 org x 3 hari]	165.0 OH	150,000	24,750,000	
<b>052</b>	<b>Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi</b>			<b>36,633,000</b>	<b>U</b>
<i>A</i>	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			<i>36,633,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			17,833,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 13 kali]	260.0 OK	22,000	5,720,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [20 orang x 11 kali]	220.0 OK	53,000	11,660,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan [1 pkt]	1.0 pkt	453,000	453,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			15,200,000	RM
	- Biaya Narasumber Eksternal Setara Es. II [4 orang x 2 jam]	8.0 OJ	1,000,000	8,000,000	
	- Biaya Narasumber Eksternal Setara Es. III [4 orang x 2 jam]	8.0 OJ	900,000	7,200,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			3,600,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [3 org x 8 kali]	24.0 OK	150,000	3,600,000	
<b>1614.EBD.974</b>	<b>Layanan Penyelenggaraan Kearsipan</b>	<b>1.0 Dokumen</b>		<b>439,433,000</b>	U
<b>051</b>	<b>Pelaksanaan Ketatusahaan dan Arsip</b>			<b>42,433,000</b>	
<b>A</b>	<b>TANPA SUB KOMPONEN</b>			<b>42,433,000</b>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			14,661,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 14 kali]	350.0 OK	22,000	7,700,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [25 orang x 5 kali]	125.0 OK	53,000	6,625,000	
	- Biaya penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	336,000	336,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			5,272,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	2,610,000	2,610,000	
	- Biaya bahan komputer	1.0 Paket	2,662,000	2,662,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			5,400,000	RM
	- Biaya Narasumber Eksternal Setara Es. III [1 orang x 6 jam]	6.0 OJ	900,000	5,400,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			17,100,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [3 org x 38 kali]	114.0 OK	150,000	17,100,000	
<b>052</b>	<b>Ketatausahaan dan Penguatan Substansi Teknis</b>			<b>397,000,000</b>	U
<b>A</b>	<b>Ketatausahaan dan Penguatan Substansi Teknis Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum</b>			<b>97,000,000</b>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			46,570,000	RM
	- Biaya Konsumsi Snack Rapat [30 Orang x 20 kali]	600.0 OK	22,000	13,200,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [30 Orang x 15 Kali]	450.0 OK	53,000	23,850,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	9,520,000	9,520,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			530,000	RM
	- Biaya Bahan Komputer	1.0 PKT	530,000	530,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V )			47,900,000	RM
	- Biaya Tiket PP [1 Orang x 6 Kali]	6.0 OK	3,000,000	18,000,000	
	- Biaya Uang Harian [1 Orang x 3 Hari x 6 kgt]	18.0 OH	400,000	7,200,000	
	- Biaya Penginapan [1 Orang x 2 Hari x 6 Kgt]	12.0 OH	1,500,000	18,000,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [1 Orang x 2 Kali x 4 Kgt]	8.0 OK	250,000	2,000,000	
	- Biaya Uang Representatif Eselon II [1 Orang x 3 Hari x 6 Kgt]	18.0 OH	150,000	2,700,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			2,000,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [2 Orang x 10 Kali x 1 Kgt]	20.0 OK	100,000	2,000,000	
<i>B</i>	<i>Ketatausahaan dan Penguatan Substansi Teknis Pusat Perencanaan Hukum</i>			100,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			15,844,000	RM
	- Biaya Konsumsi Snack Rapat [30 Orang x 9 kali]	270.0 OK	22,000	5,940,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [30 Orang x 6 Kali]	180.0 OK	53,000	9,540,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	364,000	364,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			3,417,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	2,417,000	2,417,000	
	- Bahan Komputer	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V )			297,000	RM
	- Biaya Pemeriksaan Antigen [3 Orang x 1 Kali x 1 kgt]	3.0 OK	99,000	297,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V )			66,492,000	RM
	- Biaya Tiket PP [1 Orang x 4 Kali]	4.0 OK	5,000,000	20,000,000	
	- Biaya Transport Darat [1 Orang x 2 Kali x 7 Kgt]	14.0 OK	250,000	3,500,000	
	- Biaya Uang Harian [1 Orang x 3 Hari x 18 kgt]	54.0 OH	480,000	25,920,000	
	- Biaya Penginapan [1 Orang x 2 Hari x 7 Kgt]	14.0 OH	1,000,000	14,000,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [1 Orang x 4 Kali x 2 Kgt]	8.0 OK	256,000	2,048,000	
	- Biaya Taksi Propinsi Tujuan [1 Orang x 4 Kali x 1 Kgt]	4.0 OK	256,000	1,024,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			13,950,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [1 Orang x 93 Kali]	93.0 OK	150,000	13,950,000	
<i>C</i>	<i>Ketatausahaan dan Penguatan Substansi Teknis Pusat Analisis dan Evaluasi</i>			100,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			14,250,000	RM
	- Biaya Konsumsi Snack Rapat [25 Orang x 12 kali]	300.0 OK	22,000	6,600,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	7,650,000	7,650,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V )			14,682,000	RM
	- Biaya Pengiriman Hasil-Hasil Kegiatan	400.0 PKT	36,705	14,682,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
**UNIT KERJA** (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**ALOKASI** Rp. 48,886,291,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			6,000,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	4,500,000	4,500,000	
	- Biaya pembelian bahan komputer	1.0 PKT	1,500,000	1,500,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V )			65,068,000	RM
	- Biaya Tiket PP [1 Orang x 9 Kali]	9.0 OK	2,900,000	26,100,000	
	- Biaya Uang Harian [38 Orang x 1 Hari x 1 kgt]	38.0 OH	400,000	15,200,000	
	- Biaya Penginapan	18.0 OH	1,100,000	19,800,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [3 Orang x 1 Kali x 1 Kgt]	3.0 OK	256,000	768,000	
	- Biaya Uang Representatif Eselon II [1 Orang x 3 Hari x 5 Kgt]	15.0 OH	150,000	2,250,000	
	- Biaya Taksi Propinsi Tujuan [1 Orang x 3 Kali x 1 Kgt]	3.0 OK	150,000	450,000	
	- Biaya Transport Darat	1.0 OK	500,000	500,000	
D	<i>Ketatausahaan dan Penguatan Substansi Teknis Pusat Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum</i>			100,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V )			25,600,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 6 kali]	120.0 OK	22,000	2,640,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [18 orang x 3 kali]	54.0 OK	53,000	2,862,000	
	- Biaya konsumsi snack konsultasi Anggota JDIH [7 orang x 125 kali]	875.0 OK	22,000	19,250,000	
	- Biaya penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	848,000	848,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V )			4,500,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	3,300,000	3,300,000	
	- Biaya Bahan Komputer	1.0 Paket	1,200,000	1,200,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V )			62,400,000	RM
	- Tiket PP [6 orang x 1 kali]	6.0 OK	3,700,000	22,200,000	
	- Biaya uang harian [12 orang x 3 hari x 1 kgt]	36.0 OH	450,000	16,200,000	
	- Biaya penginapan [6 orang x 2 hari x 1 kgt]	12.0 OH	1,500,000	18,000,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [6 orang x 2 kali x 1 kgt]	12.0 OK	250,000	3,000,000	
	- Biaya Taksi Propinsi Tujuan [6 orang x 1 kali x 1 kgt]	6.0 OK	300,000	1,800,000	
	- Biaya Uang Representatif [8 org x 1 hari x 1 kgt]	8.0 OH	150,000	1,200,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V )			7,500,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [5 orang x 5 kali x 2 kgt]	50.0 OK	150,000	7,500,000	

Jakarta, 13 Oktober 2023

- Catatan : 1. U = Komponen Utama  
 2. P = Komponen Penunjang  
 3. \* = Blokir

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

**Prof. Dr. Widodo Ekadjahjana, S.H., M.Hum**

NIP. 197105011993031001





**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

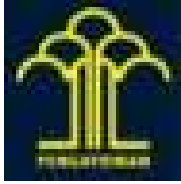
**BerAKHLAK**  
BerAKHLAK

**bangga  
melayani  
bangsa**



**LAMPIRAN**  
**ANGGARAN BELANJA**  
**TAMBAHAN (ABT)**

**BPJH HEBAT**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Jalan Mayjen Sutoyo No. 10, Cililitan Jakarta Timur  
Telepon : (021) 8091908, Faksimile : (021) 8002265  
Laman : [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id) Surel : [humas@bphn.go.id](mailto:humas@bphn.go.id)

Nomor : PHN.1-KU.01.02-79 23 Agustus 2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Data Dukung Revisi DIPA  
Anggaran Belanja Tambahan (ABT) TA 2023

Yth. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal  
Kementerian Hukum dan HAM  
di –  
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor: SEK.3-KU.01.02-242 tanggal 22 Agustus 2023 perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, bersama ini kami sampaikan data dukung revisi usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) TA 2023 pada Unit Badan Pembinaan Hukum Nasional berupa Belanja Barang dalam rangka Pelaksanaan JDIHN dan LDCC Awards pada kegiatan kehumasan BPHN sebesar Rp 1.557.108.000,- dan dalam rangka Supervisi Tindak Lanjut Penelitian Pagu Anggaran Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah TA 2024 sebesar Rp 137.758.000,- (data dukung terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Plt. Sekretaris,



Constantinus Kristomo  
NIP 197404111999031001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional RI;



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan  
Telepon (021) 525 3004 (8 saluran) Ext. 212, 222; Faksimile (021) 525 3159  
Laman: [www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id)

Nomor : SEK-KU.01.02-203  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Usulan Revisi Anggaran

1 September 2023

Yth. Direktur Jenderal Anggaran  
di Jakarta

1. Rujukan:

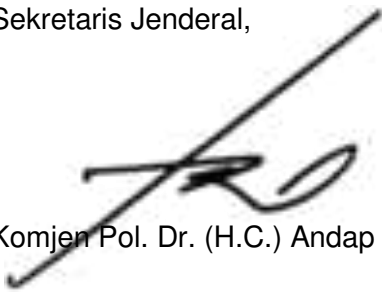
- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- d. DIPA Induk Sekretariat Jenderal (Pusat) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. SP DIPA-013.01.1.404233/2022 tanggal 30 November 2022 kode *Digital Stamp* DS: 0040-7073-9451-7331;
- e. DIPA Sekretariat Jenderal (Pusat) SP DIPA- 013.01.1.404233/2023 tanggal 22 Agustus 2023 kode *Digital Stamp* DS: 2615-6167-0205-1843;
- f. DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional SP DIPA-013.10.1.409288/2023 tanggal 24 Agustus 2023 kode *Digital Stamp* DS: 9052-0294-0491-0251;
- g. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu SP DIPA-013.01.2.409175/2023 tanggal 22 Agustus 2023 kode *Digital Stamp* DS: 1643-1741-5650-6100;
- h. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan SP DIPA- 013.01.2.408773/2023 tanggal 22 Agustus 2023 kode *Digital Stamp* DS: 4503-0545-3914-8740;
- i. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara SP DIPA- 013.01.2.408767/2023 tanggal 22 Agustus 2023 kode *Digital Stamp* DS: 3962-7780-2710-6721;
- j. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten SP DIPA-013.01.2.648999/2023 tanggal 22 Agustus 2023 kode *Digital Stamp* DS: 9721-9484-6321-0840;
- k. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat SP DIPA- 013.01.2.408736/2023 tanggal 23 Agustus 2023 kode *Digital Stamp* DS: 5360-8167-7917-3415;
- l. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta SP DIPA- 013.01.2.408720/2023 tanggal 28 Agustus 2023 kode *Digital Stamp* DS: 5495-1939-9005-4453;

- m. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur SP DIPA- 013.01.2.408751/2023 tanggal 29 Agustus 2023 kode *Digital Stamp* DS: 0224-2703-8856-4642;
  - n. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung SP DIPA- 013.01.2.649001/2023 tanggal 29 Agustus 2023 kode *Digital Stamp* DS: 0607-0002-0206-0642.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tema revisi:
    - 1) Perubahan rincian anggaran dan/atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap;
    - 2) Revisi administrasi:
      - i. Penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA;
      - ii. Pencantuman Catatan pada Halaman IVB DIPA berupa Gedung Bangunan dan Kendaraan Bermotor;
      - iii. Pemutakhiran Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
  - b. Tata cara revisi berupa pergeseran anggaran dalam 1 (satu) satuan kerja, antar satuan kerja, antar Eselon I dalam 1 (satu) Program Anggaran yang menimbulkan Rincian *Output* (RO) dalam rangka pemenuhan Belanja Operasional, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana internal dan pemenuhan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023.
3. Alasan/pertimbangan perlunya Revisi Anggaran:
- a. Pergeseran anggaran yang dilakukan dalam rangka pemenuhan Belanja Operasional, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana internal dan pemenuhan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023;
  - b. Pergeseran anggaran yang dilakukan dalam rangka pemenuhan Belanja Operasional, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana internal dan pemenuhan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023 guna meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas;
  - c. Pergeseran anggaran yang dilakukan menyebabkan perubahan pada volume rincian *output* (RO).
4. Berkaitan dengan hal tersebut, usulan Revisi Anggaran di atas dilampirkan data dukung berupa:
- a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir;
  - b. Arsip Data Komputer RKA-K/L DIPA Revisi;
  - c. Surat Persetujuan Eselon I;
  - d. Surat Pernyataan Eselon I;
  - e. Surat Pemberitahuan Perubahan RKA;
  - f. Surat Hasil Reviu (SHR);
  - g. RKBMN;
  - h. Analisa PUPR; dan
  - i. Data dukung terkait.

5. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,

  
Komjen Pol. Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Keuangan;
3. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan  
Telepon (021) 525 3004 (8 saluran) Ext. 212, 222; Faksimile (021) 525 3159  
Laman: [www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id)

---

Nomor : SEK-KU.01.02-204  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Persetujuan Revisi Anggaran

1 September 2023

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran  
di tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- d. Surat Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-79 tanggal 23 Agustus 2023 hal Penyampaian Data Dukung Revisi DIPA Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2023;
- e. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan nomor W.23-KU.01.02-518 tanggal 23 Agustus 2023 hal Usulan Revisi Penambahan Anggaran Belanja Operasional Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023
- f. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat nomor W.11-KU.01.02-9825 tanggal 24 Agustus 2023 hal Pemenuhan Data Dukung Revisi DIPA ABT TA. 2023;
- g. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten nomor W.12-KU.01.01 - 359 tanggal 24 Agustus 2023 hal Usulan Revisi Anggaran;
- h. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung Nomor W.7.KU.01.01-6020 tanggal 28 Agustus 2023 hal Usulan Revisi Anggaran;
- i. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu Nomor W8-KU.01.01-403 tanggal 28 Agustus 2023 hal Usul Revisi Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Berupa Genset;
- j. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara Nomor Surat W.2-KU.01.01-46892 tanggal 28 Agustus 2023 hal Usulan Revisi Anggaran;
- k. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur nomor W15.KU.01.02-549 tanggal 29 Agustus 2023 hal Usulan Revisi Anggaran;

- I. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta nomor W.10-KU.01.02-1033 tanggal 29 Agustus 2023 hal Usulan Permohonan Revisi DIPA Anggaran Belanja Tambahan (ABT) TA 2023.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Lingkup : 1. Perubahan rincian anggaran dan/atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap;  
2. Revisi Administrasi.
  - b. Program : Dukungan Manajemen;
  - c. Satker : Sekretariat Jenderal (404233)
    - Kegiatan : (1552) Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM  
(1554) Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM  
(1555) Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Program dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Berbasis Kinerja  
(1557) Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum dan HAM
    - Satker : Badan Pembinaan Hukum Nasional (409288)
      - Kegiatan : (1614) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN
    - Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu (409175)
      - Kegiatan : (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
    - Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (408767)
      - Kegiatan : (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
    - Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (649001)
      - Kegiatan : (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
    - Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten (648999)
      - Kegiatan : (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
    - Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur (408751)
      - Kegiatan : (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
    - Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (408736)
      - Kegiatan : (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
    - Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (408720)
      - Kegiatan : (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
    - Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (408773)
      - Kegiatan : (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

3. Pergeseran anggaran antar satuan kerja menyebabkan pengurangan pagu anggaran pada DIPA Unit Sekretariat Jenderal pada Kegiatan 1557.EBA.994.002 sebesar Rp4.302.095.000,00 dalam rangka pemenuhan Belanja Operasional, pemenuhan layanan sarana dan prasarana internal dan pemenuhan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No	KODE SATKER	NAMA SATKER	Pagu
			Selisih
1	409288	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	1,694,866,000
2	409175	KANWIL KEMENKUMHAM BENGKULU	405,000,000
3	408767	KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA UTARA	841,252,000
4	649001	KANWIL KEMENKUMHAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	80,704,000
5	648999	KANWIL KEMENKUMHAM BANTEN	353,792,000
6	408751	KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TIMUR	288,348,000
7	408736	KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT	158,325,000
8	408720	KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA	200,000,000
9	408773	KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI SELATAN	279,808,000
<b>TOTAL</b>			<b>4,302,095,000</b>

4. Pergeseran anggaran antar Kegiatan dalam 1 (satu) satuan kerja pada Sekretariat Jenderal berupa pemenuhan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Satuan Kerja		Belanja Barang		Total
		Operasional	Non Operasional	
1552.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat		700,000,000	700,000,000
1554.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		378,040,000	378,040,000
1555.EBA.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		852,034,000	852,034,000
1557.EBA.994	Layanan Perkantoran Setjen	(1,930,074,000)		(1,930,074,000)
<b>Total</b>		<b>(1,930,074,000)</b>	<b>1,930,074,000</b>	<b>-</b>



5. Pergeseran anggaran antar Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) dan antar Rincian *Output* (RO) dalam 1 (satu) Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) pada Sekretariat Jenderal berupa pemanfaatan sisa kontraktual dalam rangka pemeliharaan gedung dan kantor serta pemenuhan layanan sarana internal di Sekretariat Jenderal dengan rincian sebagai berikut:

KRO		Jenis Belanja		Total
		Belanja Barang Operasional	Belanja Modal	
1557.EBA.994.002.D	Pemeliharaan Peralatan Kantor	250,000,000		250,000,000
1557.EBB.951.053.A	Sarana Kantor		4,924,000,000	4,924,000,000
1557.EBB.971.051.C	Lanjutan Rehab Jalan Perumahan Gunung Sindur Kemenkumham		(5,174,000,000)	(5,174,000,000)
<b>Total</b>		<b>250,000,000</b>	<b>(250,000,000)</b>	<b>-</b>

6. Revisi Administrasi berupa:
- Penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA pada seluruh satuan kerja;
  - Pencantuman Catatan Halaman IVB DIPA pada satuan kerja:
    - Kantor Wilayah Jawa Timur;
    - Kantor Wilayah Sumatera Utara.
  - Pemutakhiran Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) pada Kantor Wilayah Sumatera Utara.
7. Dengan ini dinyatakan bahwa revisi anggaran berupa perubahan rincian anggaran dan/atau pergeseran rincian anggaran dalam pagu anggaran tetap serta Revisi Administrasi tersebut dapat disetujui.

Demikian untuk menjadi periksa.



Sekretaris Jenderal,

  
Komjen Pol. Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Tembusan:

- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Menteri Keuangan;
- Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan  
Telepon (021) 525 3004 (8 saluran) Ext. 212, 222; Faksimile (021) 525 3159  
Laman: [www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id)

---

**SURAT PERNYATAAN SEKRETARIS JENDERAL**  
**NOMOR SEK-KU.01.02-205**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Komjen Pol. Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui substansi usulan revisi anggaran yang diusulkan oleh:
  - a. Wisnu Nugroho Dewanto, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal berupa pergeseran anggaran dalam 1 (satu) satuan kerja, antar satuan kerja, antar Eselon I dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan Belanja Operasional, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana internal dan pemenuhan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023 yang menyebabkan pengurangan pagu sebesar Rp4.302.095.000,00 dan Revisi Administrasi;
  - b. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja, antar Eselon I dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1,694,866,000,00 dan Revisi Administrasi;
  - c. Liberti Sitinjak, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Sulawesi Selatan berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan Belanja Operasional sebesar Rp279.808.000,00 dan Revisi Administrasi;
  - f. Imam Suyudi, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan Belanja Operasional dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sebesar Rp841.252.000,00 dan Revisi Administrasi;
  - g. Harun Sulianto, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bangka Belitung berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan Belanja Operasional dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sebesar Rp80.704.000,00 dan Revisi Administrasi;
  - h. Hermansyah Siregar, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sebesar Rp405.000.000,00 dan Revisi Administrasi;

- i. Tejo Harwanto, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan Belanja Operasional sebesar Rp353.792.000,00 dan Revisi Administrasi;
  - j. R. Andika Dwi Prasetya, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sebesar Rp158.325.000,00 dan Revisi Administrasi;
  - k. Ibnu Chuldun, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan belanja operasional sebesar Rp200.000.000,00 dan Revisi Administrasi;
  - l. Imam Jauhari, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) Program Anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sebesar Rp288.348.000,00 dan Revisi Administrasi.
2. Usul revisi anggaran beserta dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah disusun dengan lengkap dan benar.
  3. Usul revisi anggaran ini telah diperhitungkan dengan seksama dan tidak mengakibatkan kekurangan belanja operasional untuk insentif WBK/WBBM pada tahun anggaran berjalan.
  4. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima segala resiko dan konsekuensinya sesuai dengan tugas dan wewenang saya.
  5. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.

Jakarta, 1 September 2023  
Sekretaris Jenderal,



Komjen Pol. Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan  
Telepon (021) 525 3004 (8 saluran) Ext. 212, 222; Faksimile (021) 525 3159  
Laman: [www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id)

Nomor : SEK-KU.01.02-206  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penetapan Perubahan Rencana Kerja (RKA)  
atas Revisi Anggaran

1 September 2023

Yth.

1. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
2. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional  
di Jakarta

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satker atas Revisi Anggaran telah ditetapkan dan pangkalan data RKA-K/L DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbaharui.
2. Dengan penetapan perubahan RKA ini, RKA Satker dimaksud berubah menjadi sebagai terlampir.
3. Bersama ini diusulkan Pengesahan Revisi Anggaran atas jenis revisi anggaran dalam rangka pemenuhan belanja operasional, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana internal dan pemenuhan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Asasi 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Komjen Pol. Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Keuangan;
3. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 12, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 2435 TELEPON (021) 3849315, FAKSIMILE (021) 3847157; SITUS [www.anggaran.kemenkeu.go.id](http://www.anggaran.kemenkeu.go.id)

Nomor : S-424/AG/AG.5/2023

7 September 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Pengesahan Usulan Revisi Pergeseran Anggaran Antar Unit Setjen Kemenkumham TA 2023

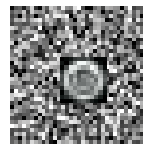
- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM  
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Sistem Perbendaharaan  
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran

Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK-KU.01.02-203 tanggal 1 September 2023 hal Usulan Revisi Anggaran, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Usulan Revisi Anggaran telah disahkan dan pangkalan data RKA-KL DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbaharui.
2. Dengan pengesahan Revisi Anggaran ini Kode Pengaman (*Digital Stamp*) DIPA Petikan yang digunakan sebagai dasar transaksi berubah menjadi sebagaimana terlampir.
3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala KPPN agar mengunduh PDF *File* DIPA Petikan Revisi sebagai dasar untuk mencetak DIPA Petikan Revisi.
4. Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta menerapkan prinsip kehati-hatian, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Direktur Jenderal Anggaran  
Direktur Anggaran Bidang Politik,  
Hukum, Pertahanan dan Keamanan,  
dan Bagian Anggaran Bendahara Umum  
Negara



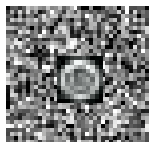
Ditandatangani secara elektronik  
Dwi Pudjiastuti Handayani

Tembusan:  
Terlampir



## DAFTAR TEMBUSAN

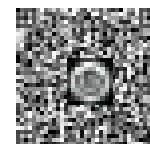
1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI
3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham
4. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung
8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur
12. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan



Lampiran II  
Nomor : S-424/AG/AG.5/2023  
Tanggal : 7 September 2023

**DAFTAR PERUBAHAN *DIGITAL STAMP*  
REVISI SETJEN KEMENKUMHAM**

NO	SATUAN KERJA	DIGITAL STAMP	
		SEMULA	MENJADI
<b>SEKRETARIAT JENDERAL</b>			
1	404233 SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	2615-6167-0205-1843	2073-2946-0468-5872
2	408720 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA	5495-1939-9005-4453	0902-4084-5600-8986
3	408736 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT	5360-8167-7917-3415	4442-5698-2048-2299
4	408751 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR	0224-2703-8856-4642	4032-6010-1666-7569
5	408767 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA	3962-7780-2710-6721	4660-4007-8457-8936
6	408773 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN	4503-0545-3914-8740	8230-4602-6506-6107
7	409175 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	1643-1741-5650-6100	6030-5043-0275-9957
8	648999 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN	9721-9484-6321-0840	7705-9075-3010-1579
9	649001 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0607-0002-0206-0642	4903-0070-5705-7164
<b>BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL</b>			
10	409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	9052-0294-0491-0251	9353-0871-4042-7366





**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

**BerAKHLAK<sup>2</sup>**  
BerAKHLAK<sup>2</sup>  
BerAKHLAK<sup>2</sup>

**#bangga  
melayani  
bangsa**



***LAMPIRAN***

***REALISASI***

***PENANGANAN***

***PANDEMI COVID-19***

**BPJH NEBAT**



**RINCIAN REALISASI BELANJA AKUN PENANGANAN COVID-19 ESELON I  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
PERIODE SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE AKUN	ANGGARAN REVISI	REALISASI	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	SISA DANA	PERSENTASE REALISASI
1	409207	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA	522192	396.000	0	0	0	396.000	0,00
2	409288	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	521131	30.268.000	30.202.573	0	30.202.573	65.427	99,78
			522192	722.000	405.000	0	405.000	317.000	56,09
<b>J U M L A H</b>				<b>31.386.000</b>	<b>30.607.573</b>	<b>0,00</b>	<b>30.607.573</b>	<b>778.427</b>	<b>97,52</b>



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

**BerAKHLAK<sup>2</sup>**

**# bangga  
melayani  
bangsa**



***LAMPIRAN***

***BERITA ACARA***

***OPNAME FISIK***



**BERITA ACARA PELAKSANAAN  
HASIL OPNAME FISIK BARANG PERSEDIAAN  
Nomor : PHNJI-PB.04.03-01**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami Tim Opname Fisik Barang Persediaan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional :

Nama : Anang Ardian Riza  
NIP : 197304092002121008  
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Nama : Numansyah  
NIP : 198308242006041001  
Jabatan : Petugas Gudang/Petugas Persediaan

Nama : Evi Imalia  
NIP : 198402022006042001  
Jabatan : Operator Persediaan

Menyatakan telah dilakukan opname fisik atas barang Persediaan dengan cara mencatat kuantitas dan kondisi barang persediaan pada satker Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tanggal 2 Januari 2024 dengan hasil ( rincian terdampir ).

Demikian berita acara ini dibuat sebagai bahan penyusunan pelaporan barang persediaan dan perekaman kedalam Aplikasi persediaan Semester II tahun 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 02 Januari 2024

Mengetahui,  
Petugas Gudang/Petugas Persediaan

Numansyah  
NIP 198308242006041001

Operator Persediaan

Evi Imalia  
NIP 198402022006042001



**LAMPIRAN BERITA ACARA**  
**OPNAME FISIK BARANG PERSEDIAAN PADA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
**PERIODE SEMESTER II TAHUN 2023**

No	Kode Barang	Uraian Barang	Jumlah	Satuan	Nilai	Kondisi
1	1010302004000020	Amplop coklat Kop BPHN Foli	5	Pas	582.500	Baik
2	1010302004000017	Amplop coklat Cabinet Points	17	Pas	550.100	Baik
3	1010302004000026	Amplop Putih Nomor 90	4	Dus	118.000	Baik
4	1010301001000049	Balpoint warna Zebra 0,5 Bku	1	Lusin	259.000	Baik
5	1010306010000009	Baterai AAA alkaline	30	Pcs	570.000	Baik
6	1010306010000010	Baterai Alkaline AA	29	Pcs	551.000	Baik
7	1010301003000047	Binder Clip No. 111	3	Dus	18.000	Baik
8	1010301999000039	Box File Karton	4	Buah	74.000	Baik
9	1010301999000041	Box File Plastik Foli	7	Buah	278.500	Baik
10	1010301005000036	Buku Agenda	83	Buah	20.584.000	Baik
11	1010301003000017	Buku agenda foto	10	Buah	195.000	Baik
12	1010301005000031	Buku Agenda Foli 100 Lir Kky	10	Buah	280.000	Baik
13	1010301003000002	Buku Agenda Foto	4	Buah	78.000	Baik
14	1010301005000018	Buku ekspedisi	10	Buah	139.000	Baik
15	1010301005000003	Buku Expedisi	10	Buah	160.000	Baik
16	1010301006000004	Business file dachi F4	1	Lusin	59.000	Baik
17	1010301004000014	Correction Pen CP-5201PT-Jyko	1	Buah	10.000	Baik
18	1010301008000002	Cutter Besar L-500	9	Buah	138.500	Baik
19	1010301010000029	Double tape 1 inch Jyko	3	Buah	25.500	Baik
20	1010304004000072	Epson T8642 CYAN	2	Buah	238.000	Baik
21	1010304004000073	Epson T8643 MAGENTA	4	Buah	476.000	Baik
22	1010304004000074	Epson T8643 YELLOW	4	Buah	476.000	Baik
23	1010304006000018	Flashdisk 128 GB Sandisk	1	Buah	238.000	Baik
24	1010304006000015	Flashdisk 16 GB Sandisk	4	Buah	380.000	Baik
25	1010304006000017	Flashdisk OTG 32 GB Sandisk	9	Buah	1.390.000	Baik
26	1010301008000013	Gunting kecil	7	Buah	83.000	Baik
27	1010301012000003	Head Machine Max HD 10 D (Stapler Kacil)	4	Buah	224.000	Baik
28	1010301006000008	Isi Cutter Besar L- 500	30	Tube	336.800	Baik
29	1010301013000007	Isi staples Kacil No. 10-16 max isi 20	5	Dus	371.250	Baik
30	1010301999000070	Joyco Tape Cutter 119	1	Buah	30.800	Baik
31	1010309999000000	Kalender	233	Buah	16.725.000	Baik
32	1010301999000064	Kalkulator	1	Buah	380.000	Baik
33	1010302501000028	Kertas HVS 80 Gr 80	215	Rim	13.096.500	Baik
34	1010302001000025	Kertas HVS 80 F4 80 Gr	50	Rim	3.745.000	Baik
35	1010301010000017	Lakban Hlam 2"	16	Buah	324.800	Baik
36	1010301011000034	Lem Fox Stick	4	Buah	61.600	Baik
37	1010301010000045	Lem UHU 35 Gram	5	Buah	112.500	Baik
38	1010302002000011	Lembar Disposisi	100	Buku	2.470.000	Baik
39	1010304010000001	Logitech Mouse Wireless M221	2	Buah	560.000	Baik
40	1010301006000050	Map Folder Ber Kop BPHN	2.200	Buah	43.120.000	Baik

41	1010301005000020	Ordner Bantex 1452 Pvc A5	14	Buah	554.000	Baik
42	1010301004000017	Penghapus Pencil Staedtler 5-26 5-20	5	Buah	126.000	Baik
43	1010301004000011	Penghapus pensil Staedtler 526-540	3	Buah	12.600	Baik
44	1010301001000010	Pensil 2B Staedtler	10	Lusin	470.800	Baik
45	1010301001000046	Pensil 2B Faber Castell	3	Lusin	172.200	Baik
46	1010301009000009	Plakat	41	Buah	18.435.000	Baik
47	1010304099000016	Pointer R 400 Logitech	1	Buah	587.000	Baik
48	1010302002000054	Post-it 3M 680-09 Sign Here	2	Buah	96.000	Baik
49	1010302002000045	Post-it 654	10	Palet	188.000	Baik
50	1010301001000039	Pulpen Ball Liner Bru Pitt	6	Lusin	1.251.600	Baik
51	1010301001000004	Pulpen Fester 08	3	Lusin	121.800	Baik
52	1010301001000037	Pulpen Gel K1 Karim	30	Lusin	1.590.000	Baik
53	1010301001000033	Pulpen Snowman pen V-5	5	Lusin	245.000	Baik
54	1010301999000037	Punch Pembolong kertas No.40 K1, Karim	2	Buah	56.000	Baik
55	1010301999000067	Reamer Pensil angul A-5 ( Karim)	2	Buah	117.600	Baik
56	1010301999000056	Remover Kertas	2	Buah	80.000	Baik
57	1010301010000031	Solarf Bering Damaru (12mm x 25cm)	4	Buah	22.400	Baik
58	1010301001000005	Spidol Art 70	1	Lusin	115.000	Baik
59	1010301001000032	Spidol Permanent Marker artline 70	5	Lusin	756.000	Baik
60	1010301001000017	Spidol whiteboard Atom	2	Lusin	208.000	Baik
61	1010301001000012	Staple box	14	Buah	224.000	Baik
62	1010301012000002	Stapler HD 10 Max	10	Buah	200.000	Baik
63	1010302002000066	Sticker Label Tork & Jerry No.120	10	Lembar	77.000	Baik
64	1010301006000040	Stap Map Push Berkep SP161	5	Palet	1.050.000	Baik
65	1010301010000021	Tape dispenser besar	3	Buah	86.100	Baik
66	1010301010000022	Tape dispenser kecil	3	Buah	64.500	Baik
67	1010304004000097	Tinta Epson 001 Black	15	Buah	3.045.000	Baik
68	1010304004000098	Tinta Epson 001 Cyan	10	Buah	1.400.000	Baik
69	1010304004000099	Tinta Epson 001 Magenta	12	Buah	1.680.000	Baik
70	1010304004000100	Tinta Epson 001 Yellow	11	Buah	1.540.000	Baik
71	1010304004000093	Tinta Epson 003 Black	12	Buah	1.428.000	Baik
72	1010304004000094	Tinta Epson 003 Cyan	12	Buah	1.428.000	Baik
73	1010304004000095	Tinta Epson 003 Magenta	11	Buah	1.308.000	Baik
74	1010304004000096	Tinta Epson 003 Yellow	10	Buah	1.190.000	Baik
75	1010304004000105	Tinta Epson 008 Black	3	Buah	1.062.000	Baik
76	1010304004000107	Tinta Epson 008 Cyan	3	Buah	621.000	Baik
77	1010304004000108	Tinta Epson 008 Magenta	3	Buah	621.000	Baik
78	1010304004000109	Tinta Epson 008 Yellow	3	Buah	621.000	Baik
79	1010304004000103	Tinta Epson 774   Epson M100	3	Buah	1.005.000	Baik
80	1010304004000090	Tinta HP 802 Colour	1	Buah	233.000	Baik
81	1010304004000007	Tinta Hp Laser Jet 12 A	2	Buah	3.240.000	Baik
82	1010301002000003	Tinta Stempel	11	Buah	107.600	Baik
83	1010304004000037	Toner HP Laser Jet 85A	1	Buah	1.510.000	Baik
84	1010304004000101	Toner HP Laserjet 79 A	1	Buah	1.490.000	Baik
85	1010301003000030	Trigonal Cijil no. 1 joko	3	Buah	70.500	Baik

86	1010314002000243	Acetylcystein 200 Mg @100 QNOV	200	Box	262.000	Bak
87	1010314005000022	Acyclovir 5% Salep	4	Tube	20.054	Bak
88	1010314002000178	Aleron	1	Box	34.000	Bak
89	1010314002000105	Allohex	2	Box	131.000	Bak
90	1010314002000245	Alloxes 10 Mg Tab @50	100	Tablet	131.000	Bak
91	1010314002000205	Aloprimol 100 MG Dua 100 Tab	1	Tablet	18.700	Bak
92	1010314002000246	Aloprimol 100 MG Dua 100 Tab @ 100 QEN	200	Gen	81.200	Bak
93	1010314002000247	Aloprimol 300 Mg @ 100 Hesa	200	Box	131.000	Bak
94	1010314005000043	Alodax Plus Gel 3 Ml	1	Tube	111.323	Bak
95	1010314001000082	Alodax Plus Spray 15 Ml	1	Tube	124.431	Bak
96	1010314002000179	Ambevan	1	Box	231.000	Bak
97	1010314099000115	Amg-Coh	5	Box	263.625	Bak
98	1010314001000086	Aquadet 25 Ml	1	Vial	9.054	Bak
99	1010314002000250	Arcoxia 120MG Tav@30	30	Tablet	735.750	Bak
100	1010314099000025	Articulating Paper	1	Box	126.540	Bak
101	1010314002000253	Alivastatin Calc 10mg Tablets	200	Box	524.000	Bak
102	1010314002000225	Alivastatin CALC 20 Mg Tab QHX	3	Box	838.500	Bak
103	1010314002000254	Alivastatin Calc 20MG Tab QHX	200	Box	651.400	Bak
104	1010314005000020	Balsam Tetan	1	Pot	13.085	Bak
105	1010314002000236	Benzocetan 500 Mg @ 100	1	Cap	131.000	Bak
106	1010314002000255	Benoxan 500MG CAP@100	200	Cap	262.000	Bak
107	1010314001000008	Betadine 60ml	1	Bottle	50.200	Bak
108	1010314005000016	Betazono N Salep	12	Box	233.412	Bak
109	1010314005000009	Bioplasento Gel	1	Tube	34.055	Bak
110	1010314002000250	Blue Hard Stone	1	Box	36.000	Bak
111	1010314002000259	Cavitas Kaplet @ 100 (ERELA)	200	Kaplet	183.400	Bak
112	1010314002000134	Cavit D3	1	Box	318.500	Bak
113	1010314002000252	Cefixime 300mg Caps@100 QDX	100	Box	480.300	Bak
114	1010314002000091	Cefiximetab 100 mg	2	Box	370.200	Bak
115	1010314001000029	Cendu LFX tetes mata	5	Bottle	178.465	Bak
116	1010314002000204	Ceftriaxone 10 MG Dua 30 Tab	6	Dua	86.458	Bak
117	1010314001000085	Chem Dental Poland NaCl 2.35% + Surfactant25	1	Bottle	198.690	Bak
118	1010314001000058	Chim Ghomas	1	Bottle	65.000	Bak
119	1010314099000018	Cotton Roll No 2 3	2	Box	189.990	Bak
120	1010314002000260	Demacolin	200	Tablet	130.000	Bak
121	1010314899000125	Disposable Syringe 3 Cc	5	Pcs	22.920	Bak
122	1010314002000232	Dolofen -F tab @100	1	Box	106.000	Bak
123	1010314005000004	Efanicetin (salep mata)	4	Tube	49.772	Bak
124	1010314001000009	Euganol	1	Bottle	55.000	Bak
125	1010314002000106	Exallam Tab 25mg	2	Box	238.800	Bak
126	1010314004000001	Fletcher	1	Box	27.500	Bak
127	1010314002000263	Fluxitar 500mg Tab@100	200	Tablet	177.200	Bak
128	1010314005000008	Farmyco Salep	4	Tube	101.640	Bak
129	1010314001000072	Forumet Tetes telinga	1	Bottle	30.000	Bak
130	1010314899000035	Fuji 8	1	Box	1.205.127	Bak

131	1010314002000097	Gastrusid Tab	3	Box	161.100	Bak
132	1010314002000096	Halgo 6mg KPL@50	250	Tablet	211.750	Bak
133	1010314005000040	Hydrocortisone 2-FLACRIDUS 24TUBE@ 5 Gr	18	Dus	81.523	Bak
134	1010314999000139	Infasel	1	Pcs	22.267	Bak
135	1010314001000050	Insta Eye Drops 7.0 ml Hjar	2	Botol	34.000	Bak
136	1010314001000048	Insta most	1	Fls	15.063	Bak
137	1010314002000024	Intunal F	4	Box	360.200	Bak
138	10103140020000267	Intesartan 300mg@20 GMV	40	Tablet	181.000	Bak
139	1010314999000136	K-File No 45-50/25 mm	1	Box	154.200	Bak
140	10103140020000268	Kalmethasone 0.5MG TAB@200	200	Tablet	28.800	Bak
141	1010314002000124	Kalmes	2	Tablet	10.400	Bak
142	1010314009000044	K-File 30	1	Kotak	165.000	Bak
143	1010314999000005	K-File No. 15	2	Box	325.600	Bak
144	1010314999000006	K-File No 20	1	Box	162.600	Bak
145	1010314999000007	K-File No 25	1	Box	165.000	Bak
146	1010314002000079	Lansoprazole Tab	4	Box	128.800	Bak
147	1010314002000148	Meloxicam 15MG	1	Box	125.300	Bak
148	1010314002000271	Methyl Prednisolon 6mg ODX	100	Tablet	89.700	Bak
149	1010314001000094	Minoxep 2% 50 ML	4	Botol	151.608	Bak
150	1010304004000074	Minyak Kayu Putih	18	Botol	280.962	Bak
151	1010314001000071	Minyak Tawon DO	3	Botol	105.665	Bak
152	1010314002000072	Mucoherm 8Mg Tab@100	400	Tablet	268.400	Bak
153	1010314001000096	Nadi Widatra 500 ML	1	Botol	9.054	Bak
154	1010314001000104	Nasalin Daily Nasal Hygiene	1	Botol	144.078	Bak
155	1010314002000111	Natur E	4	Botol	144.000	Bak
156	1010314001000005	OBH Intesael	22	Botol	132.266	Bak
157	1010314002000078	Omeprazole Tab	25	Box	881.250	Bak
158	1010314002000160	Ondansetron 8mg	11	Box	397.716	Bak
159	1010314999000081	One swala 2 Fly	3	Box	36.000	Bak
160	1010314002000276	Piroxicam 20mg (Dus 100 Tab)-LJH	100	Box	26.500	Bak
161	1010314999000109	Ploasa Eucalyptus	12	Pcs	154.518	Bak
162	1010314999000118	Ploasa Red Hot	15	Pcs	163.075	Bak
163	1010314002000186	Propranolol	1	Box	24.000	Bak
164	1010314001000097	Ringer laktal 500 ML	1	Botol	19.883	Bak
165	1010314999000096	Salva	1	Pak	55.500	Bak
166	1010314001000003	Sanaeryl	62	Botol	1.188.564	Bak
167	1010314002000099	Sannul 500gr	2	Box	110.000	Bak
168	1010314002000278	Scopma Plus Tab	300	Box	349.300	Bak
169	1010314002000080	Scopma Tab	3	Box	489.000	Bak
170	1010314001000080	Solo Tolet Angin + madu @ 12 Sachet	2	Box	122.866	Bak
171	1010314999000142	Sput 1 Ct	1	Pcs	1.114	Bak
172	1010314999000001	Sput 5 cc	3	Box	13.752	Bak
173	10103140020000234	Titan 150 Mg Tab @ 100	8	Box	395.000	Bak
174	1010314999000123	Transifa 8 Braun	3	Pcs	70.729	Bak
175	1010314002000281	Tremenza Tab@100	100	Tablet	203.100	Bak
176	1010314999000131	Verdent Diamond Sur 314.016.524.012	1	Pcs	176.400	Bak

177	1010314099000133	Vandem Diamond Bar 314.197.534.014	1	Pcs	176.490	Bak
178	1010314099000130	Vandem Diamond Bar 314.494.534.010	1	Pcs	176.490	Bak
179	1010314002000046	Vesperum	1	Bks	37.600	Bak
180	1010314002000082	Volladex 50mg Tab(50)	300	Tablet	196.500	Bak
181	1010314099000016	Z350 XT A3.5B	1	Buah	576.298	Bak
<b>JUMLAH</b>			<b>7.477</b>		<b>181.078.570</b>	

Jakarta, 02 Januari 2024

Mengetahui,  
Petugas Gudang/Petugas Persediaan



Numanayah  
NIP 198308242006041001

Operator Persediaan



Evi Imalia  
NIP 198402022006043001







**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**



***LAMPIRAN***  
***RINCIAN PRIORITAS***  
***NASIONAL***

**RINCIAN PROGRAM PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
PERIODE SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

No.	Nama Satker	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
1	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	2.672.000.000	2.577.000.000	96,44	Orang/Kasus	381	415	96,44
	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	530.728.000	518.204.800	97,64	Kegiatan	50	57	97,64
2	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	4.006.000.000	3.990.000.000	99,60	Orang/Kasus	572	1116	100
	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	677.382.000	655.931.200	96,83	Kegiatan	64	200	100
3	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	4.789.000.000	4.776.200.000	99,73	Orang/Kasus	684	1026	100
	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	747.743.000	736.202.450	98,46	Kegiatan	70	105	100
4	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	5.389.000.000	5.325.500.000	98,82	Orang/Kasus	769	769	98,82
	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	1.126.730.000	1.104.520.000	98,03	Kegiatan	106	106	98,03
5	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	2.816.000.000	2.799.670.000	99,42	Orang/Kasus	402	802	100
	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	525.105.000	488.519.000	93,03	Kegiatan	49	85	100
6	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	2.575.000.000	2.573.000.000	99,92	Orang/Kasus	367	734	100
	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	505.490.000	504.536.000	99,81	Kegiatan	48	96	100
7	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDA ACEH	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	1.721.000.000	1.715.000.000	99,65	Orang/Kasus	245	581	100
	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDA ACEH	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	325.780.000	319.220.000	97,99	Kegiatan	30	60	100
8	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	1.001.000.000	986.000.000	98,50	Orang/Kasus	142	254	100
	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	148.067.000	147.322.000	99,50	Kegiatan	14	28	100

**RINCIAN PROGRAM PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
PERIODE SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

No.	Nama Satker	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
9	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	1.101.000.000	1.100.000.000	99,91	Orang/Kasus	157	314	100
	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	217.730.000	215.770.000	99,10	Kegiatan	20	40	100
10	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALEMBANG	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	1.089.000.000	1.069.000.000	98,16	Orang/Kasus	155	228	100
	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALEMBANG	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	251.796.000	248.826.370	98,82	Kegiatan	24	60	100
11	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	1.081.000.000	1.080.000.000	99,91	Orang/Kasus	154	154	100
	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	212.860.000	210.501.000	98,89	Kegiatan	20	20	100
12	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	325.000.000	323.000.000	99,38	Orang/Kasus	46	46	100
	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	59.480.000	56.870.000	95,61	Kegiatan	11	11	100
13	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	627.000.000	626.000.000	99,84	Orang/Kasus	89	267	100
	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	94.100.000	94.099.900	100,00	Kegiatan	8	24	100
14	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	1.477.000.000	1.475.000.000	99,86	Orang/Kasus	210	468	100
	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	252.070.000	249.003.500	98,78	Kegiatan	23	27	100
15	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MANADO	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	561.000.000	548.030.000	97,69	Orang/Kasus	80	100	100
	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MANADO	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	96.490.000	92.180.000	95,53	Kegiatan	9	20	100
16	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	490.000.000	489.000.000	99,80	Orang/Kasus	69	69	100
	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	134.620.000	133.370.000	99,07	Kegiatan	12	12	100

**RINCIAN PROGRAM PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
PERIODE SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

No.	Nama Satker	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
17	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	998.000.000	997.000.000	99,90	Orang/Kasus	142	410	100
	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	134.640.000	133.077.300	98,84	Kegiatan	12	80	100
18	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	411.000.000	411.000.000	100,00	Orang/Kasus	58	108	100
	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	89.830.000	88.669.000	98,71	Kegiatan	8	16	100
19	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	391.000.000	390.000.000	99,74	Orang/Kasus	55	75	100
	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	53.150.000	53.060.000	99,83	Kegiatan	5	10	100
20	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	1.408.000.000	1.395.000.000	99,08	Orang/Kasus	201	527	99,8
	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	199.980.000	197.210.000	98,61	Kegiatan	19	57	98,61
21	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	1.029.000.000	1.026.000.000	99,71	Orang/Kasus	146	326	100
	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	160.550.000	157.807.000	98,29	Kegiatan	15	62	100
22	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	1.715.000.000	1.705.000.000	99,42	Orang/Kasus	244	444	100
	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	309.260.000	309.260.000	100,00	Kegiatan	29	58	100
23	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	523.000.000	523.000.000	100,00	Orang/Kasus	74	74	100
	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	106.300.000	106.060.000	99,77	Kegiatan	9	9	100
24	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	1.287.000.000	1.284.000.000	99,77	Orang/Kasus	183	230	100
	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	168.048.000	163.625.000	97,37	Kegiatan	15	15	100

**RINCIAN PROGRAM PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
PERIODE SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

No.	Nama Satker	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
25	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	1.241.000.000	1.240.000.000	99,92	Orang/Kasus	177	450	100
	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	209.790.000	206.337.500	98,35	Kegiatan	19	50	100
26	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	1.656.000.000	1.616.000.000	97,58	Orang/Kasus	236	236	100
	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	287.490.000	280.225.000	97,47	Kegiatan	27	27	100
27	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	1.697.000.000	1.693.000.000	99,76	Orang/Kasus	242	596	100
	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	291.220.000	287.110.000	98,59	Kegiatan	27	124	100
28	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	646.000.000	645.000.000	99,85	Orang/Kasus	92	172	100
	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	87.688.000	87.573.000	99,87	Kegiatan	8	16	100
29	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	804.000.000	803.000.000	99,88	Orang/Kasus	108	258	100
	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	117.170.000	114.660.000	97,86	Kegiatan	11	14	100
30	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	915.000.000	914.810.000	99,98	Orang/Kasus	130	260	100
	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	159.650.000	159.650.000	100,00	Kegiatan	15	45	100
31	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	341.000.000	340.000.000	99,71	Orang/Kasus	43	61	100
	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	34.863.000	31.377.159	90,00	Kegiatan	3	5	93
32	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	514.000.000	514.000.000	100,00	Orang/Kasus	73	88	100
	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	81.890.000	81.890.000	100,00	Kegiatan	7	8,4	100

**RINCIAN PROGRAM PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
PERIODE SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

No.	Nama Satker	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
33	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	576.000.000	576.000.000	100,00	Orang/Kasus	82	232	100
	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	95.630.000	95.610.000	99,98	Kegiatan	9	38	100
<b>J U M L A H</b>			<b>56.365.320.000</b>	<b>55.853.487.179</b>	<b>99,09</b>				



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

**BerAKHLAK**  
berakhlak berkeadilan  
**bangga**  
melayani  
bangsa



***LAMPIRAN***

***MEMO***

***PENYESUAIAN***

**EPHN HEBAT**  
Badan Pembinaan Hukum Nasional

# MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 No. Dokumen : 001  
 Tanggal : 02 Januari 2023  
 Tahun Anggaran : 2023  
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian atas Pendapatan Diterima Dimuka

**Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaiaan Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :**

1	√	Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32		Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	9.358.395	-
2	K	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	9.358.395

Keterangan:  
 Jurnal balik Awal Tahun Pendapatan diterima dimuka atas sewa kantin

Dibuat oleh :  
 Petugas Verifikasi/Akuntansi



Rizky Awaliyah

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 02 Januari 2023

Disetujui oleh :  
 Analis Pengelolaan Keuangan APBN  
 Ahli Muda



Yustisia Smarayoni

NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 02 Januari 2023

Direkam oleh :  
 Petugas Komputer



Ratna Jamilah

NIP. 19860321 201712 2 001

Tanggal : 02 Januari 2023



# MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
No. Dokumen : 002  
Tanggal : 18 Januari 2023  
Tahun Anggaran : 2023  
Keterangan : Jurnal Penyesuaian atas Beban yang Masih Harus Dibayar

## Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1		Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4	√	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32		Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212112	Belanja Barang yang masih Harus Dibayar	67.159.197	-
2	K	522111	Beban Langganan Listrik	-	67.159.197

### Keterangan:

Jurnal balik Pembayaran Utang Listrik bulan Desember T.A. 2022 dengan No ID 547100163555

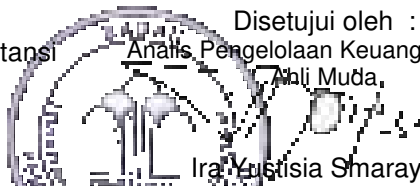
Dibuat oleh :  
Petugas Verifikasi/Akuntansi

  
Rizky Awalyan

NIP. 19830228 200901 2 004  
Tanggal : 18 Januari 2023

Disetujui oleh :

Analisis Pengelolaan Keuangan APBN

  
Ira Yustisia Smarayoni

NIP. 19780313 200312 2 001  
Tanggal : 18 Januari 2023

Direkam oleh :

Petugas Komputer

  
Ratna Jamilah

NIP. 19860321 201712 2 001  
Tanggal : 18 Januari 2023

## MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 No. Dokumen : 003  
 Tanggal : 18 Januari 2023  
 Tahun Anggaran : 2023  
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian atas Beban yang Masih Harus Dibayar

**Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :**

1		Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4	√	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32		Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	39.189.068	-
2	K	522111	Beban Langganan Listrik	-	39.189.068

**Keterangan:**

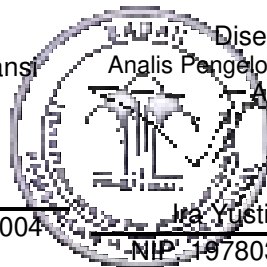
Jurnal Balik Pembayaran Utang Listrik II bulan Desember T.A. 2022 dengan nomor ID 5471100717100 dan 547102931079

Dibuat oleh :  
Petugas Verifikasi/Akuntansi


  
Rizky Awaliyah

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 18 Januari 2023



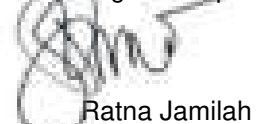
Disetujui oleh :  
Analis Pengelolaan Keuangan APBN  
Ahli Muda

  
Wa Yustisia Smarayoni

NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 18 Januari 2023

Direkam oleh :  
Petugas Komputer

  
Ratna Jamilah

NIP. 19860321 201712 2 001

Tanggal : 18 Januari 2023

## MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 No. Dokumen : 004  
 Tanggal : 06 Februari 2023  
 Tahun Anggaran : 2023  
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian atas Beban yang Masih Harus Dibayar

**Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :**

1		Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4	√	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32		Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	1.065.020	-
2	K	522112	Beban Langganan Telepon	-	1.065.020

Keterangan:  
 Jurnal balik pembayaran Utang Telepon Bulan Desember 2022

Dibuat oleh :  
 Petugas Verifikasi/Akuntansi

  
 Rizky Awaliyah

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 06 Februari 2023

Disetujui oleh :  
 Analis Pengelolaan Keuangan APBN  
 Ahli Muda



Ita Yustisia Smarayoni

NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 06 Februari 2023

Direkam oleh :  
 Petugas Komputer

  
 Ratna Jamilah

NIP. 19860321 201712 2 001

Tanggal : 06 Februari 2023

# MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 No. Dokumen : 005  
 Tanggal : 31 Desember 2023  
 Tahun Anggaran : 2023  
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian atas Pendapatan Diterima Dimuka

**Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaiaan Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :**

1	√	Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32		Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	27.547.806	-
2	K	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	-	27.547.806

Keterangan:  
 Jurnal pengakuan pendapatan diterima dimuka atas sewa kantin BPHN TA 2023

Dibuat oleh :  
 Petugas Verifikasi/Akuntansi



Rizky Awaliyah

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui oleh :  
 Analis Pengelolaan Keuangan APBN  
 Ahli Muda

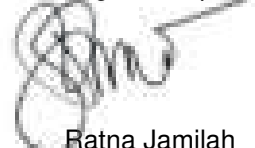


Yustisia Smarayoni

NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam oleh :  
 Petugas Komputer



Ratna Jamilah

NIP. 19860321 201712 2 001

Tanggal : 31 Desember 2023

# MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 No. Dokumen : 006  
 Tanggal : 31 Desember 2023  
 Tahun Anggaran : 2023  
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian atas Pengajuan BAST RPATA untuk SPM pembayaran Desember 2023 yang akan dilanjutkan pembayaran/ SP2D di 2024

**Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :**

1		Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30	√	Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32		Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	218111	Utang yang belum diterima tagihannya	589.375.493	-
2	K	212191	Utang kepada pihak ketiga lainnya	-	589.375.493

Keterangan:  
 Jurnal Penyesuaian atas Pengajuan BAST RPATA untuk SPM pembayaran Desember 2023 yang akan dilanjutkan pembayaran/ SP2D di 2024

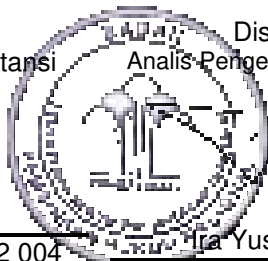
Dibuat oleh :  
 Petugas Verifikasi/Akuntansi



Rizky Awaliyah

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 31 Desember 2023



Disetujui oleh :  
 Analis Pengelolaan Keuangan APBN  
 Ahli Muda



Ira Yustisia Smarayoni

NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam oleh :  
 Petugas Komputer



Ratna Jamilah

NIP. 19860321 201712 2 001

Tanggal : 31 Desember 2023

## MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 No. Dokumen : 007  
 Tanggal : 31 Desember 2023  
 Tahun Anggaran : 2023  
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian atas Beban yang masih harus dibayar

### Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1		Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4	√	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32		Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522111	Beban Langganan Listrik	59.552.282	-
2	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	59.552.282

Keterangan:  
 Jurnal utang listrik I Bulan Desember 2023 yang dibayar bulan Januari 2024 dengan No. ID 547100163555

Dibuat oleh :  
Petugas Verifikasi/Akuntansi



Rizky Awaliyah

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui oleh :  
 Analis Pengelolaan Keuangan APBN  
 Ahli Muda

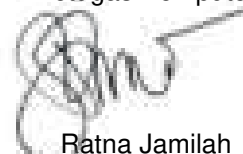


Justisia Smarayoni

NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam oleh :  
 Petugas Komputer



Ratna Jamilah

NIP. 19860321 201712 2 001

Tanggal : 31 Desember 2023

## MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 No. Dokumen : 008  
 Tanggal : 31 Desember 2023  
 Tahun Anggaran : 2023  
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian atas Beban yang masih harus dibayar

### Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1		Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4	√	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32		Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522111	Beban Langganan Listrik	37.728.322	-
2	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	37.728.322

Keterangan:  
 Jurnal utang listrik II Bulan Desember 2023 yang dibayar bulan Januari 2024 dengan No. ID 547100717100 dan 547102931079

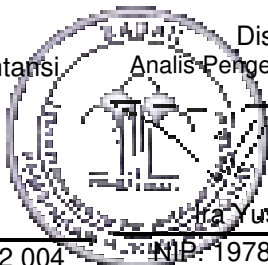
Dibuat oleh :  
Petugas Verifikasi/Akuntansi



Rizky Awaliyah

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 31 Desember 2023



Disetujui oleh :  
Analis Pengelolaan Keuangan APBN  
Ahli Muda

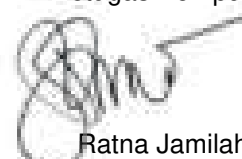


Anissa Yustisia Smarayoni

NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam oleh :  
Petugas Komputer



Ratna Jamilah

NIP. 19860321 201712 2 001

Tanggal : 31 Desember 2023

## MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 No. Dokumen : 009  
 Tanggal : 31 Desember 2023  
 Tahun Anggaran : 2023  
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian atas Beban yang masih harus dibayar

### Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1		Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4	√	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32		Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522112	Beban Langganan Telepon	972.858	-
2	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	972.858

Keterangan:  
 Jurnal utang telepon Bulan Desember 2023 yang dibayar bulan Januari 2024

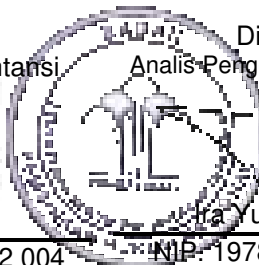
Dibuat oleh :  
Petugas Verifikasi/Akuntansi



Rizky Awaliyah

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 31 Desember 2023



Disetujui oleh :  
Analis Pengelolaan Keuangan APBN  
Ahli Muda



Yustisia Smarayoni

NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam oleh :  
Petugas Komputer



Ratna Jamilah

NIP. 19860321 201712 2 001

Tanggal : 31 Desember 2023



# MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Wilayah : (0700) Sumatera Utara  
 Satuan Kerja : (408769) Kanwil Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara di Medan  
 No. Dokumen : 01  
 Tanggal : 30 Juni 2023  
 Tahun Anggaran : 2023  
 Keterangan : Jurnal Koreksi

**Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :**

1		Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31	√	Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32		Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	18,030,000	
2.	K	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		18,030,000

Keterangan:  
 Jurnal Koreksi atas kode barang buku lainnya ke Monografi sebanyak 75 buku

Dibuat oleh :  
 Petugas Verifikasi/Akuntansi



Corry Simangunsong

NIP 198911152020122001

Tanggal : 30 Juni 2023

Disetujui oleh :  
 Kuasa Pengguna Anggaran



Imam Suyudi

NIP 196312071987031001

Tanggal : 30 Juni 2023

Direkam oleh :  
 Operator Saiba



Corry Simangunsong

NIP 198911152020122001

Tanggal : 30 Juni 2023

# MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : (409298) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 No. Dokumen : 010  
 Tanggal : 31 Desember 2023  
 Tahun Anggaran : 2023  
 Keterangan : Jumlah Penyesuaian atas Koreksi beban atas kelebihan pembayaran

**Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :**

1	Pendapatan Diterima Di Muka	17	Transfer Masuk
2	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18	Transfer Keluar
3	Belanja Dibayar Di Muka	19	Koreksi Beban Aset
4	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20	Pendapatan dan Alokasi APBN-BLU
5	Penyisihan Piutang	21	Kas Lainnya di BLU
6	Penghapusan Piutang	22	Uang Muka Belanja
7	Penyusutan Aset	23	Perolehan Aset
8	Kas Di Bendahara Penerimaan	24	Koreksi Piutang/piutang
9	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25	Hibah Langsung
10	Persediaan	26	
11	Koreksi Antar Beban	27	
12	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28	
13	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29	
14	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30	Penyesuaian Neraca
15	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31	Jurnal Koreksi
16	Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32	Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	115212	Piutang Lainnya	12.068.375	-
2	K	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	-	12.068.375

**Keterangan:**

Koreksi beban atas kelebihan pembayaran outsourcing dan telah diartikan ke kas negara pada 2024.

Dibuat oleh :  
Petugas Verifikasi/Akuntansi



Rizky Ananyah

NIP. 19830309 200901 2 004

Tanggal : 31 Desember 2023



Ditabuli oleh :  
Analis Pengelolaan Keuangan APBN  
Ahli Muda

Ika Yulia Sinarayani

NIP. 19830313 200312 2 001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam oleh :  
Petugas Komputer



Rizki Jannah

NIP. 19860221 201712 2 001

Tanggal : 31 Desember 2023

## MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 No. Dokumen : 011  
 Tanggal : 31 Desember 2023  
 Tahun Anggaran : 2023  
 Keterangan : Jumlah Penyesuaian atas Penyisihan piutang lainnya atas Koreksi beban

**Kategori Jumlah Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :**

1	Pendapatan Diterima Di Muka	17	Transfer Masuk
2	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18	Transfer Keluar
3	Belanja Dibayar Di Muka	19	Koreksi Beban Aset
4	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20	Pendapatan dari Akkasi APBN-BLU
5	Penyisihan Piutang	21	Kas Lainnya di BLU
6	Penghapusan Piutang	22	Uang Muka Belanja
7	Penyusutan Aset	23	Perolehan Aset
8	Kas Di Bendahara Penerimaan	24	Koreksi Piutang/piutang
9	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25	Hibah Langsung
10	Persediaan	26	
11	Koreksi Antar Beban	27	
12	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28	
13	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29	
14	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30	Penyesuaian Neraca
15	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31	Jumlah Koreksi
16	Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32	Jumlah Umum

No.	DIR	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	554212	Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	60.342	-
2	K	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	-	60.342

**Keterangan:**

Penyisihan piutang lainnya atas Koreksi beban atas temuan pengembalian Belanja Barang yang tidak sesuai ketentuan.

Dibuat oleh :  
Petugas Verifikasi/Akuntansi

  
Rizky Ananyah

NIP. 19830228 200901 2 004  
Tanggal : 31 Desember 2023

Dipertanggungjawabkan oleh :  
Instansi Pengawasan Keuangan APBN  
ASN Muda

  
Rita Yuliana Simanungkalit  
NIP. 19780313 200312 2 001  
Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam oleh :  
Petugas Komputer

  
Rully Zamzani

NIP. 19840321 201712 2 001  
Tanggal : 31 Desember 2023

# MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : (403208) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 No. Dokumen : 013  
 Tanggal : 31 Desember 2023  
 Tahun Anggaran : 2023  
 Keterangan : Jurnal Koreksi atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan

Kategori Jumlah Penyesuaian/Jumlah Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jumlah Umum :

1		Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31	✓	Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32		Jumlah Umum

No.	Dirk	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	115212	Piutang Lainnya	47.080.355	-
2	K	301116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	47.080.355

**Keterangan:**

Koreksi atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lantai 2 Gedung Annex, Ruang Kerja Pimpinan Gedung SIDI dan Ruang Kerja Pimpinan Gedung Induk Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Dibuat oleh :  
Petugas Verifikasi/Auditor



Rizky Awalyah

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 31 Desember 2023

Ditutupi oleh :  
Analis Pengelompokan Keuangan APBN  
and Monev



Ita Yustika Smarayoni

NIP. 19850513 200312 2 001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam oleh :  
Petugas Komputer



Ratih Jariyah

NIP. 19880301 201712 2 001

Tanggal : 31 Desember 2023

# MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : (409298) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 No. Dokumen : 013  
 Tanggal : 31 Desember 2023  
 Tahun Anggaran : 2023  
 Keterangan : Jumlah Penyesuaian atas Penyisihan Piutang lainnya atas Koreksi Aset atas kelebihan pembayaran

**Kategori Jumlah Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :**

1	Pendapatan Diterima Di Muka	17	Transfer Masuk
2	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18	Transfer Keluar
3	Belanja Dibayar Di Muka	19	Koreksi Beban Aset
4	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20	Pendapatan dan Alokasi APBN-BLU
5	Penyisihan Piutang	21	Kas Lainnya di BLU
6	Penghapusan Piutang	22	Utang Muka Belanja
7	Penyusutan Aset	23	Perolehan Aset
8	Kas Di Bendahara Penerimaan	24	Koreksi Piutang/utang
9	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25	Hibah Langsung
10	Persediaan	26	
11	Koreksi Antar Beban	27	
12	Pendapatan Selisih Kurs Batas Tersalisasi	28	
13	Beban Selisih Kurs Batas Tersalisasi	29	
14	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30	Penyesuaian Neraca
15	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31	Jurnal Koreksi
16	Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32	Jurnal Umum

No.	DK	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	504212	Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	235.402	-
2	K	116212	Penyisihan Utang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	-	235.402

**Keterangan:**

Penyisihan Piutang lainnya atas Koreksi Aset atas kelebihan pembayaran Belanja Modal yang tidak sesuai ketentuan.

Dibuat oleh :  
Petugas Verifikasi/Akuntansi



Rizky Awwalyah

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui oleh :  
Analis Pengawasan Keuangan APBN



Thea Yustina Suryaningrum

NIP. 19790313 200312 2 001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam oleh :  
Petugas Komputer



Ratna Dilyah

NIP. 19890321 201712 2 001

Tanggal : 31 Desember 2023



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**



***LAMPIRAN***

***REALISASI***

***BANTUAN HUKUM***

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BANTUAN HUKUM DI KANTOR WILAYAH  
PERIODE 01 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023**

No	KANWIL	LAYANAN BANTUAN HUKUM PERSEORANGAN (LITIGASI)				LAYANAN BANTUAN HUKUM KEL. MASYARAKAT (NON LITIGASI)				TOTAL LAYANAN BANTUAN HUKUM			
		PAGU	REALISASI	%	SISA	PAGU	REALISASI	%	SISA	PAGU	REALISASI	%	SISA
1	KEPULAUAN RIAU	514.000.000	514.000.000	100,00	-	81.890.000	81.890.000	100,00	-	595.890.000	595.890.000	100,00	-
2	SULAWESI BARAT	576.000.000	576.000.000	100,00	-	95.630.000	95.610.000	99,98	20.000	671.630.000	671.610.000	100,00	20.000
3	MALUKU UTARA	915.000.000	914.810.000	99,98	190.000	159.650.000	159.650.000	100,00	-	1.074.650.000	1.074.460.000	99,98	190.000
4	KALIMANTAN TENGAH	523.000.000	523.000.000	100,00	-	106.300.000	106.060.000	99,77	240.000	629.300.000	629.060.000	99,96	240.000
5	SULAWESI SELATAN	2.575.000.000	2.573.000.000	99,92	2.000.000	505.490.000	504.536.000	99,81	954.000	3.080.490.000	3.077.536.000	99,90	2.954.000
6	KALIMANTAN SELATAN	627.000.000	626.000.000	99,84	1.000.000	94.100.000	94.099.900	100,00	100	721.100.000	720.099.900	99,86	1.000.100
7	BANGKA BELITUNG	646.000.000	645.000.000	99,85	1.000.000	87.688.000	87.573.000	99,87	115.000	733.688.000	732.573.000	99,85	1.115.000
8	RIAU	1.101.000.000	1.100.000.000	99,91	1.000.000	217.730.000	215.770.000	99,10	1.960.000	1.318.730.000	1.315.770.000	99,78	2.960.000
9	MALUKU	411.000.000	411.000.000	100,00	-	89.830.000	88.669.000	98,71	1.161.000	500.830.000	499.669.000	99,77	1.161.000
10	PAPUA	391.000.000	390.000.000	99,74	1.000.000	53.150.000	53.060.000	99,83	90.000	444.150.000	443.060.000	99,75	1.090.000
11	LAMPUNG	1.081.000.000	1.080.000.000	99,91	1.000.000	212.860.000	210.501.000	98,89	2.359.000	1.293.860.000	1.290.501.000	99,74	3.359.000
12	KALIMANTAN TIMUR	1.477.000.000	1.475.000.000	99,86	2.000.000	252.070.000	248.903.500	98,74	3.166.500	1.729.070.000	1.723.903.500	99,70	5.166.500
13	SULAWESI TENGAH	1.241.000.000	1.240.000.000	99,92	1.000.000	209.790.000	206.337.500	98,35	3.452.500	1.450.790.000	1.446.337.500	99,69	4.452.500
14	NUSA TENGGARA TIMUR	998.000.000	996.000.000	99,80	2.000.000	134.640.000	133.077.300	98,84	1.562.700	1.132.640.000	1.129.077.300	99,69	3.562.700
15	BALI	490.000.000	489.000.000	99,80	1.000.000	134.620.000	133.370.000	99,07	1.250.000	624.620.000	622.370.000	99,64	2.250.000
16	GORONTALO	804.000.000	803.000.000	99,88	1.000.000	117.170.000	114.660.000	97,86	2.510.000	921.170.000	917.660.000	99,62	3.510.000
17	BANTEN	1.697.000.000	1.693.000.000	99,76	4.000.000	291.220.000	287.110.000	98,59	4.110.000	1.988.220.000	1.980.110.000	99,59	8.110.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	1.656.000.000	1.655.000.000	99,94	1.000.000	287.490.000	280.225.000	97,47	7.265.000	1.943.490.000	1.935.225.000	99,57	8.265.000
19	JAWA TENGAH	4.789.000.000	4.776.200.000	99,73	12.800.000	747.743.000	736.202.450	98,46	11.540.550	5.536.743.000	5.512.402.450	99,56	24.340.550
20	BENGKULU	1.029.000.000	1.026.000.000	99,71	3.000.000	160.550.000	157.807.000	98,29	2.743.000	1.189.550.000	1.183.807.000	99,52	5.743.000
21	SULAWESI TENGGARA	1.287.000.000	1.284.000.000	99,77	3.000.000	168.048.000	163.625.000	97,37	4.423.000	1.455.048.000	1.447.625.000	99,49	7.423.000
22	DI. YOGYAKARTA	1.715.000.000	1.704.000.000	99,36	11.000.000	309.260.000	309.260.000	100,00	-	2.024.260.000	2.013.260.000	99,46	11.000.000
23	ACEH	1.721.000.000	1.715.000.000	99,65	6.000.000	325.780.000	319.220.000	97,99	6.560.000	2.046.780.000	2.034.220.000	99,39	12.560.000
24	JAWA BARAT	4.006.000.000	3.990.000.000	99,60	16.000.000	677.382.000	655.931.200	96,83	21.450.800	4.683.382.000	4.645.931.200	99,20	37.450.800
25	PAPUA BARAT	341.000.000	340.000.000	99,71	1.000.000	34.863.000	31.377.159	90,00	3.485.841	375.863.000	371.377.159	98,81	4.485.841
26	JAWA TIMUR	5.389.000.000	5.325.500.000	98,82	63.500.000	1.126.730.000	1.104.520.000	98,03	22.210.000	6.515.730.000	6.430.020.000	98,68	85.710.000
27	SUMATERA BARAT	1.001.000.000	986.000.000	98,50	15.000.000	148.067.000	147.322.000	99,50	745.000	1.149.067.000	1.133.322.000	98,63	15.745.000
28	SUMATERA UTARA	2.816.000.000	2.799.670.000	99,42	16.330.000	525.105.000	488.519.000	93,03	36.586.000	3.341.105.000	3.288.189.000	98,42	52.916.000
29	SUMATERA SELATAN	1.089.000.000	1.069.000.000	98,16	20.000.000	251.796.000	248.826.370	98,82	2.969.630	1.340.796.000	1.317.826.370	98,29	22.969.630
30	KALIMANTAN BARAT	325.000.000	321.000.000	98,77	4.000.000	59.480.000	56.870.000	95,61	2.610.000	384.480.000	377.870.000	98,28	6.610.000
31	DKI JAKARTA	2.672.000.000	2.629.000.000	98,39	43.000.000	530.728.000	518.204.800	97,64	12.523.200	3.202.728.000	3.147.204.800	98,27	55.523.200
32	JAMBI	1.408.000.000	1.395.000.000	99,08	13.000.000	199.980.000	179.510.000	89,76	20.470.000	1.607.980.000	1.574.510.000	97,92	33.470.000
33	SULAWESI UTARA	561.000.000	548.030.000	97,69	12.970.000	96.490.000	92.180.000	95,53	4.310.000	657.490.000	640.210.000	97,37	17.280.000
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>47.872.000.000</b>	<b>47.612.210.000</b>	<b>99,46</b>	<b>259.790.000</b>	<b>8.493.320.000</b>	<b>8.310.477.179</b>	<b>97,85</b>	<b>182.842.821</b>	<b>56.365.320.000</b>	<b>55.922.687.179</b>	<b>99,21</b>	<b>442.632.821</b>

\* Data Bag. Keuangan BPHN (Versi Data OM SPAN DJPB)



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

**BerAKHLAK**  
BerAKHLAK

**#bangga  
melayani  
bangsa**



***LAMPIRAN***  
***SURAT PERNYATAAN***  
***HUTANG (SPH)***

**EPHN HEBAT**  
www.ephn.go.id





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Jalan May-Jeni Soetoyo - Cililitan Jakarta 13640  
Telp. (021) 8091908 – Faksimil (021) 8002265 – 801175025 Website : [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

**SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HUTANG**

Pada hari ini, Jumat 29 Desember 2023 yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Turyono, S.H.  
Jabatan : Koordinator Keuangan  
Alamat : Jl. Mayjend Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur

Dengan ini menyatakan bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional telah berhutang atas pembayaran BAST RPATA sebesar Rp. 589.375.493 (Lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah). Adapun hal tersebut dikarenakan adanya pengajuan BAST RPATA untuk SPM pembayaran Desember 2023 yang akan dilanjutkan pembayaran/SP2D di Januari 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, hutang BAST RPATA sebagaimana tersebut di atas akan kami selesaikan pada bulan Januari 2024

Demikian surat pernyataan pengakuan hutang ini dibuat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tang Menyatakan,  
  
Turyono, S.H.  
NIP. 197006151997031001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Jalan May. Jen. Soetoyo - Cililitan Jakarta 13640

Tp. (021) 8091908 – Faksimil (021) 8002285 – 801175525 Website : [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

**SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HUTANG**

Pada hari ini, Jumat 29 Desember 2023 yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tuyono, S.H.  
Jabatan : Koordinator Keuangan  
Alamat : Jl. Mayjend Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur

Dengan ini menyatakan bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional telah berhutang atas pembayaran pemakaian listrik bulan Desember 2023 dengan ID Pelanggan 547100163588 sebesar Rp.59.552.282,- (Lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah). Adapun hal tersebut dikarenakan pemakaian listrik bulan Desember 2023 ditagihkan pada bulan Januari 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, hutang pemakaian listrik sebagaimana tersebut di atas akan kami selesaikan pada bulan Januari 2024.

Demikian surat pernyataan pengakuan hutang ini dibuat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyatakan,  
  
Tuyono, S.H.  
NIP. 197006151997031001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Jalan May Jend Soetoyo - Cilandak Jakarta 12540  
Tlp. (021) 8091908 – Faksimil (021) 8032265 – 801175525 Website : [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

**SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HUTANG**

Pada hari ini, Jum'at 29 Desember 2023 yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tuyono, S.H.  
Jabatan : Koordinator Keuangan  
Alamat : Jl. Mayjend Soetoyo No. 10 Cilandak Jakarta Timur

Dengan ini menyatakan bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional telah berhutang atas pembayaran pemakaian listrik bulan Desember 2023 dengan ID Pelanggan 547100717100 dan 547102983079 sebesar Rp. 37.728.322,- (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah). Adapun hal tersebut dikarenakan pemakaian listrik bulan Desember 2023 ditagihkan pada bulan Januari 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, hutang pemakaian listrik sebagaimana tersebut di atas akan kami selesaikan pada bulan Januari 2024.

Demikian surat pernyataan pengakuan hutang ini dibuat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyatakan,  
  
Tuyono, S.H.  
NIP. 197006151997031001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Jalan May-Jen Soetoyo – Cililitan Jakarta 13540

Tlp. (021) 8091808 – Faksimil (021) 8002265 – 801175025 Website : [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

**SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HUTANG**

Pada hari ini, Jumat 29 Desember 2023 yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Turyono, S.H.  
Jabatan : Koordinator Keuangan  
Alamat : Jl. Mayjend Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur

Dengan ini menyatakan bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional telah berhutang atas pembayaran pemakaian telepon bulan Desember 2023 sebesar Rp. 972.858 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan rupiah). Adapun hal tersebut dikarenakan pemakaian telepon bulan Desember 2023 ditagihkan pada bulan Januari 2024.

Demikian surat pernyataan pengakuan hutang ini dibuat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tang Menyatakan,  
  
Turyono, S.H.  
NIP. 197006151997031001



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

**BerAKHLAK<sup>2</sup>**  
#bangga  
melayani  
bangsa



***LAMPIRAN***  
***SURAT HASIL***  
***REKONSILIASI (SHR)***

**EPHN HEBAT**



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 408789  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	2,563,594,000	2,563,594,000	0
2	Belanja	2,546,205,374	2,546,205,374	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 24-JAN-24*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 408879  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,101,669,000	1,101,669,000	0
2	Belanja	1,099,414,000	1,099,414,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 25-JAN-24*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 649008  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,192,593,000	1,192,593,000	0
2	Belanja	1,191,448,230	1,191,448,230	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,960,000	1,960,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23-JAN-24*







**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 648996  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	2,511,020,000	2,511,020,000	0
2	Belanja	2,502,681,000	2,502,681,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 24-JAN-24*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 409177  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,678,131,000	1,678,131,000	0
2	Belanja	1,668,791,300	1,668,791,300	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	11,835,000	11,835,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 17-JAN-24*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 409288  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	48,886,291,000	48,886,291,000	0
2	Belanja	48,381,791,127	48,381,791,127	0
3	Pengembalian Belanja	-36,131,389	-36,131,389	0
4	Estimasi Pendapatan	20,000,000	20,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	58,277,500	58,277,500	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23-JAN-24*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 409187  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	2,562,781,000	2,562,781,000	0
2	Belanja	2,552,762,991	2,552,762,991	0
3	Pengembalian Belanja	-1,000,000	-1,000,000	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 25-JAN-24*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 408727  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	3,772,299,000	3,772,299,000	0
2	Belanja	3,691,876,100	3,691,876,100	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 16-JAN-24*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 649017  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,368,230,000	1,368,230,000	0
2	Belanja	1,364,005,881	1,364,005,881	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22-JAN-24*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 409166  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	2,092,323,000	2,092,323,000	0
2	Belanja	2,021,305,700	2,021,305,700	0
3	Pengembalian Belanja	-17,956,000	-17,956,000	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 26-JAN-24*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 408737  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	5,249,927,000	5,249,927,000	0
2	Belanja	5,209,916,200	5,209,916,200	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23-JAN-24*







**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 408749  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	6,151,171,000	6,151,171,000	0
2	Belanja	6,120,698,738	6,120,698,738	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 24-JAN-24*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 408759  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	7,091,478,000	7,091,478,000	0
2	Belanja	7,003,002,872	7,003,002,872	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	189,200	189,200	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23-JAN-24*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 408839  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	888,681,000	888,681,000	0
2	Belanja	883,241,299	883,241,299	0
3	Pengembalian Belanja	-2,000,000	-2,000,000	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 25-JAN-24*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 408848  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,192,995,000	1,192,995,000	0
2	Belanja	1,191,879,697	1,191,879,697	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 24-JAN-24*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 409197  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,105,697,000	1,105,697,000	0
2	Belanja	1,098,728,693	1,098,728,693	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	4,740,000	4,740,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 24-JAN-24*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 408859  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	2,200,543,000	2,200,543,000	0
2	Belanja	2,194,065,178	2,194,065,178	0
3	Pengembalian Belanja	-100,000	-100,000	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	150,000	150,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 26-JAN-24*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 667789  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,077,138,000	1,077,138,000	0
2	Belanja	1,075,996,147	1,075,996,147	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 26-JAN-24*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 408829  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,777,677,000	1,777,677,000	0
2	Belanja	1,757,985,111	1,757,985,111	0
3	Pengembalian Belanja	-2,100,000	-2,100,000	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	11,874,000	11,874,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 24-JAN-24*







**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 649029  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,540,638,000	1,540,638,000	0
2	Belanja	1,540,448,000	1,540,448,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23-JAN-24*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 408899  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	920,443,000	920,443,000	0
2	Belanja	903,015,628	903,015,628	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 26-JAN-24*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 409227  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	2,456,584,000	2,456,584,000	0
2	Belanja	2,445,775,300	2,445,775,300	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23-JAN-24*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 408889  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,667,433,000	1,667,433,000	0
2	Belanja	1,655,305,003	1,655,305,003	0
3	Pengembalian Belanja	-1,000,000	-1,000,000	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23-JAN-24*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 667779  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	768,741,000	768,741,000	0
2	Belanja	763,050,559	763,050,559	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 26-JAN-24*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 408909  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	893,823,000	893,823,000	0
2	Belanja	887,125,390	887,125,390	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 24-JAN-24*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 408809  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,852,054,000	1,852,054,000	0
2	Belanja	1,848,882,306	1,848,882,306	0
3	Pengembalian Belanja	-21,000	-21,000	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 15-JAN-24*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 667799  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,171,602,000	1,171,602,000	0
2	Belanja	1,171,310,492	1,171,310,492	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 18-JAN-24*







**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 408779  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	3,576,892,000	3,576,892,000	0
2	Belanja	3,573,934,181	3,573,934,181	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 24-JAN-24*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 409217  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,938,666,000	1,938,666,000	0
2	Belanja	1,922,136,446	1,922,136,446	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 24-JAN-24*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 409207  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,972,745,000	1,972,745,000	0
2	Belanja	1,951,215,562	1,951,215,562	0
3	Pengembalian Belanja	-660,000	-660,000	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23-JAN-24*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 408869  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,070,490,000	1,070,490,000	0
2	Belanja	1,053,186,920	1,053,186,920	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 24-JAN-24*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 408799  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,663,803,000	1,663,803,000	0
2	Belanja	1,648,046,300	1,648,046,300	0
3	Pengembalian Belanja	-2,000	-2,000	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 26-JAN-24*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 408819  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,765,933,000	1,765,933,000	0
2	Belanja	1,723,291,470	1,723,291,470	0
3	Pengembalian Belanja	-804,100	-804,100	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 26-JAN-24*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 408769  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	3,862,401,000	3,862,401,000	0
2	Belanja	3,808,201,162	3,808,201,162	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 24-JAN-24*





**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

**BerAKHLAK**  
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan

**#bangga  
melayani  
bangsa**

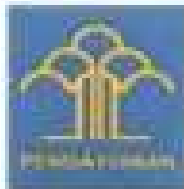


**LAMPIRAN**

**SEWA KANTIN**

**EPHN HEBAT**  
Badan Pembinaan Hukum Nasional





**SURAT PERJANJIAN SEWA ATAS SEBAGIAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN  
PADA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: PHN.1-PB.03.01-34**

Pada hari ini Selasa tanggal dua belas Bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Constantinus Kristomo  
Jabatan : Pt. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
Alamat : Jl. Mayjen Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- II. Nama : Ivo Hetty N Nainggolan  
Jabatan : Ketua Koperasi Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Alamat : Jl. Mayjen Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur

Bertindak untuk dan atas nama Koperasi Pegawai Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM selaku pemakai/penyewa kantin Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa/pemanfaatan bangunan untuk usaha kantin dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
SARANA DAN PRASARANA**

1. PIHAK PERTAMA telah menyediakan sarana dan prasarana berupa bangunan yang disewakan kepada pihak kedua untuk usaha kantin, diisi/berjualan makanan dan minuman sehari-hari dengan menyewa bangunan seluas 60 meter persegi.
2. PIHAK KEDUA bersedia mengisi berjualan makanan dan minuman sehari-hari untuk keperluan para pegawai dan tamu pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

## **Pasal 2 JANGKA WAKTU**

1. Jangka waktu perjanjian sewa bangunan untuk kegiatan kantin telah disepakati oleh para pihak selama 2 (dua) tahun, dengan sistem pembayarannya dilakukan dimuka dengan bukti kwitansi setor pada kas negara;
2. Surat perjanjian ini berlaku mulai tanggal 1 (satu) bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan 30 (tiga puluh) bulan September tahun 2025;
3. Bila kemudian hari akan memperpanjang sewa bangunan untuk kantin, maka 3 (tiga) bulan sebelum masa/jangka waktu berakhir, PIHAK KEDUA akan menyampaikan pengajuan perpanjangan sewa kepada PIHAK PERTAMA disertai dengan surat permohonan.

## **Pasal 3 NILAI SEWA**

Dengan mengacu Surat Menteri Keuangan Nomor : S-122/MK.6/KNL.07.04/2023 tanggal 13 Juli 2023 perihal Persetujuan Perpanjangan Sewa atas Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, para PIHAK sepakat dengan perjanjian sewa sebagai berikut :

1. Nilai sewa untuk jangka waktu tersebut di atas dalam Pasal 2, telah disepakati oleh para pihak. PIHAK KEDUA membayar sewa kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp.31.514.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dengan bukti setor sah berupa kwitansi bermaterai;
2. Nilai sewa seluruhnya Rp.31.514.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah) disetor ke kas negara RI oleh bendahara pengeluaran dan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil sewa bangunan untuk usaha kantin pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

## **Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

PIHAK KEDUA mempunyai tanggung jawab :

1. PIHAK KEDUA berhak memanfaatkan bangunan yang disewa untuk kegiatan usaha;
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan bangunan yang disewa;
3. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara yang disewa selama jangka waktu;
4. PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan barang milik negara yang disewa kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan kondisi semula;
5. Bila terjadi kerusakan sarana dan prasarana pada bangunan yang disewakan seperti atap bocor, plafon rusak, kran air, bohlam putus, wastafel, meja kursi dan sarana kebersihan kantin maka perbaikan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

**Pasal 5  
FORCE MAJEUR**

Apabila terjadi huru-hara, gempa bumi atau bencana alam yang mengakibatkan rusak atau hancurnya sarana bangunan maka menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, sedangkan isi kantin menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

**Pasal 6  
PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN**

1. Semua perselisihan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan perjanjian sewa menyewa diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Dalam hal tidak tercapainya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini, maka akan diselesaikan melalui pengadilan dan sepakat memilih domisili yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Perjanjian sewa ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli, masing-masing sama bunyi dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan ditubuhi cap.

Jakarta, 12 September 2023

**PIHAK PERTAMA**  
Plt. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional



Comita Purus Kristomo  
NIP. 197404111999031001

**PIHAK KEDUA**  
Perwakilan



Ivo Hetty N. Nanggolan



1

Nomor : S-122/MK.6/KNL.0704/2023 13 Juli 2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Persetujuan Perpanjangan Sewa atas Barang Milik Negara berupa  
Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
u.p.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Jalan Hajjah Rangkyo Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan  
Jakarta Selatan 12940

Sehubungan dengan surat Saudara nomor SEK-PB.03.02-454 tanggal 04 Mei 2023 hal Usulan Persetujuan Sewa Barang Milik Negara atas Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan sewa barang milik negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa sebagian tanah dan/atau bangunan seluas 60 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Mayor Jenderal Soetoyo Nomor 10, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nilai perolehan proporsional sebesar Rp2.073.542.396,41 (dua miliar tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah empat puluh satu sen), sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan barang milik negara, pelaksanaan sewa tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213/KM.6/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dengan ketentuan sebagai berikut:

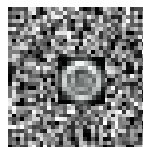
1. Barang milik negara dimaksud disewakan kepada Koperasi Pengayoman Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk jangka waktu sewa selama 2 (dua) tahun dengan nilai sewa sebesar Rp31.514.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus empat belas ribu Rupiah).
2. Berdasarkan persetujuan sewa ini, penyewaan barang milik negara tersebut dituangkan dalam perjanjian sewa-menyewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pihak penyewa setelah seluruh pembayaran uang sewa disetorkan ke rekening kas umum negara dan bukti setoran dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sewa menyewa.
3. Dalam hal perjanjian sewa belum ditandatangani dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat persetujuan ini, maka persetujuan sewa ini batal demi hukum.



4. Dalam hal penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permintaan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
5. Laporan pelaksanaan sewa perpanjangan yang dilengkapi dengan fotokopi perjanjian sewa-menyewa dan bukti setor pembayaran sewa ke rekening kas umum negara agar disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV selaku Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fotokopi perjanjian sewa agar disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV selaku Pengelola Barang paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ditandatangani perjanjian sewa.
6. Guna mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik negara, agar Saudara melakukan penatausahaan, pembinaan, dan pengawasan atas pelaksanaan sewa barang milik negara dimaksud.
7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara Dan Lelang Jakarta IV



Ditandatangani secara elektronik  
Rofiq Manshur

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
4. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
6. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara
7. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
8. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta
10. Kepala Seksi Kepatuhan Internal
11. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
12. Kepala Penilai Pemerintah Ahli Muda Penilai Pemerintah Ahli Muda Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV
13. Kepala Penilai Pemerintah Ahli Pertama Penilai Pemerintah Ahli Pertama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21  
TELEPON (021) 3449230, FAKSIMILE (021) 3453710, LAMAN [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)



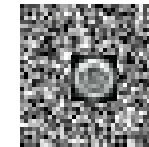


LAMPIRAN  
Surat Menteri Keuangan  
Nomor : S- 122 /MK.6/KNL.0704/2023  
Tanggal : 13 Juli 2023

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
YANG DISETUJUI UNTUK DISEWAKAN**

No.	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Lokasi	Luas yang Disewa	Jangka Waktu	Periode-sitas	Nilai Sewa (Rp)	Penyewa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2.01.01.04.001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jalan Mayor Jenderal Soetoyo Nomor 10, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	60 m <sup>2</sup>	2 (dua) tahun	2 (dua) tahun dibayar di depan	Rp31.514.000,00	Koperasi Pengayoman Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
	4.01.01.30.001	5	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen						
<b>Jumlah</b>								<b>Rp31.514.000,00</b>	

a.n. Menteri Keuangan  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara Dan Lelang Jakarta IV



Ditandatangani secara elektronik  
Rofiq Manshur



Data Rekening :

Rekening Giro (R/G) : 2019023 11001100

RTG

Rekening Tabung : 20190102

RTTB

Rekening Giro Bank : 37

RTGB

RTG : 1427884444

Data Rekening :

Rekening Billing : 810030021444224

Rekening Giro (R/G) : 80000000 0000

Rekening Giro (R/G) : 013

Rekening Giro (R/G) : 00

Rekening Giro (R/G) : 800000

Rekening Giro (R/G) : 31.514.000,00

Rekening Giro (R/G)

Rekening Giro (R/G) : 31.514.000,00 (Rekening Giro Bank) 31.514.000,00 (Rekening Giro Bank)

Rekening Giro (R/G) : 800000

Rekening Giro (R/G) : 800000

Rekening Giro (R/G) : 800000

Rekening Giro (R/G) : 800000



Vertical text on the right edge of the page, including a phone number and other contact information.



## BUKTI PENERIMAAN NEGARA

### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230021446226
Tanggal Billing	: 21-08-2023 15:36:01
Tanggal Keluarwards	: 28-08-2023 15:36:01
Tanggal Bayar	: 22-08-2023 11:01:33
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara BPHN
Kementerian/Lembaga	: 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: 10 - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 400200 - BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Total Diatur	: 31.514.000 (IDR)
Terbilang	: Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000000731118
NTPN	: 8777A61QUQTMCHH

### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Kode Akun	: 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Jumlah Setoran	: 31.514.000 (IDR)
Keterangan	: Sewa Kantor BPHN



**PERHITUNGAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA**

Contoh Kasus :

Terdapat pendapatan sewa gedung dan bangunan berupa untuk Kantin BPHN yang telah dibayarkan pada bulan September 2023 dengan menggunakan akun 425131 sebesar Rp31.514.000 untuk periode selama 2 Tahun mulai dari 1 Oktober 2023 sampai dengan 30 September 2025

Maka perhitungan nilai pendapatan sewa per semester sebagai berikut :

Total pendapatan sewa	=	31.514.000	
Periode sewa		2 Tahun	
Jumlah Hari	=	731	(tahun 2024 kabisat, 366 hari) * Diisi berdasarkan periode pada surat perjanjian sewa
Perhitungan hari			
		1-Oct-2023	1-Jan-2024
		31-Dec-2023	30-Sep-2025
		92	366
			273
			731
Nilai Pendapatan Per Hari	=	43.111	
( Total Pendapatan : periode sewa)			

Tabel Perhitungan Akrual

Keterangan	2023	2024	2025	Jumlah
jumlah hari	92	366	273	
nilai pendapatan sewa periode berjalan	3.966.194	15.778.555	11.769.250	31.514.000,00
nilai pendapatan sewa dd per	27.547.806	11.769.250	-	-

Jurnal Penyesuaian pada setiap periode pelaporan sebagai berikut :

Akun	Uraian	Debet	Kredit	
31-Dec-23	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	27.547.806	-	* Pengakuan pendapatan diterima dimuka di akhir 31 Desember xxxx
	219211 Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	-	27.547.806	
01-Jan-24	219211 Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	27.547.806	-	* Jurnal Balik Pengakuan pendapatan diterima dimuka di awal tahun berikutnya
	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	27.547.806	
31-Dec-24	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	11.769.250	-	* Pengakuan pendapatan diterima dimuka di akhir 31 Desember xxxx
	219211 Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	-	11.769.250	
01-Jan-25	219211 Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	11.769.250	-	* Jurnal Balik Pengakuan pendapatan diterima dimuka di awal tahun berikutnya
	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	11.769.250	
31-Dec-25	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-	* Pengakuan pendapatan diterima dimuka di akhir 31 Desember xxxx
	219211 Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	-	-	
01-Jan-22	219211 Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	-	-	* Jurnal Balik Pengakuan pendapatan diterima dimuka di awal tahun berikutnya
	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-	
Dst....				



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

**BerAKHLAK**  
BerAKHLAK

**#bangga  
melayani  
bangsa**



***LAMPIRAN***

***DOKUMEN***

***RPATA***

**EPHN HEBAT**  
Badan Pembinaan Hukum Nasional



## DAFTAR SP2D SATKER

Jenis SPM : PEMBAYARAN RPATA Tanggal : 08-01-2024 s.d. 08-01-2024

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Mata Uang	Rate	Tanggal Rate	Nilai SP2D Ekuivalen	Jenis SPM	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih <input type="checkbox"/>
1	249991304001181	08-01-2024	08-01-2024	28,300,810.00	IDR	1	08-01-2024	28,300,810	PEMBAYARAN RPATA	00003T/409288/2024	05-01-2024	NON GAJI	Pembayaran Pekerjaan Perawatan AC Central termasuk Cooling Tower dan Pompa Cooling Tower Kantor BPHN TA. 2023 sesuai BAST Nomor PHN.1-PB.02.01-1440/2023 Tanggal 31-12-2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
2	249991304001179	08-01-2024	08-01-2024	92,172,973.00	IDR	1	08-01-2024	92,172,973	PEMBAYARAN RPATA	00007T/409288/2024	05-01-2024	NON GAJI	Pembayaran Pengadaan Langganan Internet Kantor BPHN TA. 2023 sesuai BAST Nomor PHN.1-PB.02.01-1439/2023 Tanggal 31-12-2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
3	249991304001140	08-01-2024	08-01-2024	29,903,244.00	IDR	1	08-01-2024	29,903,244	PEMBAYARAN RPATA	00004T/409288/2024	05-01-2024	NON GAJI	Pembayaran Pekerjaan Perawatan AC Split, AC Cassette dan AC Floorr Standing Kantor BPHN TA. 2023 sesuai BAST Nomor PHN.1-PB.02.01-1441/2023 Tanggal 31-12-2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
4	249991304001180	08-01-2024	08-01-2024	26,873,560.00	IDR	1	08-01-2024	26,873,560	PEMBAYARAN RPATA	00005T/409288/2024	05-01-2024	NON GAJI	Pembayaran Perawatan Lift Kantor BPHN TA. 2023 sesuai BAST Nomor PHN.1-PB.02.01-1442/2023 Tanggal 31-12-2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
5	249991303002564	08-01-2024	08-01-2024	81,765,183.00	IDR	1	08-01-2024	81,765,183	PEMBAYARAN RPATA	00010T/409288/2024	05-01-2024	NON GAJI	Pembayaran Paket Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Petugas Pengamanan Non PNS Kantor BPHN TA. 2023 sesuai BAST Nomor PHN.1-PB.02.01-1446/2023 Tanggal 31-12-2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>



6	249991303002543	08-01-2024	08-01-2024	28,143,150.00	IDR	1	08-01-2024	28,143,150	PEMBAYARAN RPATA	00006T/409288/2024	05-01-2024	NON GAJI	Pembayaran Pengadaan Pemeliharaan Aplikasi Webserver BPHN (Content Management System) dan Subdomain Kantor BPHN TA. 2023 sesuai BAST Nomor PHN.1-PB.02.01-1443/2023 Tanggal 31-12-2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
7	249991303002563	08-01-2024	08-01-2024	156,292,423.00	IDR	1	08-01-2024	156,292,423	PEMBAYARAN RPATA	00009T/409288/2024	05-01-2024	NON GAJI	Pembayaran Paket Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Petugas Kebersihan Dalam dan Luar Gedung Non PNS Kantor BPHN TA. 2023 sesuai BAST Nomor PHN.1-PB.02.01-1445/2023 Tanggal 31-12-2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
8	249991303002559	08-01-2024	08-01-2024	41,379,025.00	IDR	1	08-01-2024	41,379,025	PEMBAYARAN RPATA	00008T/409288/2024	05-01-2024	NON GAJI	Pembayaran Pemeliharaan/perawatan aplikasi akses penyuluh dan bantuan hukum (SIDBANKUM) Badan Pembinaan Hukum Nasional TA.2023 sesuai BAST Nomor PHN.1-PB.02.01-1444/2023 Tanggal 31-12-2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
9	249991303002561	08-01-2024	08-01-2024	25,079,806.00	IDR	1	08-01-2024	25,079,806	PEMBAYARAN RPATA	00011T/409288/2024	05-01-2024	NON GAJI	Pembayaran Paket Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Pramubakti Non PNS Kantor BPHN TA. 2023 sesuai BAST Nomor PHN.1-PB.02.01-1447/2023 Tanggal 31-12-2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
10	249991303002562	08-01-2024	08-01-2024	40,901,607.00	IDR	1	08-01-2024	40,901,607	PEMBAYARAN RPATA	00012T/409288/2024	05-01-2024	NON GAJI	Pembayaran Paket Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Petugas Pengemudi Kantor BPHN TA. 2023 sesuai BAST Nomor PHN.1-PB.02.01-1448/2023 Tanggal 31-12-2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>



## DAFTAR SP2D SATKER

Jenis SPM : PENAMPUNGAN RPATA

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Mata Uang	Rate	Tanggal Rate	Nilai SP2D Ekuivalen	Jenis SPM	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih <input type="checkbox"/>
1	231390301000392	20-12-2023	21-12-2023	0.00	IDR	1	21-12-2023	0	PENAMPUNGAN RPATA	00869T/409288/2023	19-12-2023	LAINNYA	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor PHN.1- PB.02.01-1246/2023 untuk Paket Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Petugas Kebersihan Dalam dan Luar Gedung Non PNS Kantor BPHN TA. 2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
2	231390301000347	20-12-2023	21-12-2023	0.00	IDR	1	21-12-2023	0	PENAMPUNGAN RPATA	00865T/409288/2023	19-12-2023	LAINNYA	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor PHN.1- PB.02.01-09/2023 untuk Perawatan Lift Kantor BPHN TA. 2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
3	231390301000349	20-12-2023	21-12-2023	0.00	IDR	1	21-12-2023	0	PENAMPUNGAN RPATA	00864T/409288/2023	19-12-2023	LAINNYA	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor PHN.1- PB.02.01-06/2023 untuk Pekerjaan Perawatan AC Split, AC Cassette dan AC Floor Standing Kantor BPHN TA. 2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
4	231390301000393	20-12-2023	21-12-2023	0.00	IDR	1	21-12-2023	0	PENAMPUNGAN RPATA	00870T/409288/2023	19-12-2023	LAINNYA	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor PHN.1- PB.02.01-1247/2023 untuk Paket Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Petugas Pengamanan Non PNS Kantor BPHN TA. 2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
5	231390301000348	20-12-2023	21-12-2023	0.00	IDR	1	21-12-2023	0	PENAMPUNGAN RPATA	00863T/409288/2023	19-12-2023	LAINNYA	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor PHN.1- PB.02.01-07/2023 untuk Pekerjaan Perawatan AC Central termasuk Cooling Tower dan Pompa Cooling Tower Kantor BPHN TA. 2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>



6	231390301000417	20-12-2023	21-12-2023	0.00	IDR	1	21-12-2023	0	PENAMPUNGAN RPATA	00868T/409288/2023	19-12-2023	LAINNYA	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor PHN.1- PB.02.01-213/2023 untuk Pemeliharaan/perawatan aplikasi akses penyuluh dan bantuan hukum (SIDBANKUM) Badan Pembinaan Hukum Nasional TA.2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
7	231390301000395	20-12-2023	21-12-2023	0.00	IDR	1	21-12-2023	0	PENAMPUNGAN RPATA	00872T/409288/2023	19-12-2023	LAINNYA	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor PHN.1- PB.02.01-1249/2023 untuk Paket Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Petugas Pengemudi Kantor BPHN TA. 2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
8	231390301000394	20-12-2023	21-12-2023	0.00	IDR	1	21-12-2023	0	PENAMPUNGAN RPATA	00871T/409288/2023	19-12-2023	LAINNYA	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor PHN.1- PB.02.01-1248/2023 untuk Paket Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Pramubakti Non PNS Kantor BPHN TA. 2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
9	231390301000345	20-12-2023	21-12-2023	0.00	IDR	1	21-12-2023	0	PENAMPUNGAN RPATA	00867T/409288/2023	19-12-2023	LAINNYA	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor PHN.1- PB.02.01-01/2023 untuk Pengadaan Langganan Internet Kantor BPHN TA. 2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
10	231390301000344	20-12-2023	21-12-2023	0.00	IDR	1	21-12-2023	0	PENAMPUNGAN RPATA	00866T/409288/2023	19-12-2023	LAINNYA	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor PHN.1- PB.02.01-08/2023 untuk Pengadaan Pemeliharaan Aplikasi Webserver BPHN (Content Management System) dan Subdomain Kantor BPHN TA. 2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

**BerAKHLAK<sup>2</sup>**

**# bangga  
melayani  
bangsa**



***LAMPIRAN***

***BERITA ACARA***

***TRANSFER MASUK***

**EPHN HEBAT**



**BERITA ACARA TRANSFER KELUAR BMN**  
Nomor : PPH.1-PB.05.05-15

Pada hari Rabu tanggal Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02/08/2023) bertempat di Kantor Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Satker : Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Nama : Hery Widyawati, S.H., M.H.  
NIP : 19760131 200112 2 001  
Jabatan : Kepala Bagian Umum Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Barang,

2. Nama Satker : Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Nama : Anang Ardian Riza, S.H., M.H.  
NIP : 19730409 200212 1 008  
Jabatan : Kepala Bagian Umum Badan Pembinaan Hukum Nasional

Yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Barang,

Menyatakan bahwa telah dilakukan transfer Barang Milik Negara (BMN) berupa 1 (satu) unit Meja Rapat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Nilai Perolehan	Kondisi
1.	3050201008	4	Meja Rapat	2006	1	Rp. 9.968.000.-	Baik

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Penerima Barang  
Kepala Bagian Umum  
Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Pemberi Barang  
Kepala Bagian Umum  
Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM,

Hery Widyawati, S.H., M.H.  
NIP. 19760131 200112 2 001





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav 9-9, Kuningan Jakarta Selatan 12940  
Call Center: 152  
Laman: www.dgp.go.id, Surel: hato@dgpp.go.id

BERITA ACARA  
NOMOR HKI.1-PE.02.01-2225

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua bulan November tahun Dua Ribu Dua Ratus Tiga (02/11/2023), hari minggu-minggu,

1. Nama: **Hendry Pratama Prabawara**  
NIP: 198001180010121001  
Jabatan: Kepala Subbagian Rumah Tangga Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut Pihak Pertama,
2. Nama: **Hani Triawan**  
NIP: 198508112000041001  
Jabatan: Subkoordinator Pengada Barang Milik Negara selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah melampirkan

dengan ini PIHAK PERTAMA telah memberikan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA selanjutnya dan PIHAK PERTAMA Barang Milik Negara (BMN) sebagai berikut:

No	Jenis barang/Merk/Type	Jumlah	Kode Barang	NLP	Tahun Perolehan	Keterangan
1	Lap Top ACER Travelmate P214 Core i7 14 Inch	1	3 10 01 00 002	1339	2021	Bek
2	Lap Top ACER Travelmate P214 Core i7 14 Inch	1	3 10 01 00 002	1487	2021	Bek
3	Lap Top ACER Travelmate P214 Core i7 14 Inch	1	3 10 01 00 002	1596	2021	Bek
4	Lap Top ACER Travelmate P214 Core i7 14 Inch	1	3 10 01 00 002	1590	2021	Bek
5	Lap Top ACER Travelmate P214 Core i7 14 Inch	1	3 10 01 00 002	1587	2021	Bek
6	Lap Top ACER Travelmate P214 Core i7 14 Inch	1	3 10 01 00 002	1591	2021	Bek
7	Lap Top ACER Travelmate P214 Core i7 14 Inch	1	3 10 01 00 002	1602	2021	Bek
8	Lap Top ACER Travelmate P214 Core i7 14 Inch	1	3 10 01 00 002	1611	2021	Bek
9	Lap Top ACER Travelmate P214 Core i7 14 Inch	1	3 10 01 00 002	1600	2021	Bek
10	Lap Top ACER Travelmate P214 Core i7 14 Inch	1	3 10 01 00 002	1621	2021	Bek

Berdasarkan hal tersebut:

1. BMN tersebut digunakan untuk mendukung kinerja Badan Pertimbangan Hukum Nasional
2. Anop data komputer transfer BMN akan dilakukan melalui aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
3. Apabila timbul biaya yang dikibatkan dari Barang Milik Negara yang diserahkan, maka menjadi tanggungjawab Badan Pertimbangan Hukum Nasional.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

**BerAKHLAK<sup>2</sup>**

**# bangga  
melayani  
bangsa**



***LAMPIRAN***

***BERITA ACARA***

***TRANSFER KELUAR***

**EPHN HEBAT**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jln. M.T. Haryono No. 24 Cawang, Jakarta Timur 13633  
Telp. 021-8000704 Fax. 021-8000812, 8060008

**BERITA ACARA TRANSFER KELUAR BMN**  
Nomor: W.10-PB.05.01-987

Pada hari Senin tanggal 12 (dua belas) bulan Juni tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Gigantiko Mulya  
NIP : 198907252015031003  
Jabatan : Pengelola BMN Karwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

Selanjutnya disebut **PIHAK YANG MENYERAHKAN**

Nama : Muhammad Gigantiko Mulya  
NIP : 198907252015031003  
Jabatan : Pengelola BMN Karwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

Selanjutnya disebut **PIHAK YANG MENERIMA**

Dengan ini **PIHAK YANG MENYERAHKAN** telah memberikan kepada **PIHAK YANG MENERIMA** sebagaimana **PIHAK YANG MENERIMA** telah menerima **PIHAK YANG MENYERAHKAN** Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Juni 2023

Yang menerima

Muhammad Gigantiko Mulya  
NIP 198907252015031003

Yang menyerahkan

Muhammad Gigantiko Mulya  
NIP 198907252015031003



**DAFTAR BARANG TRANSFER KELUAR**

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Tahun Penjualan	Keterangan
1	Monografi	6010101001	44	2023	Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi
2	Monografi	6010101001	45	2023	Pengembangan Aset Tindak Pidana Korupsi (Pendekatan Hukum Progresif)
3	Monografi	6010101001	46	2023	Penelitian Perbara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif & Transformasi
4	Monografi	6010101001	47	2023	Valuologi Pendidikan Khotan dan Saka
5	Monografi	6010101001	48	2023	Hukum Hak Tanggungan: Hak Tanggungan Atas Tanah & Benda di Atasnya
6	Monografi	6010101001	49	2023	Hukum Kamarsan Islam di Indonesia Edisi Revisi
7	Monografi	6010101001	50	2023	Hukum Kontrak, Teori dan Teknik
8	Monografi	6010101001	51	2023	Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan
9	Monografi	6010101001	52	2023	Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
10	Monografi	6010101001	53	2023	Hukum Perdata Islam
11	Monografi	6010101001	54	2023	Hukum Perikatan dan Perjanjian
12	Monografi	6010101001	55	2023	Hukum Perjanjian: Penyelesaian Masalah Pasal Perjanjian Bermula-Dim KUH Perdata (B/P)
13	Monografi	6010101001	56	2023	Hukum Wana Perdata
14	Monografi	6010101001	57	2023	Peradilan Islam
15	Monografi	6010101001	58	2023	Perancangan Kontrak & MOU
16	Monografi	6010101001	59	2023	Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Darat
17	Monografi	6010101001	60	2023	Aspek Hukum Startup
18	Monografi	6010101001	61	2023	Corporate Social Responsibility
19	Monografi	6010101001	62	2023	Gugatan Demoralisasi Perindustri Hukum
20	Monografi	6010101001	63	2023	Hukum Investasi
21	Monografi	6010101001	64	2023	Hukum Kepentingan
22	Monografi	6010101001	65	2023	Hukum Perlindungan Konsumen

23	Monografi	6010101001	66	2023	Kontrak Bisnis di ASEAN
24	Monografi	6010101001	67	2023	Perseroan Terbatas Teori & Praktik
25	Monografi	6010101001	68	2023	Wakaf dan Pemberdayaan Umat
26	Monografi	6010101001	69	2023	Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara
27	Monografi	6010101001	70	2023	Hal Dalam Negara Hukum Demokrasi
28	Monografi	6010101001	71	2023	Hubah dan Bantuan Sosial Bersumber dari APBD
29	Monografi	6010101001	72	2023	Hukum dan Kebijakan Publik
30	Monografi	6010101001	73	2023	Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia
31	Monografi	6010101001	74	2023	Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia
32	Monografi	6010101001	75	2023	Hukum Tata Ruang & Tata Guna Tanah
33	Monografi	6010101001	76	2023	Kewarganegaraan di Indonesia Konsep & Petunjuk Teknis Tentang Kewarganegaraan (Edisi Revisi)
34	Monografi	6010101001	77	2023	Omnibus Law (Teori dan Penerapannya)
35	Monografi	6010101001	78	2023	Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya
36	Monografi	6010101001	79	2023	Politik Hukum
37	Monografi	6010101001	80	2023	Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Ed 2
38	Monografi	6010101001	81	2023	Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi
39	Monografi	6010101001	82	2023	Kamus Hukum Kontemporer
40	Monografi	6010101001	83	2023	Amandemen UU KPK (UU No. 19 Tahun 2019)
41	Monografi	6010101001	84	2023	UU Jaminan Produk Halal (UU RI No. 33 Th 14)
42	Monografi	6010101001	85	2023	Amandemen UU Informasi & Transaksi Elektronik 2016
43	Monografi	6010101001	86	2023	Perjanjian Pertumbuhan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu & Outsourcing (Edisi 2)
44	Monografi	6010101001	87	2023	Omnibus Law (Teori dan Penerapannya)
45	Monografi	6010101001	88	2023	Hukum Orang Asing di Indonesia
46	Monografi	6010101001	89	2023	Amandemen UU Perlindungan Anak No 35 Th 14)

47.	Monografi	6010101001	90	2023	Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja di Kehutanan & Pertanian
48.	Monografi	6010101001	91	2023	Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja di Bidang Ketenagakerjaan
49.	Monografi	6010101001	92	2023	Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja di Bidang Koperasi, UKM dan BUM Desa
50.	Monografi	6010101001	93	2023	UU Paten & Merk dan Indikasi Geografis 2016
51.	Monografi	6010101001	94	2023	UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan ( UU RI No 7 Tahun 2021)
52.	Monografi	6010101001	95	2023	UU Ibu Kota Negara ( UU RI No 3 Tahun 2022)
53.	Monografi	6010101001	96	2023	UU Kewarganegaraan RI 2008
54.	Monografi	6010101001	97	2023	UU Narkotika 2008
55.	Monografi	6010101001	98	2023	UU Pelayanan Publik (UU RI No 25 Tahun 2008)
56.	Monografi	6010101001	99	2023	UU Pembentukan Peraturan Per_ UU Tahun 2011



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

Jalan Jakarta Nomor 27, Bandung 40272

Telepon (022) 7272185 Faximili (022) 7219273

Laman : <http://jabar.kemenkumham.go.id> Email : [tu\\_kanwilkumhamjabar@yahoo.com](mailto:tu_kanwilkumhamjabar@yahoo.com)

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**

Nomor : W.11-PB.04.01-6714

Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Andi T. Salahuddin  
NIP : 197606062001121001  
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Anggiat Ferdinan  
NIP : 196502231989031002  
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA berupa :

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Keterangan	Nilai Perolehan
1	Monografi	88 Unit	Transfer Keluar dari BPHN	Rp. 7.500.000

Demikian berita acara ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima  
PIHAK KEDUA

Anggiat Ferdinan  
NIP 196502231989031002

Yang Menyerahkan  
PIHAK KESATU

Andi T. Salahuddin  
NIP 197606062001121001

Mengetahui

Kepala Kantor Wilayah

R. Andika Dwi Prasetya  
NIP 196712171991031002



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah  
Telepon : (024) 3543093 – Faksimil : (024) 3548795

Laman : [jaleng.kemerkumham.go.id](http://jaleng.kemerkumham.go.id), E-mail : [karwil.jateng@kemerkumham.go.id](mailto:karwil.jateng@kemerkumham.go.id)

**BERITA ACARA TRANSFER KELUAR  
Nomor : W.13-PB-05.05-830**

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deni Kristiawan  
NIP : 198012252005011002  
Jabatan : Kepala Bidang Hukum  
Selanjutnya disebut PIHAK I (PERTAMA)

Nama : Budhiarno Widhyarsono  
NIP : 195701181996031001  
Jabatan : Kepala Bagian Umum  
Selanjutnya disebut PIHAK II (KEDUA)

Menyatakan bahwa PIHAK I (PERTAMA) telah menyerahkan kepada PIHAK II (KEDUA) dan PIHAK II (KEDUA) telah menerima dari PIHAK I (PERTAMA) Barang Milik Negara (BMN) sebagai berikut dengan rincian sebagaimana data terlampir:

KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	TOTAL NILAI PEROLEHAN	KONDISI
6010101001	160 - 279	Monografi	2023	Rp. 6.939.000	Baik

Selanjutnya untuk satuan kerja PIHAK II (KEDUA) dapat melakukan penginputan di Aplikasi SAKTI pada transaksi Perolehan BMN Transfer Masuk.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**YANG MENERIMA  
PIHAK II (KEDUA)  
Kepala Bagian Umum**



Budhiarno Widhyarsono  
NIP. 195701181996031001

**YANG MENYERAHKAN  
PIHAK I (PERTAMA)  
Kepala Bidang Hukum**



Deni Kristiawan  
NIP. 198012252005011002





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan di Cipta No. 04 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon : (024) 2543003 – Faksimil : (024) 2546705

Laman : [jaleng.kemhumham.go.id](http://jaleng.kemhumham.go.id), E-mail : [kamtal.jateng@kemhumham.go.id](mailto:kamtal.jateng@kemhumham.go.id)

BERITA ACARA TRANSFER KELUAR  
Nomor : W-13-PB.05.05-538

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dero Kristawan  
NIP : 198012252005011002  
Jabatan : Kepala Bidang Hukum  
Selanjutnya disebut PIHAK I (PERTAMA)

Nama : Budharto Widhyarsono  
NIP : 196701181990031001  
Jabatan : Kepala Bagian Umum  
Selanjutnya disebut PIHAK II (KEDUA)

Menyatakan bahwa PIHAK I (PERTAMA) telah menyerahkan kepada PIHAK II (KEDUA) dan PIHAK II (KEDUA) telah menerima dari PIHAK I (PERTAMA) Barang Milik Negara (BMN) sebagai berikut dengan rincian sebagaimana data terlampir:

KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	TOTAL NILAI PEROLEHAN	KONDISI
6010101001	122 - 159	Monografi	2023	Rp. 11.081.000	Baik

Selanjutnya untuk satuan kerja PIHAK II (KEDUA) dapat melakukan penginputan di Aplikasi SAKTI pada transaksi Perolehan BMN Transfer Masuk.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekebruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

YANG MENERIMA  
PIHAK II (KEDUA)  
Kepala Bagian Umum



Budharto Widhyarsono  
NIP. 196701181990031001

YANG MENYERAHKAN  
PIHAK I (PERTAMA)  
Kepala Bidang Hukum



Dero Kristawan  
NIP. 198012252005011002



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50125 – Jawa Tengah  
Telepon : (024) 3543553 – Faksimil : (024) 3546795

Laman : [jaleng.kemhum.go.id](http://jaleng.kemhum.go.id) E-mail : [karwil.jaleng@kemhum.go.id](mailto:karwil.jaleng@kemhum.go.id)

Lampiran Berita Acara Serah Terima  
Nomor W 13-PB.05.05-539  
Tanggal 7 Juni 2023

NUP	NAMA BARANG	MERKE BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	KONDISI
122	Monografi	Perpu Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu	2023	Rp. 314.000	Baik
123	Monografi	Peraturan BKN No.6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS	2023	Rp. 211.000	Baik
124	Monografi	Peraturan BKN No.11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional	2023	Rp. 187.000	Baik
125	Monografi	Kepalahegagan (GURI No.11 Tahun 2022) dan Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Perpres No.43 Tahun 2022)	2023	Rp. 224.000	Baik
126	Monografi	Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan	2023	Rp. 279.000	Baik
127	Monografi	Bukota Negara dan Otorita Ibu Kota Nusantara Tahun 2022	2023	Rp. 257.000	Baik
128	Monografi	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Peningkatan Birokrasi Tahun 2022	2023	Rp. 360.000	Baik
129	Monografi	Peraturan Pengupahan, Pemutusan Hubungan Kerja dan Ketenagakerjaan	2023	Rp. 211.000	Baik
130	Monografi	Pendataan Kinerja PNS dan Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Edisi Tahun 2020	2023	Rp. 750.000	Baik
131	Monografi	Pengrohan Koperasi dan Perumahan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	2023	Rp. 314.000	Baik
132	Monografi	Salgas Saber Pungli Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2023	Rp. 142.000	Baik

NOF	NAMA BARANG	MERK BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	KONDISI
133	Monografi	Peningkatan Pengembangan Karir, Pemanfaatan Kapasitas Organisasi dan Pengembangan Kompetensi PNS berdasar PPRI No.17 Tahun 2020, PPRI No.11 Tahun 2017, UURJ No.5 Tahun 2014	2023	Rp 395.000	Baik
134	Monografi	Penilaian Kinerja PNS dan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif beserta Tatacara Pelaksanaan Mutasi	2023	Rp 365.000	Baik
135	Monografi	Undang-Undang Perindustrian (UURJ No.3 Tahun 2014) dilengkap Peraturan Menteri Perindustrian Tentang Pedoman Penanganan Pengajuan Masyarakat	2023	Rp 67.500	Baik
136	Monografi	Perunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Desa Buku 1-5	2023	Rp 1.675.000	Baik
137	Monografi	Peraturan Presiden Republik Indonesia No.12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.18 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2023	Rp 314.000	Baik
138	Monografi	Pengampunan Pajak dan Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Beserta Pencegahan dan Pemberantasan	2023	Rp 400.000	Baik
139	Monografi	Kelautan, Perikanan, Pelembutan, dan Kesehatan Hewan	2023	Rp 171.000	Baik
140	Monografi	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perpustakaan Beserta Jabatan Fungsional, Pustakawan dan Angka Kreditnya	2023	Rp 113.000	Baik
141	Monografi	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	2023	Rp 142.000	Baik
142	Monografi	Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam	2023	Rp 228.000	Baik
143	Monografi	Q & A: Problematika dan Solusi Terpilih tentang Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan, Serta Warisan	2023	Rp 342.000	Baik
144	Monografi	Seputar Mengenal Omas, Persekutuan Komanditer, Perkumpulan, Yayasan, dan Korporasi	2023	Rp 228.000	Baik
145	Monografi	Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Permendagri No.108 Tahun 2016)	2023	Rp 400.000	Baik
146	Monografi	KBLI Klasifikasi (Buku Lapangan Usaha Indonesia 2020)	2023	Rp 399.000	Baik
147	Monografi	Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PPRI No.12 Tahun 2017)	2023	Rp 400.000	Baik
148	Monografi	Manajemen PNS (PPRI No.11 Tahun 2017) dilengkapi UU ASN	2023	Rp 225.000	Baik
149	Monografi	Dinibus Law Juklak UU Cipta Kerja 2021 Bidang Penggunaan Tenaga Asing Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	2023	Rp 336.000	Baik

NUP	NAMA BARANG	MERKE BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	KONDISI
150	Monograf	UU RI No 1 Tahun 2023 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	2023	Rp. 402.000	Baik
151	Monograf	UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2023	Rp. 187.000	Baik
152	Monograf	Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law (Dr. H. Salm HS, S.H., M.S)	2023	Rp. 127.000	Baik
153	Monograf	Perilaku Dalam Organisasi (Prof. Dr. Yibowu SE M.Phil)	2023	Rp. 100.000	Baik
154	Monograf	Essays And Commentaries On Indonesian Law (Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum)	2023	Rp. 81.000	Baik
155	Monograf	Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum)	2023	Rp. 163.000	Baik
156	Monograf	Kasus Seleksi Hukum Tata Usah Negara (Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum)	2023	Rp. 153.000	Baik
157	Monograf	Keputusan Jabatan dalam Sistem Peradilan Terpadu (Prof. Dr. D.C. Rangk, S.H., M.H)	2023	Rp. 122.000	Baik
158	Monograf	Kebijakan Pengadilan Pagar Dalam Sistem Peradilan Nasional Indonesia (Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum)	2023	Rp. 122.000	Baik
159	Monograf	Kompilasi Formular - Formular Penanganan Perkara Perdata (Dr. H.F. Pangshon, S.H., M.S)	2023	Rp. 204.000	Baik

YANG MENERIMA  
 PIHAK II (KEDUA)  
 Kepala Bagian Umum



Budi Prasno Widhyansono  
 NIP. 196701181996031001

YANG MENYERAHKAN  
 PIHAK I (PERTAMA)  
 Kepala Bidang Hukum



Dedy Pratawan  
 NIP. 198012282005011002



**BERITA ACARA SERAH TERIMA**  
NOMOR : W2.PB.04.01- 51669

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Berkat Elhan Harefa, S.H.  
NIP. : 198504112010011026  
Jabatan : Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara

Dalam hal ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Maraulina  
NIP. : 19771231 200804 2 001  
Jabatan : Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara

Dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini PIHAK YANG MENYERAHKAN telah memberikan kepada PIHAK YANG MENERIMA sebagaimana PIHAK YANG MENERIMA telah menerima dari PIHAK YANG MENYERAHKAN BARANG MILIK NEGARA (BMN), dengan rincian sebagaimana terlampir pada lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Pihak Kedua,**

**Maraulina**  
NIP. 19771231 200804 2 001

**Pihak Pertama,**

**Berkat Elhan Harefa, S.H.**  
NIP. 19850411 201001 1 026

**Lampiran Berita Acara Serah Terima**  
**Nomor : W2.PB.04.01- 51669**  
**Tanggal : 23 Oktober 2023**

<b>No.</b>	<b>Kode Barang</b>	<b>Uraian Barang</b>	<b>NUP</b>	<b>Merk/ Tipe</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Nilai Perolehan (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
1.	6010101001	Monografi	290-291	-	2 Buah	Rp. 228.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
2.	6010101001	Monografi	292-293	-	2 Buah	Rp. 196.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
3.	6010101001	Monografi	294-295	-	2 Buah	Rp. 228.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
4.	6010101001	Monografi	296-297	-	2 Buah	Rp. 204.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
5.	6010101001	Monografi	298-299	-	2 Buah	Rp. 178.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
6.	6010101001	Monografi	300-301	-	2 Buah	Rp. 302.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
7.	6010101001	Monografi	302-303	-	2 Buah	Rp. 199.500	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
8.	6010101001	Monografi	304-305	-	2 Buah	Rp. 238.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi

9.	6010101001	Monografi	306-307	-	2 Buah	Rp. 208.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
10.	6010101001	Monografi	308-309	-	2 Buah	Rp. 256.500	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
11.	6010101001	Monografi	310-311	-	2 Buah	Rp. 264.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
12.	6010101001	Monografi	312-313	-	2 Buah	Rp. 285.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
13.	6010101001	Monografi	314-315	-	2 Buah	Rp. 199.500	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
14.	6010101001	Monografi	316-317	-	2 Buah	Rp. 228.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
15.	6010101001	Monografi	318-319	-	2 Buah	Rp. 285.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
16.	6010101001	Monografi	320-321	-	2 Buah	Rp. 264.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
17.	6010101001	Monografi	322-323	-	2 Buah	Rp. 285.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
18.	6010101001	Monografi	324-325	-	2 Buah	Rp. 267.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi

19.	6010101001	Monografi	326-327	-	2 Buah	Rp. 171.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
20.	6010101001	Monografi	328-329	-	2 Buah	Rp. 254.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
21.	6010101001	Monografi	330-331	-	2 Buah	Rp. 284.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
22.	6010101001	Monografi	332-333	-	2 Buah	Rp. 285.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
23.	6010101001	Monografi	334-335	-	2 Buah	Rp. 142.500	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
24.	6010101001	Monografi	336-337	-	2 Buah	Rp. 142.500	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
25.	6010101001	Monografi	338-339	-	2 Buah	Rp. 300.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
26.	6010101001	Monografi	340-341	-	2 Buah	Rp. 291.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
27.	6010101001	Monografi	342-343	-	2 Buah	Rp. 228.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
28.	6010101001	Monografi	344-345	-	2 Buah	Rp. 228.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi



29.	6010101001	Monografi	346-347	-	2 Buah	Rp. 294.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
30.	6010101001	Monografi	348-349	-	2 Buah	Rp. 199.500	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
31.	6010101001	Monografi	350-351	-	2 Buah	Rp. 201.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
32.	6010101001	Monografi	352-353	-	2 Buah	Rp. 294.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
33.	6010101001	Monografi	354-355	-	2 Buah	Rp. 250.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
34.	6010101001	Monografi	356-357	-	2 Buah	Rp. 171.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
35.	6010101001	Monografi	358	-	1 Buah	Rp. 245.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
36.	6010101001	Monografi	359-360	-	2 Buah	Rp. 370.500	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
37.	6010101001	Monografi	361	-	1 Buah	Rp. 179.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
38.	6010101001	Monografi	362-363	-	2 Buah	Rp. 312.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi

39.	6010101001	Monografi	364-365	-	2 Buah	Rp. 346.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
40.	6010101001	Monografi	366-367	-	2 Buah	Rp. 396.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
41.	6010101001	Monografi	368-369	-	2 Buah	Rp. 286.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
42.	6010101001	Monografi	370	-	1 Buah	Rp. 246.525	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
43.	6010101001	Monografi	371	-	1 Buah	Rp. 246.525	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
44.	6010101001	Monografi	372-373	-	2 Buah	Rp. 264.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
45.	6010101001	Monografi	374-375	-	2 Buah	Rp. 262.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
46.	6010101001	Monografi	376-377	-	2 Buah	Rp. 198.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
47.	6010101001	Monografi	378-379	-	2 Buah	Rp. 242.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
48.	6010101001	Monografi	380-381	-	2 Buah	Rp. 258.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi

49.	6010101001	Monografi	382-383	-	2 Buah	Rp. 267.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
50.	6010101001	Monografi	384-385	-	2 Buah	Rp. 234.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
51.	6010101001	Monografi	386-387	-	2 Buah	Rp. 201.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
52.	6010101001	Monografi	388-389	-	2 Buah	Rp. 198.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
53.	6010101001	Monografi	390-391	-	2 Buah	Rp. 183.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
54.	6010101001	Monografi	392-393	-	2 Buah	Rp. 258.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
55.	6010101001	Monografi	394-395	-	2 Buah	Rp. 213.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
56.	6010101001	Monografi	396-397	-	2 Buah	Rp. 243.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
57.	6010101001	Monografi	398-399	-	2 Buah	Rp. 183.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
58.	6010101001	Monografi	400-401	-	2 Buah	Rp. 252.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi

59.	6010101001	Monografi	402-403	-	2 Buah	Rp. 228.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
60.	6010101001	Monografi	404-405	-	2 Buah	Rp. 236.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
61.	6010101001	Monografi	406-407	-	2 Buah	Rp. 213.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
62.	6010101001	Monografi	408-409	-	2 Buah	Rp. 243.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
63.	6010101001	Monografi	410-411	-	2 Buah	Rp. 240.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
64.	6010101001	Monografi	412-413	-	2 Buah	Rp. 243.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
65.	6010101001	Monografi	414-415	-	2 Buah	Rp. 243.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
66.	6010101001	Monografi	416-417	-	2 Buah	Rp. 198.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
67.	6010101001	Monografi	418-419	-	2 Buah	Rp. 243.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi

68.	6010101001	Monografi	420-421	-	2 Buah	Rp. 207.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
69.	6010101001	Monografi	422-423	-	2 Buah	Rp. 243.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
70.	6010101001	Monografi	426-427	-	2 Buah	Rp. 243.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
71.	6010101001	Monografi	428-429	-	2 Buah	Rp. 213.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
72.	6010101001	Monografi	430	-	1 Buah	Rp. 156.450	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
73.	6010101001	Monografi	431-432	-	2 Buah	Rp. 228.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
74.	6010101001	Monografi	433-434	-	2 Buah	Rp. 214.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi
75.	6010101001	Monografi	435-436	-	2 Buah	Rp. 304.000	Transfer keluar kepada Divisi Administrasi

**Pihak Kedua,**



**Maraulina**  
**NIP. 19771231 200804 2 001**

**Pihak Pertama,**



**Berkat Elhan Harefa, S.H.**  
**NIP. 19850411 201001 1 026**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT  
Jln. S. Parman No. 256 - Padang 25133  
Telepon 0751-7055471 Faksimili 0751-7055510  
Website : <http://sumbar.kemenkumham.go.id>

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG BMN**

Nomor : W3.PB.06.04-22

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yustika Faella Shufa  
NIP : 20000124 202203 2 001  
Jabatan : Pranata Keuangan APBN  
Instansi : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat

Dalam surat serah terima barang ini bertindak selaku PIHAK PERTAMA yang menyerahkan

Nama : Destra Maharnica  
NIP : 19900101 201901 2 001  
Jabatan : Kusodian Barang Milik Negara  
Instansi : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA/ Penerima barang.

Menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada PIHAK KEDUA ( rincian barang terlampir )

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

PIHAK PERTAMA,  
Pemberi Barang

Yustika Faella Shufa  
NIP. 20000124 202203 2 001

PIHAK KEDUA,  
Penerima Barang

Destra Maharnica  
NIP. 19900101 201901 2 001

Mengetahui,  
Kepala Subbagian Prencanaan Keuangan dan BMN



W. E. M. Ak.  
NIP. 19900101 201012 2 001

**Lampiran Berita Acara**

**Nomor : W3.PB.06.04-22**

**Tanggal : 16 Agustus 2023**

<b>NO</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>NUP</b>	<b>Peruntukkan</b>
1.	Monografi	41	27-67	Divisi Administrasi



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH RIAU

Jl. Jend. Sudirman No. 233 Pekanbaru (28111) Telp / Faks ( 076 ) 22846 - 21880

**BERITA ACARA TRANSFER KELUAR**

Nomor : W.4.2143.PB.04.10 Tahun 2023

Pada hari ini Jumat, tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **N a m a** : M. Fathan Nizar (DIPA BPHN Karwil Kementerian Hukum dan HAM Riau)  
**N I P** : 1973072220002121001  
**Jabatan** : Kepala Bidang Hukum

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI BARANG**

2. **N a m a** : Tuti Utami  
**N I P** : 198104202002122001  
**Jabatan** : Operator BPHN

selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA BARANG**

Pernyataan telah dilakukan transfer barang milik negara (BMN) berupa 56 (lima puluh enam) buah Monografi dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kode Barang/NLP	Spesifikasi barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	E.01.01.01.001	Monografi	56	Bek	Tertanda : Kuitansi pembelian

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Penerima barang

Tuti Utami  
NIP. 198104202002122001

Pemberi barang

  
M. Fathan Nizar  
NIP. 1973072220002121001





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH LAMPUNG**  
Jl. RW. Monginsidi No.184 Teluk Betung Bandar Lampung  
Telepon : (0721) 485427 – 483927 - 474813  
Laman: [www.lampung.kemenkumham.go.id](http://www.lampung.kemenkumham.go.id)

**BERITA ACARA**  
**SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA**  
**NOMOR W9.PB.04.01-4431**

Pada hari ini, Selasa, tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Jl. RW. Monginsidi no 184 Bandar Lampung, saya yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : Arya Dwijayanti  
NIP : 198610292006042001  
Jabatan : Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

Menyatakan bahwa Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Divisi Pelayanan Hukum – BPHN (Kode Satuan Kerja : 408829) telah melakukan Transfer Keluar Barang Milik Negara (BMN) kepada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Divisi Pelayanan Hukum – BPHN (Kode Satuan Kerja : 408824) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Kode Barang/ NUP	Qty	Total	Keterangan
1	Buku Lainnya	6010101999 347-349	3	Rp 347.000,-	Transfer Keluar BMN ke Divisi Administrasi

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan penyusunan Laporan BMN Semester I Tahun 2023 dan apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala Subbagian Pengelolaan  
Keuangan dan Barang Milik Negara



Arya Dwijayanti  
NIP. 198610292006042001



**BERITA ACARA TRANSFER KELUAR BMN**  
Nomor : W.18-PB.05.02 - 4033

Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur di Samarinda, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : DULYONO  
NIP : 196808081993031001  
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum  
(Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA )
2. Nama : ITUN WARDATUL HAMRO  
NIP : 196807081992032001  
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi  
(Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA)

Menyatakan bahwa telah dilakukan transfer keluar BMN dari PIHAK PERTAMA (013.10.1600.408859.000.KD) kepada PIHAK KEDUA (013.01.1600.408855.000.KD) sebagai berikut:

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	QTY	PEROLEHAN		KET
					TAHUN	NILAI	
1	6010101001	MONOGRAFI	1-58	58	2023	5.000.000	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
  
Itun Wardatul Hamro  
NIP 196807081992032001

PIHAK PERTAMA  
  
Dulyono  
NIP 196808081993031001



**FOTO BMM**





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN

Jl. Singjend H. Hasan Basri No. 30 Banjarmasin, Kalimantan Selatan  
Telepon/Fax: 0511-3302790 Laman <http://katsel.kemkumham.go.id>  
Email: [kemkumhamkatsel@ansel.com](mailto:kemkumhamkatsel@ansel.com), [kamwikatsel@kemkumham.go.id](mailto:kamwikatsel@kemkumham.go.id)

BERITA ACARA TRANSFER KELUAR

Nomor: W.19.PB.05.01-CT08

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Kantor : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan  
Nama : Agus Sartono  
NIP : 197102231994031001  
Jabatan : Kepala Bidang Hukum

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama Kantor : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan  
Nama : Rustam Sekka  
NIP : 197206181996031001  
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selanjutnya disebut pihak kedua

Menyatakan bahwa telah melakukan Transfer Barang Milik Negara (BMN) dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berupa Monografi. Daftar BMN terlampir sebagaimana tidak terpisah dalam Berita Acara ini.

Dengan adanya Transfer barang ini, maka tanggungjawab atas barang tersebut di atas beralih kepada Pihak Kedua.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Yang menerima  
Pihak Kedua,

  
Rustam Sekka  
NIP 197206181996031001

Yang menyerahkan  
Pihak Kesatu,

  
  
Agus Sartono  
NIP 197102231994031001

DAFTAR BUKU YANG DIBELI UNTUK PERPUSTAKAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023

NO	JUDUL	PENYUSUN	HARGA SATUAN	JUMLAH	HARGA
1	Fisafat Hukum	Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A.	83.950	2	Rp 157.900
2	Hukum Adat di Indonesia	Saka I.S	105.800	2	Rp 211.600
3	Metode Penelitian Hukum	Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A.	112.700	2	Rp 225.400
4	UU Pemilu (UU RI No. 7 Tahun 2017)	Redaksi (Penghimpun)	136.850	2	Rp 273.700
5	Sosiologi Hukum	Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A.	90.500	2	Rp 181.000
6	Delik Delik Korupsi	Mahrus Ali & Dani	108.100	2	Rp 216.200
7	Hukum Pidana Anak di Indonesia	Mahrus Mursjad	153.400	2	Rp 306.800
8	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Ibu Sina C.	184.000	2	Rp 368.000
9	Kejahatan di Bidang Ekonomi	Andi Hamzah	194.350	2	Rp 388.700
10	Tindak Pidana Korupsi	Evi Hartanti	111.500	2	Rp 223.100
11	Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif	Bambang Waluyo	90.850	2	Rp 181.700
12	Sistem Penadilan Pidana Anak di Indonesia	R. Wiyono	90.850	2	Rp 181.700
13	Tindak Pidana Pornografi	Adami C.	108.250	2	Rp 216.500
14	Victimologi: Perlindungan Korban dan Saksi	Bambang Waluyo	73.600	2	Rp 147.200
15	Hukum Agraria	Supradi, S.H., M.Hum	201.250	2	Rp 402.500
16	Teori dan Kapita Selekta Kriminologi	H. Romli	98.900	2	Rp 197.800
17	Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak	Salim H.S., S.H.	94.300	2	Rp 188.600
18	Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	M. Arba	85.100	2	Rp 170.200

19	Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)	Salim H.S., S.H.	111,550	2	Rp	223,100
20	Uji Tuntas Hukum Legal Due Diligence)	Rio C	100,050	2	Rp	200,100
21	Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan	Eddy Army	129,950	2	Rp	259,900
22	Hukum Pengangkatan Anak	Rusti P	134,550	2	Rp	269,100
23	Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara	Ahmad Redi	104,650	2	Rp	209,300
24	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata	Fym Haryadi	146,050	2	Rp	292,100
25	Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online	Johannes I.	117,300	2	Rp	234,600
26	Aspek Hukum Startup	Rio C	109,250	2	Rp	218,500
27	Hukum Investasi dan Pasar Modal	Rokhmatussaldyah dkk.	131,100	2	Rp	262,200
28	Hukum Perseroan Terbatas (Hard Cover)	M. Yahya Harshap, S.H.	311,650	2	Rp	623,300
29	Insider Trading, Indikasi, Pembuktian dan Penegakan Hukum	Arman Nefi	151,600	2	Rp	303,600
30	Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia	Fard Wardi	126,350	2	Rp	252,700
31	Pengantar Pemahaman Konsep Dasar Sektor Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	Sambang Kesowo	150,650	2	Rp	301,300
32	Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi: Human Rights in Democratic Rechtsstaat	Nurul Qamar	92,000	2	Rp	184,000
33	Hukum Bisnis Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan	Ted S.	96,460	2	Rp	192,900
34	Hukum dan Kebijakan Publik	Fard Wardi	111,550	2	Rp	223,100

35	Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Ahmad Redi	164,450	2	Rp	328,900
36	Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan (Edisi Revisi)	Adrian Sutedi, S.H., M.H.	215,050	2	Rp	430,100
37	Penegakan Hukum Lingkungan (Edisi Revisi)	Sukanda	149,500	2	Rp	299,000
38	Akses Pengkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank	Johannes I.	123,000	2	Rp	246,100
39	Politik Hukum	Prof. Dr. H. Abdul Lili, S.H., M.H. & Hasti Al	100,050	2	Rp	200,100
40	Pengadilan HAM (AD HOC): Telaah Kelembagaan dan Kebijakan Hukum	Sularto	149,500	2	Rp	299,000
41	Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional (Edisi Kedua)	Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H.	93,150	2	Rp	186,300
42	Hukum Adat Hari Mengubati Negara	Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H., M.H.	60,950	2	Rp	121,900
43	Perkawinan Bawah Umur di Indonesia	Dr. Sonny Dewi Juliah, S.H., M.H., CN.	44,850	2	Rp	89,700
44	Metode Penelitian Hukum	Dr. Elisabeth Nurhaini, S.H., M.Hum.	63,250	2	Rp	126,500
45	Kekerasan Terhadap Perempuan (Revisi)	Prof. Dr. M. Munandar Sulaiman	55,200	2	Rp	110,400
46	Hukum Kekayaan Intelektual	Prof. Dr. Ahmad M. Rami	52,900	2	Rp	105,800
47	Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika	Dr. Novi E. Bashora, S.H., M.H.	90,500	2	Rp	181,000
48	Moral Pancasila, Hukum dan Kekerasan	Prof. Dr. H. Ronli Almasasmita	50,600	2	Rp	101,200
49	Kredit Perbankan	Dr. Ety Mulyati, S.H., M.H.	78,200	2	Rp	156,400
50	Eska Profesi Hukum	Dr. Serika Aprita, S.H., M.H.	42,550	2	Rp	85,100

51	Ekstensi Hukuman Mati	Dr. Ir. Sulmi Dasco Ahmad	59,800	2	Rp	119,600
52	Pelanggaran Merek di Indonesia	Dr. Rika Ratna Permata	42,550	2	Rp	85,100
53	Cyber Bullying	Dr. Sayid Mohammad Ridj Novel	68,000	2	Rp	136,000
54	Perlindungan Privasi di Era New Normal	Dr. Endah Dewu Nawangsari Sukartan	109,250	2	Rp	218,500
55	Yurisdiksi dalam Hukum Sber	Dr. Purno Cita Nugraha	80,500	2	Rp	161,000
56	Refleksi Sosiologi Hukum Ed. Revisi	Prof. Dr. Saifulah	62,100	2	Rp	124,200
57	Hak Cipta Era Digital	Dr. Rika Ratna Permata	52,900	2	Rp	105,800
58	Cyber Law: Aspek Data Privasi Ed. Revisi	Dr. Seta Dewi Rosadi	70,150	2	Rp	140,300
59	Hak Cipta dalam Media Over The Top	Dr. Tasya Safwanitaranti	48,300	2	Rp	96,600
60	Hak Cipta dalam Konteks Ekonomi Kreatif	Dr. Ranti Fauza Mayana	67,850	2	Rp	135,700
61	Akta Perjanjian Praperkawinan dan Pascaperkawinan	Dr. Habib Adje	51,750	2	Rp	103,500
62	Yayasan dalam Teori dan Praktek	Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H.	56,350	2	Rp	112,700
63	Aspek Hukum Hubungan Platform Digital	Prof. Dr. Ahmad M. Ramli	66,000	2	Rp	132,000
64	Hukum Sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia	Prof. Dr. Ahmad M. Ramli	103,500	2	Rp	207,000
65	Lagu Musik dan Hak Cipta	Prof. Dr. Ahmad M. Ramli	71,300	2	Rp	142,600
66	Pelayanan Perpustakaan	Dr. Iskandar	70,150	2	Rp	140,300
67	Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif	Prof. Dr. Endang Komara	86,250	2	Rp	172,500
68	Psikologi Bencana	Zarina Akber, Ernita Zakiah, Gita Inanda	115,000	2	Rp	230,000
69	Pemidanaan Korporasi & Gugatan Class Action Ganti Rugi Serta Pencabutan Izin Lingkungan Hidup	Gatut Supramono	88,700	2	Rp	177,400



70	Hukum Kapitalita	Jono, S.H.	108,100	2	Rp	216,200
71	Hukum Persekutuan di Indonesia	Yetty Komalasari Dewi	75,900	2	Rp	151,800
72	Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak	M. Nasir Asnawi	115,000	2	Rp	230,000
73	Hukum Lembaga Keuangan dan Perbankan	Dr. Selika Agrita & Rio Adhitya	82,800	2	Rp	165,600
TOTAL			7,496,150		Rp	14,992,300

Banjarmasin, October 2023

Kepala Bidang Hukum



Agas Sartono

NIP. 497102231994031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA  
Jalan Diponegoro No. 87, Manado 95112  
Telepon : (0431) 870359, Faksimile : (0431) 864288

Laman : [www.kemhum.go.id](http://www.kemhum.go.id) Surel : [lawhanudat@kemhum.go.id](mailto:lawhanudat@kemhum.go.id)

**BERITA ACARA TRANSFER KELUAR BMN**  
Nomor : W.25.PB.03.03- 4766

Pada hari Selasa Tanggal Dua Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Stafker : Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara DIPA BPHN (408869)  
Nama : Astri Syarifudin  
NIP : 198107062005012001  
Jabatan : Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

Dalam hal ini bertindak sebagai Pemberi Barang

2. Nama Stafker : Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara DIPA SEKJEN (408861)  
Nama : Boney Ngajow  
NIP : 198108132007031002  
Jabatan : Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Dalam hal ini bertindak sebagai Penerima Barang

Menyatakan bahwa telah dilakukan transfer keluar Barang Milik Negara (BMN) berupa :

KODE	URAIAN	SAT	KUANTITAS	NILAI
135121	Aset Tetap Lainnya			
6.01.01.01.001	Monografi	Buah	62	7.750.000

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Penerima Barang  
Kepala Subbagian  
Pengelolaan Keuangan dan  
Barang Milik Negara

Boney Ngajow  
NIP. 198108132007031002

Pemberi Barang  
Kepala Subbidang Penyuluhan  
Hukum, Bantuan Hukum, dan  
Jaringan Dokumentasi Informasi  
Hukum

Astri Syarifudin  
NIP. 198107062005012001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH BALI

Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar Timur 80234  
Telepon : (0361) 224856

Laman : [bali.kemenkumham.go.id](http://bali.kemenkumham.go.id) Surel : [kanwilbali@kemenkumham.go.id](mailto:kanwilbali@kemenkumham.go.id)

**BERITA ACARA TRANSFER KELUAR BMN**  
**Nomor :W.20.PB.05.05-6210**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh, Bulan Juni, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama Satker : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali (408879)  
Nama : Isya Nalapraja  
NIP : 197910122003121002  
Jabatan : Kasubbid Penyuluh Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH
2. Nama Satker : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali (408870)  
Nama : NI Wayan Armasanthi  
NIP : 197411012001122002  
Jabatan : Kasubag Keuangan dan BMN

Menyatakan bahwa telah dilakukan transfer keluar Barang Milik Negara (BMN) berupa Monografi.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Penerima Barang  
Kasubag Keuangan dan BMN

NI Wayan Armasanthi  
NIP. 197411012001122002



Pemberi Barang  
Kasubbid Penyuluh Hukum, Bantuan  
Hukum dan JDIH

Isya Nalapraja  
NIP. 197910122003121002



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
TRANSFER BMN**

Nomor: W22.PB.05.01-4791

Pada hari Selasa tanggal Tiga Belas bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Bertindak untuk dan atas nama Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT (BPHN) selanjutnya disebut sebagai (Pihak Pertama)

1. Nama Kantor : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT (BPHN)  
Nama : NIKEN PURWOSARI  
NIP. : 200111212022032001  
Jabatan : Operator SIMAK BMN
2. Nama Kantor : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT (SEKJEN)  
Nama : REZANI FUADHINA SA  
NIP. : 198708122019012001  
Jabatan : Operator Simak BMN

Bertindak untuk dan atas nama Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT (SEKJEN) selanjutnya disebut sebagai (Pihak Kedua)

Pihak Pertama menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) berupa :

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	KUANTITAS	SATUAN	NILAI
1	6010101001	Monografi	85	Buah	Rp. 11.000.000,-

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dapat di penggunaan sebagaimana mestinya.

Penerima  
Operator BMN  
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT  
(SEKJEN)

REZANI FUADHINA SA  
NIP. 198708122019012001

Pemberi  
Operator BMN  
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT  
(BPHN)

NIKEN PURWOSARI  
NIP. 200111212022032001

Mengetahui,

Penerima  
Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan  
BMN  
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT  
(SEKJEN)

SELFANI MARLIANA NAUTANI, SH  
NIP. 198609182006042005

Pemberi  
Kepala Bidang Pelayanan Hukum  
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT  
(BPHN)

ERNI MAMO LI, SH, M.Hum  
NIP. 198902231997032001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH JAMBI**

Jalan Kapten Sujono Kota Baru Jambi 36128  
Telepon (0741) 40035-40127, Faksimil (0741) 444226  
Laman : <http://jambi.kemkumham.go.id> Surel : [karwil.jambi@kemkumham.go.id](mailto:karwil.jambi@kemkumham.go.id)

**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
TRANSFER BMN**

Nomor : W.5-PB.05.05-5

Pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (26/06/2023) bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SURYO WIDODO, S.H  
NIP : 19710514 199003 1 002  
Jabatan : Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi

Bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Hukum Nasional Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** (yang menyerahkan);

2. Nama : AMAT DJOEMADI, S.H., M.H.  
NIP : 19720402 199203 1 001  
Jabatan : Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Jambi

Bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** (yang menerima).

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan BMN aset tetap lainnya berupa **Monografi** (8.01.01.01.001) sebagaimana terlampir yang ditransfer dari UAKPB BPHN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi ke UAKPB Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi dan **PIHAK KEDUA** menerima transfer atas BMN berupa aset tetap lainnya yang ditransfer dari UAKPB BPHN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi. Data transfer tersebut telah di registrasi ke SAKTI BMN UAKPB UAKPB Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana adanya.



PIHAK PERTAMA  
  
SURYO WIDODO, S.H.  
NIP. 19710514 199003 1 002

Lampiran :

Nomor : W.5-PB.05.05-5

Tanggal : 26 Juni 2023

**DAFTAR TRANSFER BMN**  
**MONOGRAFI HUKUM PERPUSTAKAAN JDIH**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI**

No	Judul Buku	Penerbit	Kode	Harga Satuan	Ekuivalen	Jumlah
1	Hukum Agraria Indonesia	CV Sinar Aksara Jaya	29503901343	82.000	2	164.000
2	Hukum Waris Perdata	CV Sinar Aksara Jaya	29503901350	95.000	2	190.000
3	Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)	CV Sinar Aksara Jaya	29503921170	118.000	2	236.000
4	Hukum Waris Islam : Lengkap dan Praktik (Edisi Kedua)	CV Sinar Aksara Jaya	29503921156	88.000	2	176.000
5	Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP	CV Sinar Aksara Jaya	29503901109	270.000	2	540.000
6	Hukum Kekayaan Hak Intelektual	CV Sinar Aksara Jaya	29503901211	227.000	1	227.000
7	UU Narkotika 2009	CV Sinar Aksara Jaya	29911901179	28.000	2	56.000
8	UU Paten& Merek dan Indikasi Geografis	CV Sinar Aksara Jaya	29911901245	38.000	2	76.000
9	UU Perlindungan Konsumen (UU RI No 8 Tahun 1999)	CV Sinar Aksara Jaya	29911901258	66.000	2	132.000
10	UU Pomografi	CV Sinar Aksara Jaya	29911901178	10.000	3	30.000
11	Fiqh Muamalat : Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam	CV Sinar Aksara Jaya	39109901016	204.000	2	408.000
12	Manajemen Sumber Daya Manusia	CV Sinar Aksara Jaya	19406901108	136.000	2	272.000
13	Menulis Artikel Ilmiah yang Komunikatif	CV Sinar Aksara Jaya	10601901013	60.000	2	120.000
14	Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara	CV Sinar Aksara Jaya	19510901001	52.000	1	52.000
15	Tata Kelola Pemerintahan Desa	CV Sinar Aksara Jaya	19510901003	99.000	1	99.000
16	Manajemen Sumber Daya Manusia : Membangun Tim Kerja	CV Sinar Aksara Jaya	19406901097	256.000	2	512.000
17	Hukum Pengangkatan Anak	CV Sinar Aksara Jaya	29503901277	117.000	2	234.000
18	Perancangan Kontrak dan MOU	CV Sinar Aksara Jaya	29503901148	97.000	2	194.000
19	Corporate Social Responsibility	CV Sinar Aksara Jaya	29503901163	88.000	2	176.000
20	Pendidikan Anti Korupsi : Kajian Awal Korupsi, Teori dan Praktik	CV Sinar Aksara Jaya	29503901375	97.000	1	97.000
21	HAM dan Negara Hukum Demokrasi	CV Sinar Aksara Jaya	29503901320	80.000	1	80.000
22	Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan	CV Sinar Aksara Jaya	29503901354	91.000	1	91.000
23	Delik-Delik Khusus, Kejahatan Jabatan	CV Sinar Aksara Jaya	29503901212	175.000	2	350.000

24	Hukum Kepegawaian di Indonesia Edisi Kedua	CV Sinar Aksara Jaya	29503921388	102.000	2	204.000
25	Peraturan Lengkap Fidusia UU RI No. 42 Tahun 1999	CV Sinar Aksara Jaya	29911901259	31.000	2	62.000
26	Tindak Pidana Khusus	CV Sinar Aksara Jaya	29503901257	130.000	2	260.000
27	Pemerintahan Daerah di Indonesia (Edisi Revisi)	CV Sinar Aksara Jaya	29510901014	138.000	1	138.000
28	Peradilan Etik dan Etika Konstitusi	CV Sinar Aksara Jaya	29503911350	131.000	1	131.000
29	Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	CV Sinar Aksara Jaya	29503901400	143.000	1	143.000
30	Hukum Pemerintahan di Indonesia	CV Sinar Aksara Jaya	29503901138	68.000	1	68.000
31	Pengantar Ilmu Hukum	CV Sinar Aksara Jaya	29503901064	119.000	1	119.000
32	Ilmu Pemerintahan	CV Sinar Aksara Jaya	19510901023	173.000	1	173.000
33	Pengembalian Asas Tindak Pidana	CV Sinar Aksara Jaya	19510901023	94.000	2	188.000
<b>TOTAL</b>					<b>30</b>	<b>6.000.000</b>



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH JAMBI**

Jalan Kapten Supeno Kota Baru Jambi 30128  
Telepon (0741) 40285- 40127, Faksimil (0741) 444029  
Laman : <http://jambi.kemkumham.go.id> Surel : [kanwil.jambi@kemkumham.go.id](mailto:kanwil.jambi@kemkumham.go.id)

**BERITA ACARA TRANSFER KELUAR BMN**  
Nomor : W.5-PB.05.05-5

Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26/06/2023) bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Reiky Harianto, S.E.  
NIP : 199110182020121001  
Jabatan : Operator BMN UAKPB BPHN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi  
Bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Hukum Nasional Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** (yang menyerahkan);
2. Nama : Fitra Surya Mandara, S.E.  
NIP : 19880718 2020121001  
Jabatan : Operator BMN UAKPB Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi  
Bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** (yang menerima).

Menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah melakukan transfer Keluar Barang M&K Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Kuantitas	Nilai	Kondisi
1	Monografi	Tahun 2023	55	6.000.000	Baik

Demikian Berita Acara Transfer Keluar BMN ini dibuat untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan BMN Semester I Tahun 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Fitra Surya Mandara, S.E.  
NIP. 19880718 2020121001

PIHAK PERTAMA

Reiky Harianto, S.E.  
NIP. 199110182020121001





# KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH BENGKULU

Jalan Pangeran Natadisa Km. 7 Bengkulu 38225

Telepon : (0738) 36743-33334 Faksimile (0738) 36304

Laman : <http://bengkulu.kemhum.go.id> Surel : [cdl\\_bengkulu@kemhum.go.id](mailto:cdl_bengkulu@kemhum.go.id)

## BERITA ACARA SERAH TERIMA BUKU-BUKU HUKUM NOMOR : W.S.PBL.04.01-230

Pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan bulan Mei tahun 2023 (9-5-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Bu Ahyani Rumiawati  
NIK : 198812091990032001  
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama,

2. Nama : Achmad Brahmantyo Machmud  
NIK : 197911142000021001  
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua,

Menyatakan bahwa telah melakukan serah terima Buku-buku Hukum dengan rincian sebagai berikut

NO	JUDUL BUKU	PENYARANG	ISBN
1	FILSAFAT HUKUM	ARMUDO ACHMADI	978-621-4417-7
2	AMPU ASAS-ASAS PENGOJAHAN UNDANG-UNDANG	MAR DAN HIRWONO	978-625-231-425-7
3	ASAS-ASAS PERSEKUTUAN PER LUAR	TULANGRI	978-675-759-230-8
4	DASAR-DASAR POLITIK HUKUM	IRAN SYALURAH	979-421-988-1
5	OMENSI KORUPSI KEBURAHAN (PEJABAT) PUBLIK	ASEP N MULYANA	978-625-231-603-7
6	FILSAFAT HUKUM	MUHAMMAD SYARI	978-675-759-300-2
7	FILSAFAT HUKUM KONSEPSI & IMPLEMENTASI	ABRIYAN	978-625-231-346-8
8	FILSAFAT TEORI & SINGK HUKUM	TEGUR PRASETYO	978675759 657 8
9	HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PRAKTIK	AYMAN FACIL, SUMADJIBRANO EDI SUBYANTO, ANNA TERRELLER	978 625 231-123-8
10	HUKUM ACARA PERALIHAN TATA USAHA NEGARA	ROZALI ABDULLAH	9794213101
11	HUKUM ADAT INDONESIA	SOEPHONO SOEKANTO	978 421 988 1
12	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA RIWAYAH RI	RIWAN IRI	979 759-028 8
13	HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	FUCHI SETIAWATI	978-625-425-229-7
14	HUKUM DAN KEADILAN	UNITAR	978-675759-627-8
15	HUKUM HAM DAN HUKUM HUMANITER	ANDREY SUKATMORO	978 675 759-798 3
16	HUKUM ISLAM DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA	MAR DAN	978-625-425-324-0
17	HUKUM JAMINAN DAN JAMINAN KREDIT	M. BAHAR	978-675-759-146-2
18	HUKUM KOMERSIASIAL SUKTI PERDANTAR	SAYU DAN ANDONO	978-625-073-007-7
19	"HUKUM KELUARNEGARA Melalui Hukum Perair & Indonesia"	ZAIM ACHMADI	978-625-231-346-8
20	"HUKUM KELUARNEGARA Melalui Hukum Perair Dalam Perairan"	ROHINDAR SEMBRING	978-625-425-621-8
21	HUKUM KEPALITAN & PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN	RO CHRISTIYAN	978-625-231-815-7
22	HUKUM KEPERKERJAAN Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUN PERKERJAAN, Hukum Islam dan Hukum Adat, J. & I. KODIA	ZAIM ACHMADI	978-625-425-286-1
23	HUKUM KEPERKERJAAN Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUN PERKERJA (2015)	ZAIM ACHMADI	978-625-425-286-4

	Isi dan Judul Buku	Penyusun	ISBN
24	HUKUM KEJARAN NEGARA DI INDONESIA DALAM TEORI DAN PRAKTIK	HADIYANTO	978-623-372-893-4
25	HUKUM KEMERDEKAAN	AMIN NASUTION	978-678-798-410-4
26	HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK	SALIM HS	978-623-231-550-8
27	HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH	YUSMANI HADYIMZODI	978-603-423-030-0
28	HUKUM PERILINDUNGAN & PENGANGKATAN ANAK	M. FAUZAN	978-678-798-154-8
29	HUKUM PERTANAHAN ADAT	ROSNIDAR SEMERING 1	978-603-423191-1
30	HUKUM PIDANA	ERNO	978-603-423-707-1
31	HUKUM PIDANA KHUSUS LINGKUP DAN SANKSI PIDANANYA	ROSLYAH DAN SALIM HS	978-603-423-194-2
32	HUKUM PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	ADAMI CHAUDRY	978-678-798-630-7
33	HUKUM PIDANA BILATU PENGANTAR	TOPO SANTOSO	978-623-231-430-8
34	HUKUM TATA NEGARA INDONESIA	ELLYDAR CAHDI	978-623-231-264-7
35	ILMU NEGARA	IRWAN STRAUMAN	978-603-423-487-7
36	ILMU NEGARA DALAM PERUMBUHAN PELAKSANA SELATAN DAN NEGARA HUKUM	SYAFUL BAKIR	978-603-423-334-8
37	ILMU PERUNDANG-UNDANGAN Teori dan Praktek di Indonesia	PUTERA ASTOMO	978-603-423-818-7
38	ILMU PERUNDANG-UNDANGAN Pengantar Rancangan Terhadap Jenis Peraturan Perundang-undangan	RECCA ANGGRENI	978-623-231-116-0
39	INTERFACE HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL	RAHMA JEMEF	978-678-798-616-1
40	KAJIAN PREVIEW TERHADAP UNDANG-UNDANG	ROCKI SEMARTA	978-623-231-816-1
41	KAJIAN REVIEW DI MASYARAKAT AGUNG II	ZARAL ARFIN HOSSEIN	978-678-688-258-2
42	KEPASTIAN HUKUM DALAM PROSES ARBITRASE SEBAGAI FORUM PENYELESAIAN BERSIKUTAS BERSAMA	"Agne Gurkaya Ka-rawanika"	978-623-231-831-8
43	KONSEP HUKUM PERDATA	SUNIR FLACIY	978-678-798-768-8
44	KONSEP DASAR DAN PRINSIP PRINSIP PERADILAN TATA USAHA NEGARA	Umar Dani	978-623-372-882-8
45	MEMAHAMI MEMACARA PIDANA	HULMAN PANGUTAN	978-623-231-883-1
46	KRIMINOLOGI (TOPO SANTOSO)	TOPO SANTOSO	978-678-421-827-8
47	KUMPULAN ASAS-ASAS HUKUM	AMRILYAS	978-603-423-643-3
48	LEGAL DRAFTING: TEORI DAN PRAKTIK PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN	LUFTI ANDONI	978-603-423-894-8
49	LEGAL OPINION	ABRIHAM AMCO	978-3894-23-6
50	MEDIASI ALTERNATIF PENYELESAIAN BERSIKUTAS	SUNANABDOSH AMRAN	978-678-798-871-8
51	MEMAHAMI HUKUM	SATYA APRANTO	978-678-798-278-8
52	MEMBANGUN POLITIK HUKUM	MARLUK MO	978-678-798-214-1
53	METODOLOGI PENELITIAN HUKUM (Teori, Teknik dan Praktek) ONLINE LAW DISKUSI	SUTERJI	978-603-423-876-1
54	METODOLOGI PENELITIAN HUKUM (Teori, Teknik dan Praktek) ONLINE LAW DISKUSI PENGADAPANNYA	ZENAD WEDI DAN BINTU SINA CHANDRANEGARA	978-623-231-428-8
55	PAHAM PERATURAN DAERAH	HUSLA	978-678-798-698-8
56	PENGANTAR TEORI HUKUM FACH PENELITIAN	SALIM HS & ERLINA SOPTORNAH NURDANI	978-678-798-888-8
57	PERKEMBANGAN HUKUM DALAM SISTEM PEMILIHAN LEBUM	ZARAL ARFIN HOSSEIN	978-603-423-221-2
58	PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA	ARISTONA PANGARIBUAN	978-603-423-075-1
59	ARGUMENTUM IN CONSTITUTUM, KAPITA SELECTA PEMERINTAH HUKUM DAN KONSTITUSI	MUHAMMAD MAHRUL ALI & FAR MUHAMMAD FAIZ	978-623-372-298-8
60	HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH	ALBORN PALAROSU, ANANTHA AYU DEVTASARI & MUHAMMAD MAHRUL ALI	978-623-372-178-8
61	REKONSTRUKSI HUKUM ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	RUBY	978-623-372-243-8
62	PERKEMBANGAN HUKUM ACARA PIDANA	OLY VIANA ACUSTRE & ERLINA NARITA CHRISTIN SINAGA	978-623-372-138-1
63	PENGANTAR ILMU HUKUM	SUFYANAH MARZUKI	978-623-372-487-3
64	DASAR-DASAR HUKU (SISWA ISLAM DESA) PARADIGMA BARU DASAR HUKUM ISLAM INDONESIA	JONI EMRIZEN & ALYWA SALEH	978-603-231-918-8

66	JAMINAN KELUHA	RIO CHRISTIANAH & JANUAR KOLING SAPUTERA	075-823-373-483-4
68	VIKTIMOLOGI	BAHOLU ALI	075-823-331-587-8
67	PENGANTAR HUKUM NEGARA	TESUH PRASETYO	075-823-331-585-0
69	HUKUM PERANA	TESUH PRASETYO	075-879-799-295-7
66	PONDOK POKOK HUKUM DAGANG	JAENI ACHMADI & BUDI SUTYONO	075-823-423-585-8
70	WELFARE STATE VS GLOBALISASI DAGANGAN NEGARA KESEJAHTERAAN DI INDONESIA	FALDANA	075-823-331-594-0
71	HUKUM HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF INTERNASIONAL, REGIONAL, DAN NASIONAL	ERIK RIYADI	075-823-423-283-0
72	METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF BERBASIS PENGALAMAN DIRI LAPANGAN	SITI KHOLIFAH SUTAWAN SUYADNYA	075-823-423-585-2
73	FILSAFAT HUKUM ISLAM N. SURYI ALBANI	ARMAD SURRI & ALBANI NADUTON	075-879-799-584-0
74	ASAS-ASAS HUKUM PERSELISIHAN	ALOYSIUS UNYONO	075-879-799-675-5
75	HAK PILIH DALAM PEMILIHAN UMUM	KHARIS FANBE	075-823-373-613-0
76	HUKUM BENEH	JAENY ACHMADI	075-799-533-9
77	HUKUM PEMBAYARAN USHA	RIO CHRISTIANAH	075-823-331-458-0
78	HUKUM PERUSAHAAN BENTUK-BENTUK SA DAN USHA DI INDONESIA	MUNADI	075-823-423-385-7
79	HUKUM PERANA KONSILIS	HAFIDAH SATRA	075-823-373-383-1
80	HUKUM WARIS ADAT	ROSDIAR SEMBRING	075-823-331-794-8
81	PENGANTAR HUKUM DAGANG	ADUS SARDJONO	075-879-799-685-0
82	HUKUM AZAS PERUSAHAAN BENEFIT PROSES PEMILI	RAHMAT SALLA	075-823-331-291-7

Barang Milik Negara yang telah diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua tersebut agar dicatat ke dalam Aplikasi SAKTI Modal Aset sebagai Barang Milik Negara.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama,



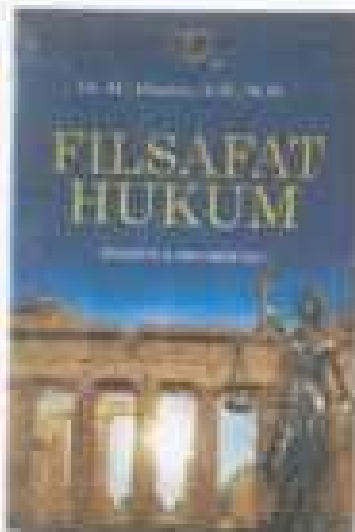
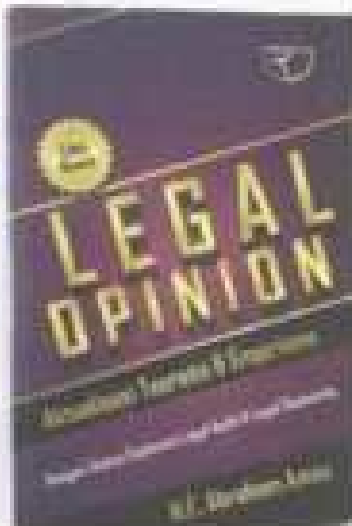
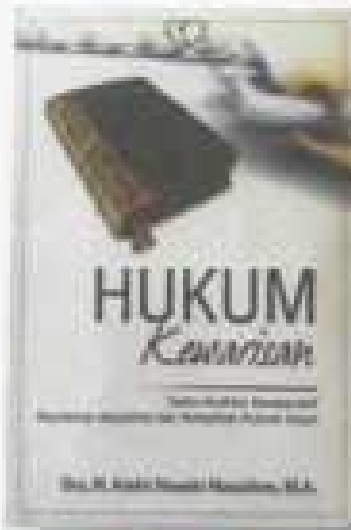
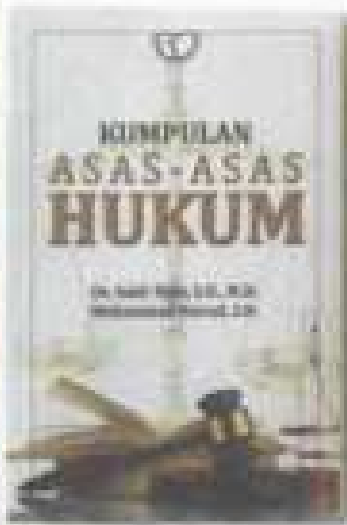
Ba Ahyani Kurniawati  
NIP. 196812091993032001

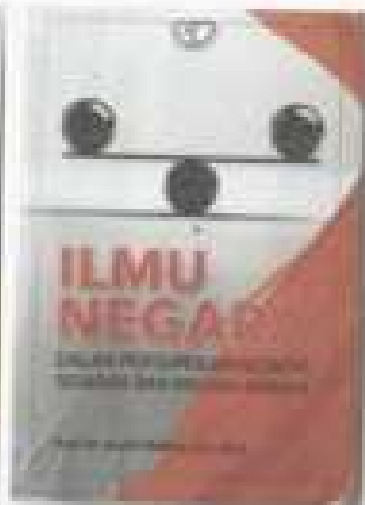
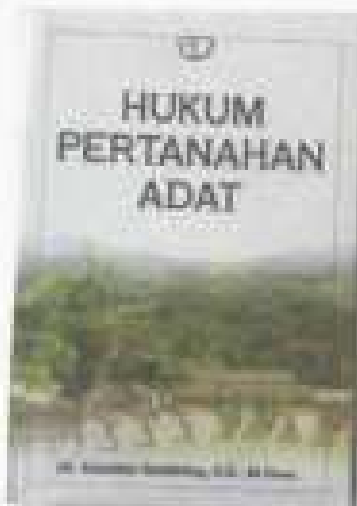
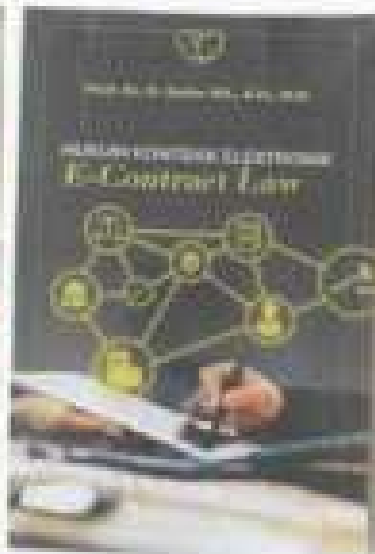
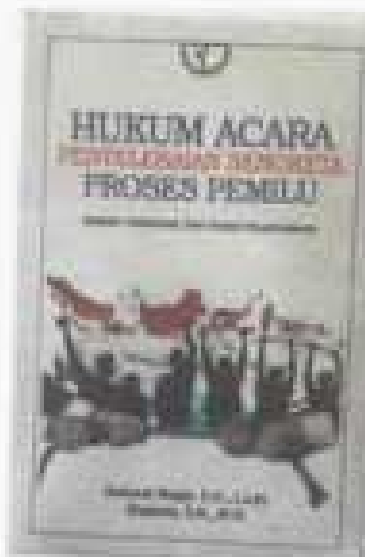
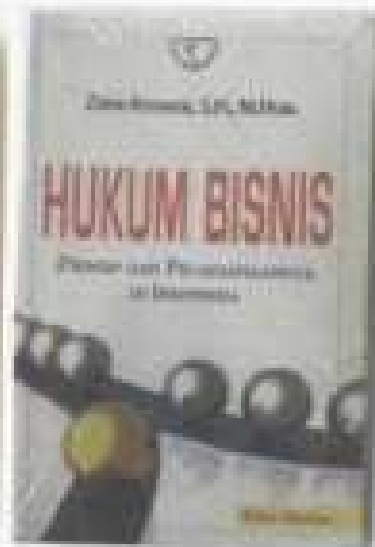
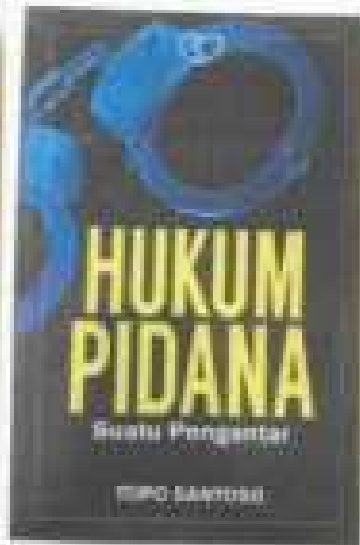
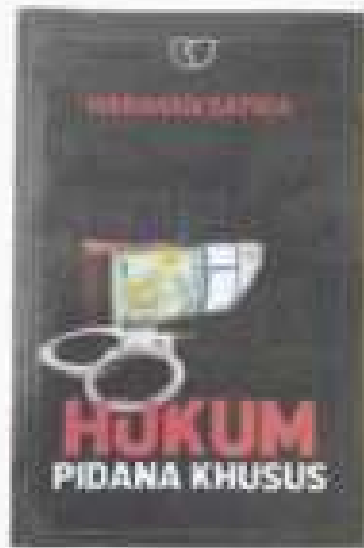
Pihak Kedua,

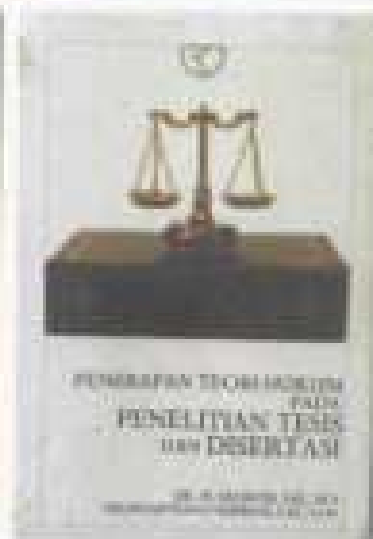
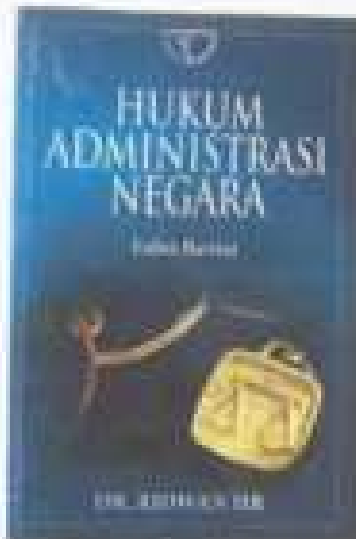
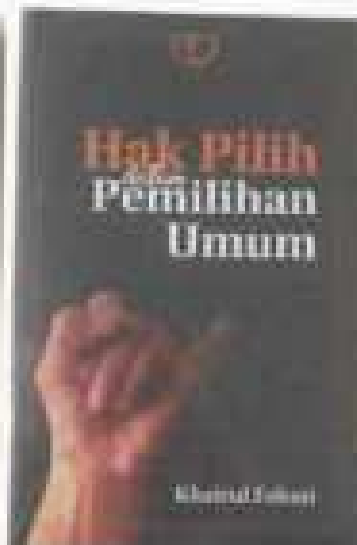
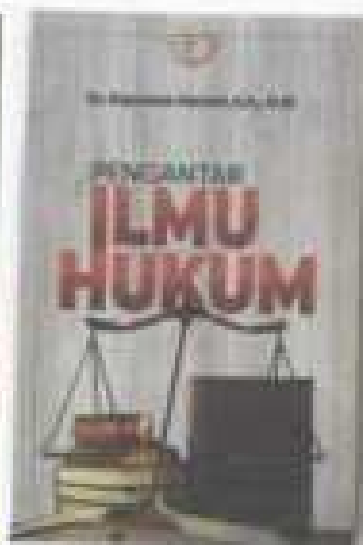


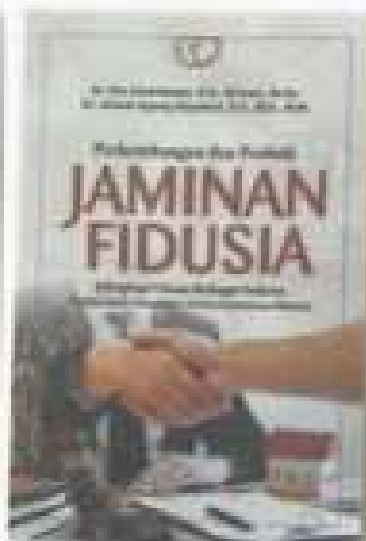
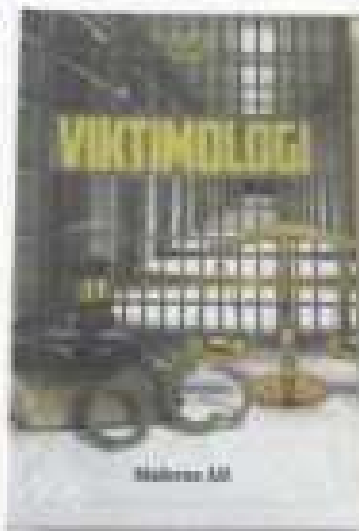
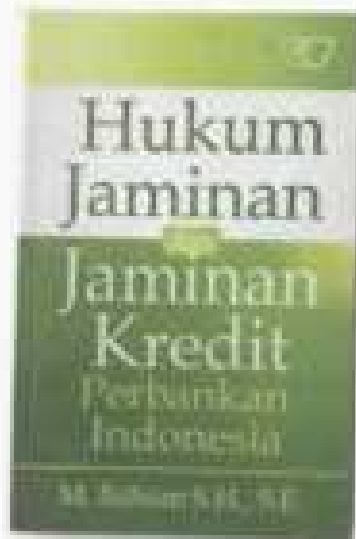
Achmad Brahmantyo Machmud  
NIP. 197911142000021001



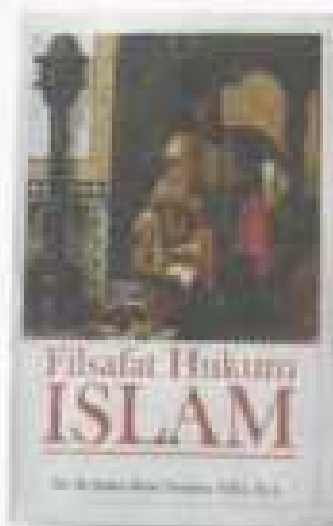
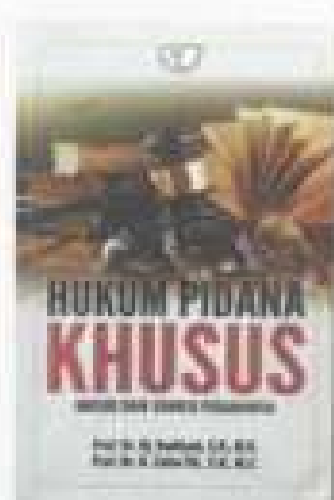
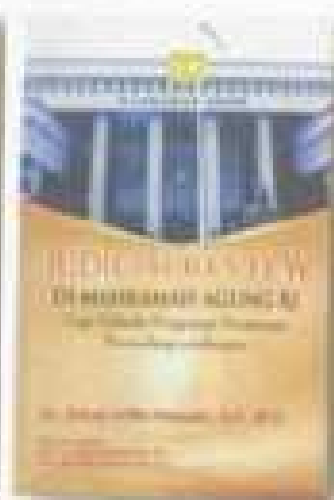


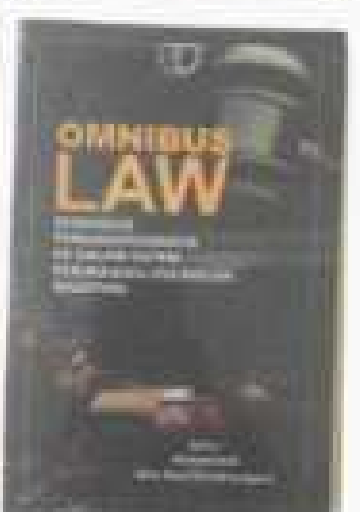
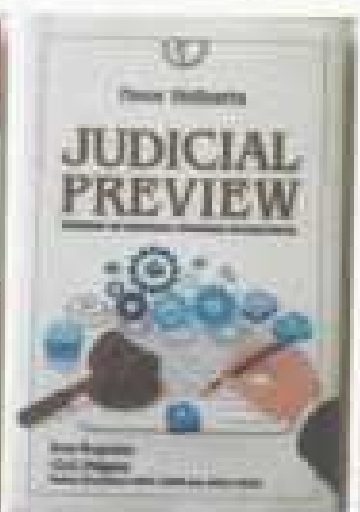
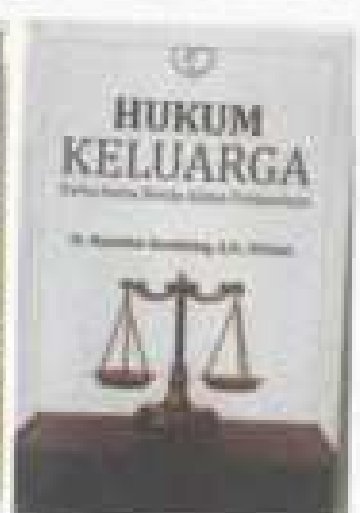
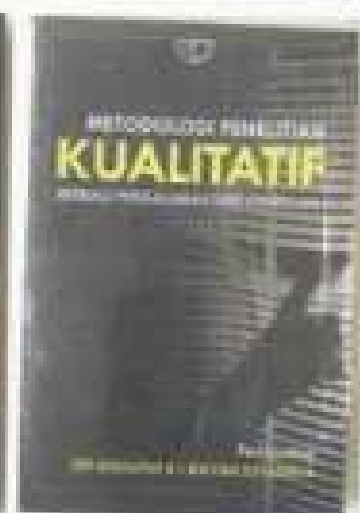
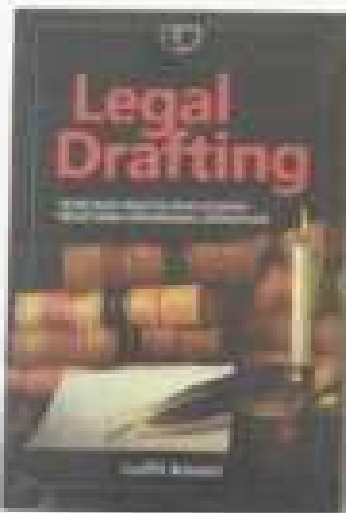
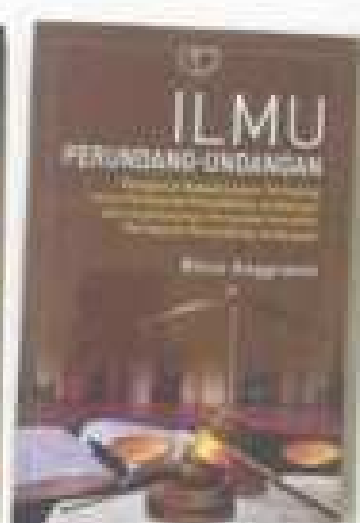
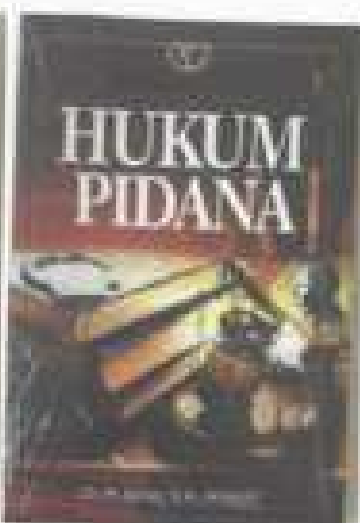
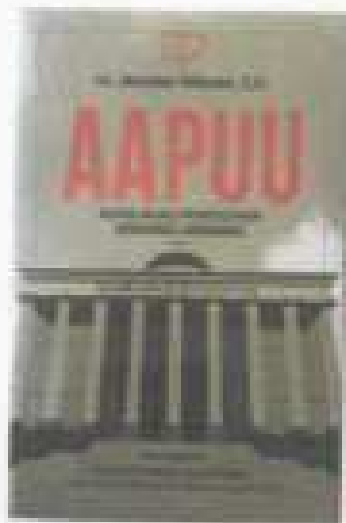


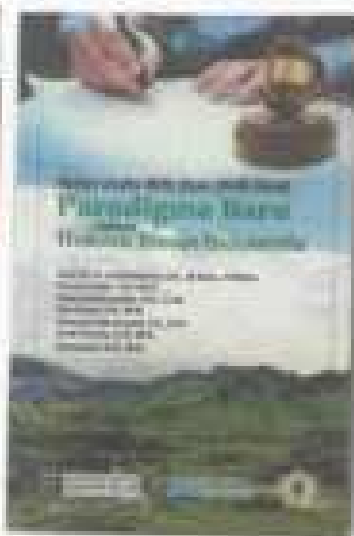
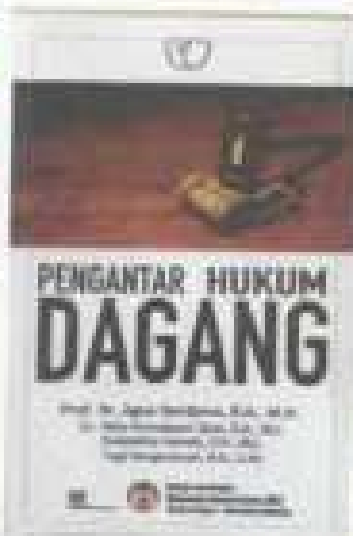
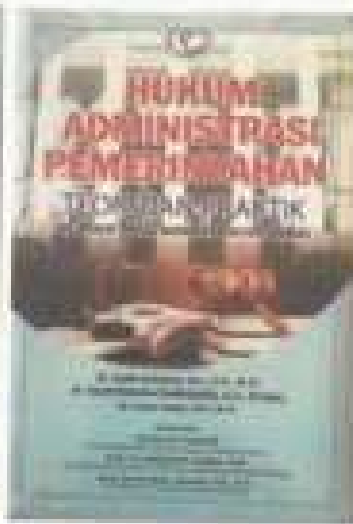
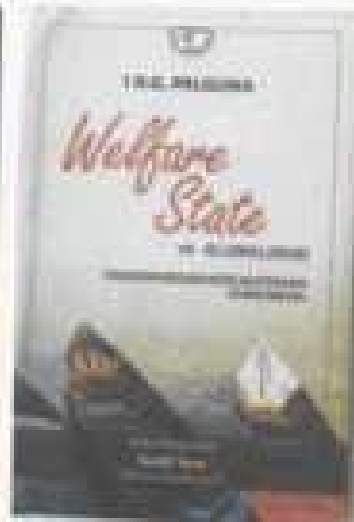
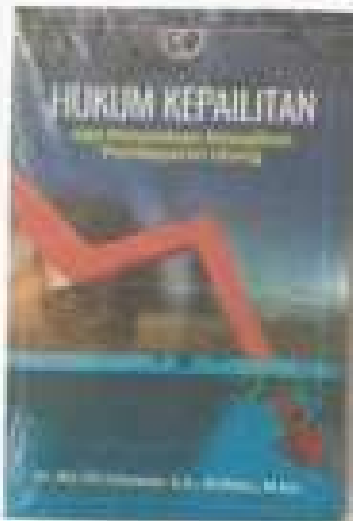
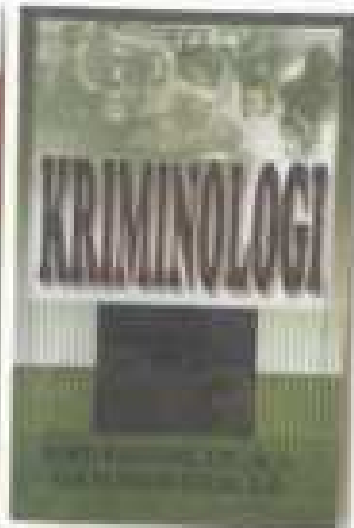
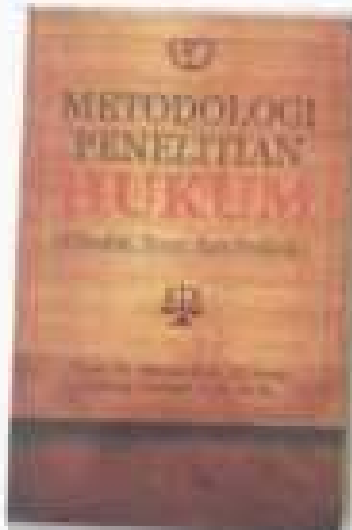


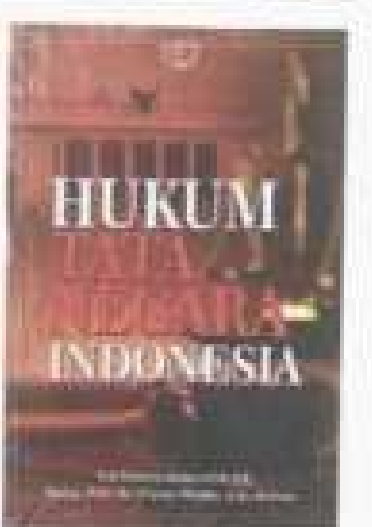
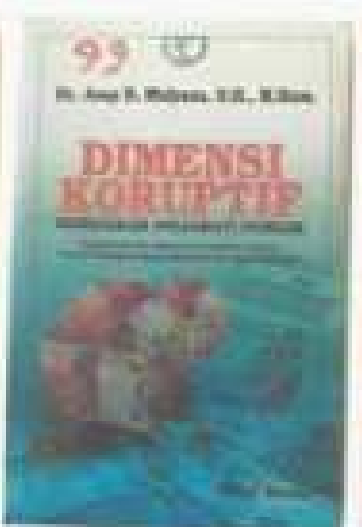
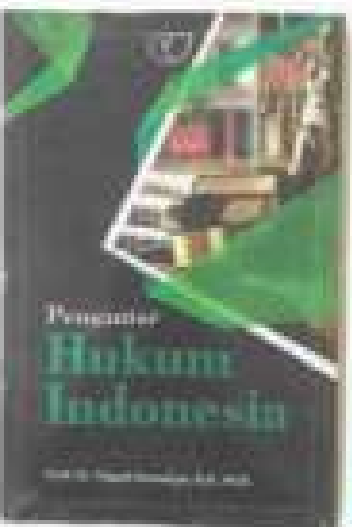
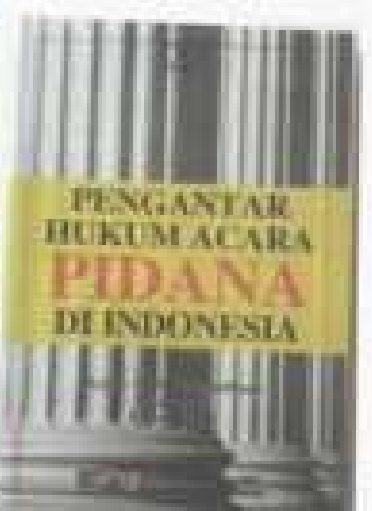
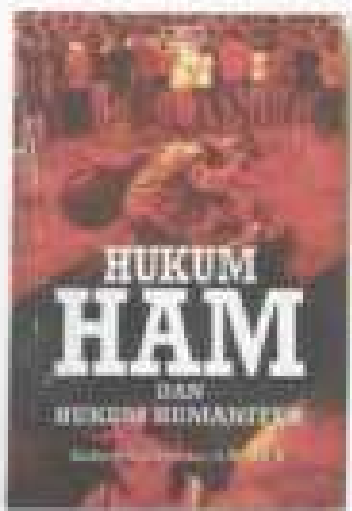
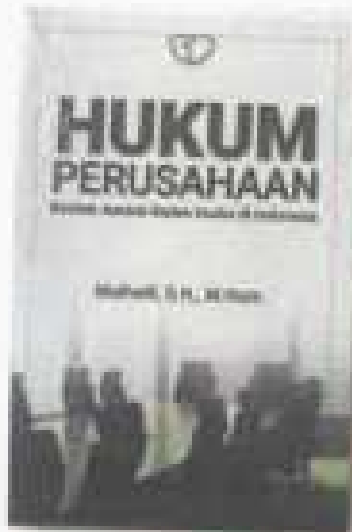
















**BERITA ACARA TRANSFER KELUAR**  
**Nomor : W.17-PB.04.01-271**

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Satker : Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng (013.10.1400.409197.000.KD)  
Nama : Arfan Faiz Muhlis, S.H., H.H.  
NIP. : 197412172000031002  
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah
2. Nama Satker : Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng (013.01.1400.409190.000.KD)  
Nama : Nur Azizah Rahmanawati, S.Pd., M.Si.  
NIP. : 197803022003122002  
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah

Menyatakan bahwa telah dilakukan transfer Barang Milik Negara BMN (rincian terlampir).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Penerima Barang  
Kepala Divisi Administrasi

Nur Azizah Rahmanawati  
NIP. 197803022003122002

Pemberi Barang  
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Arfan Faiz Muhlis  
NIP. 197412172000031002



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
Jl. Pulo Bangka Raya, Pemerintahan Gubernur  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ar Ran - Pangasinang  
Telp. (0717) 426425 – 426426 Fax (0717) 426425  
Laman: <http://litabid.kemhumham.go.id> Email: [kantwil.babel@kemhumham.go.id](mailto:kantwil.babel@kemhumham.go.id)

**BERITA ACARA TRANSFER KELUAR**  
Nomor : W.7-2609.PB.04.01 Tahun 2023

Pada hari ini senin tanggal dua puluh enam bulan juni tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Satker : Kanwil Kemenkumham Kap. Bangka Belitung-BPHN(649006)  
Nama : Muhamat Ariyanto  
NIP. : 198212262006041002  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Luhbankum dan JDIH
2. Nama Satker : Kanwil Kemenkumham Kap. Bangka Belitung (649001)  
Nama : Edi Kumiawan  
NIP. : 198709082009121006  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN

Menyatakan bahwa telah dilaksanakan transfer terhadap Barang Milik Negara (BMN) berupa:

No	Kode Barang	Nama Barang	NIP	Jumlah	Keterangan
1	6 01 01 01 001	Monografi	65 s d 62	28 buah	Pengadaan Buku Perpustakaan Tahun 2023

Mohon untuk dicatat sebagai transfer masuk Semester I Tahun 2023 pada Aplikasi SAKTI setelah ADK Transfer diterima.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Penerima Barang  
Kepala Sub Bagian  
Pengelolaan Keuangan dan BMN,

  
Edi Kumiawan  
NIP. 198709082009121006

Pemberi Barang  
Kepala Sub Bidang  
Luhbankum dan JDIH,



Muhamat Ariyanto  
NIP. 198212262006041002



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
**KANTOR WILAYAH PAPUA BARAT**

*Jl. Brigjen Marinir Abraham Oktavianus Atururi, Arfai, Manokwari  
Telepon (0986) 2210253, Fax (0986) 2210254*

*Website: papua-barat.kemenkumham.go.id. email:papuabarabmn@gmail.com*

**BERITA ACARA TRANSFER KELUAR  
Nomor : W.31-PB.04.01- 331 Tahun 2023**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga **(24-05-2023)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : JONSON SIAGIAN S.H.,M.H  
NIP : 196707101997031001  
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat
2. Nama : Drs. PIET BUKORSYOM., S.H., M.H  
NIP : 196512271996101001  
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV /c)  
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat

Menyatakan bahwa telah dilakukan transfer Barang Milik Negara (BMN) Aset Tetap Lainnya dengan spesifikasi teknis sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Penerima Barang,  
Kepala Divisi Administrasi  
Kantor Wilayah Papua Barat

Piet Bukorsyom  
NIP. 196512271996101001

Pemberi Barang,  
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM  
Kantor Wilayah Papua Barat

Jonson Siagian  
NIP. 196707101997031001

Mengetahui,  
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Taufiqurrakhman  
NIP. 196811181991031001



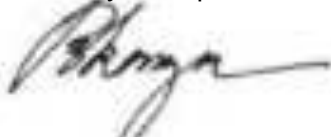
Lampiran Berita Acara Transfer Keluar  
 Nomor : **W.31- PB.04.01- 331**  
 Tanggal : 24 Mei 2023

No	Nama Barang	No aset	Tahun Perolehan	Harga Satuan	total Harga
1	Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga	33 - 34	2023	Rp 165.000	Rp 330.000
2	Hukum dan Peradilan Konstitusi Indonesia	35 - 36	2023	Rp 325.000	Rp 650.000
3	Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai	37 - 38	2023	Rp 165.000	Rp 330.000
4	Perbandingan Hukum Tata Negara	39	2023	Rp 165.000	Rp 165.000
5	18 Praktik Kepemimpinan Transformatif	40	2023	Rp 330.000	Rp 330.000
6	Hukum Bisnis	41	2023	Rp 540.000	Rp 540.000
7	Draft surat kontrak segala urusan	42	2023	Rp 210.000	Rp 210.000
8	Keseimbangan Nilai Pidana Penjara dan Pidana Denda	43 - 44	2023	Rp 270.000	Rp 540.000
9	Himpunan Peraturan dan Undang - Undang Agraria dan Pertanahan Edisi Terbaru	45 - 46	2023	Rp 705.000	Rp 1.410.000
10	Hukum Perkawinan di Indonesia	47 - 48	2023	Rp 255.000	Rp 510.000
11	Hukum Kepolisian dan Kriminalistik	49 - 50	2023	Rp 265.000	Rp 530.000
12	Sosiologi Kekuasaan teori & Perkembangan	51	2023	Rp 355.000	Rp 355.000
13	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	52 - 53	2023	Rp 180.000	Rp 360.000
14	Sejarah dan Tradisi Hukum	54 - 55	2023	Rp 330.000	Rp 660.000
15	KUHPer,KUHP dan KUHP	56	2023	Rp 355.000	Rp 355.000
16	Notaris dan Kontrak Terkait Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual	57	2023	Rp 330.000	Rp 330.000
17	Hukum Dagang dan Korporasi	58 - 60	2023	Rp 130.000	Rp 390.000

18	Kitab Undang - undang Hukum Perdata	61 - 62	2023	Rp 240.000	Rp 480.000
19	Hukum Pidana Internasional	63	2023	Rp 370.000	Rp 370.000
20	Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori - Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia	64	2023	Rp 720.000	Rp 720.000
21	Hukum Perikatan ajaran Umum Perjanjian	65	2023	Rp 435.000	Rp 435.000
				Jumlah	Rp 10.000.000

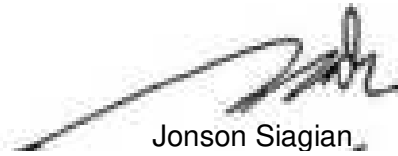
Demikian **Berita Serah Terima** penggunaan barang tersebut untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya:

Penerima Barang,  
Kepala Divisi Administrasi  
Kantor Wilayah Papua Barat



Piet Bukorsyom  
NIP. 196512271996101001

Pemberi Barang,  
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM  
Kantor Wilayah Papua Barat



Jonson Siagian  
NIP. 196707101997031001

Mengetahui,  
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat



Taufiqurrakhman  
NIP. 196811181991031001

LAMPIRAN





**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU**  
NOMOR : W.32.PB.05.01-4785 TAHUN 2023

Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

**I. HOT MULIAN SILITONGA, S.H.** : Pih. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, dalam Berita Acara Serah Terima ini disebut **PIHAK PERTAMA**;

**II. ACHMAD FAHRURAZI, S.H., M.H.** : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, dalam Berita Acara Serah Terima ini disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Serah Terima Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dibawah ini :

**PASAL 1**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara berupa Buku sebanyak III Unit dengan total nilai Rp8.947.000,- (*Delapan Rata Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) kepada **PIHAK KEDUA**, (Data Terlampir)

**PASAL 2**

1. Sejak serah terima ini segala hak dan kewajiban kerugian dan keuntungan dan tanggungjawab beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dicatat sebagai aset **PIHAK KEDUA** dalam Aplikasi Daftar Barang Milik Negara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau dan dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

**PASAL 3**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Berita Acara Serah Terima ini akan ditetapkan kemudian dalam Naskah Adendum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Serah Terima ini;
2. Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dibundatangi dan dipegang oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**  **PIHAK PERTAMA**  
**ACHMAD FAHRURAZI, S.H., M.H.**  **HOT MULIAN SILITONGA, S.H.**  
NIP 197811122001121001 NIP 197504152002121002

Lampiran Berita Acara Serah Terima  
 Nomor : W.32.PB.05.01-4785  
 Tanggal : 6 Juni 2023

**DAFTAR SERAH TERIMA BARANG MELIK NEGARA  
 KANTOR WILAYAH KEHENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU**

No	KODE BARANG	URAIAN BARANG	NUP	KUANTITAS	MERK	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
1	6010101001	Monografi	123	1	100 TANYA JAWAB SEPUTAR KEKERASAN SEKSUAL	2023	112,000	Baik
2	6010101001	Monografi	124	1	100 TANYA JAWAB SEPUTAR KEKERASAN SEKSUAL	2023	112,000	Baik
3	6010101001	Monografi	125	1	ARGUMENTASI HUKUM & TERMINOLOGI HUKUM	2023	55,000	Baik
4	6010101001	Monografi	126	1	ARGUMENTASI HUKUM & TERMINOLOGI HUKUM	2023	55,000	Baik
5	6010101001	Monografi	127	1	BANTUAN HUKUM UNTUK PENCARI KEADILAN	2023	140,000	Baik
6	6010101001	Monografi	128	1	BANTUAN HUKUM UNTUK PENCARI KEADILAN	2023	140,000	Baik
7	6010101001	Monografi	129	1	BIROKASI & GOVERNANCE	2023	121,000	Baik
8	6010101001	Monografi	130	1	BIROKASI & GOVERNANCE	2023	121,000	Baik
9	6010101001	Monografi	131	1	BITCOIN POTENSI TINDAK KEJAHATAN DAN PERTANGGUL	2023	86,000	Baik
10	6010101001	Monografi	132	1	BITCOIN POTENSI TINDAK KEJAHATAN DAN PERTANGGUL	2023	86,000	Baik
11	6010101001	Monografi	133	1	BUDAYA HUKUM DALAM MASYARAKAT PLURALISTIK	2023	195,000	Baik
12	6010101001	Monografi	134	1	BUDAYA HUKUM DALAM MASYARAKAT PLURALISTIK	2023	195,000	Baik
13	6010101001	Monografi	135	1	BUKTI ELEKTRONIK DALAM PRAKTIK PERADILAN	2023	113,000	Baik
14	6010101001	Monografi	136	1	BUKTI ELEKTRONIK DALAM PRAKTIK PERADILAN	2023	113,000	Baik
15	6010101001	Monografi	137	1	DARI RUANG KONSULTASI HUKUM	2023	115,000	Baik
16	6010101001	Monografi	138	1	DARI RUANG KONSULTASI HUKUM	2023	115,000	Baik
17	6010101001	Monografi	139	1	DELIK AGAMA	2023	77,500	Baik
18	6010101001	Monografi	140	1	DELIK AGAMA	2023	77,500	Baik
19	6010101001	Monografi	141	1	DIMENSI HUKUM PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILI	2023	60,000	Baik
20	6010101001	Monografi	142	1	DIMENSI HUKUM PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILI	2023	60,000	Baik
21	6010101001	Monografi	143	1	DESKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN DAN TINDAK PIDANA	2023	104,000	Baik
22	6010101001	Monografi	144	1	DESKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN DAN TINDAK PIDANA	2023	104,000	Baik
23	6010101001	Monografi	145	1	HAK RESTITUSI : TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEF	2023	57,000	Baik

24	6010101001	Monografi	146	1	HAK RESTITUSI : TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEJ	2023	57,000	Baik
25	6010101001	Monografi	147	1	HUKUM DAN ETIKA HUMAS	2023	66,000	Baik
26	6010101001	Monografi	148	1	HUKUM DAN ETIKA HUMAS	2023	66,000	Baik
27	6010101001	Monografi	149	1	HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN EKONOMI FIQH HUAN	2023	95,000	Baik
28	6010101001	Monografi	150	1	HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN EKONOMI FIQH HUAN	2023	95,000	Baik
29	6010101001	Monografi	151	1	HUKUM KEPALITAN : KEKURANGAN & HAK KREDITOR SEP	2023	78,000	Baik
30	6010101001	Monografi	152	1	HUKUM KEPALITAN : KEKURANGAN & HAK KREDITOR SEP	2023	78,000	Baik
31	6010101001	Monografi	153	1	HUKUM KONTRAK INTERPRETASI DAN PENYELESAIAN SE	2023	75,000	Baik
32	6010101001	Monografi	154	1	HUKUM KONTRAK INTERPRETASI DAN PENYELESAIAN SE	2023	75,000	Baik
33	6010101001	Monografi	155	1	HUKUM LINGKUNGAN PERSPEKTIF GLOBAL & NASIONAL I	2023	95,000	Baik
34	6010101001	Monografi	156	1	HUKUM LINGKUNGAN PERSPEKTIF GLOBAL & NASIONAL I	2023	95,000	Baik
35	6010101001	Monografi	157	1	HUKUM PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN PENGAKHIRAN	2023	89,000	Baik
36	6010101001	Monografi	158	1	HUKUM PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN PENGAKHIRAN	2023	89,000	Baik
37	6010101001	Monografi	159	1	HUKUM PIDANA PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF	2023	57,000	Baik
38	6010101001	Monografi	160	1	HUKUM PIDANA PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF	2023	57,000	Baik
39	6010101001	Monografi	161	1	IKLAN TELEVISI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KON	2023	58,000	Baik
40	6010101001	Monografi	162	1	IKLAN TELEVISI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KON	2023	58,000	Baik
41	6010101001	Monografi	163	1	INOVASI PELAYANAN PADA ORGANISASI PUBLIK	2023	60,000	Baik
42	6010101001	Monografi	164	1	INOVASI PELAYANAN PADA ORGANISASI PUBLIK	2023	60,000	Baik
43	6010101001	Monografi	165	1	KEPASTIAN HUKUM MASA TUNGGU EKSEKUSI PIDANA	2023	95,000	Baik
44	6010101001	Monografi	166	1	KEPASTIAN HUKUM MASA TUNGGU EKSEKUSI PIDANA	2023	95,000	Baik
45	6010101001	Monografi	167	1	KORUPSI DESA	2023	70,000	Baik
46	6010101001	Monografi	168	1	KORUPSI DESA	2023	70,000	Baik
47	6010101001	Monografi	169	1	LISENSI & ROYALTY LAGU/MUSIK DI TEMPAT PUBLIK	2023	160,000	Baik
48	6010101001	Monografi	170	1	LISENSI & ROYALTY LAGU/MUSIK DI TEMPAT PUBLIK	2023	160,000	Baik
49	6010101001	Monografi	171	1	MAHIR MENJALIS STUDI KASUS HUKUM	2023	69,000	Baik
50	6010101001	Monografi	172	1	MAHIR MENJALIS STUDI KASUS HUKUM	2023	69,000	Baik
51	6010101001	Monografi	173	1	MENGUBAH PARADIGMA KEADILAN : LANGKAH RESTOR,	2023	120,000	Baik
52	6010101001	Monografi	174	1	MENGUBAH PARADIGMA KEADILAN : LANGKAH RESTOR,	2023	120,000	Baik
53	6010101001	Monografi	175	1	OMNIBUS LAW : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA	2023	215,000	Baik
54	6010101001	Monografi	176	1	OMNIBUS LAW : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA	2023	215,000	Baik
55	6010101001	Monografi	177	1	PENDANAAN KORPORASI DAN GUGATAN CLASS ACTION	2023	78,000	Baik
56	6010101001	Monografi	178	1	PENDANAAN KORPORASI DAN GUGATAN CLASS ACTION	2023	78,000	Baik
57	6010101001	Monografi	179	1	PENERAPAN TEORI HUKUM PADA PENELITIAN TESIS & DI	2023	146,000	Baik

58	6010101001	Monografi	180	1	PENERAPAN TEORI HUKUM PADA PENELITIAN TESIS & DI	2023	146,000	Baik
59	6010101001	Monografi	181	1	PENGANTAR HUKUM KEJAHATAN BISNIS	2023	92,000	Baik
60	6010101001	Monografi	182	1	PENGANTAR HUKUM KEJAHATAN BISNIS	2023	92,000	Baik
61	6010101001	Monografi	183	1	PENGANTAR ILMU LOGIKA & PSIKOLOGI HUKUM	2023	42,000	Baik
62	6010101001	Monografi	184	1	PENGANTAR ILMU LOGIKA & PSIKOLOGI HUKUM	2023	42,000	Baik
63	6010101001	Monografi	185	1	PENGANTAR JURIMETRI DAN PENERAPAN DALAM PENYI	2023	78,000	Baik
64	6010101001	Monografi	186	1	PENGANTAR JURIMETRI DAN PENERAPAN DALAM PENYI	2023	78,000	Baik
65	6010101001	Monografi	187	1	PENGETAHUAN TRADISIONAL & HAK KEKAYAAN INTELE	2023	95,000	Baik
66	6010101001	Monografi	188	1	PENGETAHUAN TRADISIONAL & HAK KEKAYAAN INTELE	2023	95,000	Baik
67	6010101001	Monografi	189	1	PSIKOLOGI DAN PEMASYARAKATAN ED. REVISI	2023	36,000	Baik
68	6010101001	Monografi	190	1	PSIKOLOGI DAN PEMASYARAKATAN ED. REVISI	2023	36,000	Baik
69	6010101001	Monografi	191	1	PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI DAN BISNIS SYARIA	2023	65,000	Baik
70	6010101001	Monografi	192	1	PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI DAN BISNIS SYARIA	2023	65,000	Baik
71	6010101001	Monografi	193	1	PERSANDINGAN HUKUM PIDANA DI 18 NEGARA	2023	135,000	Baik
72	6010101001	Monografi	194	1	PERSANDINGAN HUKUM PIDANA DI 18 NEGARA	2023	135,000	Baik
73	6010101001	Monografi	195	1	PERSELISIHAN PRAYUDICIAL	2023	101,000	Baik
74	6010101001	Monografi	196	1	PERSELISIHAN PRAYUDICIAL	2023	101,000	Baik
75	6010101001	Monografi	197	1	REKONSTRUKSI HUKUM REHABILITASI	2023	84,000	Baik
76	6010101001	Monografi	198	1	REKONSTRUKSI HUKUM REHABILITASI	2023	84,000	Baik
77	6010101001	Monografi	199	1	RUANG LINGKUP PERMASALAHAN EKSEKUSI	2023	196,000	Baik
78	6010101001	Monografi	200	1	RUANG LINGKUP PERMASALAHAN EKSEKUSI	2023	196,000	Baik
79	6010101001	Monografi	201	1	SEJARAH DAN TRADISI HUKUM	2023	109,000	Baik
80	6010101001	Monografi	202	1	SEJARAH DAN TRADISI HUKUM	2023	109,000	Baik
81	6010101001	Monografi	203	1	SISTEM HUKUM GLOBALISASI, DAN KEABSAHAN KONTR	2023	125,000	Baik
82	6010101001	Monografi	204	1	SISTEM HUKUM GLOBALISASI, DAN KEABSAHAN KONTR	2023	125,000	Baik
83	6010101001	Monografi	205	1	TANGGUNG JAWAB DLM HUKUM PERDATA	2023	70,000	Baik
84	6010101001	Monografi	206	1	TANGGUNG JAWAB DLM HUKUM PERDATA	2023	70,000	Baik
85	6010101001	Monografi	207	1	TRUST MARK SEBAGAI JAMINAN PERLINDUNGAN BAGI	2023	70,000	Baik
86	6010101001	Monografi	208	1	TRUST MARK SEBAGAI JAMINAN PERLINDUNGAN BAGI	2023	70,000	Baik
87	6010101001	Monografi	209	1	WAKAF UANG : PENGELOLAAN DALAM HUKUM ISLAM &	2023	109,000	Baik
88	6010101001	Monografi	210	1	WAKAF UANG : PENGELOLAAN DALAM HUKUM ISLAM &	2023	109,000	Baik
89	6010101001	Monografi	211	1	WHAT WOULD YOUR LAWYER SAY? : SENE MEMENANGK	2023	110,000	Baik
90	6010101001	Monografi	212	1	WHAT WOULD YOUR LAWYER SAY? : SENE MEMENANGK	2023	110,000	Baik
91	6010101001	Monografi	213	1	ZONA INTEGRITAS	2023	75,000	Baik

92	6010101001	Memograf	214	1	ZONA INTEGRITAS	2023	75,000	Sek
		<b>JUMLAH</b>		<b>92</b>			<b>8,947,000</b>	

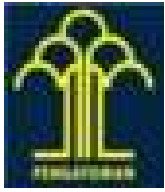


PDHKS PERTAMA



NOT MULJAN SILITONGA, S.H.  
NIP 197504152002121003





**BERITA ACARA TRANSFER KELUAR**  
**Nomor : W.33-PB.04.01-73**

Pada hari **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Rahendro Jati  
NIP : 197409012000031002  
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM,  
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Rudi Hartono  
NIP : 196509021985031001  
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi,  
selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Menyatakan bahwa **Pihak Pertama** telah melakukan transfer keluar kepada **Pihak Kedua** Barang Milik Negara (BMN) berupa Monografi dengan rincian sebagaimana telampir :

No	Kode Barang	Nama Barang/ Merk/Type	NUP	Tahun Perolehan	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	6010101001	Monografi/ Undang-Undang Kesehatan (UU RI No. 17 Tahun 2023)	27	2023	1	73.500	Transfer Keluar BMN DIPA BPHN
2	6010101001	Monografi/ Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana	28	2023	1	47.500	Transfer Keluar BMN DIPA BPHN
3	6010101001	Monografi/ Hukum Acara Pidana	29	2023	1	60.001	Transfer Keluar BMN DIPA BPHN
4	6010101001	Monografi/ The Psychology of Emotion	30	2023	1	104.500	Transfer Keluar BMN DIPA BPHN

5	6010101001	Monografi/ KUHP (Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023)	31	2023	1	69.500	Transfer Keluar BMN DIPA BPHN
6	6010101001	Monografi/ Mindset (Mengubah Pola Berpikir untuk Perubahan Besar dalam Hidup Anda)	32	2023	1	122.000	Transfer Keluar BMN DIPA BPHN
7	6010101001	Monografi/ Asas-Asas Hukum Pidana	33	2023	1	323.500	Transfer Keluar BMN DIPA BPHN
8	6010101001	Monografi/ Omnibus Law (UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)	34	2023	1	236.500	Transfer Keluar BMN DIPA BPHN
9	6010101001	Monografi/ Seni Komunikasi (Berkomunikasi Ada Seninya)	35	2023	1	64.000	Transfer Keluar BMN DIPA BPHN
10	6010101001	Monografi/ The Art of Social & Emotional Intelligence	36	2023	1	87.500	Transfer Keluar BMN DIPA BPHN
11	6010101001	Monografi/ KUHP (Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023)	37	2023	1	71.500	Transfer Keluar BMN DIPA BPHN
12	6010101001	Monografi/ Kamus Pintar Hukum	38	2023	1	98.500	Transfer Keluar BMN DIPA BPHN
13	6010101001	Monografi/ Kitab Firasat (Ilmu Membaca Sifat dan Karakter Manusia dari Bentuk Tubuhnya)	39	2023	1	65.000	Transfer Keluar BMN DIPA BPHN
14	6010101001	Monografi/ Pelaku bukan Pemimpi (Empat Fase Perjalanan Pelaku Usaha)	40	2023	1	97.000	Transfer Keluar BMN DIPA BPHN
15	6010101001	Monografi/ Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	41	2023	1	121.000	Transfer Keluar BMN DIPA BPHN

16	6010101001	Monografi/ Hukum Peradilan TUN (Tata Usaha Negara)	42	2023	1	45.000	Transfer Keluar BMN DIPA BPHN
----	------------	---	----	------	---	--------	-------------------------------------

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Negara, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua  
Kepala Divisi Administrasi,

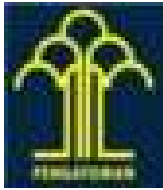


Rudi Hartono  
NIP 196509021985031001

Pihak Pertama  
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan  
HAM,



Rahendro Jati  
NIP 1974090120000031002



**BERITA ACARA TRANSFER KELUAR**  
**Nomor : W.33-PB.04.01-73**

Pada hari **Kamis** tanggal **Enam** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Rahendro Jati  
NIP : 197409012000031002  
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM,  
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Slamet Pramodji  
NIP : 196909292001121001  
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi,  
selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

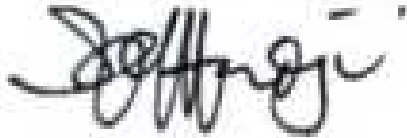
Menyatakan bahwa **Pihak Pertama** telah melakukan transfer keluar kepada **Pihak Kedua** Barang Milik Negara (BMN) berupa Monografi dengan rincian sebagaimana telampir :

No	Kode Barang	Nama Barang/ Merk/Type	NUP	Tahun Perolehan	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	6010101001	Monografi/ Penghapusan Paten Di Indonesia dan Perbandingan Negara Lain	22	2023	1	54.000	Transfer Keluar BMN DIPA BPHN
2	6010101001	Monografi/ Hak Cipta Dalam Perspektif Cyber Law	23	2023	1	45.000	Transfer Keluar BMN DIPA BPHN
3	6010101001	Monografi/ Hukum Perlindungan Saksi dan Korban	24	2023	1	79.999	Transfer Keluar BMN DIPA BPHN
4	6010101001	Monografi/ Perkembangan Aliran-Aliran Pemikiran dalam Kajian Filsafat Hukum	25	2023	1	71.000	Transfer Keluar BMN DIPA BPHN

5	6010101001	Monografi/ Pengantar Ilmu Hukum - Urgensi dan Penerapannya di Indonesia	26	2023	1	63.500	Transfer Keluar BMN DIPA BPHN
---	------------	---	----	------	---	--------	-------------------------------------

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Negara, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua  
Kepala Divisi Administrasi,



Slamet Pramodji  
NIP 196909292001121001

Pihak Pertama  
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan  
HAM,



Rahendro Jati  
NIP 1974080120000031002



**BERITA ACARA TRANSFER KELUAR DAN  
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA**

Nomor : W.30.PB.06.04 - 372

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Kantor (Satker) : Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua ( Administrasi Hukum Umum )  
Nama : Zulanyah, S.H, M.Si  
NIP : 197207012001121002  
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA sebagai yang Menyerahkan

2. Nama Kantor (Satker) : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua  
Nama : ALWI, S.H  
NIP : 198607252005011001  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA sebagai yang menerima

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan barang seperti tercantum dibawah ini kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah menerimanya dalam keadaan 100% baru, baik dan lengkap dengan uraian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Tahun	Keterangan	Satuan Kerja
1	Monografi	05	2023	Bok	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM papua (408908)

Jayapura, 26 Desember 2023

Yang Menerima  
Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan  
Dan BMN Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
Dan HAM Papua

NIP. 198607252005011001

Yang Menyerahkan  
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
Papua

Zulanyah, S.H, M.Si  
NIP. 197207012001121002



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN  
Nomor : PHN.1-PB.03.01-20**

Pada hari ini *Jumat* tanggal *sepuuluh* bulan *Maret* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinatir Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Ricky Aditya Supratman  
NIP : 19871028 201012 1002  
Jabatan : Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Mark/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Sound System (Alat Podcast)	3.05.02.06.008.18	Primattech Pro-FXR, Goldwin Headset & Micropohone, Pengadaan 2022	1	Baik

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan transfer keluar aset kepada **PIHAK KEDUA** dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan BMN berupa peralatan podcast pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Aset Tetap berupa perlengkapan podcast sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**  
  
Ricky Aditya Supratman  
NIP 19871028 201012 1002

**PIHAK PERTAMA**  
  
Heru Triawan  
NIP 198506112006041001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN  
Nomor : PHN.1-PR03.01-32**

Pada hari ini Senin tanggal dan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor Wilayah Gorontalo Kementerian Hukum dan HAM, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Constantinus Kristomo  
NIP : 197404111999031001  
Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Barbara Zamda R  
NIP : 196308281984031002  
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Ser/Merk/Type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Sound System (Alat Podcast)	3-05-02.06.008.27	Primotech Pro-FXR, Goldwin Headset & Microphone, Pengadaan 2022	1	Baik

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Gorontalo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan transfer keluar aset kepada **PIHAK KEDUA** dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti setker Kantor Wilayah Gorontalo ;
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan BMN berupa peralatan podcast dan lap top pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi SPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Gorontalo .

Dalam rangka terah penatausahaan BMN, dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Aset Tetap berupa Peralatan podcast sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA



Barbara Zamda R  
NIP. 196308281984031002

PIHAK PERTAMA



Constantinus Kristomo  
NIP. 197404111999031001





**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN ( LAPTOP )  
Nomor : PHN.J-PB03.01-01**

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Dua puluh tujuh* bulan *Januari* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Hotel Santika Premier Tangerang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Benni Risky  
NIP : 198307302007031001  
Jabatan : Kasubbag keuangan dan BMN  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/typo/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.88	Acer Travelmate TMP 214 pengadaan 2022	1	Baik

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Sumatera Selatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan transfer keluar aset kepada **PIHAK KEDUA** dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Sumatera Selatan
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatusahkan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



NIP. 198307302007031001



Heru Triawan  
NIP. 198506112006041001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN ( LAPTOP)  
Nomor : PHN.1-PR.03.01-02**

Pada hari ini *Jumat* tanggal *dua puluh tujuh* bulan *Januari* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Hotel Santika Premier Tangerang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : M. Kasim Umasangadji  
NIP : 197704272002121012  
Jabatan : Kepala Bagian Umum  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.89	Acer Travelmate TMP 214 pengadaan 2022	1	Baik

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menyetujui sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Maluku Utara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan transfer keluar aset kepada **PIHAK KEDUA** dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Maluku Utara
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPYD pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Maluku Utara

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahaan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja **PIHAK KEDUA**,

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN ( LAPTOP)**

Nomor : PHN.1-PR.03.01-03

Pada hari ini *Jumat*, tanggal *dua puluh tujuh* bulan *Januari* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Hotel Samika Premier Tangerang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Maria titik sumiyati  
NIP : 197305292001122001  
Jabatan : Kasubdag keuangan dan BMN  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.90	Acer Travelmate TMP 214 pengadaan 2022	1	Baik

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan transfer keluar aset kepada **PIHAK KEDUA** dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Jawa Tengah
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Jawa Tengah

Dalam rangka terbit penatausahaan BMN, dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN ( LAPTOP)  
Nomor : PHN.1-PR.03.01-04**

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Dua puluh tujuh* bulan *Januari* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Hotel Santika Premier Tangerang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Adi Gunawan  
NIP : 198208222006041002  
Jabatan : Kasubbag keuangan dan BMN  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.91	Acer Travelmate TMP 214 pengadaan 2022	1	baik

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Kalimantan Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan transfer keluar aset kepada **PIHAK KEDUA** dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Kalimantan Barat
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Kalimantan Barat

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN ( LAPTOP )  
Nomor : PHN.1-PB.03.01-05**

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Dua puluh tujuh* bulan *Januari* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Hotel Santika Premier Tangerang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Suci Rahmima Sari  
NIP : 198505262009122005  
Jabatan : Kabubag Pengelola keuangan dan BMN  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.92	Aset tahun pengadaan 2022	1	Baik

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan transfer keluar aset kepada **PIHAK KEDUA** dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Kepulauan Riau
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPIN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Kepulauan Riau

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatmasukakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
**PIHAK KEDUA**  
Suci Rahmima Sari  
NIP 198505262009122005

  
**PIHAK PERTAMA**  
Heru Triawan  
NIP 198506112006041001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN ( LAPTOP)  
Nomor : PHN.1-PH.03.01-06**

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Dua puluh tujuh* bulan *Januari* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Hotel Santika Premier Tangerang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Hera Triawan  
NIP : 198506112906041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Ricky Aditya Supratman  
NIP : 198710282010121003  
Jabatan : Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.93	Acer Travelmate TMP 214 pengadaan 2022	1	Baik

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan transfer keluar aset kepada **PIHAK KEDUA** dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah NTB
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPTN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,  
  
Ricky Aditya Supratman  
NIP 198710282010121003

PIHAK PERTAMA,  
  
Hera Triawan  
NIP 198506112906041001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN ( LAPTOP)  
Nomor : PHN.1-PR.03.01-07**

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Dua puluh tujuh* bulan *Januari* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Hotel Santika Premier Tangerang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Mansyur  
NIP : 196710121990031001  
Jabatan : Kasubbag. Pengelolaan Keuangan dan BMN  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No.	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.94	Acer Travelmate TMP 214 pengadaan 2022	1	Baik

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Sulawesi Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan transfer keluar aset kepada **PIHAK KEDUA** dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Sulawesi Barat.
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Sulawesi Barat

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN ( LAPTOP )  
Nomor : PHN.1-PR.03.01-08**

Pada hari ini *Rabu* tanggal *satu* bulan *Februari* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Hotel Ritz Carlton Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Heryanto Matma  
NIP : 196810121989031001  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No.	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Mark/Type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.95	Acer Travelmate TMP 214 pengadaan 2022	1	Baik

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Bengkulu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan transfer keluar aset kepada **PIHAK KEDUA** dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Bengkulu
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Bengkulu

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangan oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**  
  
Heryanto Matma  
NIP 196810121989031001

**PIHAK PERTAMA**  
  
Heru Triawan  
NIP 198506112006041001





**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN ( LAPTOP)**

Nomor : PHN.1-PIB.03.01-09

Pada hari ini *Rabu* tanggal *satu* bulan *Februari* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Hotel Ritz Carlton Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Ni Wayan Armahanti  
NIP : 197411012001122002  
Jabatan : Kamibhag Pengelolaan Keuangan dan BMN  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Mark/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.96	Acer Travelmate TMP 214 pengadaan 2022	1	Baik

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Bali Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan transfer keluar aset kepada **PIHAK KEDUA** dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Bali
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Bali

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN ( LAPTOP)  
Nomor : PHN.1-PR.03.01-10**

Pada hari ini *Rabu* tanggal *satu bulan Februari* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Hotel Ritz Carlton Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Vina Syafudin  
NIP : 19880215 201012 2 001  
Jabatan : Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.97	Acer Travelmate TMP 214 pengadaan 2022	1	Baik

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Sumatera Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan transfer keluar aset kepada **PIHAK KEDUA** dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Sumatera Barat
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPIN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Sumatera Barat

Dalam rangka terbit penatausahaan BMN, dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahaan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
Vina Syafudin  
NIP 19880215 201012 2 001

  
Heru Triawan  
NIP 198506112006041001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN ( LAPTOP )  
Nomor : PHN.J-PB.03.01-11**

Pada hari ini *Rabu* tanggal *satu* bulan *Februari* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Hotel Ritz Carlton Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heri Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Taufik Akbar Nasution  
NIP : 198608022009121001  
Jabatan : Kabubag Pengelolaan Keuangan dan BMN  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/typo/Tahun Penjualan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap-Top	3.10.01.02.002.98	Acer Travelmate TMP 214 pengadaan 2022	1	Baik

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Jambi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan transfer keluar aset kepada **PIHAK KEDUA** dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Jambi
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Jambi

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
Taufik Akbar Nasution  
NIP 198608022009121001

  
Heri Triawan  
NIP 198506112006041001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN ( LAPTOP )  
Nomor : PHN.1-PB.03.01-12**

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Hotel Ritz Carlton Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Edi Kurniawan  
NIP : 198709082009121006  
Jabatan : Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.99	Acer Travelmate TMP 214 pengadaan 2022	1	Baik

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Bangka Belitung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan transfer keluar aset kepada **PIHAK KEDUA** dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Bangka Belitung
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Bangka Belitung

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,**  
  
Edi Kurniawan  
NIP 198709082009121006

**PIHAK PERTAMA,**  
  
Heru Triawan  
NIP 198506112006041001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN ( LAPTOP)**

Nomor : PHN.I-PR.03.01-13

Pada hari ini *Kedu* tanggal *satu* bulan *Februari* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Hotel Ritz Carlton Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Khomairi  
NIP : 19800705 200912 1 003  
Jabatan : Kasubhag Pengelolaan Keuangan dan BMN  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.100	Acer Travelmate TMP 214 pengadaaan 2022	1	Baik

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan transfer keluar aset kepada **PIHAK KEDUA** dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti sather Kantor Wilayah Sulawesi Selatan
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangan oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN ( LAPTOP)**

Nomor : PHN.1-PB.03.01-14

Pada hari ini *Rabu* tanggal *satu* bulan *Februari* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Hotel Ritz Carlton Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Marsulina  
NIP : 19771231 2008042001  
Jabatan : Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/Type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.101	Acer Travelmate TMP 214 pengadaan 2022	1	Baik

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Sumatera Utara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan transfer keluar aset kepada **PIHAK KEDUA** dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Sumatera Utara
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Sumatera Utara

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan distaushkan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Marsulina  
NIP 19771231 2008042001



Heru Triawan  
NIP 198506112006041001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN ( LAPTOP )  
Nomor : PHN.1-PB.03.01-15**

Pada hari ini *Rabu* tanggal *satu* bulan *Februari* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Hotel Ritz Carlton Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : R. Indah R. Supriyadi  
NIP : 198308272006042001  
Jabatan : Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No, Seri/Mark/type/Tahun Pengadaan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.102	Acer Travelmate TMP 214 pengadaan 2022	1	Baik

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Gorontalo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan transfer keluar aset kepada **PIHAK KEDUA** dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti sater Kantor Wilayah Gorontalo
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Gorontalo

Dalam rangka terbit penatausahaan BMN, dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,**  
  
R. Indah R. Supriyadi  
NIP 198308272006042001

**PIHAK PERTAMA,**  
  
Heru Triawan  
NIP 198506112006041001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN ( LAPTOP )  
Nomor : PHN.1-PB.03.01-16**

Pada hari ini *Komik* tanggal *enam belas* bulan *Februari* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Kantor Wilayah D.I Yogyakarta Kementerian Hukum dan HAM, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Fitri Wulansari  
NIP : 198705102009122004  
Jabatan : Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.103	Acer Travelmate TMP 214 pengadaan 2022	1	Baik
2.	Sound System ( Alat Podcast)	3.05.02.06.008.15	Primattech Pro-FX8, Goldwin Headset & Microphone, Pengadaan 2022	1	Baik

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah D.I Yogyakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer keluar aset kepada PIHAK KEDUA dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah D.I Yogyakarta
3. PIHAK PERTAMA memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah D.I Yogyakarta

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Aset Tetap berupa perlengkapan podcast sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

Fitri Wulansari  
NIP 198705102009122004

PIHAK PERTAMA,



Heru Triawan  
NIP 198506112006041001





**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN  
Nomor : PHN.1-PR.03.01-18**

Pada hari ini *Selasa* tanggal *dua puluh delapan* bulan *Februari* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Kantor Wilayah Riau Kementerian Hukum dan HAM, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Nurhayati Situmorang  
NIP : 196901101994032001  
Jabatan : Kepala Bagian Umum  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.104	Acer Travelmate TMP 214 pengadaan 2022	1	Baik
2.	Sound System (Alat Podcast)	3.05.02.06.008.10	Primatich Pro-FXB, Goldwin Headset & Microphone, Pengadaan 2022	1	Baik

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menandatangani sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Riau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan transfer keluar aset kepada **PIHAK KEDUA** dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Riau
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan BMN berupa perlengkapan podcast pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Riau

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Aset Tetap berupa perlengkapan podcast sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahaan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,  
  
Nurhayati Situmorang  
NIP 196901101994032001

PIHAK PERTAMA,  
  
Heru Triawan  
NIP 198506112006041001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN  
Nomor : PHN.I-PR.03.01-19**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor Wilayah Sulawesi Barat Kementerian Hukum dan HAM, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Hera Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Mamsyar  
NIP : 196710121990031001  
Jabatan : Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merkatype/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Sound System (Alat Podcast)	2.05.02.06.008.17	Primotech Pro-FXR, Goldwin Headset & Microphone, Pengadaan 2022	1	Baik

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Sulawesi Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan transfer keluar aset kepada **PIHAK KEDUA** dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti milik Kantor Wilayah Sulawesi Barat;
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan BMN berupa perlengkapan podcast pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Sulawesi Barat

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Aset Tetap berupa perlengkapan podcast sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahaan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangan oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,**  
  
Mamsyar  
NIP 196710121990031001

**PIHAK PERTAMA,**  
  
Hera Triawan  
NIP 198506112006041001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN  
Nomor : PHN.1-PH.03.01-22**

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kalimantan Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Andy Muril M.Z, S.H.,M.H.  
NIP : 196303271989031001  
Jabatan : Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Faisel Ali, S.H.,M.H.  
NIP : 196412111990031002  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No, Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Sound System ( Alat Podcast)	3.05.02.06.008.20	Primotech Pro-FXK, Goldwin Headset & Microphone, Pengadaan 2022	1	Baik
2.	Lap Top	3.10.01.02.002.105	Acer Travelmate TMP 214 pengadaan 2022	1	Baik

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan transfer keluar aset kepada **PIHAK KEDUA** dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satuan kerja Kantor Wilayah Kalimantan Selatan;
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan BMN berupa peralatan podcast dan lap top pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Kalimantan Selatan.

Dalam rangka terbit penatausahaan BMN, dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Aset Tetap berupa Peralatan podcast sebanyak 1 (satu) unit dan lap top sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausbakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangan oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN  
Nomor : PHN.1-PB.03.01-23**

Pada hari ini *Senin* tanggal *dua puluh* bulan *Maret* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat Kantor Wilayah Maluku Utara Kementerian Hukum dan HAM, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Fatmawaty Band  
NIP : 198007242009122005  
Jabatan : Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Sound System ( Alat Podcast)	3.05.02.06.008.21	Primotech Pro-FX8, Goldwin Headset & Microphone, Pengadaan 2022	1	Baik

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Maluku Utara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan transfer keluar aset kepada **PIHAK KEDUA** dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Maluku Utara ;
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan BMN berupa peralatan podcast dan lap top pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Maluku Utara .

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Aset Tetap berupa Peralatan podcast sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
**PIHAK KEDUA,**  
Fatmawaty Band  
NIP 198007242009122005

  
**PIHAK PERTAMA,**  
Heru Triawan  
NIP 198506112006041001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN  
Nomor : PHN.I-PIB.01-24**

Pada hari ini *Senin* tanggal *dua puluh* bulan *Mei* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat Kantor Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Hukum dan HAM, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Suci Rahmima Sari, S.E  
NIP : 198505262009122005  
Jabatan : Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Sound System ( Alat Podcast)	3.03.02.06.008.22	Primotech Pro-FXR, Goldwin Headset & Microphone, Pengadaan 2022	1	Baik

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

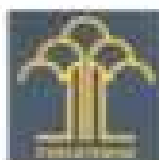
1. **PIHAK KEDUA** adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan transfer keluar aset kepada **PIHAK KEDUA** dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Kepulauan Riau ;
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan BMN berupa peralatan podcast dan lap top pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Kepulauan Riau .

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Aset Tetap berupa Peralatan podcast sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangan oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
Suci Rahmima Sari, S.E.  
NIP. 198505262009122005

  
Heru Triawan  
NIP. 198506112006041001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN  
Nomor : PHN.1-PB.03.01-25**

Pada hari ini Senin tanggal tujuh belas bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Adly Achari  
NIP : 198301052010121001  
Jabatan : Penyuluh Hukum

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No.	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri Merk/Type Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Sound System (Alat Podcast)	3.05.02.06.008.23	Primotech Pro-FNS, Goldwin Headset & Microphone, Pengadaan 2022	1	Baik

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menandatangani sebagai berikut :

- PIHAK KEDUA** adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- PIHAK PERTAMA** akan melakukan transfer keluar aset kepada **PIHAK KEDUA** dan pihak keluar akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Sulawesi Selatan;
- PIHAK PERTAMA** memberikan BMN berupa peralatan podcast dan lap top pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPJN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Sulawesi Selatan.

Dalam rangka terbit penatausahaan BMN, dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Aset Tetap berupa Peralatan podcast sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditransmisikan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja **PIHAK KEDUA**.

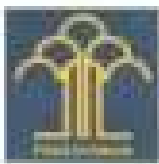
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA

Adly Achari  
NIP 198301052010121001

PIHAK PERTAMA

Heru Triawan  
NIP 198506112006041001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN  
Nomor : PHN.J-PR.03.01-25**

Pada hari ini *Kawah* tanggal *sebelas* bulan *Mei* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan HAM, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Constantinus Kristomo  
NIP : 197404111999031001  
Jabatan : Pl. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Hajriator  
NIP : 196612141990031003  
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nyctax Aset	No. Seri/Mark/Type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Sound System (Alat Podcast)	1.051.02.06.008.25	Primatex Pro-FXR, Goldwin Headset & Microphone, Pengadaan 2022	1	Baik

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertamu-samu disebut para pihak terlebih dahulu menandatangani sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan transfer keuar aset kepada **PIHAK KEDUA** dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Jawa Tengah ;
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan BMN berupa peralatan podcast pada TA 2023, yang akan dipergunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Jawa Tengah .

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Aset Tetap berupa Peralatan podcast sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahaan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

  
**PIHAK KEDUA**  
Hajriator  
NIP 196612141990031003

  
**PIHAK PERTAMA**  
Constantinus Kristomo  
NIP 197404111999031001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN  
Nomor : PHN.1-PR.03.01-25**

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *lima* bulan *Mei* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Kantor Wilayah Bali Kementerian Hukum dan HAM, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Constantinus Kristomo, S.S.M.H  
NIP : 197404111999031001  
Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Marnur Saputra, S.Sos., M.H  
NIP : 19780701 200312 1 002  
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/ Merk/ type/ Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Sound System ( Alat Podcast)	3.05.02.06.00824	Primotech Pro-FXR, Goldwin Headset & Microphone, Pengadaan 2022	1	Baik

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Bali Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan transfer keluar aset kepada **PIHAK KEDUA** dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Bali
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan BMN berupa sound system (Alat Podcast) pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hakim Kantor Wilayah Bali

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Aset Tetap berupa perlengkapan podcast sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangan oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
**PIHAK KEDUA**  
Marnur Saputra, S.Sos., M.H.  
NIP 19780701 200312 1 002

  
**PIHAK PERTAMA**  
Constantinus Kristomo, S.S., M.H.  
NIP 19740411199903 1 001





**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN  
Nomor : PHN.1-PIB.03.01- 46**

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *lima* bulan *Mei* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Kantor Wilayah Bali Kementerian Hukum dan HAM, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Constantinus Kristomo, S.S., M.H.  
NIP : 197404111999031001  
Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Marnur Saputra, S.Sos., M.H.  
NIP : 19780701 200312 1 002  
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Ser.Merk/Type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Sound System ( Alat Podcast)	3.05.02.06.008.3-1	Primattech Pro-FXS, Goldwin Headset & Microphone, Pengadaan 2022	1	Baik

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

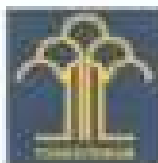
1. **PIHAK KEDUA** adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Bali Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan transfer keluar aset kepada **PIHAK KEDUA** dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Bali
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan BMN berupa sound system (Alat Podcast) pada TA.2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Bali

Dalam rangka terub penatausahaan BMN, dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Aset Tetap berupa perlengkapan podcast sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahaan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
PIHAK KEDUA  
Marnur Saputra, S.Sos., M.H.  
NIP 19780701 200312 1 002

  
BADAN  
PIHAK PERTAMA,  
Constantinus Kristomo, S.S., M.H.  
NIP 19740411 199903 1 001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN  
Nomor : PHN.J-PR.01-31**

Pada hari ini *Jumat tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Constantinus Kristomo  
NIP : 197404111999031001  
Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Muslim Alfar  
NIP : 197311251999031001  
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/Type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Sound System (Alat Podcast)	3.05.02.06.008.26	Primatech Pro-FXR, Goldwin Headset & Microphone, Pengadaan 2022	1	Baik

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berantu-santu disebut para pihak terlebih dahulu menandatangani sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Bangka Belitung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan transfer keluar aset kepada **PIHAK KEDUA** dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satuan kerja Kantor Wilayah Bangka Belitung;
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan BMN berupa peralatan podcast pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi IPDN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Bangka Belitung .

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Aset Tetap berupa Peralatan podcast sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahaan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA

Muslim Alfar  
NIP 197311251999031001



Constantinus Kristomo  
NIP 197404111999031001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN  
Nomor : PHN.1-PR.03.01-21**

Pada hari ini *Jumat* tanggal *sepuluh* bulan *Maret* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Rahmat Huda  
NIP : 196911032001121001  
Jabatan : Kepala Bagian Urusan

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Mark-type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Sound System (Alat Podcast)	3.05.02.06.008.19	Primatex Pro-FXR, Goldwin Headset & Microphone, Pengadaan 2022	1	Baik

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Bengkulu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan transfer keluar aset kepada **PIHAK KEDUA** dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Bengkulu
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan BMN berupa peralatan podcast pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DIPON pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Bengkulu

Dalam rangka terbit penatausahaan BMN, dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Aset Tetap berupa Peralatan podcast sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

Rahmat Huda  
NIP (669) 1032001121001

PIHAK PERTAMA,

Heru Triawan  
NIP 198506112006041001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN  
Nomor : PHN.1-PR.03.01-21**

Pada hari ini *Jumat*, tanggal *sepujuh* bulan *Maret* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Rahmat Husa  
NIP : 196911032001121001  
Jabatan : Kepala Bagian Umum  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No.	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/Type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Sound System (Alat Podcast)	3.05.02.06.008.19	Primatech Pro-FXR, Goldwin Headset & Microphone, Pengadain 2022	1	Baik

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Bengkulu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer keluar aset kepada PIHAK KEDUA dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti server Kantor Wilayah Bengkulu;
3. PIHAK PERTAMA memberikan BMN berupa peralatan podcast pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Bengkulu

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Aset Tetap berupa Peralatan podcast sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,  
  
Rahmat Husa  
NIP 196911032001121001

PIHAK PERTAMA,  
  
Heru Triawan  
NIP 198506112006041001



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

**BerAKHLAK<sup>2</sup>**  
#bangga  
melayani  
bangsa



***LAMPIRAN***  
***BERITA ACARA***  
***KOREKSI***  
***PENCATATAN PAGAR***

**EPHN HEBAT**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
Jl. Mayjen Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur 13640  
Telp. 021-8091908 Faxes. 021-8011753, 8002265  
laman [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

---

**BERITA ACARA KOREKSI PENCATATAN DAN PERUBAHAN NILAI ASET  
Nomor : PHN.1-PB.04.01-08**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami penanggung jawab Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang pada Badan Pembinaan Hukum Nasional :

Nama : Anang Ardian Riza  
NIP. : 197304092002121001  
Jabatan : Kepala Bagian Umum

1. Menyatakan bahwa telah melakukan koreksi pencatatan BMN berupa Pagar dengan kode aset 4040104001, Nup 1 senilai 179.449.000,-
2. Menyatakan telah melakukan koreksi pencatatan nilai/ kuantitas BMN berupa Gedung bangunan dengan kode 4010101001, Nup 1 dengan total nilai Rp.19.066.481.039,- menjadi Rp.19.245.930.039,- yang merupakan nilai kapitalisasi dari pagar yang telah dilakukan koreksi pencatatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan reklasifikasi Aset keluar dan masuk untuk Semester II (dua) Tahun 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



An. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang

Anang Ardian Riza  
NIP 197304092002121008



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

**BerAKHLAK<sup>2</sup>**  
#bangga  
melayani  
bangsa



***LAMPIRAN***

***BERITA ACARA***

***PENGHENTIAN ASET***

***BMN***

**EPHN HEBAT**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Jalan May Jend Soetoyo No. 10- Cililitan Jakarta Timur 13640  
Telp. (021) 8091908-Faksimili 8002265 - 8011753  
Website. [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id) email [bphn@bphn.go.id](mailto:bphn@bphn.go.id)

**BERITA ACARA  
PENGHENTIAN BMN DARI PENGGUNAAN  
Nomor : PHN.1-PB.05.05-02**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami penanggung jawab Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang pada Badan Pembinaan Hukum Nasional :

Nama : Anang Ardian Riza, S.H, M.H.  
NIP : 19730409 200212 1 001  
Jabatan : Kepala Bagian Umum Badan Pembinaan Hukum Nasional

Menyatakan bahwa telah dilakukan penghentian BMN dari penggunaan dengan cara merekam aset yang sudah dihentikan penggunaannya secara permanen dan tidak ada manfaat ekonomi pada masa yang akan datang. Sehingga aset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca, pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tanggal tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, dengan hasil (Rincian Terlampir)

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan penghentian BMN dari penggunaan pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional Semester I (satu) Tahun 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



An.  
Unit Akutansi Kuasa Pengguna Barang  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kepala Bagian Umum

Anang Ardian Riza  
NIP. 19730409 200212 1 001



### Lampiran Penghentian BMN dari Penggunaan

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Keterangan
1	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	21	Rusak Berat
2	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	24	Rusak Berat
3	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	26	Rusak Berat
4	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	28	Rusak Berat
5	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	29	Rusak Berat



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
Jalan May Jend Soetoyo No. 10- Cililitan Jakarta Timur 13640  
Telp. (021) 8091908-Faksimili 8002265 - 8011753  
Laman.[www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id) email [bphn@bphn.go.id](mailto:bphn@bphn.go.id)

---

**BERITA ACARA**  
**PENGHENTIAN BMN DARI PENGGUNAAN**  
**Nomor : PHN.1-PB.03.01-51**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami penanggung jawab Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang pada Badan Pembinaan Hukum Nasional :

Nama : Anang Ardian Riza,S.H,M.H.  
NIP : 19730409 200212 1 008  
Jabatan : Kepala Bagian Umum Badan Pembinaan Hukum Nasional

Menyatakan bahwa telah dilakukan penghentian BMN dari penggunaan dengan cara merekam aset yang sudah dihentikan penggunaannya secara permanen dan tidak ada manfaat ekonomi pada masa yang akan datang. Sehingga aset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca, pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, dengan hasil (Rincian Terlampir)

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan penghentian BMN dari penggunaan pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional Semester II (dua) Tahun 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

An.  
Unit Akutansi Kuasa Pengguna Barang  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kepala Bagian Umum



Anang Ardian Riza,S.H,M.H.  
NIP. 19730409 200212 1 001

### Lampiran Penghentian BMN dari Penggunaan

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Keterangan
1	3020102002	Micro Bus	4	Rusak Berat
2	3020102003	Mini Bus	12	Rusak Berat



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

**BerAKHLAK**  
BerAKHLAK

**# bangga  
melayani  
bangsa**



***LAMPIRAN***  
***BERITA ACARA***  
***PENGGUNAAN***  
***KEMBALI***

**EPHN HEBAT**  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Jalan May Jend Soetoyo No. 10- Cililitan Jakarta Timur 13640  
Telp. (021) 8091908-Faksimili 8002265 - 8011753  
Website. [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id) email [bphn@bphn.go.id](mailto:bphn@bphn.go.id)

---

**BERITA ACARA PENGGUNAAN BMN KEMBALI**  
**Nomor : PHN1-PB.03.01-02**

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami penanggung jawab Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang pada Badan Pembinaan Hukum Nasional :

Nama : Anang Ardian Riza, S.H., M.H.  
NIP : 19730409 200212 1 001  
Jabatan : Kepala Bagian Umum Badan Pembinaan Hukum Nasional

Menyatakan bahwa telah dilakukan koreksi perubahan kondisi dengan cara melakukan koreksi terhadap kondisi Barang Milik Negara pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional, dengan hasil (Rincian Terlampir)

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan koreksi perubahan kondisi dengan cara melakukan koreksi terhadap kondisi Barang Milik Negara pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional Semester I (satu) Tahun 2022, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



An.  
Unit Akutansi Kuasa Pengguna Barang  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kepala Bagian Umum

Anang Ardian Riza, S.H., M.H.  
NIP. 19730409 200212 1 001

### Lampiran Koreksi Perubahan Kondisi BMN

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Keterangan
1.	3050204004	A.C Split	83	
2.	3050204004	A.C Split	92	
3.	3050204004	A.C Split	93	
4.	3050204004	A.C Split	95	
5.	3050204004	A.C Split	100	
6.	3050204004	A.C Split	119	
7.	3050204004	A.C Split	122	
8.	3050204004	A.C Split	124	
9.	3050204004	A.C Split	128	
10.	3050204004	A.C Split	133	
11.	3050204004	A.C Split	135	
12.	3050204004	A.C Split	137	
13.	3050204004	A.C Split	148	
14.	3050204004	A.C Split	160	
15.	3050204004	A.C Split	174	
16.	3050204004	A.C Split	176	
17.	3050204004	A.C Split	177	
18.	3050204004	A.C Split	178	
19.	3050204004	A.C Split	179	
20.	3050204004	A.C Split	180	
21.	3050204004	A.C Split	184	
22.	3050204004	A.C Split	185	
23.	3050204004	A.C Split	186	
24.	3050204004	A.C Split	187	
25.	3050204004	A.C Split	188	
26.	3050204004	A.C Split	189	
27.	3050204004	A.C Split	190	
28.	3050204004	A.C Split	192	
29.	3050204004	A.C Split	193	
30.	3050204004	A.C Split	194	
31.	3050204004	A.C Split	195	
32.	3050204004	A.C Split	206	
33.	3050204004	A.C Split	207	
34.	3050204004	A.C Split	209	
35.	3050204004	A.C Split	210	
36.	3050204004	A.C Split	211	
37.	3050204004	A.C Split	213	
38.	3050204004	A.C Split	214	
39.	3050204004	A.C Split	215	
40.	3050204004	A.C Split	216	

41.	3050204004	A.C Split	217	
42.	3050204004	A.C Split	218	
43.	3050204004	A.C Split	219	
44.	3050204004	A.C Split	220	
45.	3050204004	A.C Split	221	
46.	3050204004	A.C Split	222	
47.	3050204004	A.C Split	231	
48.	3050204004	A.C Split	232	
49.	3050204004	A.C Split	233	
50.	3050204004	A.C Split	234	
51	3090402014	Recharging System	1	



**BERITA ACARA PENGGUNAAN BMN KEMBALI**  
**Nomor : PHN.1-PB.04.03-05**

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami penanggung jawab Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang pada Badan Pembinaan Hukum Nasional :

Nama : Anang Ardian Riza, S.H., M.H.

NIP : 19730409 200212 1 008

Jabatan : Kepala Bagian Umum Badan Pembinaan Hukum Nasional

Menyatakan bahwa telah dilakukan koreksi perubahan kondisi dengan cara melakukan koreksi terhadap kondisi Barang Milik Negara pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional, dengan hasil :

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Keterangan
1.	3.01.03.05.005	Sumersible Pump	1	Kondisi Baik

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan koreksi perubahan kondisi dengan cara melakukan koreksi terhadap kondisi Barang Milik Negara pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional Semester I (satu) Tahun 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



An.  
Unit Akutansi Kuasa Pengguna Barang  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kepala Bagian Umum

Anang Ardian Riza

NIP. 197304092002121008





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Jalan May Jend Soetoyo No. 10- Cililitan Jakarta Timur 13640  
Telp. (021) 8091908-Faksimili 8002265 - 8011753  
Website.[www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id) email [bphn@bphn.go.id](mailto:bphn@bphn.go.id)

---

**BERITA ACARA PENGGUNAAN BMN KEMBALI**  
**Nomor : PHN1-PB.04.03-03**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami penanggung jawab Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang pada Badan Pembinaan Hukum Nasional :

Nama : Anang Ardian Riza, S.H., M.H.  
NIP : 19730409 200212 1 001  
Jabatan : Kepala Bagian Umum Badan Pembinaan Hukum Nasional

Menyatakan bahwa telah dilakukan koreksi perubahan kondisi dengan cara melakukan koreksi terhadap kondisi Barang Milik Negara pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional, dengan hasil (Rincian Terlampir)

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan koreksi perubahan kondisi dengan cara melakukan koreksi terhadap kondisi Barang Milik Negara pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional Semester I (satu) Tahun 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



An.  
Unit Akutansi Kuasa Pengguna Barang  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kepala Bagian Umum

Anang Ardian Riza, S.H., M.H.  
NIP. 19730409 200212 1 001

### Lampiran Penggunaan BMN Kembali

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Keterangan
1.	3.05.02.06.002	Televisi	15	
2.	3.05.02.06.002	Televisi	16	
3.	3.05.02.06.002	Televisi	17	
4.	3.05.02.06.002	Televisi	18	
5.	3.05.02.06.002	Televisi	19	
6.	3.05.02.06.002	Televisi	20	
7.	3.05.02.06.002	Televisi	21	
8.	3.05.02.06.002	Televisi	22	



**BERITA ACARA PENGGUNAAN BMN KEMBALI**  
**Nomor : PHN1-PB.04.03-07**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami penanggung jawab Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang pada Badan Pembinaan Hukum Nasional :

Nama : Anang Ardian Riza, S.H., M.H.

NIP : 19730409 200212 1 008

Jabatan : Kepala Bagian Umum Badan Pembinaan Hukum Nasional

Menyatakan bahwa telah dilakukan koreksi perubahan kondisi dengan cara melakukan koreksi terhadap kondisi Barang Milik Negara pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional, dengan hasil :

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Keterangan
1.	3020104001	Sepeda Motor	12	Kondisi Baik

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan koreksi perubahan kondisi dengan cara melakukan koreksi terhadap kondisi Barang Milik Negara pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional Semester I (satu) Tahun 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



An.  
Unit Akutansi Kuasa Pengguna Barang  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kepala Bagian Umum

Anang Ardian Riza  
NIP. 197304092002121008



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**



*LAMPIRAN*

*BERITA ACARA*

*PENGGUNAAN*

*KEMBALI*

**BPJH HEBAT**



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

**BerAKHLAK**  
Berakhlak Berprestasi

**#bangga  
melayani  
bangsa**



**LAMPIRAN**

**LELANG**

**EPHN HEBAT**  
Badan Pembinaan Hukum Nasional

Lembar Pertama  
Pejabat Lelang

Ttd.

Gunawan Raharjo, S.Mn.  
NIP 19791009 200112 1 004

**SALINAN  
RISALAH LELANG  
Nomor 602/28/2023**

—Pada hari ini Selasa tanggal empat belas bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga (14-11-2023) dimulai pukul sebelas (11:00) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: —————

— Gunawan Raharjo, Sarjana Manajemen, NIP 19791009 200112 1 004 —  
Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 238/KM.5/2015 tanggal 27 Mei 2015, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kelayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-1534/KNL.0704/2023 tanggal 30 Oktober 2023 dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara bertempat di Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jalan Mayjen Sutoyo nomor 10 Cililitan Jakarta Timur . —————

—Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Constandinus Kristomo, NIP 197404111990031001, Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, berkedudukan di Jakarta, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor PHN.1-PB.05.01-04 tanggal 24 Agustus 2023, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor S-5125/KNL.0704/2023 tanggal 30 Oktober 2023 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor S-192/MK.6/KNL.0704/2023 tanggal 9 Oktober 2023. —————

—Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: —————  
Anang Ardian Riza, Sarjana Hukum, Magister Hukum, NIP 197304092002121008, Kepala Bagian Umum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor PHN.1-PB.05.01-05 tanggal 24 Agustus 2023 melaksanakan penjualan lelang dengan perantara KPKNL Jakarta IV. —————

—Barang bergerak yang dilelang berupa: —————

1 (satu) paket kendaraan roda dua dalam kondisi rusak berat terdiri dari —————  
1. Honda GL 160 D tahun 2010 nomor polisi B 6637 TQA nomor rangka MH1KC1215AK245081 nomor mesin KC12E1242678 (BPKB ada STNK tidak ada) —  
2. Honda GL 160 D tahun 2010 nomor polisi B 6640 TQA nomor rangka MH1KC1219AK245116 nomor mesin KC12E1242704 (BPKB dan STNK ada) —  
3. Honda GL 160 D tahun 2010 nomor polisi B 6642 TQA nomor rangka MH1KC1219AK345133 nomor mesin KC12E1242922 (BPKB ada STNK tidak ada) —  
4. Honda GL 200 R tahun 2013 nomor polisi B 6755 TQB nomor rangka MH1MC2310DK065279 nomor mesin MC23E1064735 (BPKB ada STNK ada) —  
5. Honda GL 200 R tahun 2013 nomor polisi B 6756 TQB nomor rangka MH1MC2315DK065276 nomor mesin MC23E1064736 (BPKB ada STNK ada) —  
Nilai Limit : Rp0 948.000,00 (sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) —————

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jalan Mayjen Sutoyo No.10 Cililitan Jakarta Timur . —————  
dilelang apa adanya. —————

—Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran tanggal 09

Lembar kedua dari Risalah Lelang Nomor : 603/28/2023 tanggal 14 November 2023  
Pejabat Lelang

Ttd.

Gunawan Raharjo, S.Mn,  
NIP 19791009 200112 1 004

November 2023.

—Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara.

—Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1906 Staatsblad 1906:169 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jls. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang.

—Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual.

—Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan:

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut:

—a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang.

—b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan;

—c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan.

2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut:

—a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli;

—b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang;

—c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan.

—Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet.

—Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka:

1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi.

2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang.

—Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka:

1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar.

2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan.

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran.

—Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: —

1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. \_\_\_\_\_
2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. \_\_\_\_\_
3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. \_\_\_\_\_  
—Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. \_\_\_\_\_  
—Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: \_\_\_\_\_
  1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. \_\_\_\_\_
  2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. \_\_\_\_\_  
—Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui formol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli. \_\_\_\_\_  
—Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui formol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawar tertinggi yang sama tersebut. \_\_\_\_\_  
—Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: \_\_\_\_\_
    1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. \_\_\_\_\_
    2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. \_\_\_\_\_  
—Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: \_\_\_\_\_
    1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. \_\_\_\_\_
    2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka



Pejabat Lelang

Ttd.

Gunawan Raharjo, S.Mn.  
NIP 19791009 200112 1 004

- waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. \_\_\_\_\_
- Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. \_\_\_\_\_
- Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. \_\_\_\_\_
- Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. \_\_\_\_\_
- Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. \_\_\_\_\_
- Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. \_\_\_\_\_
- Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. \_\_\_\_\_
- Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kiring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. \_\_\_\_\_
- Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. \_\_\_\_\_
- Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. \_\_\_\_\_
- Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wangprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. \_\_\_\_\_
- Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. \_\_\_\_\_
- Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. \_\_\_\_\_
- Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. \_\_\_\_\_
- Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kutansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat

Lambar kelima dari Risalah Lelang Nomor : 602/28/2023 tanggal 14 November 2023  
Pejabat Lelang

Ttd.

Gunawan Raharjo, S.Mn.  
NIP 19791009 200112 1 004

Satoran BPHTB. —————

—Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari Instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. —————

—Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. —————

—Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. —————

—Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Jakarta IV. —————

—Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. —————

—Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. —————

—Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan diilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. —————

—Setelah apa yang diuraikan di atas ini difayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai. —————

—Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah tiga puluh satu penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. —————

—Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini. —————

Barang yang laku/terjual: —————

1 (satu) paket kendaraan roda dua dalam kondisi rusak berat terdiri dari —————

1. Honda GL 160 D tahun 2010 nomor polisi B 6637 TQA nomor rangka MH1KC1215AK245081 nomor mesin KC12E1242676 (BPKB ada STNK tidak ada) —
2. Honda GL 160 D tahun 2010 nomor polisi B 6640 TQA nomor rangka MH1KC1219AK245118 nomor mesin KC12E1242704 (BPKB dan STNK ada) ———
3. Honda GL 160 D tahun 2010 nomor polisi B 6642 TQA nomor rangka MH1KC1219AK245133 nomor mesin KC12E1242922 (BPKB ada STNK tidak ada) —
4. Honda GL 200 R tahun 2013 nomor polisi B 6755 TQB nomor rangka MH1MC2310DK065279 nomor mesin MC23E1064735 (BPKB ada STNK ada) ———

5. Honda.../Lambar Keenam



Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 602/28/2023 tanggal 14 November 2023

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (satu) \_\_\_\_\_  
Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) \_\_\_\_\_  
Jumlah harga barang yang laku/terjual: Rp26.763.500,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) \_\_\_\_\_  
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) \_\_\_\_\_  
Jumlah harga barang yang ditahan: \_\_\_\_\_  
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 20 (dua puluh) \_\_\_\_\_  
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. \_\_\_\_\_

Perjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

Anang Ardian Riza, S.H.,  
M.H.  
NIP 197304092002121008

Gunawan Raharjo, S.Mn.  
NIP 19791009 200112 1 004

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya  
Tanggal: 15 NOV 2023  
Kepala KEKNE Jakarta IV



Rafiq Manshur  
NIP 19750725 199903 1 001



## BUKTI PENERIMAAN NEGARA

### Data Pembayaran Tagihan

Kode Billing	0202111940004
Tanggal Billing	15-11-2023 10:18:24
Tanggal Kedaluwarsa	22-11-2023 10:18:24
Tanggal Deyer	15-11-2023 22:04:07
Bank/Instansi/Peruntukan Bank	BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	Internet Banking
Nama Wakil Setor/Wakil Bayar	Bendahara Pemerintahan (PNS) Jakarta IV
Kementerian/Lembaga	KEJ - KEHENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Kerja 1	10 - Badan Pendidikan Hukum Nasional
Saluran Kerja	600300 - BADAN PEMERINTAHAN HUKUM NASIONAL
Total Tagihan	20.763.500 (IDR)
Terbilang	Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus (IDR)
Status	Salah Deyer
NTD	00000102454
NTPN	C000000001M0LKE

### Data Pembayaran Tagihan 1

Jenis Saluran	Pradapuan dan Prapaidan Pendidikan dan Masih
Kode Akun	621422 - Pradapuan dan Prapaidan Pendidikan dan Masih
Jumlah Saluran	20.763.500 (IDR)
Keterangan	RL-0001182023 Tgl 14 November 2023 Badan Pendidikan Hukum Nasional



### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	02022113405012
Tanggal Billing	15-11-2023 10:15:31
Tanggal Kadaluarsa	23-11-2023 10:15:31
Tanggal Bayar	15-11-2023 23:04:58
Bank/Pas/Pst/Instansi Bayar	BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	Internet Banking
Nama Wakil Instansi/Wakil Negara	Perwakilan Pemerintahan EPON, Jakarta IV
Kementerian/Lembaga	013 - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Kerja I	00 - Dinas Kekayaan Negara
Subsat Kerja	337037 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV
Total Debitur	535.270 (IDR)
Terdibang	Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh (IDR)
Status	Sudah Dibayar
NTB	00000102707
NIPN	71830204V02AL00

#### Data Pembayaran Tagihan :

Jenis Saluran	IV - DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B Bea Lelang Pejabat - 3 Lelang Nonberkualifikasi Wakil Negara RI di Daerah Khusus - 4 Ruang Bergaris
Kode Akun	432702 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Saluran	535.270 (IDR)
Keterangan	BL-00000102707 Tgl 14 November 2023 Surat Pembayaran Hibah Kumulatif



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

**BerAKHLAK**  
BerAKHLAK

**#bangga  
melayani  
bangsa**



# **LAMPIRAN- LAINNYA**

**BPHN HEBAT**  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL



KEMENTERIAN KEUANGAN DAN RISIKO NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI RENCANA BELANJA

Keputusan Menteri Keuangan No. 101/KM.010/2020

Halaman ini terdapat tanggal 8 bulan Desember tahun 2019 telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan Tahun 2019 untuk Badan Pertanggungjawaban Nasional sebagai (BPJAN) dengan selisihan anggaran sebagai (SLA).

Perencanaan Laporan Keuangan Tahun 2020 menggunakan Basis Akumulasi Laporan Keuangan terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CAL). Selain perencanaan Laporan Keuangan tersebut diatas, perencanaan ini juga mencakup anggaran yang terdapat dengan atau pada Laporan Keuangan bentuk pertanggungjawaban atau atau bentuk lain yang digunakan untuk memonitor pelaksanaan SLA dan pada Laporan Keuangan bentuk pertanggungjawaban.

Berikutnya adalah data keuangan untuk Laporan dan pertanggungjawaban atau atau bentuk pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Pertanggungjawaban dan Neraca ditunjukkan sebagai berikut:

ANALISA DATA AKUMULASI LAPORAN KEUANGAN

1. Saldo di Berekasir Pengeluaran + Uang Muka dari APBN		31 Desember 2019 (Revised)
	Saldo	
Saldo di Berekasir Pengeluaran (Uang Muka dari APBN)		-
Saldo		-
Penghasilan		-

2. Saldo di Anggaran + Ekuitas		31 Desember 2019 (Revised)
	Saldo	
Asal Tahun Anggaran		499.777.000.000,00
Salisihan Tahun Anggaran		203.176.750,00
Salisihan Tahun Anggaran		499.980.176.750,00
Saldo		-
Penghasilan		-

3. Saldo Akumulasi Pengeluaran ke Entitas Lain (LPE) + Total Neraca Neraca pada LRA		31 Desember 2019 (Revised)
	Saldo	
Pengeluaran ke Entitas Lain		1.000.000.000,00
Total Neraca Neraca pada LRA		1.000.000.000,00
Saldo		-
Penghasilan		-

4. Saldo Akumulasi Pengeluaran ke Entitas Lain (LPE) + Total Pertanggungjawaban Neraca pada LRA		31 Desember 2019 (Revised)
	Saldo	
Pengeluaran ke Entitas Lain		99.000.000,00
Total Pertanggungjawaban Neraca pada LRA		99.000.000,00
Saldo		-
Penghasilan		-



4. Angka surplus/defisit pada LQ + angka surplus/defisit pada LPI		31 Desember 2022 (Rupiah)
Rupiah		
surplus/defisit pada LQ		121.360.245.571,00
surplus/defisit pada LPI		121.360.245.571,00
Jumlah		-
Penjelasan :		

5. Angka ekuitas aset pada LPI tahun berjalan + angka ekuitas aset pada LPI dan Neraca TA sebelumnya		31 Desember 2022 (Rupiah)
Rupiah		
ekuitas aset pada LPI tahun berjalan		400.277.667.024,00
ekuitas aset pada LPI dan Neraca TA sebelumnya		400.277.667.024,00
Jumlah		-
Penjelasan :		

7. Angka ekuitas aset pada LPI + angka ekuitas pada Neraca tahun berjalan		31 Desember 2022 (Rupiah)
Rupiah		
ekuitas aset pada LPI		400.277.667.024,00
ekuitas pada Neraca tahun berjalan		400.277.667.024,00
Jumlah		-
Penjelasan :		

Jakarta, 8 Februari 2023

Operator Saham ODP



(Evi Nugraha)

NIP. 1980024 20001 2 001

Operator ODP Asas & Perencanaan



(Romyandhi)

NIP. 1980024 20001 2 001

Mengarahkan,


Kelembagaan Penyelenggara APBN dan Monev  
Kantor Pusat/Manajemen Wilayah Nasional



(Evi Nugraha)

NIP. 1980024 20001 2 001



Urutan Urut/No	Nama	Paraf
1. Pemimpin Unit/Manajemen Wilayah dan Monev	Evi Nugraha	
2. Kepala Pengabdian Masyarakat APBN dan Monev	Evi Nugraha	



**RINGKASAN HASIL ANALISIS DATA LAPORAN KEUANGAN (ANDALAKU)  
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN ESELON I (UAPPA-E1)  
PER 31 DESEMBER 2023 (UNAUDITED)**

**Kode Satker/Wilayah/Unit E1** 01310  
**Uraian Satker/Kanwil/Unit E1** Badan Pembinaan Hukum Nasional

**A ANALISIS DATA ANTAR AKUN LAPORAN KEUANGAN**

		Selisih	Penjelasan
1	Kas di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	-	
2	Aset = Kewajiban + Ekuitas	-	
3	Saldo Akun Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE) = Total Belanja Netto pada LRA	-	
4	Saldo akun Diterima dari Entitas Lain (LPE) = total Pendapatan Netto pada LRA	-	
5	Angka surplus/defisit pada LO = angka surplus/defisit pada LPE	-	
6	Angka ekuitas awal pada LPE tahun berjalan = angka ekuitas akhir pada LPE dan Neraca TA sebelumnya	-	
7	Angka ekuitas akhir pada LPE = angka ekuitas pada Neraca tahun berjalan	-	

**B ANALISIS REALISASI BELANJA DENGAN MUTASI ASET**

<b>1 Tanah</b>		
a	Realisasi Belanja Tanah	-
b	Mutasi + Tanah dari Realisasi belanja	-
c	<b>Selisih</b>	-
d	<b>Faktor Yang Mempengaruhi</b>	
	Belanja Tanah membentuk Aset Ekstrakomptable	-
	Aset Belum Diregister	-
	Realisasi Belanja Tanah belum SP2D (SPM belum SP2D)	-
	Belanja Gedung dan Bangunan membentuk Tanah	-
	Belanja Tanah membentuk Konstruksi Dalam pengerjaan	-
	Ralat akun belanja/Jurnal manual atas ketidaksesuaian belanja	-
	Belanja Tanah membentuk Persediaan	-
	Pengembalian belanja modal tanah	-
	Belanja modal ekstra membentuk Tanah Intra	-
	BAST belanjaTanah yang dibatalkan karena tidak dilanjutkan pembayaran	-
e	<b>Total faktor yang mempengaruhi</b>	-
f	<b>Control</b>	-
<b>2 Peralatan dan Mesin</b>		
a	Realisasi Belanja Peralatan dan mesin	1.394.106.782,00
b	Mutasi + PM dari Realisasi belanja	1.394.106.782,00
c	<b>Selisih</b>	-
d	<b>Faktor Yang Mempengaruhi</b>	
	Belanja Peralatan dan Mesin membentuk Aset Ekstrakomptable	-
	Aset Belum Diregister	-
	Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin belum SP2D (SPM belum SP2D)	-
	Belanja Barang membentuk Peralatan dan Mesin	-
	Belanja Gedung dan Bangunan membentuk Peralatan dan Mesin	-
	Belanja Peralatan dan Mesin membentuk Konstruksi Dalam pengerjaan	-

Belanja Peralatan dan Mesin membentuk Lisensi	-
Ralat akun belanja/Jurnal manual atas ketidaksesuaian belanja	-
Belanja Peralatan dan Mesin membentuk Persediaan	-
Pengembalian belanja modal Peralatan dan Mesin	-
Belanja modal ekstra membentuk PM Intra	-
BAST RPATA penampungan atas Pekerjaan yang akan diselesaikan pada Tahun 2024	-
Penihilan RPATA atas pekerjaan yang tidak diselesaikan	-
BAST belanja Peralatan dan Mesin yang dibatalkan karena tidak dilanjutkan pembayaran	-
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin membentuk Peralatan dan Mesin	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan membentuk Peralatan dan Mesin	-
Belanja Modal Lainnya membentuk Peralatan dan Mesin	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin membentuk Software	-
<b>e Total faktor yang mempengaruhi</b>	<b>-</b>
<b>f Control</b>	<b>-</b>

<b>3 Gedung dan Bangunan</b>	
<b>a</b> Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan	3.317.712.222,00
<b>b</b> Mutasi + GB dari Realisasi belanja	3.317.712.222,00
<b>c Selisih</b>	-
<b>d Faktor Yang Mempengaruhi</b>	
Belanja Gedung dan Bangunan membentuk Aset Ekstrakomptable	-
Aset Belum Diregister	-
Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan belum SP2D (SPM belum SP2D)	-
Belanja Barang membentuk Gedung dan Bangunan	-
Belanja Peralatan dan Mesin membentuk Konstruksi Dalam pengerjaan	-
Belanja Aset Lainnya membentuk Konstruksi Dalam pengerjaan	-
Belanja Tanah membentuk Konstruksi Dalam pengerjaan	-
Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan membentuk Konstruksi Dalam pengerjaan	-
Belanja Gedung dan Bangunan membentuk Peralatan dan Mesin	-
Belanja Gedung dan Bangunan membentuk Tanah	-
Belanja Gedung dan Bangunan membentuk Jaringan	-
Belanja Gedung dan Bangunan membentuk Aset Tetap Lainnya	-
Belanja Gedung dan Bangunan membentuk Aset Tetap Renovasi	-
Ralat akun belanja/Jurnal manual atas ketidaksesuaian belanja	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan membentuk Persediaan	-
Pengembalian belanja Modal Gedung dan Bangunan	-
Belanja modal ekstra membentuk GB/KDP Intra	-
BAST RPATA penampungan atas Pekerjaan yang akan diselesaikan pada Tahun 2024	-
Penihilan RPATA atas pekerjaan yang tidak diselesaikan	-
BAST belanja gedung dan bangunan yang dibatalkan karena tidak dilanjutkan pembayaran	-
Belanja Modal Lainnya membentuk Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin membentuk Aset Tetap Lainnya	-
<b>e Total faktor yang mempengaruhi</b>	<b>-</b>
<b>f Control</b>	<b>-</b>

<b>4 Jalan, Irigrasi dan Jaringan</b>	
<b>a</b> Realisasi Belanja JIJ	-
<b>b</b> Mutasi + JIJ dari Realisasi belanja	-
<b>c Selisih</b>	-
<b>d Faktor Yang Mempengaruhi</b>	
Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan membentuk Aset Ekstrakomptable	-
Aset Belum Diregister	-
Realisasi Belanja JIJ belum SP2D (SPM belum SP2D)	-
Belanja Gedung dan Bangunan membentuk Jaringan	-
Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan membentuk Konstruksi Dalam pengerjaan	-
Ralat akun belanja/Jurnal manual atas ketidaksesuaian belanja	-
Belanja Modal Jalan, Irigrasi dan Jaringan membentuk Persediaan	-
Pengembalian belanja Modal Jalan, Irigrasi dan Jaringan	-
Belanja modal ekstra membentuk Jalan, Irigrasi dan Jaringan Intra	-

BAST belanja JIJ yang dibatalkan karena tidak dilanjutkan pembayaran	-
<b>e Total faktor yang mempengaruhi</b>	-
<b>f Control</b>	-


<b>5 Aset Lainnya</b>	
<b>a</b> Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya dan Aset Lair	256.991.183,00
<b>b</b> Mutasi + Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya dar	256.991.183,00
<b>c</b> Selisih	-
<b>d Faktor Yang Mempengaruhi</b>	
Belanja Aset Lainnya membentuk Aset Ekstrakomptable	-
Aset Belum Diregister	-
Realisasi Belanja Aset Lainnya belum SP2D (SPM belum SP2D)	-
Belanja Gedung dan Bangunan membentuk Aset Tetap Renovasi	-
Belanja Peralatan dan Mesin membentuk Lisensi	-
Belanja Barang membentuk Lisensi	-
Belanja Gedung dan Bangunan membentuk Aset Tetap Lainnya	-
Belanja Aset Lainnya membentuk Konstruksi Dalam pengerjaan	-
Ralat akun belanja/Jurnal manual atas ketidaksesuaian belanja	-
Belanja Modal Aset Lainnya membentuk Persediaan	-
Pengembalian belanja Modal Aset Lainnya	-
Belanja modal ekstra membentuk Aset Lainnya Intra	-
Belanja Modal Lainnya membentuk Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	-
Belanja Modal Lainnya membentuk Peralatan dan Mesin	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin membentuk Aset Tetap Lainnya	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin membentuk Software	-
BAST belanja Aset Lainnya yang dibatalkan karena tidak dilanjutkan pembayaran	-
BAST RPATA penampungan atas Pekerjaan yang akan diselesaikan pada Tahun 2024	-
Penihilan RPATA atas pekerjaan yang tidak diselesaikan	-
<b>e Total faktor yang mempengaruhi</b>	-
<b>f Control</b>	-

**Mengetahui**  
Pejabat Penyusun LKKL,



(Ira Yustisia Smarayoni)  
NIP. 19780313 200312 2 001

**Penyusun Laporan Keuangan**



(Rizky Awaliyah)  
NIP. 19830228 200901 2 004

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN**  
**TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN ESELON I (UAPPA-E1)**  
**TAHUNAN TA 2023**

Kode dan Nama Eselon 1 : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Kode dan Nama K/L : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
<i>Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>				
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>				
<b>KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN</b>				
	<b>Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
	<b>Laporan Keuangan Tambahan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal	√		Ada
2	Neraca Percobaan AkruaI	√		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada
<b>KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI</b>				
	<b>Kesesuaian Saldo</b>	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	Sama		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>				
<b>KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI</b>				
	<b>Persamaan Dasar Akuntansi</b>	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	Sama		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	Sama		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	Sama		Sama
<b>PENGECEKAN PADA MONSAKTI</b>				
	<b>To Do List</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		√	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	√		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		√	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>				



	<b>Rekon SAKTI-SPAN</b> (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNBP		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	<b>Rekon Internal</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	<b>Daftar MONSAKTI</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
<b>PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL</b>				
	<b>Pengecekan Saldo Neraca Percobaan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	<b>Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
		√		
	<b>Akun-Akun yang tidak boleh ada</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak

5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	<b>Jika Bukan Satker BLU</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat akun Neraca (1xxxx dan 2xxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	<b>Terkait Satker BLU</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)	√		Tidak
	<b>Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		N/A	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		N/A	Tidak
	<b>Hibah Langsung</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		N/A	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		N/A	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	N/A		Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	N/A		Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	N/A		Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	N/A		Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	N/A		Ya
	<b>Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal</b>			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI		0	

2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	Rp 159.472.066		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)	Ya		Tidak
	<b>Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada <b>Neraca Percobaan Kas?</b>		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		√	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?		√	Ya
	<b>Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)		√	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	<b>Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
<b>PENGECEKAN NERACA</b>				
	<b>Pengecekan Pos-pos Neraca</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
<b>PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL</b>				
	<b>Pengecekan Pos-pos LO</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		√	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
<b>PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b>				
	<b>Pengecekan Pos-pos LPE</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak



3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
<b>Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST				
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	√		Ya
<b>PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)</b>				
<b>Pengecekan Pos-pos LRA/B/P</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya
<b>TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN</b>				
<b>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?	√		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	√		Ya
<b>Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat &amp; Beban Bansos</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		N/A	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		N/A	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
<b>Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak

TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	N/A		Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		N/A	Tidak
3	Apakah formula perhitugnan SAL pada LPSAL telah sesuai?	N/A		Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?	N/A		Ya
5	Apakah Nilai SILPA/SIKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	N/A		Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?	N/A		Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?	N/A		Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	N/A		Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	N/A		Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU	N/A		Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	N/A		Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	N/A		Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU	N/A		Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN				
"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"				
Mengetahui Pejabat Penyusun LKKL,  (Ira Yustisia Smarayoni) NIP 19780313 200312 2 001		Jakarta, 05 Februari 2024 Penelaah,  ( Rizky Awaliyah ) NIP 19830228 200901 2 004		





| |



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

**BerAKHLAK<sup>2</sup>**  
#bangga  
melayani  
bangsa



## ***LAMPIRAN***

# ***HASIL & TINDAK LANJUT TEMUAN INSPEKTORAT JENDERAL DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN***

**EPHN HEBAT**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

**INSPEKTORAT JENDERAL**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No.8, Setiabudi, Kuningan,  
Jakarta Selatan 12940, Telp. 021-5252975, Fax. 021-5253004

Laman: <http://itjen.kemenkumham.go.id>, Surel: [itjen@kemenkumham.go.id](mailto:itjen@kemenkumham.go.id)

---

Nomor : ITJ-PW.03.01-108 27 April 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Sifat : Segera  
Perihal : Petunjuk Penanganan dan Penertiban Hasil  
Audit atas Pengelolaan Keuangan pada  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan  
HAM Jawa Timur TA. 2022 sampai dengan  
Februari 2023

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
Jawa Timur  
di Surabaya

Menindaklanjuti Surat Perintah Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor ITJ.PW.02.01-121 Tanggal 01 Maret 2023, Tim Inspektorat Wilayah VI telah melakukan Audit atas Pengelolaan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur TA. 2022 sampai dengan Februari 2023 yang dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari, mulai tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan 13 Maret 2023. dengan uraian hasil audit sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Nomor: ITJ.7.PW.03.01-33/III/2023 tanggal 31 Maret 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan permasalahan yang masih perlu dilakukan tindak lanjut penanganan dan penertiban dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, sebagai berikut:

**1. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 Belum Sepenuhnya Dilakukan Dengan Akuntabel (1.04.01)**

Pada tahun 2022 pagu anggaran belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur berdasarkan RKA-K/L Revisi 13 Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp320.646.000,00. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran per tanggal 30 Desember 2022, penyerapan/realisasi anggaran belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar sebesar Rp 319.880.400,00. Dalam uji petik atas penyerapan tersebut masih ditemukan belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Bertingkat dan Gedung Kantor Tidak Bertingkat yang bukti pertanggungjawaban/pelaksanaannya belum akuntabel/tidak ada senilai Rp5.850.000,00 dengan rincian sebagaimana terlampir pada Laporan Hasil Audit.

Direkomendasikan Kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen agar segera menarik kelebihan pembayaran atas pelaksanaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 sebanyak Rp. 5.850.000,00 untuk disetorkan ke Kas Negara. (01).

## 2. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, Lembur Pegawai dan Honorarium Panitia Dilakukan Tidak Sesuai Ketentuan Dan/Atau Melebihi Standar Yang Ditetapkan (1.04.01)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan administrasi keuangan dan kelengkapannya, khususnya terkait dengan kegiatan perjalanan dinas, pembayaran lembur pegawai dan honorarium panitia pada lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, diketahui terdapat kondisi sebagai berikut:

### a. Perjalanan Dinas

Terdapat belanja / kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembayaran transportasi darat perjalanan dinas tidak sesuai dengan ketentuan dikarenakan menggunakan skema sewa kendaraan roda 4;
- 2) Terdapat pembayaran biaya / *fee* di luar tiket pesawat (asuransi, biaya pemilihan kursi) dan pembayaran taksi dari hotel menuju tempat kegiatan yang tidak dapat dibayarkan;
- 3) Pembayaran transport lokal melebihi standar yang ditetapkan;
- 4) Transport lokal dibayarkan kepada pegawai/pejabat yang menggunakan kendaraan dinas;
- 5) Terdapat bukti perjalanan dinas berupa biaya penginapan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- 6) Terdapat pembayaran honorarium narasumber dan uang harian narasumber yang tidak sesuai ketentuan;
- 7) Terdapat perjalanan dinas yang terindikasi tidak dilaksanakan yaitu pelaksana perjalanan dinas melakukan rekam kehadiran pada pagi dan sore hari pelaksanaan perjalanan dinas.

### b. Honorarium Panitia Pelaksana Tim PORA

Terdapat Kegiatan Operasi Gabungan Pengawasan Orang Asing pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang pada 14 – 15 September 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang dan terhadap 13 (tiga belas) panitia pelaksana diberikan pembayaran honorarium panitia. Berdasarkan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022, dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 orang.

### c. Lembur Pegawai

Berdasarkan pemeriksaan rekam kehadiran pada SIMPEG dan permintaan keterangan, diketahui bahwa terdapat pegawai yang melakukan lembur namun merekam kehadiran tidak sesuai dengan jumlah jam lembur dan tercatat Dinas Luar Full. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran uang lembur dan uang makan lembur pegawai

Rekapitulasi temuan *sampling* perjalanan dinas, pembayaran lembur pegawai dan honorarium panitia yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp41.434.415,00 secara rinci dan lengkap sebagaimana terlampir pada Laporan Hasil Audit.

Direkomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur melakukan hal-hal sebagai berikut: (01)

- a. Memerintahkan kepada Pejabat para pejabat dan pegawai yang terdapat kelebihan pembayaran baik berupa perjalanan dinas, honorarium, dan uang lembur dengan



total nilai seluruhnya sebesar Rp. 41.434.415,00 agar segera disetorkan ke kas negara

- b. Mengkomunikasikan secara tertulis kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim terkait dengan kondisi ini dan menyusun kebijakan/pedoman terkait dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagai acuan kedepannya.

### **3. Pengelolaan Administrasi Pertanggungjawaban Belum Seluruhnya Dilakukan Secara Akuntabel/Sesuai Ketentuan (1.04.01)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan administrasi keuangan dan kelengkapannya terhadap 9 (Sembilan) DIPA yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur masih ditemukan pengelolaan administrasi pertanggungjawaban yang belum seluruhnya akuntabel/sesuai dengan ketentuan. Hasil sampling terhadap berkas pertanggungjawaban atas realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 s.d. 2023 diketahui hal-hal dan kondisi sebagai berikut:

- a. Dokumen administrasi keuangan berupa Surat Perintah Bayar dan Kuitansi belum seluruhnya ditandatangani oleh an. Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan penerima uang muka kerja.
- b. Pelaksanaan administrasi keuangan yaitu berupa pertanggungjawaban keuangan belum seluruhnya didukung dengan data-data/berkas dan dokumentasi yang memadai (rincian terlampir dalam LHP)
  - 1) Pembelian pulsa dan belanja barang non operasional pada Operasi Bidang Keamanan Divisi Imigrasi (5254.BHB) belum didukung data dukung yang memadai yaitu Surat Perintah, Laporan Kegiatan, Dokumentasi, Surat Perjalanan Dinas dan daftar penerima pulsa.
  - 2) Honorarium narasumber dan moderator belum seluruhnya dilengkapi dengan data dukung berupa undangan, jadwal kegiatan, bahan materi narasumber, notula dan dokumentasi.
  - 3) Pembayaran konsumsi rapat dan honorarium penceramah belum seluruhnya dilengkapi dengan data dukung berupa undangan, notula, daftar hadir, dan dokumentasi.
  - 4) Pembelian Belanja Barang seperti banner, sewa LED dan Stage Event Kegiatan dan terdapat kegiatan pemeliharaan halaman yang belum dilengkapi dengan data dukung memadai yaitu dokumentasi kegiatan pemeliharaan halaman dan dokumentasi barang yang sudah diterima dari toko/penyedia.
  - 5) Perjalanan dinas belum sepenuhnya sesuai ketentuan
  - 6) Paket Kegiatan Rapat / Pertemuan di Luar Kantor (Fullboard, Fullday, Halfday) belum seluruhnya didukung dengan data dukung berupa confirmation letter, daftar kamar untuk kegiatan fullboard, jadwal kegiatan, laporan kegiatan dan daftar hadir belum per hari / per sesi.
- c. Proses pengadaan barang/jasa/belanja tidak sesuai ketentuan, antara lain sebagai berikut:
  - 1) Terdapat kegiatan fullday pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang hanya mengundang peserta internal tanpa melibatkan peserta dari kementerian negara/lembaga lainnya;
  - 2) Pelaksanaan kegiatan fullday dan halfday pada Divisi Imigrasi tidak sesuai dengan perencanaan yaitu jumlah paket meeting yang dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah peserta pada Surat Keputusan;
  - 3) Terdapat transport lokal yang dibayarkan diberikan kepada pejabat/pegawai yang melakukan kegiatan dalam kompleks perkantoran yang sama;

- 4) Terdapat belanja barang non operasional lainnya pada Operasi Bidang Keamanan Divisi Imigrasi (5254.BHB) berupa konsumsi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- d. Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan.
- e. Masih terdapat beberapa pertanggungjawaban uang persediaan yang sudah diberikan kepada pelaksana kegiatan, namun belum disertai dengan RAB yang rinci dan detail pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dan terdapat beberapa pertanggungjawaban kegiatan yang sudah lama diberikan namun belum dipertanggungjawabkan.
- f. Bukti pembelian ATK rutin belum dilakukan secara akuntabel (pihak ketiga/penyedia) pada saat pengantaran barang tidak disertai dengan surat jalan dan bukti pengoroman/serah terima secara rinci barang dan dokumentasi terhadap barang yang diantarkan

Direkomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur melakukan Langkah-langkah sebagai berikut: (06)

- a. Melengkapi/memperbaiki laporan kegiatan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi terhadap pengeluaran/belanja Tahun Anggaran 2022 s. Februari 2023;
- b. Mengkomunikasikan secara tertulis kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim terkait dengan kondisi ini dan menyusun kebijakan/pedoman terkait dengan laporan kegiatan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi terhadap pengeluaran/belanja sebagai acuan kedepannya.

**4. Pelaksanaan Belanja Anggaran Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur belum sepenuhnya mengedepankan prinsip efektif, efisien dan ekonomis (3E) (3.03.03)**

Berdasarkan hasil audit atas pengelolaan administrasi keuangan dan kelengkapannya terhadap 9 (Sembilan) DIPA yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur masih ditemukan pelaksanaan belanja anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur yang belum mengedepankan prinsip efektif, efisien dan ekonomis (3E). Hasil sampling terhadap berkas pertanggungjawaban atas realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 s.d. 2023 diketahui hal-hal dan kondisi sebagai berikut:

- a. Pengadaan barang dan jasa melebihi kebutuhan  
Pengadaan paket meeting HalfDay dilaksanakan dengan tidak efektif, jumlah peserta yang hadir lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang dibayarkan kepada Hotel/Pihak ketiga (Catatan rinci sebagaimana dalam rekap)
- b. Pelaksanaan belanja barang belum sepenuhnya mengedepankan/ mepertimbangkan prinsip efisiensi dengan kondisi: Pembelian barang berupa ATK dan Penggandaan dilakukan kepada beberapa toko/penyedia/rekanan sehingga terdapat perbedaan harga yang seharusnya bisa lebih ekonomis, serta masih terdapat penggandaan (FotoCopy) dengan jumlah eksemplar yang cukup banyak. (Rekap Terlampir)
- c. Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, antara lain:
  - 1) Belanja Pengadaan Penanganan dan Pencegahan Pandemi Covid-19 senilai Rp112.552.899,- (Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan) dibagikan kepada perwakilan MPD dari Jawa Timur. Selain itu bukti distribusi kepada perwakilan MPD tidak

- sepenuhnya meyakinkan bahwa distribusi yang diberikan kepada perwakilan MPD sudah sesuai dengan jumlah barang yang diadakan;
- 2) Pelaksanaan Belanja tidak sesuai dengan postur anggaran dan melebihi satuan harga yang terdapat dalam RKAKL.
- d. Penggunaan anggaran pada Divisi Pelayanan Hukum, Khususnya dalam hal ini DIPA Administrasi Hukum Umum berupa belanja Sewa Gudang untuk penyimpanan berkas fidusia (sisa berkas lama sampai dengan tahun 2014), belum sepenuhnya tepat sasaran dan mengedepankan efektifitas serta efisiensi anggaran: realisasi dan rincian berkas sebagaimana terlampir pada Laporan Hasil Audit.

Direkomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur melakukan Langkah-langkah sebagai berikut: (09)

- a. Menyusun kebijakan/ketentuan terkait perencanaan dan pelaksanaan anggaran/kegiatan direncanakan dan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien dan ekonomis
- b. Memerintahkan kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum untuk:
  - 1) Mempertimbangkan agar melakukan optimalisasi anggaran Tahun 2023 yang tersedia pada DIPA AHU untuk dialokasikan kepada alih media dan/atau digitalisasi terhadap arsip sertifikat jaminan fidusia, dan untuk penyusunan DIPA AHU Tahun 2024 mengutamakan anggaran untuk dialokasikan kepada alih media dan/atau digitalisasi terhadap arsip sertifikat jaminan fidusia;
  - 2) Pelaksanaan anggaran/belanja Helpdesk AHU, segera disusun ukuran dan standar yang jelas, sehingga pimpinan secara berjenjang kedepannya dapat melihat sejauh mana efektifitas/manfaat dari penggunaan anggaran untuk jasa Helpdesk;

Laporan tindakan korektif atas rekomendasi terhadap permasalahan yang masih perlu dilakukan tindak lanjut penanganan dan penertiban sudah diterima di Inspektorat Jenderal selambat-lambatnya tanggal 08 Mei 2023.

Demikian untuk menjadi periksa.



Inspektur Jenderal,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R A Z I L U', written over a horizontal line.

R A Z I L U  
NIP 196511281991031002

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Sekretaris Jenderal;

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
INSPEKTORAT JENDERAL**

**NOTA DINAS**

Nomor: ITJ.7-UM.01.01- 304

Yth. : Inspektur Jenderal  
Dari : Inspektur Wilayah VI  
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur TA. 2022 sampai dengan Februari 2023  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Tanggal : 31 Maret 2023

---

Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
  - d. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  - e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan berlakunya ketentuan Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor: KEP-005/AAIPI/DPN/2014 Tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Pedoman Telaahan Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
  - h. Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor ITJ.PW.02.01-121 tanggal 1 Maret 2023.
- i. Sehubungan dengan dengan rujukan tersebut, bersama ini dengan hormat disampaikan Hasil Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur TA. 2022 sampai dengan Februari 2023 dan konsep surat Juktib atas permasalahan yang ditemukan.

**A. Temuan Hasil Audit**

Berdasarkan hasil Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur TA. 2022 sampai dengan Februari 2023, terdapat temuan hasil audit sebagai berikut:

**1. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 Belum Sepenuhnya Dilakukan Dengan Akuntabel (1.04.01)**

Pada tahun 2022 pagu anggaran belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur berdasarkan RKA-K/L Revisi 13 Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp320.646.000,00. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran per tanggal 30 Desember 2022, penyerapan/realisasi anggaran belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar sebesar Rp 319.880.400,00. Dalam uji petik atas penyerapan tersebut masih ditemukan belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Bertingkat dan Gedung Kantor Tidak Bertingkat yang bukti pertanggungjawaban/pelaksanaannya belum akuntabel/tidak ada dengan rincian sebagaimana terlampir pada Laporan Hasil Audit.

**2. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, Lembur Pegawai dan Honorarium Panitia Dilakukan Tidak Sesuai Ketentuan Dan/Atau Melebihi Standar Yang Ditetapkan (1.04.01)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan, permintaan keterangan dan pengecekan berkas atas pengelolaan administrasi keuangan dan kelengkapannya, khususnya terkait dengan kegiatan perjalanan dinas, pembayaran lembur pegawai dan honorarium panitia pada lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, diketahui terdapat kondisi sebagai berikut:

**a. Perjalanan Dinas**

- 1) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2022 memiliki total Belanja Perjalanan Dinas Sebesar Rp.7.445.294.000,00 dan sampai dengan akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.6.871.595.449,00 (92%). Pada Tahun Anggaran 2023 memiliki total Belanja Perjalanan Dinas Sebesar Rp.8.877.989.000,00 dan sampai dengan saat pemeriksaan (Maret 2023) sudah terealisasi sebesar Rp.1.441.445.759,00 (13%).
- 2) Terdapat belanja / kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, antara lain sebagai berikut:
  - 1) Pembayaran transportasi darat perjalanan dinas tidak sesuai dengan ketentuan dikarenakan menggunakan skema sewa kendaraan roda 4;
  - 2) Terdapat pembayaran biaya / fee di luar tiket pesawat (asuransi, biaya pemilihan kursi) dan pembayaran taksi dari hotel menuju tempat kegiatan yang tidak dapat dibayarkan;
  - 3) Pembayaran transport lokal melebihi standar yang ditetapkan;
  - 4) Transport lokal dibayarkan kepada pegawai/pejabat yang menggunakan kendaraan dinas;
  - 5) Terdapat bukti perjalanan dinas berupa biaya penginapan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
  - 6) Terdapat pembayaran honorarium narasumber dan uang harian narasumber yang tidak sesuai ketentuan;

- 7) Terdapat perjalanan dinas yang terindikasi tidak dilaksanakan yaitu pelaksana perjalanan dinas melakukan rekam kehadiran pada pagi dan sore hari pelaksanaan perjalanan dinas.

**b. Honorarium Panitia Pelaksana Tim PORA**

Terdapat Kegiatan Operasi Gabungan Pengawasan Orang Asing pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang pada 14 – 15 September 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang dan terhadap 13 (tiga belas) panitia pelaksana diberikan pembayaran honorarium panitia. Berdasarkan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022, dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 orang. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran honorarium panitia untuk 9 (sembilan) orang sebesar Rp.2.580.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

**c. Lembur Pegawai**

- 1) Pada Tahun 2022, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur memiliki anggaran uang lembur pegawai sebesar Rp.133.672.000,00 dan sampai dengan akhir tahun 2022 telah direalisasikan sebesar Rp.88.708.000,00 (66,36%).
- 2) Berdasarkan pemeriksaan rekam kehadiran pada SIMPEG dan permintaan keterangan, diketahui bahwa terdapat pegawai yang melakukan lembur namun merekam kehadiran tidak sesuai dengan jumlah jam lembur dan tercatat Dinas Luar Full. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran uang lembur dan uang makan lembur sebesar Rp3.280.454,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah)

Rekapitulasi temuan *sampling* perjalanan dinas, pembayaran lembur pegawai dan honorarium panitia yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan secara rinci dan lengkap sebagaimana terlampir pada Laporan Hasil Audit.

**3. Pengelolaan Administrasi Pertanggungjawaban Belum Seluruhnya Dilakukan Secara Akuntabel/Sesuai Ketentuan (1.04.01)**

Secara umum, berdasarkan hasil audit dengan serangkaian pemeriksaan, permintaan keterangan dan pengecekan berkas atas pengelolaan administrasi keuangan dan kelengkapannya terhadap 9 (Sembilan) DIPA yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur masih ditemukan pengelolaan administrasi pertanggungjawaban yang belum seluruhnya akuntabel / sesuai dengan ketentuan. Hasil sampling terhadap berkas pertanggungjawaban atas realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 s.d. 2023 diketahui hal-hal dan kondisi sebagai berikut:

- a. Dokumen administrasi keuangan berupa Surat Perintah Bayar dan Kuitansi belum seluruhnya ditandatangani oleh an. Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan penerima uang muka kerja.
- b. Pelaksanaan administrasi keuangan yaitu berupa pertanggungjawaban keuangan belum seluruhnya didukung dengan data-data/berkas dan dokumentasi yang memadai, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembelian pulsa dan belanja barang non operasional pada Operasi Bidang Keamanan Divisi Imigrasi (5254.BHB) belum didukung data dukung yang memadai yaitu Surat Perintah, Laporan Kegiatan, Dokumentasi, Surat Perjalanan Dinas dan daftar penerima pulsa.
- 2) Honorarium narasumber dan moderator belum seluruhnya dilengkapi dengan data dukung berupa undangan, *jadwal kegiatan*, bahan materi narasumber, notula dan dokumentasi.
- 3) Pembayaran konsumsi rapat dan honorarium penceramah belum seluruhnya dilengkapi dengan data dukung berupa undangan, notula, daftar hadir, dan dokumentasi.
- 4) Pembelian Belanja Barang seperti banner, sewa LED dan Stage Event Kegiatan dan terdapat kegiatan pemeliharaan halaman yang belum dilengkapi dengan data dukung memadai yaitu dokumentasi kegiatan pemeliharaan halaman dan dokumentasi barang yang sudah diterima dari toko/penyedia.
- 5) Perjalanan dinas ditemukan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Terdapat pelaksanaan perjalanan dinas tidak sesuai dengan tanggal penugasan pada Surat Perintah;
  - 2) Perjalanan dinas belum seluruhnya didukung dengan data dukung yang memadai berupa:
    - 3) Surat Perintah
    - 4) Laporan Kegiatan
    - 5) Daftar Pengeluaran Ril dan Rincian Biaya Perjalanan Dinas ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas, dan bendahara
    - 6) Dokumen datang-tiba (SPD) belum diisi secara lengkap tanggal datang-tiba, lokasi datang-tiba dan pejabat yang mengesahkan.
    - 7) Tanda bukti kehadiran pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalam kota kurang dari 8 jam (untuk transport lokal).
    - 8) Terdapat dokumen datang-tiba (SPD) hasil pindai / scan;
    - 9) Bukti pembayaran taksi dan tol tidak sesuai / tidak akuntabel;
  - 6) Paket Kegiatan Rapat / Pertemuan di Luar Kantor (Fullboard, Fullday, Halfday) belum seluruhnya didukung dengan data dukung berupa confirmation letter, daftar kamar untuk kegiatan fullboard, jadwal kegiatan, laporan kegiatan dan daftar hadir belum per hari / per sesi.
- c. Proses pengadaan barang/jasa/belanja tidak sesuai ketentuan, antara lain sebagai berikut:
  - 10) Terdapat kegiatan fullday pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang hanya mengundang peserta internal tanpa melibatkan peserta dari kementerian negara/lembaga lainnya;
  - 10) Pelaksanaan kegiatan fullday dan halfday pada Divisi Imigrasi tidak sesuai dengan perencanaan yaitu jumlah paket meeting yang dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah peserta pada Surat Keputusan;
  - 10) Terdapat transport lokal yang dibayarkan diberikan kepada pejabat/pegawai yang melakukan kegiatan dalam kompleks perkantoran yang sama;
  - 10) Terdapat belanja barang non operasional lainnya pada Operasi Bidang Keamanan Divisi Imigrasi (5254.BHB) berupa konsumsi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

- d. Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan.
- e. Berdasarkan hasil pelaksanaan penutupan kas terhadap 9 DIPA ditemukan kondisi bahwa terdapat beberapa pertanggungjawaban uang persediaan yang sudah diberikan kepada pelaksana kegiatan, namun belum disertai dengan RAB yang rinci dan detail pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dan terdapat beberapa pertanggungjawaban kegiatan yang sudah lama diberikan namun belum dipertanggungjawabkan.
- f. Bukti pembelian ATK rutin belum dilakukan secara akuntabel (pihak ketiga/penyedia) pada saat pengantaran barang tidak disertai dengan surat jalan dan bukti pengoroman/serah terima secara rinci barang dan dokumentasi terhadap barang yang diantarkan

**4. Pelaksanaan Belanja Anggaran Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur belum sepenuhnya mengedepankan prinsip efektif, efisien dan ekonomis (3E) (3.03.03)**

Secara umum, berdasarkan hasil audit dengan serangkaian pemeriksaan, permintaan keterangan dan pengecekan berkas atas pengelolaan administrasi keuangan dan kelengkapannya terhadap 9 (Sembilan) DIPA yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur masih ditemukan pelaksanaan belanja anggaran aada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur yang belum mengedepankan prinsip efektif, efisien dan ekonomis (3E). Hasil sampling terhadap berkas pertanggungjawaban atas realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 s.d. 2023 diketahui hal-hal dan kondisi sebagai berikut:

- a. Pengadaan barang dan jasa melebihi kebutuhan  
Pengadaan paket meeting HalfDay dilaksanakan dengan tidak efektif, jumlah peserta yang hadir lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang dibayarkan kepada Hotel/Pihak ketiga (Catatan rinci sebagaimana dalam rekap)
- b. Pelaksanaan belanja barang belum sepenuhnya mengedepankan/mepertimbangkan prinsip efisiensi dengan kondisi: Pembelian barang berupa ATK dan Penggandaan dilakukan kepada beberapa toko/penyedia/rekanan sehingga terdapat perbedaan harga yang seharusnya bisa lebih ekonomis, serta masih terdapat penggandaan (FotoCopy) dengan jumlah eksemplar yang cukup banyak. (Rekap Terlampir)
- c. Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, antara lain:
  - 1) Belanja Pengadaan Penanganan dan Pencegahan Pandemi Covid-19 senilai Rp112.552.899,- (Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan) dibagikan kepada perwakilan MPD dari Jawa Timur. Selain itu bukti distribusi kepada perwakilan MPD tidak sepenuhnya meyakinkan bahwa distribusi yang diberikan kepada perwakilan MPD sudah sesuai dengan jumlah barang yang diadakan;
  - 2) Pelaksanaan Belanja tidak sesuai dengan postur anggaran dan melebihi satuan harga yang terdapat dalam RKAKL.



- d. Penggunaan anggaran belum sepenuhnya tepat sasaran dengan mengedepankan efektifitas dan efisiensi anggaran
  - 1) Pelaksanaan anggaran pada Divisi Pelayanan Hukum, Khususnya dalam hal ini DIPA Administrasi Hukum Umum terdapat belanja Sewa Gudang untuk penyimpanan berkas fidusia (sisa berkas lama sampai dengan tahun 2014), dengan realisasi dan rincian berkas sebagaimana terlampir pada Laporan Hasil Audit

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur ditemukan permasalahan yang perlu mendapat penanganan dan penertiban lebih lanjut, yaitu :

1. Kepala Wilayah Kemenkumham Jawa Timur memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen agar segera menarik kelebihan pembayaran atas pelaksanaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 sebanyak Rp. 5.850.000,00 untuk disetorkan ke Kas Negara. (01).
2. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur melakukan hal-hal sebagai berikut: (01)
  - a. Memerintahkan kepada Pejabat para pejabat dan pegawai yang terdapat kelebihan pembayaran baik berupa perjalanan dinas, honorarium, dan uang lembur dengan total nilai seluruhnya sebesar Rp. 41.434.415,00 agar segera disetorkan ke kas negara
  - b. Mengkomunikasikan secara tertulis kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim terkait dengan kondisi ini dan menyusun kebijakan/pedoman terkait dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagai acuan kedepannya.
3. Kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur melakukan Langkah-langkah sebagai berikut: (06)
  - a. Melengkapi/memperbaiki laporan kegiatan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi terhadap pengeluaran/belanja Tahun Anggaran 2022 s. Februari 2023;
  - b. Mengkomunikasikan secara tertulis kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim terkait dengan kondisi ini dan menyusun kebijakan/pedoman terkait dengan laporan kegiatan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi terhadap pengeluaran/belanja sebagai acuan kedepannya.
4. Kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur melakukan Langkah-langkah sebagai berikut: (09)
  - a. Menyusun kebijakan/ketentuan terkait perencanaan dan pelaksanaan dan anggaran/kegiatan direncanakan dan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien dan ekonomis
  - b. Memerintahkan kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum untuk:

- i. Mempertimbangkan agar melakukan optimalisasi anggaran Tahun 2023 yang tersedia pada DIPA AHU untuk dialokasikan kepada alih media dan/atau digitalisasi terhadap arsip sertifikat jaminan fidusia, dan untuk penyusunan DIPA AHU Tahun 2024 mengutamakan anggaran untuk dialokasikan kepada alih media dan/atau digitalisasi terhadap arsip sertifikat jaminan fidusia;
  - ii. Pelaksanaan anggaran/belanja Helpdesk AHU, segera disusun ukuran dan standar yang jelas, sehingga pimpinan secara berjenjang kedepannya dapat melihat sejauh mana efektifitas/manfaat dari penggunaan anggaran untuk jasa Helpdesk;
- II. Apabila Bapak Inspektur Jenderal sependapat dan tidak ada pertimbangan lain mohon perkenannya untuk menandatangani konsep surat terlampir.



Luluk Ratnaningtyas  
NIP 196310011991032001

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
INSPEKTORAT JENDERAL  
INSPEKTORAT WILAYAH VI**



**LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN  
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA  
TIMUR TA. 2022 SAMPAI DENGAN FEBRUARI 2023**

**NOMOR : ITJ.7.PW.03.01-33/III/2023**

**TANGGAL : 31 Maret 2023**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

**INSPEKTORAT JENDERAL**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X6, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Telp/Fax. 021-5252975, PO BOX 3489, SMS Gateway : 0817-000-3489

Website: <http://itjen.kemenkumham.go.id> email: [itjen@kemenkumham.go.id](mailto:itjen@kemenkumham.go.id)

---

Nomor : ITJ.7.PW.03.01-33/III/2023 31 Maret 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Laporan Hasil Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur TA. 2022 sampai dengan Februari 2023

Berdasarkan Surat Perintah Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor ITJ.PW.02.01-121 tanggal 1 Maret 2023, kami telah melakukan Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur TA. 2022 sampai dengan Februari 2023 yang dilaksanakan dari tanggal 2 Maret 2023 s.d 13 Maret 2023, dengan uraian hasil audit sebagai berikut:

**BAGIAN PERTAMA**  
**SIMPULAN HASIL AUDIT DAN REKOMENDASI**

**BAB I**  
**SIMPULAN HASIL AUDIT**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pada Pasal 48 ayat (2) berbunyi "*Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya*" sedangkan berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) menyebutkan "*Audit sebagaimana dimaksud antara lain terdiri atas audit kinerja; yaitu audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas azas kehematan, efisiensi, dan efektivitas*". Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya telah menyusun Laporan Keuangan Tahun 2019 dan disajikan berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 /PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Audit Pengelolaan Keuangan pada satuan kerja dilakukan bertujuan untuk menilai serta memberi keyakinan bahwa Pengelolaan Keuangan pada satuan kerja telah patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengelolaan Keuangan pada satuan kerja telah menerapkan prinsip-prinsip 3E (Efektif, Efisien, dan Ekonomis).

Dari hasil audit yang telah dilakukan terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor ITJ.PW.02.01-121 tanggal 1 Maret 2023 ditemukan bahwa :

1. Pengelolaan Keuangan pada satuan kerja belum sepenuhnya patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan;
2. Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja masih belum dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam PP No.60/2008 tentang SPIP;
3. Pengelolaan Keuangan pada satuan kerja belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip 3E (Efektif, Efisien, dan Ekonomis).

Hasil simpulan audit tersebut berdasarkan kondisi-kondisi yang masih ditemukan dan perlu diperhatikan untuk dilakukan perbaikan, antara lain sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 Belum Sepenuhnya Dilakukan Dengan Akuntabel (1.04.01)
2. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, Lembur Pegawai dan Honorarium Panitia Dilakukan Tidak Sesuai Ketentuan Dan/Atau Melebihi Standar Yang Ditetapkan (1.04.01)
3. Pengelolaan Administrasi Pertanggungjawaban Belum Seluruhnya Dilakukan Secara Akuntabel/Sesuai Ketentuan (1.04.01)
4. Pelaksanaan Belanja Anggaran Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur belum sepenuhnya mengedepankan prinsip efektif, efisien dan ekonomis (3E) (3.03.03)

## **BAB II REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur ditemukan permasalahan yang perlu mendapat penanganan dan penertiban lebih lanjut, yaitu :

1. Kepala Wilayah Kemenkumham Jawa Timur memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen agar segera menarik kelebihan pembayaran atas pelaksanaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 sebanyak Rp. 5.850.000,00 untuk disetorkan ke Kas Negara. (01)
2. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur melakukan hal-hal sebagai berikut: (01)
  - a. Memerintahkan kepada Pejabat para pejabat dan pegawai yang terdapat kelebihan pembayaran baik berupa perjalanan dinas, honorarium, dan uang lembur dengan total nilai seluruhnya sebesar Rp. 41.434.415,00 agar segera disetorkan ke kas negara
  - b. Mengkomunikasikan secara tertulis kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim terkait dengan kondisi ini dan menyusun kebijakan/pedoman terkait dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagai acuan kedepannya.
3. Kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur melakukan Langkah-langkah sebagai berikut: (06)
  - a. Melengkapi/memperbaiki laporan kegiatan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi terhadap pengeluaran/belanja Tahun Anggaran 2022 s. Februari 2023;
  - b. Mengkomunikasikan secara tertulis kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim terkait dengan kondisi ini dan menyusun kebijakan/pedoman terkait dengan laporan kegiatan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi terhadap pengeluaran/belanja sebagai acuan kedepannya.
4. Kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur melakukan Langkah-langkah sebagai berikut: (09)
  - a. Menyusun kebijakan/ketentuan terkait perencanaan dan pelaksanaan dan anggaran/kegiatan direncanakan dan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien dan ekonomis
  - b. Memerintahkan kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum untuk:
    - i. Mempertimbangkan agar melakukan optimalisasi anggaran Tahun 2023 yang tersedia pada DIPA AHU untuk dialokasikan kepada alih media dan/atau digitalisasi terhadap arsip sertifikat jaminan fidusia, dan untuk penyusunan DIPA AHU Tahun 2024 mengutamakan anggaran untuk dialokasikan kepada alih media dan/atau digitalisasi terhadap arsip sertifikat jaminan fidusia;
    - ii. Pelaksanaan anggaran/belanja Helpdesk AHU, segera disusun ukuran dan standar yang jelas, sehingga pimpinan secara berjenjang kedepannya dapat melihat sejauh mana efektifitas/manfaat dari penggunaan anggaran untuk jasa Helpdesk;

## **BAGIAN KEDUA URAIAN HASIL AUDIT**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1. Dasar Hukum Pelaksanaan Audit**

Pelaksanaan Audit Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI didasarkan atas:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- d. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan berlakunya ketentuan Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor: KEP-005/AAIPI/DPN/2014 Tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Pedoman Telaahan Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
- h. Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor ITJ.PW.02.01-121 tanggal 1 Maret 2023.

#### **2. Tujuan Audit**

Tujuan Audit Pengelolaan Keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa:

- a. Pengelolaan Keuangan pada satuan kerja telah patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan;
- b. Pengelolaan Keuangan pada satuan kerja telah menerapkan prinsip-prinsip 3E (Efektif, Efisien, dan Ekonomis).

#### **3. Ruang Lingkup Audit**

Ruang lingkup Audit Pengelolaan Keuangan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi atas:

- a. Pelaksanaan belanja yang diatur dalam mekanisme APBN;
- b. Pengenaan tarif pajak/PNBP oleh Bendahara;
- c. Kesesuaian dalam pembebanan mata anggaran;
- d. Penatausahaan Administrasi Keuangan.

#### **4. Standar Audit**

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang berlakunya Standar Audit Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) sesuai Keputusan Nomor KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia Tanggal 24 April 2014.

#### **5. Metode Audit**

- a. Pengumpulan data;
- b. Penetapan jumlah bukti yang akan diuji untuk mendukung masalah yang akan diungkapkan;
- c. Penggunaan teknik sampling, wawancara, analisis, pengujian dokumen dan konfirmasi, serta pengecekan dilapangan;
- d. Perbandingan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### **6. Tanggung Jawab**

Auditor bertanggung jawab terhadap simpulan hasil audit yang disajikan dalam Laporan Hasil Audit yang didasarkan pada analisis data, catatan, dan wawancara. Kebenaran atas data-data yang disajikan pihak Auditan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Auditan.

#### **7. Waktu Pelaksanaan Audit Pengelolaan Keuangan**

Audit dilaksanakan selama 19 (sembilan belas) hari dengan rincian:

- a. Persiapan 2 (dua) hari kerja;
- b. Pelaksanaan 12 (dua belas) hari audit, tanggal 2 sampai dengan 13 Maret 2023;
- c. Pelaporan 5 (lima) hari kerja.

#### **8. Susunan Tim**

Penanggung Jawab : Inspektur Wilayah VI  
Pengendali Teknis : Hari Purwanto  
Ketua Tim : Vito Adriano Wismar  
Anggota : Ade Rizke Putri Wibowo, Desy Arista Prapitasari, Vania Reghina Irsya, Ratih Manggarsari



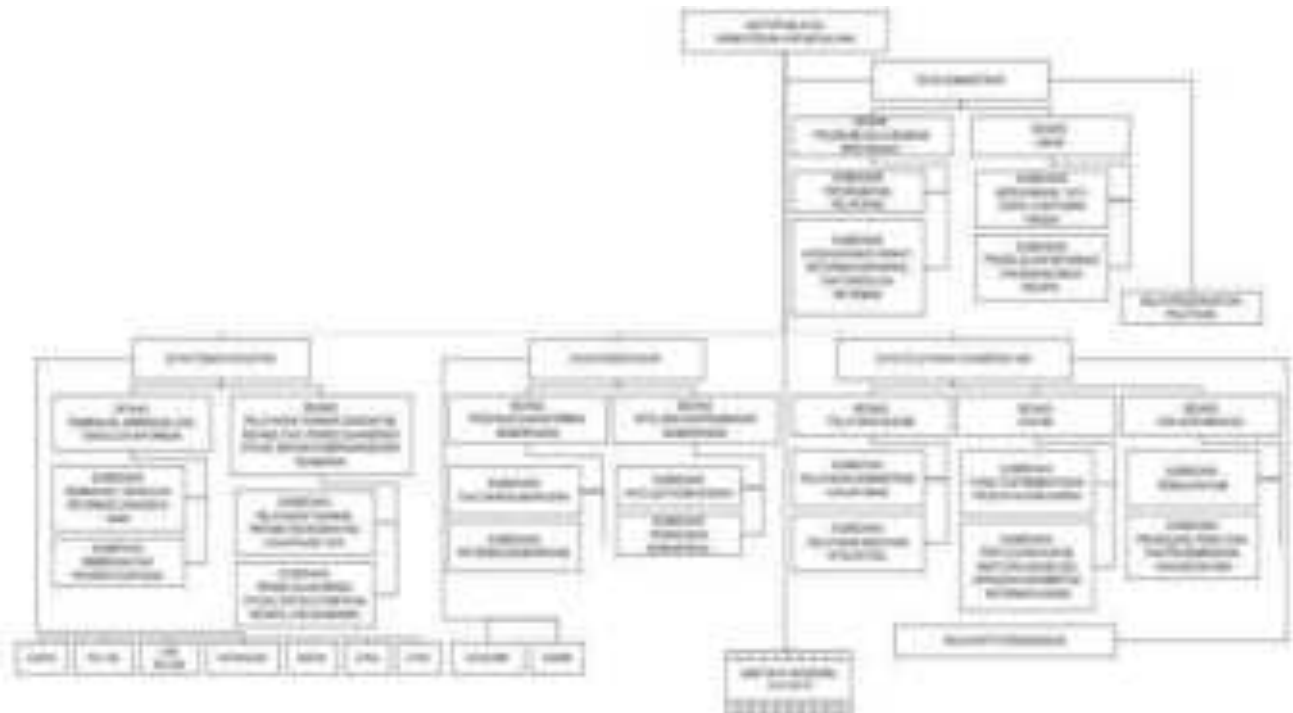
## BAB II GAMBARAN UMUM

### A. Gambaran Umum Satuan Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat;
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.



## B. Data Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2022 dan 2023

### 1. Pengelola Keuangan

Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Timur Nomor: W.15-224.KU.02.03 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Timur Nomor: W.15-120.KU.03.03 tahun 2022 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur tahun Anggaran 2022, Pengelola Keuangan Kanwil Jawa Timur yaitu:

No	Nama / NIP / Jabatan	Jabatan Dalam Pengelolaan Keuangan Satker
1	ZAEROJI, S.Sos., M.H NIP. 196211011985031002 Kepala Kantor Wilayah	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
2	TEGUH WIBOWO, Bc.IP., S.H., M.Si NIP. 196504061990011001 Kepala Divisi Pemasarakatan atas beban DIPA DITJEN PAS	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3	HENDRO TRI PRASETYO, S.H NIP. 196611241986031001 Kepala Divisi Keimigrasian atas beban DIPA DITJEN IMIGRASI	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
4	Dr. SUBIANTA MANDALA, S.H., LL.M NIP. 196308021991031001 Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM atas beban DIPA DITJEN AHU, DITJEN HAM, DITJEN KI, DITJEN PP, BPHN, dan BALITBANG	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
5	WIDYO SANDHI SUPRAPTO, A.Md.Im., S.E., M.M. NIP. 198307102002121002 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama atas beban DIPA SETJEN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
6	INDAH RAHAYUNINGSIH, S.H., M.H. NIP. 196410221988032001 Kepala Divisi Administrasi	Pejabat Yang Diberi Kewenangan Menandatangani SPM/Penguji Spp
7	BAGUS WAHYU JATMIKO, S.H NIP. 198510062005011001 JFU Bendahara Pengeluaran Satker beban DIPA 408751 SETJEN	Bendahara Pengeluaran
7	MUHAMMAD RENDI OKTAVIANTO, S.A NIP. 198810302019011001 JFU Bendahara Pengeluaran Satker atas beban DIPA 408759 BPHN	Bendahara Pengeluaran
7	OLGA CERIA SARI, S.Kom NIP. 198502012009122004 JFU Bendahara Pengeluaran Satker atas beban DIPA 408755 DITJEN IMIGRASI, 408758 DITJEN HAM & 408760 BALITBANG HAM	Bendahara Pengeluaran
7	AULIA REZY FANY, S.E NIP. 199406222019012001 JFU Bendahara Pengeluaran Satker atas beban DIPA 408753 DITJEN AHU & 408756 DITJEN KI	Bendahara Pengeluaran

7	CITRA AWANIS GH AISANI, S.Ak. NIP. 199607272019012002 Penata Keuangan atas beban DIPA 408754 DITJEN PAS & 408757DITJEN PP	Bendahara Pengeluaran
8	MUHAMMAD RENDI OKTAVIANTO, S.A NIP. 198810302019011001 JFU Bendahara Pengeluaran Satker	Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai
7	RATRI POERNOMOSARI NIP. 197405031994032001 JFU Bendahara Penerimaan Satker	Bendahara Penerimaan
7	AULIA ANANDA PERTIWI, S.E NIP. 199703132020122001 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama atas beban DIPA 408751 SETJEN	Staf Pengelola Keuangan
8	SANDY PRATOMO, S.Ak. NIP. 199410072020121001 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama atas beban DIPA 408759 BPHN	Staf Pengelola Keuangan
9	FRIDA KARINA PUTRI, S.E NIP. 199509222020122003 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama atas beban DIPA 408753 DITJEN AHU & 408756 DITJEN KI	Staf Pengelola Keuangan
9	AYU SETYO RINI, S.E. NIP. 199204202020122001 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama atas beban DIPA 408754 DITJEN PAS & 408757 DITJEN PP	Staf Pengelola Keuangan

Tahun 2023 berdasarkan KEPUTUSAN Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Timur Nomor: W.15-10.KU.02.01 tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, Pengelola Keuangan Kanwil Jawa Timur yaitu:

No	Nama / NIP / Jabatan	Jabatan Dalam Pengelolaan Keuangan Satker
1	Drs. IMAM JAUHARI, M.H. NIP 196308231992031001 Kepala Kantor Wilayah	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
2	WIDYO SANDHI SUPRAPTO, A.Md.Im., S.E., M.M NIP. 198307102002121002 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas DIPA 408751	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3	AYU SETYO RINI, S.E. NIP. 199204202020122001 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas DIPA Ditjen Administrasi Hukum Umum dan Ditjen Kekayaan Intelektual	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

4	FRIDA KARINA PUTRI, S.E NIP. 199509222020122003 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas DIPA Ditjen Pemasarakatan dan Ditjen Peraturan Perundang-Undangan	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
5	MERNA AGUSTIKA, S.E. NIP. 198708222020122001 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas DIPA Ditjen Imigrasi	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
5	SANDY PRATOMO, S.Ak. NIP. 199410072020121001 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas DIPA Ditjen Kekayaan Intelektual & Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
5	DIAN ARIE SANDI, S.E NIP. 199311032020122001 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
6	SAEFUR ROCHIM, S.H., M.H. NIP. 197504021998031001	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
7	MUHAMMAD RENDI OKTAVIANTO, S.A NIP. 198810302019011001	Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)
7	MUHAMMAD RENDI OKTAVIANTO, S.A NIP. 198810302019011001 Bendahara Pengeluaran Satker beban DIPA 408751 SETJEN	Bendahara Pengeluaran
7	OLGA CERIA SARI, S.Kom NIP. 198502012009122004 Bendahara Pengeluaran Satker atas DIPA 408753 Ditjen Administrasi Hukum Umum & 408756 Ditjen Kekayaan Intelektual	Bendahara Pengeluaran
7	AULIA REZY FANY, S.E NIP. 199406222019012001 Bendahara Pengeluaran Satker atas DIPA 408754 Ditjen Pemasarakatan, 408758 Ditjen Hak Asasi Manusia, & 408760 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Bendahara Pengeluaran
7	BAGUS WAHYU JATMIKO, S.H NIP. 198510062005011001 Bendahara Pengeluaran Satker atas DIPA 408755 Ditjen Imigrasi & 408757 Ditjen Peraturan Perundang-Undangan	Bendahara Pengeluaran
8	NOVITA ARDIYANTI, S.A NIP. 199511062020122001 Bendahara Pengeluaran Satker atas DIPA 408759 Badan Pembinaan Hukum Nasional	Bendahara Pengeluaran

## 2. Penerimaan Negara

### A. Penerimaan Negara dari Pajak

Pada tahun anggaran 2022 (1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022) Kanwil Kemenkumham Jawa Timur:

#### 1. Penerimaan PPN total sebesar Rp 68.033.403,00

- Satker 408760 Rp 270.000
- Satker 408759 Rp 3.089.294
- Satker 408758 Rp 1.315.381
- Satker 408757 Rp 1.027.273
- Satker 408756 Rp 15.097.131
- Satker 408755 Rp 1.561.154
- Satker 408754 Rp 3.641.893
- Satker 408753 Rp 6.163.916
- Satker 408751 Rp 35.867.361

#### 2. PPh 21 total sebesar Rp 38.343.526,00

- Satker 408760 Rp 630.000
- Satker 408759 Rp 1.100.000
- Satker 408758 Rp 3.240.000
- Satker 408757 Rp 1.350.000
- Satker 408756 Rp 3.480.000
- Satker 408755 Rp 8.066.026
- Satker 408754 Rp 1.160.000
- Satker 408753 Rp 14.815.000
- Satker 408751 Rp 4.502.500

#### 3. PPh 22 total sebesar Rp 11.233.662,00

- Satker 408760 Rp 000
- Satker 408759 Rp 123.410
- Satker 408758 Rp 182.470
- Satker 408757 Rp 113.182
- Satker 408756 Rp 441.892
- Satker 408755 Rp 579.464
- Satker 408754 Rp 1.082.791
- Satker 408753 Rp 543.837
- Satker 408751 Rp 8.166.616

Pada tahun anggaran berjalan 2023 (1 Januari 2023 s.d 28 Februari 2023)

1. penerimaan PPN total sebesar Rp 000,00

Satker 408760 Rp 000

Satker 408759 Rp 000

Satker 408758 Rp 000

Satker 408757 Rp 000

Satker 408756 Rp 000

Satker 408755 Rp 000

Satker 408754 Rp 000

Satker 408753 Rp 000

Satker 408751 Rp 000

2. PPh 21 total sebesar Rp 1.805.000,00

Satker 408760 Rp 000

Satker 408759 Rp 000

Satker 408758 Rp 000

Satker 408757 Rp 000

Satker 408756 Rp 000

Satker 408755 Rp 000

Satker 408754 Rp 000

Satker 408753 Rp 000

Satker 408751 Rp 1.805.000

3. PPh 22 total sebesar Rp 000,00

Satker 408760 Rp 000

Satker 408759 Rp 000

Satker 408758 Rp 000

Satker 408757 Rp 000

Satker 408756 Rp 000

Satker 408755 Rp 000

Satker 408754 Rp 000

Satker 408753 Rp 000

Satker 408751 Rp 000

Seluruh penerimaan negara dari pajak sudah disetorkan ke Kas Negara.

## B. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 38.553.223,- sedangkan PNBP selama Tahun Anggaran 2023 1 Januari 2023 s/d 28 Februari 2023 sebesar Rp 9.536.396,- dan seluruh penerimaan negara tersebut sudah disetor ke Kas Negara.

### Anggaran dan Realisasi

#### Tahun Anggaran 2022

Kanwil Kemenkumham Jawa Timur terdapat 9 DIPA dengan rincian sebagai berikut:

1. DIPA Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-013.01.2.408751/2022
2. DIPA Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-013.03.2.408753/2022
3. DIPA Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-013.05.2.408754/2022
4. DIPA Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-013.06.2.408755/2022
5. DIPA Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-013.07.2.408756/2022
6. DIPA Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-013.08.2.408757/2022
7. DIPA Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-013.09.2.408758/2022
8. DIPA Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-013.10.2.408759/2022
9. DIPA Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-013.11.2.408760/2022

Berdasarkan kompilasi dari 9 DIPA tersebut, total anggaran sebesar Rp35.361.647.000,00 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sudah terealisasi sebesar Rp 34.649.604.554,- atau 97,99%.

#### Tahun Anggaran 2023

Kanwil Kemenkumham Jawa Timur terdapat 9 DIPA dengan rincian sebagai berikut:

1. DIPA Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-013.01.2.408751/2023
2. DIPA Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-013.03.2.408753/2023
3. DIPA Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-013.05.2.408754/2023
4. DIPA Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-013.06.2.408755/2023
5. DIPA Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-013.07.2.408756/2023
6. DIPA Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-013.08.2.408757/2023
7. DIPA Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-013.09.2.408758/2023
8. DIPA Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-013.10.2.408759/2023
9. DIPA Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-013.11.2.408760/2023

Berdasarkan kompilasi dari 9 DIPA tersebut, total anggaran sebesar Rp40.356.365.000,- dan sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 sudah terealisasi sebesar Rp 4.543.059.412,- atau 11,26%.

## A. Aspek Sarana dan Prasarana

1. Telah tersedia dan terpasang peralatan komputer dan aplikasi SIMAK BMN dan sudah dioperasikan.
2. Kendaraan Operasional  
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsional tersedia:
  - a. 2 Unit Kendaraan roda 4 Dengan Status Dinas Jabatan berupa BMN
  - b. 8 Unit Kendaraan roda 4 Dengan Status Dinas Operasional berupa BMN
  - c. 1 Unit Kendaraan roda 4 Dengan Status Dinas Operasional Berupa BMN sedang dipinjam pakaikan ke Lapas Arjasa

- d. 10 Unit Kendaraan roda 2 berupa BMN
- e. 10 Unit Kendaraan roda 4 Merupakan sewa

### **3. Aset Tetap**

Tanah dan bangunan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dengan luas tanah 42.343 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 9.950 m<sup>2</sup>.

Untuk mendukung kedinasan tersedia Rumah Dinas yang dapat dipergunakan sebanyak:

- a. 3 Unit Ruman Negara Golongan I Tipe A Darurat
- b. 2 Unit Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
- c. 12 Unit Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen

### **4. Persediaan**

Telah dilakukan opname fisik terhadap barang persediaan dan dilaporkan dalam laporan persediaan. Laporan Opname Fisik Persediaan dilakukan setiap akhir Semester I dan Semester II. Opname Fisik dilakukan dengan mencocokkan data Persediaan dengan kondisi persediaan yang ada di gudang.



## B. Informasi Lainnya

### 1. Temuan dan Rekomendasi Inspektorat Jenderal

1	Kanwil Kemenku mham Jawa Timur	Surat Inspektur Jenderal Nomor ITJ.PW.03.01.V-35 tanggal 29 Juli 2022 hal Petunjuk dan Penertiban Hasil Evaluasi Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat terkait Layanan Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Tahun 2022	4	-	Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Nomor W15- PW.04.03-71 Tanggal 09 Agustus 2022 hal Petunjuk dan Penertiban Hasil Evaluasi Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat terkait Layanan Kekayaan Intelektual	4	-	Proses Tindak Lanjut
---	--	---	---	---	--	---	---	-------------------------

2	Kanwil Kementeri an Hukum dan HAM Jawa Timur	Surat Inspektur Jenderal Nomor ITJ.PW.03.01.VI-77 Tanggal 05 Desember 2022 Hal Petunjuk Penanganan dan Penertiban Hasil Pemeriksaan Khusus terkait adanya demo di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur oleh Aliansi Madura Indonesia (AMI) pada tanggal 4,8 dan 9 November 2022	4	-	Proses Tindak Lanjut	4	-	Proses Tindak Lanjut
---	---	---	---	---	-------------------------	---	---	-------------------------

## 2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Sampai dengan bulan Maret Tahun 2023, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur telah melakukan tindak lanjut berupa pengembalian Belanja Barang atas Penyelenggaraan Help Desk Layanan AHU TA 2022 sebesar Rp 1.750.200,00

### BAB III HASIL AUDIT

#### A. TEMUAN HASIL AUDIT

##### 1. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 Belum Sepenuhnya Dilakukan Dengan Akuntabel (1.04.01)

Pada tahun 2022 pagu anggaran belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur berdasarkan RKA-K/L Revisi 13 Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 320.646.000,00. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran per tanggal 30 Desember 2022, penyerapan/realisasi anggaran belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp 319.880.400,00. Dalam nilai penyerapan tersebut secara sampling telah dilakukan pengecekan dokumen dan lapangan serta permintaan keterangan terhadap beberapa kegiatan pemeliharaan. Hasil pengecekan masih ditemukan belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Bertingkat dan Gedung Kantor Tidak Bertingkat yang bukti pertanggungjawaban/pelaksanaannya belum akuntabel/tidak ada, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor SPK/Nomor or kuitansi	Tanggal Kuitansi/SPK	Uraian Kuitansi/SPK	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	W.15-PB.02.01-354	10 Mei 2022	Pengadaan Langsung Pemeliharaan Gedung Kantor Bertingkat pada Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur TA 2022	Uitzet/ Pengukuran	Ls	1	350.000	350.000
2	408751.56.LS.NK.07/2022	25 November 2022	Pemeliharaan Gedung Kantor Bertingkat Divisi Pelayanan Hukum pada Kanwil Jtim TA 2022	Uitzet/ Pengukuran	Ls	1	500.000	500.000
3				Peralatan dan Sarana Kerja/K3	Ls	1	1.000.000	1.000.000
4	408751.105.LS.NK.07/2022	10 November 2022	Pemeliharaan Gedung Kantor Bertingkat Divisi Administrasi pada Kanwil Jatim TA 2022	Uitzet/ Pengukuran	Ls	1	500.000	500.000
5				Peralatan dan Sarana Kerja/K3	Ls	1	900.000	900.000
6				Mobilisasi Tenaga Kerja	Ls	1	1.000.000	1.000.000
7	408751.61.LS.NK.07/2022	28 Juli 2022	Pemeliharaan Gedung Kantor Tidak Bertingkat pada Kanwil Jatim TA 2022	Uitzet/ Pengukuran	Ls	1	450.000	450.000
8	408751.82.LS.NK.09/2022	28 Juli 2022	Pemeliharaan Gedung Kantor Tidak Bertingkat pada Kanwil Jatim TA 2022	Uitzet/ Pengukuran	Ls	1	400.000	400.000
9				Mobilisasi Tenaga Kerja	Ls	1	750.000	750.000
Total								5.850.000

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
  - a. Pasal 78 ayat (3)
    - Huruf d yang menyatakan bahwa dalam hal penyedia melakukan kesalahan perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
    - Huruf e yang menyatakan bahwa dalam hal penyedia menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit;
  - b. Pasal 78 ayat (4) yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan sebagaimana pada ayat (3), penyedia dapat dikenai sanksi administratif berupa ganti kerugian.
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/ jasa yang akan diserahkan
3. Pasal 14 ayat 1 huruf d,e, dan f PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan:

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf h, PPK menguji:

  - c. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/ kontrak dengan barang/ jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa.
  - d. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum Pada dokumen serah terima barang/ jasa yang dengan dokumen perjanjian/ Kontrak.
  - e. Kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara

Kondisi tersebut disebabkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen tidak teliti dan cermat dalam pelaksanaan pembayaran dan serah terima hasil pekerjaan.

Hal tersebut mengakibatkan Adanya kelebihan pembayaran terhadap CV. HIMALAYA atas pekerjaan pemeliharaan Gedung dan bangunan sebanyak Rp.5.850.000,00 (Lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Atas permasalahan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur menanggapi bahwa :

Terhadap pelaksanaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 yang belum sepenuhnya dilakukan dengan akuntabel khususnya dalam penghitungan pekerjaan teknis pelaksanaan oleh penyedia yang terindikasi ada kelebihan pembayaran terhadap CV. Himalaya yang belum dapat dibuktikan sebanyak Rp. 5.850.000,00 (Lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) bersedia untuk menyetorkan ke Kas Negara.

## **Rekomendasi**

Direkomendasikan kepada Kepala Wilayah Kemenkumham Jawa Timur memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen agar segera menarik kelebihan pembayaran atas pelaksanaan **Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 sebanyak Rp. 5.850.000,00** untuk disetorkan ke Kas Negara. (01)

## **2. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, Lembur Pegawai dan Honorarium Panitia Dilakukan Tidak Sesuai Ketentuan Dan/Atau Melebihi Standar Yang Ditetapkan (1.01.04)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan, permintaan keterangan dan pengecekan berkas atas pengelolaan administrasi keuangan dan kelengkapannya, khususnya terkait dengan kegiatan perjalanan dinas, pembayaran lembur pegawai dan honorarium panitia pada lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, diketahui terdapat kondisi sebagai berikut:

### **A. Perjalanan Dinas**

- 1) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2022 memiliki total Belanja Perjalanan Dinas Sebesar Rp.7.445.294.000,00 dan sampai dengan akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.6.871.595.449,00 (92%). Pada Tahun Anggaran 2023 memiliki total Belanja Perjalanan Dinas Sebesar Rp.8.877.989.000,00 dan sampai dengan saat pemeriksaan (Maret 2023) sudah terealisasi sebesar Rp.1.441.445.759,00 (13%).
- 2) Terdapat belanja / kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, antara lain sebagai berikut:
  - a) Pembayaran transportasi darat perjalanan dinas tidak sesuai dengan ketentuan dikarenakan menggunakan skema sewa kendaraan roda 4;
  - b) Terdapat pembayaran biaya / *fee* di luar tiket pesawat (asuransi, biaya pemilihan kursi) dan pembayaran taksi dari hotel menuju tempat kegiatan yang tidak dapat dibayarkan;
  - c) Pembayaran transport lokal melebihi standar yang ditetapkan;
  - d) Transport lokal dibayarkan kepada pegawai/pejabat yang menggunakan kendaraan dinas;
  - e) Terdapat bukti perjalanan dinas berupa biaya penginapan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
  - f) Terdapat pembayaran honorarium narasumber dan uang harian narasumber yang tidak sesuai ketentuan;
  - g) Terdapat perjalanan dinas yang terindikasi tidak dilaksanakan yaitu pelaksana perjalanan dinas melakukan rekam kehadiran pada pagi dan sore hari pelaksanaan perjalanan dinas.

### **B. Honorarium Panitia Pelaksana Tim PORA**

Terdapat Kegiatan Operasi Gabungan Pengawasan Orang Asing pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang pada 14 – 15 September 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang dan terhadap 13 (tiga belas) panitia pelaksana diberikan pembayaran honorarium panitia. Berdasarkan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022, dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 orang. **Sehingga terdapat kelebihan pembayaran honorarium panitia untuk 9 (sembilan) orang sebesar Rp.2.580.000,00**

### C Lembur Pegawai

1. Pada Tahun 2022, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur memiliki anggaran uang lembur pegawai sebesar Rp.133.672.000,00 dan sampai dengan akhir tahun 2022 telah direalisasikan sebesar Rp.88.708.000,00 (66,36%).
2. Berdasarkan pemeriksaan rekam kehadiran pada SIMPEG dan permintaan keterangan, diketahui bahwa terdapat pegawai yang melakukan lembur namun merekam kehadiran tidak sesuai dengan jumlah jam lembur dan tercatat Dinas Luar Full. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran uang lembur dan uang makan lembur sebesar Rp3.280.454,00

Rekapitulasi temuan *sampling* perjalanan dinas, pembayaran lembur pegawai dan honorarium panitia yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan secara rinci dan lengkap sebagaimana terlampir.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 Ayat (1) bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 54 ayat (2) menetapkan bahwa “.....Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya...”;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Pasal 1 Huruf 1 dan 6 Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satker Pengelola APBN serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 yang menyebutkan:
  - a. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.
  - b. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara / pelabuhan / terminal / stasiun keberangkatan atau dari bandara / Pelabuhan / terminal / stasiun kedatangan menuju termpat tujuan di kota bandara/ pelabuhan/terminal/ stasiun kedatangan dan sebaliknya.
  - c. Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI/pihak lain dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota PP yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas.

7. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satker Pengelola APBN serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

**Kondisi tersebut disebabkan:**

1. Pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang oleh KPA dan PPK dalam pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan, khususnya perjalanan dinas belum sepenuhnya optimal;
2. Bendahara pengeluaran belum sepenuhnya menjalankan tanggungjawab dan wewenangnya terkait penatausahaan pertanggungjawaban Keuangan Negara;
3. Para Pelaksana kegiatan/anggaran dalam melakukan perjalanan dinas belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Hal tersebut mengakibatkan:**

1. Anggaran perjalanan dinas belum sepenuhnya dilakukan dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien dan ekonomis;
2. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp35.573.961,00
3. Kelebihan pembayaran honorarium panitia pelaksanaan Tim PORA sebesar Rp.2.580.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
4. Kelebihan pembayaran uang lembur pegawai sebesar Rp3.280.454,00

Atas permasalahan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur menanggapi bahwa :

**1. Perjaianan Dinas Transport Darat menggunakan skema sewa kendaraan roda 4 dapat dijelaskan sebagai berikut:**

Pada Divisi Administrasi yang ditemukan adanya sewa mobil karena biaya transport yang dikeluarkan untuk perjaianan dinas dipertanggungjawabkan secara riil untuk pembayaran sewa mobil perjaianan dinas. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan karena kondisi banyaknya kebutuhan akan kendaraan dinas operasional untuk menunjang pelaksanaan tugas yang tidak diimbangi dengan kecukupan ketersediaan kendaraan yang layak pakai. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut maka biaya transport per orang dilakukan untuk membayar sewa kendaraan yang riil cost yang tidak melebihi SBM sehingga secara perhitungan lebih efektif dan efisien untuk dilaksanakan. **Selanjutnya akan menjadi koreksi dan perbaikan di kemudian hari. Atas temuan sebesar Rp2.970.268,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)** kami bersedia menyetorkan ke Kas Negara.

Pada Divisi Pemasarakatan yang ditemukan adanya sewa mobil dapat disampaikan bahwa pembayaran transport darat perjaianan dinas dengan sewa kendaraan lebih menghemat Keuangan Negara dan tidak melebihi SBM. Dari 12 temuan Inspektorat Jenderal yang senilai Rp.10.082.860,- Hanya 1 (satu) yang pembayarannya melebihi SBM dengan selisih **senilai Rp83.833,00 (Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)**. Atas perhitungan kami tersebut maka Divisi Pemasarakatan sanggup mengembalikan kelebihan bayar yang melebihi SBM sebesar Rp83.833,00



- Pada Divisi Pelayanan Hukum **DIPA HAM** yang ditemukan adanya sewa mobil dapat disampaikan bahwa pembayaran transportasi darat perjalanan dinas dengan sewa kendaraan pada Bidang HAM lebih menghemat keuangan negara dengan kata lain tidak melebihi SBM sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut tidak merugikan keuangan negara. **Namun Atas temuan sebesar Rp760.000,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) kami bersedia menyetorkan ke Kas Negara.**
2. Terhadap pembayaran biaya/fee di luar tiket pesawat (asuransi, biaya pemilihan kursi) pada **DIPA BPHN sebesar Rp. 189.200,00** kelebihan pembayaran taksi dari hotel menuju tempat kegiatan yang tidak dapat dibayarkan pada **DIPA Setjen sebesar Rp446.000,00** kelebihan pembayaran **transport rapat pada DIPA KI sebesar Rp150.000,00** dan kelebihan pembayaran transport darat **pada DIPA AHU sebesar Rp159.000,00** maka akan menjadi koreksi dan perbaikan di kemudian hari. Selanjutnya untuk temuan tersebut kami bersedia untuk melakukan penyetoran pengembalian ke kas negara.
  3. Terhadap transport lokal yang melebihi standar yang ditetapkan yang ditemukan pada **DIPA Imigrasi sebesar Rp530.000,00** akan dilakukan pengembalian ke Kas Negara
  4. Terhadap transport lokal yang dibayarkan kepada pejabat atau pegawai pemegang SK Pengguna Kendaraan Dinas yang ditemukan pada **DIPA KI sebesar Rp1.650.000,00** dan pada **DIPA Imigrasi sebesar Rp. 2.720.000,00** adalah murni kealpaan karena ketidaktahuan PPK dan Bendahara Pengeluaran terhadap siapa saja pejabat atau pegawai yang memegang SK Pengguna Kendaraan Dinas dan akan menjadi koreksi serta perbaikan di kemudian hari. Selanjutnya untuk temuan tersebut kami bersedia untuk melakukan penyetoran pengembalian ke Kas Negara.
  5. Terhadap bukti perjalanan dinas berupa biaya penginapan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada **DIPA AHU sebesar Rp4.066.633,00** dan pada **DIPA Imigrasi sebesar Rp1.600.000,00** maka kami bersedia melakukan penyetoran pengembalian ke Kas Negara.
  6. Terhadap pembayaran honorarium narasumber dan uang harian narasumber yang tidak sesuai ketentuan dimana uang harian narasumber dibayarkan bersamaan dengan honor narasumber yang ditemukan pada **DIPA AHU sebesar Rp.820.000,00** akan menjadi koreksi dan perbaikan kami di kemudian hari. Selanjutnya untuk temuan tersebut kami bersedia untuk melakukan penyetoran pengembalian ke Kas Negara.
  7. Terhadap perjalanan dinas yang terindikasi tidak dilaksanakan dimana pelaksana perjalanan dinas melakukan rekam kehadiran pada pagi dan sore hari yang ditemukan pada **DIPA Pemasyarakatan sebesar Rp820.000,00** **DIPA Setjen Rp.2.460.000,00** **DIPA AHU Rp5.330.000,00** dan **DIPA KI Rp820.000,00** Hal ini dapat dijelaskan bahwa pelaksana perjalanan dinas baru menerima perintah tugas pada sore hari dan langsung melaksanakan tugas pada hari yang sama dan tidak melakukan konfirmasi ke petugas absensi karena beranggapan bahwa data SIMPEG dan data Absensi sudah terintegrasi. Selanjutnya untuk temuan tersebut kami bersedia untuk melakukan penyetoran pengembalian ke kas negara.
  8. Terhadap pembayaran honor panitia yang jumlah panitianya melebihi 10% dari jumlah peserta yang ditemukan pada **DIPA Imigrasi sebesar Rp2.580.000,00** merupakan kelapaan dari PPK dan Bendahara Pengeluaran. Selanjutnya untuk temuan tersebut kami bersedia untuk melakukan penyetoran pengembalian ke kas negara.

9. Terhadap Lembur Pegawai yang tidak sesuai dengan rekam kehadiran pegawai dimana pegawai tersebut sedang melaksanakan Dinas Luar Full dan Cuti maka kami bersedia melakukan pengembalian kelebihan **pembayaran lembur sebesar Rp. 3.280.454,00** sebagaimana daftar terlampir

**Direkomendasikan**

Kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur melakukan hal-hal sebagai berikut: (01)

1. Memerintahkan kepada Pejabat para pejabat dan pegawai yang terdapat kelebihan pembayaran baik berupa perjalanan dinas, honorarium, dan uang lembur dengan total nilai seluruhnya sebesar Rp. 41.434.415,00 agar segera disetorkan ke kas negara
2. Mengkomunikasikan secara tertulis kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim terkait dengan kondisi ini dan menyusun kebijakan/pedoman terkait dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagai acuan kedepannya.

### 3. Pengelolaan Administrasi Pertanggungjawaban Belum Seluruhnya Dilakukan Secara Akuntabel/Sesuai Ketentuan (1.04.01)

Secara umum, berdasarkan hasil audit dengan serangkaian pemeriksaan, permintaan keterangan dan pengecekan berkas atas pengelolaan administrasi keuangan dan kelengkapannya terhadap 9 (Sembilan) DIPA yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur masih ditemukan pengelolaan administrasi pertanggungjawaban yang belum seluruhnya akuntabel / sesuai dengan ketentuan. Hasil sampling terhadap berkas pertanggungjawaban atas realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 s.d. 2023 diketahui hal-hal dan kondisi sebagai berikut:

- 1) Dokumen administrasi keuangan berupa Surat Perintah Bayar dan Kuitansi belum seluruhnya ditandatangani oleh an. Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan penerima uang muka kerja.
- 2) Pelaksanaan administrasi keuangan yaitu berupa pertanggungjawaban keuangan belum seluruhnya didukung dengan data-data/berkas dan dokumentasi yang memadai, antara lain sebagai berikut:
- 3) Pembelian pulsa dan belanja barang non operasional pada Operasi Bidang Keamanan Divisi Imigrasi (5254.BHB) belum didukung data dukung yang memadai yaitu Surat Perintah, Laporan Kegiatan, Dokumentasi, Surat Perjalanan Dinas dan daftar penerima pulsa.
- 4) Honorarium narasumber dan moderator belum seluruhnya dilengkapi dengan data dukung berupa undangan, *jadwal kegiatan*, bahan materi narasumber, notula dan dokumentasi.
- 5) Pembayaran konsumsi rapat dan honorarium penceramah belum seluruhnya dilengkapi dengan data dukung berupa undangan, notula, daftar hadir, dan dokumentasi.
- 6) Pembelian Belanja Barang seperti banner, sewa LED dan Stage Event Kegiatan dan terdapat kegiatan pemeliharaan halaman yang belum dilengkapi dengan data dukung memadai yaitu dokumentasi kegiatan pemeliharaan halaman dan dokumentasi barang yang sudah diterima dari toko/penyedia.
- 7) Perjalanan dinas ditemukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Terdapat pelaksanaan perjalanan dinas tidak sesuai dengan tanggal penugasan pada Surat Perintah;
  - b. Perjalanan dinas belum seluruhnya didukung dengan data dukung yang memadai berupa:
    - 1) Surat Perintah
    - 2) Laporan Kegiatan
    - 3) Daftar Pengeluaran Ril dan Rincian Biaya Perjalanan Dinas ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas, dan bendahara
    - 4) Dokumen datang-tiba (SPD) belum diisi secara lengkap tanggal datang-tiba, lokasi datang-tiba dan pejabat yang mengesahkan.
    - 5) Tanda bukti kehadiran pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalam kota kurang dari 8 jam (untuk transport lokal).
    - 6) Terdapat dokumen datang-tiba (SPD) hasil pindai / *scan*;
    - 7) Bukti pembayaran taksi dan tol tidak sesuai / tidak akuntabel;
- 8) Paket Kegiatan Rapat / Pertemuan di Luar Kantor (*Fullboard, Fullday, Halfday*) belum seluruhnya didukung dengan data dukung berupa *confirmation letter*, daftar kamar untuk kegiatan *fullboard*, jadwal kegiatan, laporan kegiatan dan daftar hadir belum per hari / per sesi.

- 9) Proses pengadaan barang/jasa/belanja tidak sesuai ketentuan, antara lain sebagai berikut:
  - a. Terdapat kegiatan fullday pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang hanya mengundang peserta internal tanpa melibatkan peserta dari kementerian negara/lembaga lainnya;
  - b. Pelaksanaan kegiatan fullday dan halfday pada Divisi Imigrasi tidak sesuai dengan perencanaan yaitu jumlah paket meeting yang dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah peserta pada Surat Keputusan;
  - c. Terdapat transport lokal yang dibayarkan diberikan kepada pejabat/pegawai yang melakukan kegiatan dalam kompleks perkantoran yang sama;
  - d. Terdapat belanja barang non operasional lainnya pada Operasi Bidang Keamanan Divisi Imigrasi (5254.BHB) berupa konsumsi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- 10) Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan.
- 11) Berdasarkan hasil pelaksanaan penutupan kas terhadap 9 DIPA ditemukan kondisi bahwa terdapat beberapa pertanggungjawaban uang persediaan yang sudah diberikan kepada pelaksana kegiatan, namun belum disertai dengan RAB yang rinci dan detail pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dan terdapat beberapa pertanggungjawaban kegiatan yang sudah lama diberikan namun belum dipertanggungjawabkan.
- 12) Bukti pembelian ATK rutin belum dilakukan secara akuntabel (pihak ketiga/penyedia) pada saat pengantaran barang tidak disertai dengan surat jalan dan bukti pengoroman/serah terima secara rinci barang dan dokumentasi terhadap barang yang diantarkan

**Kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 Ayat (1) bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 54 ayat (2) menetapkan bahwa "Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaany";
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Pasal 1 Huruf 1 dan 6 Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satker Pengelola APBN serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satker Pengelola APBN serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

Kondisi tersebut disebabkan

1. Pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang oleh KPA dan PPK dalam pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan, belum sepenuhnya optimal;
2. Bendahara pengeluaran belum sepenuhnya menjalankan tanggungjawab dan wewenangnya terkait penatausahaan pertanggungjawaban Keuangan Negara;
3. Para Pelaksana kegiatan/anggaran dalam membuat bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut mengakibatkan

1. Pengelolaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan secara administrasi belum seluruhnya akuntabel dan sesuai ketentuan/belum memadai.
2. Terdapat belanja yang tidak sepenuhnya dapat diyakinkan diadakan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan (peluang terjadinya penyimpangan).

Atas permasalahan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur menanggapi bahwa :

Terhadap Pengelolaan Administrasi Pertanggungjawaban yang Belum Seluruhnya Dilakukan Secara Akuntabel/Sesuai Ketentuan dapat dijelaskan bahwa semua kegiatan telah dilakukan secara riil namun kami akui masih terdapat kelemahan terhadap kelengkapan bukti pertanggungjawaban. Hal ini antara lain disebabkan karena pengelola keuangan dalam hal ini PPK dan Bendahara Pengeluaran memiliki batas waktu yang harus dipenuhi dalam Revolving Anggaran dan batas waktu Penyelesaian Pembayaran Tagihan yang sangat berpengaruh pada penilaian IKPA sehingga dokumen pertanggungjawaban yang belum sepenuhnya lengkap terpaksa diterima dengan catatan bahwa pelaksana kegiatan segera melengkapinya namun pada kenyataannya bukti pertanggungjawaban itu belum sepenuhnya dilengkapi hingga berakhirnya masa tahun anggaran berjalan. Selanjutnya akan menjadi koreksi dan perbaikan di kemudian hari agar lebih memperhatikan ketentuan terhadap kelengkapan bukti pertanggungjawaban.

#### **Direkomendasikan**

Kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur melakukan Langkah-langkah sebagai berikut: (06)

1. Melengkapi/memperbaiki laporan kegiatan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi terhadap pengeluaran/belanja Tahun Anggaran 2022 s. Februari 2023;
2. Mengkomunikasikan secara tertulis kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim terkait dengan kondisi ini dan menyusun kebijakan/pedoman terkait dengan laporan kegiatan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi terhadap pengeluaran/belanja sebagai acuan kedepannya.

#### **4. Pelaksanaan Belanja Anggaran Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur belum sepenuhnya mengedepankan prinsip efektif, efisien dan ekonomis (3E) (3.03.03)**

Secara umum, berdasarkan hasil audit dengan serangkaian pemeriksaan, permintaan keterangan dan pengecekan berkas atas pengelolaan administrasi keuangan dan kelengkapannya terhadap 9 (Sembilan) DIPA yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur masih ditemukan pelaksanaan belanja anggaran aada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur yang belum mengedepankan prinsip efektif, efisien dan ekonomis (3E). Hasil sampling terhadap berkas pertanggungjawaban atas

realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 s.d. 2023 diketahui hal-hal dan kondisi sebagai berikut:

1. Pengadaan barang dan jasa melebihi kebutuhan
2. Pengadaan paket meeting HalfDay dilaksanakan dengan tidak efektif, jumlah peserta yang hadir lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang dibayarkan kepada Hotel/Pihak ketiga (Catatan rinci sebagaimana dalam rekap)
3. Pelaksanaan belanja barang belum sepenuhnya mengedepankan/mepertimbangkan prinsip efisiensi dengan kondisi: Pembelian barang berupa ATK dan Penggandaan dilakukan kepada beberapa toko/penyedia/rekanan sehingga terdapat perbedaan harga yang seharusnya bisa lebih ekonomis, serta masih terdapat penggandaan (FotoCopy) dengan jumlah eksemplar yang cukup banyak. (Rekap Terlampir)
4. Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, antara lain:
  - 1 Belanja Pengadaan Penanganan dan Pencegahan Pandemi Covid-19 senilai Rp112.552.899,- (Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan) dibagikan kepada perwakilan MPD dari Jawa Timur. Selain itu bukti distribusi kepada perwakilan MPD tidak sepenuhnya meyakinkan bahwa distribusi yang diberikan kepada perwakilan MPD sudah sesuai dengan jumlah barang yang diadakan;
  - 2 Pelaksanaan Belanja tidak sesuai dengan postur anggaran dan melebihi satuan harga yang terdapat dalam RKAKL
- 5 Penggunaan anggaran belum sepenuhnya tepat sasaran dengan mengedepankan efektifitas dan efisiensi anggaran sebagai berikut:
  - 1) **Pelaksanaan anggaran pada Divisi Pelayanan Hukum, Khususnya dalam hal ini DIPA Administrasi Hukum Umum terdapat belanja Sewa Gudang untuk penyimpanan berkas fidusia (sisa berkas lama sampai dengan tahun 2014), dengan realisasi dan rincian berkas sebagai berikut:**

Matriks Realisasi Anggaran

No	Kegiatan	Harga Satuan (Rp)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	Penyimpanan Box Standar Uk 216 TA 2021	3.600	4.500	160.390.000	12 Bulan (Jan – Des)
2	Penyimpanan Box Standar Uk 216 TA 2022	3.600	3.996	143.712.144	12 Bulan (Jan – Des)
3	Penyimpanan Box Standar Uk 216 TA 2022	3.600	3.996	31.928.000	2 Bulan (Jan – Feb)

**Matriks Jumlah Arsip Sertifikat Jaminan Fidusia Kantor Wilayah Jawa Timur**

(Arsip yang tersimpan di gudang Indoarsip)

No.	Arsip Fidusia (Dalam Tahun)	yang sudah Dilaksanakan		
		Alih Media (-)	Digitalisasi (+)	Pemusnahan (+)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tahun 2018	263.405		
			26.950	-
2.	Tahun 2019		14.629	-
3.	Tahun 2020		-	-

4.	Tahun 2021		16.403	41.584
5.	Tahun 2022	221.821	22.848	-
6.	Tahun 2023		-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>221.821</b>	<b>80.830</b>	<b>41.584</b>

Pelaksanaan anggaran alih media dan digitalisasi pada tahun 2022 dengan menggunakan anggaran sebesar Rp98.620.690,- dengan rincian kegiatan:

1. Scan sertifikat fidusia sebanyak 12.530
2. Entry data fidusia perberkas sebanyak 213.010
3. Upload sertifikat fidusia sebanyak 12.530

Berdasarkan kondisi-kondisi keterangan dan 2 matriks diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Divisi Pelayanan Hukum masih memiliki arsip/berkas lama fidusia (yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan berkas sudah dapat dihapuskan setelah dilakukan digitalisasi/alih media)
2. Belanja sewa gudang untuk penyimpanan berkas sudah dilakukan sejak Tahun 2018. Berdasarkan data yang didapatkan, selama periode tahun anggaran 2021, 2022 dan s.d. Maret 2023 untuk kegiatan/belanja sewa Gudang sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp335.400.144,00
3. Realisasi pembayaran atau belanja pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan atau penghematan biaya sebesar Rp16.677.856,00 Penghematan atau penurunan realisasi belanja sewa Gudang tersebut terjadi karena jumlah box yang disimpan terjadi penurunan karena berkas sudah dilakukan pemusnahan di Tahun 2021 terhadap berkas yang sudah dilakukan alih media/digitalisasi
4. Sampai dengan saat ini masih terdapat berkas/arsip yang belum dilakukan digitalisasi dan diusulkan penghapusannya, sehingga masih harus disediakan anggaran sewa Gudang.

**2) Divisi pelayanan hukum terdapat anggaran Jasa Penyelenggaran HelpDesk Layanan AHU pada tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:**

- a. Pembayaran Bulan Januari dan Februari 2022 sebesar Rp22.543.536,00
- b. Pembayaran Bulan Maret s.d. Desember 2022 sebesar Rp122.177.682,00 Sehingga total pembayaran jasa Helked TA 2022 sebesar Rp144.721.218,00
- c. Rincian biaya sebesar tersebut adalah untuk personal tenaga sebanyak 2 orang per harinya yang standby pada Loker Pelayanan AHU
- d. Berdasarkan permintaan keterangan lebih lanjut dan dokumen untuk mengukur kinerja dari Jasa Helpdesk AHU, diketahui:
  - 1) Data jumlah pemakai dari loket pelayanan AHU selama 1 Minggu (5 hari kerja) periode 27 Februari s.d. 3 Maret 2023 adalah sebanyak 37 orang, atau dengan rata-rata perhari sebanyak 7.4 orang. Sehingga rata rata jumlah yang ditangani oleh masing-masing tenaga HelpDesk hanya sebesar 3.7 orang perhari
  - 2) Belum terdapat dokumen atau uraian yang jelas dan spesifik atas tugas dan tanggung jawab dari helpdesk, namun berdasarkan permintaan keterangan langsung kepada helpdesk, tidak seluruh tugas dan fungsi dari layanan AHU secara umum diketahui dan dikuasai oleh Helpdesk.
  - 3) Belum terdapat dokumen yang dapat mendukung secara meyakinkan terkait hal-hal yang dilakukan oleh masing-masing helpdesk kepada para pengguna loket AHU

- 4) Belum ada pengaturan servis terkait dengan performa atau kehadiran dari jasa Helpdesk: Izin dan Sakit berdasarkan bukti kehadiran tidak berdampak terhadap remunerasi helpdesk (Bukti kehadiran juga masih secara manual)

Semua kondisi diatas dan khususnya angka 2 dan 3 menunjukkan penggunaan anggaran dibandingkan dengan kinerja tidak terdapat ukuran dan standar yang jelas, sehingga pimpinan tidak dapat melihat sejauh mana efektifitas/manfaat dari penggunaan anggaran untuk jasa Helpdesk ini.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 Ayat (1) bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 54 ayat (2) menetapkan bahwa "Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya";
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satker Pengelola APBN serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

Kondisi tersebut disebabkan:

1. Pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang oleh KPA dan PPK dalam pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan, belum sepenuhnya mengedepankan prinsip 3E;
2. Para Pelaksana kegiatan/anggaran dalam membuat rencana kegiatan tidak mengedepankan prinsip 3E.

Hal tersebut mengakibatkan:

1. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan belum seluruhnya direncanakan dengan mengedepankan prinsip 3E.
2. Efisiensi, efektifitas dan ekonomis dari belanja barang/sewa seharusnya dapat lebih ditingkatkan
3. Khusus untuk Helpdesk AHU, tidak terdapat ukuran dan standar yang jelas, sehingga pimpinan tidak dapat melihat sejauh mana efektifitas/manfaat dari penggunaan anggaran untuk jasa Helpdesk.

Atas permasalahan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur menanggapi bahwa :

- 1) Terhadap pengadaan barang dan jasa melebihi kebutuhan dimana pengadaan paket meeting Halfday dilaksanakan dengan tidak efektif, jumlah peserta yang hadir lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang dibayarkan kepada hotel/pihak ketiga akan menjadi koreksi dan perbaikan bagi kami dikemudian hari.
- 2) Terhadap belanja barang yang belum sepenuhnya mengedepankan/mempertimbangkan prinsip efisiensi dengan kondisi adanya pembelian barang berupa ATK dan Penggandaan yang dilakukan ke beberapa toko/penyedia/rekanan sehingga terdapat perbedaan harga yang seharusnya lebih



ekonomis. Hal tersebut terjadi karena kami menghindari potensi timbulnya kecurigaan terjadinya persekongkolan atau monopoli ke salah satu penyedia.

**3) Terhadap pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, antara lain :**

- 1) Belanja Pengadaan Penanganan dan Pencegahan Pandemi Covid-19 pada DIPA AHU sebesar Rp. 112.552.899,00 (Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) yang dibagikan kepada perwakilan MPD Jawa Timur yang tidak sepenuhnya meyakinkan antara barang yang diberikan kepada perwakilan MPD dengan jumlah barang yang diadakan dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut murni kealpaan dari PPK dalam meminta pelaksana kegiatan untuk melengkapi dokumen pertanggungjawaban.
- 2) Terhadap pelaksanaan belanja tidak sesuai dengan postur anggaran dan melebihi satuan harga yang terdapat dalam RKAKL dapat kami sampaikan bahwa belanja barang telah dilakukan sesuai kebutuhan riil kegiatan namun tetap tidak melebihi pagu anggaran pada akun belanja yang digunakan. Selanjutnya akan menjadi koreksi dan perbaikan di kemudian hari.

**4) Terhadap penggunaan anggaran yang belum sepenuhnya tepat sasaran dengan mengedepankan efektifitas dan efisiensi anggaran yaitu:**

1. Belanja Sewa Gudang untuk penyimpanan berkas pada Divisi Pelayanan Hukum DIPA AHU dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa untuk mengurangi biaya sewa gudang kami telah melakukan alih media dan digitalisasi arsip Fidusia terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 yang akan direncanakan di bulan Maret 2023. Tahapan berikutnya setelah dilakukan alih media dan/atau digitalisasi terhadap arsip sertifikat jaminan fidusia tersebut adalah melakukan penghapusan atau pemusnahan terhadap arsip tersebut sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, sehingga dengan demikian biaya sewa gudang untuk penyimpanan arsip Fidusia secara bertahap dapat berkurang (semakin efisien).
2. Terhadap anggaran jasa penyelenggaraan HelpDesk Layanan AHU Tahun Anggaran 2022 dapat kami jelaskan bahwa kebutuhan tenaga helpdesk dalam kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan Sub Bidang Pelayanan AHU merupakan sebuah keniscayaan. Jumlah pengunjung yang datang pada loket layanan AHU di ruang layanan terpadu Kanwil Kemenkumham Jatim dapat menjadi indikator untuk mengukur tingkat kinerja helpdesk. 2 (dua) orang tenaga helpdesk yang telah ada saat ini sungguh sangat membantu dalam pelaksanaan tugas Sub Bidang Pelayanan AHU, baik dalam tugas administratif ataupun dalam tugas pelayanan publik. Ketidakseimbangan jumlah SDM (staf ASN) yang terdapat pada Sub Bidang Pelayanan AHU (karena staf yang ada juga seringkali melaksanakan tugas lain selain tugas, misalnya: sebagai pejabat pengadaan, tim verifikasi ZI/WBK/WBBM untuk 63 UPT, Pokja WBBM, dll) dibanding dengan beban kerja substansi, kegiatan, penyusunan laporan dan tarja AHU, menjadikan peran mereka sangat berguna dalam praktik. Namun memang diperlukan identifikasi dan uraian yang jelas dan spesifik mengenai tugas dan tanggung jawab helpdesk, program peningkatan pengetahuan dan pemahaman helpdesk yang berkesinambungan, serta laporan kinerja harian yang jelas dan terukur sebagai alat kontrol user terhadap kinerja mereka yang ke depannya nanti akan menjadi koreksi dan perbaikan bagi kami.

Direkomendasikan

Kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur melakukan Langkah-langkah sebagai berikut: (09)

1. Menyusun kebijakan/ketentuan terkait perencanaan dan pelaksanaan dan anggaran/kegiatan direncanakan dan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien dan ekonomis
2. Memerintahkan kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum untuk:
  - a. Mempertimbangkan agar melakukan optimalisasi anggaran Tahun 2023 yang tersedia pada DIPA AHU untuk dialokasikan kepada alih media dan/atau digitalisasi terhadap arsip sertifikat jaminan fidusia, dan untuk penyusunan DIPA AHU Tahun 2024 mengutamakan anggaran untuk dialokasikan kepada alih media dan/atau digitalisasi terhadap arsip sertifikat jaminan fidusia;
  - b. Pelaksanaan anggaran/belanja Helpdesk AHU, segera disusun ukuran dan standar yang jelas, sehingga pimpinan secara berjenjang kedepannya dapat melihat sejauh mana efektifitas/manfaat dari penggunaan anggaran untuk jasa Helpdesk;

Demikian laporan kami untuk perkenan Bapak Inspektur Jenderal maklum.



Inspektur Wilayah VI,



Luluk Ratnaningtyas  
NIP 196310011991032001



### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820230315504560  
Tanggal Billing : 15-03-2023 15:09:19  
Tanggal Kedaluwarsa : 22-03-2023 15:09:19  
Tanggal Bayar : 15-03-2023 15:15:44  
Bank/Pos/*Fintech* Bayar : BANK NEGARA INDONESIA  
*Channel* Bayar : *Internet Banking*  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerima  
Kementerian/Lembaga : **013** - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Eselon I : **10** - Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Satuan Kerja : **408759** - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA  
Total Disetor : 189.200 (IDR)  
Terbilang : *Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus (IDR)*  
Status : Sudah Dibayar  
**NTB** : **000000229669**  
**NTPN** : **4D71B0N9VR09DSTG**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu  
Kode Akun : 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu  
Jumlah Setoran : 189.200 (IDR)  
Keterangan : Penerimaan Kembali Biaya Perjalanan Dinas TA 2022

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 15/03/23 15:15:44	NTB	: 000000229669
Tanggal Buku	: 16/03/23	NTPN	: 4D71B0N9VR09DSTG
Kode Cabang Bank	: 0996	STAN	: 657615

Data Setoran :

Kode Billing	: 820230315504560		
Nama Wajib Bayar	: BENDAHARA PENERIMA		
Kementerian/Lembaga	: 013		
Unit Eselon I	: 10		
Satuan Kerja	: 408759		
Jumlah Setoran	: 189,200.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah		

This is a computer generated message and requires no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

The absence of NTPN number means that the transaction is being processed. Please visit the nearest branch to get your NTPN number and re-print the receipt.  
Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses. Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
**INSPEKTORAT JENDERAL**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Kuningan,  
Jakarta Selatan 12940, P.O. Box 3489, Telepon/Faksimili 021-5252975  
Laman: <http://www.itjen.kemenkumham.go.id>, Email: [itjen@kemenkumham.go.id](mailto:itjen@kemenkumham.go.id)

---

---

Nomor : ITJ-PW.03.01-171 5 Juni 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas laporan  
Sifat : Penting  
Hal : Petunjuk Penanganan dan Penertiban Audit  
Kinerja atas Pengelolaan Keuangan pada  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan  
HAM Lampung Tahun Anggaran 2022  
sampai dengan Februari 2023

Yth. Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Lampung  
Di –  
Lampung

Merujuk Surat Perintah Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: ITJ.KP.04.01-459 tanggal 3 Maret 2023, Tim Inspektorat Jenderal telah melakukan Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Februari 2023 yang dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari, mulai tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan 21 Maret 2023 dengan uraian hasil audit sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Nomor: ITJ.7-PW.03.01-76/V/2023 tanggal 30 Mei 2023. Berdasarkan hasil audit, ditemukan permasalahan yang memerlukan penanganan dan penertiban sebagai berikut:

**1. Terdapat pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa (524111) yang tidak didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban yang memadai sebesar Rp.229.439.950.**

Audit Kinerja Atas Pengelolaan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2022 sd Februari 2023 dilaksanakan untuk menilai apakah pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, aspek efektif, aspek efisien dan aspek ekonomis (3E). Audit dilaksanakan pada 9 (Sembilan) DIPA yang dikelola oleh Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Imigrasi dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

Berdasarkan hasil pengecekan dokumen pertanggungjawaban Belanja Barang atas Perjalanan Dinas (Akun 524111) yang disajikan oleh Bendahara Pengeluaran pada 9 DIPA yang dikelola pada Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Imigrasi dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, terdapat pembayaran atas perjalanan dinas pejabat dan pegawai yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai sebagaimana ditetapkan dalam Dalam Kepmenkumham M.HH-12.KU.04.01 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kemenkumham dan Kepmenkumham Nomor: M.HH-03.KU.02.01 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya

Transportasi Darat, Laut, atau Udara di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Penggunaan Komponen Biaya Transport Darat antar kota/kabupaten pada perjalanan dinas lebih dari 8 jam tidak dilaksanakan dengan *at cost* karena tidak menggunakan bukti pertanggungjawaban, sebagai berikut :
  - 1) Terdapat Pejabat Pimpti Pratama (Kepala Divisi dan Kepala Kanwil (TA 2022 dan 2023) yang memiliki Kendaraan Dinas Jabatan namun mengajukan Transport Darat Antar Kabupaten/Kota;
  - 2) Terdapat Pejabat Struktural Eselon III yang memiliki Kendaraan Dinas Jabatan namun mengajukan Transport Darat Antar Kabupaten/Kota;
  - 3) Terdapat Pegawai yang mengajukan Transpor Darat Antar Kabupaten/Kota namun tidak melampirkan Bukti At Cost sebagai bukti pertanggungjawaban. Transport Darat Antar Kabupaten/Kota dipertanggungjawabkan sebagai BUKTI PENGELUARAN RIIL berupa Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya.
- b. Penggunaan Komponen Biaya Transport Darat antar Provinsi pada perjalanan dinas lebih dari 8 jam tidak dilaksanakan dengan *at cost* karena tidak menggunakan bukti pertanggungjawaban, penjelasan sebagai berikut :
  - 1) Terdapat pejabat dan pegawai yang mengajukan Sewa Kendaraan namun Tidak Melampirkan Bukti STNK atas nama dari Vendor yang menerbitkan Jasa Sewa Kendaraan tersebut dan Bukti Foto Kendaraan dengan menunjukkan Plat Mobil.
  - 2) Pengajuan Transpor Darat dengan sewa kendaraan masih dilakukan selama masa Perjalanan Dinas bukan pada saat Keberangkatan dan Saat Kepulangan.
  - 3) Terdapat pegawai yang mengajukan biaya transpot di lokasi tujuan selama masa perjalanan dinas yang tidak sah karena kebutuhan Transpor Lokal di lokasi tujuan selama perjalanan dinas merupakan bagian dari Komponen Uang Harian.
- c. Penggunaan Komponen Biaya Penginapan tidak didukung dengan Bukti Kuitansi Hotel yang sesuai dengan Rate Biaya Kamar Tertinggi yang diterbitkan oleh Hotel tersebut, sebagai berikut:
  - Berdasarkan bukti rekaman percakapan dengan pihak Hotel Srikandi diketahui bahwa nilai Kamar VIP di hotel tersebut paling mahal adalah sebesar Rp.300.000, namun terdapat pengajuan Komponen Penginapan dengan biaya Rp.1.140.000 dan Rp.580.000 per malam.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas maka terdapat pembayaran atas perjalanan dinas biasa pejabat dan pegawai (akun 524111) yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai atas pada pada 9 DIPA yang dikelola pada Divisi Administrasi, Divisi Pemasarakatan, Divisi Imigrasi dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM sebesar **Rp.229.439.950.**, dengan rincian sebagai berikut: *(rincian rekap terlampir)*

NO	URAIAN DIPA	JUMLAH PENGEMBALIAN KE KAS NEGARA	KETERANGAN
1	DIPA SEKJEN	68.360.000	Divisi Administrasi
2	DIPA DITJEN PAS	69.850.000	Divisi Pemasarakatan
3	DIPA DITJEN IMIGRASI	4.685.000	Divisi Imigrasi
4	DIPA DITJEN AHU	37.100.808	Divisi Pemasarakatan <b>Rp.86.544.950</b>
5	DIPA DITJEN KI	14.895.860	
6	DIPA DITJEN PP	13.275.022	
7	DIPA DITJEN HAM	4.220.000	

NO	URAIAN DIPA	JUMLAH PENGEMBALIAN KE KAS NEGARA	KETERANGAN
8	DIPA BPHN	16.453.260	
9	DIPA BALITBANG HUKUM DAN HAM	600.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>229.439.950</b>	

Terhadap kondisi tersebut diatas, Tim telah melakukan wawancara dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu, PPK dan Pelaksana Kegiatan pada Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Imigrasi dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dengan hasil sebagai berikut:

- a. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu telah menyampaikan kepada pelaksana kegiatan pada masing-masing Divisi bahwa penggunaan Transport Darat harus mengajukan berdasarkan bukti At Cost namun pelaksanaan teknis pada masing-masing Divisi menyatakan bahwa dalam Lampiran PMK Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap disebutkan Transpor Lokal dan Penginapan merupakan bagian yang dapat dimasukkan ke dalam Bukti Pengeluaran Riil Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut disepakati bersama bahwa Transport Darat antar kota/kabupaten tidak perlu dipertanggungjawabkan dengan At Cost.
- b. Bahwa pejabat atau pegawai di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung ketika melakukan perjalanan dinas luar kota atas undangan Unit Eselon I Pembina melakukan pertanggungjawaban Transpor Darat dengan At Cost, namun ketika melakukan perjalanan dinas di dalam Provinsi Lampung tidak menerapkan pertanggungjawaban Transport Darat secara At Cost.
- c. Dalam dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas, setiap pegawai dan pejabat telah menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sehingga dapat diyakini bahwa setiap pegawai dan pejabat sudah memahami bahwa masing-masing pegawai/pejabat bertanggungjawab secara pribadi terhadap akuntabilitas perjalanan dinas yang dilakukan apabila terdapat temuan dari hasil Pemeriksaan Internal maupun Eksternal.

Terjadinya permasalahan tersebut antara lain disebabkan:

- a. Pelaksana Teknis pada Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Imigrasi dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menafsirkan pertanggungjawaban Transport Darat berdasarkan Lampiran PMK Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap disebutkan Transpor Lokal dan Penginapan merupakan bagian yang dapat dimasukkan ke dalam Bukti Pengeluaran Riil Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan.
- b. Pejabat atau Pegawai di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung ketika melakukan perjalanan dinas luar kota atas undangan Unit Eselon I Pembina melakukan pertanggungjawaban Transpor Darat dengan At Cost, namun ketika melakukan perjalanan dinas di dalam Provinsi Lampung tidak menerapkan pertanggungjawaban Transport Darat secara At Cost.
- c. Pejabat atau Pegawai di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung sudah mengetahui adanya Kepmenkumham M.HH-12.KU.04.01 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan

Kemenkumham dan Kepmenkumham Nomor: M.HH-03.KU.02.01 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Transportasi Darat, Laut, atau Udara di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM namun tidak ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran.

**Direkomendasikan** kepada Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung selaku KPA agar segera memerintahkan segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Segera menerbitkan kebijakan internal di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung perihal penerapan Kepmenkumham M.HH-12.KU.04.01 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kemenkumham dan Kepmenkumham Nomor: M.HH-03.KU.02.01 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Transportasi Darat, Laut, atau Udara di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung serta melakukan sosialisasi terkait kebijakan tersebut pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung dan melaporkan hasilnya kepada Inspektorat Jenderal.
- b. Menerbitkan surat penagihan kepada pegawai di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung yang tercatat sebagai pelaksana perjalanan dinas yang tidak dapat menunjukkan bukti At Cost atas Komponen Transpor Darat dan Komponen Penginapan sebesar **Rp.229.439.950,-** untuk disetorkan ke Kas Negara dengan Akun Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Lalu serta melaporkan hasilnya kepada Inspektorat Jenderal, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pegawai	Divisi	Jumlah Pengembalian
1	Alpius Sarumaha	Divisi Yankum dan HAM	6.300.120
2	Adi Ismanto	Divisi Yankum dan HAM	1.122.000
3	Adil Jaya	Divisi Yankum dan HAM	3.659.000
4	Ahmad Kadafi	Divisi Yankum dan HAM	1.200.000
5	Agus Kamin	Divisi Yankum dan HAM	200.000
6	Ali Badary	Divisi Yankum dan HAM	1.850.000
7	Arlisa Noviriantono	Divisi Yankum dan HAM	674.000
8	Beniyati	Divisi Yankum dan HAM	486.000
9	Brassica Oryza	Divisi Yankum dan HAM	270.000
10	Cucuk Wasisatu	Divisi Yankum dan HAM	3.169.000
11	Cory Maryati	Divisi Yankum dan HAM	1.010.000
12	Damba Wiratama	Divisi Yankum dan HAM	200.000
13	Deni Saputra	Divisi Yankum dan HAM	1.446.000
14	Deddy Nopriadi	Divisi Yankum dan HAM	694.000
15	Desi Rulianti	Divisi Yankum dan HAM	660.000
16	Dewi Kartika S	Divisi Yankum dan HAM	700.000
17	Dina Ismela	Divisi Yankum dan HAM	740.000
18	Dina Mariana	Divisi Yankum dan HAM	1.966.000
19	Elisabeth	Divisi Yankum dan HAM	1.223.000
20	Eliyani	Divisi Yankum dan HAM	695.000
21	Elidawaty	Divisi Yankum dan HAM	440.000
22	Elmi Asritiningati	Divisi Yankum dan HAM	792.000
23	Erbit Septriawan	Divisi Yankum dan HAM	549.808
24	Erwin Sewtiawan	Divisi Yankum dan HAM	267.000



25	Euis Meivia Rahma	Divisi Yankum dan HAM	210.000
26	Farid Anfasa	Divisi Yankum dan HAM	200.000
27	Farid Junaidi	Divisi Yankum dan HAM	220.000
28	Febrina Anitasari	Divisi Yankum dan HAM	1.926.000
29	Ferli Syahdi	Divisi Yankum dan HAM	3.123.000
30	Gumelar	Divisi Yankum dan HAM	2.352.000
31	Gumirica	Divisi Yankum dan HAM	528.000
32	Gunawan	Divisi Yankum dan HAM	2.928.000
33	Gunawan Ali	Divisi Yankum dan HAM	936.000
34	Hapsoro Adinungroho	Divisi Yankum dan HAM	1.595.000
35	Herliana Husein	Divisi Yankum dan HAM	660.000
36	Hidayatullah	Divisi Yankum dan HAM	3.275.000
37	Hugo Maorit	Divisi Yankum dan HAM	3.178.000
38	Kamal Putra Tamrin	Divisi Yankum dan HAM	2.850.000
39	Levi Septiyanti	Divisi Yankum dan HAM	1.208.000
40	M Dwi Rianto	Divisi Yankum dan HAM	1.329.000
41	M Ridho Pratama	Divisi Yankum dan HAM	997.000
42	M Yudho Syafei	Divisi Yankum dan HAM	702.000
43	Marisa Agistia	Divisi Yankum dan HAM	270.000
44	Masriakromi	Divisi Yankum dan HAM	5.992.022
45	Meliana	Divisi Yankum dan HAM	430.000
46	Muhammad Yusuf	Divisi Yankum dan HAM	240.000
47	Muhammad Ali B	Divisi Yankum dan HAM	510.000
48	Muhammad Yudoharajo	Divisi Yankum dan HAM	895.000
49	Nabil an nafis	Divisi Yankum dan HAM	270.000
50	Nanta Fenomena	Divisi Yankum dan HAM	2.667.000
51	Nurul Amalia	Divisi Yankum dan HAM	690.000
52	Oktariawati Emran	Divisi Yankum dan HAM	240.000
53	Pijar Putra	Divisi Yankum dan HAM	2.905.000
54	Priska Pestaria	Divisi Yankum dan HAM	1.884.000
55	Resa Ariyanti	Divisi Yankum dan HAM	811.000
56	Reza Khairul	Divisi Yankum dan HAM	200.000
57	Rido Yunando	Divisi Yankum dan HAM	420.000
58	Risma Eka Wati	Divisi Yankum dan HAM	750.000
59	Rizky Yovanda	Divisi Yankum dan HAM	2.608.000
60	Rugun Tresia OP	Divisi Yankum dan HAM	410.000
61	Santosa	Divisi Yankum dan HAM	2.226.000
62	Sorta Delima	Divisi Yankum dan HAM	250.000
63	Sherly Marthalia	Divisi Yankum dan HAM	1.200.000
64	Tommy Ferza Husin	Divisi Yankum dan HAM	200.000
65	Vega Surya Melinda	Divisi Yankum dan HAM	276.000
66	Wahyu Sutanto	Divisi Yankum dan HAM	1.404.000
67	Yulinar Trisia	Divisi Yankum dan HAM	267.000
<b>Jumlah Pengembalian Divisi Yankum dan HAM</b>			<b>86.544.950</b>
1	M. Afif	Divisi Administrasi	1.200.000
2	Aldila Rosa Tama	Divisi Administrasi	3.960.000
3	Arlisa Noviriantono	Divisi Administrasi	5.480.000
4	Basnamara	Divisi Administrasi	7.240.000

5	Christian	Divisi Administrasi	200.000
6	Damba Wiratama	Divisi Administrasi	2.380.000
7	Dedi Irawan	Divisi Administrasi	1.880.000
8	Denial	Divisi Administrasi	400.000
9	Edi Aprianto	Divisi Administrasi	3.760.000
10	Elvira	Divisi Administrasi	2.080.000
11	Erbit Septiawan	Divisi Administrasi	2.480.000
12	Felina	Divisi Administrasi	200.000
13	Gumelar Adi	Divisi Administrasi	2.080.000
14	Gunawan Ali	Divisi Administrasi	6.440.000
15	Ikmal Idrus	Divisi Administrasi	600.000
16	Muhammad Yusuf	Divisi Administrasi	2.200.000
17	Nabil	Divisi Administrasi	3.780.000
18	Odi	Divisi Administrasi	3.280.000
19	Pijar Putra Arinda	Divisi Administrasi	2.200.000
20	Ramayani Putri	Divisi Administrasi	1.200.000
21	Reza Khairul Fitra	Divisi Administrasi	4.080.000
22	Rizqi Dhita	Divisi Administrasi	2.200.000
23	Rizky Yovanda Saputra	Divisi Administrasi	1.400.000
24	Roby Pajrin	Divisi Administrasi	3.480.000
25	Shifa	Divisi Administrasi	200.000
26	Sri Mulyani	Divisi Administrasi	2.080.000
27	Vike Youdit	Divisi Administrasi	200.000
28	Yanti	Divisi Administrasi	1.680.000
<b>Jumlah Pengembalian Divisi Administrasi</b>			<b>68.360.000</b>
1	Farid Junaedi	Divisi Pemasarakatan	10.200.000
2	Bambang Ludiro	Divisi Pemasarakatan	300.000
3	Yuniarto	Divisi Pemasarakatan	4.250.000
4	Firman Hidayat	Divisi Pemasarakatan	3.800.000
5	Rudi Suwartono	Divisi Pemasarakatan	2.100.000
6	Albran	Divisi Pemasarakatan	2.100.000
7	Agung Chandra	Divisi Pemasarakatan	2.100.000
8	Alvin	Divisi Pemasarakatan	300.000
9	Artika Kumala Dewi	Divisi Pemasarakatan	450.000
10	Basnamara	Divisi Pemasarakatan	200.000
11	Berta Ekasaari	Divisi Pemasarakatan	1.800.000
12	Dory	Divisi Pemasarakatan	150.000
13	Dhian Pratiwi DH	Divisi Pemasarakatan	300.000
14	Elvi Surya Ningsih	Divisi Pemasarakatan	450.000
15	Erna Ria Situmorang	Divisi Pemasarakatan	1.950.000
16	Fitria Oktaviani	Divisi Pemasarakatan	1.500.000
17	Lanjar Juliantoro	Divisi Pemasarakatan	9.900.000
18	Winda Martina	Divisi Pemasarakatan	8.850.000
19	M Nurhidayat	Divisi Pemasarakatan	4.350.000
20	Marisca	Divisi Pemasarakatan	2.250.000
21	Gilang	Divisi Pemasarakatan	200.000
22	Henny	Divisi Pemasarakatan	450.000
23	Indah	Divisi Pemasarakatan	450.000

24	Ismail	Divisi Pemasyarakatan	750.000
25	Reddy Putranto	Divisi Pemasyarakatan	3.150.000
26	Qisty	Divisi Pemasyarakatan	300.000
27	Fikri	Divisi Pemasyarakatan	300.000
28	Leni	Divisi Pemasyarakatan	150.000
29	Mad Adi	Divisi Pemasyarakatan	200.000
30	Natalia	Divisi Pemasyarakatan	1.950.000
31	Nita Aulia	Divisi Pemasyarakatan	1.050.000
32	Resty	Divisi Pemasyarakatan	450.000
33	Sri Rahayu	Divisi Pemasyarakatan	300.000
34	Eka Safitri	Divisi Pemasyarakatan	600.000
35	Yunita	Divisi Pemasyarakatan	600.000
36	Putra	Divisi Pemasyarakatan	150.000
37	Dedi Kasim	Divisi Pemasyarakatan	150.000
38	Renaldi	Divisi Pemasyarakatan	150.000
39	Heru Suprijo	Divisi Pemasyarakatan	600.000
40	Alkausar	Divisi Pemasyarakatan	150.000
41	Marlinawati	Divisi Pemasyarakatan	150.000
42	Okta Fitriansyah	Divisi Pemasyarakatan	150.000
43	Amalia Hayatunisa	Divisi Pemasyarakatan	150.000
<b>Jumlah Pengembalian Divisi Pemasyarakatan</b>			<b>69.850.000</b>
1	Anita	Divisi Imigrasi	300.000
2	Bactiar	Divisi Imigrasi	150.000
3	Badi	Divisi Imigrasi	785.000
4	Joeliansyah	Divisi Imigrasi	150.000
5	Kobiyah	Divisi Imigrasi	300.000
6	Miza Akbar	Divisi Imigrasi	150.000
7	Nadriana Qisty	Divisi Imigrasi	150.000
8	Newin	Divisi Imigrasi	450.000
9	Ra Fatima	Divisi Imigrasi	450.000
10	Rosidin	Divisi Imigrasi	300.000
11	Samsul	Divisi Imigrasi	150.000
12	Senja	Divisi Imigrasi	300.000
13	Siska	Divisi Imigrasi	450.000
14	Teodorus Simarmata	Divisi Imigrasi	300.000
15	Lisa Masyarti	Divisi Imigrasi	150.000
16	Jojo Suparjo	Divisi Imigrasi	150.000
<b>Jumlah Pengembalian Divisi Imigrasi</b>			<b>4.685.000</b>
<b>Total Jumlah Pengembalian Kanwil Kemenkumham Lampung</b>			<b>229.439.950</b>

2. Terdapat pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (521213) yang tidak sesuai Ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp.14.432.000.

Audit Kinerja Atas Pengelolaan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2022 sd Februari 2023 dilaksanakan untuk menilai apakah pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, aspek efektif, aspek efisien dan aspek

ekonomis (3E). Audit dilaksanakan pada 9 (Sembilan) DIPA yang dikelola oleh Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Imigrasi dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

Berdasarkan hasil pengecekan dokumen pertanggungjawaban Belanja Barang atas Pemberian Honor Tim Pelaksana Kegiatan (521213) yang disajikan oleh Bendahara Pengeluaran pada 9 DIPA yang dikelola pada Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Imigrasi dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM terdapat pembayaran **Honor Tim Pelaksana Kegiatan (Akun 521213) Yang Tidak Sesuai Ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp.14.432.000, dengan rincian sebagai berikut:**

No	Nama Pegawai	Divisi	Jumlah	Keterangan
1	Bactiar	Divisi Imigrasi	2.295.000	Kelebihan bayar Honor Tim Penilai Angka Kredit
2	Badi Uzaman	Divisi Imigrasi	2.565.000	
3	Deni Usmansyah	Divisi Imigrasi	47.000	
4	Jojo Suparjo	Divisi Imigrasi	765.000	
5	Mamun	Divisi Imigrasi	855.000	
6	Raden Ayu Fatima	Divisi Imigrasi	2.295.000	
7	Samsul Komar	Divisi Imigrasi	1.710.000	
8	Sugiaro	Divisi Imigrasi	1.710.000	
9	Yulinar Trisia	Divisi Imigrasi	510.000	
10	Newin	Divisi Imigrasi	285.000	
11	Joeliansyah	Divisi Imigrasi	285.000	
12	Ikhsan Yusuf	Divisi Imigrasi	285.000	
13	Arlisa	Divisi Imigrasi	255.000	
14	Pijar	Divisi Imigrasi	285.000	
15	Erbit	Divisi Imigrasi	285.000	
<b>JUMLAH</b>			<b>14.432.000</b>	

Terjadinya permasalahan tersebut antara lain disebabkan:

- a. Kurangnya pemahaman pegawai Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung terkait Kepmenkumham M.HH-12.KU.04.01 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kemenkumham, Kemenkumham, PMK Nomor 60/PMK.02/Tahun 2021 tentang SBM Tahun 2022 dan PMK Nomor 80/PMK.02/Tahun 2022 tentang SBM Tahun 2023 khususnya terkait dengan penerapat Honor Tim Pelaksana Kegiatan.
- b. Bendahara Pengeluaran Pembantu dan PPK tidak memahami standar biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan atas SK yang diterbitkan oleh KPA berdasarkan Kemenkumham, PMK Nomor 60/PMK.02/Tahun 2021 tentang SBM Tahun 2022 dan PMK Nomor 80/PMK.02/Tahun 2022 tentang SBM Tahun 2023.

**Direkomendasikan** kepada Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung selaku KPA agar segera memerintahkan PPK DIPA Ditjen Imigrasi dan DIPA Sekretariat Jenderal untuk menerbitkan surat penagihan kepada pegawai di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung yang tercatat menerima pembayaran atas Honor Tim Pelaksana Kegiatan (Akun 521213) Yang Tidak Sesuai Ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2022 dan 2023 sebesar **Rp.14.432.000,-** serta menyetorkan ke Kas Negara sebagai Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu dan melaporkan hasilnya kepada Inspektorat Jenderal, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pegawai	Divisi	Jumlah	Keterangan
1	Bactiar	Divisi Imigrasi	2.295.000	Kelebihan bayar Honor Tim Penilai Angka Kredit
2	Badi Uzaman	Divisi Imigrasi	2.565.000	
3	Deni Usmansyah	Divisi Imigrasi	47.000	
4	Jojo Suparjo	Divisi Imigrasi	765.000	
5	Mamun	Divisi Imigrasi	855.000	
6	Raden Ayu Fatima	Divisi Imigrasi	2.295.000	
7	Samsul Komar	Divisi Imigrasi	1.710.000	
8	Sugiarto	Divisi Imigrasi	1.710.000	
9	Yulinar Trisia	Divisi Imigrasi	510.000	
10	Newin	Divisi Imigrasi	285.000	
11	Joeliansyah	Divisi Imigrasi	285.000	
12	Ikhsan Yusuf	Divisi Imigrasi	285.000	
13	Arlisa	Divisi Imigrasi	255.000	
14	Pijar	Divisi Imigrasi	285.000	
15	Erbit	Divisi Imigrasi	285.000	
<b>JUMLAH</b>			<b>14.432.000</b>	

**3. Terdapat kurang pungut PNBPN atas Pendapatan Sewa atas Tanah, Gedung, dan Bangunan berupa Rumah Negara senilai Rp.2.068.704.**

Laporan Realisasi Anggaran Kanwil Kemenkumham Lampung (408824) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 (unaudited) menyajikan realisasi pendapatan PNBPN sebesar Rp108.387.037. Dalam pendapatan tersebut salah satunya bersumber dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131) sebesar Rp8.655.258,-.

Berdasarkan hasil penelusuran dan pengujian terhadap dokumen pengelolaan PNBPN Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung yang disajikan oleh Operator Pengelola Barang diperoleh data nilai Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp.8.655.258 seluruhnya bersumber dari Pendapatan Sewa Rumah Negara Golongan I tipe B dan C. Pengelolaan PNBPN atas Sewa Rumah Negara pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung memiliki Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan Rumah Negara sebanyak 10 unit.
- b. Dari 10 unit rumah negara tersebut hanya 5 unit yang masih di aktif di huni oleh Pejabat atau Pegawai Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, yaitu rumah negara yang berada di Jalan P. Emir Noor, KS Tubun dan M Roem. Sedangkan 5 Unit rumah lainnya tidak dihuni oleh Pejabat atau Pegawai karena kondisinya bangunan yang tidak layak.
- c. Terdapat Rumah Negara yang dihuni oleh Pejabat atau Pegawai ternyata tidak seluruhnya dipungut sewa rumah dinas. Pada tahun 2023 terdapat pejabat yang menempati rumah negara golongan I yang telah menempati rumah dinas yang belum dipotong gajinya untuk pembayaran sewa rumah negara oleh bendahara melalui SPM gaji.
- d. Belum terdapat mekanisme penghentian/pencabutan Surat izin penghuni sehingga menimbulkan pemotongan gaji pegawai yang sudah tidak menempati rumah dinas.
- e. Terdapat kelebihan luasan bangunan rumah dinas golongan I tipe B yang berlokasi di jalan KS. Tubun kota Bandar Lampung dengan luas pada KIB 629 m2 sementara berdasarkan Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK) luas maksimal adalah 120 m2.
- f. Penetapan nilai sewa atas rumah negara masih belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor:

373/KPTS/2001 Tentang Sewa Rumah Negara. Terdapat ketidaktepatan penghitungan tarif sewa rumah dinas yang disebabkan tidak terdapatnya informasi terkait Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kota Bandar Lampung dan faktor klasifikasi tanah/kelas bumi (FKB) sehingga operator BMN menggunakan asumsi HSBGN kota terdekat dalam penghitungan tarif sewa. Bahwa tim audit telah mendapatkan informasi terkait HSBGN Kota Bandar Lampung yaitu Rp5.140.000 dan dengan menggunakan asumsi FKB terendah yaitu 40% (karena belum ditemukan data FKB) serta rekap pemotongan gaji yang dilakukan oleh Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), terdapat kekurangan pembayaran sewa pada tahun 2022 dan Januari s.d April 2023 senilai Rp5.191.485. (rekapitulasi terlampir)

- g. Penghitungan tarif sewa rumah negara pada Kanwil Kemenkumham Lampung dilaksanakan oleh operator BMN dimana seharusnya dilaksanakan oleh PPABP/Bendaharawan.
- h. Terdapat pemanfaatan gedung bangunan pada Kanwil Kemenkumham Lampung untuk Kantin yang belum didasarkan pada persetujuan/penghitungan KPKNL ataupun perjanjian dengan KPB sehingga belum terdapat penyeteroran PNPB atas sewa ke kas negara.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas maka terdapat kurang Pungut PNPB atas Pendapatan Sewa atas Tanah, Gedung, dan Bangunan Berupa Rumah Negara pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung sebesar **Rp.2.068.704**, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kurang pungut Pungut PNPB atas Pendapatan Sewa atas Tanah, Gedung, dan Bangunan Berupa Rumah Negara pada tahun 2023 sebesar Rp.342.936.

No	Uraian Rumah Negara	Luas	Alamat	Penghuni	Kurang Pungut Sewa
1	RN Gol I Tipe C Permanen	70	M ROEM	Alpius Sarumaha	342.936
<b>JUMLAH KURANG PUNGUT SEWA TAHUN 2022</b>					<b>342.936</b>

- b. Kurang pungut Pungut PNPB atas Pendapatan Sewa atas Tanah, Gedung, dan Bangunan Berupa Rumah Negara pada tahun 2022 sebesar Rp.1.725.768.

No	Uraian Rumah Negara	Luas	Alamat	Penghuni	Kurang Pungut Sewa
1	RN Gol I Tipe B Permanen	120	P. Emir M.Noor	Masriakromi	<b>1.039.896</b>
2	RN Gol I Tipe C Permanen	70	M ROEM	Alpius Sarumaha	<b>685.872</b>
<b>JUMLAH KURANG PUNGUT SEWA TAHUN 2023</b>					<b>1.725.768</b>

- c. Kurang Pungut PNPB atas Pendapata Sewa atas Tanah, Gedung dan Bangunan berupa pemanfaatan gedung bangunan pada Kanwil Kemenkumham Lampung untuk Kantin yang belum dilakukan pemungutan sewa.

Terjadinya permasalahan tersebut antara lain disebabkan:

- a. Kurangnya pemahaman Operator BMN terhadap ketentuan perhitungan penetapan besaran sewa rumah negara sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor: 373/KPTS/2001 Tentang Sewa Rumah Negara.
- b. PPABP/Bendaharawan lalai dalam melakukan pemotongan dan pemungutan Sewa Rumah Negara terhadap Pejabat atau Pegawai yang ditetapkan sebagai penghuni Rumah Negara pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung.
- c. Kurangnya pengendalian dari Kuasa Pengguna Barang pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung terhadap pengelolaan PNBPN yang bersumber dari Pendapatan Sewa Rumah Negara.

**Direkomendasikan** kepada Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung selaku Kuasa Pengguna Barang agar melakukan langkah-langkah penertiban sebagai berikut:

- a. Memerintahkan PPABP/Bendaharawan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM agar segera melakukan pemungutan terhadap Pejabat/Pegawai terkait kurang pungut PNBPN tahun 2022 dan 2023 atas Sewa atas Tanah, Gedung, dan Bangunan Berupa Rumah Negara pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung sebesar **Rp.2.068.704**, serta segera menyetorkan ke Kas Negara sebagai Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131) serta melaporkan hasilnya kepada Inspektorat Jenderal, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pegawai	Divisi	Jumlah
1	Alpius Sarumaha	Divisi Yankum dan HAM	1.028.808
2	Masriakromi	Divisi Yankum dan HAM	1.039.896
<b>Jumlah</b>			<b>2.068.704</b>

- b. Memerintahkan Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat yang membidangi pajak daerah untuk mendapatkan informasi terkait faktor klasifikasi tanah/kelas bumi (FKB) pada masing-masing rumah negara sebagai dasar melakukan penghitungan ulang sesuai dengan data terbaru dan ketentuan yang berlaku, merevisi SIP dengan tarif yang terbaru sebagai dasar pemotongan gaji atas sewa rumah negara.
- c. Selaku pembina Unit Pelaksana teknis di Lingkungan Kanwil kemenkumham Lampung melakukan asistensi dan monitoring kepada seluruh UPT dalam penertiban sewa rumah negara.
- d. Memerintahkan PPABP/Bendaharawan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM agar melakukan pemotongan gaji secara rutin terhadap Pejabat atau Pegawai yang ditetapkan sebagai penghuni dari Rumah Negara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung dan menyetorkan ke Kas Negara sebagai PNBPN.
- e. Memerintahkan Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN untuk melakukan koordinasi dengan KPKNL Kota Bandar Lampung terkait dengan penetapan Sewa Rumah Negara pada Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen seluas 629 M2 yang berlokasi di K.S yang melebihi Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK) untuk Pejabat Eselon II.
- f. Segera membuat Perjanjian Kerjasama atas Pemanfaatan Gedung Bangunan pada Kanwil Kemenkumham Lampung sebagai Kantin Pegawai serta mengajukan permohonan

persetujuan/penghitungan KPKNL terkait dengan penetapan PNBP atas sewa Kantin Pegawai.

#### 4. **Pengelola Penatausahaan Pertanggungjawaban Anggaran Pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung Belum Optimal dan Akuntabel.**

Audit Kinerja Atas Pengelolaan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2022 sd Februari 2023 dilaksanakan untuk menilai apakah pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, aspek efektif, aspek efisien dan aspek ekonomis (3E). Audit dilaksanakan pada 9 (Sembilan) DIPA yang dikelola oleh Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Imigrasi dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan PPK, diketahui bahwa pengelolaan anggaran pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan 9 DIPA pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung dilakukan oleh 1 orang Bendahara Pengeluaran, 6 orang Bendahara Pengeluaran Pembantu dan 2 orang PPK.
- b. Masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggungjawab terhadap DIPA yang dikelolanya serta menjadi penghubung dengan Pelaksana Teknis pada masing-masing Divisi.
- c. PPK dalam melaksanakan realisasi anggaran pada 9 DIPA secara LS melalui kegiatan Kontraktual maupun Non Kontraktual. Sedangkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan realisasi anggaran secara swakelola melalui Uang Persediaan.
- d. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan Pembayaran atas pengajuan pertanggungjawaban kegiatan dari Pelaksana Teknis di masing-masing Divisi.

Berdasarkan hasil pengecekan dokumen pertanggungjawaban Belanja Barang (AKUN 52) yang disajikan oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada 9 DIPA yang dikelola pada Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Imigrasi dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM terdapat **Pengelola Penatausahaan Pertanggungjawaban Anggaran Pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung yang belum sesuai dengan** Kepmenkumham M.HH-12.KU.04.01 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kemenkumham, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Dalam kegiatan Perjalanan Dinas Biasa (524111) banyak pejabat dan pegawai yang mengajukan Komponen Penginapan dengan tanpa bukti pertanggungjawaban sehingga mengajukan biaya 30% dari biaya penginapan di kota tujuan. Namun isi Surat Pernyataan yang dibuat oleh pejabat/pegawai tidak sesuai dengan Kepmenkumham M.HH-12.KU.04.01 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kemenkumham yang menyebutkan bahwa Surat Pernyataan yang disetujui oleh PPK terkait dengan pengajuan biaya Penginapan 30% harus memperhatikan hal-hal, yaitu sebagai berikut:
  - 1) Menjelaskan bahwa di kota tujuan perjalanan dinas tidak terdapat hotel/tempat menginap lainnya, sehingga menginap ditempat yang tidak menyediakan kuitansi/bukti biaya



- penginapan; atau
- 2) Menjelaskan bahwa di kota tujuan perjalanan dinas terdapat hotel/tempat menginap lainnya, namun tidak menginap di hotel/tempat menginap lainnya tersebut dan menjelaskan alasan tidak menginap di hotel tersebut.
  - 3) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) tidak diberikan untuk: Perjalanan Dinas Jabatan dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama.
- b. Terdapat pejabat yang terindikasi melakukan Perjalanan Dinas ke Jakarta yang tidak sesuai dengan tujuan penugasan sehingga tidak sesuai dengan Kepmenkumham M.HH-12.KU.04.01 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kemenkumham yang menyebutkan bahwa Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan dengan Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, dengan penjelasan sebagai berikut
- 1) Perjalanan keberangkatan dilakukan pada hari Jumat dan kembali pada hari Senin.
  - 2) Uang harian pada hari Sabtu tetap diajukan namun tidak melakukan kepulangan perjalanan dinas.
  - 3) Dalam Surat Penugasan disebutkan melakukan kegiatan Koordinasi namun didalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan tidak ada penjelasan Kegiatan Koordinasi yang dilakukan dan hasil dari kegiatan koordinasi tersebut. Laporan hanya menjelaskan bahwa kegiatan koordinasi telah dilaksanakan dengan baik.
  - 4) Foto lampiran bukti Koordinasi tidak menunjukkan suasana pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi di ruang kantor atau ruang rapat.
- c. Perhitungan uang makan pegawai pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung tidak memperhatikan data perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai tersebut sehingga mengakibatkan adanya pegawai yang sudah melakukan perjalanan dinas dengan menerima Uang Harian namun masih tetap diajukan untuk mendapatkan Uang Makan. Sebagai contoh sampling adalah sebagai berikut:

No	Nama Pegawai	Perdin Uang Harian di Januari	Masuk Kerja Berdasarkan Uang Makan	Uang Harian	Lebih Bayar Uang Makan
1	Arlisa	4 hari	21 hari	41.000	164.000
2	Roby Pajrin	4 Hari	21 hari	37.000	148.000
3	Damba Wiarata	5 hari	21 hari	37.000	185.000
4	Rizqi Dhita	6 Hari	21 hari	37.000	222.000
5	Nabil An Nafis	3 Hari	22 hari	37.000	111.000

- d. Kuitansi Resmi pada Bengkel Resmi Auto Persada namun terdapat beberapa kegiatan pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 yang dilakukan pada Bengkel yang hanya menerbitkan kuitansi manual dengan tulis tangan.
- e. Masih terdapat Pejabat yang memiliki kendaraan dinas melakukan pembelian bensin dengan menggunakan Bukti Kuitansi Tulis Tangan, bukan bon Faktur resmi dari Pertamina.
- f. Terdapat pengajuan Belanja Penerbitan Buletin Kanwil Lampung setiap bulan sebanyak 128 Eksemplar namun dalam bukti pertanggungjawaban tidak pernah melampirkan bukti foto penyerahan Buletin dari Pihak Percetakan kepada PPK sebanyak 128 Eksemplar.
- g. Pengelolaan Belanja berupa Pengadaan Keperluan Pokok Perkantoran, Pengadaan Persediaan ATK, Pengadaan Belanja Konsumsi Makan Rapat, Belanja Jamuan Tamu,

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, tidak dilakukan secara akuntabel, yaitu:

- 1) PPK melakukan transaksi pengadaan Belanja Barang secara Kontraktual maupun non kontraktual namun tidak didukung dengan dokumen HPS yg akuntabel.
- 2) PPK menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanpa didukung dengan bukti foto berupa foto penyerahan barang dari penyedia kepada pegawai dan foto barang yang dibeli.
- 3) Pembelian jamuan tamu dilakukan melalui Aplikasi Grabfood namun tidak ada dukungan foto atas jamuan tamu tersebut ataupun surat tugas dari jamuan makan tersebut.
- 4) Pembelian Konsumsi Rapat tidak didukung dengan foto kegiatan rapat dan surat undangan untuk rapat tersebut.

Terjadinya permasalahan tersebut antara lain disebabkan:

- a. Belanja yang dilakukan oleh pelaksana tidak disertai bukti valid sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Bendahara pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu belum optimal melaksanakan fungsinya selaku penguji tingkat pertama atas pembayaran yang ditagihkan oleh pelaksana;
- c. PPK kurang cermat dalam melakukan pengujian atas kebenaran tagihan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- d. PPSPM belum melaksanakan fungsinya dalam menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung.

**Direkomendasikan** kepada Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung selaku KPA agar segera melakukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas kinerja Pengelola Penatausahaan Pertanggungjawaban Anggaran Pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung yang Optimal dan Akuntabel, sebagai berikut:

- a. Segera menerbitkan kebijakan internal di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung perihal penerapan Kepmenkumham M.HH-12.KU.04.01 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kemenkumham dan Kepmenkumham Nomor: M.HH-03.KU.02.01 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Transportasi Darat, Laut, atau Udara di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung serta melakukan sosialisasi terkait kebijakan tersebut pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung dan melaporkan hasilnya kepada Inspektorat Jenderal.
- b. Memerintahkan seluruh Pejabat dan Pegawai di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung agar melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi jabatan.
- c. Memerintahkan agar PPAPB/Bendahara Gaji agar dalam melakukan perhitungan Uang Makan pegawai memperhatikan perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai.
- d. Memerintahkan PPK dan Bendahara Pengeluaran agar meningkatkan kualitas pertanggungjawaban anggaran pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung, yaitu:
  - 1) Dalam melakukan pembayaran atas anggaran pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan 4 agar mewajibkan pelaksana kegiatan untuk melampirkan Kuitansi Resmi dari Bengkel Resmi yang ditetapkan oleh PPK.
  - 2) Selektif dalam memberikan persetujuan terkait dengan pengajuan biaya Penginapan 30% oleh pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar kota.

- 3) Dalam melakukan pembayaran atas pengajuan pembelian bensin agar mewajibkan pelaksana kegiatan melampirkan bukti Struk Bensin resmi dari Pertamina.
- 4) Dalam melakukan pembayaran terkait Belanja Buletin Kanwil Lampung agar mewajibkan pelaksana kegiatan melampirkan bukti foto penyerahan Buletin dari Pihak Percetakan kepada PPK/Pelaksana kegiatan sebesar jumlah buletin yang dibayarkan.
- 5) Melampirkan dokumen HPS pada setiap transaksi pengadaan Belanja Barang secara Kontraktual maupun non kontraktual.
- 6) Dalam menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan agar mewajibkan pelaksana kegiatan melampirkan bukti foto berupa foto penyerahan barang dari penyedia kepada pegawai dan foto barang yang dibeli.
- 7) Dalam melakukan pembayaran atas pembelian jamuan tamu agar mewajibkan pelaksana kegiatan melampirkan dukungan foto atas jamuan tamu tersebut ataupun surat tugas dari jamuan makan tersebut.
- 8) Dalam melakukan pembayaran atas Pembelian Konsumsi Rapat agar mewajibkan pelaksana kegiatan melampirkan foto kegiatan rapat dan surat undangan untuk rapat tersebut.

#### 5. Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Gedung pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung Belum Tertib.

Berdasarkan informasi pada laporan keuangan Kanwil Kemenkumham Lampung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 (unaudited) menyajikan aset tetap berupa tanah senilai Rp53.244.053.437. Nilai aset tanah tersebut, berdasarkan tarikan data pada master aset Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN), terdiri dari 27 bidang tanah dengan luas total 232.514 m<sup>2</sup> yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

No	Uraian	Sat	Kuantitas	Nilai
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	M2	3,600	9,595,299,000
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	158,978	30,610,158,437
3	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	M2	68,946	13,038,596,000
<b>JUMLAH</b>			<b>231,524</b>	<b>53,244,053,437</b>

Hasil penelusuran terhadap dokumen administrasi serta dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan BMN Aset Tetap Tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Kanwil Kemenkumham Lampung menunjukkan kondisi sebagai berikut:

- a. Terdapat potensi salah saji aset tetap berupa tanah karena perbedaan/selisih pencatatan luasan antara laporan BMN dan bukti kepemilikan tanah/sertifikat. Berdasarkan pengujian pada dokumen kepemilikan tanah berupa sertifikat/bukti kepemilikan lainnya ditemukan adanya kurang saji kuantitas tanah seluas 6.089 m<sup>2</sup> pada 4 bidang tanah, yaitu:

NO	Nama Satker	Nama Barang	NUP	Jenis Dokumen	Kepemilikan	Luas SAKTI (M <sup>2</sup> )	Luas sertifikat (M <sup>2</sup> )	selisih	Status penggunaan
1	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN	Tanah Bangunan Rumah	3	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q	350	378	-28	Rumah dinas

NO	Nama Satker	Nama Barang	NUP	Jenis Dokumen	Kepemilikan	Luas SAKTI (M <sup>2</sup> )	Luas sertifikat (M <sup>2</sup> )	selisih	Status penggunaan
	HAM LAMPUNG	Negara Golongan I			Kementerian/ Lembaga				
2	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	4	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	394	542	-148	Rumah dinas Kadiv Imigrasi
3	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	5	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	200	213	-13	Rumah dinas digunakan oleh Kasubbid KI
4	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Kementerian/ Lembaga	50.000	55.900	-5.900	Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung
<b>JUMLAH</b>						<b>50.944</b>	<b>57.033</b>	<b>-6.089</b>	

Bahwa selain 4 bidang tanah tersebut, terdapat 1 bidang tanah dalam proses sertifikasi yang berpotensi kurang saji kuantitas yaitu pada desa/kelurahan Way Huwi, Kecamatan Jati Sari, Kab. Lampung Selatan karena adanya perbedaan luasan antara hasil ukur Badan Pertanahan Nasional dan berita acara hibah tanah oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Kanwil Kemenkumham Lampung sedang berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung untuk melakukan koreksi hibah tanah tersebut.

- b. Berdasarkan pengujian pada dokumen kepemilikan tanah berupa sertifikat/bukti kepemilikan lainnya ditemukan adanya lebih saji saji kuantitas tanah seluas 8.027 m<sup>2</sup> pada 4 bidang tanah, yaitu:

NO	Nama Satker	Nama Barang	NUP	Jenis Dokumen	Kepemilikan	Luas SAKTI (M <sup>2</sup> )	Luas sertifikat (M <sup>2</sup> )	selisih	Status penggunaan
1	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	3	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	6.670	5.817	853	ex. Balai sidang
2	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	4	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	2.620	2.600	20	ex. Balai sidang

NO	Nama Satker	Nama Barang	NUP	Jenis Dokumen	Kepemilikan	Luas SAKTI (M <sup>2</sup> )	Luas sertifikat (M <sup>2</sup> )	selisih	Status penggunaan
3	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	5	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/Lembaga	5.100	3.946	1.154	ex. Balai sidang
4	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	9	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/Lembaga	10.000	4.000	6.000	ex. Balai sidang
<b>JUMLAH</b>						<b>24.390</b>	<b>16.363</b>	<b>8.027</b>	

Bahwa masih terdapat 1 bidang tanah dalam proses sertifikasi yang berpotensi lebih saji yaitu tanah yang digunakan untuk gedung bangunan Kanwil Kemenkumham Lampung berdasarkan hasil ukur Badan Pertanahan Nasional karena sebagian tanah telah digunakan untuk fasilitas umum berupa jalan.

Berdasarkan konfirmasi kepada operator BMN pada Sub Bagian Keuangan dan BMN, perbedaan pencatatan luas tanah pada laporan aset BMN dan dokumen sertifikat dapat ditimbulkan karena pencatatan awal belum berdasarkan dokumen sertifikat/hasil ukur yang dikeluarkan oleh BPN. Serta terdapat potensi adanya penggunaan lahan oleh pihak lain sehingga saat dilakukan proses sertifikasi terdapat luas yang berkurang akibat tidak tercapainya persetujuan pengukuran batas tanah.

- c. Proses pengamanan aset tetap berupa tanah belum dilakukan secara optimal.

Kuasa Pengguna Barang memiliki kewajiban untuk melakukan pengamanan BMN secara aspek administratif yaitu penatausahaan dokumen kepemilikan yang andal, pembukuan, inventarisasi dan pelaporan, aspek hukum yaitu BMN terjaga/terlindungi dari potensi masalah hukum seperti sengketa, gugatan, atau beralih kepemilikan kepada pihak lain secara tidak sah, serta aspek fisik yaitu untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen bukti kepemilikan tanah terdapat 1 bidang tanah yang tidak terdapat bukti kepemilikan, 2 bidang tanah yang belum bersertifikat dan 11 bidang tanah Bersertifikat Belum Sesuai Ketentuan (BBSK), yaitu:

NO	Nama Satker	Nama Barang	NUP	Jenis Dokumen	Kepemilikan	Luas SAKTI (M <sup>2</sup> )	Luas sertifikat (M <sup>2</sup> )	Status penggunaan
1	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7	Tidak Bersertifikat	Bukti Kepemilikan Lainnya (Naskah pemberian Hibah pemprov lampung)	75.000	-proses koreksi hibah karena hasil pengukuran lebih besar dari yang BA hibah	4 satker ; Lapas Kelas IIA Narkotika, Rutan Kelas I Bandar Lampung, Lapas Perempuan

NO	Nama Satker	Nama Barang	NUP	Jenis Dokumen	Kepemilikan	Luas SAKTI (M <sup>2</sup> )	Luas sertifikat (M <sup>2</sup> )	Status penggunaan
							-potensi kurang saji	Kelas IIA Bandar Lampung, Rupbasan Kelas II Bandar Lampung (sedang dalam proses sertipikasi)
2	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Kementerian/ Lembaga	50.000	55.900	Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung
3	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	9	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Kementerian/ Lembaga	21.800	21.800	Lapas Kelas IIB Kota Agung
4	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12	Hibah	Bukti kepemilikan lainnya (Naskah pemberian Hibah pemkab pesisir barat)	3.189	hibah 2022 belum proses sertifikat	akan digunakan untuk unit kerja keimigrasian (UKK)
5	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1	<b>Tidak Bersertifikat</b>	<b>Bukti Kepemilikan Lainnya</b>	2.450	tidak terdapat bukti kepemilikan dan telah dilakukan penelusuran	
6	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	2	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Kementerian/ Lembaga	1.200	1.200	ex. Balai sidang
7	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	6	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Kementerian/ Lembaga	4.345	4.345	ex. Balai sidang (tanah kosong)
8	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	8	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Kementerian/ Lembaga	7.300	7.300	ex. Balai sidang
9	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	10	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Kementerian/ Lembaga	6.950	6.950	ex. Balai sidang

NO	Nama Satker	Nama Barang	NUP	Jenis Dokumen	Kepemilikan	Luas SAKTI (M <sup>2</sup> )	Luas sertifikat (M <sup>2</sup> )	Status penggunaan
10	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	11	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pihak Ketiga	1.375	1.375	ex. Balai sidang (Proses BBSK)
11	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	12	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Kementerian/ Lembaga	3.490	3.490	ex. Balai sidang
12	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	13	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Kementerian/ Lembaga	4.150	4.150	ex. Balai sidang
13	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	16	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Kementerian/ Lembaga	6.280	6.280	ex. Balai sidang (tanah kosong)
14	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	17	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Kementerian/ Lembaga	4.965	4.965	ex. Balai sidang (tanah kosong)

Kanwil Kemenkumham Lampung belum secara optimal melakukan pengamanan secara fisik atas aset tanah. Terdapat beberapa aset tanah yang belum dilakukan pengamanan permanen berupa pemagaran sesuai batas-batas tanah. Terdapat aset tanah digunakan oleh pihak lain tidak sebagaimana mestinya seperti tempat pembuangan sampah sehingga berpotensi menurunkan fungsi tanah. Belum terdapat monitoring fisik secara berkala atas aset tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Kanwil Kemenkumham Lampung. Hal tersebut dapat menimbulkan risiko-risiko berkurangnya aset tanah secara kuantitas dan fungsi. Sebagai contoh telah terdapat berkurangnya aset tanah yang dihibahkan oleh Mahkamah Agung seluas tercatat 10.000 m<sup>2</sup> pada berita acara hibah yang berlokasi di Desa Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, saat dilakukan sertifikasi di tahun 2014 hanya tercatat 4.000 m<sup>2</sup> pada SHP. diindikasikan terdapat okupansi pihak lain sehingga pada saat pengukuran luasan tanah untuk proses sertifikasi berkurang secara signifikan. Selain itu, sebagian tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Kanwil Kemenkumham Lampung belum dilakukan optimalisasi pemanfaatan selama beberapa tahun terakhir (*idle*) dan belum terdapat rencana pemanfaatan yang jelas.

Berdasarkan konfirmasi kepada operator BMN pada Sub Bagian Keuangan dan BMN, menyampaikan bahwa 1 bidang tanah yang tidak ditemukan bukti kepemilikannya telah dilakukan penelusuran dan pengusulan proses penghapusan. Terhadap 2 bidang tanah yang belum bersertifikat sedang dalam proses pengajuan/penerbitan sertifikat oleh BPN. Terhadap tanah dengan status BBSK dan pengamanan fisik terhadap BMN tanah terkendala jarak yang jauh, utamanya tanah eks. Balai Sidang, serta keterbatasan ketersediaan anggaran monitoring aset tanah tersebut.

Terjadinya permasalahan tersebut antara lain disebabkan:

- a. Kuasa Pengguna Barang Kanwil Kemenkumham Lampung belum secara optimal melakukan penatausahaan, pengamanan, pengawasan dan pengendalian atas BMN berupa tanah secara optimal.
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN telah melakukan koordinasi BPN, KPKNL dan pihak-pihak terkait percepatan penertiban sertifikat tanah milik Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung, namun proses pelaksanaan di lapangan membutuhkan waktu yang lama.
- c. Operator BMN baru mengetahui adanya selisih Lebih Catat dan Kurang Catat Aset Tanah pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung sehingga baru dilakukan rekapitulasi atas permasalahan tersebut.

**Direkomendasikan** kepada Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung selaku Kuasa Pengguna Barang agar segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memerintahkan Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN segera menyusun rencana aksi terkait percepatan penertiban sertifikat tanah milik Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung khusus pada 1 (satu) bidang tanah yang tidak terdapat bukti kepemilikan, 2 (dua) bidang tanah yang belum bersertifikat dan 11 (sebelas) bidang tanah Bersertifikat Belum Sesuai Ketentuan (BBSK).
- b. Memerintahkan Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN segera melakukan monitoring atas kondisi dan fungsi tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional setempat dan Biro Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM terkait upaya pengawasan, pengendalian dan pengamanan BMN.
- c. Memerintahkan Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN segera melakukan koordinasi dengan KPKNL Kota Bandar Lampung terkait koreksi catat atas potensi lebih saji dan kurang saji Aset Tetap berupa Tanah pada neraca laporan keuangan Kanwil Kemenkumham Lampung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Ketidaktertiban tersebut, setelah dilakukan perbaikan disampaikan kepada kami selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat ini.

Demikian untuk menjadi periksa.



Inspektur Jenderal,



RAZILU

NIP. 196511281991031002

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Sekretaris Jenderal.





### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230509622214
Tanggal Billing	: 09-05-2023 08:57:17
Tanggal Keluaran	: 14-05-2023 08:57:17
Tanggal Bayar	: 09-05-2023 09:25:01
Bank/Post/Finch Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Seter/Wajib Bayar	: Pajak Roadshow
Kementerian/Lembaga	: HJ - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: 10 - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 400029 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNGPINANG
Total Diatur	: 140.000 (IDR)
Terbilang	: Seratus Empat Puluh Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 230509096222
NTPN	: PR04040VY0PK3TE

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Seteran	: Pemertmaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 820112 - Pemertmaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Seteran	: 140.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022 an-Adi Imanto



## BUKTI PENERIMAAN NEGARA

### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 030230020497184
Tanggal Billing	: 20-06-2023 14:28:18
Tanggal Kelulusan	: 27-06-2023 14:28:18
Tanggal Bayar	: 20-06-2023 15:24:21
Bank/Pos/Pintech Bayar	: BANK RAEYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Pagar Ramidan
Kementerian/Lembaga	: 012 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: 10 - Badan Pendidikan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 400029 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNGPINANG
Total Dikawatir	: 140.000 (IDR)
Terbilang	: Seratus Empat Puluh Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 219620532304
NTPN	: 9086048V5ITTH90

### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 140.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022 a.n Adi Ismanto



### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 828230802298845
Tanggal Billing	: 02-08-2023 08:05:30
Tanggal Kedaluwarsa	: 09-08-2023 09:05:30
Tanggal Bayar	: 02-08-2023 11:25:15
Bank/Pos/Instansi Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Fajar Nurhidan
Kementerian/Lembaga	: 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Emisi 1	: 10 - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 400029 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG
Total Dibayar	: 140.000 (IDR)
Terdulang	: Seratus Empat Puluh Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTH	: 230802506521
NTPN	: 2306055019ANMLDL

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pemertmaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Laku
Kode Akun	: 425013 - Pemertmaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Laku
Jumlah Setoran	: 140.000 (IDR)
Keterangan	: Pertanggungjawaban Uang Transport Kegiatan TA 2022 an. Adh Imamita



### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 82923P04093700
Tanggal Billing	: 04-05-2023 09:12:25
Tanggal Kedaluwarsa	: 11-05-2023 09:12:25
Tanggal Bayar	: 04-05-2023 10:39:46
Bank/Pos/Pinnek Bayar	: BANK BAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Pajak Komodor
Kementerian/Lembaga	: 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: 10 - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 400029 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNGPINANG
Total Diturunkan	: 331.000 (IDR)
Terbilang	: Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 230504749993
NTPN	: 5241D55DF018A609

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pembayaran Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Pembayaran Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 331.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Karyawan TA 2022 an.Deddy Nopriadi



### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820200703781020
Tanggal Billing	: 03-07-2023 17:45:04
Tanggal Kedaluwarsa	: 03-07-2023 17:45:04
Tanggal Bayar	: 03-07-2023 17:46:14
Bank/Pos/Instansi Bayar	: BANK BAYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Pajak Rendah
Kementerian/Lembaga	: KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: 10 - Badan Pendidikan Hukum Nasional
Setoran Kerja	: 408829 - DANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNGPINANG
Total Dikotor	: 231.000 (IDR)
Terbilang	: Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu (IDR)
Status	: Salah Dibayar
NTB	: 230703215713
NTPN	: 63B460N95VBBN045

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pembayaran Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lulu
Kode Akun	: 42012 - Pembayaran Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lulu
Jumlah Setoran	: 231.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022 an. Dedy Nopriadi



### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 020236802290203
Tanggal Billing	: 02-06-2023 09:07:32
Tanggal Kedaluwarsa	: 09-06-2023 09:07:32
Tanggal Bayar	: 02-06-2023 11:26:01
Bank/Pos/Instansi Bayar	: BANK RASYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Pajak Bumi
Kementerian/Lembaga	: 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: 10 - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 400029 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNGPINANG
Total Dasar	: 232.000 (IDR)
Terdang	: Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTN	: 239802506726
NTPN	: 2037130378558MB1

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pembayaran Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425013 - Pembayaran Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 232.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022 an. Dedy Nopriadi



### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 8202300040094417
Tanggal Billing	: 04-05-2023 09:15:21
Tanggal Kelakewatan	: 11-05-2023 09:15:21
Tanggal Bayar	: 04-05-2023 10:40:31
Bank/Proof Intech Bayar	: BANK BAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Pajak Rendah
Kementerian/Lembaga	: 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Kerja 1	: 10 - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Setoran Kerja	: 400020 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNGPINANG
Total Dasar	: 210.000 (IDR)
Terkalang	: Dua Ratus Sepuluh Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 230304758289
NTPN	: 8107061012464688

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penorimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 42512 - Penorimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 210.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022 an.Dest Saputra



### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 8202302040044004
Tanggal Billing	: 04-05-2023 09:17:00
Tanggal Kedaluwarsa	: 11-05-2023 09:17:00
Tanggal Bayar	: 04-05-2023 10:42:04
Bank/Prov/Instansi Bayar	: BANK BAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Pajak Sumbar
Kementerian/Lembaga	: 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: 10 - Badan Pertimbangan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 400029 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNGPINANG
Total Dasar	: 210.000 (IDR)
Terkalang	: Dua Ratus Sepuluh Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 230504750430
NTPN	: P7P0040YV3PFT75E

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pembiayaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 62012 - Pembiayaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 210.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022 an.Deni Sulianti





### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 020230509623023
Tanggal Billing	: 09-05-2023 08:58:39
Tanggal Kedaluwarsa	: 16-05-2023 08:58:39
Tanggal Bayar	: 09-05-2023 09:24:22
Bank/Instansi/Bank Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Pagar Rembulan
Kementerian/Lembaga	: 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: JP - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Status Kerja	: 400029 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNGPINANG
Total Debet	: 210.000 (IDR)
Terbilang	: Dua Ratus Sepuluh Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTN	: 230509096438
NTPN	: E77E23CEFA70473

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pemertasaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Pemertasaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 210.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022 an.Kiyati



### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230504095583
Tanggal Billing	: 04-05-2023 09:19:39
Tanggal Kedaluwarsa	: 11-05-2023 09:19:39
Tanggal Bayar	: 04-05-2023 10:43:04
Bank/Pos/Instansi Bayar	: BANK BAYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Pajak Posisional
Kementerian/Lembaga	: <b>013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKEASASI MANUSIA RI</b>
Unit Eselon I	: <b>10 - Badan Pembinaan Hukum Nasional</b>
Satuan Kerja	: <b>400029 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNGPINANG</b>
Total Dibeat	: 210.000 (IDR)
Terbilang	: Dua Ratus Sepuluh Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 2303041730006
NTPN	: EEC423C1FAT2G7QV

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pembayaran Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425312 - Pembayaran Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 210.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022 an.Elydewati



### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 821230508912792
Tanggal Billing	: 09-05-2023 08:58:37
Tanggal Keluarwarsa	: 16-05-2023 08:58:37
Tanggal Bayar	: 09-05-2023 09:23:48
Bank/Pos/Instansi Bayar	: BANE RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Pagar Bendah
Kementerian/Lembaga	: 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKEASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: 10 - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 400029 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNGPINANG
Total Dibayar	: 210.000 (IDR)
Terbilang	: Dua Ratus Sepuluh Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 230509095284
NTPN	: D1A8B2G4VGARLU5

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pembayaran Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425012 - Pembayaran Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 210.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022 on Duty Melvia



### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820330823654640
Tanggal Billing	: 23-08-2023 08:31:11
Tanggal Kedaluwarsa	: 30-08-2023 08:31:11
Tanggal Bayar	: 23-08-2023 10:21:18
Bank/Prod/Instech Bayar	: BANK BAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Fajar Nomidin
Kementerian/Lembaga	: 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: 10 - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 408829 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNGPINANG
Total Diatur	: 220.000 (IDR)
Terbilang	: Dua Ratus Dua Puluh Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 230823328179
NTPN	: 725CEBN9VRJFE1D7G

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pemertasaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lela
Kode Akun	: 425912 - Pemertasaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lela
Jumlah Setoran	: 220.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022 an. Paraf Jusaidi



## BUKTI PENERIMAAN NEGARA

### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 81023050MG24037
Tanggal Billing	: 09-05-2023 09:00:37
Tanggal Kedaluwarsa	: 16-05-2023 09:00:37
Tanggal Bayar	: 09-05-2023 09:22:52
Bank/Pos/Instansi Bayar	: BANK RAYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajah Setor/Wajah Bayar	: Fajar Domsih
Kementerian/Lembaga	: 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Dasar 1	: 10 - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 400029 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG
Total Debetur	: 210.000 (IDR)
Terbilang	: Dua Ratus Sepuluh Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 230509093901
NTPN	: FFDFDUBELAPCUN5

### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penertaman Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425013 - Penertaman Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 210.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022 an-Polres Anjarsari



## BUKTI PENERIMAAN NEGARA

### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 0202305040095095
Tanggal Billing	: 04-05-2023 09:21:09
Tanggal Kelakarnya	: 11-05-2023 09:21:09
Tanggal Bayar	: 04-05-2023 10:43:58
Bank/Pos/Instansi Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Fajar Romadan
Kementerian/Lembaga	: 02J - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: JP - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 400029 - KANTOR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNGPINANG
Total Duitar	: 210.000 (IDR)
Terdibang	: Dua Ratus Sepuluh Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 230504751200
NTPN	: 9DC5A55DF018A87E

### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pemertamaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 435012 - Pemertamaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 210.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022 an.Garawati



### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 800230620501907
Tanggal Billing	: 20-06-2023 14:48:19
Tanggal Kedaluwarsa	: 27-06-2023 14:48:19
Tanggal Bayar	: 20-06-2023 15:23:39
Bank/Pos/Pintech Bayar	: BANK BARYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Pajak Rumahan
Kementerian/Lembaga	: 012 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Kerja I	: 10 - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 400029 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNGPINANG
Total Dasar	: 210.000 (IDR)
Terbilang	: Dua Ratus Sepuluh Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 230620532231
NTPN	: 705FARURELA34LSJ

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penarikan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425012 - Penarikan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 210.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022 a.n Gunawan



## BUKTI PENERIMAAN NEGARA

### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230802209507
Tanggal Billing	: 03-08-2023 09:08:41
Tanggal Kelulusan	: 09-08-2023 09:08:41
Tanggal Bayar	: 02-08-2023 11:26:30
Bank/Pos/Instansi Bayar	: BANK RASYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Fajar Hamidah
Kementerian/Lembaga	: 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Kerja I	: JP - Badan Pertimbangan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 400029 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNGPINANG
Total Debet	: 218.000 (IDR)
Terbilang	: Dua Ratus Sepuluh Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 230002500942
NTPN	: 0E1DC80BE1F666A8

### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pemotongan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425012 - Pemotongan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 218.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022 no. Gunung





### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230504096028
Tanggal Billing	: 04-05-2023 09:23:04
Tanggal Kedaluwarsa	: 11-05-2023 09:23:04
Tanggal Bayar	: 04-05-2023 10:44:47
Bank/Pos/Instansi Bayar	: BANK BAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Fajar Romadhon
Kementerian/Lembaga	: <b>013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKE ASASI MANUSIA RI</b>
Unit Eselon I	: <b>10 - Badan Pembinaan Hukum Nasional</b>
Satuan Kerja	: <b>400029 - KANTOR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNGPINANG</b>
Total Duefor	: 920.000 (IDR)
Terbilang	: Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 230504731373
NTPN	: 5708948995PCTBRG

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pemertama Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Pemertama Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 920.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022 an.Hapurno Adhinugroho



### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230509024329
Tanggal Billing	: 09-05-2023 09:00:32
Tanggal Kedaluwarsa	: 16-05-2023 09:00:32
Tanggal Bayar	: 09-05-2023 09:21:17
Bank/Pos/Financi Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Pajak Bandara
Kementerian/Lembaga	: 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: 10 - Badan Peradilan Hakam Nasional
Satuan Kerja	: 400029 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG
Total Debet	: 210.000 (IDR)
Tertulang	: Dua Ratus Sepuluh Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 230509093502
NTPN	: 7400A0N3EAHEV6H

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pemertmaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425012 - Pemertmaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 210.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022 an. Herliana Husata



### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 02020504107547
Tanggal Billing	: 04-05-2023 09:56:44
Tanggal Kedaluwarsa	: 11-05-2023 09:56:44
Tanggal Bayar	: 04-05-2023 10:45:54
Bank/Pos/Instansi Bayar	: BANK BARYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Fajar Romadin
Kementerian/Lembaga	: 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: 10 - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 000029 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNGPINRANG
Total Diatur	: 100.000 (IDR)
Terbilang	: Seratus Ratus Puluh Ratus Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 230504751597
NTPN	: 71FED618E16K4JCR

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pemertasaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Pemertasaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 100.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022 ex.Hugo Muarti



### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 020230620502494
Tanggal Billing	: 26-06-2023 14:50:39
Tanggal Kelahiran	: 27-06-2023 14:50:39
Tanggal Bayar	: 20-06-2023 15:23:06
Bank/Pos/Instansi Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Fajar Romidan
Kementerian/Lembaga	: 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: 10 - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 400029 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNGPINANG
Total Diatur	: 100.000 (IDR)
Terbilang	: Seratus Ratus Puluh Delapan Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTR	: 230620532039
NTPN	: ED64D48VVSITTMEL

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pemertuan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Pemertuan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 100.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022 a.n Hugo Mauri A



### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 8202308023225911
Tanggal Billing	: 02-08-2023 10:40:09
Tanggal Kedaluwarsa	: 09-08-2023 10:40:09
Tanggal Bayar	: 02-08-2023 11:29:12
Bank/Pos/Instansi Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Fajar Simandj
Kementerian/Lembaga	: 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Kerja	: JP - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 800029 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNGPINANG
Total Debet	: 100.000 (IDR)
Terbilang	: Seratus Ratus Puluh Ribu Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTR	: 230002507425
NIPN	: 5781011NPM1830CN

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pemertaman Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Laku
Kode Akun	: 425812 - Pemertaman Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Laku
Jumlah Setoran	: 100.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022 an. (Bag)



### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 020230504116297
Tanggal Billing	: 04-05-2023 10:21:30
Tanggal Kedaluwarsa	: 11-05-2023 10:21:30
Tanggal Bayar	: 04-05-2023 10:46:08
Bank/Pos/Instansi Bayar	: BANK RASYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Fajar Romadon
Kementerian/Lembaga	: RIJ - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKE AGAMA MANDIA RI
Unit Eselon I	: JP - Badan Pertinaan Hukum Nasional
Selatan Kerja	: 400029 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNGPINANG
Total Dikawatir	: 363.000 (IDR)
Tertidatir	: Tipe Retur Esom Palak Tipe Riba (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 230304731915
NTPN	: 0FDEFGURILAK4S29

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 363.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022-an Kamal Putra



## BUKTI PENERIMAAN NEGARA

### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 800306020500134
Tanggal Billing	: 26-06-2023 14:54:21
Tanggal Endeorsemen	: 27-06-2023 14:54:21
Tanggal Bayar	: 28-06-2023 15:22:34
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Pagar Ramadan
Kementerian/Lembaga	: 012 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: 10 - Badan Perhimpunan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 400029 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNGPINANG
Total Daetor	: 363.000 (IDR)
Tertimbang	: Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 210620531913
NTPN	: 20829489V5ITN62

### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 363.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022 s.d. Kamal Petra Tamris



### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230002324714
Tanggal Billing	: 03-08-2023 10:36:16
Tanggal Kedatwaatna	: 03-08-2023 10:36:16
Tanggal Bayar	: 02-08-2023 11:28:29
Bank/Instansi/Instansi Bayar	: BANE RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nomor Wajib Setor/Wajib Bayar	: Pajak Bumi dan
Kemesterian/Lembaga	: 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: JP - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 400029 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNGPINANG
Total Debetur	: 364.000 (IDR)
Terdilang	: Tipe Batas Eksem Pindah Eksem Riba (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTH	: 230002507336
NTPN	: 3AF9148VY5ORAF7A

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pembayaran Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Pembayaran Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 364.000 (IDR)
Keterangan	: Pembiayaan Uang Transport Kegiatan TA 2022 no. Kami





### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230504118917
Tanggal Billing	: 04-05-2023 10:22:53
Tanggal Kedaluwarsa	: 11-05-2023 10:22:53
Tanggal Bayar	: 04-05-2023 10:47:40
Bank/Prod/Instansi Bayar	: BANK RASYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Fajar Hamidah
Kementerian/Lembaga	: 813 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: 10 - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 400029 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNGPINANG
Total Dibeat	: 446.000 (IDR)
Terbilang	: Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTH	: 238504752127
NTPN	: FE4FD6UHEL6K4SL1

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pembayaran Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 42511 - Pembayaran Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 446.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Register TA 2022 as.MAli Bodary



### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 801030620506388
Tanggal Billing	: 20-06-2023 15:07:54
Tanggal Kelakarnya	: 27-06-2023 15:07:54
Tanggal Bayar	: 20-06-2023 15:21:48
Bank/Pran/Pintech Bayar	: BANK BARYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Pajak Ramadan
Kementerian/Lembaga	: 012 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: 10 - Badan Pendidikan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 408829 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNGPINANG
Total Diatur	: 446.000 (IDR)
Terdibang	: Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 230620531655
NTPN	: 04F6B7QLUFSFHQ8K

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pemertasaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Pemertasaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 446.000 (IDR)
Eeterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022 a.n M. Ali Badary



### BUKTI PENTRIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 82020002330010
Tanggal Billing	: 02-08-2023 10:52:00
Tanggal Kelulusan	: 02-08-2023 10:52:00
Tanggal Bayar	: 02-08-2023 11:29:51
Bank/Pos/Instansi Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Fajar Simandoh
Kementerian/Lembaga	: 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: JP - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 400029 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNGPINANG
Total Dibeat	: 448.000 (IDR)
Terbilang	: Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 230002347972
NTPN	: 998DC6N9VREPNKJ2

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pemotretan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425012 - Pemotretan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 448.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022 an. Ali Sadary



## BUKTI PENERIMAAN NEGARA

### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: E20230509020204
Tanggal Billing	: 09-05-2023 09:08:09
Tanggal Kedaluwarsa	: 16-05-2023 09:08:09
Tanggal Bayar	: 09-05-2023 09:15:49
Bank/Pos/Instansi Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Pajak Pemisahan
Kementerian/Lembaga	: 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: 10 - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 400029 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNGPINANG
Total Debet	: 110.000 (IDR)
Terbilang	: Dua Ratus Sepuluh Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 230509094003
NTPN	: EE26061QUQKD000G

### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pembayaran Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lulus
Kode Akun	: 425812 - Pembayaran Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lulus
Jumlah Setoran	: 110.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022 an M. Balho Pratama



### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 82020004117794
Tanggal Billing	: 08-05-2023 10:24:58
Tanggal Kedaluwarsa	: 11-05-2023 10:24:58
Tanggal Bayar	: 04-05-2023 10:48:38
Bank/Pos/Instansi Bayar	: BANK RABYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Fajar Humada
Kementerian/Lembaga	: 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKEASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: 10 - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 400829 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG
Total Dasar	: 210.000 (IDR)
Terdikang	: Dua Ratus Sepuluh Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTN	: 230304752311
NTPN	: 5099948VVSFETTS12

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pembayaran Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425913 - Pembayaran Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 210.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022 an.M.Yaharabaya



### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 8262304020506806
Tanggal Billing	: 20-06-2023 15:10:29
Tanggal Kedaluwarsa	: 27-06-2023 15:10:29
Tanggal Bayar	: 20-06-2023 15:21:16
Bank/Pos/Pintech Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Pajak Rumahan
Kementerian/Lembaga	: DJJ - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: ID - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 408629 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG
Total Due	: 210.000 (IDR)
Terbilang	: Dua Ratus Sepuluh Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 220620531577
NTPN	: A1A0B61QUONMNLN

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penertaman Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penertaman Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 210.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022 a.n M. Yudi Baharja



### BUKTI PENTRIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: E2023090213908
Tanggal Billing	: 02-08-2023 10:53:19
Tanggal Kelatwatna	: 02-08-2023 10:53:19
Tanggal Bayar	: 02-08-2023 11:30:30
Bank/Pos/Instansi Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nomor Wajib Setor/Wajib Bayar	: Pajak Bumi dan
Komunikasi/Lembaga	: 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Daerah	: JP - Badan Pemerintahan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 400029 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNGPINANG
Total Debet	: 210.000 (IDR)
Terdibayar	: Dns Rata Sepuluh Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTH	: 230002507798
NTPN	: F380361QUQT44L10

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pembayaran Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425012 - Pembayaran Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 210.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022 no. M.Yulandawaty



## BUKTI PENERIMAAN NEGARA

### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 829230504118235
Tanggal Billing	: 04-05-2023 10:26:10
Tanggal Kedaluwarsa	: 11-05-2023 10:26:10
Tanggal Bayar	: 04-05-2023 10:49:28
Bank/Pos/Instansi Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Pajak/Wajib Bayar	: Fajar Samudra
Kementerian/Lembaga	: 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: 10 - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 408829 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNGPINANG
Total Dasar	: 258.000 (IDR)
Terbilang	: Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 288504752700
NTPN	: A05C655DF01RATU7

### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pemertamaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 625913 - Pemertamaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 258.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022 an.Maarkahroni





### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230504120443
Tanggal Billing	: 04-05-2023 10:32:04
Tanggal Kadaluwarsa	: 11-05-2023 10:32:04
Tanggal Bayar	: 04-05-2023 10:54:14
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Fajar Romadon
Kementerian/Lembaga	: 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: 10 - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 40000 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG
Total Debetur	: 250.000 (IDR)
Terbilang	: Dua Ratus Lima Puluh Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 210004754074
NTPN	: B77303C1FAT2H03R

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425012 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 250.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022 an.Musabikromi (2)



### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230620507208
Tanggal Billing	: 20-06-2023 15:12:18
Tanggal Kedaluwarsa	: 27-06-2023 15:12:18
Tanggal Bayar	: 20-06-2023 15:20:40
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK BAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Pajak Rumahan
Kementerian/Lembaga	: 012 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: 10 - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 400029 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG
Total Diatur	: 8.000 (IDR)
Tertalang	: Delapan Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
<b>NTB</b>	: 230620531444
<b>NTPN</b>	: D063D7QLUFSFK2B

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pemertaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425012 - Pemertaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 8.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022 a.n. Maskiarni



### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230902339962
Tanggal Billing	: 03-08-2023 10:54:08
Tanggal Kedaluwarsa	: 09-08-2023 10:54:08
Tanggal Bayar	: 02-08-2023 11:31:09
Bank/Pos/Instansi Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Fajar Sumidha
Kementerian/Lembaga	: 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: JP - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 400029 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG
Total Debet	: 258.000 (IDR)
Terdahang	: Duit Akras Lima Puluh Delapan Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 230002500090
NTPN	: 7FDD92G4VGJGLAI

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penunjaman Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425012 - Penunjaman Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 258.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022 no. Haurakroni



### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 020308034018174
Tanggal Billing	: 23-08-2023 08:53:06
Tanggal Kedaluwarsa	: 30-08-2023 08:53:06
Tanggal Bayar	: 23-08-2023 08:54:23
Bank/Pos/Instansi Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Fajar Hamidah
Kementerian/Lembaga	: 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: 10 - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Setoran Kerja	: 400029 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG
Total Dibayar	: 258.000 (IDR)
Terbilang	: Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 230823295526
NTPN	: 0CB0448VNS0V1.HHT

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pembayaran Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Laku
Kode Akun	: 415013 - Pembayaran Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Laku
Jumlah Setoran	: 258.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2023 an.Masrahkromi



### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230912053043
Tanggal Billing	: 13-09-2023 14:56:27
Tanggal Kelakarnya	: 19-09-2023 14:56:27
Tanggal Bayar	: 13-09-2023 14:59:25
Bank/Instansi/Bank Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Pajak Rendah
Kemampuan/Lembaga	: 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: 10 - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Setoran Kerja	: 400029 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNGPINANG
Total Diatur	: 250.000 (IDR)
Terbilang	: Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 230912761459
NTPN	: D93E73C1FB97E208

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penarikan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Laku
Kode Akun	: 425811 - Penarikan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Laku
Jumlah Setoran	: 250.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2023 an.Mauritroni



### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Ekode Billing	: 020231012525406
Tanggal Billing	: 13-10-2023 08:44:06
Tanggal Kedaluwarsa	: 19-10-2023 08:44:06
Tanggal Bayar	: 13-10-2023 08:53:24
Bank/Pos/Pintech Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Fajar Sumidha
Kementerian/Lembaga	: 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: 10 - Badan Pendidikan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 400020 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNGPINANG
Total Diatur	: 200.000 (IDR)
Terbilang	: Dua Ratus Empat Puluh Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 231012382719
NTPN	: C140P61QUR3CJ500

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penertaman Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Ekode Akun	: 425012 - Penertaman Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 200.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2023 an.Menindakrasi



### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 020200504110708
Tanggal Billing	: 04-05-2023 10:27:23
Tanggal Kedaluwarsa	: 11-05-2023 10:27:23
Tanggal Bayar	: 04-05-2023 10:50:23
Bank/Pos/Potret Bayar	: BANK BAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Fajar Romidon
Kementerian/Lembaga	: #13 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKE ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: 10 - Badan Pertimbangan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 400029 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNGPINANG
Total Tagihan	: 210.000 (IDR)
Terdibang	: Dua Ratus Sepuluh Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTR	: 230504713007
NTPN	: A52648N3EABCUUDL

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pemotretan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425013 - Pemotretan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 210.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022 an.Meliana



### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820210802331135
Tanggal Billing	: 01-08-2023 10:55:01
Tanggal Kadaluwarsa	: 09-08-2023 10:55:01
Tanggal Bayar	: 02-08-2023 11:51:46
Bank/Pro/Potensi Bayar	: BANK BAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Fajar Simanin
Kementerian/Lembaga	: 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: 10 - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 400020 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNGPINANG
Total Duetar	: 690.000 (IDR)
Terbilang	: Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 230002500245
NTPN	: DGA1955D0BANN1J3

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pemertaman Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Pemertaman Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 690.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022 an. Nural Analia





## BUKTI PENERIMAAN NEGARA

### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 82020509020028
Tanggal Billing	: 09-05-2023 09:09:19
Tanggal Kedaluwarsa	: 16-05-2023 09:09:19
Tanggal Bayar	: 09-05-2023 09:14:48
Bank/Pos/Instansi Bayar	: BANK BAKYAT INDONESIA
Chanel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Fajar Ramadhan
Kementerian/Lembaga	: 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Kerja I	: JP - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 400029 - KANTOR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNGPINANG
Total Denda	: 210.000 (IDR)
Terbilang	: Dua Ratus Sepuluh Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 230509093755
NTPN	: 8A03781QUQKID9182

### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pemertmaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Pemertmaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 210.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022 an.Petaka Petatar



### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 82020504119449
Tanggal Billing	: 04-05-2023 10:29:03
Tanggal Kelulusan	: 11-05-2023 10:29:03
Tanggal Bayar	: 04-05-2023 10:51:16
Bank/Pos/Instansi Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Fajar Romadhon
Kementerian/Lembaga	: 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: 10 - Badan Pertimbangan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 400029 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG
Total Denda	: 210.000 (IDR)
Terbilang	: Dua Ratus Sepuluh Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 230504753333
NTPN	: 5E5J88N3EABCLV4P

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pembiayaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Pembiayaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 210.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022 an.Rapun Tria



### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230004119790
Tanggal Billing	: 04-05-2023 10:30:07
Tanggal Kedaluwarsa	: 11-05-2023 10:30:07
Tanggal Bayar	: 04-05-2023 10:52:07
Bank/Pos/Pinjamh Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Pajak Romahon
Kementerian/Lembaga	: 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKE ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: 10 - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 400029 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG
Total Dasar	: 210.000 (IDR)
Terdang	: Dua Ratus Sepuluh Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 230504733583
NTPN	: 654FD0N9V83T9VTE

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pemertaman Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 420112 - Pemertaman Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 210.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022 an Sistem



### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: K20230504110002
Tanggal Billing	: 04-05-2023 10:31:06
Tanggal Kedaluwarsa	: 11-05-2023 10:31:06
Tanggal Bayar	: 04-05-2023 10:53:29
Bank/Pos/Instansi Bayar	: BANK BARYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Pajak Bumi dan Bangunan
Kementerian/Lembaga	: RIJ - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKE ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: JP - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Selasa Kerja	: 400029 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNGPINANG
Total Duitar	: 223.000 (IDR)
Terbilang	: Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 230304753812
NTPN	: A2458204VGMJY01

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pemertanian Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Pemertanian Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 223.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022 an-Wahyu Santia



## BUKTI PENERIMAAN NEGARA

### Data Pembayaran Tagihan :

Ekode Billing	: 820230620307533
Tanggal Billing	: 20-06-2023 15:14:08
Tanggal Kelakarnya	: 27-06-2023 15:14:08
Tanggal Bayar	: 20-06-2023 15:19:59
Bank/Pos/Pintech Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Pajak Resident
Kementerian/Lembaga	: 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: 10 - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 400829 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNGPINANG
Total Diatur	: 223.000 (IDR)
Terbilang	: Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 230620331375
NTPN	: BD9773C1FB088BCD

### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penyerahan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Ekode Akun	: 425012 - Penyerahan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 223.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Uang Transport Kegiatan TA 2022 s.d. Wahyu Setanto



### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 8202308023311324
Tanggal Billing	: 02-08-2023 10:55:04
Tanggal Kadaluarsa	: 09-08-2023 10:55:04
Tanggal Bayar	: 02-08-2023 11:02:17
Bank/Pos/Finleach Bayar	: BANK BAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Pajak Rumah
Kementerian/Lembaga	: 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: 10 - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 400029 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNGPINANG
Total Debet	: 224.000 (IDR)
Terbilang	: Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
<b>NTB</b>	: 230802500360
<b>NTPN</b>	: 84C3648VY50H4LS4

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pembayaran Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 820912 - Pembayaran Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 224.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Utang Transport Kegiatan TA 2022 an. Wahyu Setanto



## BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

### Data Pembayaran Tagihan

<b>Kode Billing</b> 702311160076567	<b>Pembuat Billing</b> NOVARIA AYU PRATIWI	<b>NTPN</b> 4DBC66QT6O8AAM8N
<b>Tanggal Billing</b> 16-11-2023 08:45:19	<b>Kementerian/ Lembaga</b> 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	<b>NTB</b> 231116557138
<b>Tanggal Kadaluwarsa</b> 23-11-2023 08:45:19	<b>Unit Eselon I</b> 10 - BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	<b>Tanggal Bayar</b> 16-11-2023 08:48:05
<b>Status</b> Sudah dibayar	<b>Satuan Kerja</b> 408829 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	<b>Bank/ Pos Bayar</b> BANK RAKYAT INDONESIA
<b>Keterangan</b> Pengembalian Transport an.Hugo SPM No:00001 (Temuan Itjen)		<b>Kanal Bayar</b> 7015 - Mobile Banking

### Detil Pembayaran Tagihan

Wajib Bayar	Uraian	Akun	Jumlah Setoran
<b>BPG 017 Kanwil Hukum dan HAM Tanjung Karang 10</b> NPWP 000357848324000	<b>Kab/ Kota KOTA BANDAR LAMPUNG</b> Periode NOPEMBER 2023	<b>524111</b> 01310BF.4841BDD	<b>220.000,00</b>

**Total Disetor**

**IDR 220.000,00**

( Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah )

#### Ketentuan Pembayaran Tagihan

- Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara.
- Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
- Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkeenaan.
- Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkeenaan.
- Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
- Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
- Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
- Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui <https://hai.kemenkeu.go.id/>.



## BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

## Data pembayaran tagihan :

Kode Billing	: 700230408333009
Tanggal Billing	: 06-04-2023 09:17
Tanggal Kelakarnya	: 13-04-2023 23:59
Tanggal Bayar	: -
Bank/Pos Bayar	: -
Channel Bayar	: -
Nama Penerima	: Bendahara Pengeluaran
Kementerian / Lembaga	: DITJEN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: TD-BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Satuan Kerja	: 408029-KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG
Total Dianggap	: 250.000 (Rp)
Terbilang	: Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah (Rp)
Status	: BELUM TERBAYAR
NTPN	: -
NTB	: -
KPHU	: BANDAR LAMPUNG
Program	: Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
Sumber Dana	: RM
Cara Penarikan	: RM
Register	: 00000001
Kemungkinan	: Kantor Daerah
Keterangan	: Pengembalian Perijinan Dinas DPM No 0000

## Detail pembayaran tagihan :

Wajib Bayar	: Bendahara
	: Bayaran: 4841 Penyelenggaraan Peradilan dan Pemertahanan Hakam di Wilayah
Unit	: Thana: 0001 Kantor dan Perwakilan Kantor Pengadilan
	: Periode: 04/2023 s.d 04/2023
Revisi	: 124171 - Biaya Pengalihan Dinas Baru
Jumlah Bayar	: 250.000 (Rp)

## Keterangan pembayaran tagihan :

1. Nomor Transaksi Penarikan Tagihan (NTPN) adalah informasi yang tidak terdapat pada bukti melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran harga dapat dilakukan sebelum terdapatnya file maka terdapatnya file invoice, billing or nota terbit, dan tidak diterima oleh melakukan pengisian data pembayaran terbit.
3. Pembayaran lain-jenis transaksi dilakukan paling lambat tanggal 01 (satu) bulan kemudian.
4. Pembayaran atas kata data pemohon dan tanggapan dari kas dilakukan paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan kemudian.
5. Pembayaran pengembalian biaya atau anggaran belanja dilakukan menggunakan Billing Perencanaan sehingga pembayaran pengembalian biaya atau anggaran yang telah menggunakan DPM.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti bank/pos/efek bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan via banking agent dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Fasilitas bahwa tidak dapat pembayaran akan dilakukan di pusat dengan cara yang tertera. Kemudian terbit bukti dan melakukan pembayaran. Apabila terjadi keterlambatan data, maka apabila kode billing yang tidak masalah untuk reset.
8. Apabila tidak mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran dan membutuhkan bantuan, hubungi call center Kas DPM di 1428 dan juga dapat melalui https://portal.kemerkas.go.id





### Transaksi Berhasil

Tanggal: 06-Apr-2023 09:27:00 WIB

Referensi: 57124713820

Saluran Dana: KIRYADA KIRI PRATNY  
(0000 444 444 000)

BLACS: Perumahan Nagari Pulau  
Pulau  
KELURAHAN  
KELURAHAN

MTN: 10402010000000000000

MTD: 20000000000000000000

MTA: 275578

Tanggal dan  
Waktu: 06-Apr-2023 09:27:00

Tanggal Buku: 06-April 2023

Kode Billing: 10020000000000000000

Nama Muka  
Buku: Bendahara Pengeluaran

Komponen  
Salahsaja: 073

Unit Kerja: 10

Salahsaja: 400000

Revisi: Rp250.000

Salahsaja: Rp0

**Total Rp250.000**

Informasi lebih lanjut mengenai layanan kami, kunjungi [www.bri.co.id](http://www.bri.co.id) atau hubungi [15888](tel:15888).

© 2023 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.

BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA	KEMENTERIAN KEUANGAN
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	

Data Pembayaran:

Tanggal Jam Bayar : 15/11/2023 09:11:19 NTB : 231115133176  
Tanggal Buku : 15/11/2023 NTPN :  
: 06ECE2CPNJC2OC04  
Kode Cab. Bank : 0374 STAN : 301111

Data Setoran:

Kode Billing : 702311150071812  
Nama Wajib Bayar : BPG 017 Kanwil Hukum dan HAM Tanjung Karang 10  
Kementerian/Lembaga : 013  
Unit Eselon I : 10  
Satuan Kerja : 408829  
Jumlah Setoran : Rp. 1,380,000.00 Mata Uang : IDR  
Terbilang : SATU JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH  
Uraian Pembayaran :

*This is a computer generated message and requires no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

Validasi Bank

BPG 017 Kanwil Hukum dan HAM Tanjung Karang 10 0000 0000 1380000.00 15112023  
15112023 06ECE2CPNJC2OC04 231115133176 301111



## BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

### Data pembayaran tagihan:

Kode Billing	: 705200512000022
Tanggal Billing	: 12-05-2023 12:28
Tanggal Kadaluarsa	: 19-05-2023 23:59
Tanggal Bayar	: 12-MAY-23 12:27:42.1671110 PM
Bank/Pos Bayar	: BANK RASYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Penerima	: Bendahara Pengeluaran
Kementerian / Lembaga	: DTK-KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Kerja I	: TD-BADAN PEMBAYARAN HUKUM NASIONAL
Satuan Kerja	: 40823-KAWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANGUNG KARANG
Total Duitier	: 250.000 (Rp)
Terbayar	: Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah (Rp)
Status	: TERBARU
NTN	: 093032CM81K0008
MTN	: 230512332156
SPM	: BANDAR LAMPUNG
Program	: Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
Sumber Dana	: RRI
Cara Pemakaian	: RRI
Register	: 00000001
Kewenangan	: Kantor Daerah
Keterangan	: Pengembalian Transport Pembinaan Desa Kadasterum Lembang SPM No 8 th. Satu Duitier

### Detail pembayaran tagihan:

Wali Area	: Bendahara
	: Karyawan - 4041-Pengembangan Kualitas dan Peningkatan Hukum di Masyarakat
Unit	: Kantor - 40823-Kawil dan Pembinaan Eksternak Masyarakat
	: Pejabat - 40823-40823003
Akun	: 524111 - Biaya Perjalanan Dinas Luar
Saldo Salinan	: 230000.000

### Keterangan pembayaran tagihan:

1. Nomor Transaksi Pembayaran Negara (NTN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran tanpa dapat dibatalkan sebelum kadaluarsa. Bila masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengajuan data pembayaran kembali
3. Pembayaran akan diterima setelah dilakukan pengisian kembali tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
4. Pembayaran dan saldo dana pembiayaan dan anggaran yang terdapat pada billing yang berlaku tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
5. Pembayaran pengembalian biaya atau anggaran belanja dilakukan menggunakan Billing PerintahMonev sedangkan pembukuan menggunakan tagihan atau anggaran yang telah menggunakan SPM
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti transfer bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan billing pembayaran yang diterbitkan dan collection agent
7. Fasilitas billing data detail pembayaran akan dibagikan ke email dengan cara yang berbeda, rekening billing Anda dan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidaksesuaian data, bill dapat tidak billing yang Anda masukkan tidak sesuai
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran dan membutuhkan bantuan, hubungi call center 142-SPP @ 14000 dan juga dapat melalui https://www.kemendagri.go.id



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 830231026236203  
 Tanggal Billing : 26-10-2023 09:05:32  
 Tanggal Kelahiran : 02-11-2023 09:05:32  
 Tanggal Bayar : -  
 Bank/Pos/Instech Bayar : -  
 Channel Bayar : -  
 Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Kaswil Bengkulu  
 Kementerian/Lembaga : 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Eselon I : 80 - Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : 499177 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU  
 Total Dasar : 100.000 (IDR)  
 Terbilang : Seratus Ribu (IDR)  
 Status : Belum Dibayar  
 NTB : -  
 NTPN : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penarikan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu  
 Kode Akun : 425012 - Penarikan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu  
 Jumlah Setoran : 100.000 (IDR)  
 Keterangan : Pengambilan Biaya Penghapusan Tahun 2022 an Tahun awal dengan SP  
 WA UM 03.07.2025 (Taman BPK)

Kantor : PT POS INDONESIA (PERSERO)  
 Kantor : KANTOR BENGKULU LINGKARUM 2022A  
 573670763  
 TANDA TERIMA  
 Setoran Pajak (PNP Billing)  
 Tanggal : 27-10-2023 16:07:29  
 No. Resi : 300394-03/2023/002508 | Pelanggan : 97120588  
 Tanggal Buku : 30-10-2023  
 Kode Cabang Pos : 03000  
 NIP : 0258802412  
 NTPN : 8002000000000000  
 STN : 00012  
 Waktu Transaksi : 27-10-2023 16:07:29  
 Kode Billing : 830231026236203  
 Nama Wajib Setor/Bendahara Kaswil Bengkulu  
 E / L : 013  
 Unit Eselon : 10  
 Kode Satker : 499177  
 Jumlah Setoran : Rp. 100.000 | Mata Uang : IDR  
 Terbilang : (Seratus ribu rupiah)  
 Tanggal :  
 NTPN : 01.000.400.2-005.000 s.d PT Pos Indonesia  
 KANTOR POS  
 PT POS INDONESIA



## Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	14-08-2023
Waktu Transaksi	10:10:39 WIB
Tanggal Buku	14/08/23
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	000000562384
STAN	185735
Kode Billing	B20230814642766
Nama Wajib Bayar	BENDAHARA KANWIL BENGKULU
Kementerian / Lembaga	013
Unit Eselon I	10
Satuan Kerja	409177
Nominal Tagihan	100000
Mata Uang	IDR
NTPN	76CF261QUQTFSCIE
Fee Bank	0
Total Pembayaran	100.000,00
Terbilang	seratus ribu rupiah
Nomor Rekening	0901054725

## Status

Ditjen Anggaran  
Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	31/10/23
Waktu Transaksi	15:54:59 WIB
Tanggal Buku	01/11/23
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	000000341557
STAN	122338
Kode Billing	820231031882185
Nama Wajib Bayar	BENDAHARA KANWIL BENGKULU
Kementerian / Lembaga	013
Unit Eselon I	10
Satuan Kerja	409177
Nominal Tagihan	310.000,00
Mata Uang	IDR
NTPN	E9D0F55DF0HILOE9
Fee Bank	0
Total Pembayaran	310.000,00
Terbilang	tiga ratus sepuluh ribu rupiah



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820231026239348
Tanggal Billing	: 26-10-2023 09:16:39
Tanggal Kodakwarsa	: 02-11-2023 09:16:39
Tanggal Bayar	: -
Bank/Pos/Pintech Bayar	: -
Channel Bayar	: -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Kaswil Bengkulu
Kementerian/Lembaga	: 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: 10 - Badan Perencanaan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 409177 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
Total Diotor	: 340.000 (IDR)
Terbilang	: Tiga Ratus Empat Puluh Ribu (IDR)
Status	: Belum Dibayar
NTB	: -
NTPN	: -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penertaman Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penertaman Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 340.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Biaya Transport Luar Kota ke Bengkulu Selatan Tahun 2022 an Yatna pada tanggal 7-8 Juni 2022 (sesuai BPK)

Kontak

1. Per  
2. Cu  
3. Bu  
4. Pa  
5. Pa  
6. Ap  
7. Si  
8. Ta  
9. Ur  
10. Ap  
As

1. PT POS INDONESIA (PERSOAL)  
Kantor BENGKULU LINDRANTER 30204

573670768

TAM TETINA  
Bekas Pajak (PNP Billing)

Tanggal c 27-10-2023 16:08:29  
No. Kwitansi : 382264-25/2023-012573    Refresi : 97135686

Tanggal Baru : 30-10-2023    NTPN : 955212023022  
Kode Cabang Pos : 03000    NTPN : A3837ALLK8177PK  
NTPN : 02902

Waktu Transaksi : 27-10-2023 16:08:29  
Kode Billing : 820231026239348

Nama Wajib Bayar: Bendahara Kaswil Bengkulu  
E / L : 013  
Unit Eselon : 10  
Kode Satker : 409177  
Jumlah Setoran : Rp. 340.000    Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Tanggal : 18/10/2023 08:00:00 a.n PT Pos Indonesia

KANTOR POS

## Status



## Ditjen Anggaran

## Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	31/10/23
Waktu Transaksi	16:01:33 WIB
Tanggal Buku	01/11/23
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	000000548620
STAN	123818
Kode Billing	820231031882795
Nama Wajib Bayar	BENDAHARA KANWIL BENGKULU
Kementerian / Lembaga	013
Unit Eselon I	10
Satuan Kerja	409177
Nominal Tagihan	190.000,00
Mata Uang	IDR
NTPN	7E69755DF0HIL11B
Fee Bank	0
Total Pembayaran	190.000,00
Terbilang	seratus sembilan puluh ribu rupiah





**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 828231026241802  
 Tanggal Billing : 26-10-2023 09:25:34  
 Tanggal Kelahiran : 03-11-2003 09:25:34  
 Tanggal Bayar : -  
 Bank/Pas/Pintech Bayar : -  
 Channel Bayar : -  
 Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Kasu Bengkulu  
 Kementerian/Lembaga : 012 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Eselon I : 20 - Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : 489177 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU  
 Total Diaster : 190.000 (IDR)  
 Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Ribu (IDR)  
 Status : Belum Dibayar  
 NTB : -  
 NTPN : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pembiayaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu  
 Kode Akun : 475812 - Pembiayaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu  
 Jumlah Setoran : 190.000 (IDR)  
 Keterangan : Pengembalian Biaya Transport Luar Kota ke Bengkulu Tengah Tahun 2022 an Tahun pada tanggal 14 Juli 2023 (Omuan BPK)

Kontak dan

1. Per  
 rec PT POS INDONESIA (PERSERO)  
 ker di Kantor KEMERIAS LINGKUPINR BUNDA  
 2. Cus  
 Jns  
 3. Bar  
 ref  
 4. Pa  
 5. Pa  
 ak  
 ma  
 6. Ap  
 An  
 7. St  
 8. Tel  
 9. Un  
 10. Ap  
 An

Tanggal : 27-10-2023 16:47:29  
 Nomor : 20236-23/2023/012567  
 Tanggal Issu : 26-10-2023  
 Kode Cabang Pos : 828000  
 Nama Transaksi : 27-10-2023 16:47:29  
 Kode Billing : 828231026241802  
 Nama Wajib Bayar: Bendahara Kasu Bengkulu  
 E / L : 012  
 Unit Eselon : 20  
 Kode Satker : 489177  
 Jumlah Setoran : Rp. 190.000  
 Mata Uang : IDR

573670764

190000  
 Setoran Pajak (Rp. Belian)

HP : 02501402314  
 NPN : 02501402314  
 STAN : 023014

Tanda Terbilang : Seratus sembilan puluh ribu rupiah

## Status



# Ditjen Anggaran

## Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	31/10/23
Waktu Transaksi	16:02:19 WIB
Tanggal Buku	01/11/23
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	000000572947
STAN	123930
Kode Billing	820231031880973
Nama Wajib Bayar	BENDAHARA KANWIL BENGKULU
Kementerian / Lembaga	013
Unit Eselon I	10
Satuan Kerja	409177
Nominal Tagihan	290.000,00
Mata Uang	IDR
NTPN	D19643CIFBCPQV8D
Fee Bank	0
Total Pembayaran	290.000,00
Terbilang	dua ratus sembilan puluh



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

**Data Pembayaran Tagihan :**

Kode Billing	: 020231026240677
Tanggal Billing	: 26-10-2023 09:21:33
Tanggal Kedaluwarsa	: 02-11-2023 09:21:33
Tanggal Bayar	: -
Bank/Pos/Instansi Bayar	: -
Channel Bayar	: -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Kaswil Bengkulu
Kementerian/Lembaga	: 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: 10 - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 409177 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
Total Ditaraf	: 300.000 (IDR)
Terdafang	: Tiga Ratus Ribu (IDR)
Status	: Belum Dibayar
NTB	: -
NTPN	: -

**Detail Pembayaran Tagihan :**

Jenis Setoran	: Pemertaman Kembali Belanja Barang Taken Anggaran Yang Laku
Kode Akun	: 425012 - Pemertaman Kembali Belanja Barang Taken Anggaran Yang Laku
Jumlah Setoran	: 300.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Biaya Transport Luar Kota ke Bengkulu Utara Tahun 2022 an Value pada tanggal 23-24 Juni 2022 (smenter BPK)

Kontak:

1. Per re in	PT PNB BUSINESS (PNEBIS)	573670766
2. Ca In	Kantor BENGKULU LINGGATJUNE BCSIA	
3. Sa rel		SAGU YEKIN Setoran Pajak (PNP Billing)
4. Pa No. Res	Tanggal : 27-10-2023 10:40:05 No. Res : 30206-21/2025-012571	Perhap : 57325006
5. Pa ak no	Tanggal Maks : 30-10-2023 Kode Cabang Pos : 02000	HP : 7521102710 KPN : ACF488ELM355 GSM : 02710
6. Ap An	Waktu Transaksi : 27-10-2023 10:40:00	
7. St	Kode Billing : 020231026240677	
8. Tai	Nama Wajib Bayar: Bendahara Kaswil Bengkulu	
9. Us	E / L : 013	
10. Ap An	Unit Eselon : 10 Kode Saklar : 409177	
Tanda	Jumlah Setoran : Rp. 300.000 Mata Uang : IDR	
Tanda	Terdafang : (Tiga ratus ribu rupiah)	

Tanggal: 30/10/2023 10:40:05 dan PT PNB Indonesia

KANTOR POS  
 02000 BENGKULU  
 02000 BENGKULU

## Status

## Ditjen Anggaran

## Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	31/10/23
Waktu Transaksi	15:49:31 WIB
Tanggal Buku	01/11/23
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	000000164147
STAN	121353
Kode Billing	820231031884246
Nama Wajib Bayar	BENDAHARA KANWIL BENGKULU
Kementerian / Lembaga	013
Unit Eselon I	10
Satuan Kerja	409177
Nominal Tagihan	345.000,00
Mata Uang	IDR
NTPN	8E90761QUR3V22EM
Fee Bank	0
Total Pembayaran	345.000,00
Terbilang	tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

**Data Pembayaran Tagihan :**

Kode Billing : 820231026241134  
 Tanggal Billing : 26-10-2023 09:23:10  
 Tanggal Kedaluwarsa : 02-11-2023 09:23:10  
 Tanggal Bayar : -  
 Bank/Pon/Protack Bayar : -  
 Channel Bayar : -  
 Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Kanwil Bengkulu  
 Kementerian/Lembaga : 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Eselon I : 10 - Badan Pendidikan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : 409177 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU  
 Total Dikotor : 300.000 (IDR)  
 Terbilang : Tiga Ratus Ribu (IDR)  
 Status : Belum Dibayar  
 NTB : -  
 NTPN : -

**Detail Pembayaran Tagihan :**

Jenis Setoran : Pemulihan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu  
 Kode Akun : 425812 - Pemulihan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu  
 Jumlah Setoran : 300.000 (IDR)  
 Keterangan : Pengembalian Biaya Transport Luar Kota ke Kab Rejang Lebong Tahun 2022 an Tahun pada tanggal 12-13 Juli 2022 (dalam BPP)

**Keterangan :**

1. **Fr** PT POS INDONESIA (PERSERO)  
**re** Kantor BENGKULU LINGKARINDAH 30226  
**ku** 573670758

2. **Ca** INWA TERUM  
**In** Setoran Pajak (PNP BILLING)

3. **Be** Tanggal : 27-10-2023 16:45:17  
**re** No. Rec : 30226-23/2023-00263 Periode : 07/2023

4. **Pa**

5. **Pa** Tanggal Rata : 20-10-2023  
**ak** Kode Cabang Pos : 02000  
**sa** NTP : 820231026241134  
 NPN : 820231026241134  
 STAN : 02000

6. **At** Maktu Transaksi : 27-10-2023 16:45:17  
**At** Kode Billing : 820231026241134

7. **Si** Nama Wajib Bayar: Bendahara Kanwil Bengkulu

8. **Ta** at K / L : 003

9. **Ur** Unit Eselon : 10

10. **Ar** Kode Sekor : 409177  
**An** arn Jumlah Setoran : Rp. 300.000 Mata Uang : IDR

Tanda Terbilang : (Tiga ratus ribu rupiah)

Tanggal NPN : 01.001-020.2-075.000 a.n PT Pos Indonesia KANTOR POS

## Status



## Ditjen Anggaran

## Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	26/09/23
Waktu Transaksi	17:21:23 WIB
Tanggal Buku	27/09/23
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	000000207650
STAN	689816
Kode Billing	820230926656690
Nama Wajib Bayar	BENDAHARA KANWIL BENGKULU
Kementerian / Lembaga	013
Unit Eselon I	10
Satuan Kerja	409177
Nominal Tagihan	190.000,00
Mata Uang	IDR
NTPN	6AEFC0N9YRIG8PSI
Fee Bank	0
Total Pembayaran	190.000,00

## Status



# Ditjen Anggaran

## Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	26/09/23
Waktu Transaksi	17:21:23 WIB
Tanggal Buku	27/09/23
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	000000207650
STAN	689816
Kode Billing	820230926656690
Nama Wajib Bayar	BENDAHARA KANWIL BENGKULU
Kementerian / Lembaga	013
Unit Eselon I	10
Satuan Kerja	409177
Nominal Tagihan	190.000,00
Mata Uang	IDR
NTPN	6AEFC0N9VRIG8PSI
Fee Bank	0
Total Pembayaran	190.000,00



## Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	27-10-2023
Waktu Transaksi	14:37:09 WIB
Tanggal Buku	27/10/23
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	000000764210
STAN	721709
Kode Billing	820231027438911
Nama Wajib Bayar	BENDAHARA KANWIL BENGKULU
Kementerian / Lembaga	013
Unit Eselon I	10
Satuan Kerja	409177
Nominal Tagihan	190000
Mata Uang	IDR
NTPN	980821JNFM7SPD9V
Fee Bank	
Total Pembayaran	190.000,00
Terbilang	seratus sembilan puluh ribu rupiah
Nomor Rekening	0087941458





## Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	27-10-2023
Waktu Transaksi	14:37:09 WIB
Tanggal Buku	27/10/23
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	000000764210
STAN	721709
Kode Billing	820231027438911
Nama Wajib Bayar	BENDAHARA KANWIL BENGKULU
Kementerian / Lembaga	013
Unit Eselon I	10
Satuan Kerja	409177
Nominal Tagihan	190000
Mata Uang	IDR
NTPN	980821JNFM7SPD9V
Fee Bank	
Total Pembayaran	190.000,00
Terbilang	seratus sembilan puluh ribu rupiah
Nomor Rekening	0087941458



## Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	26-09-2023
Waktu Transaksi	06:45:34 WIB
Tanggal Buku	26/09/23
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	000000147012
STAN	555747
Kode Billing	B20230925512225
Nama Wajib Bayar	BENDAHARA KANWIL BENGKULU
Kementerian / Lembaga	013
Unit Eselon I	10
Satuan Kerja	409177
Nominal Tagihan	190000
Mata Uang	IDR
NTPN	E356C55DF0ED6RHI
Fee Bank	0
Total Pembayaran	190.000,00
Terbilang	seratus sembilan puluh ribu rupiah
Nomor Rekening	0901054464



## Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	26-09-2023
Waktu Transaksi	06:45:34 WIB
Tanggal Buku	26/09/23
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	000000147012
STAN	555747
Kode Billing	B20230925512225
Nama Wajib Bayar	BENDAHARA KANWIL BENGKULU
Kementerian / Lembaga	013
Unit Eselon I	10
Satuan Kerja	409177
Nominal Tagihan	190000
Mata Uang	IDR
NTPN	E356C55DF0ED6RHI
Fee Bank	0
Total Pembayaran	190.000,00
Terbilang	seratus sembilan puluh ribu rupiah
Nomor Rekening	0901054464



## Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	26-09-2023
Waktu Transaksi	06:47:57 WIB
Tanggal Buku	26/09/23
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	000000181957
STAN	555808
Kode Billing	820230925512153
Nama Wajib Bayar	BENDAHARA KANWIL BENGKULU
Kementerian / Lembaga	013
Unit Eselon I	10
Satuan Kerja	409177
Nominal Tagihan	190000
Mata Uang	IDR
NTPN	DF73C3CIFB9KCREP
Fee Bank	0
Total Pembayaran	190.000,00
Terbilang	seratus sembilan puluh ribu rupiah
Nomor Rekening	0901054464



## Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	26-09-2023
Waktu Transaksi	06:47:57 WIB
Tanggal Buku	26/09/23
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	000000181957
STAN	555808
Kode Billing	820230925512153
Nama Wajib Bayar	BENDAHARA KANWIL BENGKULU
Kementerian / Lembaga	013
Unit Eselon I	10
Satuan Kerja	409177
Nominal Tagihan	190000
Mata Uang	IDR
NTPN	DF73C3CIFB9KCREP
Fee Bank	0
Total Pembayaran	190.000,00
Terbilang	seratus sembilan puluh ribu rupiah
Nomor Rekening	0901054464



## Ditjen Anggaran Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	26/09/23
Waktu Transaksi	17:08:20 WIB
Tanggal Buku	27/09/23
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	000000650225
STAN	687843
Kode Billing	820230926655084
Nama Wajib Bayar	BENDAHARA KANWIL BENGKULU
Kementerian / Lembaga	013
Unit Eselon I	10
Satuan Kerja	409177
Nominal Tagihan	190.000,00
Mata Uang	IDR
NTPN	ACS9A48VV5S1SNJC
Fee Bank	0
Total Pembayaran	190.000,00
Terbilang	seratus sembilan puluh ribu rupiah
Nomor Rekening	1101736288



## Ditjen Anggaran Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	26/09/23
Waktu Transaksi	17:08:20 WIB
Tanggal Buku	27/09/23
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	000000650225
STAN	687843
Kode Billing	820230926655084
Nama Wajib Bayar	BENDAHARA KANWIL BENGKULU
Kementerian / Lembaga	013
Unit Eselon I	10
Satuan Kerja	409177
Nominal Tagihan	190.000,00
Mata Uang	IDR
NTPN	ACS9A48VV5S1SNJC
Fee Bank	0
Total Pembayaran	190.000,00
Terbilang	seratus sembilan puluh ribu rupiah
Nomor Rekening	1101736288

## Status



# Ditjen Anggaran

## Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	26/09/23
Waktu Transaksi	17:29:44 WIB
Tanggal Buku	27/09/23
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	000000439592
STAN	690312
Kode Billing	820230926656950
Nama Wajib Bayar	BENDAHARA KANWIL BENGKULU
Kementerian / Lembaga	013
Unit Eselon I	10
Satuan Kerja	409177
Nominal Tagihan	345.000,00
Mata Uang	IDR
NTPN	10D420N9VRIG8PDM
Fee Bank	0
Total Pembayaran	345.000,00
Terbilang	tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah





## Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	26-09-2023
Waktu Transaksi	06:44:04 WIB
Tanggal Buku	26/09/23
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	000000126032
STAN	555667
Kode Billing	820230925512311
Nama Wajib Bayar	BENDAHARA KANWIL BENGKULU
Kementerian / Lembaga	013
Unit Eselon I	10
Satuan Kerja	409177
Nominal Tagihan	345000
Mata Uang	IDR
NTPN	A44251JNFM4RIRJN
Fee Bank	0
Total Pembayaran	345.000,00
Terbilang	tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah
Nomor Rekening	0901054464



### BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 620031030036310
Tanggal Billing	: 30-10-2023 10:33:38
Tanggal Kedaluwarsa	: 06-11-2023 10:33:38
Tanggal Bayar	: -
Bank/Pos/Financi Bayar	: -
Channel Bayar	: -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Kanwil Bengkulu
Kementerian/Lembaga	: RIJ - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Kerja I	: IB - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Setoran Kerja	: 409177 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
Total Dikeror	: 300.000 (IDR)
Terbilang	: Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu (IDR)
Status	: Belanja Dukung
NTB	: -
NTPN	: -

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penertaman Kontrol Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Laku
Kode Akun	: 620012 - Penertaman Kontrol Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Laku
Jumlah Setoran	: 300.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Biaya Transport Luar Kota ke Kabupaten Esau Tahun 2023 ke Muzani Saerita Koro Di Silepa pada tanggal 9-10 April 2023 (sement DPK)

#### Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, billing receipt ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengajukan SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam payment channel seperti Over The Counter (kecuali perampas), ATM, Internet Banking, EDC (semua dengan fasilitas yang dimiliki oleh handphone perampas), dan Dompet Elektronik (sement), dan Dompet Elektronik (sement).
3. Sewaktu Bukti Pembuatan Tagihan (Billing Receipt) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atas hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/terteraun bahwa Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, tolong apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Baki Setor atau struk dari Bank atau payment channel. Anda juga akan menerima Bukti Penertaman Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email Anda.
7. Simpanlah Tanda Baki Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://apps.kemendagri.go.id>
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DPK di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Dagen Anggaran di nomor 14090 Ext. 3 atau melalui email ke [apps.anggaran@kemendagri.go.id](mailto:apps.anggaran@kemendagri.go.id) (Dilang DGA).

Tanda Baki Setor/Bukti Penertaman Negara (BPN) yang di dalamnya terdapat Nomor Transaksi Penertaman Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara.



PT POS INDONESIA (PERSERO)  
Kantor Kp. RENGKULU 38000

436096119

TANDA TERIMA  
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

Tanggal : 30-10-2023 14:37:34  
No. Resi : 38000-07/2023/8/9960

Pebruas : 550045398

Tanggal Buku : 30-10-2023  
Kode Cabang Pos : 038000

NIP : 928400032742  
NTPN : 596CE/INP-84,10,12  
STAN : 032742

Waktu Transaksi : 30-10-2023 14:37:34  
Kode Billing : 820231030626210  
Kassa Wajib Bayar: Bendahara Harwi] Rengkulu  
K / L : 013  
Unit Eselon : 10  
Kode Satker : 409177  
Jumlah Setoran : Rp. 360.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)



PNP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia

KANTOR POS



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>



## Penerimaan Negara

Pembayaran/Pembelian Penerimaan Negara  
Bukan Pajak  
**BUKTI PENERIMAAN NEGARA**

Status : BERHASIL

Nomor Transaksi : FT23270K4D17

Rekening Sumber : XXXXXX6033

Tanggal dan Jam Bayar : 27/09/2023 14:45:23

Tanggal Buku : 27/09/2023

Kode Cabang Bank : 000001

NTB/NTP : FT23270K4D17

NTPN : 0D4A23CIFB9MI6NB

STAN : 813508

Kode Billing : 820230927784683

Nama Wajib Bayar : Bendahara Kanwil  
Bengkulu

Kementerian Lembaga : 013

Unit Eselon I : 10

Satuan Kerja : 409177

Jumlah Setoran : IDR 315.000

Terbilang : tiga ratus lima belas ribu Rupiah

This is computer generated message and requires no  
signature.

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak  
memerlukan tanda tangan



## Ditjen Anggaran Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi 26/09/23

Waktu Transaksi 17:10:35 WIB

Tanggal Buku 27/09/23

Institusi Penerimaan Negara

NTB 000000706677

STAN 688344

Kode Billing 820230926654834

Nama Wajib Bayar BENDAHARA KANWIL  
BENGKULU

Kementerian / Lembaga 013

Unit Eselon I 10

Satuan Kerja 409177

Nominal Tagihan 300.000,00

Mata Uang IDR

NTPN 0A10D48VV5S1SNBI

---

Fee Bank 0

Total Pembayaran 300.000,00

Terbilang tiga ratus ribu rupiah

Nomor Rekening 1101736288

[Kembali ke Menu](#)

## Status



# Ditjen Anggaran

## Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	26/09/23
Waktu Transaksi	17:33:59 WIB
Tanggal Buku	27/09/23
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	000000553503
STAN	690488
Kode Billing	820230926657231
Nama Wajib Bayar	BENDAHARA KANWIL BENGKULU
Kementerian / Lembaga	013
Unit Eselon I	10
Satuan Kerja	409177
Nominal Tagihan	300.000,00
Mata Uang	IDR
NTPN	D5D501JNFM45LPMF
Fee Bank	0
Total Pembayaran	300.000,00
Terbilang	tiga ratus ribu rupiah



# Pembayaran Berhasil!

27 Sep 2023 - 14:57:00 WIB



[Lihat Resi](#)

Penyedia Jasa

**Pajak/PNBP/Cukai**

820230927773087

NTPN

**4AA496U8ELJ85RCV**

Total Transaksi

Rp 290.000



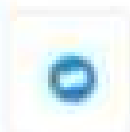
## Detail Transaksi



**Rp250.000**

Pembayaran Berhasil

27 Sep 2023 - 16:55



**Penerimaan Negara Bukan Pajak -  
Bendahara Kanwil Bengkulu**

PENERMAAN NEGARA

Order Berhasil

Nomor Invoice

078876U8ELJ85003

Bukti Penerimaan Negara

Invoice ini adalah bukti pembayaran sah yang diterbitkan atas nama:

Bukti Penerimaan Negara - Penerimaan Negara Bukan Pajak

Tanggal dan Jam

27/09/2023 16:55:09

Bayar

Tanggal Buku

29/09/2023

Kode Cabang  
Bank

000000

NTL

273133187868

NTPN

078876U8ELJ85003

STAN

110119

Kode Billing

820230927770019

Nama Wajib Bayar

Bendahara Kanwil Bengkulu

Kementrian/Lembaga

013

Unit Eselon I

10

Satuan Kerja

409177

Jumlah Setoran

Rp250.000



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 82023102629886  
 Tanggal Billing : 26-10-2023 09:18:38  
 Tanggal Ketaahwara : 02-11-2023 09:18:38  
 Tanggal Bayar : -  
 Bank/Pos/Pintech Bayar : -  
 Channel Bayar : -  
 Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Kanwil Bengkulu  
 Kementerian/Lembaga : 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Eselon I : 10 - Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : 409177 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU  
 Total Diatur : 380.000 (IDR)  
 Tertilang : Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu (IDR)  
 Status : Belum Dibayar  
 NTB : -  
 NTPN : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penarikan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu  
 Kode Akun : 425012 - Penarikan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu  
 Jumlah Setoran : 380.000 (IDR)  
 Keterangan : Pengembalian Biaya Transport Luar Kota ke Kantor Tahun 2022 on Yatra pada tanggal 9-10 Juni 2022 (seman BPK)

Konten:

1. No. Faktur : PT PIS INDONESIA (PERKERO)  
 Kantor BENDAHARA KANWIL BENGKULU  
 573670761

2. Car. Jns : TWA TRWA  
 Setoran Pajak (PNP Billing)

3. No. ref : Tanggal : 27-10-2023 MoMo04  
 No.Revi : 30266-05/2023/01256 Perihal : 97130006

4. No. :  
 5. No. ala sad : Tanggal Rata : 30-10-2023 NP : 92517002304  
 Kode Cahani Pos : 03800 ATN : 0703X0F0E0E0E  
 SWW : 02304

6. No. An : No. Faktur Transaksi : 27-10-2023 MoMo04  
 Kode Billing : 82023102629886

7. No. Sta : Nama Wajib Setor: Bendahara Kanwil Bengkulu

8. No. Tar : X / L : 013

9. No. Un : Unit Eselon : 10

10. No. Ap : Kode Satker : 409177  
 Jumlah Setoran : Rp. 380.000 Nota Uang : IDR

Tanda Tertilang : (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Tanggal :  
 NPWP : 01.001.620.2-003.000 dan PT PIS Indonesia KANTOR POS

## Status

## Ditjen Anggaran

## Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	31/10/23
Waktu Transaksi	15:48:13 WIB
Tanggal Buku	01/11/23
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	000000124478
STAN	121023
Kode Billing	820231031881903
Nama Wajib Bayar	BENDAHARA KANWIL BENGKULU
Kementerian / Lembaga	013
Unit Eselon I	10
Satuan Kerja	409177
Nominal Tagihan	260.000,00
Mata Uang	IDR
NTPN	CB23B3CIFBCPR05F
Fee Bank	0
Total Pembayaran	260.000,00
Terbilang	dua ratus enam puluh ribu rupiah



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Detail Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 800231006238351  
 Tanggal Billing : 28-10-2023 09:13:23  
 Tanggal Kedatangan : 02-11-2023 09:13:23  
 Tanggal Bayar : -  
 Bank/Pos/Instansi Bayar : -  
 Channel Bayar : -  
 Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Badanahara Karwil Bengkulu  
 Kementerian/Lembaga : 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Eselon I : 10 - Badan Penanaman Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : 409177 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU  
 Total Disetor : 300.000 (IDR)  
 Tertibtag : Tipe Rata-rata Riba (IDR)  
 Status : Belum Dibayar  
 NTB : -  
 NTPN : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu  
 Kode Akun : 425012 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu  
 Jumlah Setoran : 300.000 (IDR)  
 Keterangan : Pengembalian Biaya Transport Luar Kota ke Kota Bengkulu Tahun 2022 an  
 Pinal Tutul pada tanggal 23-24 Juni 2022 (namun BPK)

Keterangan

1. Per  
rec  
ker  
2. Car  
Info  
3. Bas  
ref  
4. Pas  
5. Pas  
aka  
sud  
6. Apr  
Anc  
7. Siz  
8. Tat  
ara  
9. Un  
10. Apr  
Anc  
Tanda

PT POS INDONESIA (PERSERO)  
Kantor BANGKULU LINDAW/BUP 38226A  
573670757  
TANDA TERIMA  
Setoran Pajak (PNP Billing)  
Tanggal : 27-10-2023 16:45:41  
No. Pinal : 38226A-23/2023/021262  
Pinaltag : 97135586  
Tanggal Riba : 30-10-2023  
Kode Cabang Pos : 03000  
NTP : 92560003005  
NPN : 800231006238351  
SNAN : 1 023802  
Maktu Transaksi : 27-10-2023 16:45:40  
Kode Billing : 800231006238351  
Nama Wajib Bayar : Badanahara Karwil Bengkulu  
E / L : 013  
Unit Eselon : 10  
Kode Satker : 409177  
Jumlah Setoran : Rp. 300.000  
Rata Rata : IDR  
Tertibtag : (Tipe rata-rata riba rupiah)

NTPN : 01.001.623.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia KANTOR POS



Tanggal



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820231026238966  
 Tanggal Billing : 26-10-2023 09:15:01  
 Tanggal Kedaluwarsa : 02-11-2023 09:15:01  
 Tanggal Bayar : -  
 Bank/Pos/Pintech Bayar : -  
 Channel Bayar : -  
 Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Kaswil Bengkulu  
 Kementerian/Lembaga : 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Eselon I : 10 - Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : 409177 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU  
 Total Disetor : 300.000 (IDR)  
 Terbilang : Tiga Ratus Ribu (IDR)  
 Status : Belum Dibayar  
 NTB : -  
 NTPN : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pemenuhan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu  
 Kode Akun : 425012 - Pemenuhan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu  
 Jumlah Setoran : 300.000 (IDR)  
 Keterangan : Pengembalian Biaya Transport Luar Kota ke Kota Bengkulu Tahun 2022 an  
 Dulain pada tanggal 22-24 Juni 2022 (nomor BPK)

Kontak : PT POS INDONESIA (PUBERS) Kantor BENGKULU LINGKUPAN JEMMA 573670756

1. Pr  
 2. Ci  
 3. Br  
 4. Pa  
 5. Pa  
 6. Ap  
 7. Sit  
 8. Tar  
 9. In  
 10. Ap  
 An

1. PT POS INDONESIA (PUBERS)  
 Kantor BENGKULU LINGKUPAN JEMMA

2. CI  
 INDA BENDU  
 Setoran Pajak (PNP Billinal)

3. BR  
 Tanggal : 27-10-2023 16:45:08  
 No. Fakt : 38236-01-2023/402562 Periode : 5/12023M

4. PA  
 Tanggal Baru : 30-10-2023  
 Kode Cabang Pos : 02000  
 HP : 8015402370  
 RTN : 1271760100PLCI  
 EWM : 02000

5. PA  
 Tanggal Baru : 30-10-2023  
 Kode Cabang Pos : 02000

6. AP  
 An  
 Mula Transfer : 27-10-2023 16:45:08  
 Kode Billing : 820231026238966

7. SIT  
 Nama Wajib Bayar : Bendahara Kaswil Bengkulu

8. TAR  
 m. E / L : 013

9. IN  
 Unit Eselon : 10

10. AP  
 An  
 Kode Setor : 409177  
 Jumlah Setoran : Rp. 300.000 Mata Uang : IDR

Tanda Terbilang : (Tiga ratus ribu rupiah)

Tanggal : 3

INFP : 01.001.025.2-075.000 a.n PT Pos Indonesia KANTOR POS

## Status



## Ditjen Anggaran

## Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	31/10/23
Waktu Transaksi	15:50:36 WIB
Tanggal Buku	01/11/23
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	000000195576
STAN	121552
Kode Billing	820231031883729
Nama Wajib Bayar	BENDAHARA KANWIL BENGKULU
Kementerian / Lembaga	013
Unit Eselon I	10
Satuan Kerja	409177
Nominal Tagihan	315.000,00
Mata Uang	IDR
NTPN	C93128N3EAR491UH
Fee Bank	0
Total Pembayaran	315.000,00
Terbilang	tiga ratus lima belas ribu rupiah

## Status

# Ditjen Anggaran

## Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	31/10/23
Waktu Transaksi	15:58:09 WIB
Tanggal Buku	01/11/23
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	000000432519
STAN	123062
Kode Billing	820231031883483
Nama Wajib Bayar	BENDAHARA KANWIL BENGKULU
Kementerian / Lembaga	013
Unit Eselon I	10
Satuan Kerja	409177
Nominal Tagihan	290.000,00
Mata Uang	IDR
NTPN	F458B3CIFBCPR1MR
Fee Bank	0
Total Pembayaran	290.000,00
Terbilang	dua ratus sembilan puluh ribu rupiah

## Status

## Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	31/10/23
Waktu Transaksi	15:45:36 WIB
Tanggal Buku	01/11/23
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	000000029357
STAN	120172
Kode Billing	820231031882091
Nama Wajib Bayar	BENDAHARA KANWIL BENGKULU
Kementerian / Lembaga	013
Unit Eselon I	10
Satuan Kerja	409177
Nominal Tagihan	250.000,00
Mata Uang	IDR
NTPN	FF92C1JNFM8110BB
Fee Bank	0
Total Pembayaran	250.000,00
Terbilang	dua ratus lima puluh ribu rupiah
Nomor Rekening	0798476366



## Penerimaan Negara

Pembayaran/Pembelian Penerimaan Negara  
Bukan Pajak  
**BUKTI PENERIMAAN NEGARA**

Status : BERHASIL  
Nomor Transaksi : FT23268RS2JS

Rekening Sumber : XXXXXX5030

Tanggal dan Jam Bayar : 25/09/2023 21:46:23  
Tanggal Buku : 26/09/2023  
Kode Cabang Bank : 000001  
NTB/NTP : FT23268RS2JS  
NTPN : 25A3255DF0EC300R  
STAN : 804196

Kode Billing : 820230924361755  
Nama Wajib Bayar : Bendahara Kanwil Bengkulu  
Kementerian Lembaga : 013  
Unit Eselon I : 10  
Satuan Kerja : 409177  
Jumlah Setoran : IDR 310.000  
Terbilang : tiga ratus sepuluh ribu Rupiah

This is computer generated message and requires no  
signature.

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan  
tanda tangan

## Penerimaan Negara

Pembayaran/Pembelian Penerimaan Negara  
Bukan Pajak  
**BUKTI PENERIMAAN NEGARA**

Status : BERHASIL  
Nomor Transaksi : FT23268DVV9H

Rekening Sumber : XXXXXX5030

Tanggal dan Jam Bayar : 25/09/2023 21:48:12  
Tanggal Buku : 26/09/2023  
Kode Cabang Bank : 000001  
NTB/NTP : FT23268DVV9H  
NTPN : 798C56U8ELJ4TO2M  
STAN : 804197

Kode Billing : 820230924361814  
Nama Wajib Bayar : Bendahara Kanwil Bengkulu  
Kementerian Lembaga : 013  
Unit Eselon I : 10  
Satuan Kerja : 409177  
Jumlah Setoran : IDR 190.000  
Terbilang : seratus sembilan puluh ribu Rupiah

This is computer generated message and requires no  
signature.

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan  
tanda tangan



## Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	16-08-2023
Waktu Transaksi	15:32:06 WIB
Tanggal Buku	18/08/23
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	000000219566
STAN	765792
Kode Billing	820230815898343
Nama Wajib Bayar	BENDAHARA KANWIL BENGKULU
Kementerian / Lembaga	013
Unit Eselon I	10
Satuan Kerja	409177
Nominal Tagihan	300000
Mata Uang	IDR
NTPN	E57623CIFB6BRMN7
Fee Bank	0
Total Pembayaran	300.000,00
Terbilang	tiga ratus ribu rupiah
Nomor Rekening	0901054248



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

**Data Pembayaran Tagihan :**

Kode Billing : R20231006818924  
 Tanggal Billing : 06-10-2023 09:27:54  
 Tanggal Keterbacaan : 13-10-2023 09:27:54  
 Tanggal Bayar : -  
 Bank/Pos/Postech Bayar : -  
 Channel Bayar : -  
 Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Kamwil Bengkulu  
 Kementerian/Lembaga : 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Eselon I : 10 - Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : 409177 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU  
 Total Duitar : 290.000 (IDR)  
 Tertimbang : Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu (IDR)  
 Status : Status Dibayar  
 NTB : -  
 NTPN : -

**Detail Pembayaran Tagihan :**

Jenis Setoran : Pemertamaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu  
 Kode Akun : 425613 - Pemertamaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu  
 Jumlah Setoran : 290.000 (IDR)  
 Keterangan : Pengembalian Transport Luar Kota Tahun 2022 ke Bengkulu Utara ex. Oliver Stopping 1q1.2 sd 3 Feb 2022 (Terima BPK)

BANK RAKYAT INDONESIA	<b>BUKTI PENERIMAAN NEGARA</b>	KEMENTERIAN KEJANGGAN
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	

**Data Pembayaran**

Tanggal Jam Bayar : 06/10/2023 10:12:14 NTB : 231006818924  
 Tanggal Buku : 06/10/2023 NTPN : F20D948VVSUE82K5  
 Kode Cab. Bank : 5018 STAN : 211760

**Data Setoran**

Kode Billing : R20231006818924  
 Nama Wajib Bayar : Bendahara Kamwil Bengkulu  
 Kementerian/Lembaga : 013  
 Unit Eselon I : 10  
 Satuan Kerja : 409177  
 Jumlah Setoran : Rp. 290.000,00 Mata Uang : IDR  
 Tertimbang : DUA RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH

This is a computer generated message and requires no signature  
 Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Validasi Bank

## Penerimaan Negara

Pembayaran/Pembelian Penerimaan Negara  
Bukan Pajak

**BUKTI PENERIMAAN NEGARA**

Status : BERHASIL

Nomor Transaksi : FT2328477955

Rekening Sumber : XXXXXX3863

Tanggal dan Jam Bayar : 11/10/2023 09:24:13

Tanggal Buku : 11/10/2023

Kode Cabang Bank : 000001

NTB/NTP : FT2328477955

NTPN : 4C6E048VV5UIMBAS

STAN : 869938

Kode Billing : 820231011380572

Nama Wajib Bayar : Bendahara Kanwil Bengkulu

Kementerian Lembaga : 013

Unit Eselon I : 10

Satuan Kerja : 409177

Jumlah Setoran : IDR 380.000

Terbilang : tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah

This is computer generated message and requires no  
signature.

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak  
memerlukan tanda tangan

## Penerimaan Negara

Pembayaran/Pembelian Penerimaan Negara  
Bukan Pajak  
**BUKTI PENERIMAAN NEGARA**

Status : BERHASIL

Nomor Transaksi : FT23233WK64C

Rekening Sumber : XXXXXX0120

Tanggal dan Jam Bayar : 21/08/2023 14:42:13

Tanggal Buku : 21/08/2023

Kode Cabang Bank : 000001

NTB/NTP : FT23233WK64C

NTPN : 1C51A8N3EAKRIGON

STAN : 659885

Kode Billing : 820230821430039

Nama Wajib Bayar : Bendahara Kanwil  
Bengkulu

Kementerian Lembaga : 013

Unit Eselon I : 10

Satuan Kerja : 409177

Jumlah Setoran : IDR 300.000

Terbilang : tiga ratus ribu Rupiah

This is computer generated message and requires no  
signature.

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak  
memerlukan tanda tangan

## Penerimaan Negara

Pembayaran/Pembelian Penerimaan Negara  
Bukan Pajak  
BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Status : BERHASIL  
Nomor Transaksi : FT23234B2RLJ

Rekening Sumber : XXXXXX2867

Tanggal dan Jam Bayar : 22/08/2023 09:00:24  
Tanggal Buku : 22/08/2023  
Kode Cabang Bank : 000001  
NTB/NTP : FT23234B2RLJ  
NTPN : 0E09C0N9VRFCUF6U  
STAN : 661948

Kode Billing : 820230822509790  
Nama Wajib Bayar : Bendahara Kanwil  
Bengkulu  
Kementerian Lembaga : 013  
Unit Eselon I : 10  
Satuan Kerja : 409177  
Jumlah Setoran : IDR 300.000  
Terbilang : tiga ratus ribu Rupiah

This is computer generated message and requires no  
signature.

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak  
memerlukan tanda tangan

## Penerimaan Negara

Pembayaran/Pembelian Penerimaan Negara  
Bukan Pajak

**BUKTI PENERIMAAN NEGARA**

Status : BERHASIL

Nomor Transaksi : FT23284JRH3Z

Rekening Sumber : XXXXXX3863

Tanggal dan Jam Bayar : 11/10/2023 09:25:41

Tanggal Buku : 11/10/2023

Kode Cabang Bank : 000001

NTB/NTP : FT23284JRH3Z

NTPN : 8F9707QLUG84AANF

STAN : 869952

Kode Billing : 820231011379951

Nama Wajib Bayar : Bendahara Kanwil Bengkulu

Kementerian Lembaga : 013

Unit Eselon I : 10

Satuan Kerja : 409177

Jumlah Setoran : IDR 340.000

Terbilang : tiga ratus empat puluh ribu Rupiah

This is computer generated message and requires no  
signature.

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak  
memerlukan tanda tangan





## Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	14-08-2023
Waktu Transaksi	15:33:00 WIB
Tanggal Buku	15/08/23
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	000000494052
STAN	308341
Kode Billing	820230814743267
Nama Wajib Bayar	BENDAHARA KANWIL BENGKULU
Kementerian / Lembaga	013
Unit Eselon I	10
Satuan Kerja	409177
Nominal Tagihan	300000
Mata Uang	IDR
NTPN	440266UBELFSCEN3
Fee Bank	
Total Pembayaran	300.000,00
Terbilang	tiga ratus ribu rupiah
Nomor Rekening	070036154



## Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	14-08-2023
Waktu Transaksi	10:14:17 WIB
Tanggal Buku	14/08/23
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	000000663941
STAN	186702
Kode Billing	820230814651033
Nama Wajib Bayar	BENDAHARA KANWIL BENGKULU
Kementerian / Lembaga	013
Unit Eselon I	10
Satuan Kerja	409177
Nominal Tagihan	300000
Mata Uang	IDR
NTPN	208013C1FB6ALKKP
Fee Bank	0
Total Pembayaran	300.000,00
Terbilang	tiga ratus ribu rupiah
Nomor Rekening	0901054725





## BUKTI PENERIMAAN NEGARA

### Detail Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 82020905142338
Tanggal Billing	: 05-09-2023 08:35:34
Tanggal Kedaluwarsa	: 12-09-2023 08:35:34
Tanggal Bayar	: 05-09-2023 16:38:32
Bank/Pos/Instansi Bayar	: POS INDONESIA
Channel Bayar	: Teller
Nama Wajib Bayar/Wajib Bayar	: BPMN
Rekening/Lembaga	: 813 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKE ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: 10 - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Setoran Kerja	: 66659 - KAWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA
Total Denda	: 150.000 (IDR)
Terbilang	: Seratus Lima Puluh Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NIB	: 830321354736
NTPN	: 2640070LUG4V9Q2

### Detail Pembebasan Tagihan :

Jenis Setoran	: Pembebasan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425512 - Pembebasan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 150.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Belanja atau Transport Lokal Serti Mediana Pospattin BPM LS 79 TA 2022



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Gedung Sate Nomor 31 Jakarta Pusat 10110 Telp. (021) 2544000 Fax. (021) 2544024

Samarinda, 1 September 2023

Nomor : 23/S/PTT-Kesw/09/2023  
Lampiran : Satu berkas  
Perihal : Penyusunan Konsep Terms of Reference

Kepada Yth,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
Kalimantan Timur  
di Samarinda

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Konsep Terms of Reference pada Komisi Kemandirian Kalimantan Timur atau Pemeriksaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja Barang, dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Komisi Kemandirian Kalimantan Timur sesuai dengan Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/ST/18/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 untuk memperoleh tanggapan tertulis dari pimpinan satuan kerja terkait. Adapun Konsep Terms of Reference dapat dilihat pada lampiran.

Kami harapkan tanggapan atau konsep terms of reference pemeriksaan tersebut dapat kami terima pada hari Rabu, 6 September 2023.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim,

Herdiyanto

Tembusan Yth:

- Pengendali Teknis

**Lampiran Konsep Timuan Pemeriksaan  
pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur**

**A. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu**

1. Perhitungan dan Penetapan Tarif Sewa Rumah Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur Tidak Sesuai Ketentuan;
2. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur Belum Sebahaya Diatur Ke Kas Negara;
3. Kelebihan Pembayaran Atas Pekerjaan Pengadaan Sewa Kamaran Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 Jan 2023 Sebesar Rp9.386.147,00;
4. Kelebihan Pembayaran atas Kegiatan Pengadaan Peraliharaan Gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 Sebesar Rp2.777.064,00;
5. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp2.550.000,00;
6. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur Tidak sesuai Ketentuan Sebesar Rp1.001.000,00.

**B. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Samarinda**

1. Proses Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Samarinda Tidak Sesuai Ketentuan;
2. Kelebihan Pembayaran Belanja Peralatan atau Kegiatan Pelatihan Ketertarikan Pembuatan Tumpu; Tahun Anggaran 2023 pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Samarinda Sebesar Rp3.953.000,00;
3. Kelebihan Pembayaran Pengadaan Alat Makan dan Minum Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Samarinda Tahun Anggaran 2023 Sebesar Rp9.311.000,00.

**C. Rumah Tahanan Kelas II Samarinda**

1. Proses Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Rumah Tahanan Kelas II Samarinda Tidak Sesuai Ketentuan;
2. Terdapat Kelebihan Pembayaran atau Realisasi Belanja Barang pada Rumah Tahanan Negara Kelas II Samarinda Sebesar Rp77.650.000,00;
3. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Peraliharaan Gedung dan Bangunan Pada Rumah Tahanan Negara Kelas II Samarinda Tahun Anggaran 2023;
4. Terdapat Kelebihan Pembayaran atau Biaya Transport Kegiatan Dalam Kota pada Rumah Tahanan Negara Kelas II Samarinda Sebesar Rp1.650.000,00;

**D. Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda**

1. Bukti Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Barang pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya;

#### **E. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda**

1. Denda Keterlambatan atas Pekerjaan Pengalihan Kendaran Bermotor Roda Dua Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Samarinda Tahun 2022 Kurang Dikerja Sebesar Rp7.661.915,00;
2. Kelebihan Pembayaran Kegiatan Pengalihan Persewaan Gedung Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Samarinda Sebesar Rp2.340.778,00;
3. Bukti Pertanggungjawaban Realisasi Biaya Penginapan Luar Kota Dalam Provinsi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya;
4. Bukti Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Sewa pada Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya;

#### **F. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong**

1. Perhitungan dan Penetapan Tarif Sewa Rumah Negara pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong Tidak Sesuai Ketentuan;
2. Proses Persewaan Barang Milik Negara Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong Tidak Sesuai Ketentuan;
3. Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya;
4. Kelebihan Pembayaran atas Pengalihan Renovasi Jaringan Listrik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong Tahun Anggaran 2023 Sebesar Rp1.386.600,00

#### **G. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan**

1. Perhitungan dan Penetapan Tarif Sewa Rumah Negara pada Komplek Perumahan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan Tidak Sesuai Ketentuan;
2. Kelebihan Pembayaran Belanja Bahan atas Tiga Kegiatan Pelatihan Kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan Tahun Anggaran 2023 Sebesar Rp3.140.000,00;
3. Kelebihan Pembayaran atas Pengalihan Persewaan Perlengkapan Mandi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan Tahun Anggaran 2022 Sebesar Rp11.657.250,00;
4. Realisasi Pembayaran Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan Tidak Sesuai Ketentuan;
5. Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan Sebesar Rp125.845.350,00;
6. Kelebihan Pembayaran Biaya Personil Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Perencanaan Pembangunan Blok Hunian dan Gedung Permisori Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan Tahun Anggaran 2023 Sebesar Rp77.100.000,00.

#### **H. Rumah Tahanan Kelas IIB Balikpapan**

1. Proses Persewaan Barang Milik Negara Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan Tidak Sesuai Ketentuan;
2. Kelebihan Pembayaran atas Persewaan Perlengkapan Mandi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan Tahun Anggaran 2023 Sebesar Rp1.268.807,00;

3. Realisasi Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Rumah Tahana Negara Kelas III Balikpapan Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp4.200.000,00.
4. Realisasi Pembayaran Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Kota pada Rumah Tahana Negara Kelas III Balikpapan Tidak Sesuai Ketentuan.

**I. Rumah Detensi Imigrasi Kelas II Balikpapan**

1. Kelebihan Pembayaran atas Realisasi Hromeritum Nersumber pada Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan sebesar Rp2.180.000,00.
2. Bukti Pertanggungjawaban Realisasi Pembayaran Biaya Penginapan Luar Kota pada Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan Tidak Sesuai Kondisi Sebetulnya.

**J. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan**

1. Perhitungan dan Penetapan Tarif Sewa Rumah Negara pada Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Balikpapan Tidak Sesuai Ketentuan.
2. Bukti Pertanggungjawaban Belanja Bureng pada Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Balikpapan Tidak Sesuai Ketentuan.
3. Kelebihan Pembayaran atas Realisasi Pengadaan Sewa Kebutuhan Operasional Perbaikan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Balikpapan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.501.000,00.
4. Kelebihan Pembayaran atas Renovasi Bangunan Gedung Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Balikpapan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.358.710,00.
5. Realisasi Pembayaran Biaya Transport Kegiatan Dalam Kota pada Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Balikpapan Tidak Sesuai Ketentuan.
6. Bukti Pertanggungjawaban Kegiatan Pindahan Pemeriksaan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan Tidak Sesuai Kondisi Sebetulnya.
7. Bukti Pertanggungjawaban Realisasi Pembayaran Biaya Penginapan Luar Kota pada Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Balikpapan Tidak Sesuai Kondisi Sebetulnya.



**Formulir Tanggapan Satuan Kerja**

KIP SURAT SATUAN KERJA

**I. Judul Temuan**

Tanggapan: Kami sependapat dan menyetujui hasil pemeriksaan BPK RI / Kami tidak sependapat  
(Pilih salah satu)

Penjelasan:

---

**Kepala Satuan Kerja**

TTD + Stempel

Nama

NIP.....

**Keterangan:**

Tanggapan dibuat untuk setiap temuan pemeriksaan. 1 tanggapan pemeriksaan yang telah ditandatangani untuk 1 temuan pemeriksaan.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR  
Jalan Letjend M.T. Haryono No. 10 Samarinda 75124  
TELP: (0541) 741539, FAX: (0541) 736517

Laman : kemenkumham.kaltim.go.id Email : karewil.kaltim@kemenkumham.go.id

**A.6 Judul Temuan :**

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Ganda pada Karwal Kemenkumham Kaltim tidak sesuai ketentuan

**Tanggapan :** Kami Sependapat dan menerima hasil pemeriksaan BPK RI

**Penjelasan :**

1. Rusa Pengguna Anggaran akan melakukan optimalisasi dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur.
2. Pejabat Pembuat Komitmen akan lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas bukti-bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas agar tidak terjadi pembayaran ganda yang tidak sesuai ketentuan.
3. Pejabat atau pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur bersedia mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas ganda yang tidak sesuai ketentuan dengan pengeluaran sebesar Rp. 1.881.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan nomor NTPN: 9058C395A5G4KPRB; 2040070LUG4V0QJ2 dan F5A006UBELGCFORS melalui Kantor POS cabang Samarinda



Kepala Kantor Wilayah

NIK 296410241985031002

## Status



## Ditjen Anggaran

### Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi 07/12/23

Waktu Transaksi 13:40:49 WIB

Tanggal Buku 07/12/23

Institusi Penerimaan Negara

NTB 000000289902

STAN 815437

Kode Billing 702312070192495

Nama Wajib Bayar KANWIL

Kementerian / Lembaga 013

Unit Eselon I 10

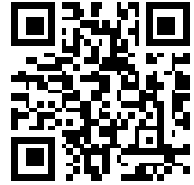
Satuan Kerja 409207

Nominal Tagihan 660.000,00

Mata Uang IDR

NTPN 1A0B152273ULF7BF





### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240327603945  
Tanggal Billing : 27-03-2024 08:15:32  
Tanggal Kedaluwarsa : 03-04-2024 08:15:32  
Tanggal Bayar : 28-03-2024 14:44:48  
Bank/Pos/*Fintech* Bayar : BANK MANDIRI  
*Channel* Bayar : *Mobile Banking*  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara BPHN  
Kementerian/Lembaga : **013** - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Eselon I : **10** - Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Satuan Kerja : **409288** - BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Total Disetor : 12.068.375 (IDR)  
Terbilang : *Dua Belas Juta Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima (IDR)*  
Status : Sudah Dibayar  
**NTB** : **252600874623**  
**NTPN** : **9D5EA55DF96JNTN9**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu  
Kode Akun : 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu  
Jumlah Setoran : 12.068.375 (IDR)  
Keterangan : Pengembalian kelebihan/selisih pembayaran iuran BPJS Kesehatan terkait pengadaan outsourcing Tahun 2023




### Selisih Nilai Pembayaran Biaya Tenaga Kerja/Upah dengan Nilai SP

Uraian Pembayaran	Satuan	Nilai	Jumlah	Total
Biaya Tenaga Kerja/Upah dalam SP				619.735.138,00
PPN 11%			9.863.700,00	
Manajemen fee			89.669.998,00	
Gaji/Upah per bulan			480.600.000,00	
Pakaian Kerja:				
- Seragam	2,00		-	
- Sepatu	1,00		-	
BPJS Perusahaan			27.533.065,00	607.666.763,00
Seilsih Lebih				<b>12.068.375,00</b>

	Detail Real Payroll		Bukti Transfer Gaji	Bukti Bayar BPJS	
	Rincian Gaji	Potongan BPJS	Potongan PPH21	BPJS KES	BPJS TK
Nov					
Des					
	-	-	-	-	-

<b>Total Bayar BPJS</b>	41.627.065,00
<b>Dari Personil</b>	14.094.000,00
<b>Dari Perusahaan</b>	27.533.065,00

 <b>BPK RI</b>	<b>BAHAN DISKUSI PEMERIKSAAN TERINCI ATAS LKKL KEMENKUMHAM TA 2023</b>	<b>Halaman</b>	:	<b>1</b>
		<b>Satker</b>	:	<b>BPHN</b>
		<b>Direviu Oleh</b>	:	

**Terdapat Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lantai 2 Gedung Annex, Ruang Kerja Pimpinan Gedung SDJI dan Ruang Kerja Pimpinan Gedung Induk Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional.**

**Kondisi**

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada Tahun Anggaran (TA) 2023 telah menganggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2023 untuk kegiatan belanja modal penambahan nilai gedung dan bangunan renovasi gedung dan bangunan seluas 1800 m<sup>2</sup> sebesar Rp3.348.248.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.744.897.000,00 atau 81,98% dari alokasi anggarannya.


Pekerjaan Konstruksi berupa renovasi lantai 2 gedung annex, ruang kerja pimpinan SDJI, dan ruang kerja pimpinan gedung induk di TA 2023 dilaksanakan oleh PT. Aisha Bangun Raya (PT. ABR) berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor PHN.1-PB.02.01-1093 tanggal 18 September 2023 senilai Rp2.744.897.000,00 (termasuk PPN). Pelaksanaan pekerjaan renovasi Rumah Negara di Jalan Swadharma tersebut telah dinyatakan selesai sesuai dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor PHN.1.PB.02.01-1348 1 Desember 2023. Adapun jangka waktu pelaksanaan kontrak pemeliharaan gedung adalah 75 hari kalender dan telah dibayar lunas sesuai SP2D terakhir nomor 231391303054394 tanggal 12 Desember 2024.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen Surat Perjanjian Kontrak berikut laporan pelaksanaannya, Dokumen pembayaran, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), BAST, dan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama dengan pihak penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjukkan bahwa masih terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp47.080.353,29 (rincian perhitungan pada *Lampiran*).

**Kriteria**

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 54 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas Pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya”;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
  - 1) Pasal 4 huruf a. yang menyatakan bahwa ”Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.”;
  - 2) Pasal 6 yang menyatakan bahwa ”Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel”;

 <p><b>BPK RI</b></p>	<b>BAHAN DISKUSI PEMERIKSAAN TERINCI ATAS LKKL KEMENKUMHAM TA 2023</b>	<b>Halaman</b>	:	<b>2</b>
		<b>Satker</b>	:	<b>BPHN</b>
		<b>Direviu Oleh</b>	:	

- 3) Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
- a) huruf a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b) huruf f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara"; dan
  - c. Kontrak masing-masing pekerjaan, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), dan dokumen lain yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak.

#### **Akibat**

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp47.080.353, 29.

#### **Sebab**

Kondisi tersebut disebabkan oleh:

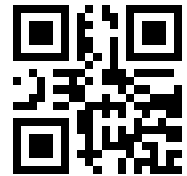
- a. Kuasa Pengguna Anggaran pada BPHN kurang optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan;
- b. PPK BPHN tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan; dan
- c. PT. ABR tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan dan disepakati dalam dokumen kontrak.

#### **Tanggapan Instansi**

*(Terlampir)*







### **BUKTI PENERIMAAN NEGARA**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240502303698  
Tanggal Billing : 02-05-2024 15:41:14  
Tanggal Kedaluwarsa : 09-05-2024 15:41:14  
Tanggal Bayar : 03-05-2024 11:07:40  
Bank/Pos/*Fintech* Bayar : PT. TOKOPEDIA  
*Channel* Bayar : *Virtual Account*  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara BPHN  
Kementerian/Lembaga : **013** - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Eselon I : **10** - Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Satuan Kerja : **409288** - BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Total Disetor : 47.080.355 (IDR)  
Terbilang : *Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima (IDR)*  
Status : Sudah Dibayar  
**NTB** : **001693503525**  
**NTPN** : **2A2DE6U8EUGJ5AUI**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu  
Kode Akun : 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu  
Jumlah Setoran : 47.080.355 (IDR)  
Keterangan : Pengembalian kelebihan bayar pekerjaan konstruksi renovasi lt.2 Gd annex, ruang kerja pimpinan Gd.SJDI dan ruang kerja pimpinan Gd. induk kantor BPHN



# Selamat, Transaksi Penerimaan Negara Online Anda BERHASIL

1 pesan

Tokopedia <noreply@tokopedia.com>  
Kepada: slowlyaditya@gmail.com

Jum, 3 Mei 2024 pukul 11.07

tokopedia

Penerimaan Negara

## Bukti Penerimaan Negara - Penerimaan Negara Bukan Pajak

Tanggal dan Jam Bayar	03/05/2024 11:07:40
Tanggal Buku	03/05/2024
Kode Cabang bank	020601
NTL	001693503525
NTPN	2A2DE6U8EUGJ5AUI
STAN	009272
Kode Billing	820240502303698
Nama Wajib Bayar	Bendahara BPHN
K/L	013
Unit Eselon I	10
Satuan Kerja	409288
Jumlah	Rp47.080.355
Mata Uang	IDR
Terbilang	EMPAT PULUH TUJUH JUTA DELAPAN PULUH RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH LIMA RUPIAH
Nomor Invoice	IVR/20240503/XXIV/V/2054055895

This is a computer generated message and requires no signature. Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Bayar berbagai macam tagihan jadi mudah.  
Manfaatkan fitur Langganan!



Pulsa



Paket Data



Listrik PLN



BPJS